



SALINAN

WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAKASSAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Makassar Tahun 2025-2045;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 41 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

5. Undang-Undang . . .

5. Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7071);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 340);
8. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar Tahun 2015-2034 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2015, Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAKASSAR

Dan

WALI KOTA MAKASSAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang di maksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Makassar.

3. Wakil . . .

3. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Makassar.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut RENSTRA Perangkat Daerah adalah Rencana Strategis Perangkat Daerah Pemerintah Kota Makassar untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan/kondisi daerah yang diinginkan pada tahun 2045 sebagai hasil pembangunan selama 20 (dua puluh) tahun yang selaras dengan visi RPJPN tahun 2025-2045.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh daerah untuk mewujudkan visi RPJPD tahun 2025-2045 dengan memperhatikan misi (agenda) pembangunan nasional dalam RPJPN tahun 2025-2045.

13. Arah . . .

13. Arah Kebijakan adalah kerangka kerja 20 (dua puluh) tahunan yang dijabarkan menjadi 5 (lima) tahunan guna mencapai target sasaran pokok dalam rangka mewujudkan visi RPJPD tahun 2025-2045
14. Sasaran Pokok adalah gambaran rangkaian kinerja dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan terwujudnya visi RPJPD tahun 2025-2045 pada setiap tahapan dan diukur dengan menggunakan indikator yang bersifat progresif.
15. Indikator Utama Pembangunan adalah alat ukur untuk melihat pencapaian dari tujuan pembangunan daerah serta kontribusi terhadap tujuan pembangunan nasional jangka panjang.

Pasal 2

- (1) RPJPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun memuat visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok dan indikator utama pembangunan jangka panjang Daerah.
- (2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan.

Pasal 3

- (1) Sistematika RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) memuat:
 - a. BAB I PENDAHULUAN;
 - b. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;
 - c. BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH;
 - d. BAB IV VISI DAN MISI DAERAH;
 - e. BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH; dan
 - f. BAB VI PENUTUP.
- (2) Sistematika RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4 . . .

Pasal 4

- (1) RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah.

Pasal 5

RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) menjadi acuan bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, masyarakat, dan *stakeholder* dalam pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Daerah dalam pencapaian visi dan misi pembangunan jangka panjang yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat dilakukan perubahan dalam hal hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Perubahan mendasar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (3) Perubahan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun.
- (4) Perubahan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman untuk perubahan RPJMD dan perubahan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 7

- (1) Wali Kota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJPD.

(2) Pengendalian . . .

- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan Daerah.
- (3) Pengendalian dan evaluasi terhadap RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Ketentuan mengenai RPJMD yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2021), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disesuaikan dengan RPJPD sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 26 November 2024

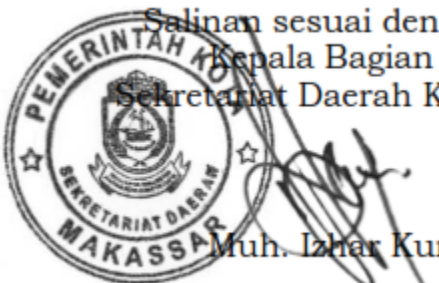
WALI KOTA MAKASSAR
TTD
MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 26 November 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR
TTD
IRWAN RUSFIADY ADNAN

LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2024 NOMOR 6
NO. REG PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR B.HK. B.HK.06.114.24

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Makassar



Muh. Izhar Kurniawan

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045

I. UMUM

Pemerintah Kota Makassar upaya untuk menentukan arah pembangunan daerah mencapai tujuan, upaya ini diwujudkan dengan menyusun perencanaan daerah secara khusus perencanaan jangka panjang daerah yang berlaku dalam jangka waktu dua puluh tahun.

Untuk memberikan dasar yang kokoh bagi pemerintah daerah untuk menentukan arah pembangunan daerah, maka pemerintah daerah Kota Makassar yang Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah telah berakhir masa keberlakuan atau daya gunanya, memberikan penegasan dibutuhkan peraturan yang baru untuk dijadikan dasar pembangunan daerah jangka panjang selanjutnya.

Dalam Perda tersebut salah satu aspek perubahan dari Perda terdahulu ialah memberikan penegasan bahwa untuk penentuan arah pembangunan jangka waktu 2025-2045 wajib untuk didasarkan pada dokumen perencanaan sebagai bagian tak terpisahkan dari peraturan daerah tersebut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5 . . .

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2024 NOMOR 3

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
DAERAH TAHUN 2025-2045

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah yang dilaksanakan berdasarkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah provinsi dan Daerah provinsi itu dibagi atas Daerah kabupaten dan kota, dimana masing-masing mempunyai Pemerintahan Daerah. Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangannya. DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Pemerintah Daerah (Pemda) menyusun perencanaan pembangunan daerah, di mana perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Pembangunan daerah bertujuan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik. Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan, pemerintah daerah wajib menyusun rencana pembangunan daerah yang terdiri atas: 1). Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD); 2). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); dan 3). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Kota Makassar, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW. Tata cara penyusunan dan yang menjadi substansi dalam RPJPD adalah rumusan arah kebijakan, sasaran pokok, indikator kinerja serta target kinerjanya dari sasaran pokok untuk menjadi acuan bagi setiap periode RPJMD. RPJPD Kota Makassar yang berlaku saat ini adalah RPJPD Kota Makassar tahun 2005-2025 yang disahkan pada tanggal 03 Oktober 2017 dengan Peraturan Daerah Kota Makassar 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2017 Nomor 5). Dengan berakhirnya perodesasi RPJPD Kota Makassar Tahun 2005-2025, maka Pemerintah Kota Makassar wajib menyusun RPJPD sebagai dokumen perencanaan untuk perodesasi 20 (dua puluh) tahun mendatang.

Indonesia Emas Tahun 2045 yang tertuang dalam RPJPN Tahun 2025-2045, perlu didukung dengan kontribusi pembangunan tingkat

Kabupaten/Kota dan Provinsi secara maksimal sesuai urusan dan kewenangan masing-masing. Dalam usaha perwujudan Indonesia Emas Tahun 2045, maka sinkronisasi dan sinergitas perencanaan mulai dari nasional, provinsi dan kabupaten/kota menjadi hal yang mutlak dilakukan. Penyusunan RPJPD Kota Makassar 2025-2045 mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sistematis, terarah, terpadu, inovatif, dan responsif, serta selaras dengan RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045. Landasan penting lainnya dalam penyusunan RPJPD adalah Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Makassar Tahun 2015–2034. Penyusunan dokumen RPJPD juga memperhatikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dimana KLHS berfungsi untuk penjaminan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam penyusunan RPJPD, sehingga pengambilan keputusan pembangunan yang dapat berdampak negatif terhadap lingkungan dapat dihindari.

Kota Makassar adalah kota yang terletak dekat dengan pantai yang membentang sepanjang koridor barat dan utara dan juga dikenal sebagai “*Waterfront City*” yang didalamnya mengalir beberapa sungai (Sungai Tallo, Sungai Jeneberang, dan Sungai Pampang) yang kesemuanya bermuara ke laut pada wilayah pesisir Kota Makassar. Sebagai ibukota Provinsi Sulawesi Selatan memiliki posisi yang sangat strategis sebagai pintu gerbang Kawasan Timur Indonesia (KTI), terletak relatif di tengah-tengah kepulauan Indonesia, dengan bagian barat berbatasan dengan Selat Makassar yang merupakan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II, yang ditetapkan pemerintah Indonesia untuk dilalui kapal-kapal asing yang melintas wilayah laut Indonesia berdasarkan konvensi hukum laut internasional. Pada aspek ekonomi, Kota Makassar memiliki posisi yang sangat penting dalam perekonomian Sulawesi Selatan, mengingat kontribusi Kota Makassar terhadap total PDRB Provinsi yang mencapai 34,67%. Makassar memiliki keunggulan kompetitif dari sektor lapangan usaha perdagangan besar dan eceran dengan kontribusi sebesar 20 persen, disusul industri pengolahan sebesar 19 persen, konstruksi 18 persen, informasi dan komunikasi 10 persen, dan jasa pendidikan 8 persen. Lima sektor ini berkontribusi sebesar $\frac{3}{4}$ dari perekonomian Kota Makassar. Selain itu, dari sisi sosial budaya, Makassar sangat kaya dengan budaya dan kental dengan tradisi dan nilai-nilai, yang masih tetap hidup dalam keseharian masyarakatnya seperti *sipakatau* (*memanusiakan satu sama lain*), *sipakainge'* (*saling mengingatkan*), *sipakalebbi'* (*saling menghormati*), *siri 'na Pacce*, (*lebih baik mati secara terhormat daripada hidup dengan rasa malu*). Dalam hal budaya sastra, Makassar juga mendunia, dengan karya kesusastraan I Lalaligo yang masyhur sebagai epik atau genre puisi naratif terpanjang di dunia. Makassar juga identik dan kental dengan budaya islaminya, seperti tradisi *Mabbarazanji* yaitu tradisi pembacaan Barzanji -sebuah kitab yang berisi sejarah nabi Muhammad SAW- dalam acara hajatan atau doa-doa selamat. Keunggulan posisi strategis, potensi ekonomi, dan sosial budaya yang dimiliki ini, perlu dipadukan secara bijak dan cerdas agar dapat dikelola secara optimal dalam rangka memajukan Kota Makassar dan mensejahterakan masyarakatnya.

Pertumbuhan ekonomi Kota Makassar menunjukkan kinerja yang baik, bahkan tergolong dalam 6 (enam) daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi, dengan rata-rata pertumbuhan 5,06% dalam 3 (tiga) tahun terakhir. Setelah mengalami kontraksi akibat Covid-19 tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Kota Makassar meskipun belum pulih, tetapi konsisten menunjukkan kinerja pertumbuhan yang lebih tinggi dari capaian Sul-Sel dan

Nasional hingga tahun 2023. Makassar juga menyumbang kontribusi 34,67 % total PDRB Provinsi Sulsel, sehingga tinggi atau rendahnya pertumbuhan ekonomi Kota Makassar akan berdampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan. PDRB per Kapita Kota Makassar menunjukkan kinerja yang sangat baik, dimana dalam dalam sepuluh tahun terakhir meningkat dari hanya Rp 62,75 juta pada tahun 2013 menjadi sebesar Rp155,95 juta pada tahun 2023. Indeks pembangunan manusia (IPM) Kota Makassar yang menunjukkan kualitas SDM, telah mencapai predikat “sangat tinggi” sejak tahun 2016 dengan IPM 80,53, dan hingga tahun 2023, IPM Kota Makassar berhasil mencatatkan angka antara 83-84.

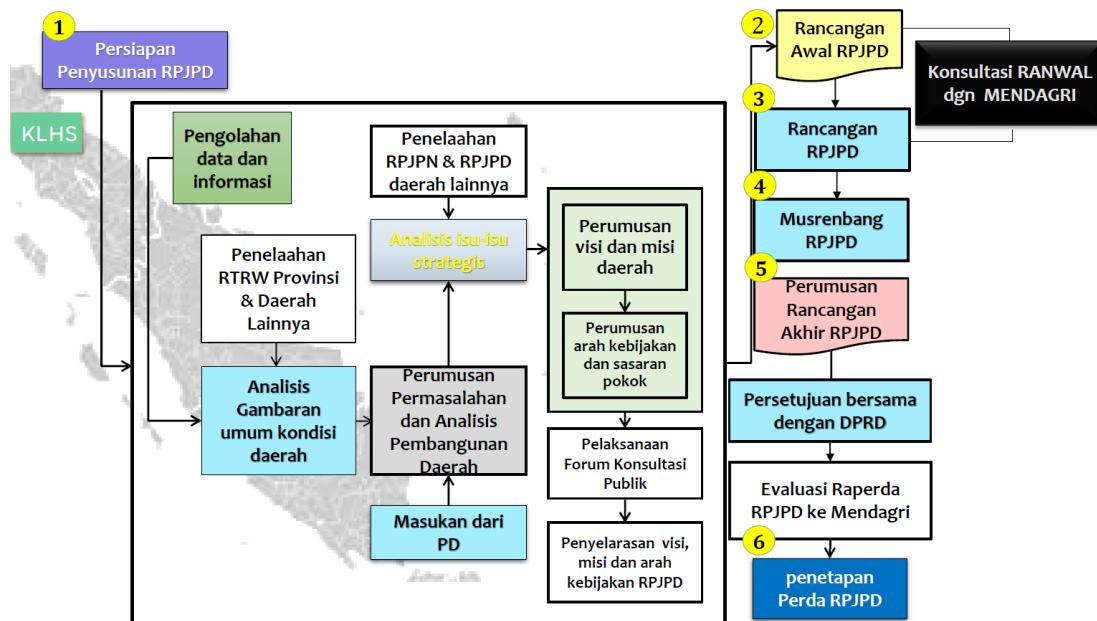
Perencanaan pembangunan jangka panjang daerah disusun dengan memperhatikan potensi dan capaian pembangunan Kota Makassar dalam 20 tahun terakhir, seperti yang digambarkan secara singkat di atas, dan pembangunan 20 tahun kedepan harus menggunakan paradigma baru agar lebih dapat mencapai kesejahteraan masyarakat serta pemerataan hasil-hasil pembangunan. Paradigma baru pembangunan yang dikedepankan dalam RPJPD Kota Makassar 2025-2045 adalah Transformasi, dimana transformasi mengandung makna perubahan dari keadaan yang sebelumnya menjadi keadaan yang baru dan lebih baik. Transformasi dilakukan untuk mewujudkan pembangunan yang kompetitif, yang didorong oleh produktivitas tinggi yang inklusif dan berkelanjutan. Transformasi pembangunan Kota Makassar meliputi Transformasi Sosial, Transformasi Ekonomi, Transformasi Tata Kelola. Transformasi tersebut dapat berjalan baik dengan ditopang oleh kuatnya landasan daerah yang meliputi supremasi hukum, keamanan dan ketertiban, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro daerah yang kondusif serta daya saing daerah yang tinggi. Selanjutnya, dalam rangka menjamin kesejahteraan masyarakat sekaligus pembangunan yang berkelanjutan diperlukan ketahanan sosial budaya dan ekologi. Interaksi yang kuat dan sinergis antara ketahanan sosial budaya dan ekologi dilakukan dengan mengintegrasikan konsep pembangunan manusia yang melibatkan individu, keluarga, dan masyarakat dalam mengelola sumberdaya alam dan lingkungannya baik fisik dan non fisik secara bijaksana sehingga tercipta keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi berkualitas dan inklusif serta pelestarian lingkungan untuk generasi mendatang. Transformasi Kota Makassar memerlukan kerangka implementasi berupa pembangunan kewilayahan yang didukung oleh sarana prasarana yang dilaksanakan secara bertahap, untuk itu diperlukan upaya menjaga kesinambungan pembangunan agar seluruh tahapan pembangunan dapat terlaksana dengan baik.

Proses penyusunan dokumen RPJPD menggunakan 4 (empat) pendekatan, yaitu: pendekatan teknokratik, pendekatan politis, pendekatan partisipatif, dan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas. Adapun secara substansi, penyusunan dokumen RPJPD menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif, dan spasial. Selain itu, pada perspektifnya RPJPD ini didesain sedemikian rupa dengan tetap berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan pemanfaatan sumber daya alam secara optimal dalam perspektif ekonomi hijau dan ekonomi biru, peningkatan kualitas sumberdaya manusia, perbaikan pelayanan publik, dan pengembangan daya saing daerah melalui pendekatan kemandirian lokal. Seluruh desain perencanaan tersebut bertumpu pada karakteristik daerah, potensi daerah, masalah dan tantangan yang dihadapi daerah, dan berbagai peluang yang dapat dimanfaatkan oleh daerah di masa depan. RPJPD Kota Makassar Tahun 2025-2045 disusun dengan memperhatikan dan mempedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045,

serta Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional PPN/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Dalam Negeri tentang Penyelarasan RPJPD dengan RPJPN Tahun 2025-2045. Proses penyusunan RPJPD dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu mulai dari persiapan penyusunan, orientasi penyusunan RPJPD, penyusunan rancangan awal, pelaksanaan forum Konsultasi Publik, konsultasi Rancangan Awal ke pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, penyusunan rancangan, pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) RPJPD, penyusunan rancangan akhir, review APIP, pembahasan Rancangan Perda RPJPD oleh DPRD Kota Makassar, evaluasi/fasilitasi pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, hingga penetapan Peraturan Daerah RPJPD.

Tahapan penyusunan RPJPD Kota Makassar sebagai dokumen perencanaan pembangunan periode 20 (dua puluh) tahun, dapat digambarkan pada tahapan penyusunan sebagai berikut:

Gambar 1.1
Tahapan Penyusunan RPJPD Kota Makassar Tahun 2025-2045

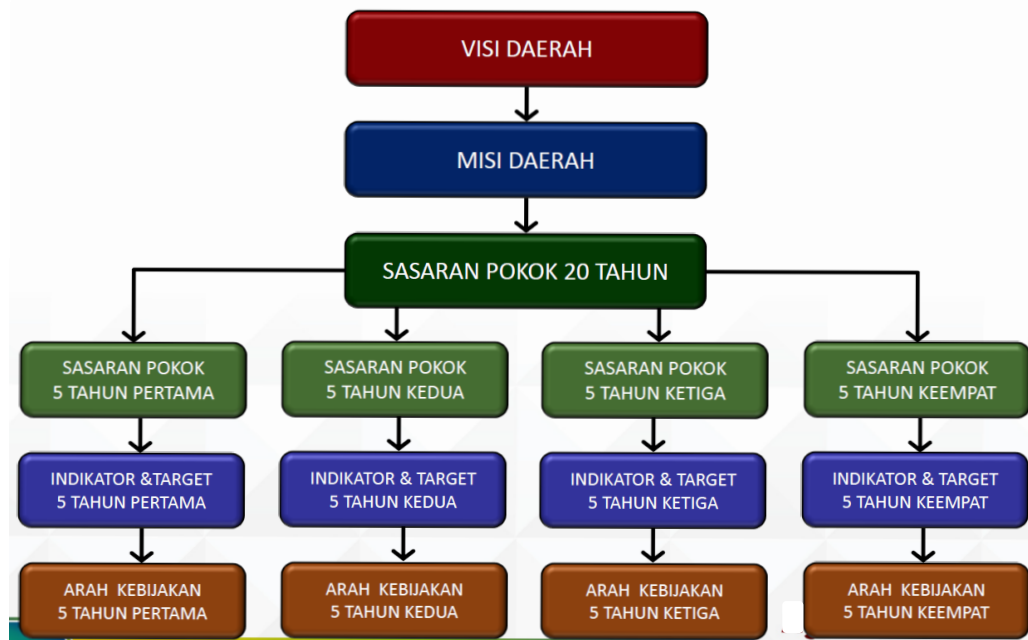


Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, data diolah

RPJPD Kota Makassar Tahun 2025-2045 sebagai dokumen perencanaan untuk jangka waktu dua puluh tahun, akan memuat visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka panjang. Visi menjelaskan suatu kondisi ideal yang ingin dicapai di masa depan (*desired future*) oleh Kota Makassar berdasarkan kondisi dan situasi saat ini. Visi kemudian dirumuskan ke dalam misi-misi pembangunan, dimana misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi, sebagai komitmen keseluruhan *stakeholders* pembangunan daerah. Dimensi dan agenda pembangunan pada visi dan misi, kemudian diuraikan dalam langkah-langkah yang akan dilakukan dalam penahapan untuk prioritas pembangunan 20 (dua puluh) tahun yang kemudian dituangkan ke dalam penahapan per periode RPJMD. Masing-masing sasaran pokok akan dikuantifikasi menjadi indikator dan target kinerja yang dirinci berdasarkan prioritas masing-masing misi. Guna mencapai target-target kinerja sasaran pokok RPJPD, disusun arah kebijakan sebagai pedoman untuk menentukan prioritas pembangunan 5 (lima) tahunan. Penerjemahan pokok visi ke dalam misi, serta penentuan target sasaran jangka panjang yang dibagi ke dalam pembangunan lima

tahunan, dapat digambarkan pada arsitektur perencanaan, sebagai berikut:

Gambar 1.2
Arsitektur Kinerja RPJPD Kota Makassar Tahun 2025-2045



Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, data diolah

RPJPD Kota Makassar Tahun 2025-2045 menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD Kota Makassar yang akan memuat visi, misi, dan program Kepala Daerah yang selanjutnya menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra). Renstra SKPD memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang bersifat indikatif dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap SKPD. RPJMD sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah selanjutnya dijabarkan kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Renstra SKPD sebagai dokumen perencanaan jangka menengah SKPD selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai dokumen perencanaan SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

1.2. Dasar Hukum

Landasan hukum yang menjadi dasar dalam penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 Kota Makassar ini adalah:

1. Amandemen ke-3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
10. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
11. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-Batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-Kabupaten Gowa, Maros, dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan

- Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6885);
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 126);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 459 tahun 2018);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1114 Tahun 2019);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);
 25. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
 26. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 322);
 27. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 304);
 28. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 600.1/176/SJ dan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
 29. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.

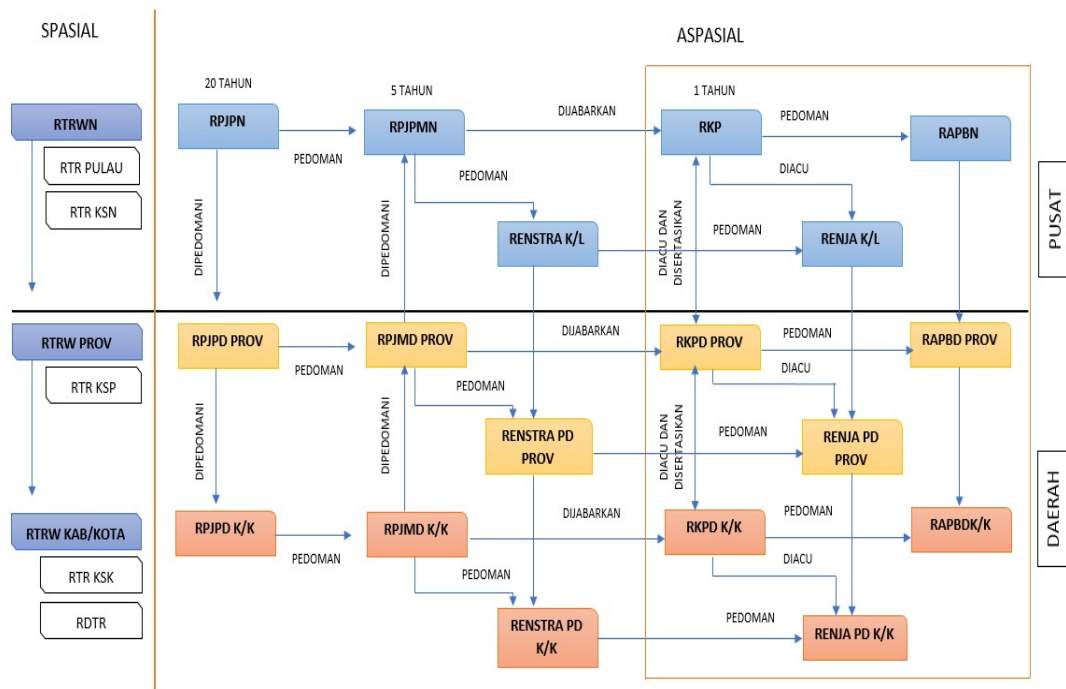
1.3. Hubungan Antar Dokumen

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 260 mengamanahkan bahwa Daerah sesuai kewenangannya menyusun

perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Lebih lanjut pada pasal 263 mengatur bahwa RPJPD disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). RPJPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan periode 20 (dua puluh) tahun merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan Daerah, secara substansi harus memperhatikan substansi perencanaan dengan pendekatan spasial untuk mempertimbangkan dimensi keruangan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanahkan kepada pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota, untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun dengan mengacu pada RPJPN. Penyusunan RPJPD Kota Makassar Tahun 2025-2045 disusun selaras dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045 serta RTRW Kota Makassar. Keselarasan RPJPD Kota Makassar dengan RPJPN dan RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan tersebut meliputi keselarasan dalam visi, misi/agenda pembangunan, arah pembangunan, dan indikator kinerja utama pembangunan. Keselarasan dengan RTRW Kota Makassar, meliputi keselarasan dalam arahan rencana tata ruang utamanya struktur ruang, pola ruang, dan kawasan strategis daerah. Selain itu, penyusunan RPJPD Kota Makassar juga memperhatikan isu strategis dan arah kebijakan dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kota Makassar, hasil evaluasi RPJPD Kota Makassar Tahun 2005-2025 terutama pada tingkat ketercapaian dan rekomendasi, dan dokumen perencanaan pembangunan sektoral lainnya yang secara substansi berkaitan dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah seperti Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dan lainnya.

Oleh karena itu, semua dokumen yang berdimensi jangka menengah (RPJMD) dan berdimensi tahunan (RKPD dan APBD), harus mengacu pada dokumen RPJPD ini. Dokumen RPJPD ini selanjutnya dijabarkan oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah Perangkat Daerah (SKPD) lingkup pemerintah Kota Makassar dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja), dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Berdasarkan RKPD dan RKA tersebut selanjutnya disusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Makassar. Hubungan dokumen RPJPD dan RTRW memiliki keterkaitan yang erat dalam rangka mencapai pembangunan yang terarah dan berkelanjutan. Fokus utama RTRW adalah pada pengaturan struktur ruang dan pola ruang wilayah dan memberikan arah dan pedoman dalam pengembangan ruang secara keseluruhan. Oleh karena itu konsistensi, integrasi, sinkronisasi serta sinergi antara dokumen RPJPD dan RTRW merupakan hal yang sangat penting. RPJPD sebagai dokumen perencanaan jangka panjang daerah harus mempedomani pemanfaatan ruang agar terwujud ruang kota yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan di Kota Makassar. Aspek spasial dalam penyusunan RPJPD Kota Makassar, dapat digambarkan pada gambar sebagai berikut:

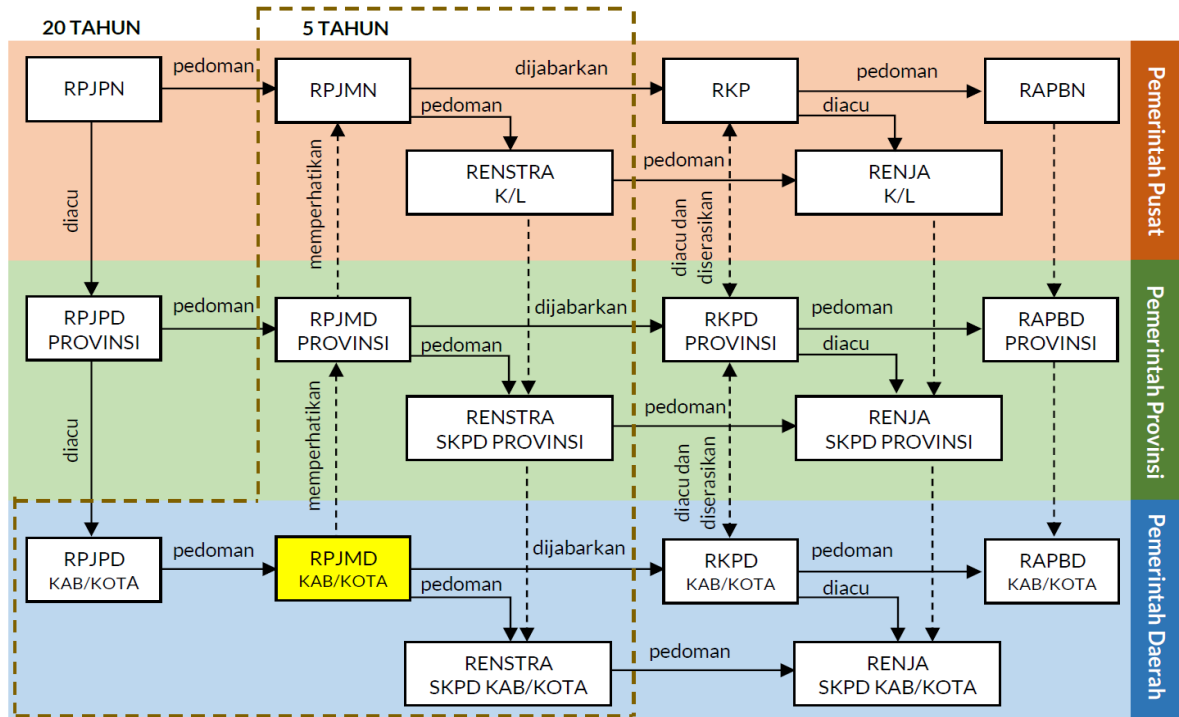
Gambar 1.3
Aspek Spasial dalam penyusunan RPJPD



Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, data diolah

Dokumen RPJPD Kota Makassar Tahun 2025-2045 selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD Kota Makassar yang akan memuat penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang selanjutnya menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD. Renstra SKPD yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang bersifat indikatif dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap SKPD. RPJMD sebagai dokumen perencanaan pembangunan Daerah Jangka Menengah untuk periode 5 (lima) tahunan selanjutnya dijabarkan kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Renstra SKPD sebagai dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahunan selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Hubungan antara RPJPD dengan dokumen perencanaan lainnya, dapat digambarkan sebagai berikut:

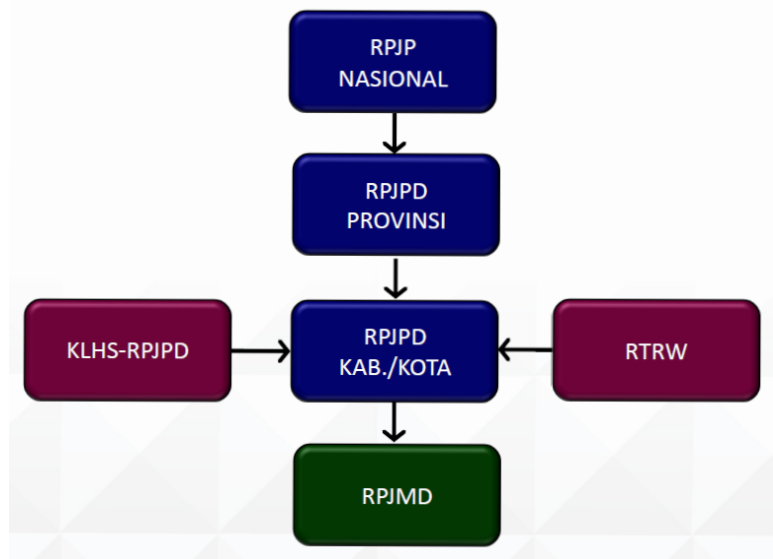
Gambar 1.4
Hubungan RPJPD Kota Makassar dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, data diolah

RPJPD Kota Makassar adalah dokumen perencanaan yang bersifat *strategic direction* dengan mengedepankan transformasi dan kolaborasi lintas bidang, mencakup transformasi sosial, transformasi ekonomi, transformasi tata kelola, dan transformasi lingkungan hidup yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW. Dengan berpedoman RPJPN, diharapkan substansi dari RPJPD Kota Makassar dapat sinergis dan selaras dengan RPJPN yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah dan kearifan lokal Makassar. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis mengamanahkan bahwa penyusunan RPJPD wajib melakukan penelaahan terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah, kebijakan, dan/atau rencana. Sebagai dokumen perencanaan jangka panjang, RPJPD tidak menggunakan perspektif sektoral, tetapi lintas sektor (*cross-cutting issues*), serta hanya memuat kinerja dampak (*impact based*), sehingga harus dapat meramu seluruh aspirasi dan kepentingan dengan melibatkan semua *stakeholder* pembangunan daerah, sehingga dapat terwujud dokumen RPJPD yang paripurna dan mampu menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD), yang memuat Visi, Misi dan Program Kepala Daerah terpilih nantinya. Aspek lintas sektor dalam penyusunan RPJPD Kota Makassar, disajikan pada gambar berikut:

Gambar 1.5
Aspek Lintas Sektor dalam penyusunan RPJPD Kota Makassar



Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, data diolah

1.4. Maksud dan Tujuan

Penyusunan RPJPD Kota Makassar dimaksudkan sebagai upaya menyelaraskan RPJPD dengan RPJPN Tahun 2025-2045 dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) serta sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah yang bersifat *strategic direction* untuk menjabarkan visi, misi, sasaran pokok, arah kebijakan serta indikator dan target-target kinerja pembangunan Kota Makassar untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dengan periodisasi mulai tahun 2025 sampai dengan tahun 2045 dan menjadi pedoman penyusunan perencanaan Daerah periode 5 (lima) tahun (RPJMD).

RPJPD Kota Makassar Tahun 2025-2045 disusun dengan tujuan:

1. Berkontribusi secara maksimal terhadap pencapaian target pembangunan jangka panjang nasional;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara Pemerintah Kota Makassar, dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Pusat;
3. Menciptakan koordinasi dan sinergi antar pelaku pembangunan dalam mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Kota Makassar.
4. Memberikan ruang optimal bagi pembangunan Kota Makassar sesuai dengan karakteristik, inovasi, dan pengembangan Kota Makassar di masa depan;
5. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar;
6. Sebagai pedoman bagi calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam perumusan visi, misi dan program;
7. Sebagai pedoman penetapan arah kebijakan, indikator kinerja dan target kinerja pembangunan tiap 5 (lima) tahunan sebagai sasaran Pembangunan Daerah yang ingin dicapai tiap tahapan rencana pembangunan jangka menengah;
8. Sebagai parameter penilaian keberhasilan maupun ketidakberhasilan pembangunan Kota Makassar pada periode 2025-2045 melalui indikator kinerja dan target kinerja yang telah ditetapkan;
9. Menjadi instrumen bagi DPRD Kota Makassar dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja pembangunan Kota Makassar;

10. Menjadi instrumen bagi masyarakat dan *stakeholder* dalam pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Kota Makassar dalam pencapaian visi dan misi pembangunan yang menjadi cita-cita bersama masyarakat, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. Menyelesaikan permasalahan pembangunan, mengelola potensi dan sumber daya Kota Makassar secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan serta meraih setiap peluang yang ada untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

1.5. Sistematika

Sistematika penyusunan RPJPD Kota Makassar Tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Memuat Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Hubungan Antar Dokumen RPJPD, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan.

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Memuat Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Sosial dan Budaya, Aspek Daya Saing Daerah, Aspek Pelayanan Umum, Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025, Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik dan Pengembangan Pusat-Pusat Pertumbuhan Wilayah.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Menguraikan tentang permasalahan utama yang merupakan faktor penghambat yang mengikat dan apabila ditangani dapat melepaskan potensi daerah yang tertahan secara signifikan. Lebih jauh, bagian ini menguraikan isu-isu strategis daerah yang berdampak luas dan memiliki konsekuensi jauh ke depan. Termasuk dalam isu-isu strategis daerah ini adalah hal-hal yang apabila tidak ditangani dengan baik akan menimbulkan kerugian dan kerusakan yang makin besar.

BAB IV. VISI DAN MISI DAERAH

Memuat visi yang merupakan kondisi Kota Makassar yang ingin diwujudkan sampai dengan Tahun 2045, Sasaran Visi dan Misi yang akan dilaksanakan daerah guna mewujudkan visi.

BAB V. ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH

Memuat Arah Kebijakan Pembangunan Daerah dalam 4 (empat) Periode 5 (lima) tahunan dalam rangka pencapaian visi Kota Makassar dan Sasaran Pokok RPJPD.

BAB VI. PENUTUP

Memuat tentang kaidah pelaksanaan dan pembiayaan pembangunan, diantaranya melalui konsistensi perencanaan dan pendanaan, kerangka pengendalian, manajemen risiko, mekanisme perubahan, peningkatan kapasitas pembiayaan sektor publik, peningkatan kapasitas pembiayaan sektor non publik, dan manajemen investasi sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1. Geografi

2.1.1.1. Peran Strategis Daerah

Kota Makassar ibukota Provinsi Sulawesi Selatan, memiliki luas wilayah indikatif seluas 176,852 km² berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau.

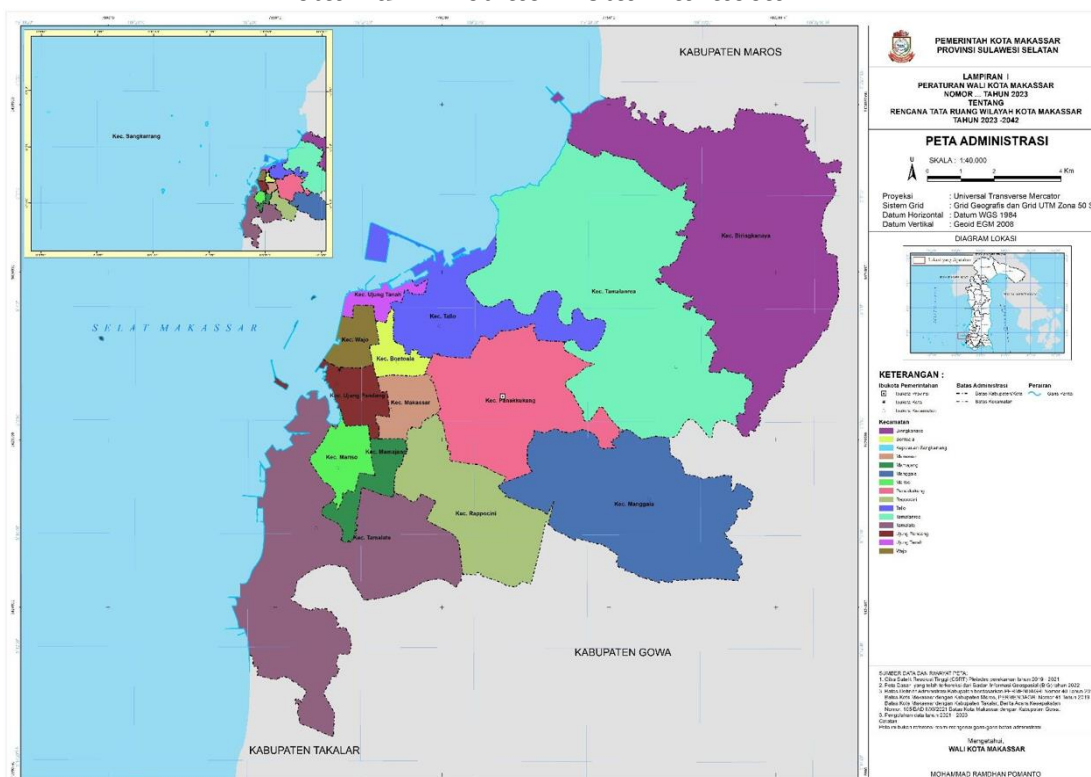
Selain memiliki wilayah daratan, Kota Makassar juga memiliki wilayah kepulauan yang merupakan gugusan pulau-pulau karang sebanyak 13 pulau, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau). Ketigabelas pulau tersebut yaitu Pulau Lanjukung (terjauh), Pulau Langkai, Pulau Lumu-Lumu, Pulau Bonetambung, Pulau Kodingareng, Pulau Barrang Lompo, Pulau Barrang Caddi, Pulau Kodingareng Keke, Pulau Samalona, Pulau Lae-Lae, Pulau Gusung, Pulau Kolokoloang dan Pulau Kayangan (terdekat).

Kota Makassar secara administratif berada pada batas batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Maros
- Sebelah Selatan : Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar
- Sebelah Timur : Kabupaten Gowa dan Kabupaten Maros
- Sebelah Barat : Selat Makassar

Secara geografis, Kota Makassar terletak di Pantai Barat Pulau Sulawesi pada koordinat 119°4'29,038"-119°32'35,781" Bujur Timur dan 4°58'30,052"-5°14'0,146" Lintang Selatan. Berada pada posisi strategis karena berada pada persimpangan jalur lalu lintas dari arah selatan dan utara dalam provinsi di Pulau Sulawesi, dari wilayah kawasan Barat ke wilayah Kawasan Timur Indonesia dan dari wilayah utara ke wilayah selatan Indonesia.

Gambar 2.1.
Peta Administrasi Kota Makassar



Sumber: Dokumen Materi Teknis Revisi RTRW Kota Makassar Tahun 2024-2043
Kota ...

Kota Makassar juga pernah mempunyai peran global dalam sejarah peradaban dunia, yang menjadi tanda bahwa keikutsertaan Makassar dalam ranah Internasional sudah dimulai dari dulu, ditandai dengan adanya: Hub (network) internasional, Free Trade Zone, Kota global, Pusat penyebaran islam, Pusat Iptek, Perpustakaan ilmiah terbesar di dunia serta tren “pasar dunia”. Wilayah Makassar yang berada di tengah-tengah dunia perdagangan dan hal itu yang membuat Kota Makassar menjadi sangat strategis. Dari sejarah perdagangan Kota Makassar yang sudah dari dulu terkemuka dan terkenal sampai ranah internasional, membuat hal ini menjadi potensi Kota Makassar yang sekarang berada dalam persaingan ekonomi dunia dan menjadi salah satu kota di Indonesia yang memiliki peran dalam perekonomian nasional maupun internasional.

Berdasarkan sistem perkotaan nasional, Kota Makassar telah ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Dalam RPJMN 2015-2019, Kota Makassar merupakan bagian dari Kawasan Perkotaan Metropolitan Mamminasata dan diarahkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) berskala global yang mendorong pertumbuhan kota-kota di sekitarnya sebagai sentra produksi wilayah pulau serta sebagai pusat orientasi pelayanan berskala internasional dan penggerak utama bagi Kawasan Timur Indonesia (KTI). Kota Makassar juga termasuk ke dalam Kawasan Strategis Nasional Perkotaan Mamminasata.

Kota Makassar juga berada dalam Pulau Sulawesi, yang berada diantara ALKI II dan ALKI III. Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) adalah Alur laut yang ditetapkan sebagai alur untuk pelaksanaan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan berdasarkan konvensi hukum laut internasional. Alur ini merupakan alur untuk pelayaran dan penerbangan yang dapat dimanfaatkan oleh kapal atau pesawat udara asing di atas laut tersebut untuk dilaksanakan pelayaran dan penerbangan damai dengan cara normal. Dimana bahwa sekitar 45% perdagangan barang dunia melalui ALKI. Hal ini dapat menjadi potensi dan nilai terhadap perkembangan dan pembangunan Kota Makassar.

Secara umum Kota Makassar dengan posisi strategis akan memberi nilai berdasarkan potensi dalam pengembangan dan pembangunan wilayah baik secara nasional maupun secara global, berikut gambaran potensi dan nilai strategis Kota Makassar:

1. Nilai strategis geografis (laut dan udara) Kota Makassar terhadap pasar regional maupun internasional.
2. Nilai strategis historis Kota Makassar sebagai pintu gerbang Kawasan Timur Indonesia.
3. Potensi Pelabuhan (*New Port Makassar*) di Kota Makassar yang dapat didorong sebagai basis pengembangan ekonomi wilayah dari sektor pelayanan.
4. Posisi strategis wilayah Kota Makassar terhadap konstelasi regional dan Internasional.

2.1.1.2. Potensi Sumber Daya Alam

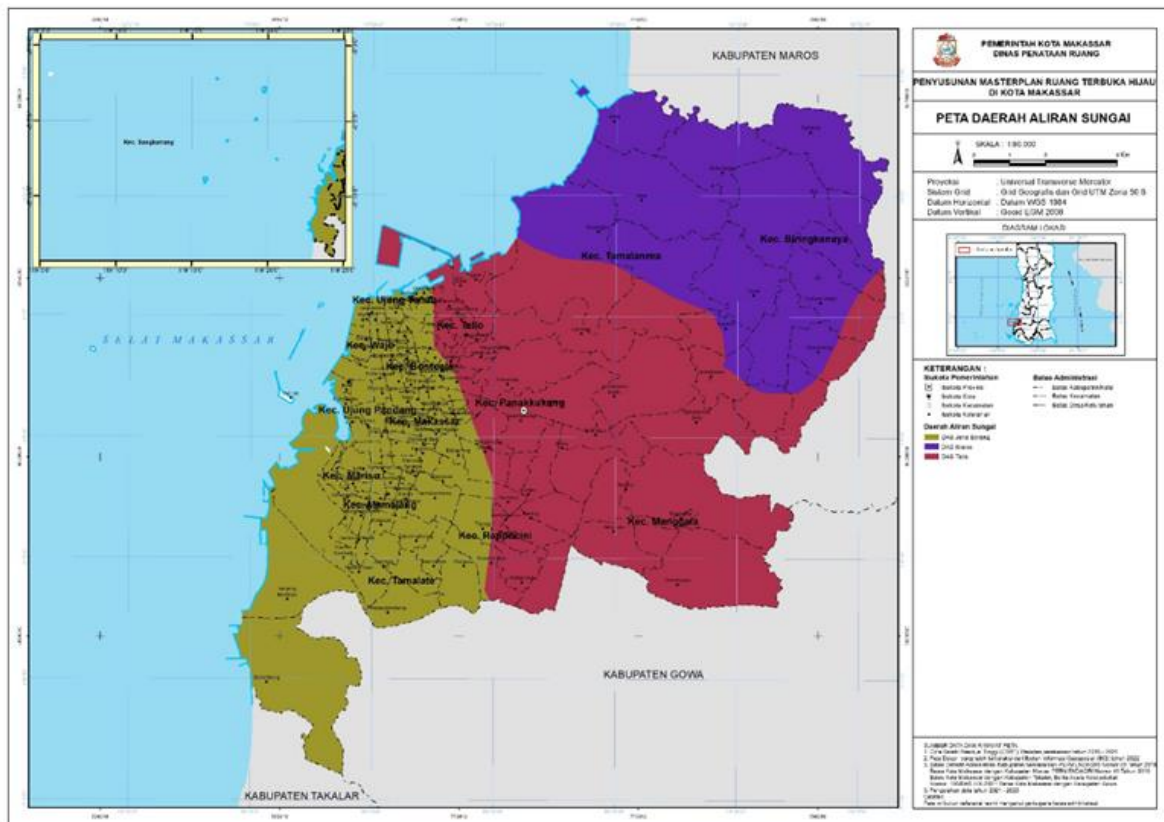
Potensi sumber daya alam Kota Makassar sangat dipengaruhi kondisi sumber daya air, sebagai berikut :

a. Sungai

Kota Makassar dilalui 3 aliran sungai besar yaitu Sungai Tallo dan Pampang sebagai anak sungai Tallo, yang bermuara di bagian Utara Kota Makassar, berkapasitas rendah dengan debit kira-kira 0-5 m³/detik. Dan Sungai Jeneberang yang mengalir melintasi wilayah Kabupaten Gowa dan bermuara di bagian selatan wilayah Kota Makassar, berkapasitas sedang dengan debit 1-2 m³/detik. Selain ketiga sungai tersebut juga terdapat sungai

kecil yaitu sungai Bone Tanjore yang terletak di perbatasan Kota Makassar dan Kabupaten Maros.

Gambar 2.2.
Daerah Aliran Sungai Yang Melingkupi Kota Makassar



Sumber: Dokumen Materi Teknis Revisi RTRW Kota Makassar Tahun 2024-2043

b. Danau dan Waduk

Kota Makassar memiliki beberapa danau dan waduk, pertama Danau Balang Tonjong (Jurnal Ilmiah *Techno Entrepreneur Acta*, Vol.2, No.1, 01 April 2017; Marzuki, et al., 2014). Danau Balang Tonjong terletak di Kelurahan Antang Kecamatan Manggala. Danau Balang Tonjong memiliki kedalaman 1-6 meter dengan luas area 4,5 Ha.; kedua Danau Unhas terletak di area Universitas Hasanuddin Kecamatan Tamalanrea dengan luas sekitar 4,9525 Ha dan 1,2006 Ha (Data Digitasi Danau Unhas).; ketiga Waduk Tunggu Pampang merupakan salah satu sistem pengendali banjir yang ditimbulkan intensitas hujan yang cukup tinggi, baik untuk wilayah Kota Makassar maupun kabupaten sekitarnya. selain sebagai pengendali banjir juga menjadi tempat rekreasi bagi sebagian warga; keempat Danau Tanjung Bunga merupakan danau buatan yang terletak di tengah pemukiman dan sumber air dari hilir Sungai Jeneberang dan air keluaran pada Pantai Akkarena Makassar. Luas danau 950.000 m² dengan kedalaman 2-5 meter.

c. Air Tanah

Air tanah di Kota Makassar dapat ditemukan pada kedalaman 15 meter yang tersebar di sekitar wilayah bagian barat, dan kedalaman 150 meter berada pada sekitar wilayah bagian barat yang kondisi morfologi wilayahnya berbukit.

Estimasi terhadap potensi air tanah kota Makassar diketahui melalui pemantauan terhadap penggunaan air tanah yakni berkisar antara ±20 m³/hari sampai ±150 m³/hari. Kualitas air tanah kota Makassar menunjukkan beberapa parameter kualitas air yang telah melebihi ambang batas yakni parameter fisika seperti TDS, DHL, dan kekeruhan di Kecamatan Panakkukang . . .

Panakkukang, Kecamatan Tamalanrea dan Kecamatan Biringkanaya serta parameter kimia yakni Kesadahan, Chloride, Nitrit, BOD, DO, Salinitas dan pH yang melebihi baku mutu di wilayah Kecamatan Panakkukang, Kecamatan Tamalanrea, Kecamatan Makassar, Kecamatan Bontoala, Kecamatan Mamajang, Kecamatan Manggala dan Kecamatan Biringkanaya.

Air tanah Kota Makassar diperkirakan juga telah mengalami intrusi air laut. Daerah-daerah yang diperkirakan telah terintrusi air yakni Kecamatan Panakkukang, Kecamatan Tamalanrea, Kecamatan Bontoala, dan Kecamatan Biringkanaya karena nilai pH, salinitas dan DHL yang melebihi baku mutu yang dipersyaratkan.

Untuk tingkat kerusakan air tanah dilihat dari nilai salinitas, 97,3% kondisi aman dan 2,6% berada pada kondisi kerusakan rawan. Sedangkan kerusakan dari nilai DHL, 89,3% tingkat kerusakan air tanah aman dan 6,6% tingkat kerusakan rawan serta terdapat 4% berada dalam kondisi tingkat kerusakan air tanah rusak.

d. Sumber Keanekaragaman Hayati

Flora yang ada di Kota Makassar terbagi 2 yaitu flora yang merupakan tumbuhan lokal dan flora yang *introduced/invasive* atau bukan tumbuhan lokal. Jenis flora yang merupakan kategori tumbuhan invasif seperti trembesi/kihujan, Mahoni, Ketapang Kencana, Tabebuaya Kuning, Tabebuaya, Kingroot, Glodogan, Jati Putih, Flamboyan, Pucuk Merah, dan Palembang. Sedangkan Tumbuhan Mangrove, beberapa jenis buah seperti mangga, jambu air, belimbing manis, dan lainnya, Cenrana, Bungur, Tanjung Bintaro, Salam, Johar Dadap Merah, Kembang Merak, Kusambi dan lainnya merupakan tumbuhan lokal.

e. Sumber Daya Pertanian

Kegiatan pertanian di Kota Makassar meliputi tanaman pertanian pangan dan perkebunan. Tercatat pada Tahun 2021, produktivitas tanaman padi 44,91 ton/ha, di mana luas lahan panen untuk tanaman padi seluas 2.655,56 ha dengan produksi sebanyak 11.924,93 ton. Tanaman Hortikultura sayuran adalah kangkung, cabe rawit dan bayam. Untuk jenis buah-buahan yaitu mangga dan pisang. Populasi ternak terbanyak didominasi oleh kambing yang jumlahnya mencapai 7.042 ekor sapi dan kerbau. Populasi unggas yaitu ayam pedaging. serta produksi perikanan baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya seperti tambak, kolam dan sawah.

f. Sumber Daya Laut dan Pesisir

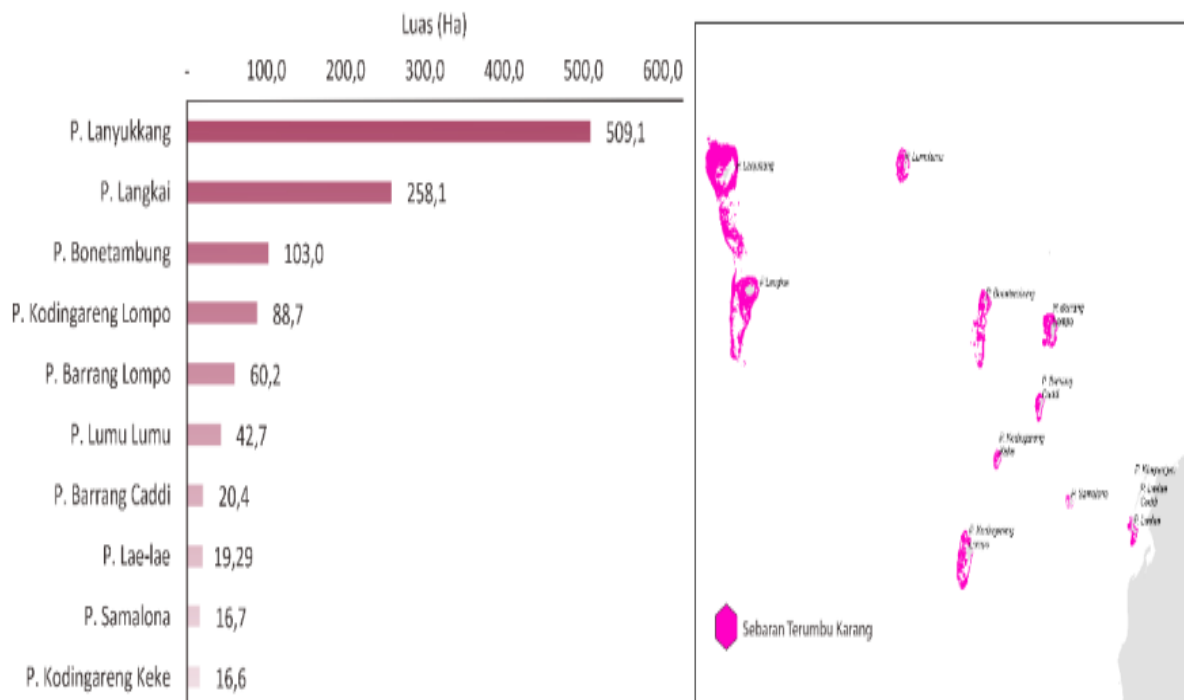
Makassar letaknya di wilayah pesisir, terdapat 3 ekosistem lingkungan yang ada di pesisir dan laut Kota Makassar yaitu mangrove, padang lamun, dan terumbu karang. Berdasarkan hasil pemantauan Dinas Lingkungan Hidup pada Tahun 2021, diperoleh data sebagai berikut:

- a) Mangrove: *Avicennia Alba*, *Avicennia Marina*, *Rhizophora Apiculata*, dan *Rhizophora Mucronata*, *Bruguiera sp*, dan *Nypa Fruticans* dan jenis fauna di sekitar mangrove yaitu insekta, ular, burung (bangau), kepiting, kerang dan berbagai jenis invertebrata lainnya
- b) Padang Lamun: *Enhalus Acoroides*, *Cymodocea Serrulata*, *Cymodocea Rotundata*, *Syringodium Isoetifolium*, dan *Thalassia Hemprichii*
- c) Terumbu Karang: merupakan kesatuan gugusan karang Spermonde (dari pulau paling utara Kab.Pangkep hingga Pulau Tanakeke Kab.Takalar. dengan Keanekaragaman diantaranya *Stylopora*, *Seriatopora*, *Pocillopora*, *Echinopora*, *Pavona*, *Hydnopora*, *Goniopora*, *Acropora*, *Favia*, *Favites*, *Porites*, *Sinularia*, *Sarchopython*, *Montipora*, *Galaxea*, *Fungia*, *Platygyra*, *Coeloseris* dan *Lobophytum*. Dan ikan karang diantaranya *Pomacentrus*

d) *Smithi* . . .

- d) *Smithi*, *Pomacentrus Moluccensis*, *Thalassoma Iunare*, *Pomacentrus lepidogenys*, *Cirrhilabrus ryukyuensis*, *Thalassoma hardwicke*, *Pomacentrus alexanderae*, dan *Chromis viridis*.

Gambar 2.3.
Luasan dan Sebarannya Terumbu Karang
di Wilayah Perairan Kota Makassar

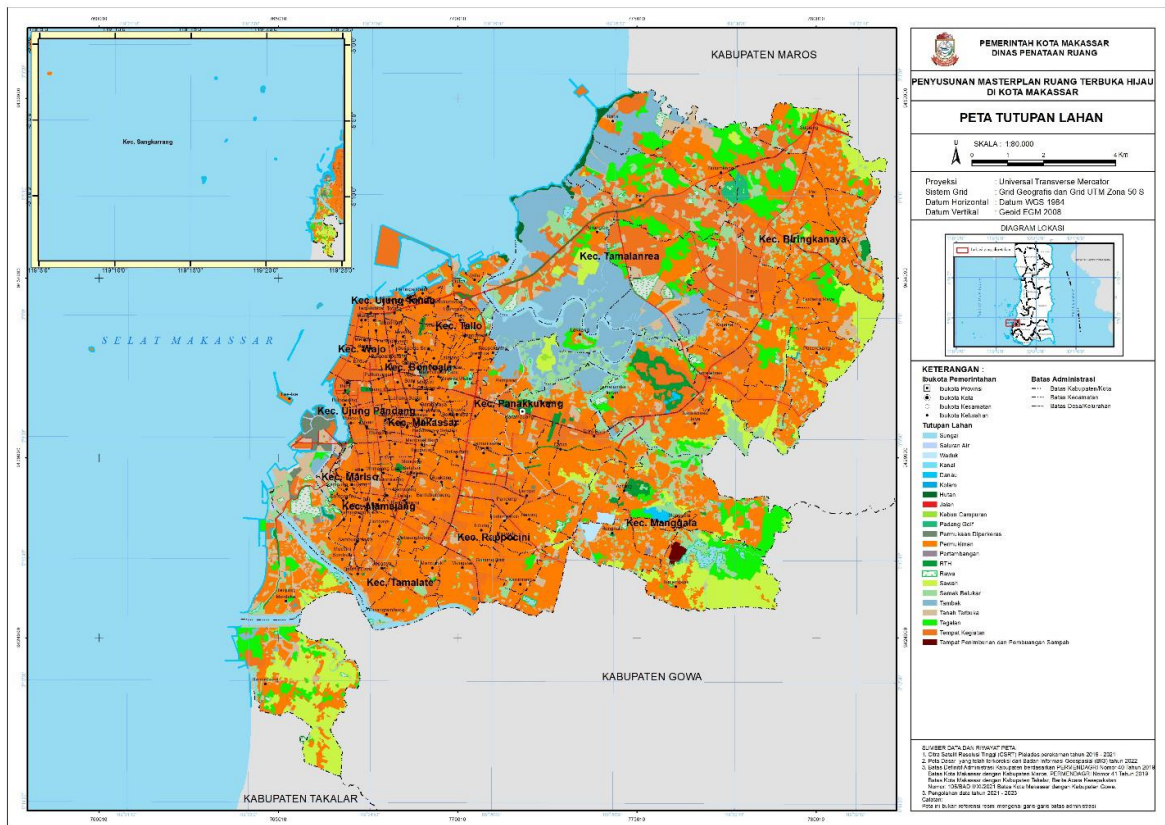


Sumber: KLHS RPJPD Kota Makassar 2025-2045

g. Pemanfaatan Lahan dan Ruang Terbuka.

Kondisi penggunaan lahan wilayah Kota Makassar sebagian besar merupakan kawasan permukiman dengan persentase mencapai 57,49% dari total luas kota. Tutupan lahan atau penggunaan lahan yang juga masih cukup besar persentasenya adalah tambak, sebagai daerah pesisir wilayah Kota Makassar dikelilingi oleh kawasan perikanan budidaya yang secara bertahap terinvansi oleh pertumbuhan fisik kota sehingga mengalami perubahan fungsi menjadi kawasan permukiman. Secara spasial penggunaan lahan di Kota Makassar yang didominasi oleh kawasan permukiman seluas 10.279 ha tersebar hampir di seluruh wilayah administrasi kota.

Gambar 2.4.
Tutupan Lahan Kota Makassar



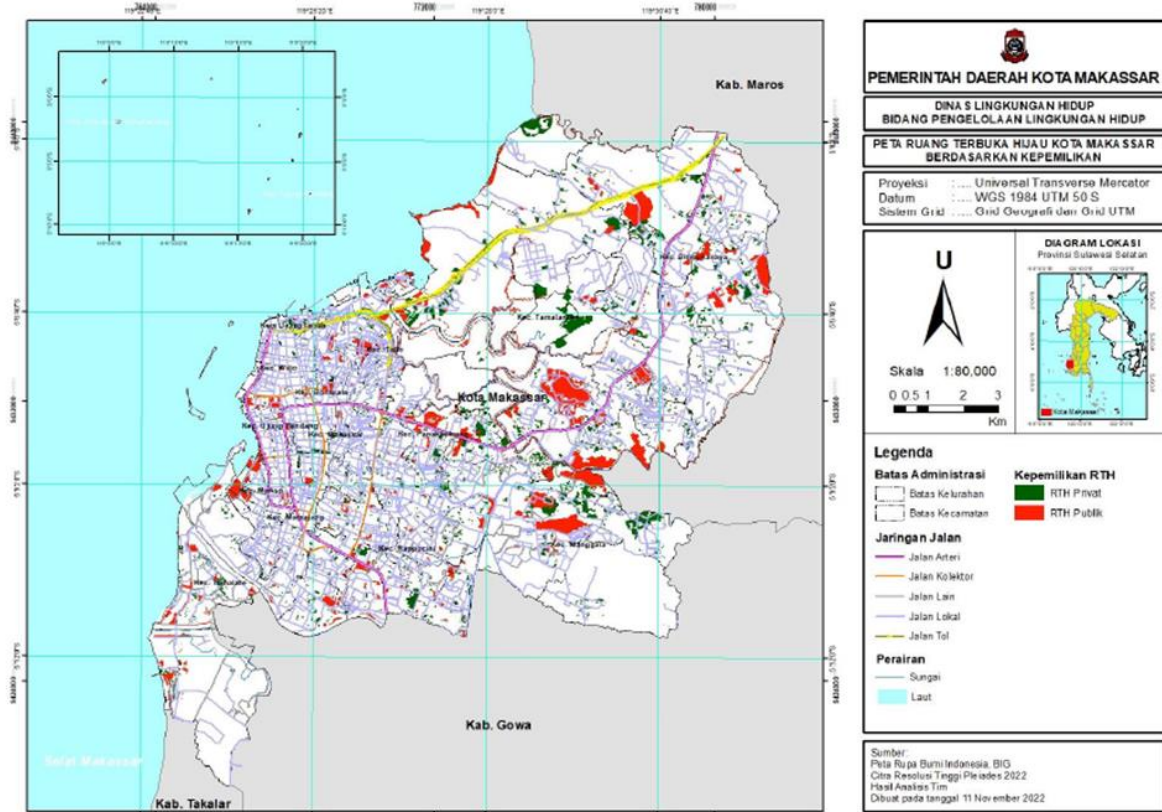
Sumber: Dokumen Materi Teknis Revisi RTRW Kota Makassar Tahun 2024-2043

Flora yang ada di Kota Makassar terbagi 2 yaitu flora yang merupakan tumbuhan lokal dan flora yang *introduced/invasive* atau bukan tumbuhan lokal. jenis flora yang merupakan kategori tumbuhan invasif seperti trembesi/ki hujan, Mahoni, Ketapang Kencana, Tabebuaya Kuning, Tabebuaya, Kingroot, Glodogan, Jati Putih, Flamboyan, Pucuk Merah, dan Palembang. Sedangkan Tumbuhan Mangrove, beberapa jenis buah seperti mangga, jambu air, belimbing manis, dan lainnya, Cenrana, Bungur, Tanjung Bintaro, Salam, Johar Dadap Merah, Kembang Merak, Kusambi dan lainnya, merupakan tumbuhan lokal.

h. Ruang Terbuka Hijau

Berdasarkan data tahun 2021, jumlah RTH Publik Kota Makassar sebesar 884,63 atau 5,03% dari luas wilayah Kota Makassar (17.577 ha). Adapun luas RTH Privat terdata sebesar 719,22 ha atau 4,09% dari luas wilayah Kota Makassar. Dengan demikian, total RTH Kota Makassar pada Tahun 2021 sejumlah 1.603,85 ha atau 9,12% dari luas wilayah Kota Makassar (Tabel 6.2). RTH Publik di Wilayah Kota Makassar terdiri dari RTH Hutan Kota (di dalamnya terdapat Hutan Mangrove), Taman, Lapangan Olah Raga, Jalur Hijau, dan Pemakaman.

Gambar 2.5.
Ruang Terbuka Hijau Kota Makassar



Sumber : Dokumen Identifikasi RTH dan IKL Kota Makassar Tahun 2022

2.1.1.3. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Hasil analisis untuk status DDLH pangan terlihat bahwa Status daya dukung pangan di Kota Makassar Belum Melampaui sebesar 11.665,30 ha dan sudah melampaui sebesar 5.897,17 ha. Status daya dukung penyedia air yang sudah melampaui seluas 13.353,89 ha, Sedangkan untuk daya dukung air yang belum melampaui seluas 4.205,58 ha. Ketersediaan air di Kota Makassar yaitu sebesar 670,07 juta m³/Tahun, dan untuk kebutuhan air total di Kota Makassar yaitu sebesar 1.478,12 juta m³/Tahun.

Tabel 2.1
Status Daya Dukung Lingkungan Hidup
Penyediaan Bahan Pangan dan Air Bersih Kota Makassar

No	Penyediaan Bahan	Status DDLH		Grand Total (ha)
		Belum Melampaui	Sudah melampaui	
1	Pangan	11665,30	5897,17	17562,47
2	Air Bersih	4205,58	13353,89	17559,46

Sumber : Dokumen KLHS RPJPD 2025-2045 Kota Makassar, Tahun 2023

Kondisi Daya Dukung Lingkungan Hidup (DDLH) di Kota Makassar didasarkan pada kemampuan lingkungan memenuhi kebutuhan makhluk hidup untuk menyediakan energi pangan dan air bersih. DDLH Pangan disajikan pada tabel berikut:

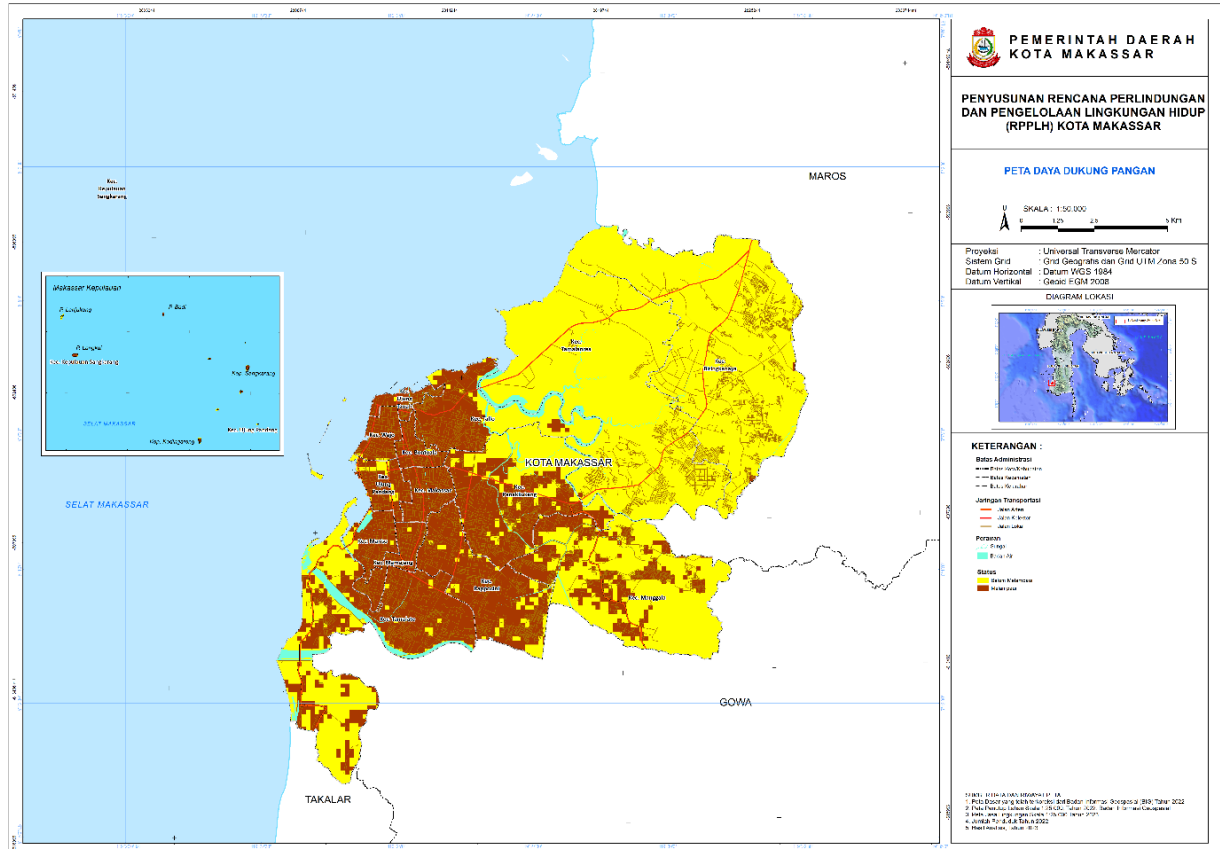
Tabel 2.2
DDLH Penyedia Pangan Kota Makassar
Berdasarkan Wilayah Kecamatan

NO.	KECAMATAN	LUAS (ha)	
		Belum Melampaui	Sudah Melampaui
1	Kecamatan Biringkanaya	3665,84	12,34
2	Kecamatan Bontoala	4,47	169,33
3	Kecamatan Kepulauan Sangkarrang	20,06	75,33
4	Kecamatan Makassar		265,36
5	Kecamatan Mamajang	2,23	248,64
6	Kecamatan Manggala	1640,05	651,42
7	Kecamatan Mariso	45,86	236,03
8	Kecamatan Panakukang	624,03	943,61
9	Kecamatan Rappocini	135,74	960,54
10	Kecamatan Tallo	384,32	577,21
11	Kecamatan Tamalanrea	3854,82	2,27
12	Kecamatan Tamalate	1203,31	1209,57
13	Kecamatan Ujung Pandang	71,47	214,61
14	Kecamatan Ujung Tanah	5,45	133,85
15	Kecamatan Wajo	7,65	197,07
TOTAL		11665,3	5897,18

Sumber: Laporan KLHS RPJPD Tahun 2025-2045

Data di atas menunjukkan bahwa pada wilayah seluas 5.897,18 ha atau 33,03% wilayah kota tersebar pada seluruh kecamatan, dimana ketersediaan energi pangan baik yang bersumber dari hasil laut, hasil pertanian dan peternakan, tidak dapat memenuhi kebutuhan penduduk dan makhluk hidup lainnya yang hidup di wilayah tersebut atau ketersediaan energi pangan sudah defisit karena kebutuhan/*demand* lebih tinggi dari ketersediaan/suplai pangan. Pada Kecamatan Bontoala, Kecamatan Makassar, Kecamatan Mamajang, Kecamatan Ujung Tanah dan Kecamatan Wajo, hampir 100% lingkungannya tidak mampu menyuplai kebutuhan pangan sehingga sangat bergantung pada pasokan dari wilayah lain, namun pada wilayah Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Manggala dan Kecamatan Tamalanrea, proporsi wilayah ketersediaan pangan lebih besar, hal tersebut didukung pada wilayah tersebut masih terdapat lahan untuk budidaya tanaman pangan dengan total luas 487,36 Ha, perikanan tambak dan peternakan.

Gambar 2.6.
Peta Status Daya Dukung Pangan di Kota Makassar



Sumber: KLHS RPJPD Kota Makassar 2025-2045

Sedangkan DDLH penyedia air yang menggambarkan ketersediaan air tanah dan air permukaan berdasarkan wilayah kecamatan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3
DDLH Penyedia Air Kota Makassar
Berdasarkan Wilayah Kecamatan

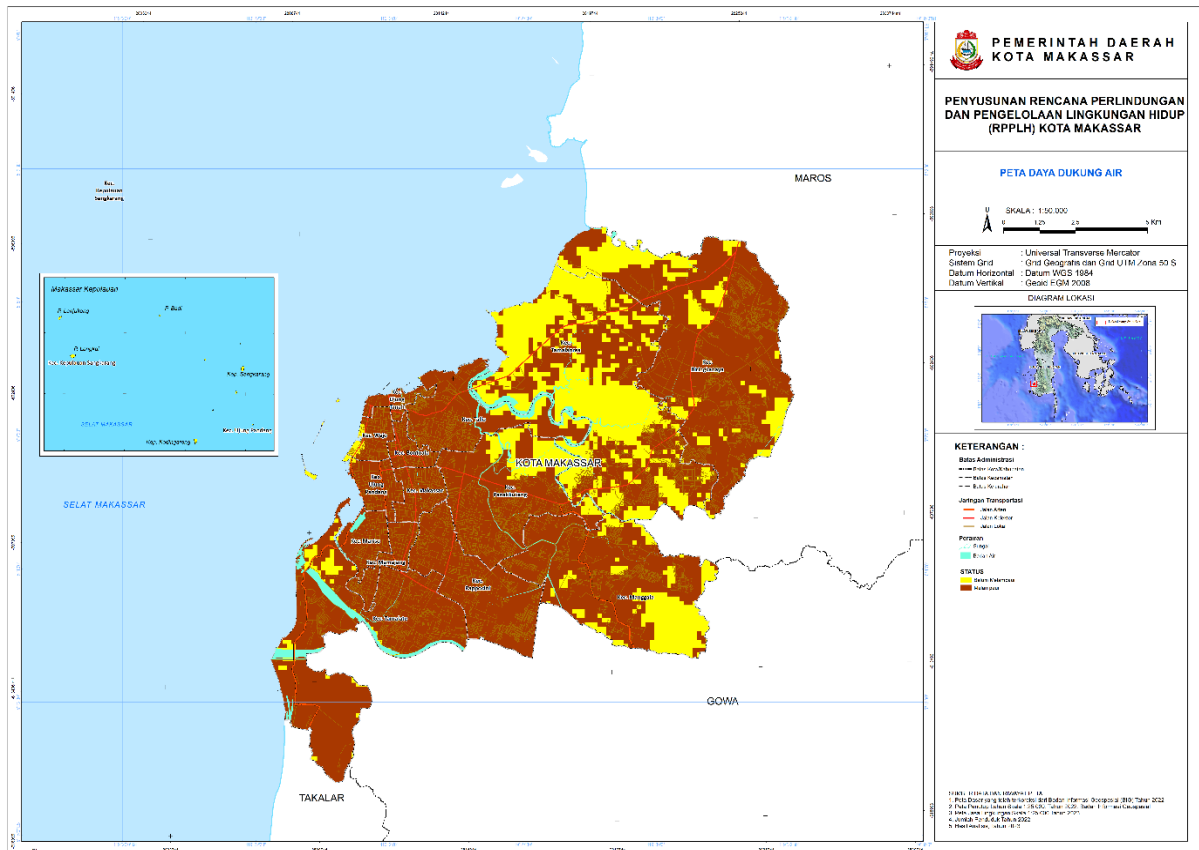
No	KECAMATAN	LUAS (ha)	
		Belum Melampaui	Sudah Melampaui
1	Kecamatan Biringkanaya	651,25	3026,92
2	Kecamatan Bontoala		173,8
3	Kecamatan Kepulauan Sangkarrang	95,39	
4	Kecamatan Makassar		265,36
5	Kecamatan Mamajang		250,87
6	Kecamatan Manggala	589,32	1702,14
7	Kecamatan Mariso	1,71	280,18
8	Kecamatan Panakukang	309,16	1258,49
9	Kecamatan Rappocini		1096,28
10	Kecamatan Tallo	125,73	835,79
11	Kecamatan Tamalanrea	2173,55	1683,53
12	Kecamatan Tamalate	199,49	2213,38
13	Kecamatan Ujung Pandang	26,39	258,21
14	Kecamatan Ujung Tanah	1,92	135,88

15	Kecamatan Wajo	31,66	173,05
TOTAL		4205,58	13353,89

Sumber : Laporan KLHS RPJPD Tahun 2025-2045

Data di atas menunjukkan bahwa pada wilayah seluas 13.353,89 ha tidak mampu lagi mendukung kebutuhan air bersih penduduk di atasnya, atau dengan kata lain kebutuhan air penduduk tidak dapat mengandalkan ketersediaan air tanah dan air permukaan, tetapi harus didukung dengan sumber air lainnya seperti sumber air perpipaan.

Gambar 2.7.
Peta Status Daya Dukung Air di Kota Makassar



Sumber: KLHS RPJPD Kota Makassar 2025-2045

Daya Tampung Lingkungan Hidup dianalisis berdasarkan potensi beban pencemar, kualitas air, daya tampung sampah dan lumpur tinja, emisi udara, polusi kebisingan, pencemaran tanah dan kerentanan terhadap bencana. Dampak kondisi-kondisi tersebut tergambar pada kualitas lingkungan hidup. Sedangkan kemampuan lingkungan dalam adaptasi dan antisipasi terhadap perubahan iklim dapat diketahui dari jasa ekosistem pengaturan iklim yang didominasi pada kelas jasa yang sangat rendah tersebar pada seluruh wilayah kecamatan dengan luas 13.113,89 ha atau 74,16% dari total luas wilayah, kemudian status rendah seluas 1.040,50 ha, status sedang seluas 3.263,05 ha, dan status tinggi seluas 144,61 ha, yang mencerminkan kerentanan yang tinggi terhadap bencana yang terkait dengan perubahan iklim.

2.1.1.4. Persentase Alih Fungsi Lahan

Berdasarkan data laju alih fungsi lahan, luas Ruang Terbuka Hijau mengalami degradasi dan penurunan secara luasan dari tahun 2015 ke tahun 2022 sebesar 53,28% dari luasan penggunaan lahan Ruang Terbuka Hijau tersebut serta menurunnya atau terjadinya alih fungsi lahan pertanian/sawah dari tahun 2015 ke tahun 2022 sebesar 104,15%, sebagai perbandingannya . . .

perbandingannya meningkatnya penggunaan lahan permukiman dari tahun 2015 ke tahun 2022 sebesar 7377,12%, serta terjadinya peningkatan sebesar 2490,37% dari penggunaan lahan lainnya/kegiatan pembangunan lainnya dari tahun 2015 ke tahun 2022.

Hal tersebut di atas diperkuat dukungan data perubahan lahan pertanian/sawah di Kota Makassar yang mengalami penurunan dan mengalami perubahan fungsi secara umum dari lahan sawah menjadi lahan terbangun, baik untuk penggunaan permukiman maupun penggunaan aktivitas lainnya, seperti pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Penggunaan Lahan Kota Makassar
Tahun 2015, Tahun 2019, Tahun 2021, Tahun 2022

No	Penggunaan Lahan	Luas Lahan (Hektare) dan Persentase Luasan (%)							
		Tahun 2015	%	Tahun 2019	%	Tahun 2021	%	Tahun 2022	%
1	DANAU	84,95106007	0,48	227,000604	1,27	33,598237	0,19	118,88299	0,67
2	HUTAN KOTA	44,52174419	0,25	35,384863	0,20	65,074198	0,37	0	0,00
3	RTH	645,6865733	3,67	418,309761	2,33	262,528751	1,48	56,94956187	0,32
4	JALAN	232,8687333	1,32	252,605727	1,41	260,514726	1,47	299,1368724	1,68
5	KEBUN CAMPURAN	1554,727614	8,84	556,447559	3,10	1105,468828	6,23	2697,515086	15,19
7	TANAH TERBUKA	528,9449197	3,01	2797,819121	15,60	1185,108714	6,68	2439,069557	13,74
8	LAUT/PASIR	116,1085544	0,66	21,564243	0,12	25,755859	0,15	9,000365771	0,05
9	PERMUKIMAN	6674,440436	37,97	5959,660227	33,22	6727,951254	37,93	7415,085859	41,76
11	RAWA	382,7371593	2,18	170,390825	0,95	302,541044	1,71	67,19760474	0,38
12	SAWAH	2797,686776	15,92	2781,160429	15,50	1245,407178	7,02	120,0654778	0,68
13	SEMAK	476,5778117	2,71	508,109300	2,83	1221,248993	6,88	0	0,00
14	SUNGAI	438,214576	2,49	328,143313	1,83	438,214576	2,47	445,4963845	2,51
15	SALURAN AIR	115,7189505	0,66	27,131308	0,15	80,916185	0,46	80,87677742	0,46
17	TAMBAK	2353,315772	13,39	283,403058	1,58	1377,809518	7,77	1429,282418	8,05
18	TPA	13,65600762	0,08	25,671524	0,14	20,180825	0,11	48,82880146	0,27
19	PENGUNAAN LAINNYA/KEGIATAN LAIN	1084,510483	6,17	3268,765038	18,22	3353,394124	18,90	2496,539871	14,06
20	WADUK	34,014991	0,19	275,938923	1,54	34,014991	0,19	33,82619384	0,19
	JUMLAH	17577	100,00	17577	100,00	17577	100,00	17577	100,00

Sumber: Bappeda Kota Makassar, Tahun 2024 (data diolah)

Berdasarkan analisa data yang diuraikan di atas umumnya dipengaruhi semakin tingginya kebutuhan lahan permukiman dan bangunan komersial lainnya dalam mendukung kebutuhan dasar manusia untuk beraktivitas secara sosial maupun untuk peningkatan perekonomian Masyarakat secara individu maupun secara korporasi.

Perubahan penggunaan lahan Kota Makassar tahun 2015 ke tahun 2022, secara umum data penggunaan lahan Ruang Terbuka Hijau dari tahun 2015 mengalami perubahan sebesar 6,188% pada tahun 2022, penggunaan lahan sawah pada tahun 2022 mengalami perubahan sebesar 28,126%, penggunaan lahan rawa pada tahun 2022 mengalami perubahan sebesar 3,314%, penggunaan lahan tambak pada tahun 2022 mengalami perubahan sebesar 9,706%. Hal ini sejalan dengan peningkatan penggunaan lahan permukiman sebesar 7,780%, penggunaan lahan lainnya/kegiatan lainnya pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 9,826%.

Tabel 2.5
Laju Alih Fungsi Lahan Kota Makassar
Tahun 2015, 2019, 2021 DAN 2022.

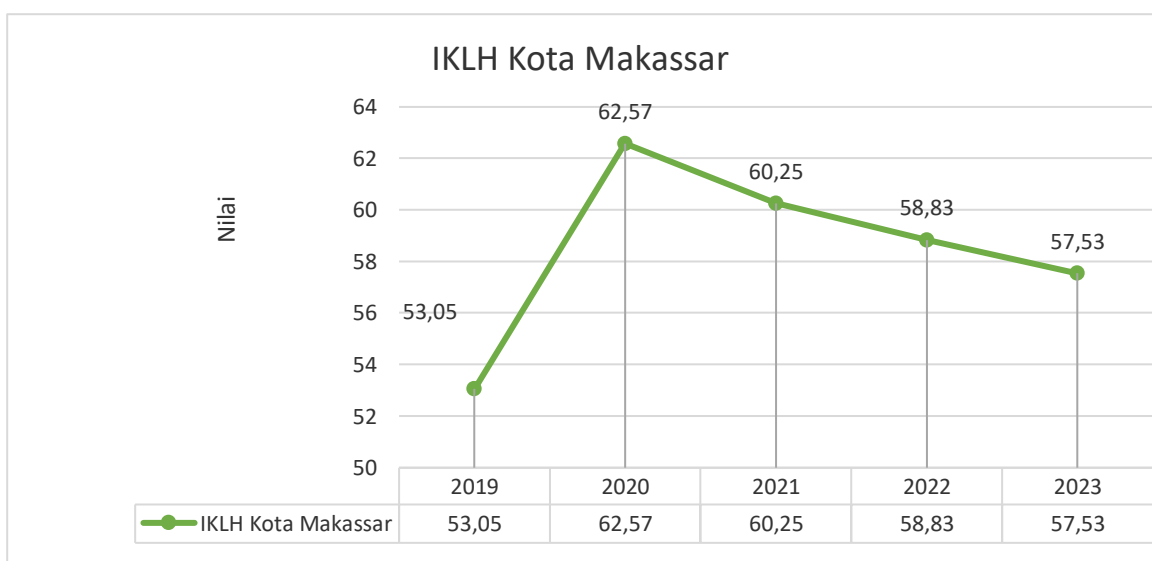
No	Penggunaan Lahan	Laju Alih Fungsi Lahan (ha)					
		Tahun 2015 Ke 2019	Tahun 2015 Ke 2021	Tahun 2015 Ke 2022	Tahun 2019 Ke 2021	Tahun 2019 Ke 2022	Tahun 2021 Ke 2022
1	DANAU	226,52	33,11	118,40	32,33	117,62	118,69
2	HUTAN KOTA	35,13	64,82	-0,25	64,88	-0,20	-0,37
3	RTH	414,64	258,86	53,28	260,20	54,62	55,47
4	JALAN	251,28	259,19	297,81	259,11	297,73	297,67
5	KEBUN CAMPURAN	547,60	1096,62	2688,67	1102,37	2694,41	2691,28
7	TANAH TERBUKA	2794,81	1182,10	2436,06	1169,51	2423,47	2432,39
8	LAUT	20,90	25,10	8,34	25,64	8,88	8,86
9	PERMUKIMAN	5921,69	6689,98	7377,12	6694,73	7381,86	7377,16
11	RAWA	168,21	300,36	65,02	301,59	66,25	65,49
12	SAWAH	2765,25	1229,49	104,15	1229,90	104,56	113,05
13	SEMAK	505,40	1218,54	-2,71	1218,42	-2,83	-6,88
14	SUNGAI	325,65	435,72	443,00	436,39	443,67	443,03
15	SALURAN AIR	26,47	80,26	80,22	80,76	80,73	80,42
17	TAMBAK	270,02	1364,42	1415,90	1376,23	1427,70	1421,52
18	TPA	25,59	20,10	48,75	20,04	48,69	48,72
19	Penggunaan Lainnya/ Kegiatan Lain	3262,60	3347,22	2490,37	3335,17	2478,32	2477,64
20	WADUK	275,75	33,82	33,63	32,48	32,29	33,63
PERUBAHAN KUMULATIF LAHAN		17577	17577	17577	17577	17577	17577

Sumber: Bappeda Kota Makassar, Tahun 2024 (data diolah)

2.1.1.5. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Makassar mencapai nilai tertinggi dalam periode 2019-2023, yaitu sebesar 62,57. Ini merupakan peningkatan dari nilai pada tahun sebelumnya, yaitu 53,05 pada tahun 2019. Namun, setelah tahun 2020, terjadi penurunan IKLH secara berturut-turut, mencapai 57,53 pada tahun 2023. Penurunan ini disebabkan karena penurunan nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL), yang dapat dilihat pada data berikut:

Grafik 2.1
Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Kota Makassar Tahun 2019 – 2023

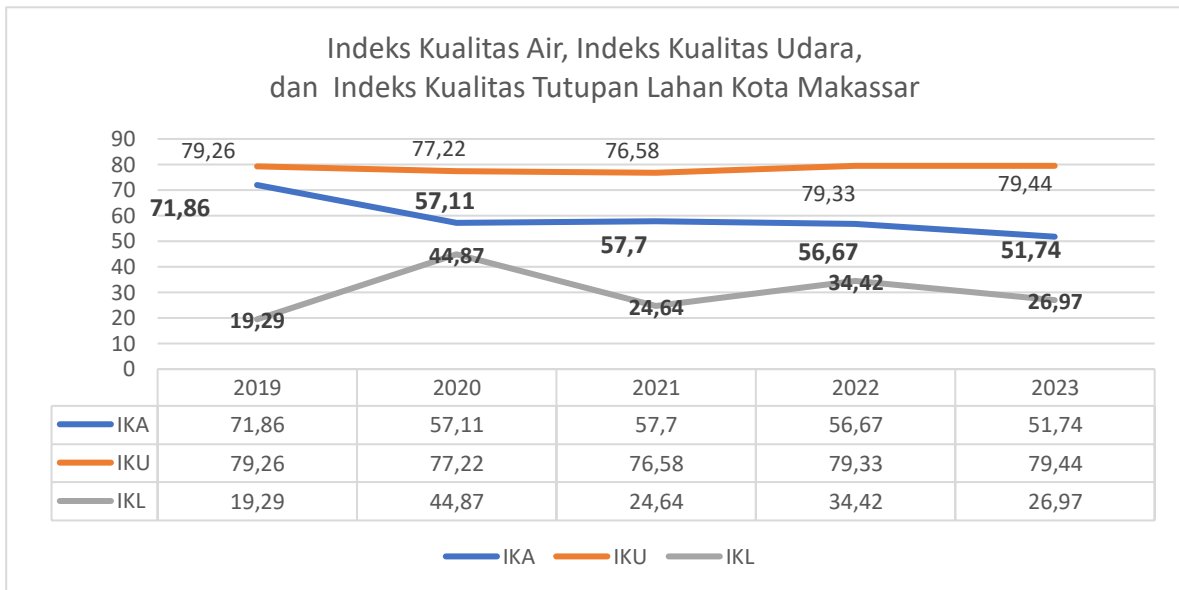


Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar

Penurunan . . .

Penurunan ini disebabkan karena penurunan nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL), yang dapat dilihat pada data berikut:

Grafik 2.2
 Nilai Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kota Makassar Tahun 2019-2023

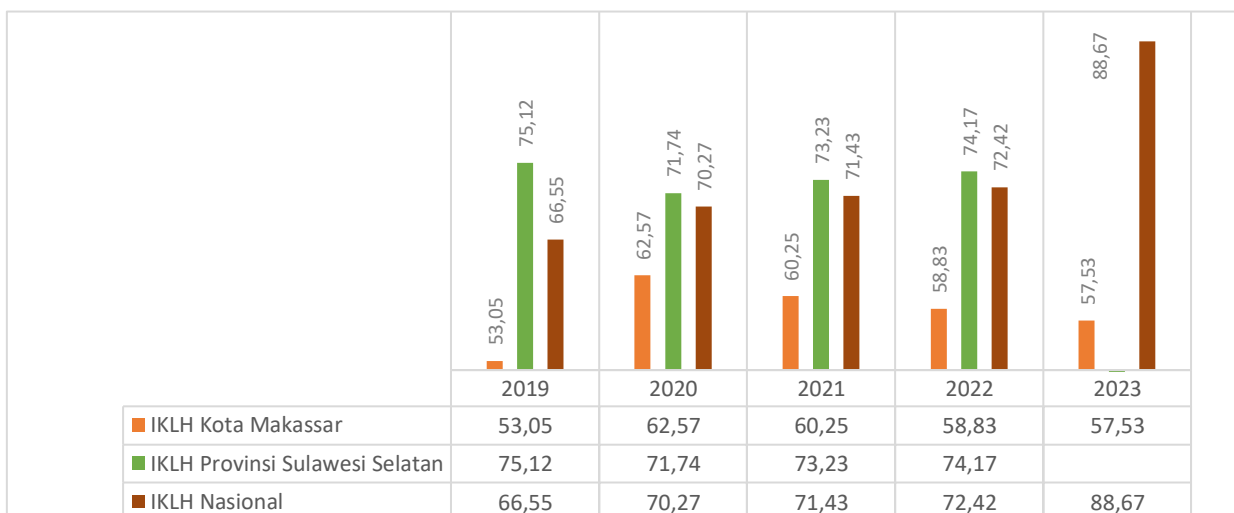


Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar Tahun 2024

Data di atas memperlihatkan indeks kualitas air dan indeks kualitas tutupan lahan mengalami penurunan yang signifikan dari tahun 2019 hingga tahun 2023. Pada tahun 2019, nilai indeks kualitas air mencapai 71,86, namun turun menjadi 51,74 pada tahun 2023. Ini menunjukkan penurunan sebesar 20,12 poin selama periode tersebut. Indeks kualitas tutupan lahan menurun dari tahun 2020 sebesar 44,87 menjadi 26,97 pada tahun 2023.

Penurunan nilai IKTL dan IKA yang mempengaruhi penurunan nilai IKLH ini terjadi antara lain karena pencemaran pada sungai/waduk di Makassar sehingga tidak memenuhi standar baku mutu, volume air pada musim kemarau berkurang sehingga konsentrasi bahan pencemar dalam air meningkat, dan masih minimnya ruang terbuka hijau.

Grafik 2.3
 Posisi relatif Nilai IKLH Kota Makassar terhadap IKLH Provinsi Sulawesi Selatan dan IKLH Nasional Tahun 2019 – 2023



Sumber: Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045, RKPD Provinsi Sulsel 2024, dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, 2024

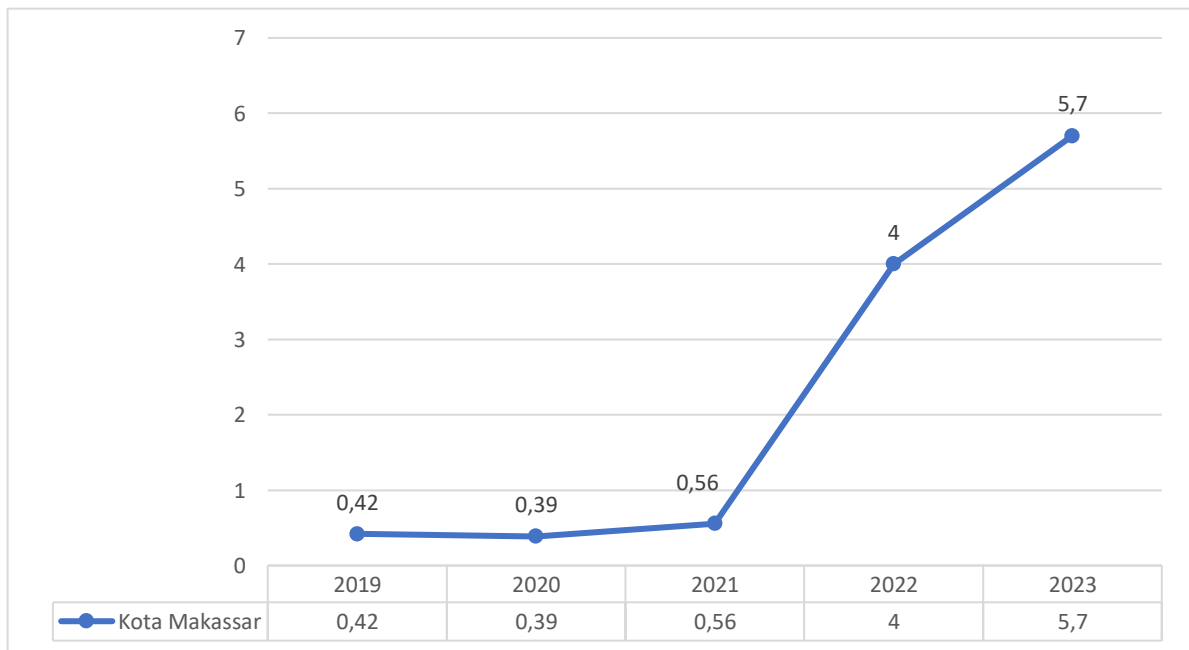
Posisi relatif nilai IKLH Kota Makassar terus berada di bawah rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan dan nasional sepanjang periode 5 tahun terakhir dan mengalami penurunan dari tahun 2020 sampai 2023, sementara nilai IKLH Provinsi Sulawesi Selatan dan nasional menunjukkan peningkatan yang stabil.

2.1.1.6. Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Aman

Pada tahun 2019, hanya 0,42% rumah tangga yang memiliki akses sanitasi aman di Kota Makassar, angka ini menurun menjadi 0,39% pada tahun 2020, namun mulai tahun 2021, terjadi perubahan positif dengan persentase meningkat menjadi 0,56%. Pada tahun 2022, persentase rumah tangga dengan akses sanitasi aman melonjak menjadi 4%, dan terus meningkat menjadi 5,7% pada tahun 2023. Tren perkembangan akses sanitasi aman di Kota Makassar, berikut ini ditampilkan grafik yang menggambarkan perubahan persentase rumah tangga dengan akses sanitasi aman dari tahun 2019 hingga 2023.

Meskipun persentase rumah tangga dengan akses sanitasi aman di Kota Makassar meningkat dari 0,42% pada tahun 2019 menjadi 5,7% pada tahun 2023, angka ini masih tergolong rendah, terutama disebabkan oleh frekuensi penyedotan tangki septik yang tidak memadai. Selain itu, kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Antang yang terbatas menghambat pengolahan limbah secara efektif. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Losari, diharapkan akan meningkatnya kapasitas pengolahan limbah domestik yang pada akhirnya dapat meningkatkan rumah tangga yang memiliki akses sanitasi aman.

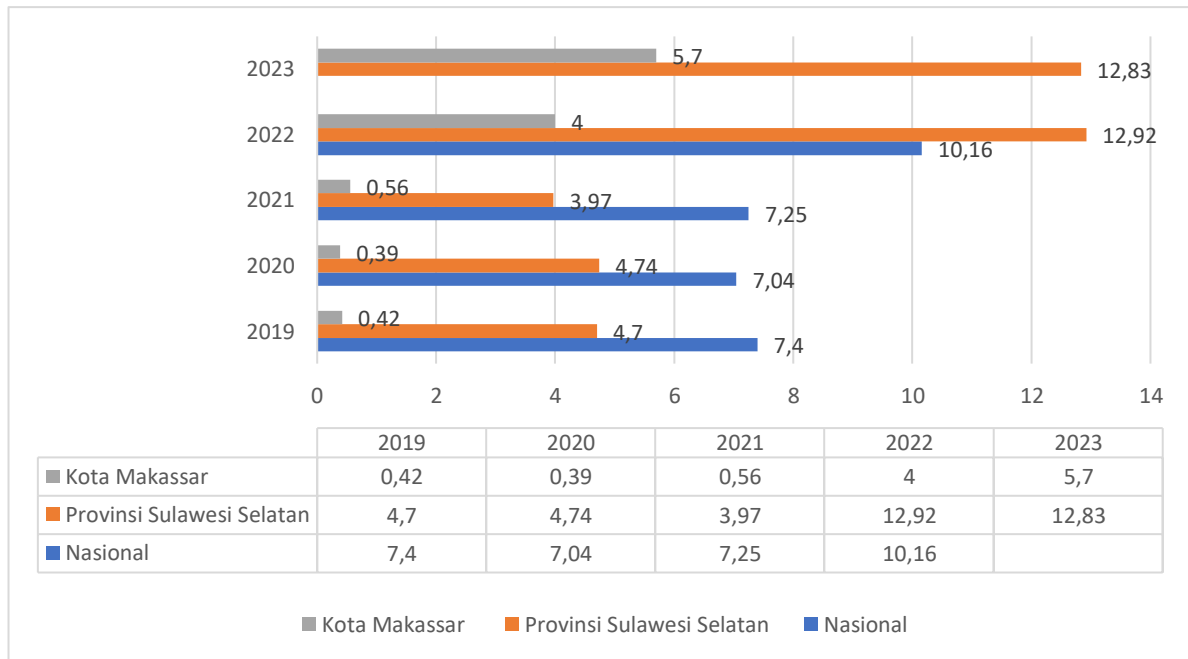
Grafik 2.4
Akses Sanitasi Aman
Kota Makassar Tahun 2019 - 2023



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar Tahun 2024

Berikut ini adalah grafik perbandingan akses sanitasi aman antara Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dan nasional. Data yang tersaji menjelaskan posisi relatif Kota Makassar dalam konteks sanitasi aman dibandingkan dengan tingkat provinsi dan nasional.

Grafik 2.5
Posisi Relatif Akses Sanitasi Aman Kota Makassar terhadap Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional



Sumber: Dinas PU Kota Makassar, RPJPN, RPJPD Sulsel

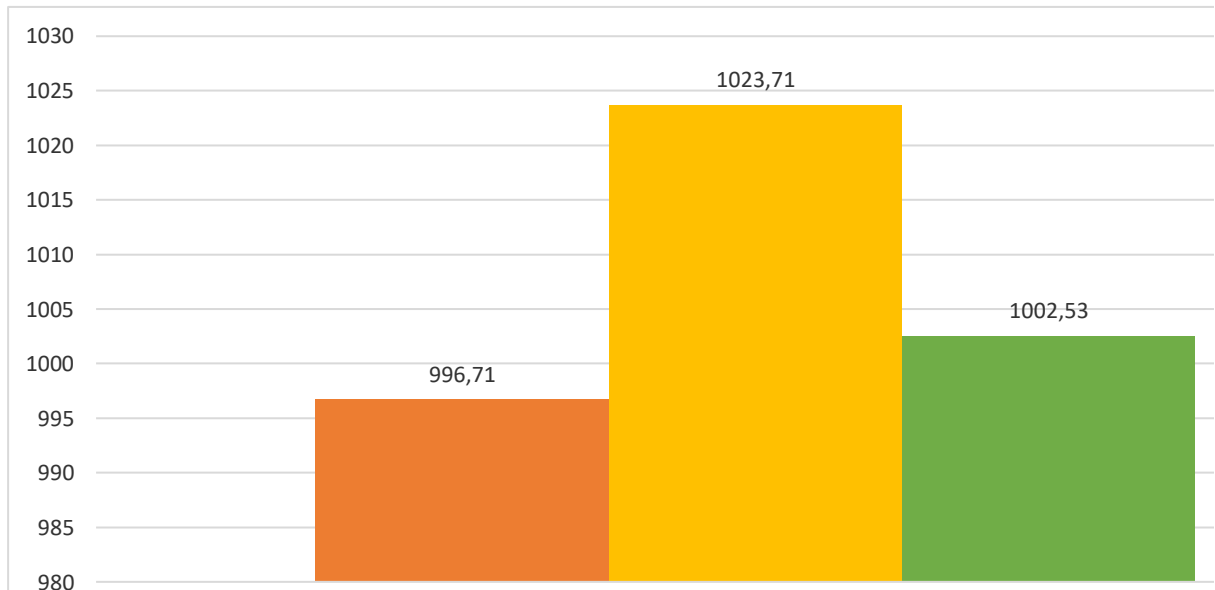
Pada tahun 2019, akses sanitasi aman di Provinsi Sulawesi Selatan adalah 4,7%. tahun 2020 meningkat menjadi 4,74%, tahun 2021 menunjukkan penurunan menjadi 3,97%, kemudian, terjadi lonjakan yang cukup besar pada tahun 2022 menjadi 12,92% dan 12,83% pada tahun 2023. Pada tahun 2019, akses sanitasi aman secara nasional adalah 7,4%, tahun 2020 menunjukkan penurunan ke 7,04%, namun pada tahun 2021, ada sedikit peningkatan menjadi 7,25%, terjadi kembali lonjakan signifikan pada tahun 2022 menjadi 10,16%.

Kota Makassar menunjukkan capaian yang jauh di bawah Provinsi Sulawesi Selatan dan rata-rata nasional dalam hal akses sanitasi aman sepanjang periode 2019-2023. Meskipun terjadi peningkatan pada tahun 2021-2023, namun masih terdapat kesenjangan yang signifikan antara capaian Kota Makassar dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan nasional. Ada kebutuhan yang sangat mendesak bagi Kota Makassar untuk meningkatkan akses sanitasi amannya agar dapat mengejar posisi yang lebih baik dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan rata-rata nasional.

2.1.1.7. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengelolaan Sampah

Timbulan sampah harian di Kota Makassar mengalami peningkatan dari tahun 2020 ke tahun 2021. Tahun 2020, volume timbulan sampah harian sebesar 996,71 Ton, tahun 2022, volume timbulan sampah harian meningkat menjadi 1023,71 Ton, kemudian tahun 2022 terjadi penurunan timbulan sampah menjadi 1002,53 Ton. Gambaran mengenai timbulan sampah di Kota Makassar ditunjukkan melalui grafik volume timbulan sampah harian dari tahun 2020 hingga 2022. Grafik ini menunjukkan perubahan jumlah sampah yang dihasilkan setiap hari selama periode tersebut:

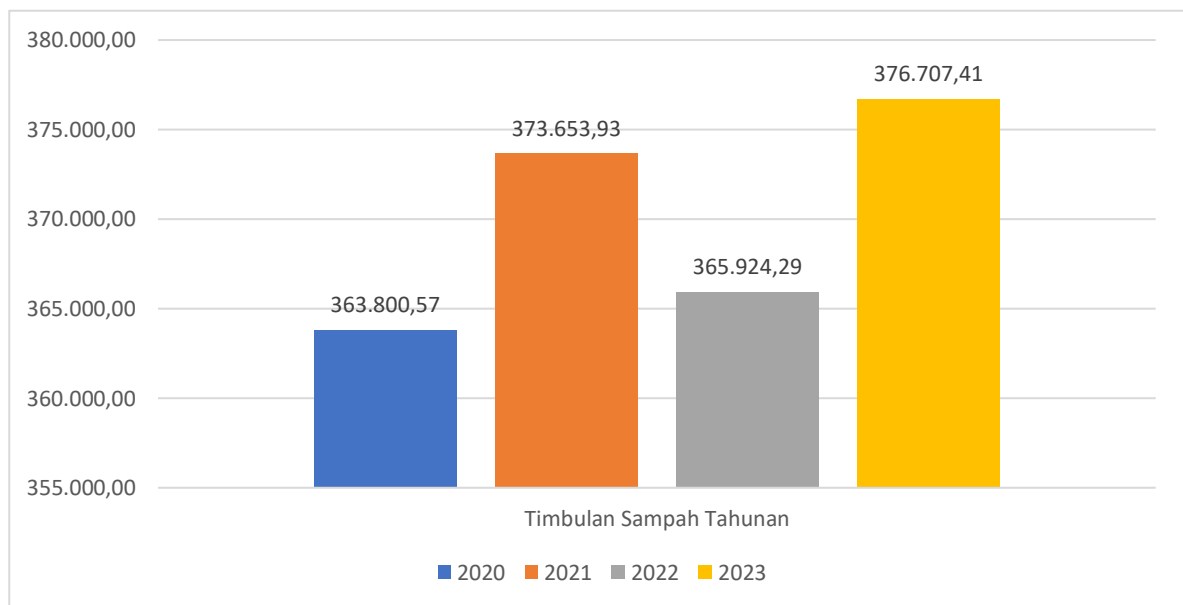
Grafik 2.6
Timbulan Sampah Harian (Ton) Kota Makassar Tahun 2020-2022



Sumber : Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, 2024

Berikut adalah grafik yang menunjukkan data timbulan sampah tahunan di Kota Makassar dari tahun 2020 sampai tahun 2023:

Grafik 2.7
Timbulan Sampah Tahunan (Ton)
Kota Makassar Tahun 2020-2022



Sumber: Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, 2024

Timbulan sampah tahunan di Kota Makassar menunjukkan fluktuasi dari tahun 2020 hingga 2023. Pada tahun 2020, volume timbulan sampah tercatat sebesar 363.800,57 ton. Angka ini meningkat menjadi 373.653,93 ton pada tahun 2021, sebelum mengalami penurunan menjadi 365.924,29 ton di tahun 2022. Pada tahun 2023, volume timbulan sampah kembali mengalami lonjakan, mencapai 376.707,41 ton. Persentase timbulan sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah di Kota Makassar disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.6
Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah
Kota Makassar Tahun 2020-2023

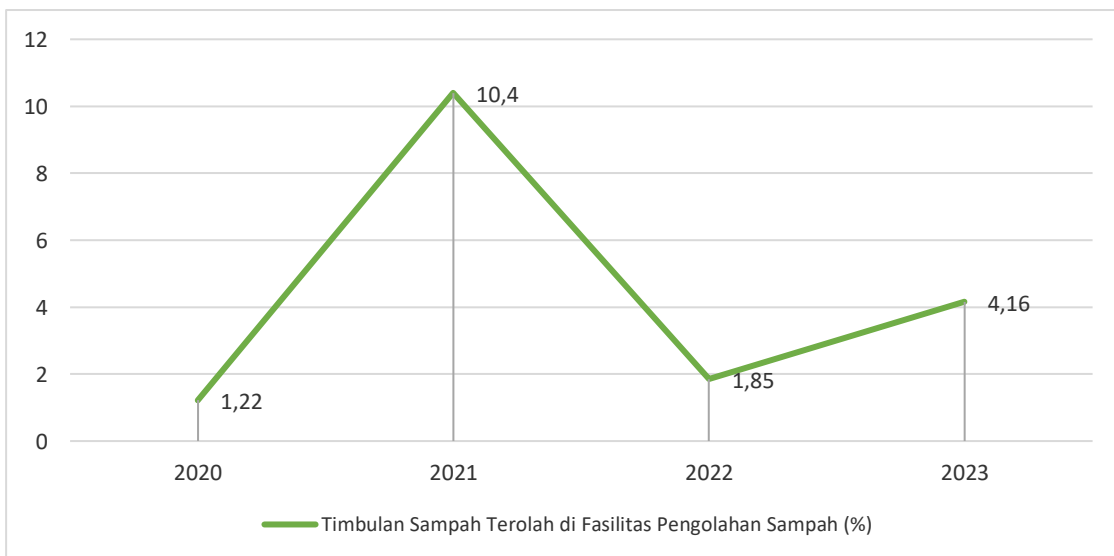
Tahun	Timbulan Sampah Tahunan (Ton/Tahun)	Pengurangan Sampah Tahunan (Ton/Tahun)	% Pengurangan Sampah	Penanganan Sampah Tahunan (Ton/Tahun)	% Penanganan Sampah	Sampah Terkelola Tahunan (Ton/Tahun)	Sampah Masuk TPA (Ton/Tahun)	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah(%)
	a	b	c	d	e	f = b+d	g	$h = (f-g)/a*100$
2020	363.800,57	4.456,19	1,22	255.784,71	70,31	260.240,90	255.784,71	1,22
2021	373.653,93	38.865,22	10,40	328.500,00	87,92	367.365,22	328.500,00	10,40
2022	365.924,29	6.766,44	1,85	274.912,30	75,13	281.678,74	274.912,30	1,85
2023	376.707,41	15.645,29	4,15	313.855,17	83,32	329.500,46	313.826,10	4,16

Sumber : Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, 2024

Secara keseluruhan, data pada tabel menunjukkan adanya kemajuan dalam pengelolaan sampah di Kota Makassar pada tahun 2021, dengan timbulan sampah mencapai 373.653,93 ton dan persentase pengurangan sampah yang signifikan sebesar 10,40%. Pada tahun tersebut, penanganan sampah juga mencapai angka tertinggi, yaitu 328.500,00 ton, dengan persentase penanganan sampah sebesar 87,92%. Namun, di tahun-tahun berikutnya, Kota Makassar menghadapi tantangan dalam pengelolaan sampah. Pada tahun 2022, timbulan sampah sedikit menurun menjadi 365.924,29 ton, tetapi persentase pengurangan sampah turun menjadi 1,85%, dan penanganan sampah juga menurun menjadi 274.912,30 ton dengan persentase penanganan sampah sebesar 75,13%. Tahun 2023 menunjukkan timbulan sampah kembali meningkat menjadi 376.707,41 ton, dengan pengurangan sampah mencapai 4,15% dan penanganan sampah meningkat menjadi 313.855,17 ton, dengan persentase penanganan sampah sebesar 83,32%. Fluktuasi ini mengindikasikan perlunya evaluasi berkelanjutan serta penyesuaian kebijakan untuk mengatasi pertumbuhan volume sampah dan meningkatkan efektivitas sistem pengelolaan sampah.

Capaian timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah Kota Makassar menunjukkan fluktuasi selama periode 2020 hingga 2023. Grafik berikut ini memberikan ilustrasi lebih rinci terkait hal tersebut.

Grafik 2.8
Persentase Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah
Kota Makassar Tahun 2020-2023



Sumber : Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, 2024

Pada tahun 2020, persentase timbunan sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah mencapai 1,22%, mencerminkan pengolahan yang masih sangat terbatas dari total sampah yang dihasilkan. Peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2021, dengan persentase terolah melonjak menjadi 10,40%. Namun, pada tahun 2022, persentase ini turun kembali menjadi 1,85%. Pada tahun 2023 terjadi pemulihan dengan persentase mencapai 4,16%. Meskipun angka ini belum menyamai capaian tahun 2021, kenaikan dari tahun 2022 menunjukkan adanya upaya perbaikan dalam pengelolaan sampah.

2.1.1.8. Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Pengumpulan Sampah

Terjadi peningkatan jumlah rumah tangga yang signifikan dari tahun 2021 hingga 2023. Tahun 2021 323,275 rumah tangga, tahun 2022, 324,310 rumah tangga, tahun 2023 448,909 rumah tangga. Meskipun begitu, pada tahun 2021, 2022, dan 2023, proporsi rumah tangga dengan layanan pengumpulan sampah di Kota Makassar adalah 100%. Artinya, seluruh rumah tangga di Kota Makassar pada tahun-tahun tersebut dilayani oleh layanan pengumpulan sampah. Proporsi rumah tangga dengan layanan pengumpulan sampah di Kota Makassar tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 2.7
Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Pengumpulan

Tahun	Jumlah Rumah Tangga	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Pengumpulan Sampah	Proporsi RT Dengan Layanan Pengumpulan Sampah (%)
2021	323.275	323.275	100
2022	324.310	324.310	100
2023	363.739	363.739	100

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, 2024

Walaupun proporsi rumah tangga yang dilayani oleh pengumpulan sampah di Kota Makassar mencapai 100% dari tahun 2021 hingga 2023, namun keterbatasan armada pengangkut sampah bisa menjadi masalah yang perlu diperhatikan karena pengangkutan sampah tidak bisa dilakukan setiap hari. Keterbatasan armada pengangkut sampah bisa mengakibatkan penumpukan sampah di beberapa area atau keterlambatan pengangkutan sampah dari rumah tangga tetap perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sampah seperti meningkatkan efisiensi rute pengumpulan sampah, menerapkan jadwal pengangkutan yang lebih fleksibel, dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya manajemen sampah yang baik agar dapat mengatasi tantangan seperti kekurangan armada pengangkut sampah.

2.1.1.9. Ketahanan Energi/Konsumsi Listrik Per Kapita (KwH)

Konsumsi listrik per kapita Kota Makassar terus meningkat sejak tahun 2017. Tercatat pada tahun 2023 realisasi konsumsi listrik di ibukota Provinsi Sulawesi Selatan ini mencapai 1565 KwH, meningkat dari 1327 KwH pada tahun 2017. Peningkatan penggunaan listrik di Kota Makassar ini tersaji pada tabel dan grafik dibawah ini:

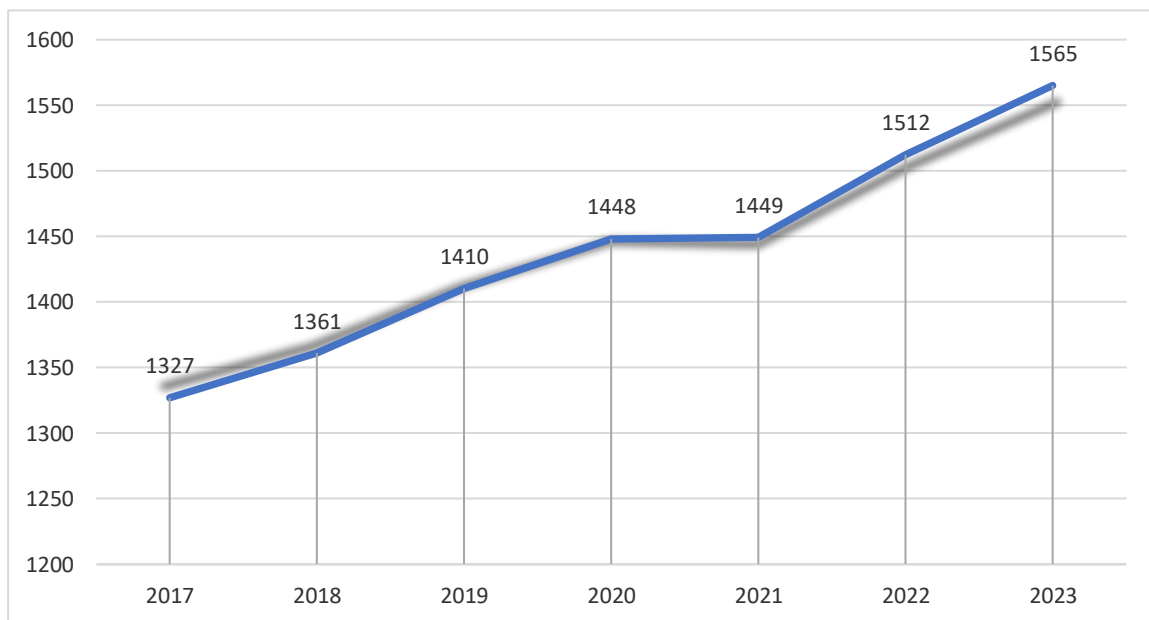
Tabel 2.8
Konsumsi Energi Listrik Per Kapita Kota Makassar Tahun 2017 – 2023

Tahun	Jumlah Pelanggan Listrik	Jumlah Konsumsi Listrik (KwH)	Jumlah Penduduk Kota Makassar	Konsumsi Energi Listrik Per Kapita (KwH)
2017	380.682	1.975.209.425	1.489.011	1.327
2018	401.214	2.052.368.047	1.508.154	1.361
2019	419.286	2.152.778.551	1.526.700	1.410
2020	436.025	2.061.776.972	1.423.900	1.448
2021	454.024	2.068.857.108	1.427.600	1.449
2022	471.668	2.166.084.834	1.432.189	1.512
2023	491.960	2.307.357.680	1.474.393	1.565

Sumber : Buku Statistik PLN IUD Sulselrabar, 2024

Rata-rata kenaikan konsumsi energi listrik per tahun dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun adalah sekitar 40,3 KwH/tahun, Tergambar pada grafik di atas, dari 1327 KwH di tahun 2017, meningkat menjadi 1448 Kwh pada tahun 2020, seiring dengan penambahan jumlah penduduk.

Grafik 2.9
Perkembangan Konsumsi Energi Listrik Per Kapita Kota Makassar



Sumber : Buku Statistik PLN IUD Sulselrabar, 2024

Pemadaman listrik yang terjadi di Kota Makassar pada tahun 2023 saat terdampak El Nino disebabkan oleh kelebihan permintaan energi dibandingkan dengan kapasitas pasokan yang tersedia. Dalam situasi ini, kapasitas pasokan energi hanya mencapai 200 Megawatt, dibanding sebelum El Nino sebesar 850 Megawatt, sementara permintaan energi dari masyarakat dan industri jauh melebihi angka tersebut. Kekeringan menyebabkan penurunan debit air di sungai dan waduk, yang mengurangi kemampuan pembangkit hidroelektrik untuk menghasilkan listrik.

2.1.1.10. Ketahanan Air/Kapasitas Air Baku (m³/detik)

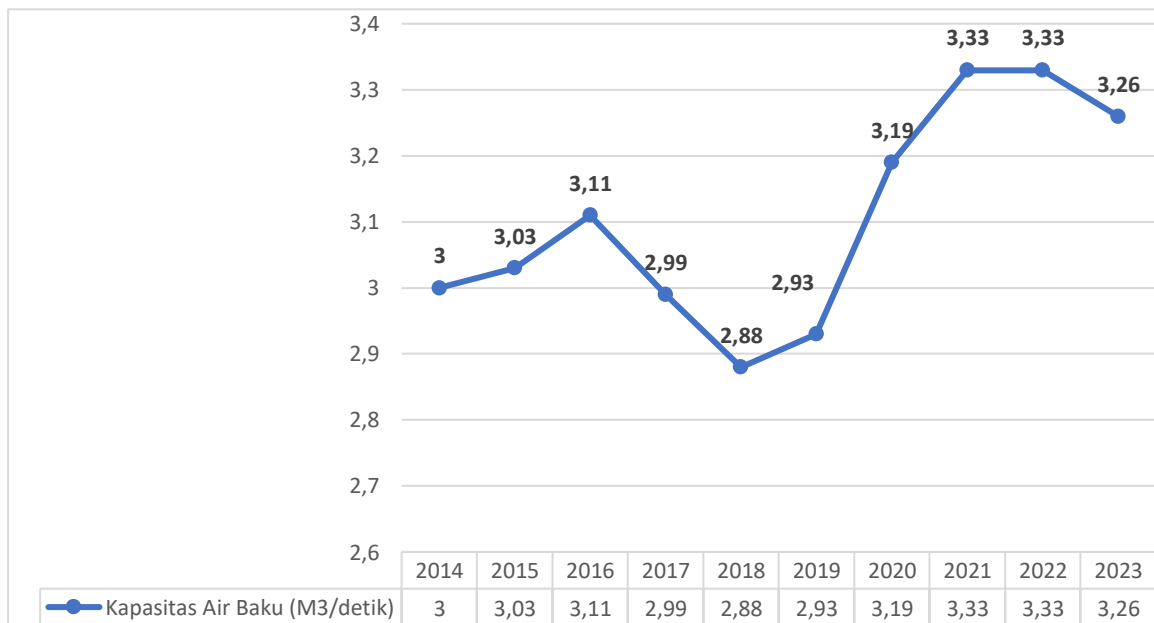
Terdapat 5 (lima) instalasi pengolahan air (IPA) yang untuk memenuhi kebutuhan air bagi penduduk Kota Makassar. Gambaran selengkapnya Kapasitas air baku dan air bersih yang disalurkan disajikan pada tabel dan grafik berikut:

Tabel 2.9
Kapasitas Air Baku Kota Makassar Tahun 2014 – 2023

TAHUN	IPA 1 Ratulangi	IPA 2 Panaikang	IPA 3 Antang	IPA 4 Maccini Sombala	IPA 5 Somba Opu	TOTAL(m ³)	Total (m ³ /detik)
2014	555.556,97	39.994.411,00	2.754.178,00	5.989.280,00	45.287.413,00	94.580.838,97	3,00
2015	918.355,80	39.887.368,00	2.686.004,00	7.342.559,00	44.785.777,00	95.620.063,8	3,03
2016	1.300.290,52	43.543.402,00	2.898.980,00	7.082.957,00	43.437.188,00	98.262.817,52	3,11
2017	1.268.761,53	39.140.405,00	3.026.088,00	9.632.554,00	41.291.357,00	94.359.163,53	2,99
2018	1.153.419,58	37.581.842,00	3.050.326,00	6.101.220,00	42.637.689,00	90.770.339,12	2,88
2019	1.477.046,20	37.070.085,00	2.889.605,00	5.576.210,00	45.459.858,00	92.472.804,2	2,93
2020	1.511.120,50	39.021.891,00	3.400.299,00	9.951.657,00	47.098.958,00	100.983.928	3,19
2021	1.508.560,17	41.935.121,00	3.456.804,00	10.283.589,00	47.873.821,00	105.057.895,2	3,33
2022	1.698.667,00	39.824.415,00	4.801.618,00	9.900.555,00	48.830.801,00	105.056.056	3,33
2023	1.373.290,00	34.303.285,00	4.421.843,00	10.659.329,00	51.992.691,00	102.750.438	3,26

Sumber : PDAM Kota Makassar, Tahun 2024

Grafik 2.10
Kapasitas Air Baku Kota Makassar Tahun 2014 – 2023



Sumber : PDAM Kota Makassar, Tahun 2023

Terlihat pada data yang disajikan, terjadi variasi atau perubahan dalam kapasitas air baku per detik selama periode 2014-2023. Dari tahun 2014 hingga 2016, terjadi peningkatan yang relatif stabil dari 3,00 m³/detik pada tahun 2014 menjadi 3,11 m³/detik pada tahun 2016. Ini menunjukkan peningkatan yang bertahap dalam kapasitas air baku selama periode tersebut. Namun, dari tahun 2016 hingga 2018, terjadi penurunan yang cukup tajam dari 3,11 m³/detik pada tahun 2016 menjadi 2,88 M3/detik pada tahun 2018. Ini menunjukkan adanya penurunan signifikan dalam kapasitas air baku selama periode tersebut. Setelah tahun 2018, terjadi fluktuasi yang lebih besar dalam . . .

dalam kapasitas air baku. Meskipun terdapat peningkatan kecil pada tahun 2019 (2,93 m³/detik), peningkatan yang lebih signifikan terjadi pada tahun 2020 (3,19 m³/detik), diikuti oleh peningkatan yang lebih besar lagi pada tahun 2021 (3,33 m³/detik). Pada tahun 2022, kapasitas air baku tetap stabil pada 3,33 m³/detik, tetapi kemudian mengalami penurunan ke 3,26 m³/detik pada tahun 2023.

Fluktuasi ketersediaan air baku dari tahun ke tahun terjadi karena kondisi iklim yang mempengaruhi ketersediaan air di sumber air baku Kota Makassar yaitu Sungai Jeneberang dan Sungai Maros/Waduk Lekopancing. Kekeringan tahun 2023 di Kota Makassar sehingga terjadi penurunan suplai air baku ke PDAM, sehingga PDAM perlu melakukan tindakan manajemen mitigasi dengan melakukan pembatasan air kepada pelanggan berupa pembatasan waktu penggunaan air, pengurangan tekanan air dan penghentian suplai air di beberapa wilayah.

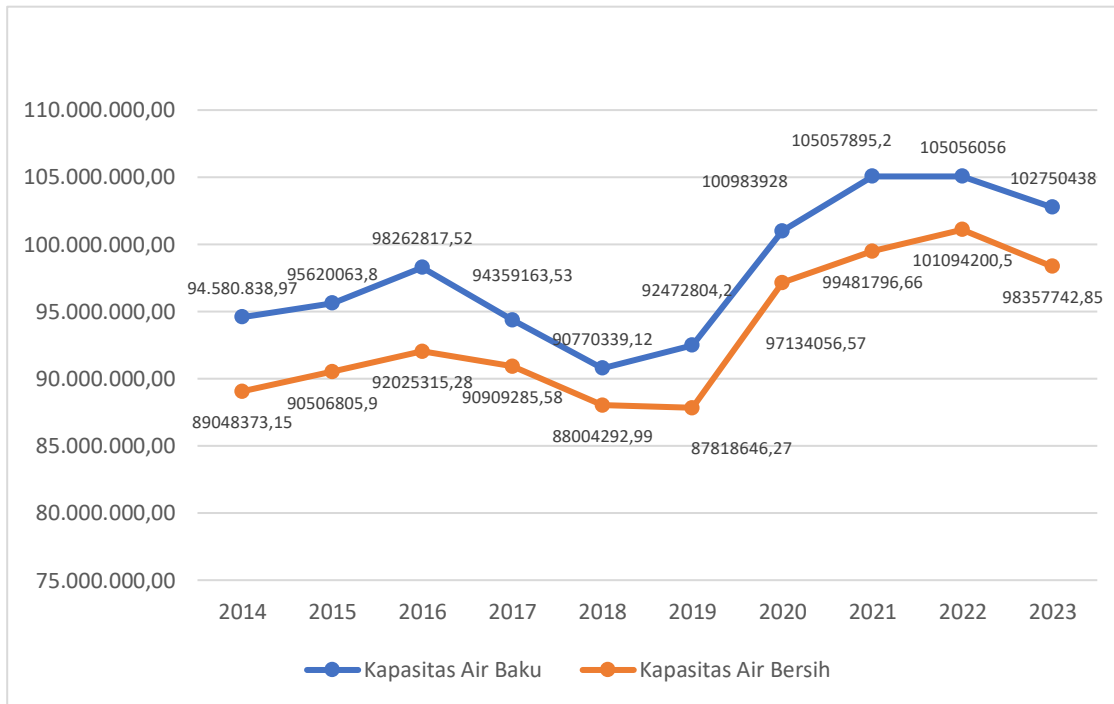
Tabel 2.10
Kapasitas Air Bersih Kota Makassar (m³) Tahun 2014 – 2023

TAHUN	IPA 1	IPA 2	IPA 3	IPA 4	IPA 5	TOTAL (m ³)	Total (m ³ /detik)
2014	505.051,7	38.253.064,37	2.631.532,00	5.746.421,00	41.912.304,00	89.048.373,15	2,82
2015	834.868,90	37.563.770,00	2.557.982,00	7.078.346,00	42.471.839,00	90.506.805,9	2,87
2016	1.182.082,28	39.435.478,00	2.762.218,00	6.948.542,00	41.696.995,00	92.025.315,28	2,91
2017	1.153.419,58	37.820.592,00	2.881.986,00	9.370.779,00	39.682.509,00	90.909.285,58	2,88
2018	1.272.056,47	37.042.785,00	2.903.451,00	6.001.295,00	40.784.705,52	88.004.292,99	2,79
2019	1.342.769,27	34.874.724,00	2.751.899,00	5.472.217,00	43.377.037,00	87.818.646,27	2,78
2020	1.420.829,57	37.538.259,00	3.211.427,00	9.501.144,00	45.462.397,00	97.134.056,57	3,07
2021	1.174.026,66	38.953.808,00	3.198.466,00	9.574.352,00	46.581.144,00	99.481.796,66	3,15
2022	1.519.874,54	39.426.151,00	4.257.027,00	8.876.857,00	47.014.291,00	101.094.200,5	3,21
2023	1.223.578,85	33.662.816,00	4.157.881,00	9.392.948,00	49.920.519,00	98.357.742,85	3,12

Sumber : PDAM Kota Makassar, Tahun 2024

Kapasitas air bersih di Kota Makassar mengalami fluktuasi selama periode 2014-2023. Dari tahun 2014 hingga 2016, terjadi peningkatan yang relatif stabil dari 2,82 m³/detik pada tahun 2014 menjadi 2,91 m³/detik pada tahun 2016. Ini menunjukkan peningkatan bertahap dalam kapasitas air bersih selama periode tersebut. Namun, dari tahun 2016 hingga 2019, terjadi penurunan yang cukup signifikan dari 2,91 m³/detik pada tahun 2016 menjadi 2,78 m³/detik pada tahun 2019. Ini menunjukkan adanya penurunan yang signifikan dalam kapasitas air bersih selama periode tersebut. Setelah tahun 2019, terjadi fluktuasi yang lebih besar dalam kapasitas air bersih. Meskipun terdapat peningkatan kecil pada tahun 2020 (3,07 m³/detik), peningkatan yang lebih signifikan terjadi pada tahun 2021 (3,15 m³/detik), diikuti oleh peningkatan yang lebih besar lagi pada tahun 2022 (3,21). Namun, pada tahun 2023, kapasitas air bersih mengalami penurunan ke 3,12 m³/detik.

Grafik 2.11
Kapasitas Air Baku dan Air Bersih m³ per tahun
Kota Makassar Tahun 2014 – 2023



Sumber : PDAM Kota Makassar, Tahun 2024

Berdasarkan grafik di atas, terlihat bahwa air baku Kota Makassar mengalami fluktuasi selama beberapa tahun terakhir. Tahun 2014 kapasitas air baku sebesar 94.580.838,97 m³, tahun 2016 terjadi peningkatan menjadi 98.262.817,52 m³, tahun 2017 kapasitas menurun menjadi 94.359.163,53 m³, tahun 2018 terjadi penurunan lebih lanjut menjadi 90.770.339,12 m³. Perubahan kapasitas air baku dari tahun 2019 hingga 2021 menunjukkan peningkatan yang signifikan sebelum mengalami penurunan kembali pada tahun 2021 menjadi 102.750.438 m³

2.1.1.11. Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan

Berdasarkan data SIM Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), hingga tahun 2023, Kota Makassar memiliki 174.586 sambungan rumah (SR) yang terakses air minum perpipaan, dengan total 123 sarana, terdiri dari PDAM dengan 5 Instalasi Pengolahan Air (IPA) serta 122 sarana PAMSIMAS dan non-PAMSIMAS. Dari total sarana tersebut, 91 sarana telah melalui pengawasan kualitas air minum, dan 73 diantaranya memenuhi syarat kualitas air minum, meliputi 103.616 SR sehingga yang dikategorikan akses rumah tangga terhadap air siap minum perpipaan mencapai 28,49%. Meskipun sejumlah sarana memenuhi standar kualitas air minum, masih banyak sambungan rumah yang belum melalui pengawasan kualitas air minum atau tidak memenuhi persyaratan kualitas air minum aman. Oleh karena itu, diperlukan upaya tambahan untuk meningkatkan cakupan akses air minum yang aman agar dapat memenuhi kebutuhan seluruh warga kota secara lebih efektif. Data mengenai akses rumah tangga terhadap air siap minum perpipaan di Kota Makassar, sebagai berikut:

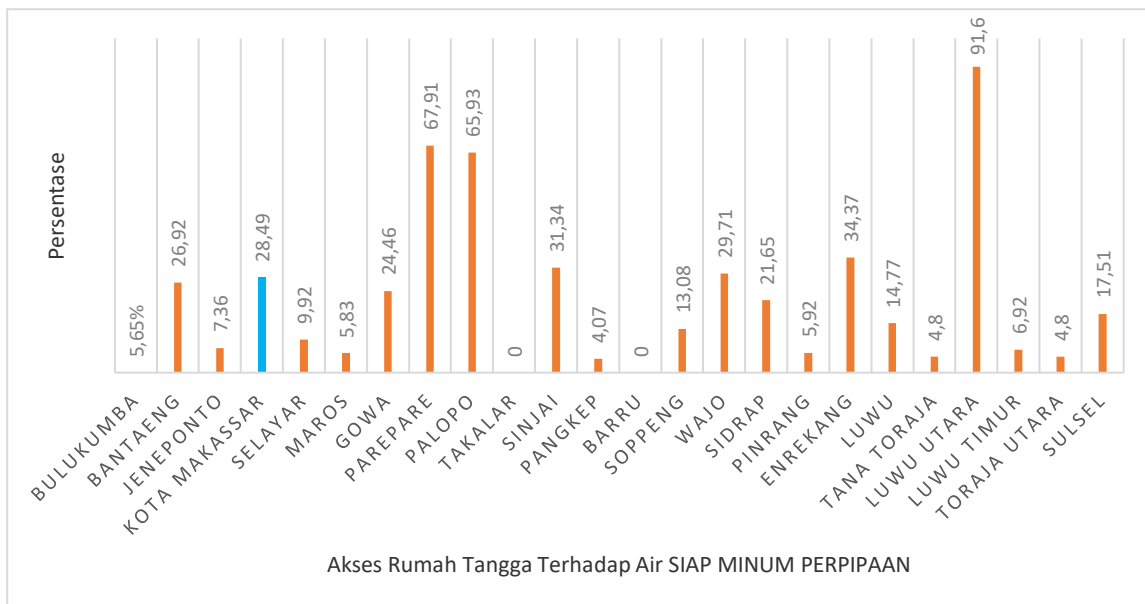
Tabel 2.11
Akses Rumah Tangga Terhadap Air Siap Minum Perpipaan
Kota Makassar Tahun 2014-2023

Jumlah Sambungan Rumah (SIMSPAM)	Jumlah Rumah Tangga	Jumlah Total Sarana Air Minum	Jumlah Sarana Air Minum yang Diperiksa	Jumlah Sarana Air Minum Aman	Jumlah Sambungan Rumah Aman	% Akses Rumah Tangga Terhadap Air Siap Minum Perpipaan
174.586	363.739	123	91	73	103.616	28,49

Sumber : SIM SPAM, 2024

Berikut adalah grafik yang menunjukkan posisi relatif akses rumah tangga terhadap air siap minum perpipaan di Kota Makassar dibandingkan dengan kabupaten dan kota lain di Sulawesi Selatan pada tahun 2023.

Grafik 2.12
Posisi Relatif Akses Rumah Tangga terhadap air siap minum perpipaan Kota Makassar terhadap kabupaten/kota lain di Sulawesi selatan Tahun 2023



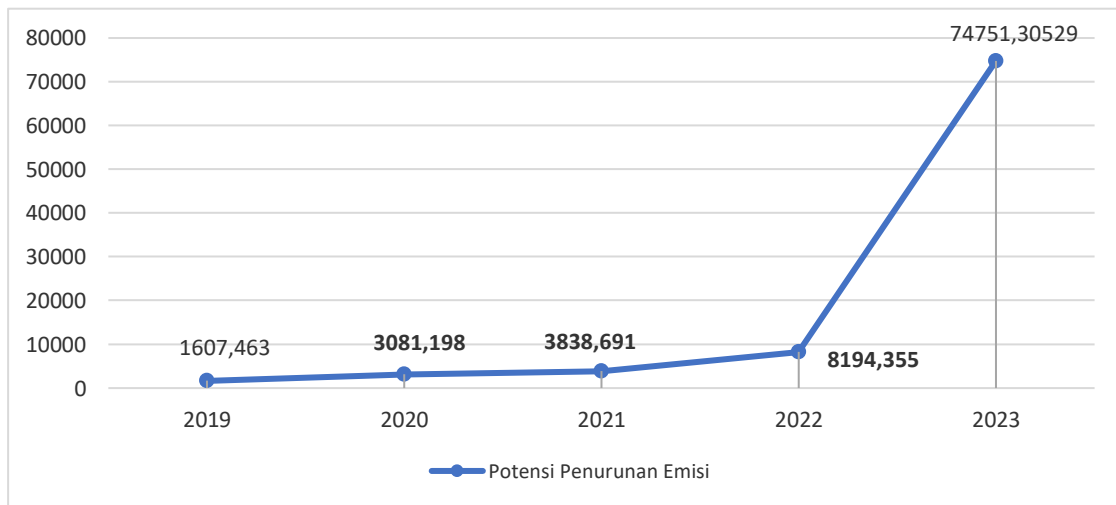
Sumber : Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sul-Sel, Tahun 2024

Capaian tertinggi dalam akses rumah tangga terhadap air siap minum perpipaan menunjukkan perbedaan antara daerah-daerah di Sulawesi Selatan. Kabupaten Luwu Utara mencatat capaian tertinggi dengan 91,6% rumah tangga yang terhubung ke sistem air siap minum perpipaan. Kota Parepare berada di posisi kedua dengan capaian 67,91%, sementara Kota Palopo mengikuti dengan capaian 65,93%. Kota Makassar dengan capaian 28,49%, masih menghadapi tantangan dalam memperluas cakupannya. Sementara itu, beberapa kabupaten/kota lain memiliki tingkat akses yang lebih rendah, seperti Bulukumba, Maros, dan Pinrang. Ada juga beberapa kabupaten/kota yang memiliki persentase nol, seperti Takalar dan Barru, yang menunjukkan bahwa ada kebutuhan untuk meningkatkan infrastruktur dan layanan air minum di daerah-daerah tersebut.

2.1.1.12. Potensi Penurunan Emisi GRK

Peningkatan yang signifikan terjadi dalam potensi penurunan emisi GRK dari tahun 2019 hingga 2022, tercatat capaian potensi penurunan emisi GRK Kota Makassar mengalami kenaikan dari 1.607,463 ton CO₂ eq tahun 2019 menjadi 8.194,35 ton CO₂ eq pada tahun 2022. Sesuai pelaporan pada Aplikasi Perencanaan-Pemantauan Aksi Rendah Karbon Nasional (AKSARA) BAPPENAS, dari 52 total kegiatan aksi pembangunan rendah karbon yang telah dilaksanakan di Kota Makassar menyebabkan total potensi penurunan emisi kumulatif sampai tahun 2023 sebesar 74751,31 ton CO₂ eq dan menyumbang 2,5% persentase kontribusi pada capaian Provinsi Sulawesi Selatan. Data capaian potensi penurunan emisi di Kota Makassar tersaji terlihat pada grafik berikut:

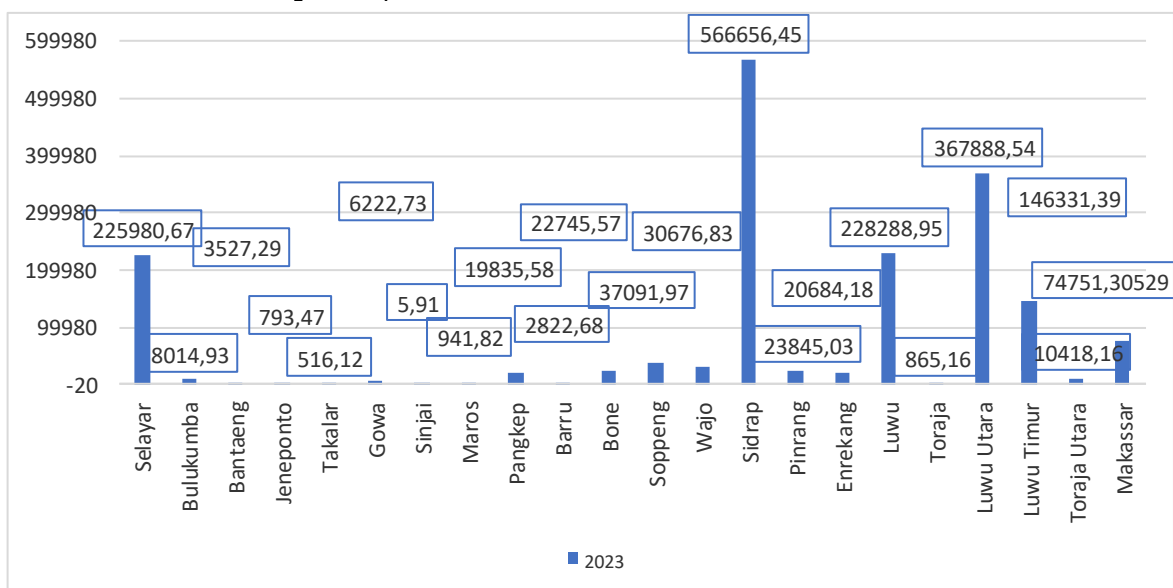
Grafik 2.13
Pencapaian Penurunan emisi (Ton CO₂eq)
Kota Makassar Tahun 2019 – Tahun 2023



Sumber: Aplikasi AKSARA, Bappenas, Tahun 2024

Dari grafik terlihat bahwa terjadi peningkatan yang signifikan dalam potensi penurunan emisi CO₂ dari tahun 2019 hingga 2022, dan kenaikan potensi penurunan yang lebih besar lagi pada tahun 2023.

Grafik 2.14
Posisi Relatif Potensi Penurunan Emisi GRK Kota Makassar terhadap
Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Tahun 2023

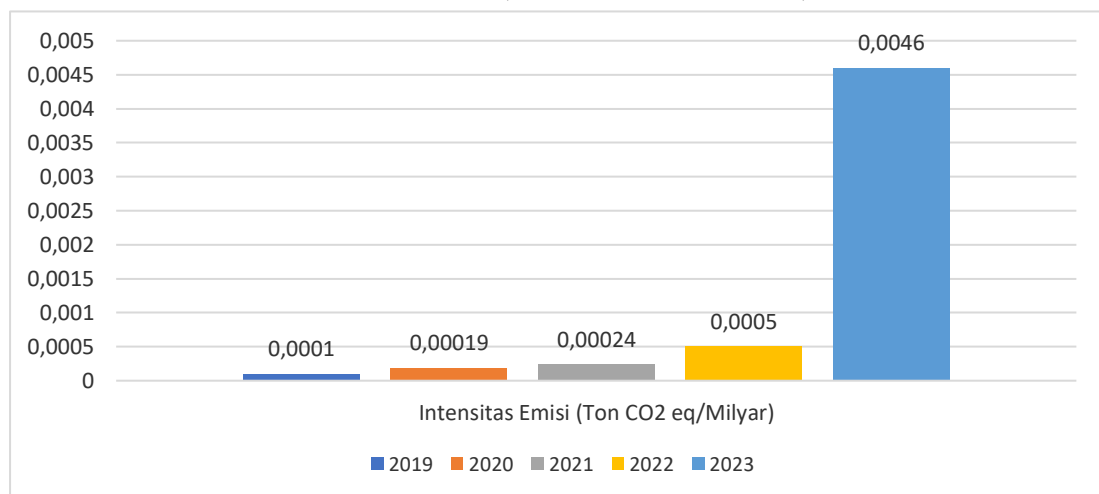


Sumber : Aplikasi AKSARA, Bappenas, Tahun 2023

Capaian Kota Makassar dalam hal potensi penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) pada tahun 2023 adalah sebesar 74751,30529 ton CO₂ eq. Meskipun tidak termasuk dalam daerah yang memiliki potensi penurunan emisi GRK tertinggi seperti Sidrap, Luwu Utara, atau Selayar, Kota Makassar memiliki potensi yang signifikan untuk mempengaruhi emisi GRK di Sulawesi Selatan karena statusnya sebagai ibu kota provinsi dan pusat aktivitas ekonomi dan sosial yang besar.

Untuk intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) per miliar rupiah aktivitas ekonomi di Kota Makassar meningkat dari tahun 2019 hingga tahun 2023. Intensitas emisi GRK di tahun 2019 sebesar 0,00010 ton CO₂ eq/miliar rupiah, tahun 2020 0,00019 CO₂ eq/miliar rupiah, tahun 2021 meningkat menjadi 0,00024 CO₂ eq/miliar rupiah, kemudian ditahun 2022 intensitas emisi GRK menjadi 0,00050 CO₂ eq/miliar rupiah, dan pada tahun 2023 untuk setiap 1 milyar rupiah yang diinvestasikan atau digunakan untuk aktivitas ekonomi atau pembangunan di Kota Makassar pada tahun 2023 berpotensi menghasilkan emisi gas rumah kaca sebesar 0,00460 ton CO₂ eq. Perkembangan intensitas emisi GRK di Kota Makassar tersaji pada grafik berikut :

Grafik 2.15
Intensitas Emisi GRK (Ton CO₂eq/Milyar) Kota Makassar



Sumber: Aplikasi AKSARA, Bappenas, Tahun 2023

2.1.1.13. Kebencanaan dan Ancaman Perubahan Iklim

A. Kebencanaan

Berdasarkan Kajian Risiko Bencana Kota Makassar, terhadap 8 (delapan) potensi bencana yaitu gempa bumi, banjir, kekeringan, cuaca ekstrim, tsunami, gelombang ekstrim, epidemi dan wabah penyakit dan kegagalan teknologi.

a) Gempa Bumi

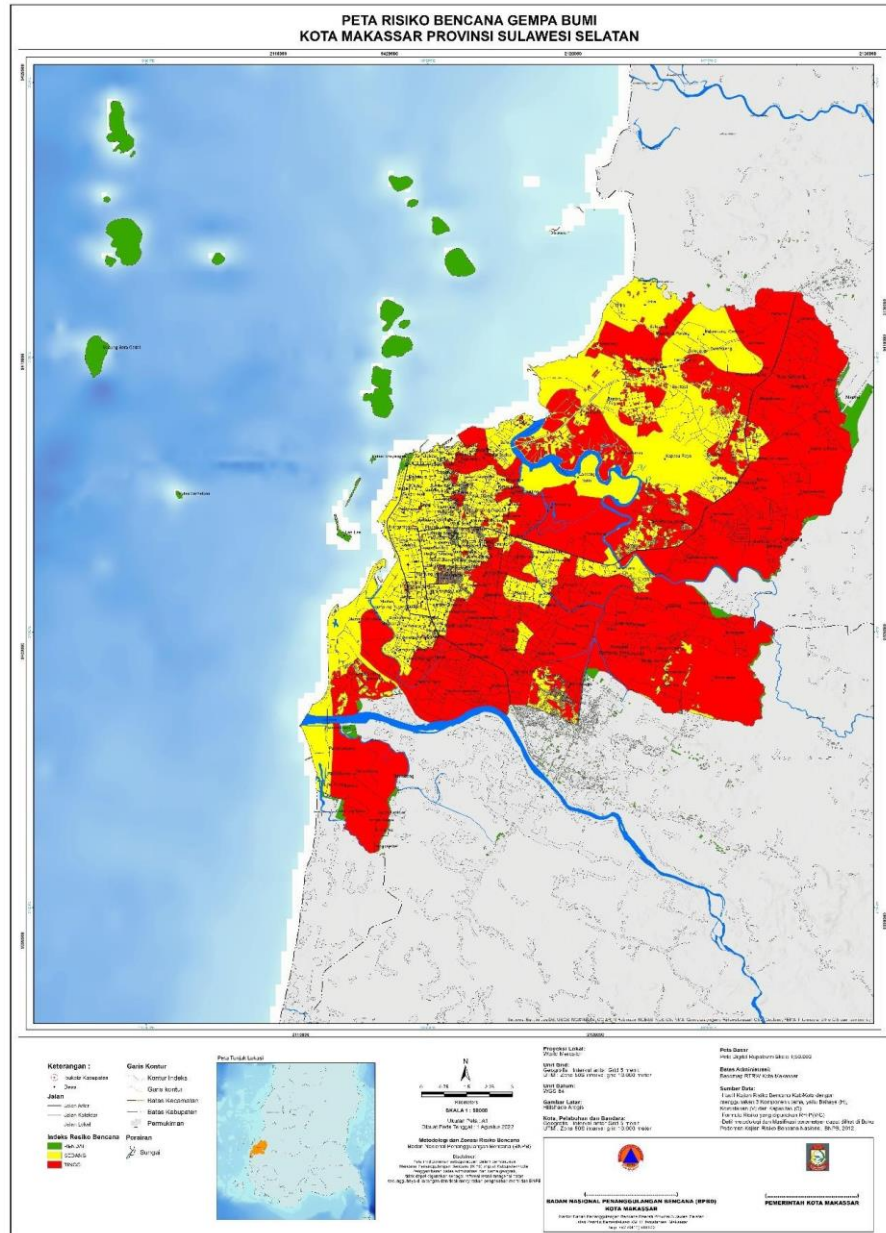
Untuk risiko bencana gempa bumi Kota Makassar masuk ke dalam kelas tinggi dan sedang sampai rendah. Kategori rendah hanya di Kecamatan Sangkarang dengan potensi bahaya seluas 756.15 ha. Untuk kategori sedang berada di 9 (sembilan) kecamatan yaitu: Biringkanaya, Manggala, Mariso, Panakkukang, Tallo, Tamalanrea, Ujung Pandang, Ujung Tanah, Wajo dengan luas total sebesar 13.273,63 ha. Untuk kategori tinggi berada di 5 (lima) Kecamatan yaitu Bontoala, Makassar, Mamajang, Rappocini, Tamalate dengan luas total sebesar 2.893 ha. Adapun hasil kajian bahaya gempa bumi per kecamatan di Kota Makassar dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.12
Potensi Bahaya Gempa Bumi Per Kecamatan di Kota Makassar

No	Kecamatan	Luas (ha)	Kelas
1	Biring Kanaya	3667.67	Sedang
2	Bontoala	177.43	Tinggi
3	Kepulauan Sangkarrang	756.15	Rendah
4	Makassar	267.35	Tinggi
5	Mamajang	253.43	Tinggi
6	Manggala	2296.22	Sedang
7	Mariso	301.50	Sedang
8	Panakkukang	1559.58	Sedang
9	Rappocini	1097.41	Tinggi
10	Tallo	971.06	Sedang
11	Tamalanrea	3850.95	Sedang
12	Tamalate	2406.33	Tinggi
13	Ujung Pandang	281.84	Sedang
14	Ujung Tanah	139.13	Sedang
15	Wajo	205.68	Sedang

Sumber: Kajian Risiko Bencana Kota Makassar, Tahun 2022

Gambar 2.8.
Peta Risiko Gempa Bumi Kota Makassar



Sumber: Kajian Risiko Bencana Kota Makassar, Tahun 2022

b) Banjir

Di Kota Makassar untuk resiko bencana banjir masuk ke dalam kelas tinggi, sedang dan rendah. Kategori sedang berada di 3 (tiga) kecamatan yaitu: Biringkanaya, Rappocini, Tamalate dengan luas paparan 2.286,24 ha. Untuk kategori tinggi berada di 6 (enam) Kecamatan yaitu: Manggala, Mariso, Mamajang, Panakkukang, Tallo, Tamalanrea, dengan luas total sebesar 4.078 ha. Untuk kategori rendah berada di 5 (lima) dengan luas paparan 132.50 ha. Adapun hasil kajian bahaya banjir per kecamatan Kota Makassar sebagai berikut:

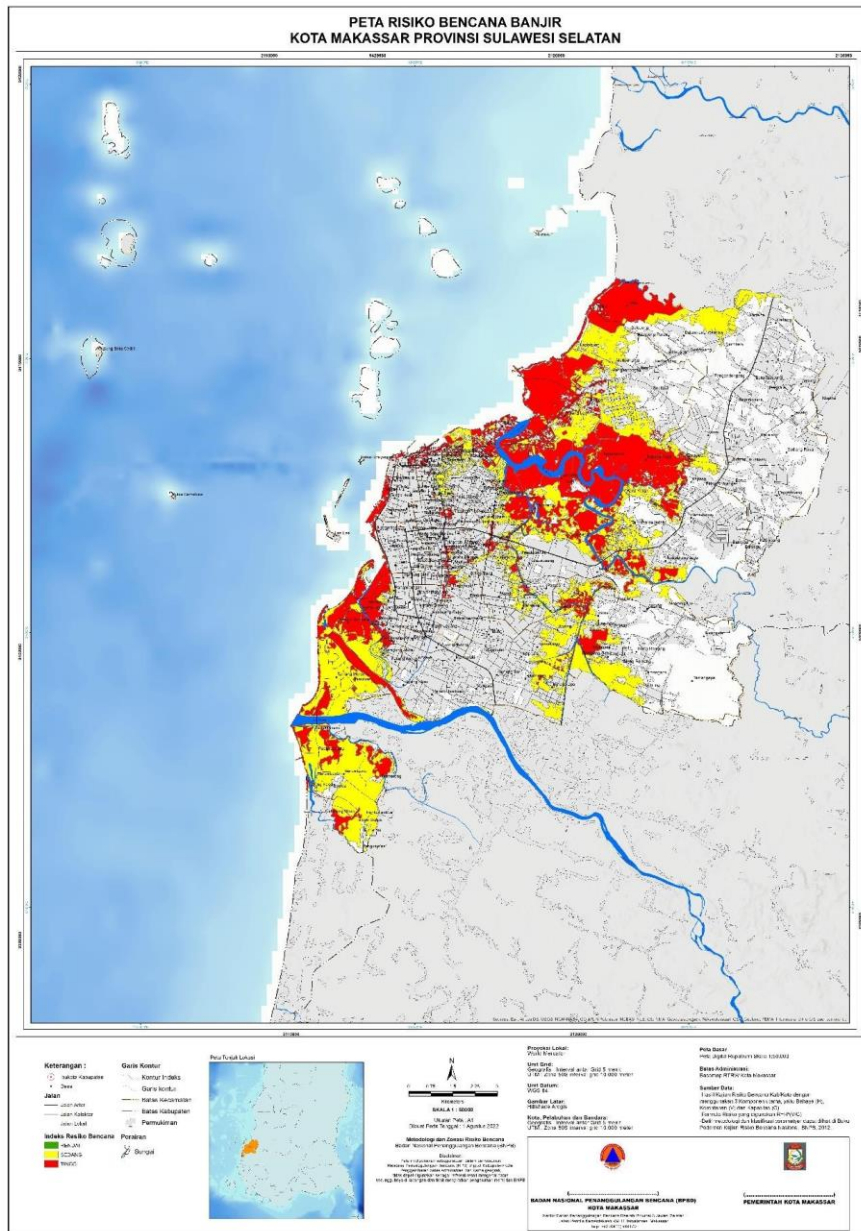
Tabel 2.13
Potensi Bahaya Banjir Per Kecamatan di Kota Makassar

No	Kecamatan	Luas (ha)	Kelas
1.	Biring Kanaya	522.27	Sedang
2.	Bontoala	14.71	Rendah
3.	Makassar	24.40	Rendah
4.	Mamajang	33.71	Tinggi

5.	Manggala	525.07	Tinggi
6.	Mariso	134.81	Tinggi
7.	Panakkukang	685.44	Tinggi
8.	Rappocini	203.15	Sedang
9.	Tallo	593.69	Tinggi
10.	Tamalanrea	2105.28	Tinggi
11.	Tamalate	1560.82	Sedang
12.	Ujung Pandang	15.72	Rendah
13.	Ujung Tanah	48.11	Rendah
14.	Wajo	29.56	Rendah

Sumber: Kajian Risiko Bencana Kota Makassar, Tahun 2022

Gambar 2.9.
Peta Risiko Bencana Banjir



Sumber: Kajian Risiko Bencana Kota Makassar, Tahun 2022

c) Kekeringan

Untuk risiko bencana kekeringan Kota Makassar masuk ke dalam kelas tinggi, sedang sampai rendah. Kategori sedang berada di 13

(tigabelas) . . .

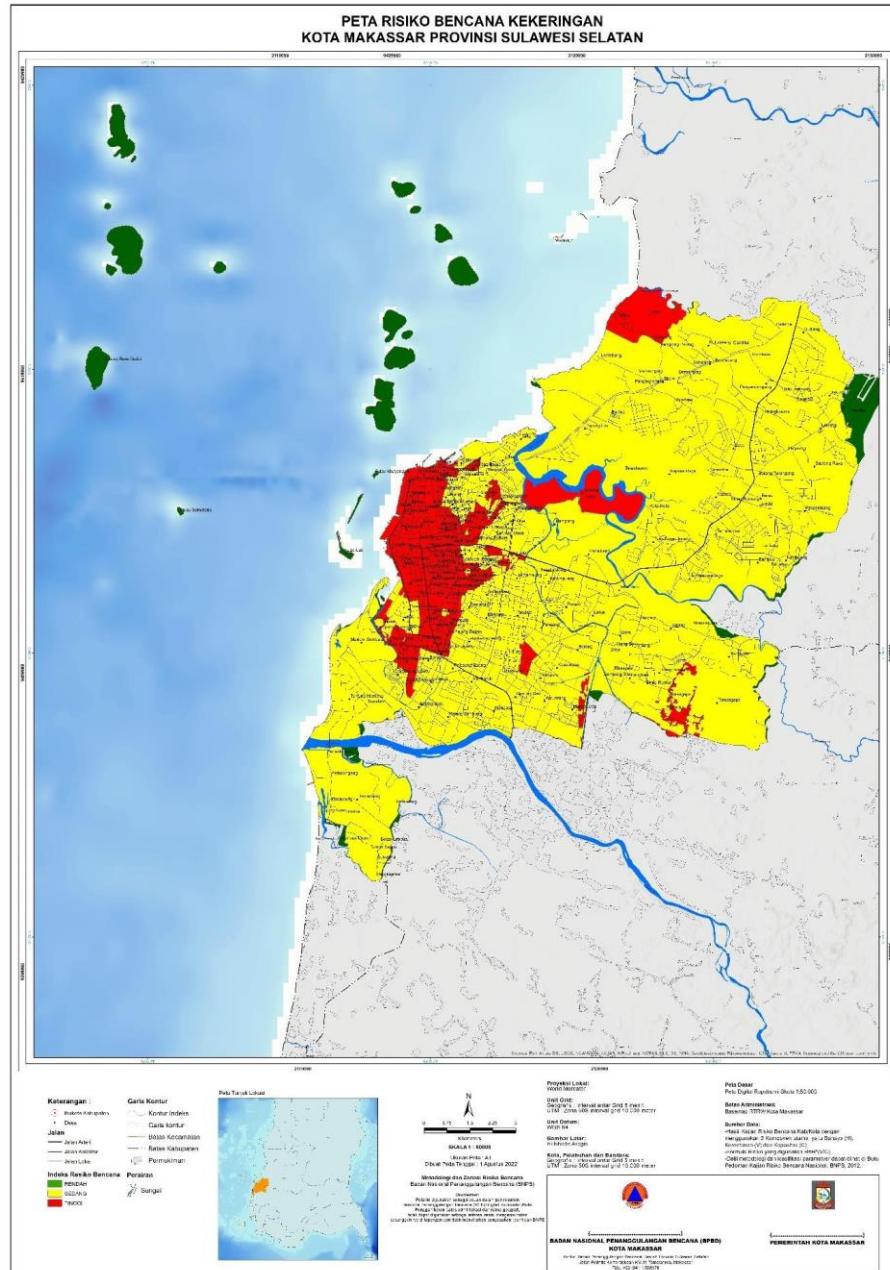
(tigabelas) kecamatan, yaitu: Mariso, Tallo, Ujung Tanah, Wajo, Ujung Pandang, Panakkukang, Rappocini, Makassar, Biringkanaya, Tamalanrea, Tamalate, Mamajang dan Bontoala dengan luas total sebesar 15.177,80 ha. Untuk kategori tinggi berada Kecamatan Manggala dengan luas 2.296.10 ha. Untuk kategori rendah berada di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang total sebesar 756.4 ha. Luas bahaya kekeringan per kecamatan di Kota Makassar dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.14
Potensi Bahaya Kekeringan Per Kecamatan di Kota Makassar

No	Kecamatan	Luas (ha)	Kelas
1	Biring Kanaya	3667.40	Sedang
2	Bontoala	177.43	Sedang
3	Kepulauan Sangkarrang	756.04	Rendah
4	Makassar	267.35	Sedang
5	Mamajang	253.43	Sedang
6	Manggala	2296.10	Tinggi
7	Mariso	301.56	Sedang
8	Panakkukang	1559.58	Sedang
9	Rappocini	1097.44	Sedang
10	Tallo	970.92	Sedang
11	Tamalanrea	3851.35	Sedang
12	Tamalate	2404.09	Sedang
13	Ujung Pandang	281.72	Sedang
14	Ujung Tanah	139.50	Sedang
15	Wajo	206.03	Sedang

Sumber: *Kajian Risiko Bencana Kota Makassar, Tahun 2022*

Gambar 2.10.
Peta Risiko Bencana Kekeringan



Sumber: Kajian Risiko Bencana Kota Makassar, Tahun 2022

d) Cuaca Ekstrim

Risiko bencana cuaca ekstrim Kota Makassar masuk ke dalam kelas tinggi dan sedang. Kategori sedang berada di 2 (dua) kecamatan yaitu: Biringkanaya dan Panakkukang dengan luas total sebesar 5.099,77 ha. Untuk kategori tinggi berada di 13 (tigabelas) Kecamatan yaitu Kepulauan Sangkarrang, Tamalanrea, Tamalate, Ujung Pandang, Ujung Tanah, Wajo, Bontoala, Mariso, Mamajang, Makassar, Rappocini Manggala, Tallo dengan luas total sebesar 12.728,03 ha. Luas paparan bahaya cuaca ekstrim per kecamatan di Kota Makassar dapat dilihat pada tabel berikut.

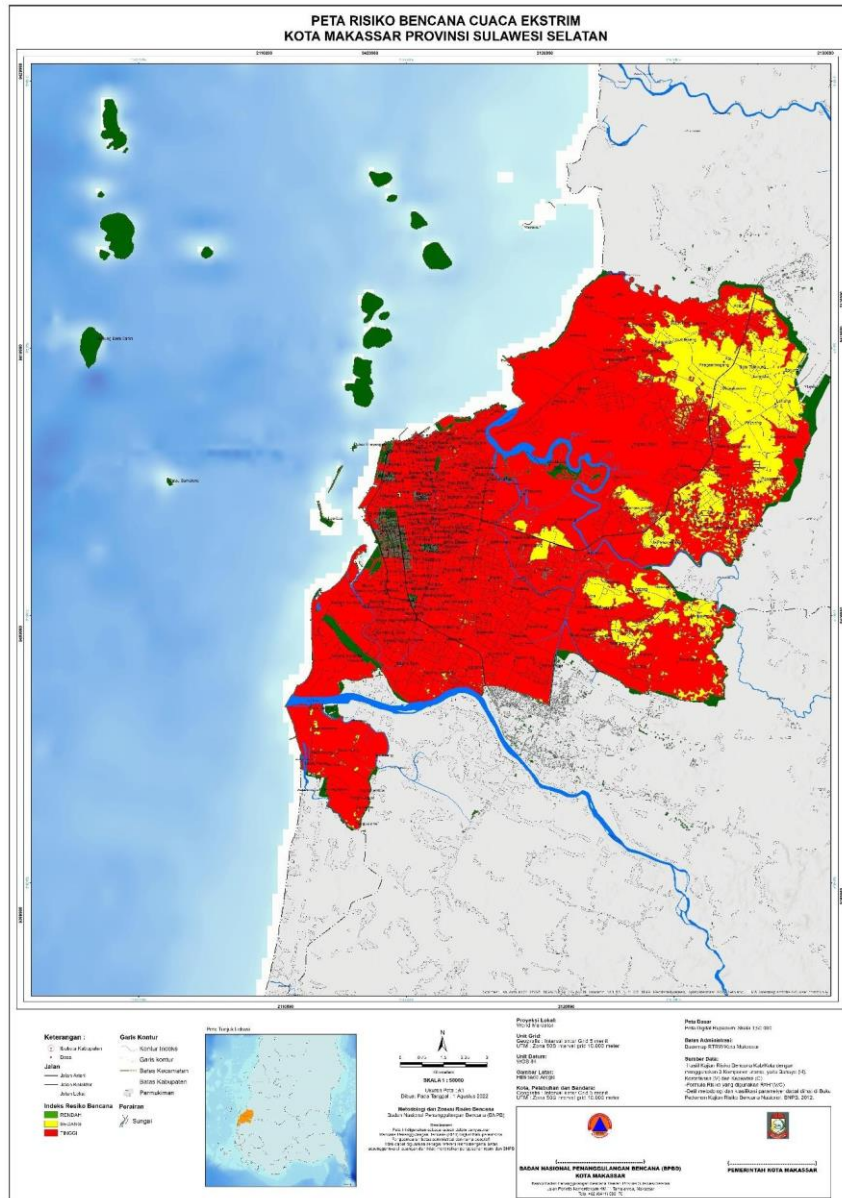
Tabel 2.15
Potensi Bahaya Cuaca Ekstrim Per Kecamatan di Kota Makassar

No	Kecamatan	Luas (ha)	Kelas
1	Biring Kanaya	3540.88	Sedang
2	Bontoala	177.43	Tinggi

3	Kepulauan Sangkarrang	756.04	Tinggi
4	Makassar	267.35	Tinggi
5	Mamajang	253.43	Tinggi
6	Manggala	2240.28	Tinggi
7	Mariso	273.30	Tinggi
8	Panakkukang	1558.89	Sedang
9	Rappocini	1095.09	Tinggi
10	Tallo	943.77	Tinggi
11	Tamalanrea	3828.92	Tinggi
12	Tamalate	2286.98	Tinggi
13	Ujung Pandang	265.61	Tinggi
14	Ujung Tanah	135.92	Tinggi
15	wajo	203.91	Tinggi

Sumber: Kajian Risiko Bencana Kota Makassar, Tahun 2022

Gambar 2.11.
Peta Risiko Bencana Cuaca Ekstrim



Sumber: Kajian Risiko Bencana Kota Makassar, Tahun 2022

e) Tsunami

Risiko bencana tsunami Kota Makassar masuk ke dalam kelas tinggi dan sedang. Kategori sedang berada di 4 (empat) kecamatan yaitu: Mariso, Tallo, Ujung Tanah dan Wajo, dengan luas total sebesar 152.33 ha. Untuk kategori tinggi berada di 4 (empat) Kecamatan yaitu: Kepulauan Sangkarrang, Tamalanrea, Tamalate dan Ujung Pandang, dengan luas total sebesar 1702.02. Paparan bahaya tsunami per kecamatan di Kota Makassar dapat dilihat pada tabel berikut:

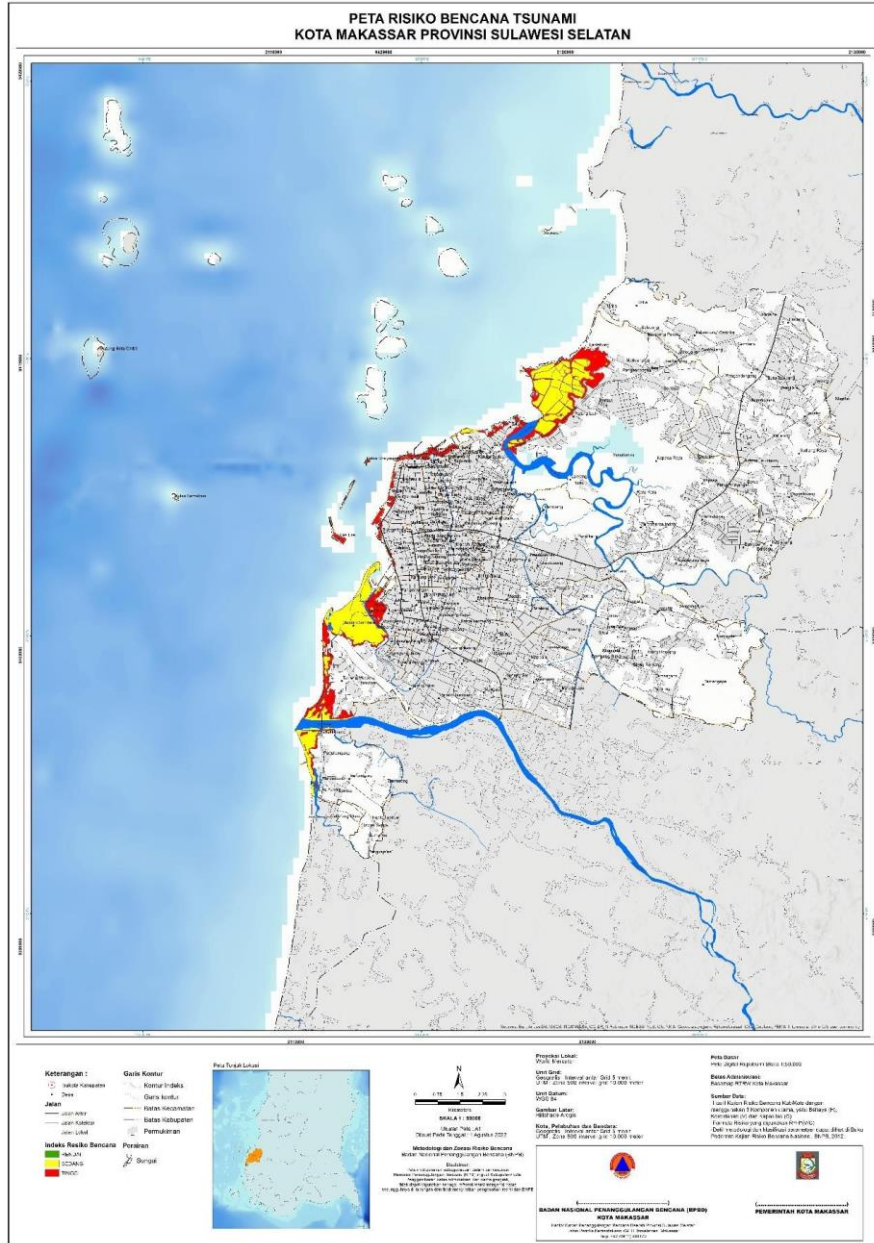
Tabel 2.16
Potensi Bahaya Tsunami Per Kecamatan di Kota Makassar

No	Kecamatan	Luas (ha)	Kelas
1	Kepulauan Sangkarrang	756.04	Tinggi
2	Mariso	53.89	Sedang
3	Tallo	49.37	Sedang
4	Tamalanrea	466.68	Tinggi
5	Tamalate	457.68	Tinggi
6	Ujung Pandang	21.62	Tinggi
7	Ujung Tanah	35.38	Sedang
8	Wajo	13.69	Sedang

Sumber: *Kajian Risiko Bencana Kota Makassar, Tahun 2022*

Potensi tsunami tersebut dilihat berdasarkan luasan kecamatan yang memiliki kondisi rentan terhadap bahaya tsunami berdasarkan kajian bahaya. Secara keseluruhan, luas bahaya tsunami di Kota Makassar adalah 1854.35 ha yang berada pada kelas sedang. Kelas bahaya ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum dari setiap kecamatan terpapar bahaya tsunami.

Gambar 2.12.
Peta Bahaya Bencana Tsunami di Kota Makassar



Sumber: Kajian Risiko Bencana Kota Makassar, Tahun 2022

f) Gelombang Ekstrim dan Abrasi

Risiko gelombang ekstrim dan abrasi Kota Makassar masuk ke dalam kelas tinggi dan sedang. Kategori sedang berada di 2 (dua) kecamatan yaitu: Tamalanrea, Tamalate dengan luas total sebesar 317,29 ha. Untuk kategori tinggi berada di 7 (tujuh) kecamatan yaitu: Biringkanaya, Kepulauan Sangkarang, Mariso, Tallo, Ujung Pandang dan Wajo dengan luas total sebesar 946,22 ha. Luas paparan bahaya gelombang ekstrim dan abrasi per kecamatan di Kota Makassar dapat dilihat pada tabel berikut:

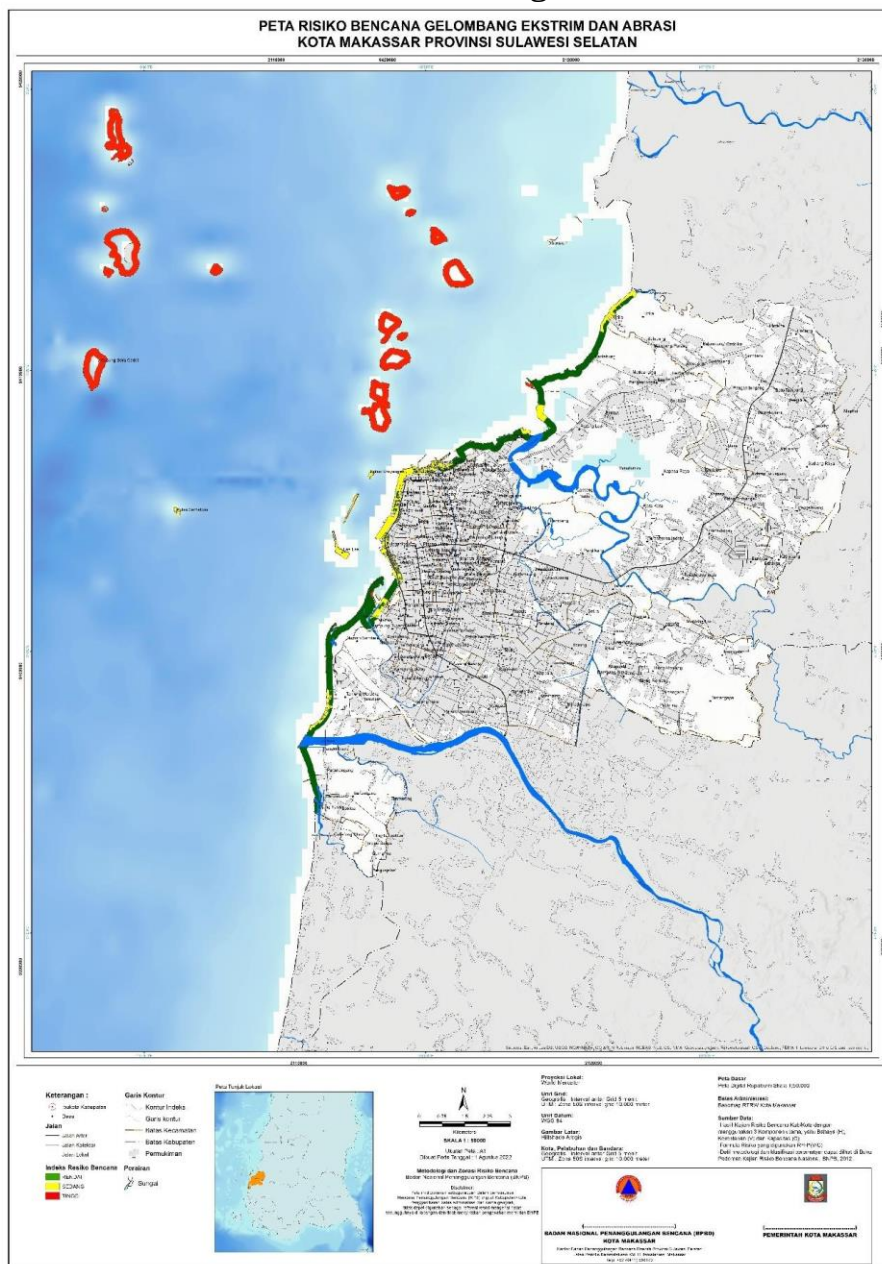
Tabel 2.17
Potensi Bahaya Gelombang Ekstrim Per Kecamatan di Kota Makassar

No	Kecamatan	Luas (ha)	Kelas
1.	Biringkanaya	36.21	Tinggi
2.	Kepulauan Sangkarrang	648.96	Tinggi
3.	Mariso	35.20	Tinggi

4.	Tallo	69.28	Tinggi
5.	Tamalanrea	116.95	Sedang
6.	Tamalate	200.34	Sedang
7.	Ujung Pandang	58.25	Tinggi
8.	Ujung Tanah	62.59	Tinggi
9.	Wajo	35.73	Tinggi

Sumber: Kajian Risiko Bencana Kota Makassar, Tahun 2022

Gambar 2.13.
Peta Risiko Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi



Sumber: Kajian Risiko Bencana Kota Makassar, Tahun 2022

g) Epidemologi dan Wabah Penyakit

Risiko wabah penyakit dan epidemi di Kota Makassar masuk ke dalam kelas tinggi dan sedang. Kategori sedang berada di 10 (sepuluh) kecamatan yaitu: Biringkanaya, Bontoala, Makassar, Mamajang, Manggala, Tamalate, Ujung Pandang, Wajo, Mariso, Panakkukang dengan luas total sebesar 11.454,81 ha. Untuk kategori tinggi berada di 2 (dua) kecamatan yaitu

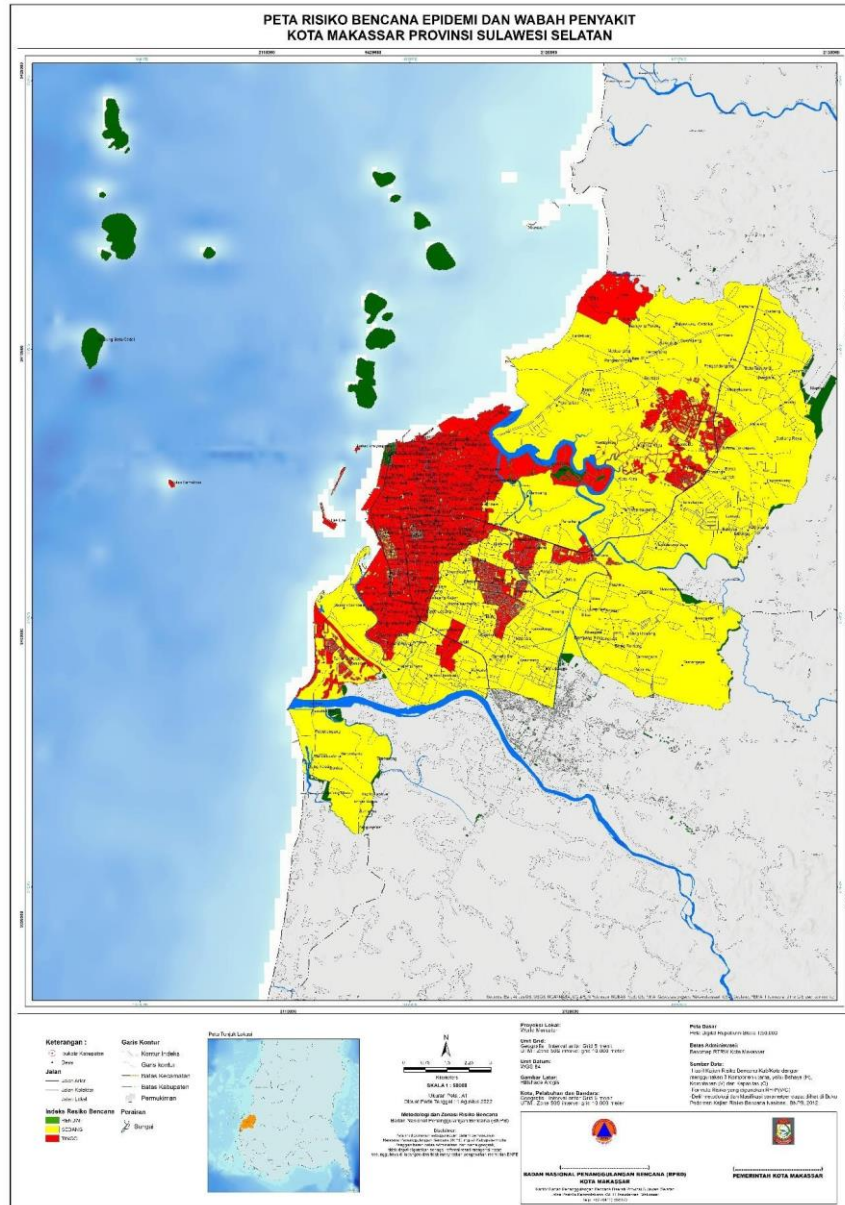
Rappocini dan Tamalanrea dengan luas total sebesar 4.954,67 ha. Untuk kategori rendah berada di 3 (tiga) kecamatan yaitu, Kepulauan Sangkarrang, Tallo dan Ujung Tanah dengan luas 1.896,45 ha. Paparan bahaya wabah penyakit dan epidemi per kecamatan di Kota Makassar dapat dilihat pada tabel berikut. Luas paparan bahaya epidemi dan wabah penyakit per kecamatan di Kota Makassar dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.18
Potensi Bahaya Epidemi Per Kecamatan di Kota Makassar

No	Kecamatan	Luas (ha)	Kelas
1	Biring Kanaya	3681.18	Sedang
2	Bontoala	177.37	Sedang
3	Kepulauan Sangkarrang	781.46	Rendah
4	Makassar	267.29	Sedang
5	Mamajang	253.42	Sedang
6	Manggala	2302.82	Sedang
7	Mariso	301.90	Sedang
8	Panakkukang	1559.58	Sedang
9	Rappocini	1099.06	Tinggi
10	Tallo	973.02	Rendah
11	Tamalanrea	3855.61	Tinggi
12	Tamalate	2416.86	Sedang
13	Ujung Pandang	287.54	Sedang
14	Ujung Tanah	141.97	Rendah
15	Wajo	206.85	Sedang

Sumber: *Kajian Risiko Bencana Kota Makassar, Tahun 2022*

Gambar 2.14.
Peta Risiko Bencana Epidemi dan Wabah Penyakit



Sumber: Kajian Risiko Bencana Kota Makassar, Tahun 2022

h) Kegagalan Teknologi

Kegagalan teknologi adalah semua kejadian bencana yang diakibatkan oleh kesalahan desain, pengoperasian, kelalaian dan kesengajaan manusia dalam penggunaan teknologi dan/atau industri. Untuk risiko bencana kegagalan teknologi di Kota Makassar masuk ke dalam kelas rendah yang berada di 13 (tigabelas) Kecamatan yaitu Biringkanaya, Bontoala, Makassar, Manggala, Mariso, Panakkukang, Rappocini, Tallo, Tamalanrea, Tamalate, Ujung Pandang, Ujung Tanah dan Wajo dengan luas 298,12 ha. Luas paparan bahaya kegagalan teknologi per kecamatan di Kota Makassar dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.19
Potensi Bahaya Kegagalan Teknologi Per Kecamatan di Kota Makassar

No	Kecamatan	Luas (ha)	Kelas
1	Biringkanaya	8.04	Rendah
2	Bontoala	4.21	Rendah
3	Makassar	3.87	Rendah

B. Ancaman Perubahan Iklim

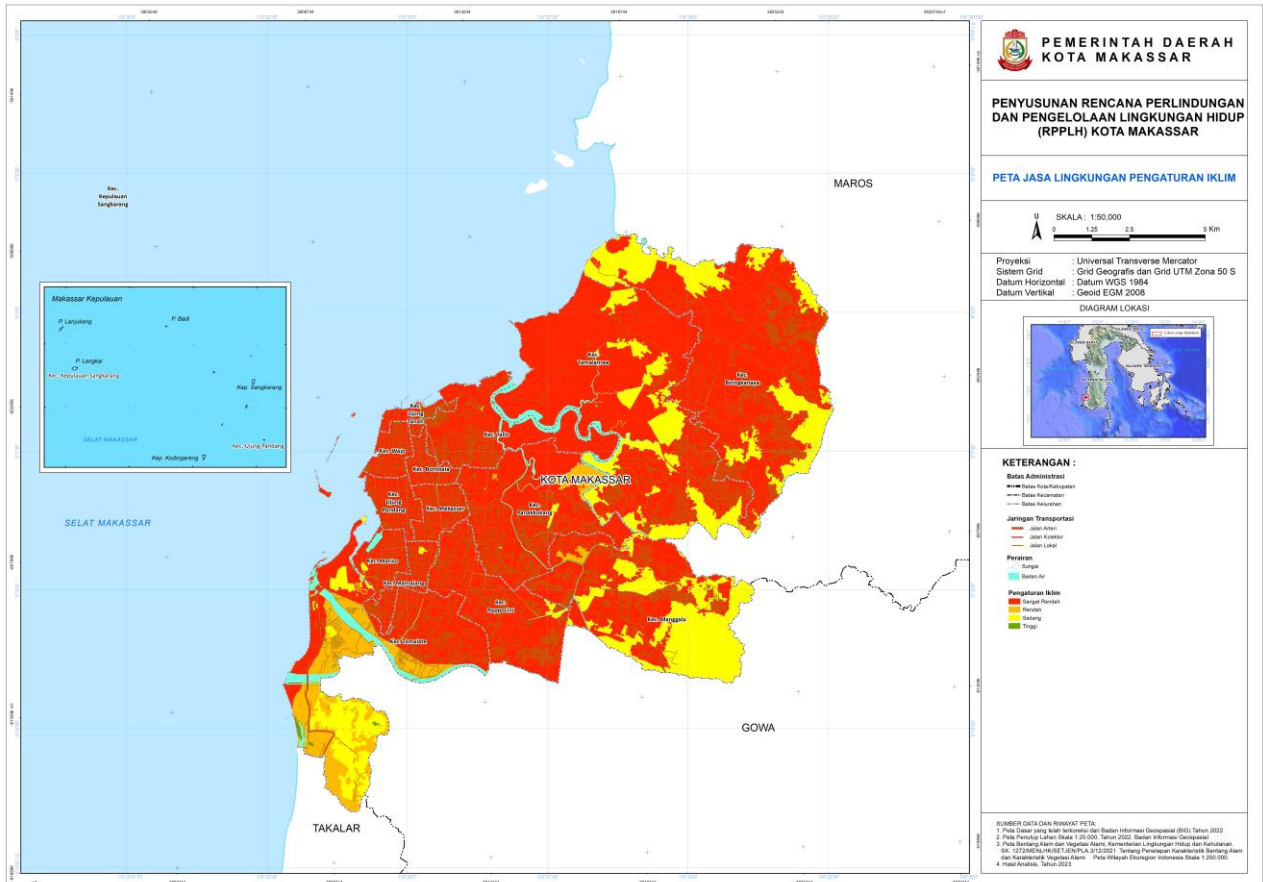
Jasa ekosistem pengaturan iklim di Kota Makassar dapat dilihat rata-rata berada pada kelas jasa sangat rendah dengan luas 13.113,89 ha yang tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kota Makassar.

Tabel 2.20
Luasan Status Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim di Kota Makassar

No	Kecamatan	Jasa Lingkungan Pengaturan Iklim (ha)				Grand Total (ha)
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	
1	Biringkanaya	2816,68		861,28		3677,96
2	Bontoala	172,43		1,37		173,80
3	Kepulauan Sangkarang	0,50	82,61	12,28		95,39
4	Makassar	263,56		1,80		265,36
5	Mamajang	242,73	1,17	6,73	0,24	250,87
6	Manggala	1277,36	27,22	986,88		2291,46
7	Mariso	269,61		12,28		281,89
8	Panakkukang	1413,17	92,84	61,64		1567,65
9	Rappocini	1055,59	19,82	20,88		1096,28
10	Tallo	880,14		81,38		961,53
11	Tamalanrea	3094,23		762,86		3857,08
12	Tamalate	1001,09	815,44	452,70	144,37	2413,59
13	Ujung Pandang	284,23	1,40			285,63
14	Ujung Tanah	137,86		0,98		138,84
15	Wajo	204,72				204,72

Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2023

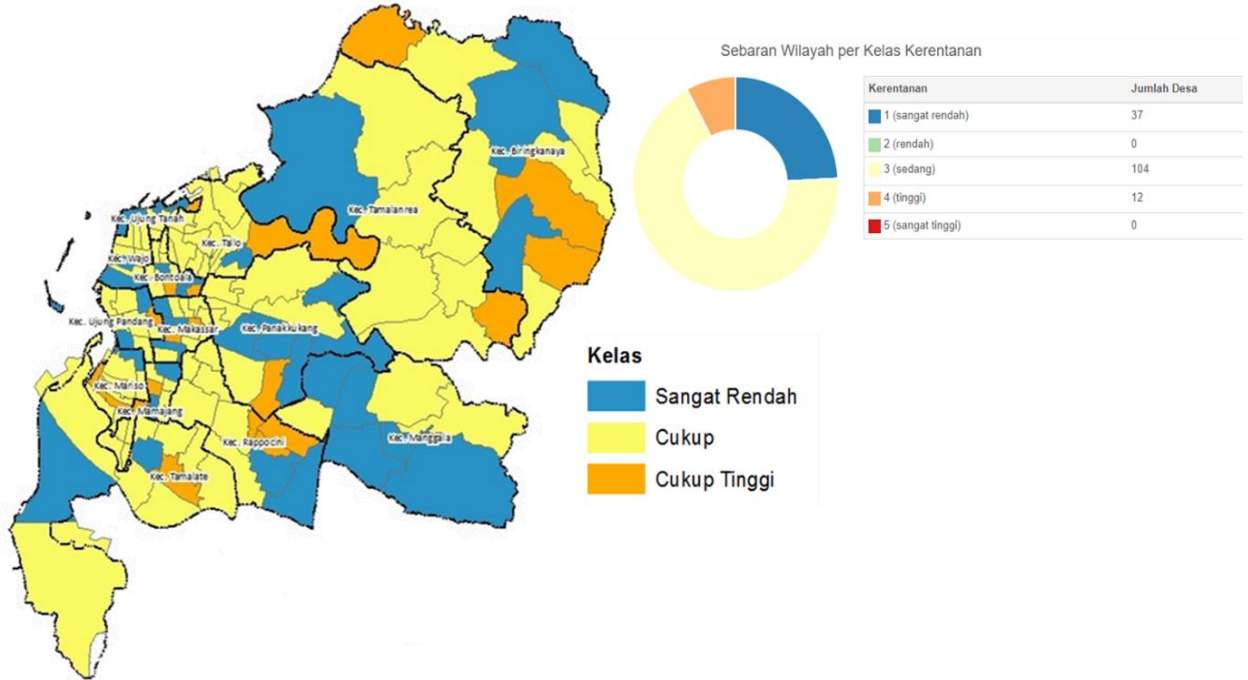
Gambar 2.16.
Peta Status Jasa Lingkungan Pengaturan Iklim di Kota Makassar



Sumber : KLHS RPJPD Kota Makassar, Tahun 2023

Gambar 2.17 . . .

Gambar 2.17.
Peta Kerentanan dan Adaptasi Perubahan Iklim Kota Makassar



Sumber : KLHS RPJPD Kota Makassar, Tahun 2023

2.1.1.14. Indeks Risiko Bencana

Dalam sembilan tahun terakhir, Indeks Risiko Bencana (IRB) Kota Makassar mengalami penurunan. Tahun 2015 dan 2016, IRB Kota Makassar mencapai 144,40 atau termasuk dalam kategori risiko tinggi. Risiko tinggi menggambarkan bahwa saat itu Kota Makassar memiliki kerentanan tinggi terhadap bencana akibat dari besarnya potensi kerugian sosial, ekonomi, fisik, dan luasan lahan jika terjadi bencana. Tahun 2017 level risiko bencana Kota Makassar turun ke level sedang dengan IRB 131,78, mengindikasikan ada perbaikan pada kapasitas pemerintah daerah dan kapasitas masyarakat dalam memitigasi dampak bencana. Angka tersebut bertahan hingga tahun 2020 dan kemudian turun berturut-turut di tahun 2021 dan 2022 dengan angka IRB masing-masing 127,18 dan 119,49. Tahun 2023, IRB Kota Makassar tetap diangka 119,49 atau berada pada level risiko sedang.

Grafik 2.16
Indeks Risiko Bencana Kota Makassar Tahun 2015-2023



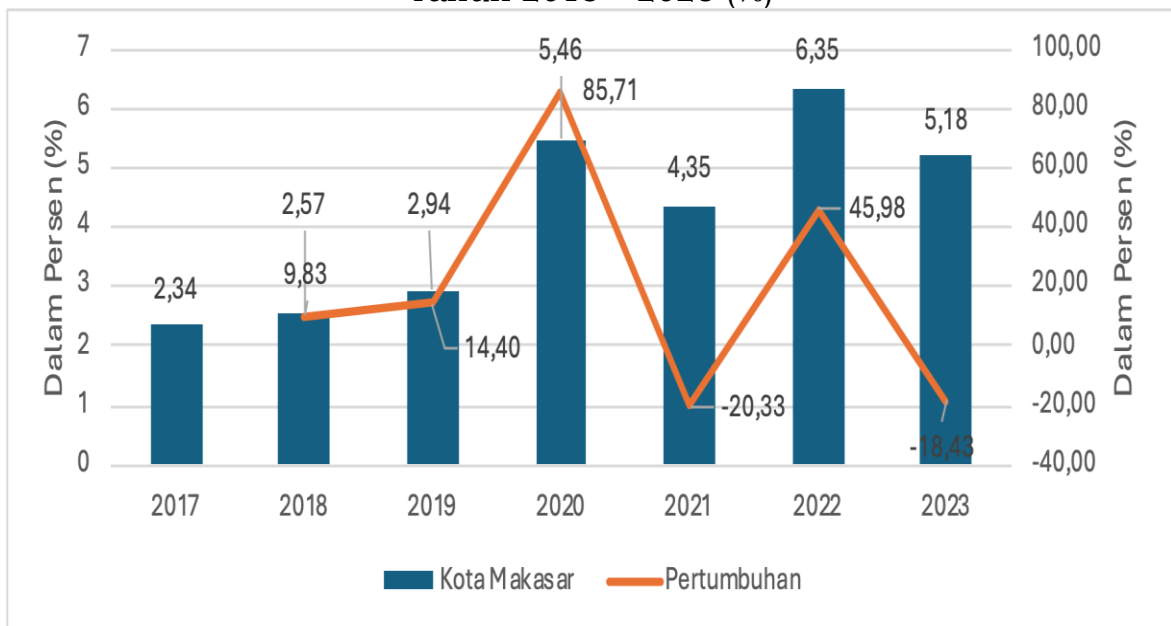
Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Tahun 2024

2.1.1.15. Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan

Dalam kurun waktu 2017-2023 di Kota Makassar prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan menunjukkan tren cenderung fluktuatif. Terlebih lagi, pada masa pandemi COVID-19 di tahun 2020 indikator ini naik secara signifikan menjadi 5.46% atau bertumbuh sebesar 85.72% dari tahun sebelumnya. Hal ini menandakan bahwa pada periode tersebut aspek keterjangkauan (*accessibility*) dan ketersediaan (*availability*) pangan sangat sulit diakses oleh masyarakat terkhususnya kalangan menengah ke bawah. Meskipun pada tahun 2021 indikator ini menunjukkan penurunan menjadi 4.35% angka ini tetap sangat tinggi jika dikomparasi dengan rata-rata capaian pada periode sebelum COVID-19 (2017-2019) yang hanya 2.61%. Lebih lanjut, angka ini semakin bertumbuh di tahun 2022 menjadi 6.35% atau bertumbuh sebesar 45.98% sekaligus menjadi capaian terburuk dalam kurun waktu 2017-2023. Fenomena ini juga menjadi indikasi pentingnya pemerintah meningkatkan aspek jaring perlindungan/pengaman sosial (*social safety net*) seperti bantuan sosial untuk pangan dan lain-lain pada masa-masa krisis untuk melindungi masyarakat menengah ke bawah yang rawan/rentan terdampak (*vulnerable*).

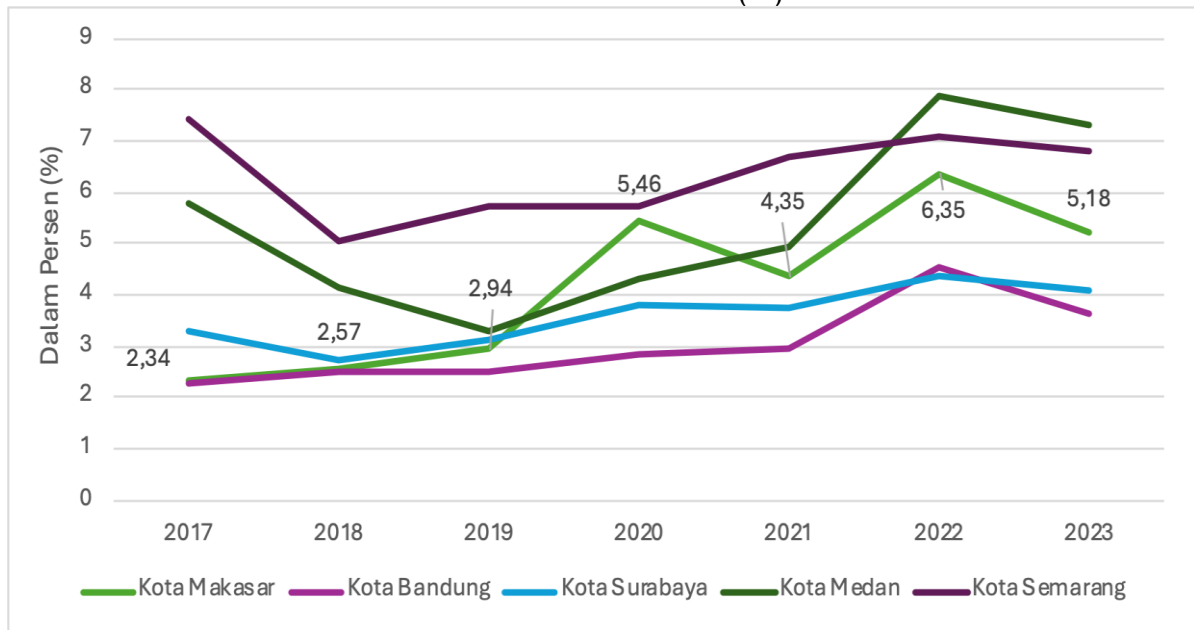
Grafik 2.17

Perkembangan Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan Kota Makassar Tahun 2013 – 2023 (%)



Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2024

Grafik 2.18
Perkembangan Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan antara Kota Makassar, Kota Bandung, Kota Surabaya, Kota Medan dan Kota Semarang Tahun 2013 – 2023 (%)



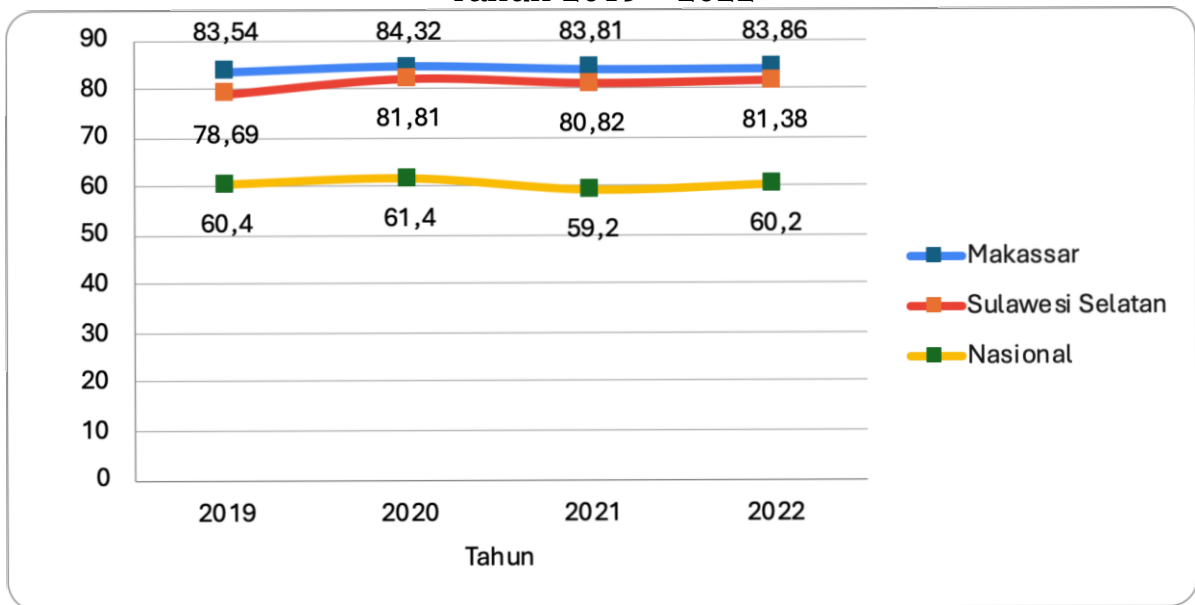
Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2024

Jika dikomparasi dengan kota-kota besar lainnya seperti Bandung, Surabaya, Medan, dan Semarang. Capaian Kota Makassar dapat dikategorikan menengah, sebab masih dalam kisaran yang cukup rendah jika dibandingkan dengan Kota Medan dan Semarang, namun belum mampu menyamai Kota Bandung dan Surabaya. Meskipun kelima kota tersebut menunjukkan pola/tren yang sama pada masa pandemi COVID-19, akan tetapi peningkatan tersebut tidak terlalu tajam/signifikan jika dibandingkan dengan Makassar. Misalnya di Kota Bandung dan Surabaya tren prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan cenderung stabil. Hal ini terjadi karena pada kota-kota tersebut, jaring pengaman sosial (*social safety net*) telah menjangkau masyarakat secara luas. Sehingga, masyarakat yang rawan terkena dampak (*vulnerable*) dapat terlindungi melalui kehadiran bantuan dari pemerintah itu sendiri.

2.1.1.16. Indeks Ketahanan Pangan

Data menunjukkan, bahwa secara umum IKP Kota Makassar cenderung stabil selama 2018-2022 pada angka rata-rata 83% dan bahkan lebih tinggi dibandingkan IKP Provinsi Sulawesi Selatan dan nasional. Walaupun sedikit menurun dari 84,32% pada tahun 2020 menjadi 83,81% pada tahun 2021, IKP kota Makassar menunjukkan angka peningkatan positif selama kurun waktu 6 (enam) tahun terakhir. Secara signifikan, IKP kota Makassar meningkat menjadi 89,28% pada tahun 2023. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti distribusi air bersih, angka harapan hidup, serta prevalensi stunting yang relatif rendah. Namun fakta ini cukup menarik dikarenakan angka kemiskinan di Kota Makassar, yang menyumbang bobot 20% IKP, tercatat sebesar 5,07% pada tahun 2023, naik 0,49% dibandingkan tahun sebelumnya yang dilaporkan 4,58%.

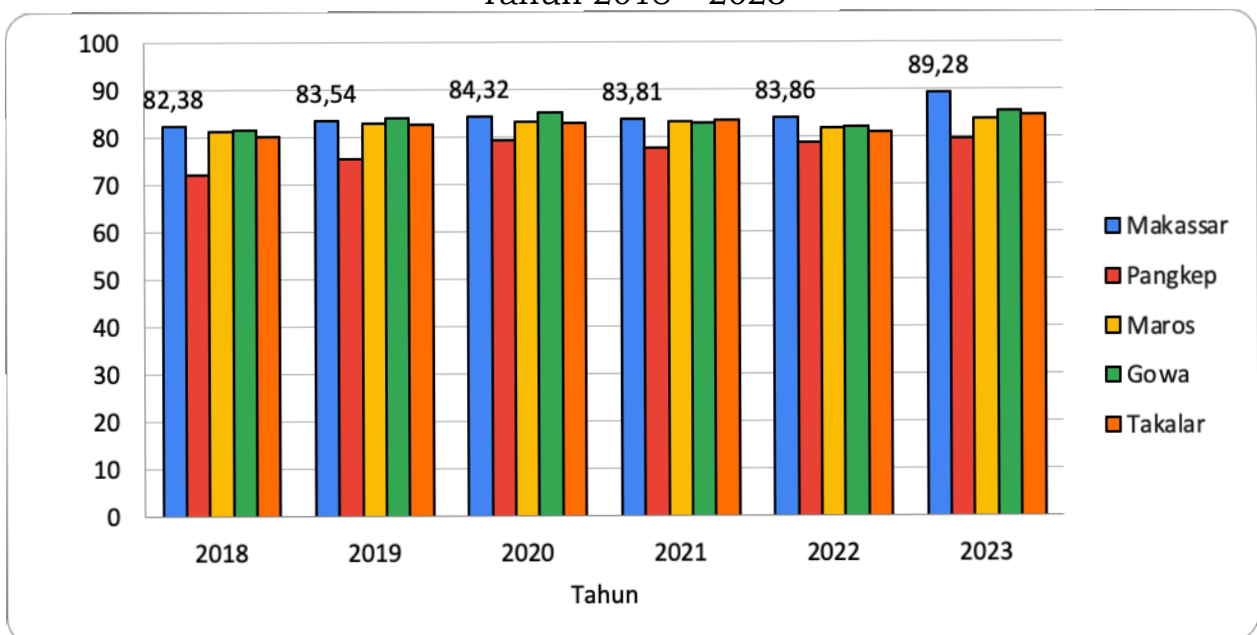
Grafik 2.19
Indeks Ketahanan Pangan Makassar, Sulawesi Selatan, dan Nasional,
Tahun 2019 – 2022



Sumber: Badan Pangan Nasional, Tahun 2024

Dibandingkan dengan kabupaten lain di wilayah Mamminasata yaitu Gowa, Maros, dan Takalar, IKP Kota Makassar secara umum lebih baik selama periode 2018-2023, kecuali di tahun 2019 dan 2020 yang berada di bawah Kabupaten Gowa. Sebagai ibu kota Provinsi dengan jumlah penduduk tertinggi di Sulawesi Selatan, akses air bersih dan listrik serta jumlah tenaga kesehatan di Kota Makassar tercatat paling tinggi dibanding daerah lain.

Grafik 2.20
Indeks Ketahanan Pangan Makassar dan Daerah Sekitar
Tahun 2018 – 2023

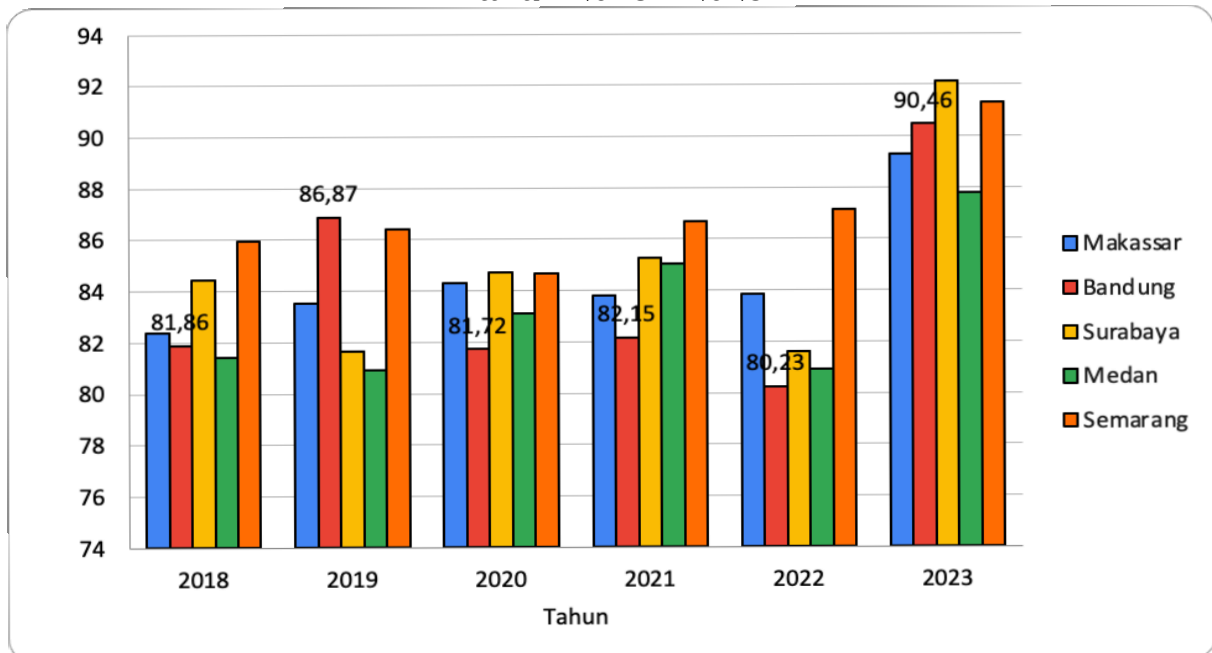


Sumber: Badan Pangan Nasional, Tahun 2024

Data IKP beberapa kota besar di Indonesia menunjukkan tren yang konsisten stabil dalam kurun waktu 2018 – 2022 dan meningkat di tahun 2023. Dibandingkan dengan Kota Bandung, Surabaya, Medan dan Semarang, Kota Makassar memperlihatkan IKP yang hampir sama. Kota Semarang menempati urutan tertinggi jika dibandingkan dengan keempat kota lainnya dengan kontribusi ketersediaan dan akses pangan yang memadai. Skor PPH (Produktivitas . . .

(Produktivitas Pertanian Hortikultura) mencapai 91,8 menandakan keberhasilan dalam meningkatkan produksi pertanian khususnya sektor hortikultura. Kota Makassar dapat meningkatkan IKP dengan lebih mengoptimalkan distribusi dan pemasaran pertanian serta menurunkan angka kemiskinan. Selain itu, peningkatan akses air bersih dan listrik masyarakat perlu mendapat perhatian dari pemerintah Kota Makassar.

Grafik 2.21
Indeks Ketahanan Pangan Makassar dan Kota Besar Lainnya
Tahun 2018 – 2023



Sumber: Badan Pangan Nasional, Tahun 2024

Indeks ketahanan pangan Kota Makassar selama periode 2013-2023 relatif lebih tinggi dari rata-rata provinsi dan nasional, namun capaiannya cenderung stagnan. Bahkan jika dibandingkan dengan beberapa kota setara di Indonesia, posisi IKP Kota Makassar relatif lebih rendah. Beberapa faktor sebagai pemicu rendahnya IKP antara lain terkait dengan keamanan, ketersediaan pangan, produktivitas pelaku utama pangan, dan distribusi dan pemasaran produk pertanian di perkotaan.

2.1.1.17. Skor Pola Pangan Harapan

Skor PPH Kota Makassar menunjukkan angka yang lebih rendah dibandingkan dengan skor PPH secara nasional. Secara umum, skor PPH Kota Makassar jatuh pada kategori “cukup” dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, kecuali pada tahun 2018, 2019, dan 2023 yang sempat masuk kategori “tinggi”. Beberapa faktor penghambat peningkatan skor PPH Kota Makassar di antaranya adalah akses pangan rendah akibat menurunnya daya beli masyarakat yang disebabkan oleh kemiskinan dan stabilitas harga pangan. Selain itu, ragam komoditas pangan masih terbatas yang ditunjukkan dengan sumber karbohidrat masyarakat yang masih didominasi oleh beras.

Grafik 2.22
Pola Pangan Harapan Kota Makassar dan Nasional Tahun 2014 - 2023



Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Tahun 2023

2.1.2. Demografi

2.1.2.1. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Sebagai kota metropolitan, Makassar tumbuh dengan ditunjang berbagai potensi, salah satunya adalah jumlah penduduk di atas 1 juta jiwa, dan terus berkembang. Pertumbuhan penduduk absolut Kota Makassar tahun 2023 sebesar 5.860 atau 0,25%, dari tahun 2022. Dalam tiga tahun, dari tahun 2021 sampai dengan 2023, penduduk Kota Makassar secara absolut bertambah 7.819 jiwa, yakni dari 1.462.442 di tahun 2021, menjadi 1.470.261 jiwa di tahun 2023. Pertumbuhan penduduk Kota Makassar ini dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya jumlah kelahiran, kematian, imigrasi (pendatang) dan emigrasi (penduduk keluar). Berdasarkan jumlah penduduk pada setiap Kecamatan, jumlah penduduk terbesar ada di Kecamatan Biringkanaya dengan jumlah penduduk 214.656 jiwa dan yang terkecil ada di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang dengan jumlah penduduk 14.934 jiwa. Data jumlah penduduk Kota Makassar dalam 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.21
Jumlah Penduduk Dirinci Menurut Kecamatan
Kota Makassar Tahun 2018-2023

No	Kecamatan	2018			2019			2020			2021		
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
1	Biringkanaya	118.928	115.889	234.817	105.046	103.681	209.510	105.929	105.566	211.495	105359	105551	210910
2	Bontoala	33.516	33.333	66.849	28.744	29.117	57.861	28.751	29.064	57.815	27950	28219	56169
3	Makassar	46.165	46.461	92.626	42.88	43.599	86.479	42.693	43.499	86.192	41310	42295	83605
4	Mamajang	31.504	32.190	63.694	29.54	30.53	60.070	29.453	30.490	59.943	28682	29687	58369
5	Manggala	82.807	81.209	164.016	76.063	75.186	151.989	76.803	76.749	153.552	76705	77237	153942
6	Mariso	32.169	39.922	64.091	30.135	30.234	60.369	30.087	30.155	60.242	29427	29485	58912
7	Panakkukang	84.932	83.110	168.042	73.214	73.249	146.463	73.266	73.494	146.760	71834	72492	144326
8	Rappocini	84.276	85.897	169.863	75.193	77.769	153.026	75.322	77.947	153.269	73858	76886	150744
9	Tallo	86.587	83.199	169.786	76.934	75.496	152.430	76.873	75.414	152.287	74651	73502	148153
10	Tamalanrea	61.849	59.608	121.457	52.121	51.460	103.947	52.290	52.151	104.441	51712	51948	103660
11	Tamalate	111.908	108.522	220.430	94.363	93.652	188.015	94.718	94.117	188.835	93115	93034	186149
12	Ujung Pandang	13.855	14.552	28.407	12.625	13.357	25.982	12.566	13.300	25.866	12270	13039	25309
13	Ujung tanah	21.258	20.691	41.949	19.048	18.868	37.916	19.092	18.915	38.007	18662	18486	37148
14	Wajo	19.658	18.899	38.557	16.002	15.874	31.876	15.845	15.754	31.599	15216	15319	30535
15	Kep Sangkarrang	7.590	7.603	15.193	7.246	7.265	14.547	7.272	7.337	14.609	7219	7292	14511
	Jumlah	837.002	822.775	1.659.777	739.154	741.326	1.480.480	740.960	743.952	1.484.912	727970	734472	1462442

No	Kecamatan	202			2023			Laju Pertumbuh an *)
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	
1	Biringkanaya	106,287	106,947	213,234	106.937	107.719	214.656	0,50
2	Bontoala	27,591	27,853	55,444	27.547	27.873	55.420	0,20
3	Makassar	40,758	41,567	82,325	40.783	41.508	82.291	0,10
4	Mamajang	28,559	29,619	58,178	28.604	29.634	58.238	0,02
5	Manggala	78,379	79,123	157,502	79.019	79.930	158.949	0,57
6	Mariso	29,177	29,324	58,501	29.221	29.375	58.596	0,30
7	Panakkukang	71,462	72,462	143,924	71.681	72.684	144.365	0,04
8	Rappocini	73,388	76,557	149,945	73.505	76.837	150.342	0,03
9	Tallo	74,306	73,260	147,566	74.523	73.357	147.880	0,30
10	Tamalanrea	52,097	52,490	104,587	52.495	52.943	105.438	0,05
11	Tamalate	93,248	93,601	186,849	93.627	94.138	187.765	0,40
12	Ujung Pandang	12,107	12,804	24,911	12.101	12.805	24.906	0,10
13	Ujung tanah	18,429	18,335	36,764	18.401	18.350	36.751	0,45
14	Wajo	14,717	15,065	29,782	14.652	15.078	29.730	0,21
15	Kep Sangkarrang	7,433	7,456	14,889	7.460	7.474	14.934	0,45
	Jumlah	727,938	736,463	1,464,401	730,556	739,705	1,470,26 1	0,26

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, Tahun 2023

*) Laju pertumbuhan penduduk berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Kota Makassar

Tahun 2023 jumlah penduduk Kota Makassar sebanyak 1.470.261 jiwa. Jumlah penduduk terbesar ada pada Kecamatan Biringkanaya yaitu sebesar 214.656 jiwa, sedangkan jumlah penduduk yang terkecil terdapat pada Kecamatan Kepulauan Sangkarrang yaitu 14.934 jiwa. Hal ini memberi gambaran bahwa distribusi penduduk yang terjadi di Kota Makassar tidak merata, dimana luas wilayah tidak berbanding lurus dengan jumlah penduduk, dimana kepadatan penduduk yang terbesar ada di Kecamatan Makassar, dengan kepadatan 32.655 jiwa setiap hektarnya, dan dengan kepadatan terendah ada di Kecamatan Biringkanaya dengan kepadatan 4.451 jiwa/ha.

Tahun 2023 jumlah penduduk Kota Makassar sebesar 1.470.261 jiwa terjadi peningkatan sebanyak 5.860 jiwa jika dibandingkan pada tahun 2022 sebesar 1.464.401 jiwa, hal ini dikarenakan adanya peningkatan jumlah kelahiran, pindah masuk (migrasi) penduduk. Gambaran lebih lengkap mengenai jumlah penduduk, luas, dan kepadatan penduduk Kota Makassar pada tahun 2023 adalah sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2.22
Sebaran dan Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan
Kota Makassar Tahun 2021 – 2023

No	Kecamatan	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
		Jumlah Penduduk	Luas Wilayah (ha)	kepadatan penduduk (jiwa/ha)	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah (ha)	kepadatan penduduk (jiwa/ha)	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah (ha)	kepadatan penduduk (jiwa/ha)
1	Biringkanaya	210910	4822	43.74	213,234	4,822	44.22	214.656	48,22	4.451
2	Bontoala	56169	210	267.47	55,444	210	264.02	55.420	2,10	26.390
3	Makassar	83605	252	331.77	82,325	252	326.69	82.291	2,52	32.655
4	Mamajang	58369	225	259.42	58,178	225	258.57	58.238	2,25	25.883
5	Manggala	153942	2414	63.77	157,502	2,414	65.25	158.949	24,14	6.584
6	Mariso	58912	182	323.69	58,501	182	321.43	58.596	1,82	32.195
7	Panakkukang	144326	1705	84.65	143,924	1,705	84.41	144.365	17,05	8.467
8	Rappocini	150744	923	163.32	149,945	923	162.45	150.342	9,23	16.288
9	Tallo	148153	583	254.12	147,566	583	253.11	147.880	5,83	25.365
10	Tamalanrea	103660	3184	32.56	104,587	3,184	32.85	105.438	31,84	3.311
11	Tamalate	186149	2021	92.11	186,849	2,021	92.45	187.765	20,21	9.290
12	Ujung Pandang	25309	263	96.23	24,911	263	94.72	24.906	2,63	9.469
13	Ujung Tanah	37148	440	84.43	36,764	440	83.55	36.751	4,40	8.352
14	Wajo	30535	199	153.44	29,782	199	149.66	29.730	1,99	14.939
15	Kep Sangkarrang	14511	154	94.23	14,889	154	96.68	14.934	1,54	9.697
	Jumlah	1462442	175.77	8320.20	1,464,401	175.77	8331.35	1.470.261	175.77	8.364

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tahun 2023

2.1.2.2. Komposisi Penduduk

Berdasarkan kelompok umum, Penduduk Kota Makassar terbesar berada pada kelompok umur 15-19 tahun (9,25%) dan yang terendah pada kelompok umur 60-64 tahun (3,61%). Data penduduk berdasarkan kelompok umur memberikan informasi penting terkait dengan pembangunan sosial, pasar tenaga kerja, dimana Makassar memiliki penduduk yang berada di usia produktif, sehingga kebutuhan tenaga kerja dapat relatif terpenuhi dengan adanya penduduk kelompok umur usia produktif. Penduduk Kota Makassar berdasarkan kelompok umur, disajikan dalam tabel berikut:

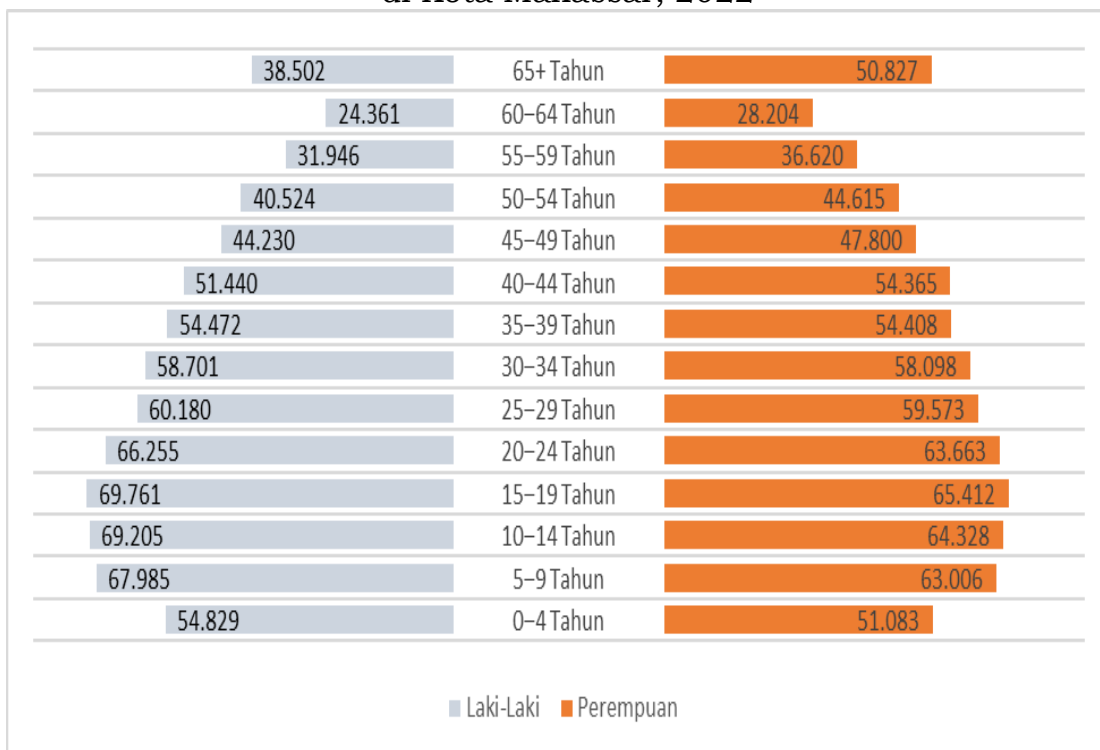
Tabel 2.23 . . .

Tabel 2.23
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur
Kota Makassar Tahun 2023

Kelompok Umur	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
0 - 4	92.719	6,31
5 - 9	130.568	8,88
10 - 14	133.932	9,11
15 - 19	135.928	9,25
20 - 24	132.834	9,03
25 - 29	120.087	8,17
30 - 34	117.428	7,98
35 - 39	109.497	7,45
40 - 44	106.311	7,23
45 -49	92.445	6,29
50 - 54	85.683	5,83
55 - 59	69.021	4,69
60 - 64	53.036	3,61
65+	90.772	6,17
Jumlah	1.470.261	100

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, Tahun 2023

Grafik 2.23
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
di Kota Makassar, 2022



Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2023

Berdasarkan jenis kelamin, penduduk Kota Makassar di tahun 2023 lebih banyak penduduk perempuan dibandingkan dengan penduduk laki-laki yakni sebesar 9,149 jiwa lebih banyak penduduk perempuan. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin berkaitan erat dengan kebijakan pembangunan berbasis . . .

berbasis gender seperti sarana prasarana kesehatan, ketenagakerjaan, dan sarana infrastruktur lainnya. Data penduduk Kota Makassar berdasarkan jenis kelamin disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.24
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Setiap Kecamatan Kota Makassar Tahun 2023

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		
		Laki-Laki	Perempuan	Total
1	Biringkanaya	106.937	107.719	214.656
2	Bontoala	27.547	27.873	55.420
3	Makassar	40.783	41.508	82.291
4	Mamajang	28.604	29.634	58.238
5	Manggala	79.019	79.930	158.949
6	Mariso	29.221	29.375	58.596
7	Panakkukang	71.681	72.684	144.365
8	Rappocini	73.505	76.837	150.342
9	Tallo	74.523	73.357	147.880
10	Tamalanrea	52.495	52.943	105.438
11	Tamalate	93.627	94.138	187.765
12	Ujung Pandang	12.101	12.805	24.906
13	Ujung Tanah	18.401	18.350	36.751
14	Wajo	14.652	15.078	29.730
15	Kep Sangkarrang	7.460	7.474	14.934
	Jumlah	730.556	739.705	1.470.261

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, Tahun 2023

Penduduk Kota Makassar berdasarkan tingkat pendidikan, yang tertinggi berada pada tingkat Sekolah Menengah (SMA/MA/Sederajat) dengan jumlah 454.380 jiwa (30,90%), dan yang terendah berada pada tingkat Doktoral (S3) yakni sebesar 2.603 jiwa atau 0,17%. Tingkat pendidikan menentukan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), dimana SDM memiliki peran yang sangat penting dalam kemajuan sebuah kota. SDM yang memiliki tingkat pendidikan dan keterampilan yang tinggi dapat memberikan kontribusi besar dalam sektor-sektor yang memerlukan keahlian khusus, seperti industri, teknologi, dan pelayanan profesional. SDM dengan pendidikan yang baik menciptakan masyarakat yang lebih terdidik, inovatif, dan dapat bersaing secara global. Pentingnya pengembangan SDM dalam kemajuan sebuah kota menunjukkan bahwa investasi dalam pendidikan, pelatihan, dan pembangunan kapasitas manusia merupakan langkah strategis untuk mencapai pertumbuhan dan keberlanjutan jangka panjang. Penduduk Kota Makassar berdasarkan tingkat pendidikannya, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.25
Penduduk Berdasarkan Pendidikan Kota Makassar, 2022

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1.	Tidak/Belum Sekolah	319.719	21,75
2.	Tidak/ Belum Tamat SD	170.111	11,57
3.	TAMAT SD/MI Sederajat	154.881	10,53

4. SMP/MTs/Sederajat . . .

4.	SMP/MTs/Sederajat	161.951	11,02
5.	SMA/MA/Sederajat	454.380	30,90
6.	Diplomat I/II/III	4.827	0,33
7.	Akademi/Diploma III/ Sarjana Muda	31.311	2,13
8.	Diplomat IV/Strata I	151.656	10,31
9.	Strata II	18.822	1,28
10.	Strata III	2.603	0,17
Jumlah		1.470.261	100

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, Tahun 2023

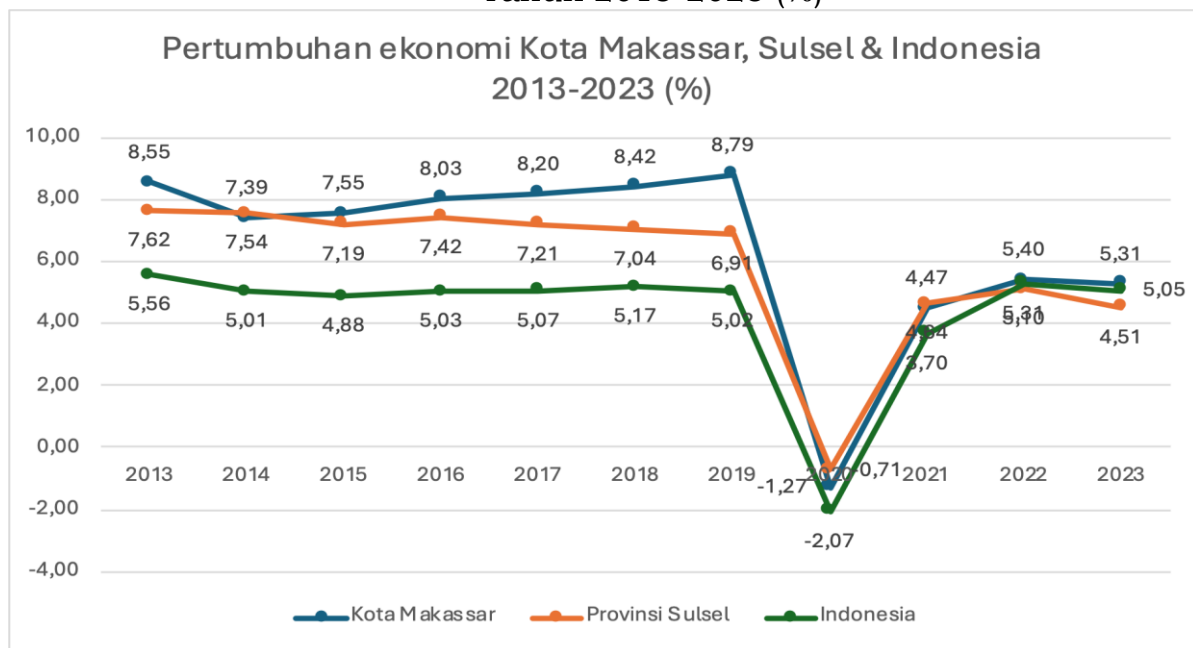
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi

2.2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Kinerja pertumbuhan ekonomi Kota Makassar dalam sepuluh tahun terakhir juga menunjukkan capaian yang stabil hingga tahun 2019, selain terus meningkat juga melebihi capaian pertumbuhan ekonomi Sul-Sel dan nasional. Setelah mengalami kontraksi akibat Covid 19 tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Kota Makassar meskipun belum pulih, tetapi konsisten menunjukkan kinerja pertumbuhan yang lebih tinggi dari capaian Sulsel dan nasional hingga tahun 2023.

Grafik 2.24
Pertumbuhan Ekonomi Kota Makassar, Sulawesi Selatan & Nasional
Tahun 2013-2023 (%)

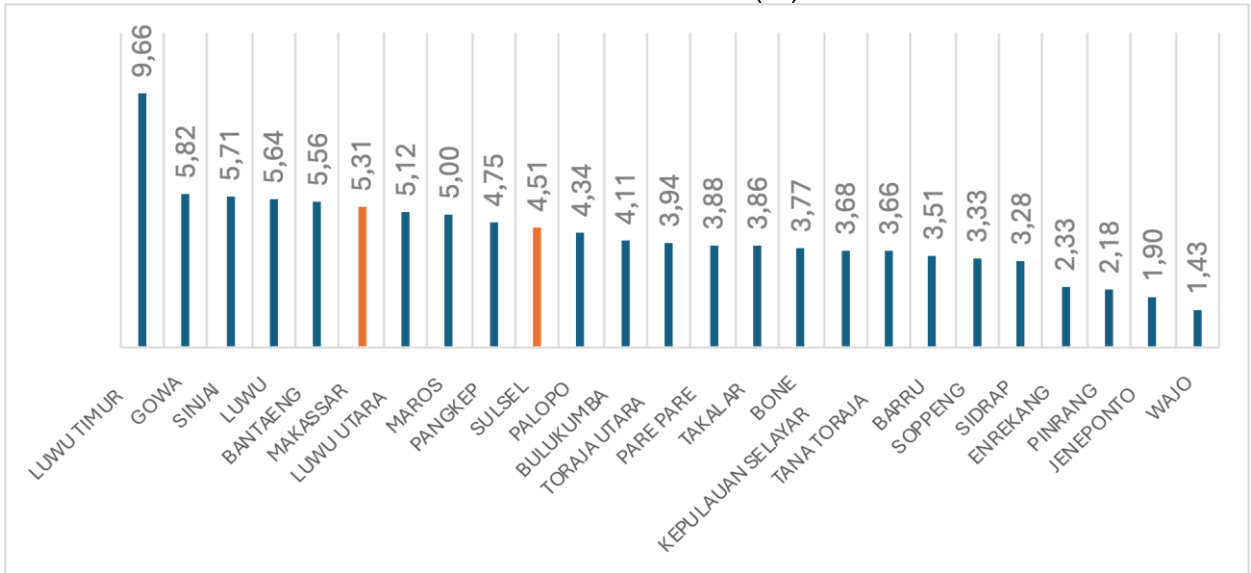


Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2024

Bila dilihat posisi relatif pertumbuhan ekonomi Kota Makassar diantara kabupaten dan kota lainnya di Sulsel pada tahun 2023, juga menunjukkan kinerja yang tidak buruk, bahkan tergolong daerah dengan tingkat pertumbuhan ekonomi enam tertinggi, melebihi delapan belas kabupaten kota lainnya di Sulsel. Tantangannya, bagaimana mempertahankannya dan terus mengoptimalkan kinerjanya agar mampu menjadi daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Sulsel ke depan. Hal ini penting, mengingat Kota Makassar berkontribusi 37 persen total PDRB Provinsi Sulsel, sehingga tinggi atau rendahnya pertumbuhan ekonomi Kota Makassar akan berdampak pada tinggi atau rendahnya pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan.

Grafik 2.25 . . .

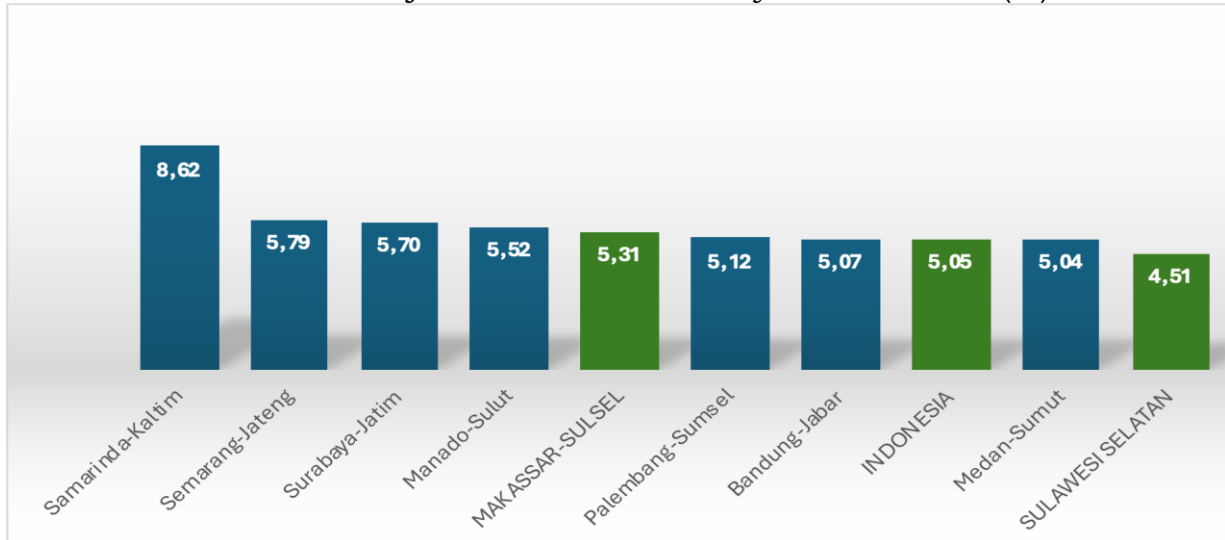
Grafik 2.25
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota & Sulawesi Selatan
Tahun 2023 (%)



Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2024

Secara nasional, posisi relatif pertumbuhan ekonomi Kota Makassar, juga tidak buruk tetapi memiliki tantangan besar untuk lebih akseleratif agar ke depan mampu setara dengan kota-kota besar yang menjadi pusat pertumbuhan pulau-pulau besar lainnya di Indonesia. Meskipun mampu bertumbuh lebih besar dari Kota Bandung (Jabar) serta di kota besar di Pulau Sumatera (Medan dan Palembang), tetapi pertumbuhan ekonomi Kota Makassar belum mampu menandingi pencapaian pertumbuhan ekonomi Kota Samarinda (Kalimantan), Semarang dan Surabaya (Jawa), serta Manado (Sulawesi).

Grafik 2.26
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Makassar dengan Provinsi Sulsel,
Nasional & Tujuh Kota Setara Lainnya Tahun 2023 (%)



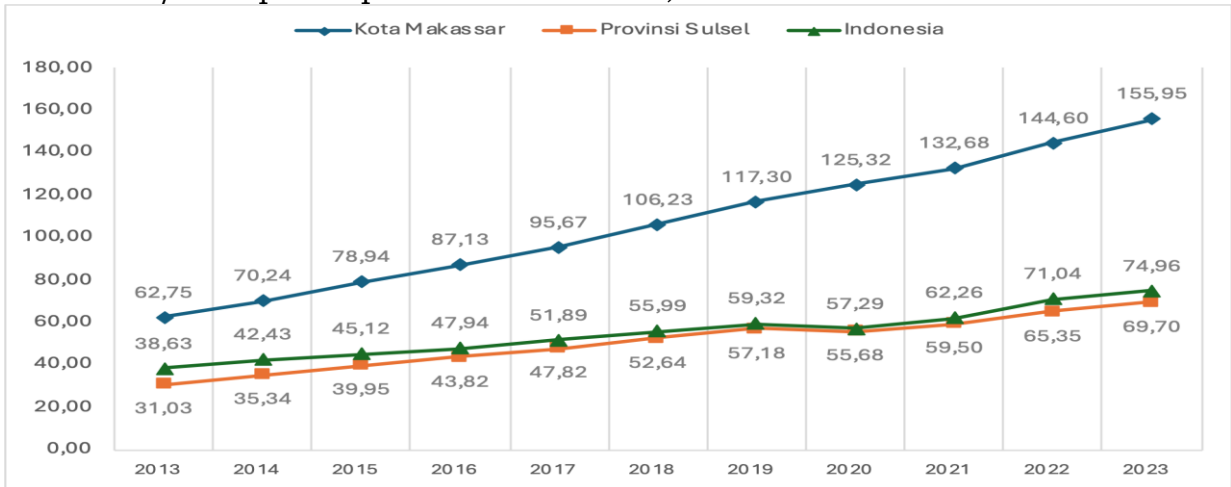
Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2024

Tantangan Kota Makassar adalah harus mampu bertumbuh setara dengan pertumbuhan ekonomi kota besar lainnya seperti Kota Surabaya, bahkan sejatinya menjadi yang tertinggi agar mampu mewujudkan, mendorong Provinsi Sulsel sebagai salah satu provinsi kontributor utama dalam mewujudkan Indonesia dengan pendapatan per kapita masyarakat yang setara dengan negara maju di dunia pada tahun 2045 yang akan datang.

2.2.1.2. PDRB Per Kapita

Pencapaian PDRB per Kapita Kota Makassar dalam sepuluh tahun terakhir menunjukkan kinerja peningkatan yang menakjubkan. Meningkat dari hanya Rp 62,75 juta pada tahun 2013 menjadi sebesar Rp155,95 juta pada tahun 2023. Kinerja peningkatan PDRB Kota Makassar jauh melampaui kinerja Provinsi Sulsel dan nasional, sehingga gap-nya akan semakin nampak melebar. Kondisi ini harus terus dipertahankan dan perlu terus ditingkatkan hingga Kota Makassar mampu mendorong peningkatan PDRB Provinsi Sulsel dapat melampaui capaian PDB per Kapita nasional dalam jangka panjang yang akan datang.

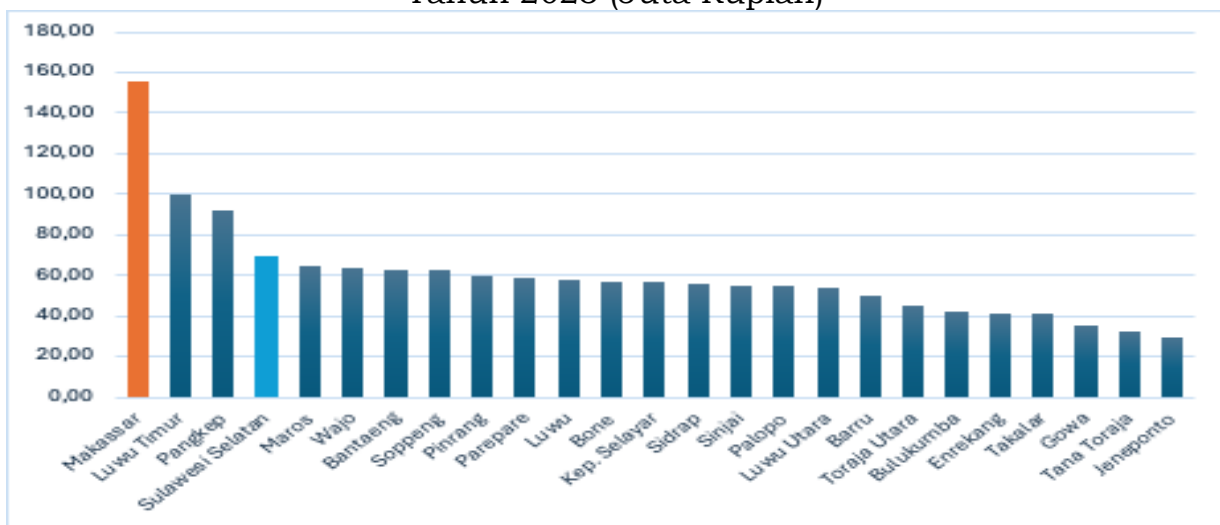
Grafik 2.27
PDRB/PDB per Kapita Kota Makassar, Sulawesi Selatan dan Nasional



Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2024

Bila dibandingkan dengan kabupaten dan kota lainnya di Provinsi Sulsel, PDRB per Kapita Kota Makassar juga menggambarkan pencapaian yang superior hingga tahun 2023. Jauh meninggalkan pencapaian Kabupaten Jeneponto yang mencatat kinerja terendah. Bahkan bila dibandingkan dengan pencapaian PDRB per Kapita Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Pangkep sebagai yang tertinggi kedua dan ketiga, Kota Makassar hanya sedikit lebih rendah bila PDRB per Kapita keduanya digabungkan. Padahal pada kedua kabupaten ini terdapat PMA dan BUMN pertambangan dan industri pengolahan berskala besar dan berlevel global dan nasional.

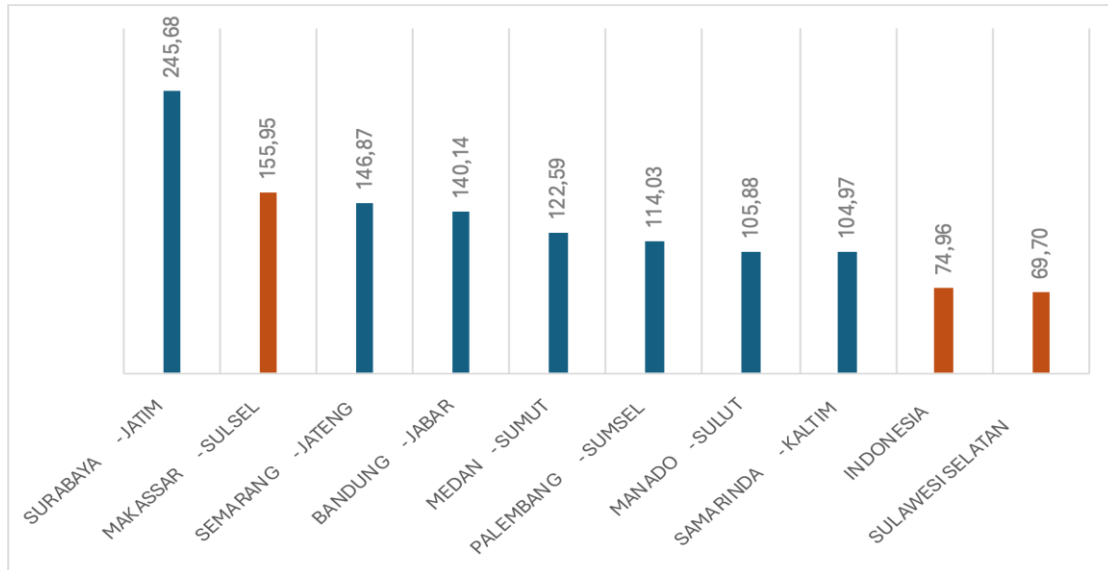
Grafik 2.28
PDRB Per Kapita Provinsi & Kab/Kota di Provinsi Sulsel
Tahun 2023 (Juta Rupiah)



Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2024

Fakta ini menggambarkan bahwa dalam hal pencapaian kinerja PDRB per Kapita Kota Makassar menunjukkan kinerja yang sangat baik. Tantangannya, pada bagaimana terus mempertahankan kinerja tersebut dan terus berusaha mengoptimalkan agar mampu setara dan bahkan melampaui pencapaian kinerja kota setara lainnya di Indonesia.

Grafik 2.29
Perbandingan PDRB Per Kapita Kota Makassar dengan Provinsi Sulawesi Selatan, Nasional & Tujuh Kota Setara lainnya Tahun 2023 (Juta Rupiah)



Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2024

Secara nasional, PDRB per kapita Kota Makassar meskipun bila dibandingkan dengan nasional dan Sulsel, serta dengan enam kota maju dari sejumlah pulau besar lainnya, nampak sudah berkinerja baik. Tetapi bila dibandingkan Kota Surabaya, maka Kota Makassar nampak masih sangat tertinggal dalam pencapaian besaran nilai PDRB per Kapita hingga tahun 2023. Kota Surabaya telah mencapai Rp245,68 juta pada tahun 2023, Kota Makassar bahkan tertinggal hingga Rp89,73 juta pada tahun yang sama. Padahal dalam berbagai hal dan dukungan kebijakan kedua kota ini relative setara, bahkan dari posisi strategis perekonomian dunia dan nasional seringkali Kota Makassar diposisikan lebih unggul dari Kota Surabaya. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi perekonomian Kota Makassar untuk mengoptimalkan segenap sumber daya ekonominya sebagai pintu gerbang perekonomian KTI dan lalu lintas utama perdagangan dunia.

2.2.1.3. PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha

Lapangan usaha yang berkontribusi paling dominan pada tahun 2023 di Kota Makassar adalah perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor, dengan kontribusi sebesar 20%, disusul industri pengolahan sebesar 19%, konstruksi 18%, informasi dan komunikasi 10%, dan jasa pendidikan 8. Lima sektor ini berkontribusi sebesar $\frac{3}{4}$ dari perekonomian Kota Makassar. Potret ini sedikit berbeda dibanding tahun 2013, dimana lapangan usaha yang berkontribusi paling besar justru berasal dari industri pengolahan 20%, disusul perdagangan 19%, konstruksi 16%, informasi dan komunikasi 10%, dan jasa pendidikan 9%.

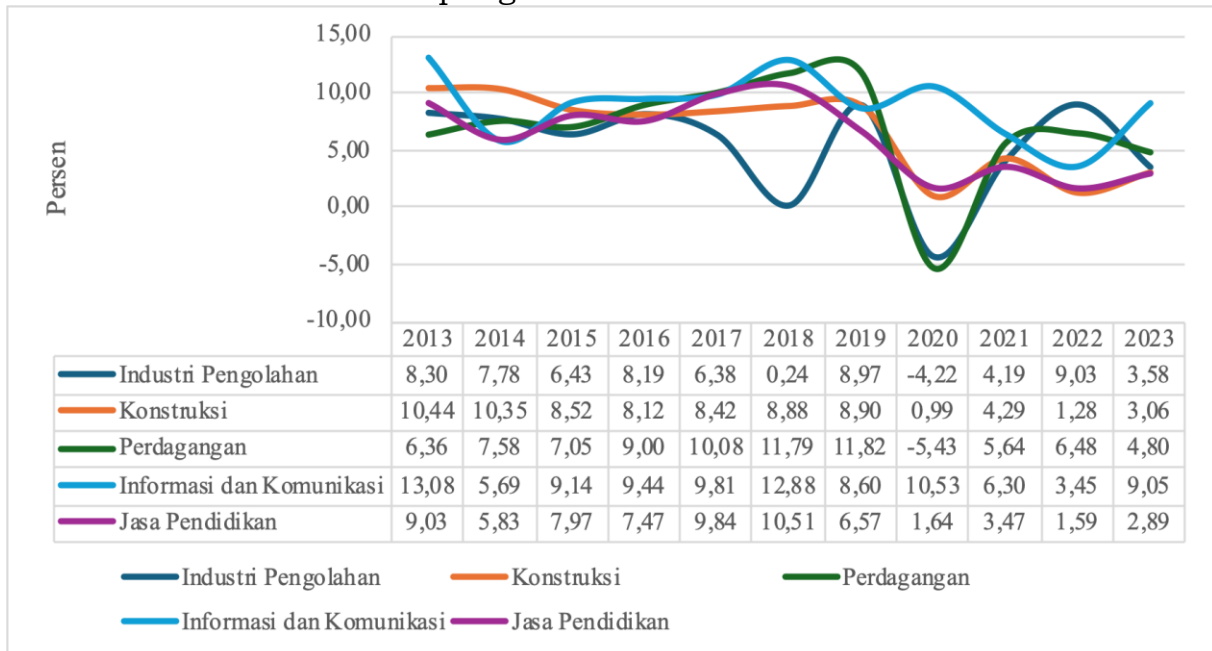
Kondisi ini menunjukkan adanya transformasi perekonomian Kota Makassar dari industri pengolahan ke sektor jasa, yang utamanya diwakili oleh pertumbuhan sektor perdagangan. Selama tahun 2013 hingga 2023, rata-rata

pertumbuhan . . .

pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor informasi dan komunikasi sebesar 8,91%, disusul oleh sektor perdagangan sebesar 6,83% dan sektor konstruksi sebesar 6,66%. Percepatan pertumbuhan pada sektor informasi dan komunikasi dipengaruhi oleh meningkatnya digitalisasi di berbagai kegiatan sosial dan ekonomi. Hal ini bisa dilihat dari proporsi penduduk pengguna internet yang semakin meningkat dari 47,34 di tahun 2013 menjadi 83,31% di tahun 2023. Sementara itu, kegiatan perdagangan masih tumbuh agresif meskipun sempat negatif sebesar -5,43% di tahun 2020. Lebih lanjut, pertumbuhan sektor konstruksi ditopang oleh banyaknya kegiatan pembangunan fisik, seperti infrastruktur, perhotelan, dan perkantoran, baik yang dilakukan oleh swasta maupun pemerintah. Sementara itu, industri pengolahan cenderung melambat, salah satunya disebabkan oleh lahan Kawasan Industri Makassar (KIMA) yang semakin terbatas, sehingga ekspansi kegiatan industri menjadi terhambat dan cenderung tidak menjadi pilihan bagi investor baru. Pengembangan sejumlah kawasan industri di luar Kota Makassar, seperti di Bantaeng, membuat sejumlah perusahaan baru menempatkan kegiatan industri-nya di daerah tersebut.

Grafik 2.30

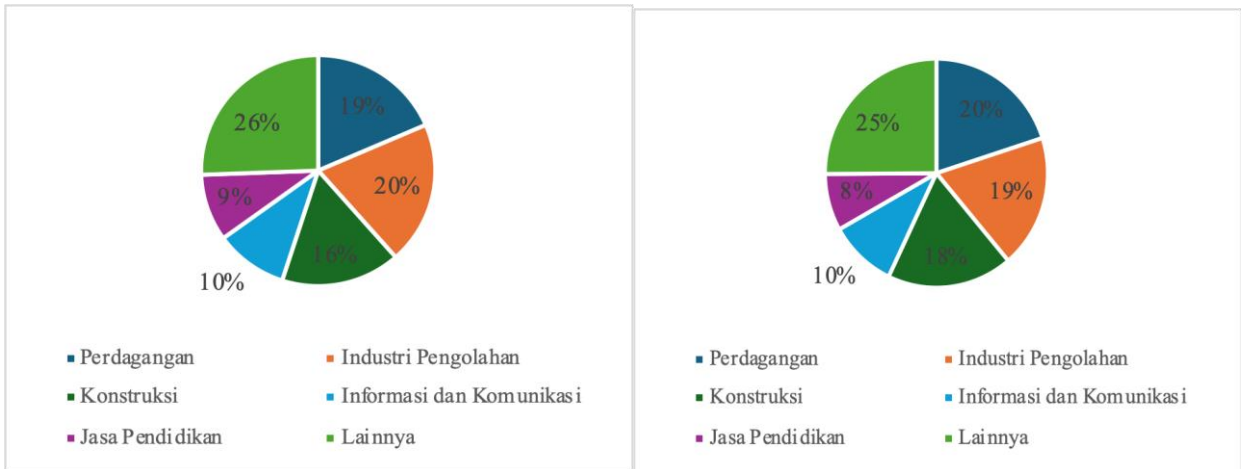
Pertumbuhan PDRB Lima Lapangan Usaha Utama Kota Makassar 2013 – 2023



Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2024

Jika dibandingkan kinerja capaian proporsi PDRB kelima sub lapangan usaha tahun 2013 dan 2023, tampak terjadi pergeseran peran. Misalnya pada tahun 2013 industri pengolahan menyumbang sekitar 20% menurun perannya menjadi 19% di tahun 2023. Penurunan peran juga dikontribusi oleh jasa Pendidikan, akan tetapi penurunan tersebut tergantikan oleh perdagangan dengan proporsi sebesar 20% dan konstruksi sebesar 18% dari sebelumnya hanya 16%.

Grafik 2.31
Proporsi PDRB Berdasarkan Lima Lapangan Usaha Utama di Kota Makassar
Tahun 2013 dan 2023

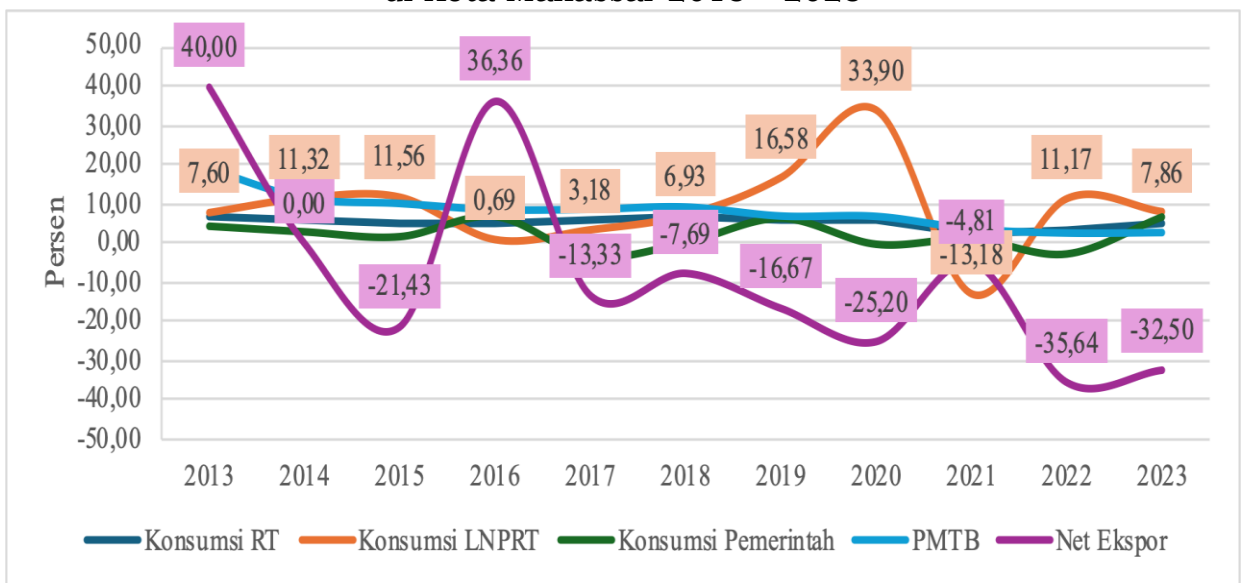


Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2024

2.2.1.4. PDRB Berdasarkan Penggunaan

PDRB yang dihitung berdasarkan penggunaan juga mengalami fluktuasi pertumbuhan selama periode 2013 – 2023. Di antara lima komponen pengeluaran, pertumbuhan net ekspor berfluktuasi cukup tinggi dengan tren yang menurun sejak tahun 2013. Fluktuasi ini dipengaruhi oleh naik turunnya permintaan barang dan jasa dari luar (ekspor) ataupun permintaan domestik terhadap barang dan jasa dari luar wilayah (impor). Tiga komponen yang tumbuh pada angka relatif konstan, yaitu konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Adapun konsumsi LNPRT tumbuh tinggi pada tahun 2019, yaitu sebesar 33,90%, karena besarnya kegiatan ekonomi untuk mendukung kegiatan pemilihan umum.

Grafik 2.32
Pertumbuhan PDRB Berdasarkan Komponen Pengeluaran
di Kota Makassar 2013 – 2023

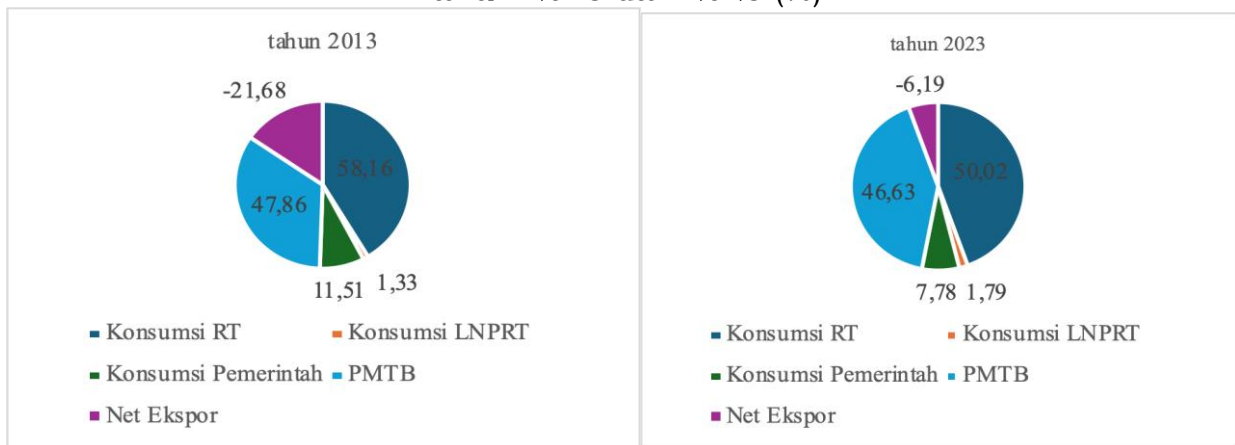


Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2024

Dari sisi kontribusi setiap komponen penggunaan, konsumsi rumah tangga tetap mendominasi pembentukan PDRB Kota Makassar di tahun 2023, meskipun menurun dibandingkan tahun 2013. Pada tahun 2013, konsumsi rumah tangga memberikan kontribusi sebesar 58,16% terhadap total PDRB, sedangkan di tahun 2023 turun menjadi 50,02%. Penurunan ini terjadi terutama sebagai akibat dari turunnya daya beli masyarakat saat pandemi COVID-19 dan cenderung belum sepenuhnya pulih. Adapun komponen yang juga . . .

juga perannya besar adalah PMTB atau pengeluaran untuk belanja modal, yang memberikan kontribusi sebesar 46,63% di tahun 2023, sedikit menurun dibanding posisi tahun 2013 yang mencapai 47,86%. PMTB salah satunya dipengaruhi oleh aliran investasi, baik dari domestik maupun asing, yang berfluktuasi dengan tren sedikit meningkat selama 11 tahun terakhir. Sementara itu, meskipun kontribusi net ekspor masih negatif di tahun 2023 yaitu sebesar -6,19%, tetapi capaian ini masih lebih baik dibanding tahun 2013 yang mencapai -21,68%.

Grafik 2.33
Proporsi PDRB Berdasarkan Komponen Pengeluaran di Kota Makassar
Tahun 2013 dan 2023 (%)

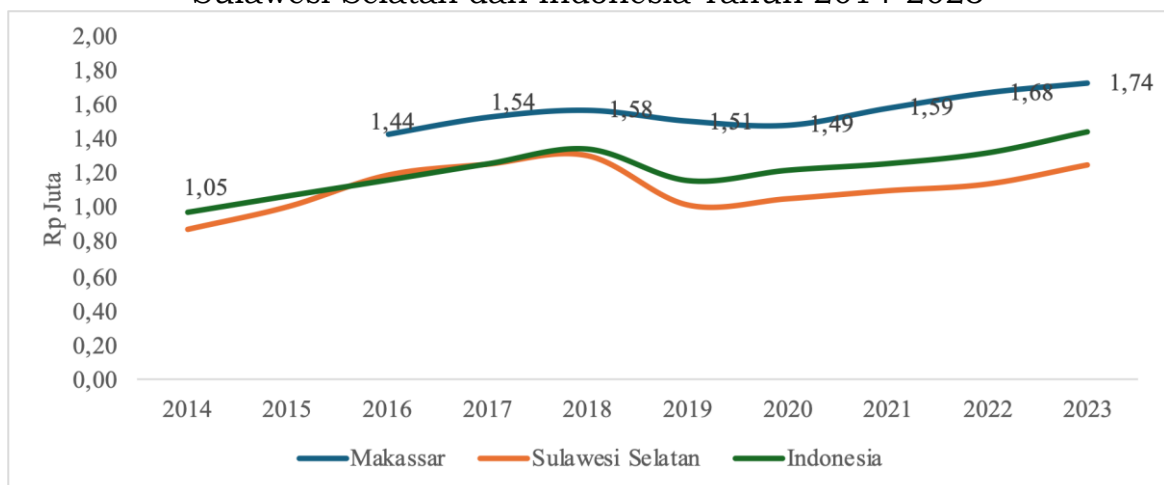


Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2024

2.2.1.5. Pengeluaran Per Kapita

Dari tahun 2014-2023, rata-rata pengeluaran per kapita dalam sebulan di Makassar mencapai Rp1,51 Juta, relatif lebih tinggi dibandingkan rata-rata Sulawesi Selatan dan Nasional yang masing-masing sebesar Rp1,12 Juta dan Rp1,23 Juta. Secara umum, terjadi peningkatan rata-rata pengeluaran per kapita di Kota Makassar sebesar 65,14 % dari Rp1,05 juta di tahun 2014 menjadi Rp1,74 juta di tahun 2023. Kenaikan pengeluaran per kapita penduduk terutama di tahun 2023 disebabkan oleh kenaikan harga sejumlah komoditas pangan dan komoditas non pangan seperti beras, cabai rawit, angkutan udara, rokok kretek filter, emas perhiasan, cabai merah, labu siam/jipang, bawang putih, ikan layang/ ikan benggol, kacang panjang, gula pasir, daging ayam ras, rokok putih dan ikan bakar.

Grafik 2.34
Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan di Makassar,
Sulawesi Selatan dan Indonesia Tahun 2014-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2024

Sementara . . .

Sementara itu, jika dibandingkan dengan daerah di sekitar Kota Makassar, rata-rata pengeluaran per kapita dalam sebulan di Makassar merupakan yang tertinggi, disusul oleh Pangkep dan Maros yang masing-masing sebesar Rp 0,97 juta dan Rp1,05 juta. Sementara itu, Kabupaten Gowa dan Takalar masing-masing mencatatkan rata-rata pengeluaran per kapita dalam sebulan sebesar Rp 0,97 juta dan Rp 0,87 juta.

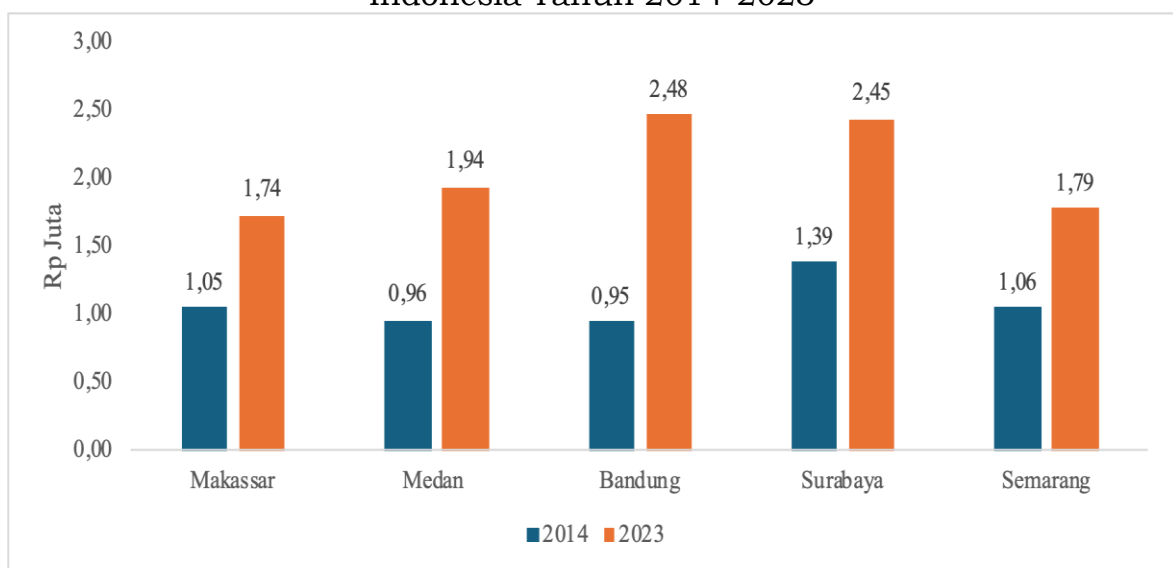
Tabel 2.26
Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan di Makassar dan Daerah Sekitar Tahun 2014-2023

Kab/Kota	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Makassar	1,05		1,44	1,54	1,58	1,51	1,49	1,59	1,68	1,74
Maros	0,72		1,01	0,99	1,02	1,10	1,12	1,14	1,16	1,20
Pangkep	0,65		0,72	0,86	1,00	0,93	0,91	1,10	1,17	1,43
Takalar	0,54		0,70	0,85	0,98	0,90	0,88	0,93	1,01	1,07
Gowa	0,61		0,84	0,86	1,01	0,94	1,08	1,04	1,12	1,19

Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2024

Jika dibandingkan dengan berbagai Kota besar lainnya, rata-rata pengeluaran per kapita sebulan Kota Makassar tertinggal dari empat kota besar lainnya ditahun 2023. Dua kota besar yang mencatatkan rata-rata pengeluaran per kapita sebulan tertinggi yakni Bandung dan Surabaya dengan masing-masing sebesar Rp2,48 juta dan Rp2,45 juta. Sementara itu, Medan dan Semarang masing-masing mencatatkan angka rata-rata pengeluaran per kapita sebulan Rp1,94 juta dan Rp1,79 juta. Rendahnya rata-rata pengeluaran per kapita Kota Makassar dibanding kota besar lainnya bisa menjadi indikasi masih rendahnya kesejahteraan ekonomi penduduk di Kota Makassar dengan penduduk di kota besar lainnya.

Grafik 2.35
Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan di Makassar, Sulawesi Selatan dan Indonesia Tahun 2014-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2024

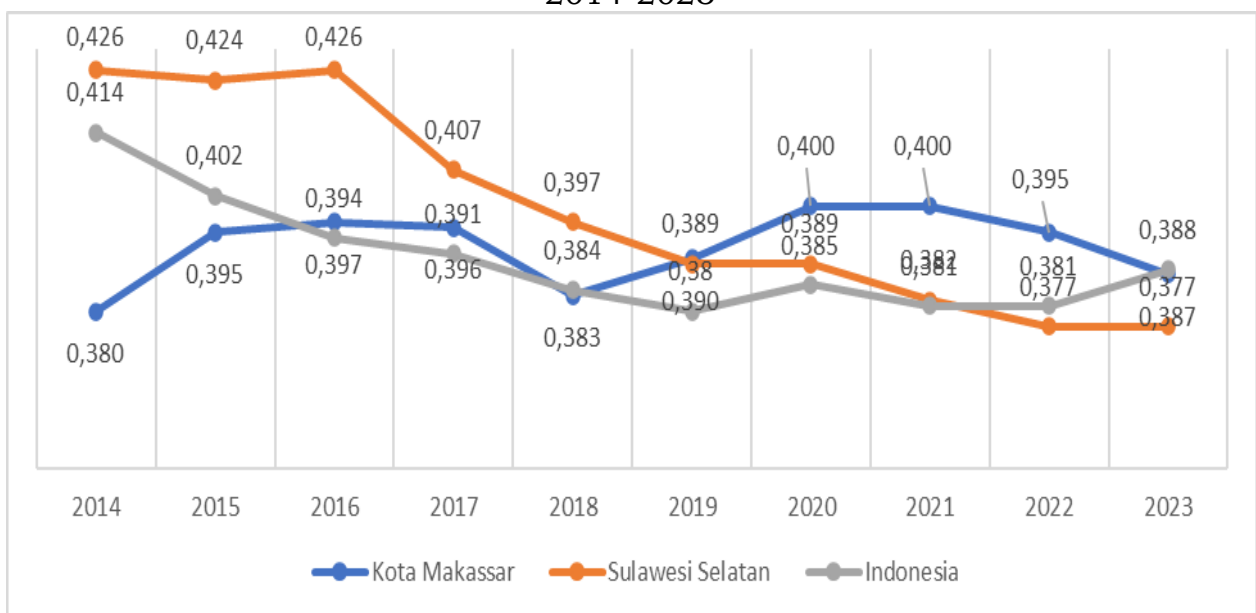
2.2.1.6. Indeks Gini

Dalam 10 tahun terakhir, ketimpangan pendapatan Kota Makassar tak kunjung menunjukkan perbaikan yang berarti dilihat dari indeks gini yang cenderung fluktuatif. Selama periode tersebut, grafik indeks gini membentuk pola huruf W terbalik. Tahun 2014 hingga 2016, indeks gini Kota Makassar

mengalami . . .

mengalami kenaikan signifikan dari 0,380, kemudian 0,395, dan 0,397. Angkanya turun di tahun 2017 dan 2018, masing-masing sebesar 0,396 dan 0,383, setelah itu kembali naik lagi hingga mencapai angka tertinggi sebesar 4,000 tahun 2020 dan 2021. Tahun 2022 angkanya turun ke 0,395 dan 2023 menjadi 0,388. Meski turun, indeks gini Kota Makassar masih lebih tinggi dari provinsi dan nasional. Kota Makassar termasuk daerah yang mencatat angka pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi meski dalam beberapa tahun melambat. Kota Makassar menguasai lebih dari 1/3 perekonomian Sulawesi Selatan yang membuat daerah ini menjadi daya tarik bagi angkatan kerja daerah lain untuk mencari pekerjaan. Meski begitu, implikasi dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi perlu dilihat lebih mendalam karena data menunjukkan, alih-alih mensejahterakan semua kelompok masyarakat, ketimpangan pendapatan di Kota Makassar masih sangat tajam.

Grafik 2.36
Indeks Gini Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Indonesia Tahun 2014-2023

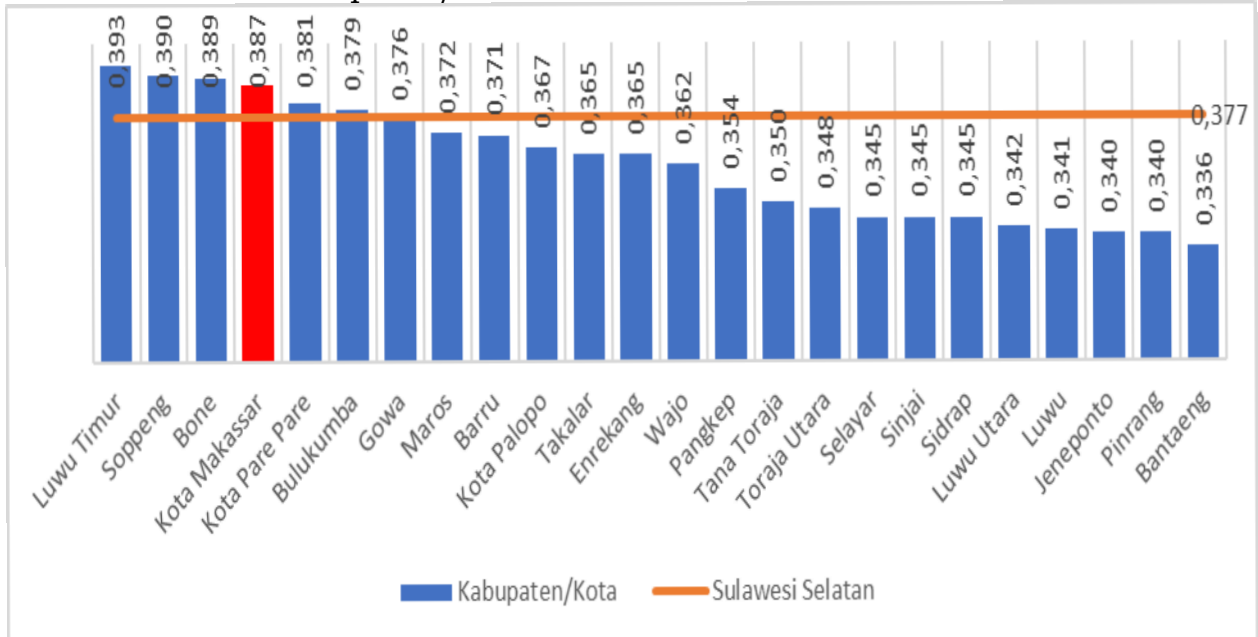


Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2024

Secara relatif, indeks gini Kota Makassar berada di urutan keempat tertinggi setelah Kabupaten Luwu Timur, Soppeng, dan Bone. Tiga daerah ini mencatat indeks gini masing-masing 0,393, 0,390, dan 0,389. Selain empat daerah tersebut, ada dua daerah lain yang memiliki indeks gini lebih tinggi dari provinsi yaitu Kota Parepare sebesar 0,381 dan Bulukumba 0,379. Posisi relatif yang masih tinggi menunjukkan bahwa isu ketimpangan pendapatan harus dimasukkan sebagai salah satu masalah pembangunan daerah yang perlu mendapat intervensi. Pemerintah daerah dalam jangka panjang perlu fokus pada kualitas pertumbuhan ekonomi, tidak semata-mata mendorong angka pertumbuhan.

Grafik 2.37

Indeks Gini Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023



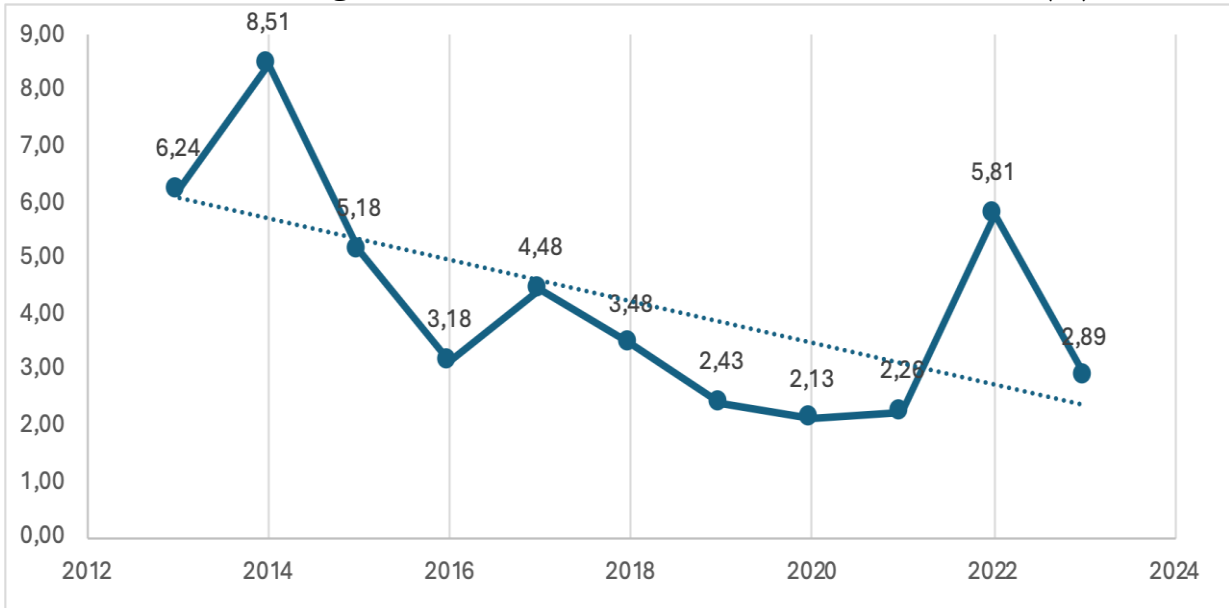
Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2024

Masih tingginya ketimpangan pendapatan di Kota Makassar, disebabkan oleh empat faktor, yaitu adanya ketimpangan peluang, pekerjaan yang tidak merata, tingginya konsentrasi kekayaan, dan ketahanan ekonomi rendah. Ketimpangan peluang berkaitan dengan Anak-anak miskin seringkali tidak memiliki kesempatan awal yang adil dalam hidup, sehingga mengurangi kemampuan mereka untuk sukses di masa depan. Setidaknya sepertiga ketimpangan disebabkan faktor-faktor di luar kendali individu. Saat anak-anak miskin memasuki pasar tenaga kerja, mereka kemungkinan akan bekerja pada pekerjaan yang berketerampilan rendah dan berupah rendah. Orang kaya akan menumpuk kekayaan mereka dengan berbagai instrumen, misalnya investasi, sementara kelompok miskin sulit untuk melakukan akumulasi kekayaan. Alih-alih berinvestasi untuk mengakumulasi kekayaan, rumah tangga miskin hanya mampu memenuhi kebutuhan hidup subsisten mereka dan ditambah dengan rumah tangga yang rentan miskin, yang sangat rawan terhadap guncangan. Empat faktor ini bisa menjadi fokus pemerintah Kota Makassar dalam jangka panjang untuk mempersempit ketimpangan pendapatan antar kelompok masyarakat.

2.2.1.7. Tingkat Inflasi Gabungan

Tingkat inflasi tahunan Kota Makassar di tahun 2023 tercatat sebesar 2,89% (yoy). Capaian tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan inflasi yoy pada Desember 2022 yang tercatat berada pada level 5,81%. Secara umum, trend inflasi tahunan di Kota Makassar dalam rentang sebelas tahun terakhir menunjukkan penurunan, menandakan bahwa laju peningkatan harga barang dan jasa secara umum lebih terkendali. Selain di tahun 2022, tingkat inflasi tahunan di Kota Makassar dalam kurun lima tahun terakhir cukup konsisten berada di kisaran angka 2%, relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian di medio sebelumnya (2013 – 2018) yang secara rata-rata masih berada di angka 5%.

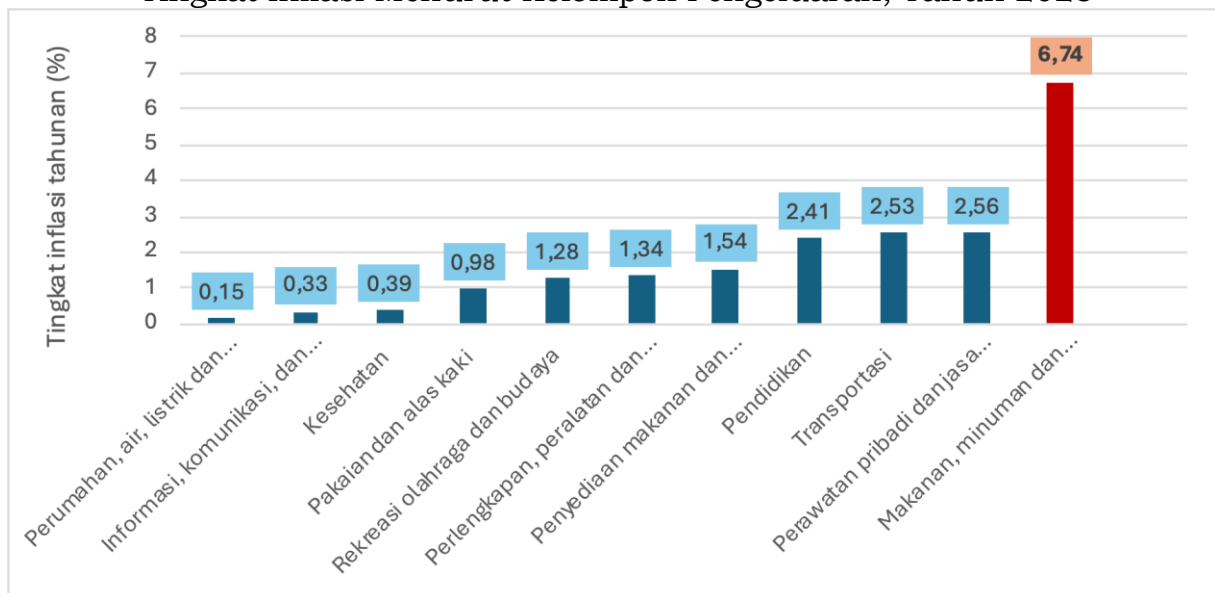
Grafik 2.38
Perkembangan inflasi Kota Makassar Tahun 2013-2023 (%)



Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2024

Inflasi yang terjadi di Kota Makassar sepanjang tahun 2023 lebih dominan didorong oleh peningkatan harga pada sejumlah kelompok pengeluaran, dimana kelompok makanan, minuman, dan tembakau mencatatkan peningkatan harga yang paling signifikan dengan besaran 6,74%. Sementara itu, dua kelompok pengeluaran dengan tingkat inflasi tertinggi lainnya adalah perawatan pribadi dan jasa lainnya (2,56%), dan juga transportasi (2,53%).

Grafik 2.39
Tingkat Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran, Tahun 2023



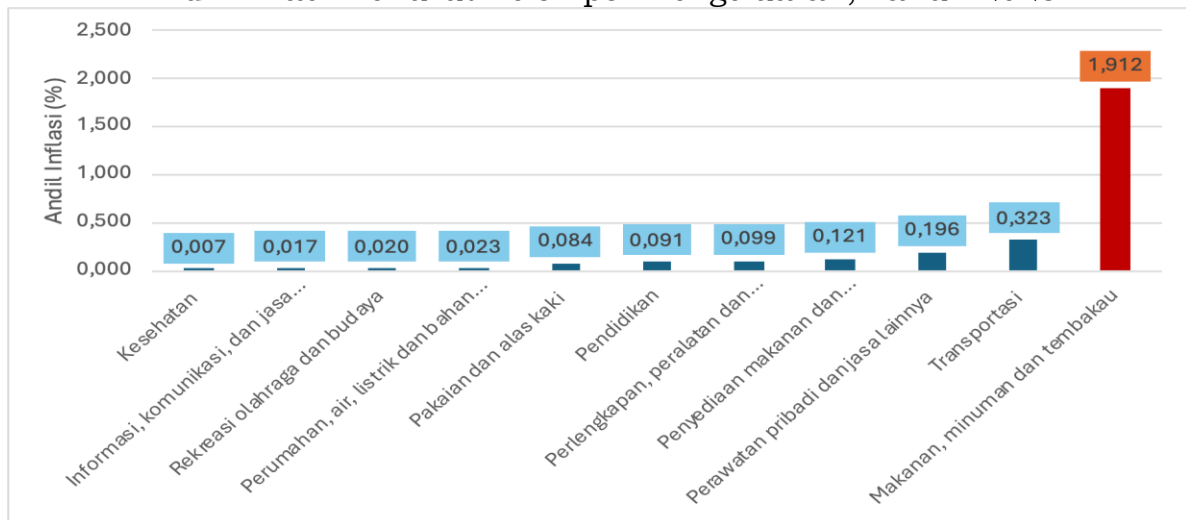
Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2024

Sementara itu, berdasarkan distribusi andil inflasi dari setiap kelompok pengeluaran, kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang inflasi tertinggi di Kota Makassar dengan nilai andil inflasi mencapai 1,912%. Selain itu, dua kelompok pengeluaran lainnya dengan andil inflasi terbesar adalah transportasi (0,323%), dan juga perawatan pribadi dan jasa lainnya (0,196%). Tingginya andil inflasi untuk kelompok makanan, minuman, dan tembakau dapat disebabkan salah satunya oleh fenomena el nino yang terjadi di sepanjang tahun 2023. Fenomena El Nino

tersebut . . .

tersebut menyebabkan terjadinya musim kemarau yang lebih panjang dan kering, sehingga menyebabkan terjadinya kekeringan pada sejumlah lahan pertanian. Hal ini mengimplikasikan kenaikan pada harga-harga bahan pangan, khususnya beras. Sementara itu, adanya eskalasi konflik dan instabilitas geopolitik global juga menjadi salah satu pemicu meningkatnya harga-harga pangan. Hal ini dimulai ketika konflik Rusia-Ukraina pecah di akhir Tahun 2021 hingga saat ini, serta meningkatnya ketegangan antara beberapa negara di Timur Tengah yang berpotensi dapat mengganggu sistem logistik dan rantai pasok global.

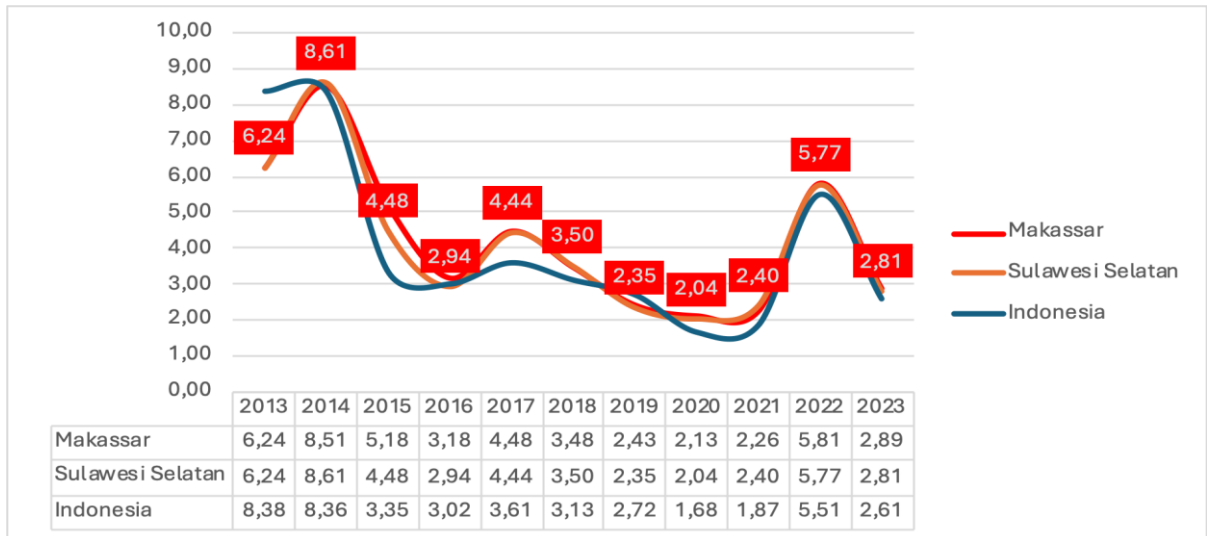
Grafik 2.40
Andil Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran, Tahun 2023



Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2024

Jika dibandingkan dengan tingkat inflasi di level provinsi dan nasional, tampak pergerakannya mempunyai pola yang sama, namun capaian tingkat inflasi tahunan di Kota Makassar relative masih lebih tinggi. Di tahun 2023, inflasi sepanjang tahun di Provinsi Sulawesi Selatan berada di level 2,81%, sedangkan nasional sebesar 2,61%. Hal ini dapat menjadi salah satu indikasi bahwa kenaikan harga-harga barang dan jasa secara umum di Kota Makassar berlangsung relatif lebih cepat jika dibandingkan dengan rata-rata wilayah lainnya di level provinsi maupun nasional. Salah satu penyebabnya adalah posisi Kota Makassar sebagai ibukota provinsi dan juga merupakan salah satu kota metropolitan yang menjadi motor penggerak perekonomian, khusus di wilayah Indonesia Bagian Timur, dimana kebutuhan dan permintaan terhadap barang dan jasa relatif lebih besar. Dalam kurun dua tahun terakhir (2022 – 2023), tingkat inflasi tahunan di Kota Makassar tercatat lebih tinggi jika dibandingkan dengan inflasi di level provinsi maupun nasional, meskipun dengan margin yang relatif tidak signifikan. Namun pada umumnya, pola pergerakan tingkat inflasi tahunan di Kota Makassar cenderung mengikuti trend yang sama pada level nasional maupun provinsi.

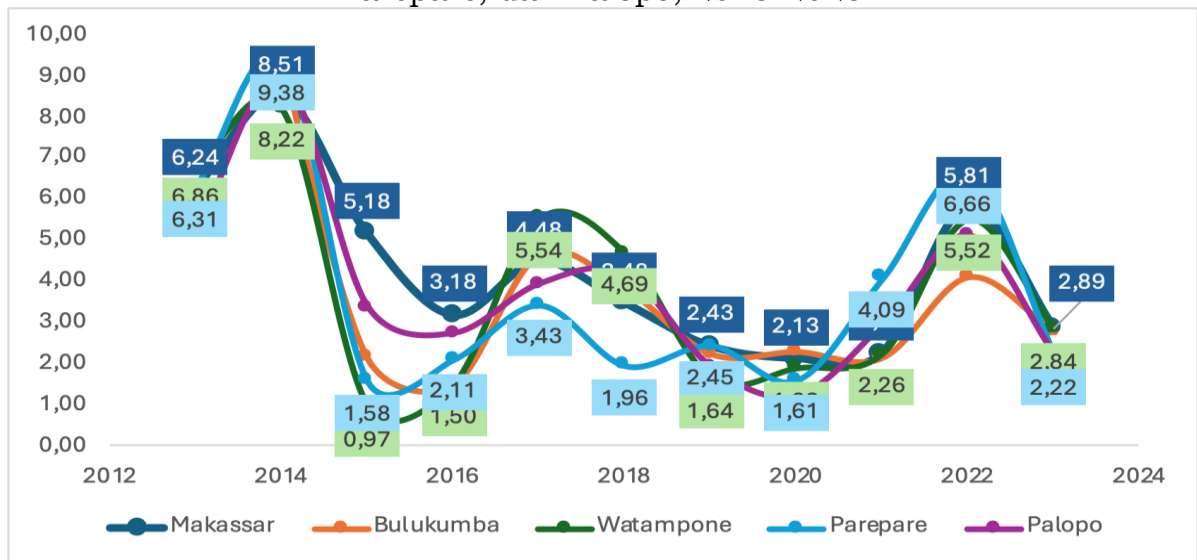
Grafik 2.41
Perkembangan Inflasi Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dan Nasional, Tahun 2013-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2024

Jika mengacu pada perbandingan dengan keempat kota inflasi lainnya di Sulawesi Selatan, level inflasi yang terjadi di Kota Makassar selama periode 11 tahun terakhir mempunyai pola yang sama dengan keempat kabupaten/kota tersebut. Pada tiga tahun terakhir, inflasi di Kota Parepare menempati urutan tertinggi yang berarti kenaikan harga barang di Kota Parepare lebih tinggi daripada Kota Makassar kecuali tahun 2023. Tingkat inflasi di Kota Makassar bergerak naik di tahun 2023 sebesar 2,89% dan merupakan tertinggi dari kabupaten/kota lainnya yaitu Watampone (2,84%), Bulukumba (2,78%), Parepare (2,22%), dan juga Palopo (2,21%). Dalam kurun sebelas tahun terakhir (2013-2023), trend yang diperlihatkan pada laju inflasi di kelima kota tersebut cenderung menunjukkan pola yang sama. Akan tetapi, jika dihitung berdasarkan angka rata-rata, maka capaian rata-rata tingkat inflasi di Kota Makassar relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan empat kota inflasi lainnya. Rata-rata tingkat inflasi tahunan Kota Makassar dalam kurun 2013-2023 sebesar 4,24%, lebih tinggi jika dibandingkan dengan empat kota lainnya yang berada di kisaran angka 3%.

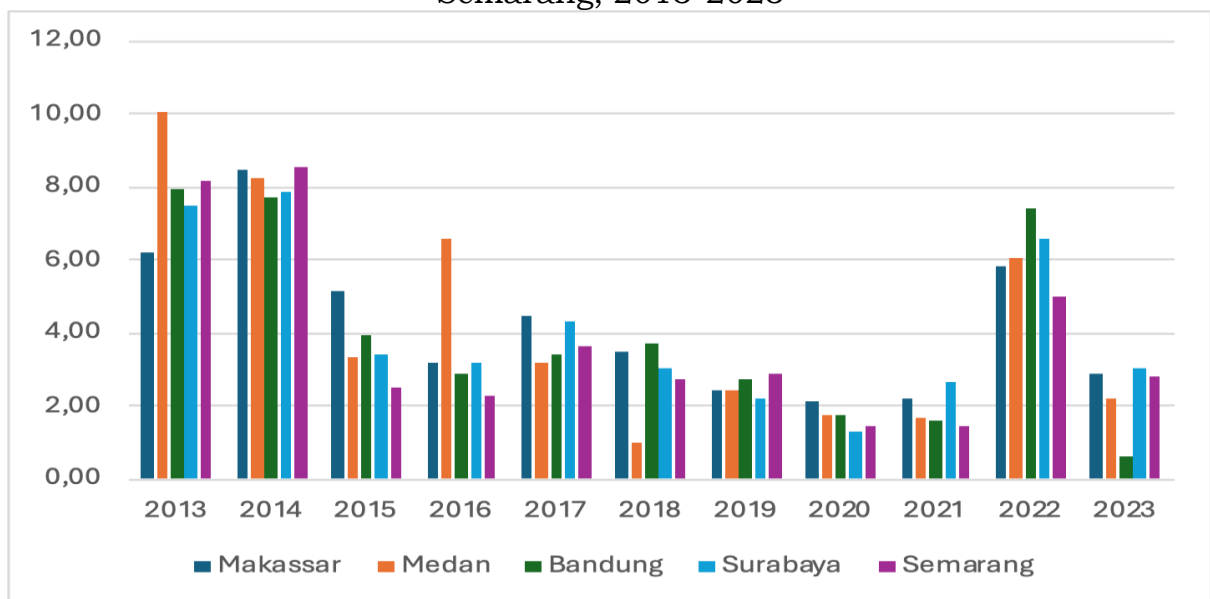
Grafik 2.42
Perkembangan Inflasi Kota Makassar, Bulukumba, Watampone, Parepare, dan Palopo, 2013-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2024

Perbandingan tingkat inflasi tahunan dengan empat ibukota provinsi lainnya di Indonesia, yakni Kota Surabaya, Bandung, Semarang, dan Medan, juga cenderung memperlihatkan pola yang sama. Meskipun demikian, capaian di tahun 2023 menunjukkan bahwa tingkat inflasi di Kota Makassar masih relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan sejumlah kota besar lainnya seperti Medan (2,19%), Bandung (0,63%), dan juga Semarang (2,84%). Dari perbandingan dengan keempat kota besar lainnya, rata-rata tingkat inflasi tahunan di Kota Makassar dalam kurun sebelas tahun terakhir masih menunjukkan angka yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan kota besar lainnya. Rata-rata laju inflasi Kota Makassar selama 2013-2023 menunjukkan angka 4,24%, sama dengan Kota Medan. Sementara itu, rata-rata tingkat inflasi tahunan pada Kota Surabaya dan Bandung berada di level masing-masing 4,12% dan 4,01%, lalu Kota Semarang dengan capaian rata-rata terendah yakni 3,79%.

Grafik 2.43
Perkembangan Inflasi Kota Makassar, Medan, Bandung, Surabaya, dan Semarang, 2013-2023

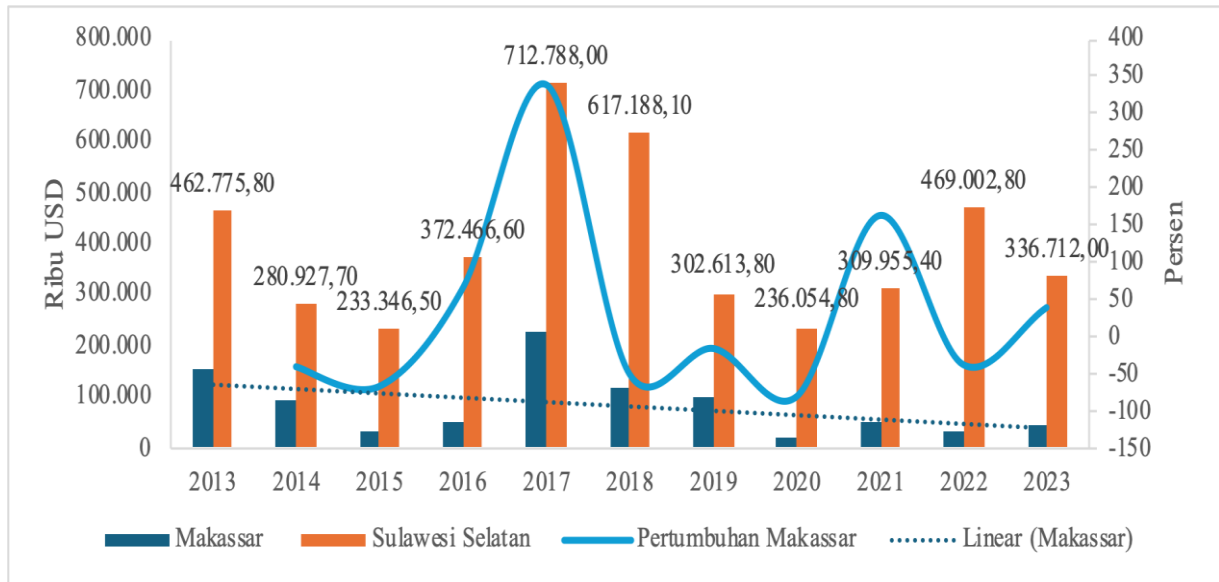


Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2024

2.2.1.8. Persentase Peningkatan Investasi Daerah

Data menunjukkan total PMA di Kota Makassar mengalami fluktuasi selama tahun 2013 – 2023 dan secara umum mengalami tren penurunan. PMA ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor seperti terjadinya pandemi Covid-19, kebijakan pemerintah, kondisi makroekonomi, serta kondisi sosial dan politik, baik di tingkat lokal maupun nasional. Penurunan investasi terjadi di beberapa periode, termasuk pada tahun 2020 saat pandemi Covid-19 terjadi. PMA turun dari USD 96.862,50 ribu di tahun 2019 menjadi USD 19.132,30 ribu di tahun 2020. Meskipun telah memasuki pemulihan ekonomi, capaian PMA Kota Makassar belum sepenuhnya menyamai kondisi sebelum pandemi. Hal ini karena investor asing masih *wait and see* terhadap prospek bisnis ke depan di tengah gejolak ekonomi global yang masih belum sepenuhnya pulih dan diperparah oleh konflik di sejumlah negara, seperti perang Rusia – Ukraina dan perang di timur tengah.

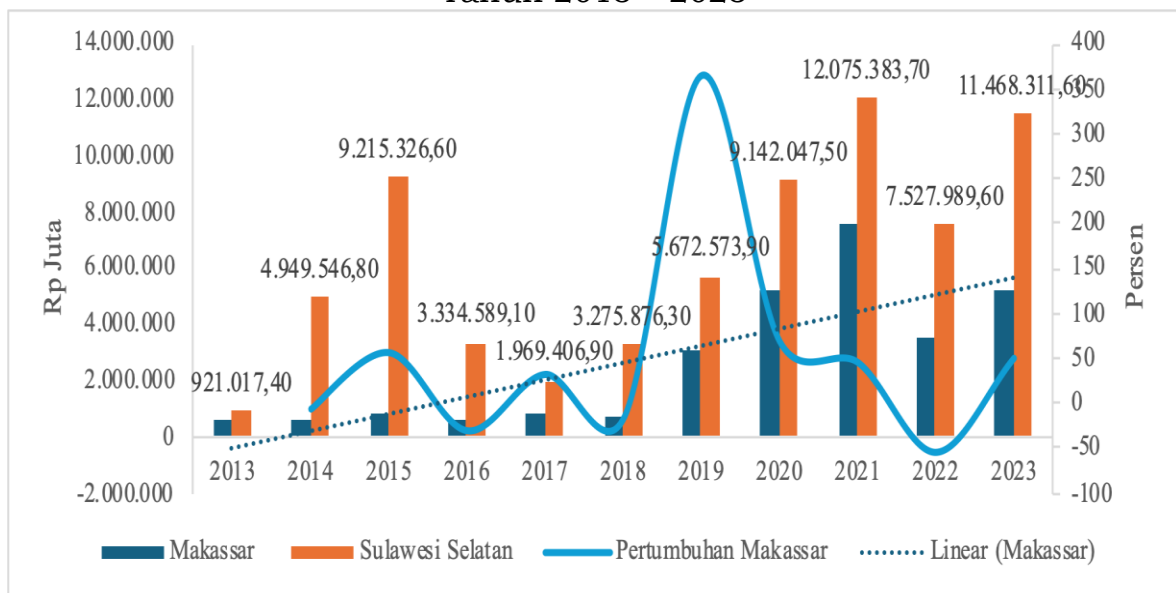
Grafik 2.44
Perkembangan PMA Kota Makassar dan Provinsi Sulawesi Selatan,
Tahun 2013 – 2023



Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2024

Sementara itu, PMDN di Kota Makassar juga terus mengalami fluktuasi dengan tren meningkat. Bahkan, saat pandemi Covid-19, PMDN masih mengalami kenaikan dari Rp3.067.061,1 juta di tahun 2019 menjadi Rp5.190.003,6 di tahun 2020. Penurunan justru terjadi di tahun 2022, yaitu menjadi sebesar Rp3.483.455,70, setelah sebelumnya mencapai Rp 7.571.355,80 di tahun 2021. Investor domestik memang cenderung tidak terpengaruh oleh kondisi global, tetapi lebih pada potensi dan tantangan lokal. Beberapa sektor unggulan yang menjadi tujuan investasi PMDN di Kota Makassar, seperti industri makanan dan minuman.

Grafik 2.45
Perkembangan PMDN Kota Makassar dan Provinsi Sulawesi Selatan,
Tahun 2013 – 2023



Sumber: Badan Pusat Statistik diolah, Tahun 2024

Sementara itu, akumulasi PMA dan PMDN di Kota Makassar menunjukkan tren meningkat, tetapi tetap berfluktuasi. Penurunan terjadi di sejumlah tahun, seperti 2018 dan 2022, sedangkan peningkatan signifikan yang ditandai dengan pertumbuhan tinggi terjadi di tahun 2017 (199,19%),

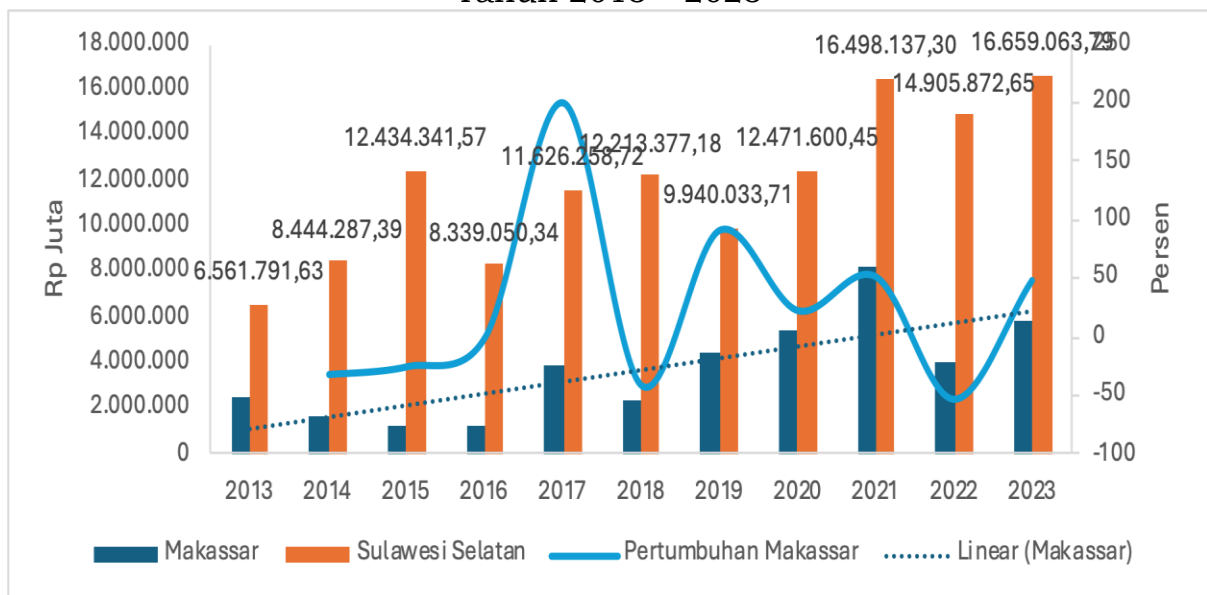
2019 ...

2019 (91,12%), dan 2023 (48,67%). Pada tahun 2017, terjadi kenaikan investasi yang signifikan pada industri makanan dan minuman menjadi USD 182.189 ribu, dari yang sebelumnya hanya sebesar USD 45.096,5 ribu di tahun 2016. Sementara itu, kenaikan investasi juga terjadi di tahun 2019 yang berasal dari sektor transportasi, gudang, dan telekomunikasi menjadi sebesar USD 34.700,4 di tahun 2019, dari tahun sebelumnya tidak ada investasi di sektor tersebut. Terakhir, di tahun 2023, terjadi kenaikan investasi di industri lainnya menjadi sebesar Rp. 277,5 miliar, dari tahun sebelumnya hanya sebesar Rp88,9 miliar. Tahun 2022 dan 2023 juga ditandai dengan peningkatan investasi di sektor konstruksi sejalan dengan pembangunan jalan tol layang AP Pettarani.

Kinerja investasi baik dalam bentuk PMA maupun PMDN di Kota Makassar tidak terlepas dari berbagai capaian pembangunan ekonomi Kota Makassar seperti fasilitas infrastruktur jalan yang semakin membaik, ketersediaan listrik, dan telekomunikasi, lembaga-lembaga perbankan dan non-perbankan, serta tak kalah pentingnya adalah kebijakan-kebijakan pemerintah kota untuk menarik para investor. Kesemuanya ini merupakan faktor-faktor yang secara umum penyebab ketertarikan para investor untuk menanamkan modalnya. Di sisi lain, perubahan kebijakan nasional, perubahan iklim investasi dunia seperti nilai tukar, dan kondisi politik nasional dan dunia juga secara signifikan turut berpengaruh terhadap kegiatan investasi suatu daerah termasuk Kota Makassar.

Grafik 2.46

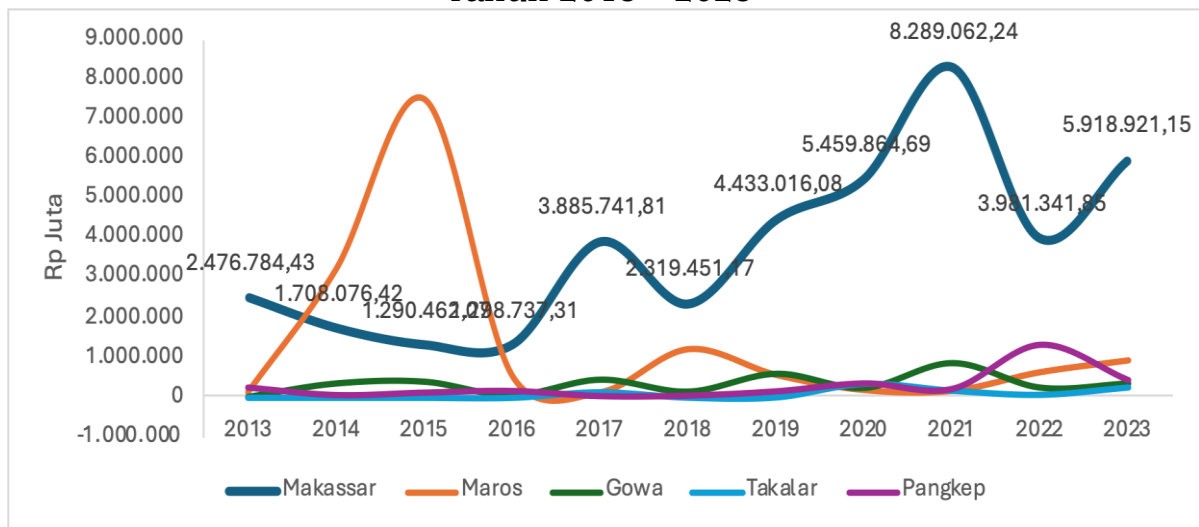
Perkembangan PMA dan PMDN Kota Makassar dan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2013 – 2023



Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2024

Dibandingkan dengan kabupaten lain di wilayah Mamminasata, yaitu: Gowa, Maros, dan Takalar, capaian PMA/PMDN Kota Makassar secara umum tergolong paling tinggi selama periode 2013 – 2023, kecuali di tahun 2014 dan 2015 yang berada di bawah Kabupaten Maros. Sebagai wilayah dengan keberadaan Kawasan Industri (KIMA) yang telah maju, menjadikan Kota Makassar sebagai lokasi yang berdaya saing bagi masuknya PMA. Ketersediaan infrastruktur seperti pelabuhan dan bandara juga turut berkontribusi bagi tingginya daya saing wilayah ini dibanding wilayah sekitarnya.

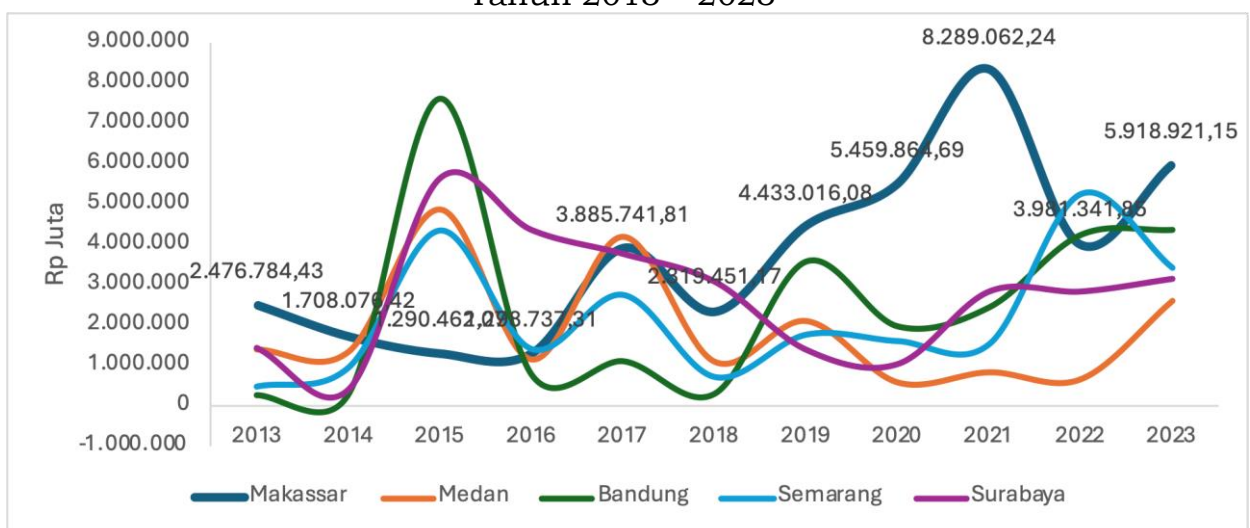
Grafik 2.47
Perkembangan PMA dan PMDN Kota Makassar dan Daerah Sekitar,
Tahun 2013 – 2023



Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2024

Sementara itu, apabila dibandingkan dengan kota besar lainnya di Indonesia, posisi investasi Kota Makassar juga relatif tinggi, terutama pada tahun 2019 hingga 2021. Hal ini menunjukkan bahwa daya saing investasi di Kota Makassar tidak kalah dengan kota besar lainnya di Indonesia. Bahkan ketika terjadi pandemi Covid-19, dimana seluruh kota besar mengalami penurunan investasi, Kota Makassar justru tetap tumbuh positif. Daya tarik investasi yang dimiliki oleh Kota Makassar ini merupakan keunggulan yang mesti dimanfaatkan untuk menarik lebih banyak lagi investasi, baik yang sifatnya domestik maupun asing. Namun, perlu menjadi perhatian bahwa investasi mesti memberikan manfaat bagi masyarakat lokal, terutama dalam hal perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan. Jika diamati perkembangan tingkat pengangguran di Kota Makassar yang tergolong tinggi, hal tersebut menandakan bahwa kehadiran investasi belum sepenuhnya mampu menyerap tenaga kerja yang tersedia di Kota Makassar.

Grafik 2.48
Perkembangan PMA dan PMDN Kota Makassar dan Kota Besar Lainnya,
Tahun 2013 – 2023



Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2024

Secara umum dapat disimpulkan bahwa nilai dan persentase peningkatan investasi di Kota Makassar baik dalam bentuk PMA maupun PMDN selama sebelas tahun terakhir memperlihatkan kinerja yang meningkat namun cukup berfluktuasi . . .

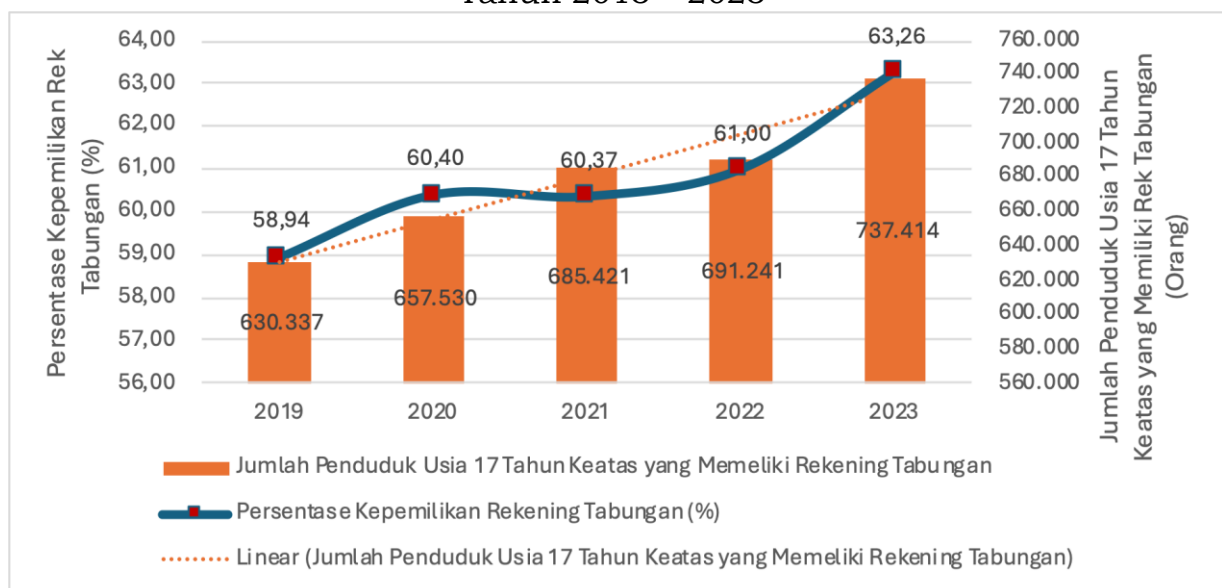
berfluktuasi. Posisi relatif Kota Makassar dalam hal nilai investasi adalah lebih berdaya saing dibandingkan dengan kabupaten di Kawasan Mamminasata dan sejumlah kota yang relatif setara di Indonesia. Meskipun demikian, percepatan pertumbuhan investasi Kota Makassar selama periode 2013-2023 secara rata-rata relatif lebih rendah dari capaian kinerja investasi keempat kota tersebut. Ketidakstabilan capaian investasi tidak terlepas dari perubahan dalam kondisi ekonomi global, regional, atau nasional dapat mempengaruhi keputusan sektor swasta untuk melakukan investasi. Fluktuasi nilai tukar mata uang dan perubahan kebijakan perdagangan dapat mengurangi daya tarik investasi di Kota Makassar

2.2.1.9. Tingkat Kepemilikan Rekening Tabungan

Kepemilikan rekening tabungan cenderung memperlihatkan tren peningkatan dalam kurun lima tahun terakhir (2019-2023). Dalam lima tahun terakhir, tingkat kepemilikan rekening tabungan di Kota Makassar oleh penduduk berusia tujuh belas tahun keatas telah berada di kisaran 60% keatas. Capaian tertinggi ditunjukkan pada Tahun 2023, dimana tingkat kepemilikan rekening tabungan di Kota Makassar telah menyentuh angka 63,26%, atau sebanyak kurang lebih 730 ribu orang. Jika dibandingkan dengan angka di Tahun 2019, jumlah penduduk usia tujuh belas tahun keatas yang telah memiliki rekening tabungan di institusi keuangan telah mengalami peningkatan sebesar 17%.

Meskipun demikian, sebagai salah satu kota yang menjadi pilar utama pembangunan ekonomi di Indonesia, tingkat penetrasi kepemilikan rekening tabungan di kisaran 60% tersebut juga masih mengindikasikan banyaknya masyarakat di usia tujuh belas tahun keatas yang belum memiliki rekening tabungan. Dalam kurun lima tahun terakhir, proporsi masyarakat yang masih belum memiliki rekening tabungan masih berada di kisaran angka 37-40%, suatu proporsi yang masih cukup besar untuk ukuran ibukota provinsi, sekaligus penggerak utama perekonomian di Kawasan Timur Indonesia.

Grafik 2.49
Persentase Kepemilikan Rekening tabungan di Kota Makassar,
Tahun 2013 – 2023

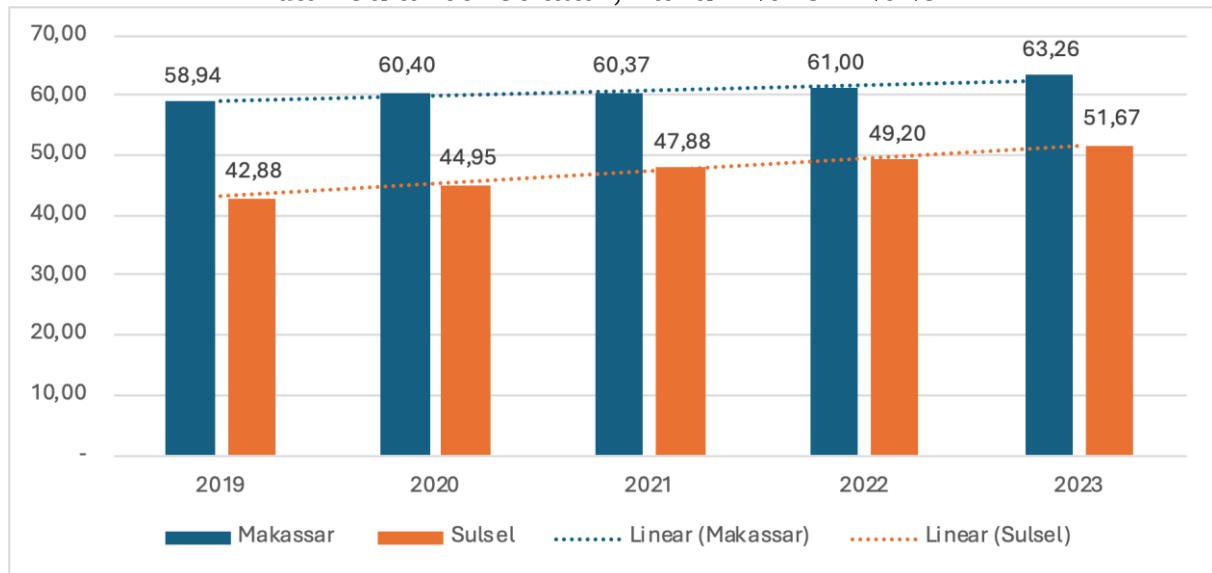


Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2024

Jika dibandingkan dengan pencapaian di level provinsi, tingkat kepemilikan rekening tabungan di Kota Makassar relatif lebih tinggi. Dalam kurun lima tahun terakhir, proporsi penduduk usia tujuh belas tahun keatas yang telah memiliki rekening tabungan di Sulawesi Selatan masih berada di kisaran . . .

kisaran angka 50% kebawah. Capaian tertinggi pada level provinsi ditunjukkan pada pencapaian di Tahun 2023, dimana tingkat kepemilikan rekening tabungan untuk pertama kalinya menembus angka 50%, yakni di level 51,67%, relative masih lebih rendah jika dibandingkan dengan pencapaian Kota Makassar dalam kurun lima tahun terakhir.

Grafik 2.50
Perkembangan Persentase Kepemilikan Tabungan Kota Makassar dan Sulawesi Selatan, Tahun 2013 – 2023

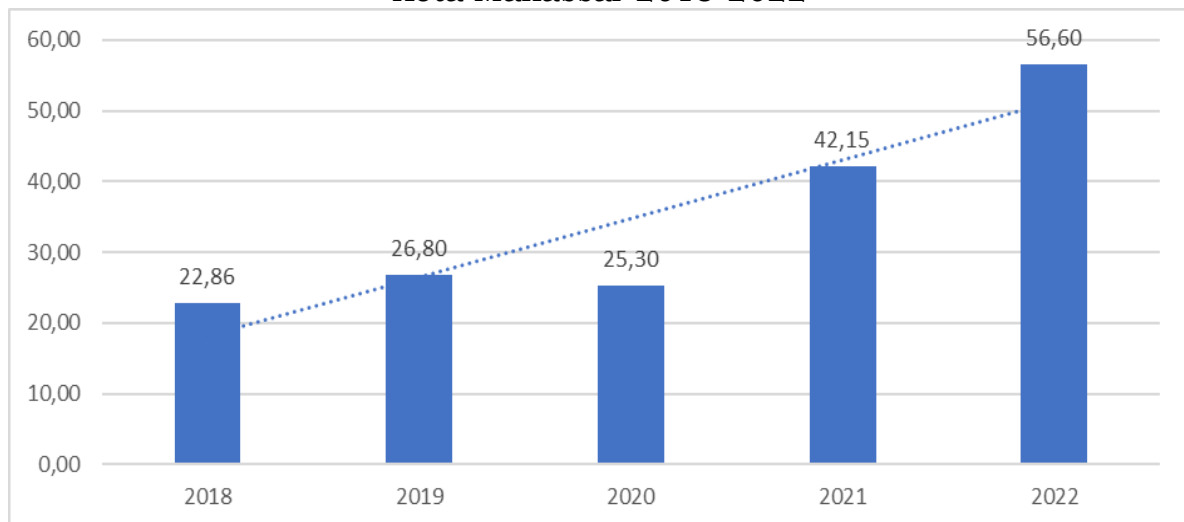


Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2024

2.2.1.10. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Makassar cenderung memperlihatkan tren peningkatan yang cukup signifikan sejak tahun 2018 hingga tahun 2022. Ditahun 2018, IPKD Kota Makassar tercatat sebesar 22,86. Angka tersebut mengalami peningkatan hingga lebih dari 147% menjadi 56,60 ditahun 2022. Skor IPKD ditahun 2022 menjadi yang tertinggi dalam rentang tahun tersebut. Secara historik, rata-rata skor IPKD Kota Makassar periode 2021-2022 (25%) relatif jauh lebih besar jika dibandingkan dengan rata-rata skor di rentang 2018-2020 (49%). Namun demikian, dalam kurun 2018-2022, IPKD Kota Makassar masih selalu termasuk dalam kategori “Sangat Perlu Perbaikan”.

Grafik 2.51
Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Makassar 2018-2022



Sumber: Badan Pengembangan dan Penelitian Kemendagri, Tahun 2023

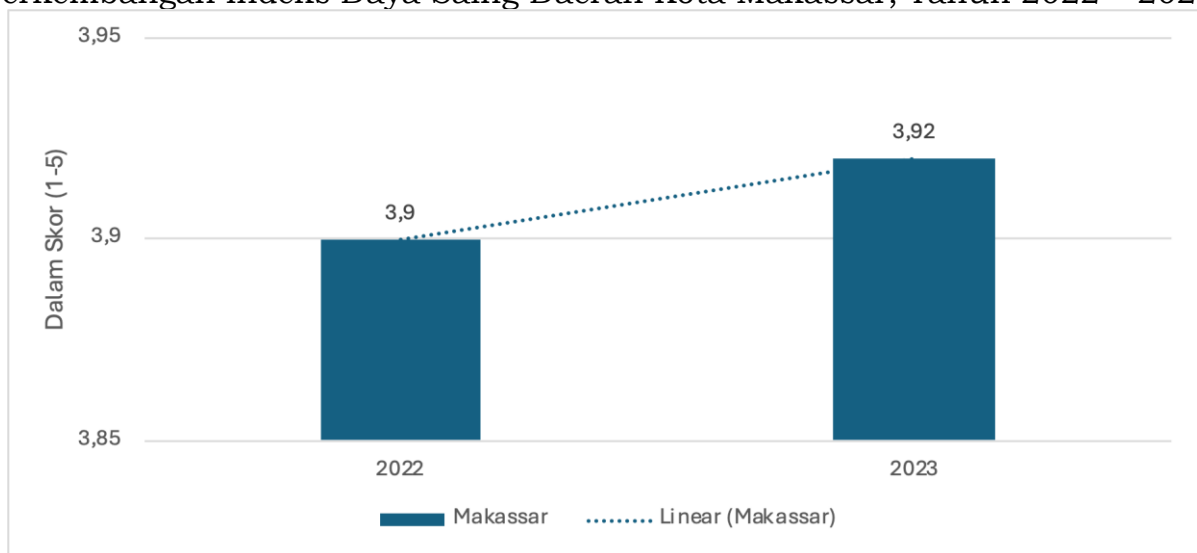
Tren dari skor IPKD Kota Makassar dalam kurun 2018-2022 memperlihatkan bahwa Pemerintah Kota Makassar telah mengalami perbaikan dari segi tata kelola keuangan daerah secara signifikan. Perbaikan dari segi tata kelola keuangan daerah menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah kini telah menjadi lebih transparan, akuntabel, serta sesuai dengan peraturan yang berlaku. Peningkatan skor IPKD juga menunjukkan adanya perbaikan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan anggaran. Hal ini menandakan bahwa penggunaan anggaran daerah menjadi lebih efisien dan efektif, sehingga program-program pembangunan dapat terlaksana dengan baik dan tepat sasaran. Namun demikian, skor IPKD Kota Makassar selama 2018 hingga 2022 masih selalu termasuk dalam kategori sangat memerlukan perbaikan. Data Tahun 2022 menunjukkan bahwa keuangan daerah Kota Makassar masih sangat lemah pada dimensi transparansi pengelolaan keuangan daerah yang bahkan masih berada di bawah 2, serta kondisi keuangan daerah yang masih berada di bawah 6. Secara umum, skor IPKD Kota Makassar dalam kurun 2018-2022 masih sangat jauh dibawah rata-rata skor nasional.

2.2.1.11. Indeks Daya Saing Daerah

Secara umum, capaian indeks daya saing daerah (IDSD) di Makassar masih menunjukkan kenaikan dari tahun 2022 menjadi 3.92 atau naik sebesar 0.2 poin. Pada tahun 2023, Kota Makassar meraih perolehan yang sangat baik pada pilar 3 (Adopsi TIK) yang meraih skor 4,91 seperti penggunaan telepon seluler dan internet. Selain itu, Kota Makassar juga meraih perolehan sempurna pada pilar 9 (Sistem Keuangan) yang menitikberatkan indikator sistem keuangan (pembiayaan dan kredit usaha) dengan perolehan 5,00. Namun demikian, pemerintah kota Makassar masih harus meningkatkan pilar 2 (Infrastruktur) seperti proporsi jumlah bandara, pelabuhan, kereta api dan lain-lain yang perolehannya hanya 2,64 dan pilar 11 (Dinamisme Bisnis) seperti kinerja pelayanan publik dan pertumbuhan nomor induk berusaha (NIB) yang hanya mencapai 2,71.

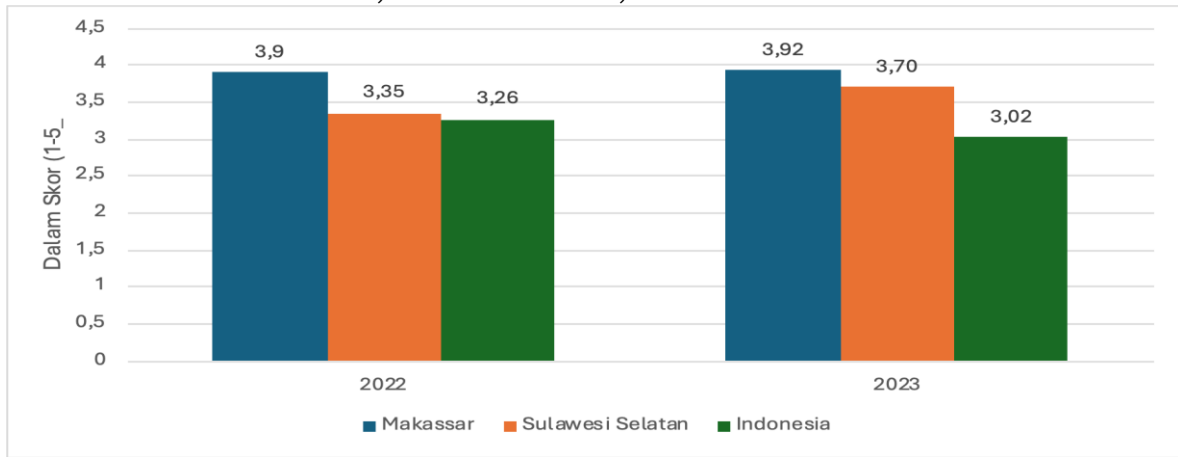
Grafik 2.52

Perkembangan Indeks Daya Saing Daerah Kota Makassar, Tahun 2022 – 2023



Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional (data diolah), Tahun 2024

Grafik 2.53
Perkembangan Indeks Daya Saing Daerah di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Indonesia, Tahun 2022-2023

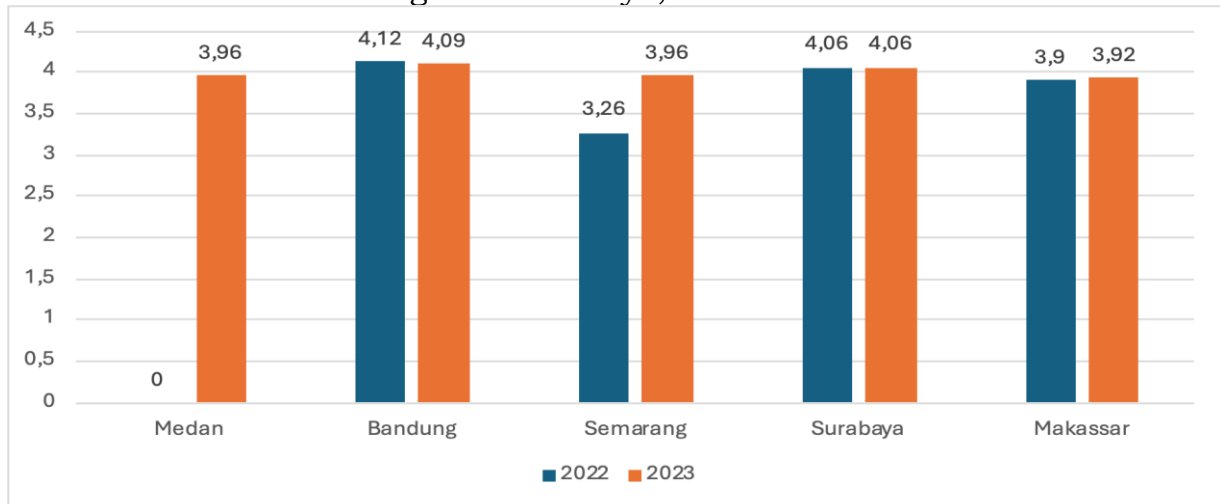


Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional (data diolah), Tahun 2024

Lebih lanjut, perolehan indeks daya saing daerah Kota Makassar lebih tinggi dan stabil, jika dikomparasi dengan tingkat provinsi (Sulawesi Selatan) dan Nasional (Indonesia). Meskipun capaian IDSD pada tahun 2023 di Sulawesi Selatan meningkat menjadi 3.70 atau naik sebesar 0.35 poin, perolehan Makassar masih lebih tinggi dengan perbedaan sekitar 0.22 poin. Nilai IDSD pada tingkat nasional juga relatif tidak stabil, bahkan menunjukkan penurunan di tahun 2023 menjadi 3.02 atau turun sebesar 0.24 poin dari tahun 2022. Grafik tersebut menunjukkan bahwa posisi daya saing Kota Makassar mampu melebihi capaian pada tingkat provinsi maupun nasional.

Namun demikian, posisi daya saing Makassar cukup kompetitif jika disandingkan dengan 4 kota setara, terkhususnya Kota Bandung dan Surabaya. Perolehan IDSD Makassar secara umum masih lebih rendah dibandingkan 4 kota lainnya, meskipun perbedaan (*gap*) tidak begitu besar. Oleh karena itu, Makassar harus meningkatkan infrastruktur dan menjaga dinamisme bisnis guna meningkatkan daya saingnya. Misalnya, Bandung mencapai skor 3,94 dan Surabaya meraih 3,62 pada pilar infrastruktur. Capaian ini tentunya berbeda signifikan dengan Makassar yang hanya mencapai 2,64 poin. Daya saing Makassar juga terlihat lebih rendah dibandingkan Medan dan Semarang yang mencapai skor 3.96 pada tahun 2023.

Grafik 2.54
Perkembangan Indeks Daya Saing Daerah di Kota Bandung, Makassar, Medan, Semarang dan Surabaya, Tahun 2022-2023

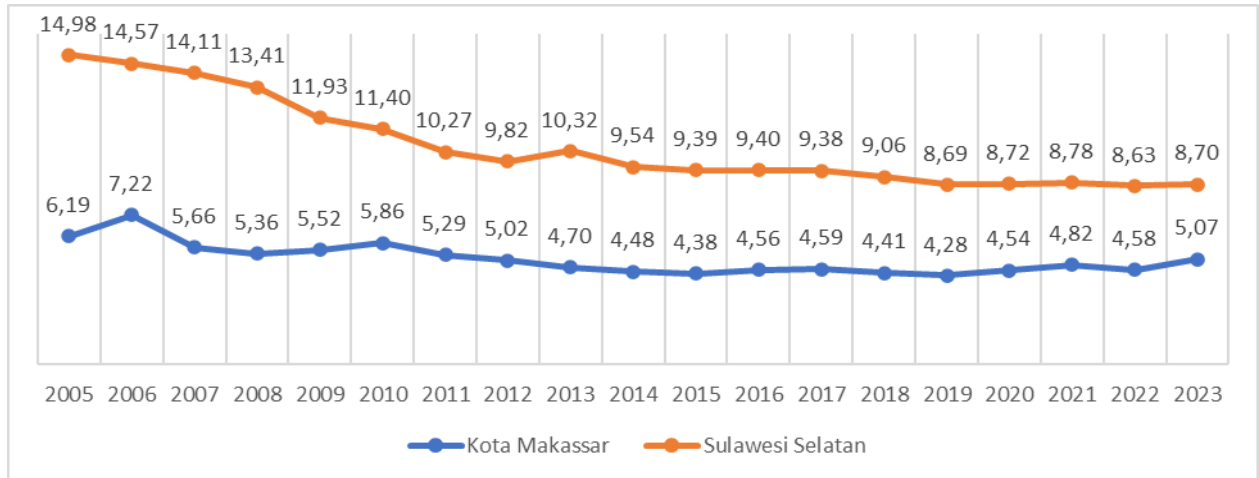


Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional (data diolah), Tahun 2024

2.2.1.12. Tingkat Kemiskinan

Dalam 19 (sembilan belas) tahun terakhir, tingkat kemiskinan Kota Makassar cenderung turun dan lebih rendah provinsi. Tingkat kemiskinan tertinggi selama periode ini adalah 7,22% tahun 2006, setelah itu kemudian turun cukup tajam di angka 5,66 % tahun 2007. Angka di kisaran 5% bertahan selama lima tahun dan berhasil mencapai dibawah 5 % tahun 2013 dengan capaian 4,70%. Dari tahun 2013 hingga 2023, terlihat stagnasi tingkat kemiskinan pada level 4%, bahkan tahun 2023 angkanya kembali menyentuh level 5,07%, untuk pertama kalinya dalam 10 terakhir.

Grafik 2.55
Persentase Penduduk Miskin Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Makassar Tahun 2005-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2023

BPS merilis data Tingkat kemiskinan Kota Makassar tahun 2023 yang diperkirakan akan turun lagi. Perkiraan penurunan tingkat kemiskinan tahun 2023 dilatarbelakangi oleh asumsi kondisi perekonomian yang semakin membaik dan adanya bantuan pemerintah, terutama untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem, tapi rilis data BPS menunjukkan persentase penduduk miskin naik menjadi 5,07%. Angka tersebut termasuk yang tertinggi dalam 10 tahun terakhir, bahkan lebih tinggi dibandingkan saat pandemi Covid-19 yang hanya 4,54% tahun 2020 dan 4,82 % tahun 2022. Umumnya penyebab utama kenaikan garis kemiskinan adalah inflasi. Kenaikan garis kemiskinan tahun 2023 adalah kenaikan tertinggi dalam lima tahun terakhir. Saat pandemi Covid-19, garis kemiskinan hanya naik 7,44% dari Rp. 442.513 per kapita/bulan menjadi Rp. 475.444 per kapita/bulan. Tahun 2023, angkanya naik sampai 11,58% hingga menyentuh angka Rp. 570.286 per kapita/bulan. Data menunjukkan inflasi secara umum di Kota Makassar ternyata melambat dari 5,77% tahun 2022 menjadi 2,89% tahun 2023 (YoY).

Meski dibandingkan dengan provinsi, Kota Makassar termasuk daerah dengan tingkat kemiskinan paling rendah, tapi angka 5,07 % masih relatif tinggi dibandingkan kabupaten/kota lain di Indonesia. Dari 514 kabupaten/kota di Indonesia, tingkat kemiskinan Kota Makassar menempati urutan ke-71 daerah dengan tingkat kemiskinan paling rendah, menunjukkan ada 70 (tujuh puluh) kabupaten/kota lainnya di Indonesia yang memiliki tingkat kemiskinan lebih rendah dari Kota Makassar. Kota Sawah Lunto di Provinsi Sumatera Barat menjadi daerah dengan tingkat kemiskinan paling rendah di Indonesia dengan angka 2,27%, disusul dengan Kabupaten Badung, Kota Balikpapan, Kota Depok masing-masing mencatat angka 2,30%, 2,31 %, dan 2,38%. Daerah lain seperti Banjar, Kota Tangerang Selatan, Kota Denpasar, Bangka Barat, Kota Sungai Penuh, dan Kota Solok menempati posisi ke-5 hingga ke-10.

Tabel 2.27 . . .

Tabel 2.27
Perbandingan Persentase Penduduk Miskin dengan
Beberapa Daerah Lain di Indonesia Tahun 2023

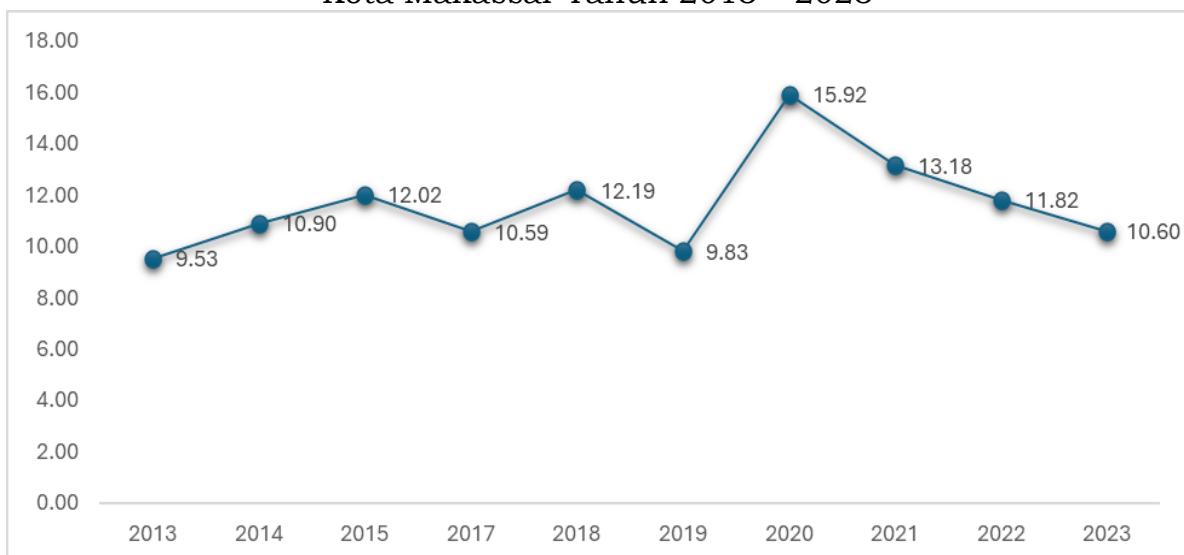
No	Kota	Persentase Penduduk Miskin	Peringkat
1	Sawah Lunto	2.27	1
2	Bandung	2.30	2
3	Balikpapan	2.31	3
4	Depok	2.38	4
5	Najar	2.44	5
6	Tangerang Selatan	2.57	6
7	Denpasar	2.68	7
8	Bangka Barat	2.71	8
9	Sungai Penuh	3.00	9
10	Solok	3.05	10
11	Makassar	5.07	71

Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2023

2.2.1.13. Tingkat Pengangguran Terbuka

Data BPS menunjukkan perkembangan tingkat pengangguran terbuka 10 tahun terakhir di Kota Makassar di atas 9,5% dan berfluktuasi. Tingkat pengangguran tertinggi terjadi pada tahun 2020 mencapai 15,92% atau sebanyak 110.883 jiwa. Tingginya tingkat pengangguran pada tahun tersebut disebabkan adanya pandemi covid-19. Pandemi menyebabkan banyak perusahaan mengurangi produksi, melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK), dan merumahkan karyawan. Selain itu, sektor-sektor tertentu mengalami penurunan signifikan dalam aktivitas ekonomi yang berdampak pada tingkat pengangguran. Kebijakan pemerintah yang memberlakukan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) membatasi ruang gerak masyarakat sehingga menyebabkan sebagian masyarakat yang bekerja pada sektor informal kehilangan pekerjaannya.

Grafik 2.56
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka
Kota Makassar Tahun 2013 – 2023

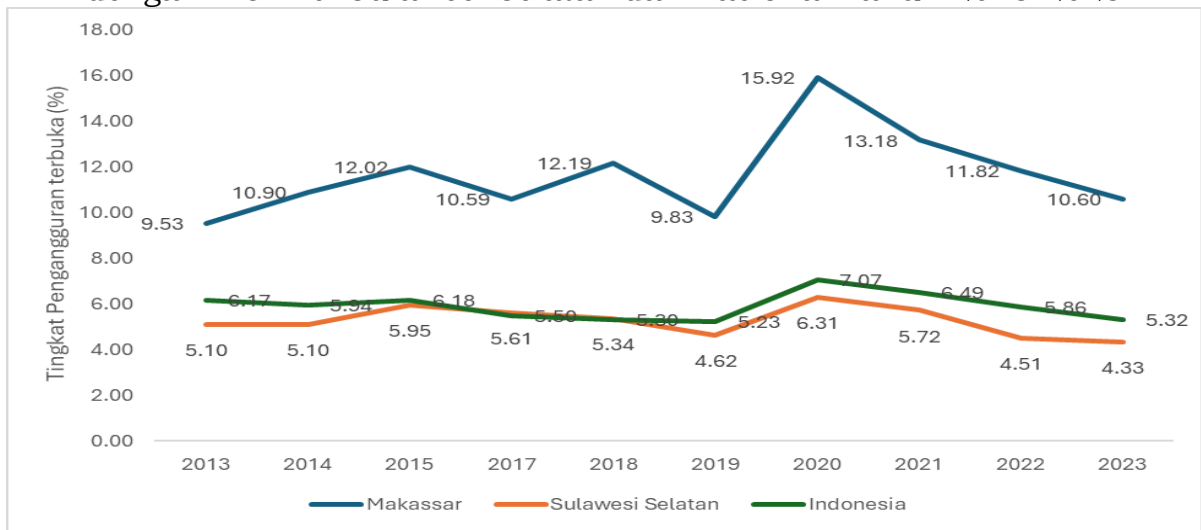


Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2024

Perkembangan Pengangguran Terbuka Kota Makassar setelah tahun 2020 mengalami penurunan. Tren penurunan yang signifikan dari tahun 2021 sebesar 13,18% hingga 2023 menjadi 10,60%. Tren penurunan ini merupakan indikasi positif dari perbaikan kondisi ketenagakerjaan Kota Makassar . . .

Makassar selama periode tersebut. Selama tiga tahun terakhir Penurunan sebesar 1,3%, tidak terjadi secara otomatis, hal ini disebabkan adanya pemulihan ekonomi yang berdampak terhadap membaiknya sektor bisnis formal dan informal di Kota Makassar, selain itu upaya pemerintah dalam melakukan pelatihan enterpreneur yang dapat meningkatkan kesempatan kerja pada sektor informal serta boomingnya *startup* di Kota Makassar yang memberi efek pada perputaran ekonomi di sektor informal sehingga dapat menurunkan angka pengangguran. Namun, tingkat pengangguran di Kota Makassar masih sangat tinggi jika dibandingkan pada level provinsi bahkan nasional.

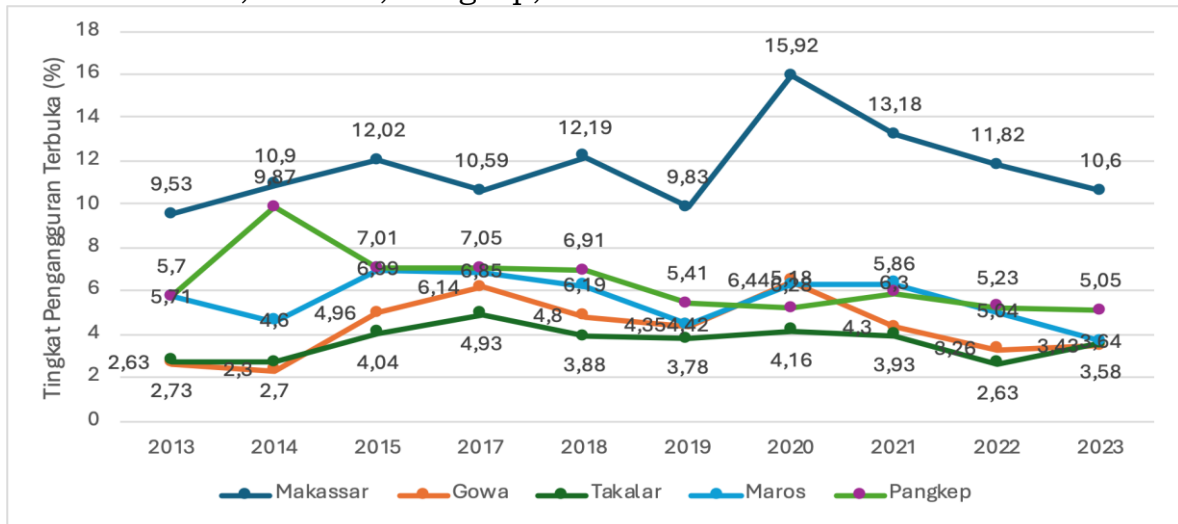
Grafik 2.57
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Makassar dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2013-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2024

Perkembangan pengangguran Kota Makassar meski mengalami penurunan selama tiga tahun terakhir namun, masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan yang besarnya rata-rata 4,85% dan tingkat nasional pada kisaran rata-rata 5,89%. Dengan berbagai sarana dan prasarana yang lebih memadai dan berkualitas adalah menjadi pilihan tenaga kerja yang berasal dari kabupaten/kota di sekitarnya untuk mencari pekerjaan di Kota Makassar. Arus urbanisasi tenaga kerja dari desa ke kota yang pada umumnya tidak selalu didukung oleh tingkat pendidikan yang memadai. Jumlah lapangan kerja yang tersedia tidak seimbang dengan banyaknya Angkatan kerja yang tersedia setiap tahunnya. Karakteristik Kota Makassar sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan adalah pemicu tingginya tingkat pengangguran di Kota Makassar dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Sulawesi Selatan.

Grafik 2.58
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Makassar, Kabupaten Gowa, Takalar, Pangkep, dan Maros Tahun 2013 – 2023

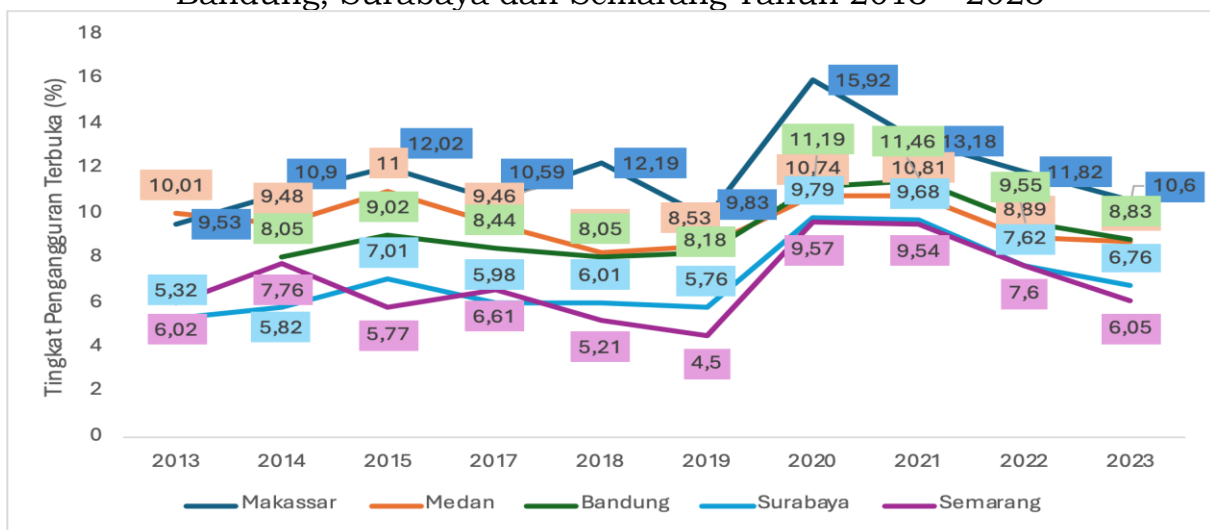


Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2024

Dari data di atas menunjukkan bahwa tingkat pengangguran Kota Makassar paling tinggi jika dibandingkan dengan Kabupaten Gowa, Takalar, Maros dan Pangkep, yang rata-rata dibawah 7% selama 10 tahun. Tingkat pengangguran paling rendah adalah Kabupaten Takalar. Tingkat Pengangguran ketiga kabupaten tersebut dibawah level provinsi dan nasional. Tingkat Pengangguran yang tinggi terindikasi adanya masalah dalam perekonomian, misalnya perlambatan pertumbuhan atau belum stabilnya sektor bisnis sehingga belum mampu menciptakan kesempatan kerja. Masalah pengangguran di Kota Makassar bukan pada sisi penawaran tenaga kerja melainkan terletak pada sisi permintaan tenaga kerja.

Jika dibandingkan tingkat pengangguran terbuka Kota Makassar terhadap beberapa kota besar yang setara di Indonesia seperti Medan, Bandung, Surabaya dan Semarang, terlihat bahwa Kota Makassar juga menempati urutan pertama diantara keempat kota tersebut. Hal ini menandakan bahwa tingkat penyerapan tenaga kerja di Kota Makassar jauh lebih rendah daripada keempat kota tersebut seperti Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Medan, dan Kota Surabaya.

Grafik 2.59
Perbandingan Tingkat pengangguran Terbuka Kota Makassar, Medan, Bandung, Surabaya dan Semarang Tahun 2013 – 2023



Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2024

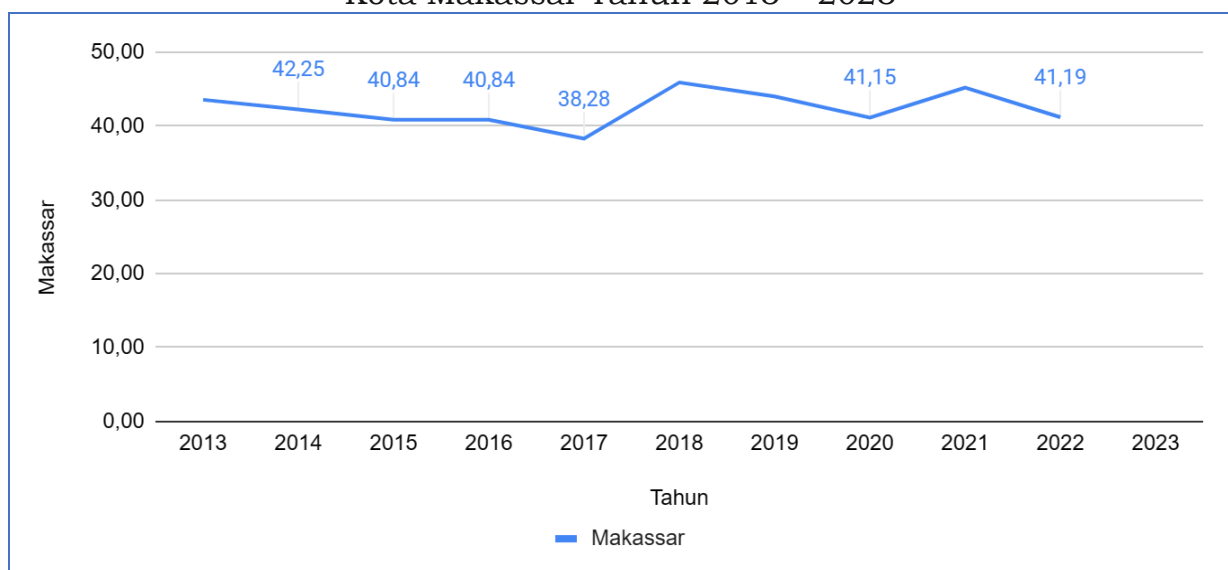
Uraian di atas menyimpulkan bahwa pasar tenaga kerja di Kota Makassar belum mampu menciptakan keseimbangan antara persediaan tenaga kerja dan permintaan tenaga kerja. Beberapa faktor penyebab tingginya tingkat pengangguran di Kota Makassar adalah (i) penawaran tenaga kerja lebih tinggi daripada permintaan tenaga kerja yang menyebabkan tingkat pengangguran Kota Makassar relatif lebih tinggi baik terhadap kabupaten sekitar, Provinsi Sulawesi Selatan, level nasional, dan beberapa kota yang setara di Indonesia. (ii) tidak terserapnya tenaga kerja disebabkan belum terpenuhinya kualifikasi dan kompetensi tenaga kerja yang sesuai dengan tuntutan pasar kerja. (iii) orientasi investasi padat modal bukan padat karya sehingga tidak menyerap banyak tenaga kerja. (iv) arus urbanisasi dan tingginya pertumbuhan ekonomi menyebabkan penduduk dari luar daerah mencari pekerjaan ke Kota Makassar. Hal ini menjadi perhatian khusus bagi pemerintah Kota Makassar untuk melakukan perencanaan strategis dan kebijakan yang lebih intensif untuk membantu orang-orang yang masih menganggur.

2.2.1.14. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

TPAK secara keseluruhan (laki-laki dan perempuan) memiliki selisih 38,0 yakni masing-masing TPAK laki-laki dan perempuan sekitar 58,0 sedangkan TPAK perempuan saja sekitar 40,0. Hal tersebut menunjukkan bahwa TPAK laki-laki adalah dua kali lebih tinggi daripada TPAK perempuan. Kondisi ini terindikasi bahwa Kota Makassar masih terjadi ketidaksetaraan gender di bidang ketenagakerjaan. Relatif rendahnya TPAK perempuan dibandingkan dengan TPAK laki-laki sangat ditentukan oleh faktor ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan lingkungan, termasuk risiko pekerjaan dan status gender.

Status gender yang dimaksud adalah bagi perempuan yang belum menikah kurang termotivasi masuk ke pasar kerja karena faktor budaya dan faktor ekonomi yang masih bisa dihidupi atau ditanggung oleh keluarga (orang tua). Kemudian bagi perempuan yang sudah menikah sangat tergantung pada status perempuan sebagai ibu dalam rumah tangga, sebagai istri, dan sebagai anggota masyarakat sosial. Rendahnya TPAK perempuan boleh jadi disebabkan karena *opportunity cost* perempuan menikah relatif tinggi daripada upah yang diterima jika perempuan tersebut bekerja di luar rumah, terutama bagi perempuan yang sudah menikah dan memiliki anak usia balita.

Grafik 2.60
Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan
Kota Makassar Tahun 2013 – 2023

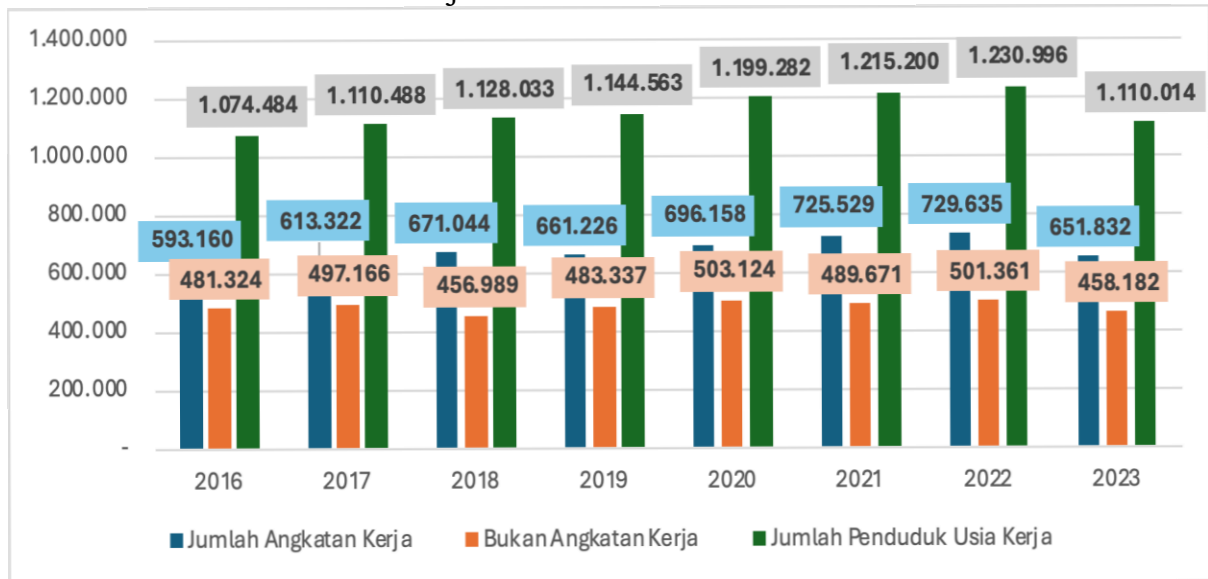


Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2024

2.2.1.15. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

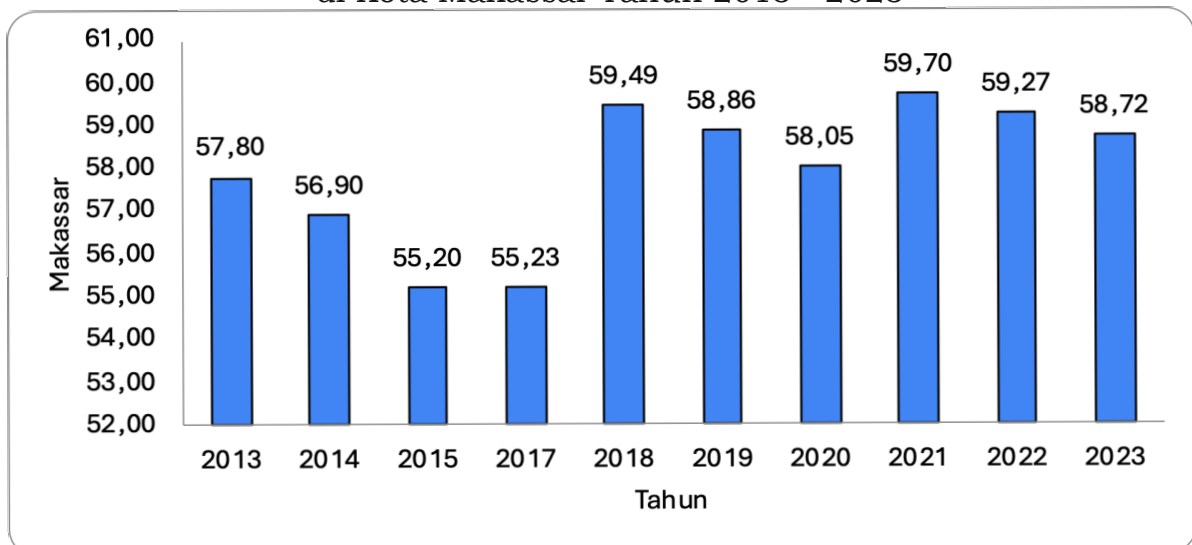
Potensi penawaran tenaga kerja (penduduk usia kerja) selama tahun periode 2016-2023 mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yakni 2,17% per tahun. Di sisi lain, penawaran tenaga kerja secara aktual (angkatan kerja), nampak juga mengalami pertumbuhan sebesar 3,79% per tahun, sedangkan pertumbuhan penduduk usia kerja dalam kategori bukan angkatan kerja tumbuh hanya sebesar 0,17% per tahun pada periode yang sama. Hal ini memberi indikasi bahwa kecenderungan penduduk usia kerja masuk ke pasar kerja lebih tinggi daripada melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, menjadi pengurus rumah tangga, dan lainnya. Kenaikan jumlah penduduk usia kerja pada golongan umur 15-64 tahun tergantung pada dinamika kependudukan, yakni fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Berdasarkan fenomena di atas, nampak bahwa meningkatnya penawaran tenaga kerja sebagai akibat dari meningkatnya migran masuk ke Kota Makassar selama tahun periode tersebut. Peningkatan jumlah angkatan kerja merupakan penyebab terhadap peningkatan tingkat partisipasi angkatan kerja.

Grafik 2.61
Perkembangan Jumlah Angkatan Kerja, Bukan Angkatan Kerja, dan Penduduk Usia Kerja di Kota Makassar Tahun 2016 - 2023



Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2024

Grafik 2.62
Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Makassar Tahun 2013 - 2023



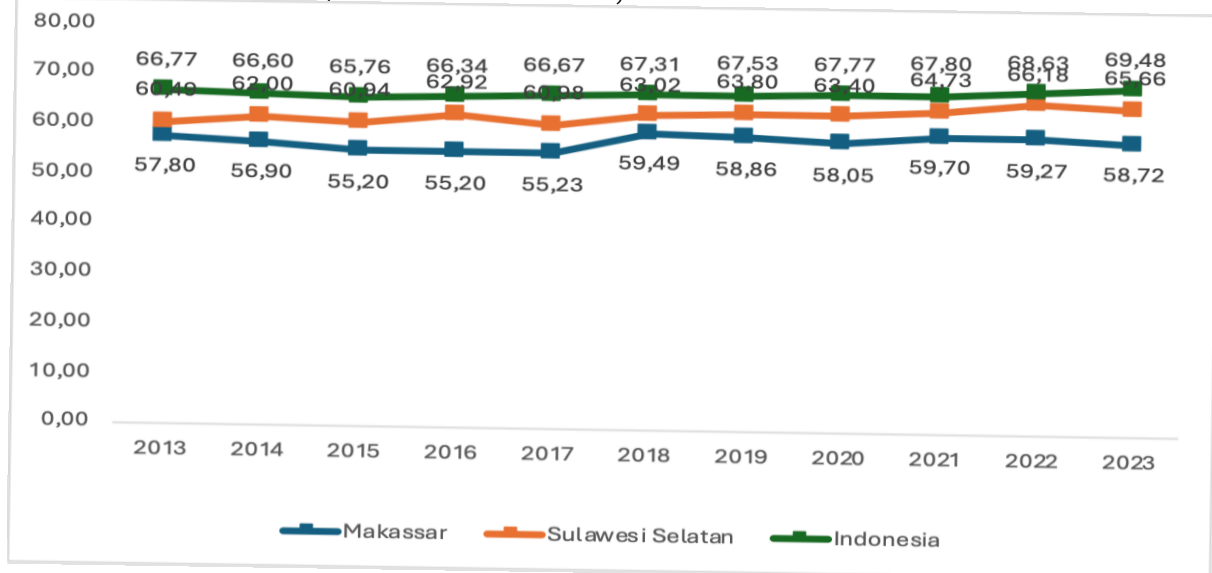
Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2024

Berdasarkan . . .

Berdasarkan angka TPAK yang diperoleh dari perbandingan antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah tenaga kerja dikali 100 tampak perkembangannya berfluktuasi tetapi pada tahun 2023 meningkat dibandingkan tahun 2012. TPAK di Kota Makassar pada tahun 2013 sebesar 57,80 yang berarti bahwa di antara 100 orang penduduk usia kerja terdapat 58 orang yang menawarkan jasanya ke pasar tenaga kerja, selebihnya tergolong sebagai bukan angkatan kerja. Selama periode 2013-2023, TPAK secara rata-rata meningkat sebesar 0,092 (di antara 100 orang tambahan penduduk usia kerja terdapat 9 orang tambahan pencari kerja atau menawarkan jasanya ke pasar tenaga kerja per tahun selama periode tahun 2013-2023. Jika kondisi ini tidak dapat dimbangi oleh penyediaan lapangan kerja, implikasinya akan memperburuk persoalan pengangguran terbuka di Kota Makassar di masa yang datang.

Selama periode 2013-2023, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tertinggi tercatat sebesar 59,70 yaitu pada tahun 2021. Sedangkan terendah tercatat sebesar 55,20% yaitu pada tahun 2015. Pada dua tahun terakhir, TPAK Kota Makassar mengalami penurunan sebagai akibat dari peningkatan jumlah Bukan Angkatan Kerja di tahun 2022 dan penurunan jumlah angkatan kerja dan bukan angkatan kerja yang terjadi di tahun 2023. Peningkatan TPAK perlu dipertahankan pada tahun-tahun berikutnya. Kondisi ini perlu digaris bawahi bahwa sasaran peningkatan TPAK ini harus tertuju pada masyarakat yang mendapat pekerjaan, bukan di bagian bertambahnya jumlah penganggur. Faktor-faktor yang mempengaruhi TPAK adalah migrasi penduduk, orientasi investasi (padat modal/padat karya), jenjang pendidikan yang masih rendah dan rendahnya kualitas/kompetensi tenaga kerja.

Grafik 2.63
Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
di Kota Makassar, di Provinsi Sulsel, dan Nasional Tahun 2013 - 2023



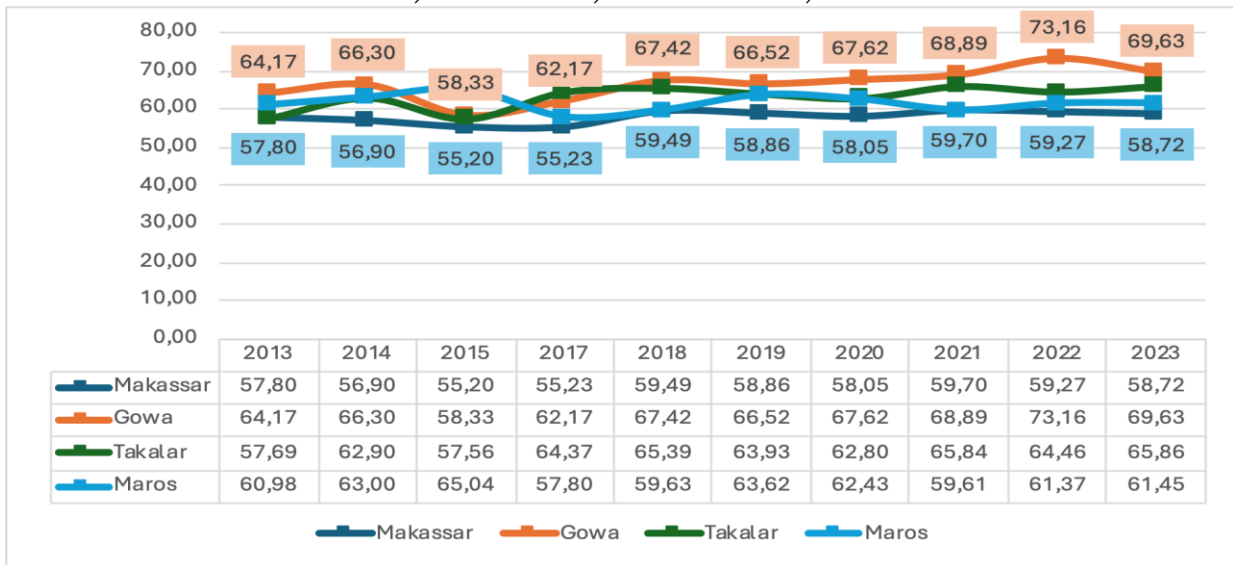
Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2024

Jika dibandingkan TPAK Kota Makassar dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Indonesia memperlihatkan pola dan tren yang sama, yakni meningkat dari tahun ke tahun selama tahun 2013-2023, meskipun memiliki level yang relatif berbeda, dimana TPAK Kota Makassar lebih rendah daripada TPAK Provinsi Sulawesi Selatan dan juga Indonesia secara rata-rata. Hal ini memberi indikasi bahwa penduduk usia kerja di Kota Makassar lebih mampu membeli *leisure time* dibandingkan dengan penduduk usia kerja secara rata-rata di Provinsi Sulawesi Selatan dan Indonesia. Dengan demikian partisipasi

angkatan . . .

angkatan kerja Kota Makassar lebih baik daripada partisipasi angkatan kerja secara rata-rata di Sulawesi Selatan dan Nasional.

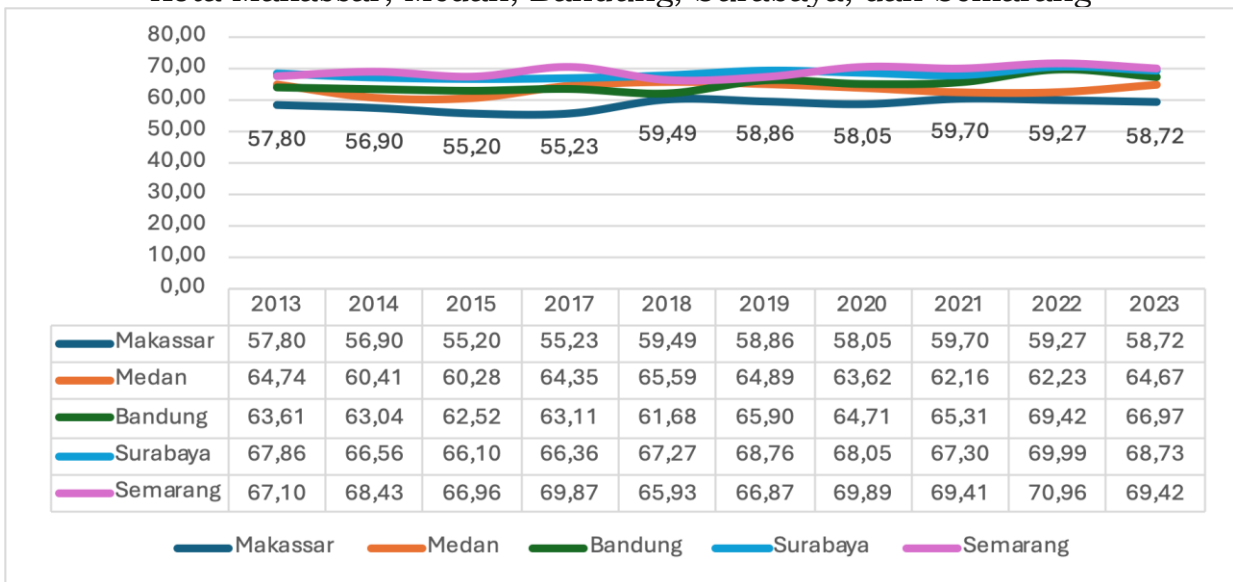
Grafik 2.64
Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2013-2023
Kota Makassar, Kab Gowa, Kan Takalar, dan Kab Maros



Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2024

TPAK Kota Makassar dibanding dengan 3 kabupaten tetangga yakni, Kabupaten Gowa, Kabupaten Takalar dan Kabupaten Maros tercatat bahwa TPAK Kota Makassar lebih rendah daripada TPAK di ketiga kabupaten tetangga tersebut. TPAK dari tahun ke tahun keempat daerah tersebut mengalami sedikit fluktuasi, namun trennya cenderung mengalami peningkatan selama 2013-2023.

Grafik 2.65
Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2013 – 2023
Kota Makassar, Medan, Bandung, Surabaya, dan Semarang



Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2024

Pada level Provinsi Sulawesi Selatan, TPAK Kota Makassar tergolong cukup baik, akan tetapi jika dibandingkan dengan lima kota besar di Indonesia (kecuali DKI Jakarta), nampak bahwa posisi TPAK Kota Makassar relatif lebih rendah daripada empat kota lainnya di Indonesia. Artinya penawaran tenaga kerja di Kota Makassar relatif rendah terhadap potensi penawaran . . .

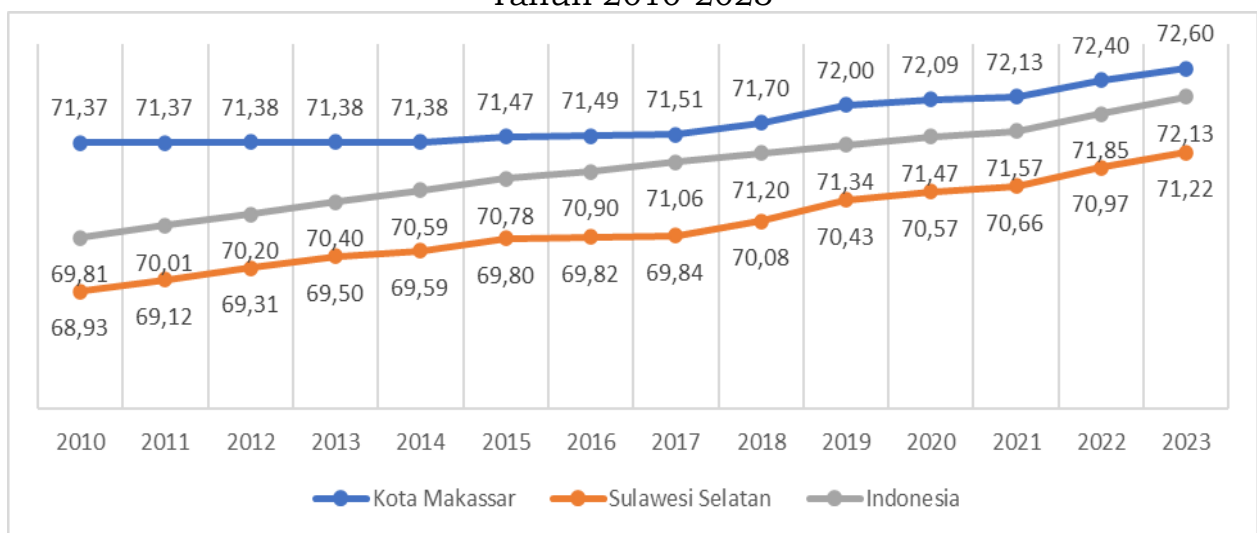
penawaran tenaga kerja (*Manpower*) atau penduduk usia kerja yang ada dibandingkan dengan 4 kota lainnya, Medan, Bandung, Surabaya dan Semarang. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Makassar relatif lebih tinggi daripada empat kota lainnya padahal angka TPAK rendah, hal ini mengindikasikan persoalan serius di Makassar bukan pada sisi penawaran tenaga kerja, tetapi pada sisi permintaan tenaga kerja. Permintaan tenaga kerja sangat ditentukan oleh angka pertumbuhan ekonomi dan struktur lapangan pekerjaan yang terkait dengan struktur ekonomi, masing-masing sektor primer, sektor sekunder, dan sektor tertier. Demikian pula pola produksi padat karya dan padat modal perlu menjadi perhatian khusus menuju Indonesia Emas, tahun 2045.

2.2.2. Kesejahteraan Sosial Budaya

2.2.2.1. Usia Harapan Hidup (UHH)

Kualitas kesehatan dalam 14 tahun terakhir di Kota Makassar menunjukkan kondisi yang terus membaik dilihat dari kecenderungan peningkatan indikator usia harapan hidup (UHH). Tahun 2020 hingga 2014, UHH Kota Makassar cenderung stagnan di angka 71,37 tahun dan 71,38 tahun, kemudian mulai meningkat di tahun 2015 menjadi 71,49 tahun. Kenaikan terus berlanjut hingga akhir mencapai angka 72,60 tahun pada tahun 2023. Dalam periode 14 tahun terakhir, UHH Kota Makassar lebih tinggi dibandingkan Provinsi Sulawesi Selatan dan nasional. Meski sempat stagnan, tapi angka UHH Kota Makassar belum terlampaui, hingga di tahun 2023, provinsi hanya mencatat UHH 71,22 tahun dan nasional mencapai 72,13 tahun. Walau begitu, UHH Kota Makassar bukan yang tertinggi di Sulawesi Selatan. Data BPS Sulawesi Selatan mencatat masih ada dua daerah yang UHH-nya berada di atas Kota Makassar yaitu Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Toraja Utara dengan UHH masing-masing 73,99 tahun dan 73,83 tahun. Oleh karena itu, isu tentang kesehatan masih perlu menjadi prioritas pembangunan daerah jangka panjang.

Grafik 2.66
UHH Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Indonesia
Tahun 2010-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2024

Data di atas menunjukkan UHH Kota Makassar kecenderungan naik, tapi angka kenaikannya sangat rendah. Butuh waktu puluhan tahun bagi Kota Makassar agar dapat menaikkan UHH sebesar 1 tahun dari 71 tahun menjadi 72 tahun. Menurut laporan IPM BPS tahun 2022, ada beberapa variabel yang sangat mempengaruhi UHH sebuah daerah, termasuk Kota Makassar. Variabel

tersebut . . .

tersebut adalah rumah tangga dengan sumber air minum bersih; rumah tangga yang memiliki akses air minum layak; rumah tangga yang tidak memiliki fasilitas buang air besar; morbiditas; perempuan yang pernah kawin berumur 10 tahun ke atas dengan umur perkawinan pertama ≤ 16 tahun; perempuan pernah kawin berusia 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan; dan perempuan pernah kawin berusia 15-49 tahun yang proses kelahiran terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.

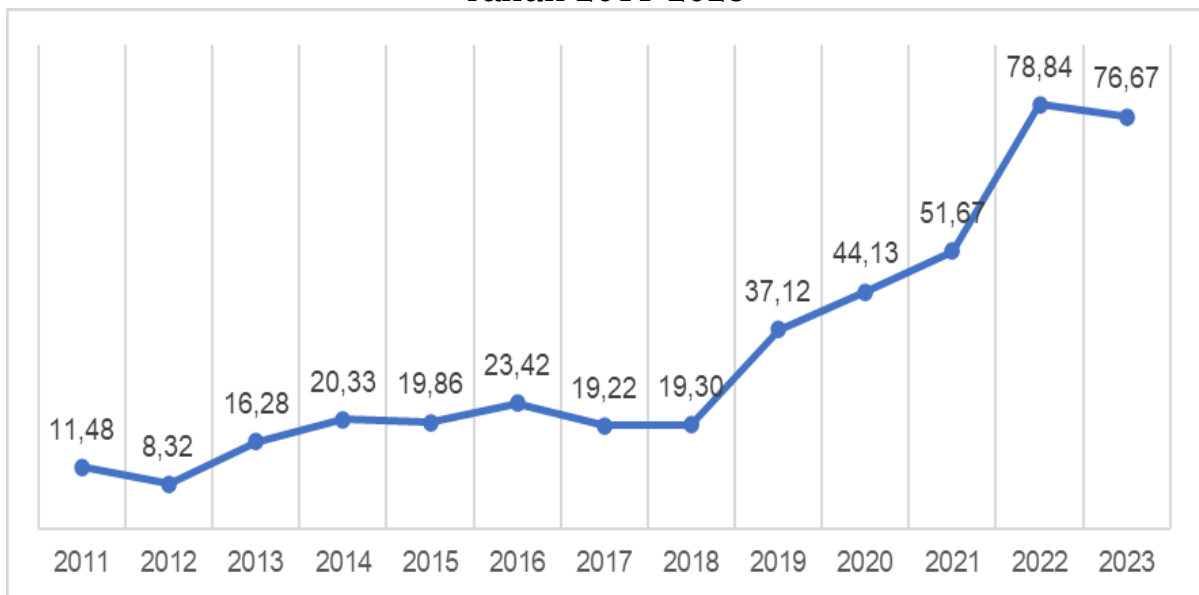
Untuk variabel rumah tangga dengan sumber air minum bersih dan rumah tangga yang memiliki akses air minum layak, capaian Kota Makassar cukup baik. Berdasarkan data Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Selatan, proporsi rumah tangga dengan sumber air minum bersih sudah mencapai 97,61%, sementara rumah tangga yang memiliki akses air minum layak 98,74% tahun 2023. Pada variabel pertama, Kota Makassar yang tertinggi di Sulawesi Selatan dan untuk variabel kedua, tertinggi ketiga. Begitupun dengan variabel rumah tangga yang tidak memiliki fasilitas buang air besar, hampir tak ada lagi rumah tangga di Kota Makassar yang tidak memiliki fasilitas buang air besar. Angka kesakitan (morbiditas) Kota Makassar juga relatif rendah, hanya 5,42% tahun 2023, paling rendah di Sulawesi Selatan. Meski begitu, angka kesakitan masih bisa diturunkan lebih rendah lagi. Perhatian pemerintah daerah juga perlu diarahkan pada variabel perempuan yang pernah kawin berumur 10 tahun ke atas dengan umur perkawinan pertama ≤ 16 tahun atau pernikahan di bawah umur. Tahun 2023, di Kota Makassar masih ada perempuan yang pernah menikah pada saat usianya masih di bawah 16 tahun, proporsinya mencapai 7,35% tahun 2023. Variabel perempuan pernah kawin berusia 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan dan perempuan pernah kawin berusia 15-49 tahun yang proses kelahiran terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih, capaian Kota Makassar juga sangat baik karena proporsi keduanya mencapai 100%. Artinya tak ada lagi perempuan pernah kawin berusia 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya bukan di fasilitas kesehatan dan tak ada lagi perempuan pernah kawin berusia 15-49 tahun yang proses kelahiran terakhirnya tidak ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.

2.2.2.2. Angka Kematian Ibu

Walaupun telah terjadi kemajuan yang signifikan dalam bidang kesehatan ibu selama beberapa dekade terakhir, tingkat kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup masih tinggi di beberapa daerah, termasuk Kota Makassar. Salah satu faktor utama yang menyebabkan hal ini adalah keterbatasan akses terhadap perawatan kesehatan yang berkualitas, keterbatasan fasilitas kesehatan yang memadai, kurangnya jumlah tenaga medis yang terlatih, serta masalah infrastruktur yang kurang baik menjadi kendala utama bagi ibu untuk mendapatkan perawatan kesehatan maternal yang tepat dan efektif.

Selain itu, faktor-faktor sosial dan ekonomi juga memegang peranan penting dalam menentukan tingkat kematian ibu yang tinggi. Ketidaksetaraan gender, kemiskinan, kurangnya akses pendidikan, dan adat istiadat yang tidak selalu mendukung perawatan ibu secara optimal merupakan beberapa hal yang ikut berkontribusi terhadap tingginya angka kematian ibu. Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan upaya holistik dan berkelanjutan yang meliputi perbaikan akses terhadap perawatan kesehatan, peningkatan kesadaran masyarakat tentang kesehatan reproduksi, serta peningkatan kondisi sosial dan ekonomi secara menyeluruh.

Grafik 2.67
Angka Kematian Ibu Kota Makassar Per 100.000 Kelahiran Hidup
Tahun 2011-2023



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Makassar, Tahun 2024

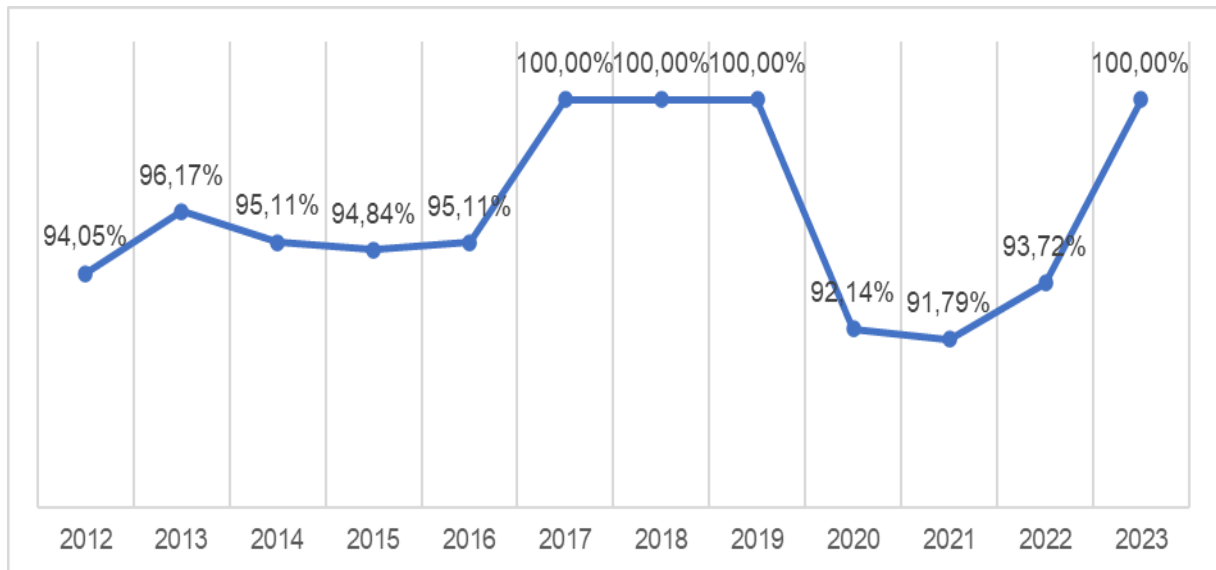
Dalam 13 (tiga belas) tahun terakhir, angka kematian ibu Kota Makassar cenderung naik. Kota Makassar sempat mencapai angka kematian ibu level paling rendah di tahun 2012 yaitu 8 per 100.000 kelahiran hidup. Setelah itu, terus mengalami kenaikan hingga tahun 2014 mencapai 20,33 per 100.000 kelahiran hidup. Meski mengalami penurunan tahun 2015 menjadi 19,86 per 100.000 kelahiran hidup, tapi setahun kemudian naik ke 23,42 per 100.000 kelahiran hidup. Tahun 2017 dan 2018, AKI Kota Makassar turun masing-masing 19,22 dan 19,30, namun setelah itu hingga tahun 2023 mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Tahun 2022 dan 2023, AKI Kota Makassar menyentuh angka 78,84 dan 76,67 disebabkan karena jumlah kematian ibu melahirkan yang tinggi. Tahun 2022, sebanyak 21 jiwa ibu melahirkan meninggal dan tahun 2023 sebanyak 19 jiwa. Angka tersebut setara dengan 0,079% dan 0,077% dari total ibu melahirkan hidup. Kenaikan AKI dalam beberapa tahun terakhir berbanding terbalik dengan capaian persentase persalinan di fasilitas kesehatan. Tingginya AKI biasanya diasosiasikan dengan masih banyaknya persalinan yang dilakukan bukan di fasilitas kesehatan, menunjukkan bahwa semakin tinggi angka bukan di fasilitas kesehatan, maka semakin tinggi AKI. Namun hal tersebut tidak terjadi di Kota Makassar. Data Dinas Kesehatan Kota Makassar menunjukkan dalam 12 tahun terakhir, persentase persalinan di fasilitas kesehatan cenderung naik, meski ada beberapa tahun yang belum mencapai 100%. Tahun 2023 misalnya, persentase persalinan di fasilitas kesehatan sudah mencapai 100%, tapi AKI justru lebih tinggi dibandingkan 76,67 per 100.00 kelahiran hidup, lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun ketika persentase persalinan di fasilitas kesehatan di bawah 100%. Tidak linear tren antara AKI dan persentase persalinan di fasilitas kesehatan kemungkinan disebabkan karena empat faktor lain yaitu terlalu tua hamil (hamil di atas usia 35 tahun), terlalu muda untuk hamil (hamil di bawah usia 20 tahun), terlalu banyak (jumlah anak lebih dari 4), atau terlalu dekat (jarak antar kelahiran kurang dari 2 tahun).

2.2.2.3. Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan

Angka persentase persalinan di fasilitas kesehatan Kota Makassar pada tahun 2012 hingga 2016, belum semua dilakukan di fasilitas kesehatan, dilihat dari angka persentase persalinan di fasilitas kesehatan di bawah 100%. Tahun 2017 sampai 2019, angkanya naik sampai 100%. Tapi angka tersebut tidak . . .

tidak bertahan lebih lama karena tahun 2020 hingga 2022, persentasenya turun lagi di bawah 100%. Baru kemudian di tahun 2023, kembali di angka 100%. Karena sudah mencapai angka maksimum, maka pemerintah kota perlu mempertahankan kinerja tersebut dalam jangka panjang, untuk menurunkan angka kematian ibu.

Grafik 2.68
Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan Kota Makassar
Tahun 2012-2023



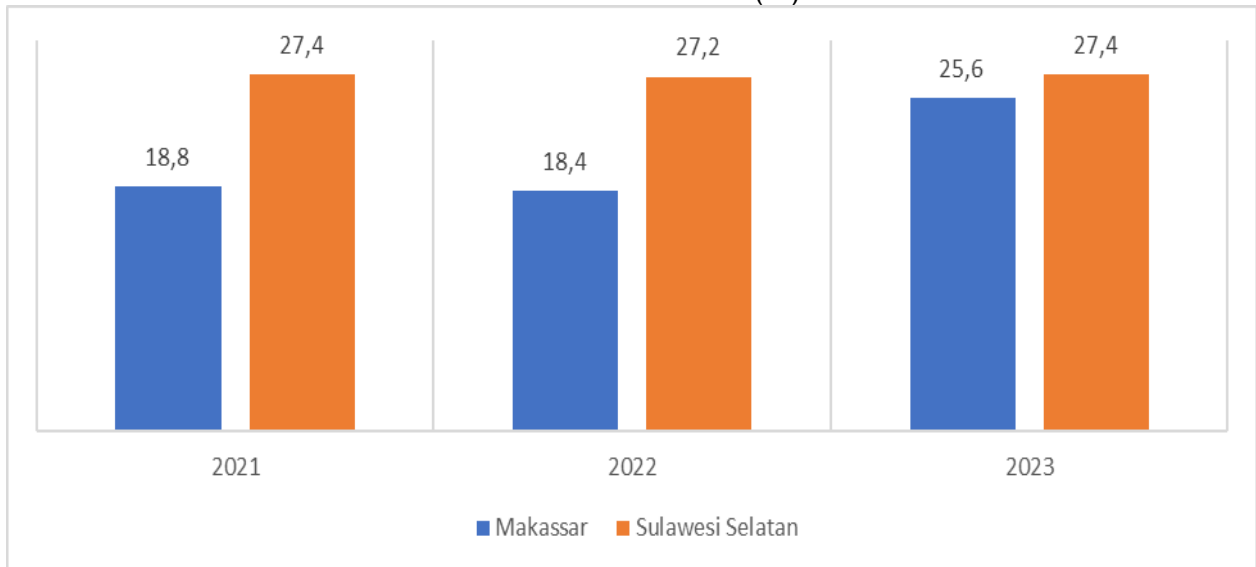
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Makassar, Tahun 2024

Yang menjadi target kebijakan yang tepat untuk menghindari kerawanan persalinan di rumah adalah terhadap persalinan di rumah adalah wanita berusia muda, pendidikan rendah, pengangguran, tidak pernah menikah, memiliki banyak anak, tidak memiliki asuransi, tidak mengetahui tanda bahaya kehamilan, melakukan ANC < empat kali, tinggal di daerah pedesaan, memiliki otonomi kesehatan, tidak memiliki otonomi keuangan keluarga, kepala rumah tangga pria, dan miskin.

2.2.2.4. Prevalensi Stunting

Kota Makassar secara relatif termasuk daerah dengan prevalensi stunting cukup rendah di Sulawesi Selatan. Berdasarkan hasil SSGI, tahun 2021, prevalensi stunting Kota Makassar tercatat 18,8%, menunjukkan dari 100 balita, terdapat 18-19 yang mengalami stunting. Angka tersebut turun di tahun 2022 menjadi 18,4%, tapi naik cukup signifikan di tahun 2023 menjadi 25,6%. Capaian prevalensi stunting Kota Makassar yang justru naik di tahun 2023 semakin menjauh dari target nasional yaitu 14% tahun 2024. Jika ingin mencapai target tersebut, Kota Makassar setidaknya harus menurunkan prevalensi stunting 11,6% tahun 2024, tantangan yang cukup sulit.

Grafik 2.69
Prevalensi Stunting Kota Makassar dan Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2021-2023 (%)

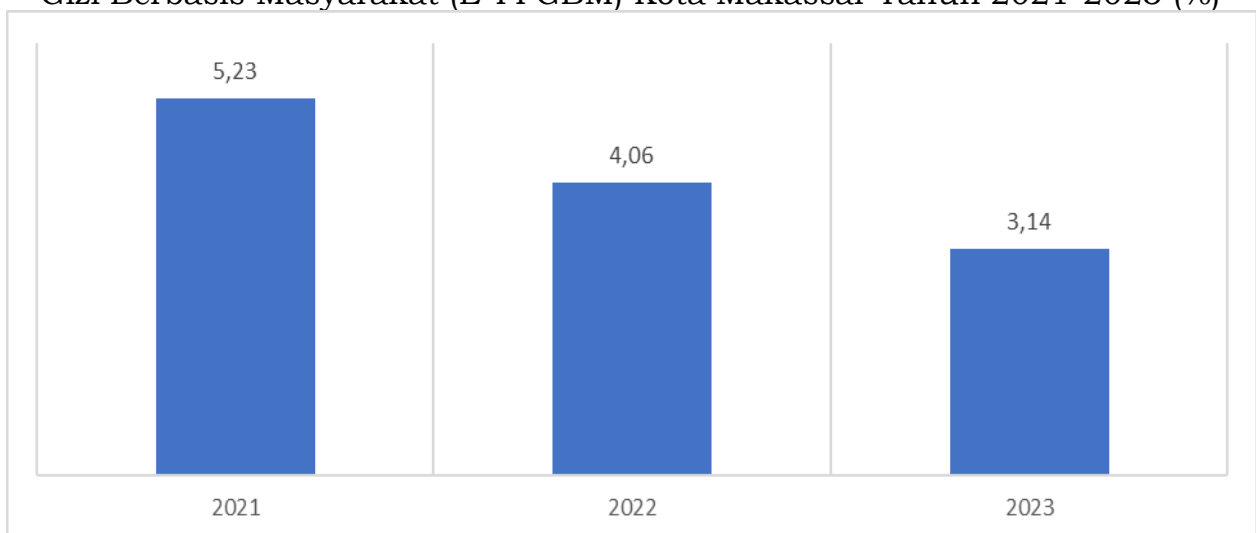


Sumber: Survei Status Gizi Indonesia, Tahun 2023

Hasil survei Dinas Kesehatan Kota Makassar menemukan penyebab dominan masing tingginya angka stunting di Kota Makassar adalah masalah pola asuh orang tua, terutama dalam 1.000 HPK. Pola asuh orang tua sangat penting karena kualitas nutrisi yang adekuat tidak hanya bergantung pada ketersediaan makanan di rumah tangga, melainkan juga dipengaruhi oleh praktik pola asuh seperti memberikan kolostrum (ASI awal), melakukan Inisiasi Menyusu Dini (IMD), memberikan ASI secara eksklusif, dan memberikan Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) dengan tepat waktu. Olehnya itu, dalam jangka panjang, pendekatan sensitif, termasuk melalui pola asuh orang tua menjadi penting dilakukan pemerintah kota untuk menurunkan prevalensi stunting pada level paling rendah.

Untuk penanganan stunting di Kota Makassar, ada kesenjangan antara data prevalensi stunting yang bersumber dari SSGI dan data Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGBM).

Grafik 2.70
Prevalensi Stunting Berdasarkan Data Elektronik Pencatatan dan Pelaporan
Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGBM) Kota Makassar Tahun 2021-2023 (%)



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Makassar, Tahun 2024

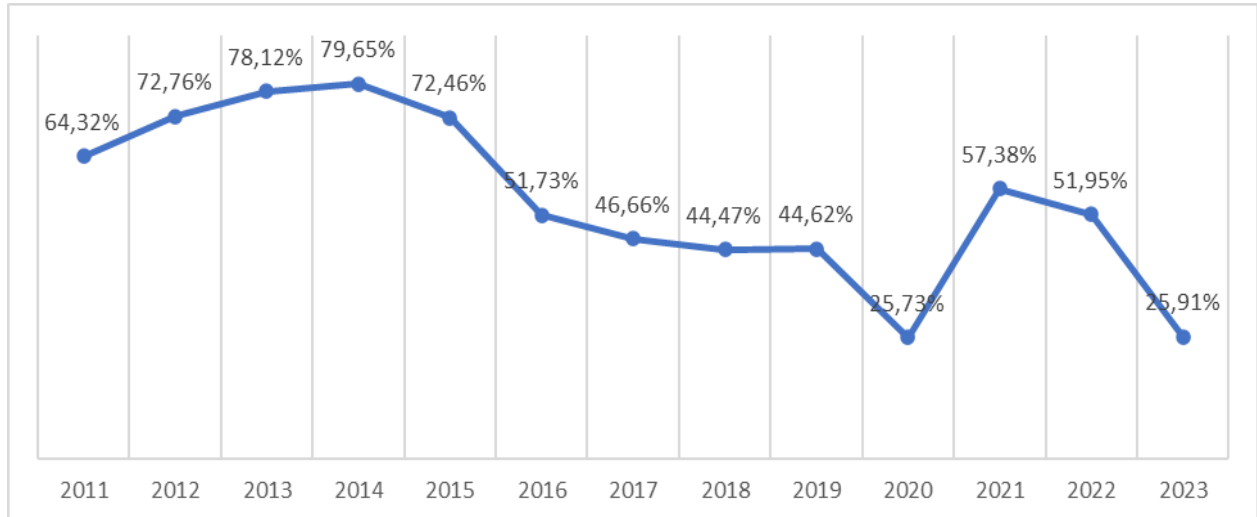
Karena perbedaan tersebut, data stunting yang bersumber dari E-PPGBM jauh lebih rendah dibandingkan SSGI dan cenderung turun. Tahun 2021 prevalensi . . .

prevalensi stunting yang berasal dari data E-PPGBM hanya 5,23%, kemudian turun ke 4,06 % tahun 2022, dan tahun 2023 tersisa 3,14%. Berdasarkan Data Elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM) Dinas Kesehatan Kota Makassar, jumlah anak usia di bawah dua tahun di Kota Makassar yang mengalami stunting sebanyak 3.318 balita pada Oktober 2022. Jumlah stunting terbanyak ada di Kecamatan Tamalate 681 balita, disusul Biringkanaya 605 balita, Tallo 366 balita, Rappocini 354 balita, Panakkukang 344 balita, Bontoala 217 balita, Manggala 195 balita, Tamalanrea 95 balita, dan Sangkarrang 90 balita. Sementara di Mamajang 87 balita, Ujung Tanah 81 balita, Mariso 62 balita, Wajo 54 balita, Makassar 47 balita, dan Ujung Pandang 40 balita.

2.2.2.5. Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis

Dalam 13 tahun terakhir, cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis di Kota Makassar cenderung menurun. Pada awal-awal gerakan nasional penanggulangan TBC diterapkan, Kota Makassar mengalami kenaikan penemuan kasus TBC dan pengobatan dari 64,32% tahun 2011, kemudian naik ke 72,76% tahun 2012, dan hingga menyentuh 79,65% tahun 2014. Penurunan mulai terjadi di tahun 2015 hingga 2020, awalnya turun ke angka 72,46 %, kemudian sampai pada level yang cukup rendah yaitu 25,73%. Penurunan tersebut menunjukkan kinerja yang tak begitu baik karena itu artinya orang yang diduga menderita TBC yang diobati terus menurun. Angka cakupannya sempat meningkat di tahun 2021 menjadi 57,38%, tapi dua tahun berturut-turut kembali turun yaitu 51,95% tahun 2022 dan 25,91% tahun 2023.

Grafik 2.71
Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis
Kota Makassar Tahun 2011-2023



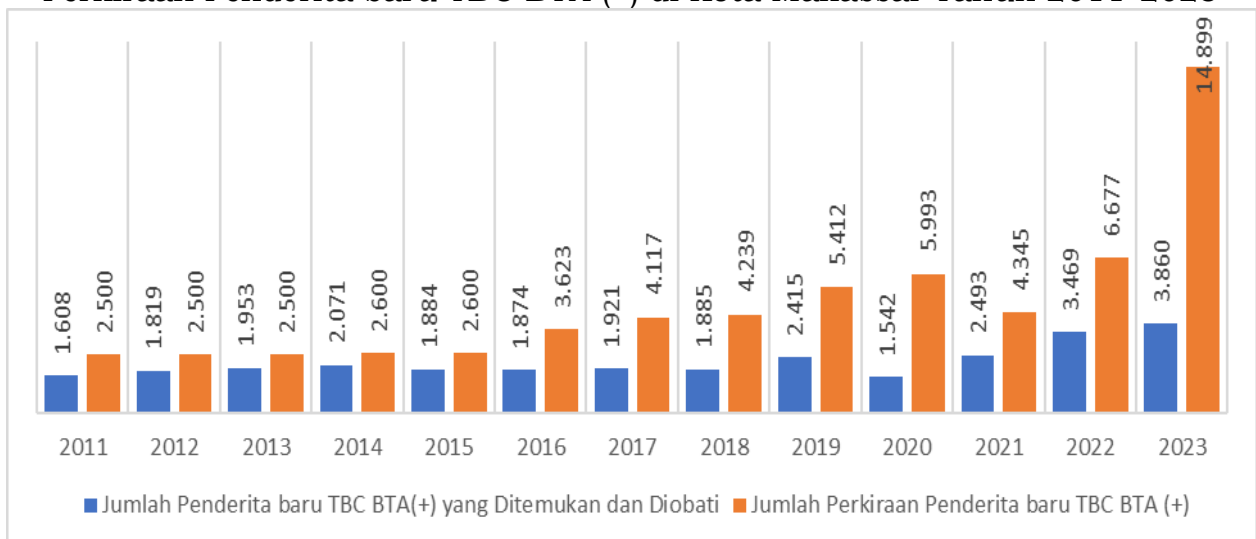
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Makassar, Tahun 2024

Kecenderungan penurunan cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis di Kota Makassar disebabkan karena jumlah penderita baru TBC BTA(+) yang ditemukan dan diobati lebih rendah dibandingkan jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+), meski jumlah penderita yang diobati juga terus meningkat. Dinas Kesehatan Kota Makassar mencatat, jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) terus naik dalam 13 tahun terakhir, dan semakin tinggi di tahun 2019 hingga 2023. Tahun 2023, jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) di Kota Makassar mencapai 14.899 orang, tertinggi dalam 13 tahun terakhir, sementara jumlah penderita baru TBC BTA(+) yang ditemukan dan diobati hanya 3.860 orang

Grafik 2.72 . . .

Grafik 2.72

Jumlah Penderita baru TBC BTA(+) yang Ditemukan dan Diobati dan Jumlah Perkiraan Penderita baru TBC BTA (+) di Kota Makassar Tahun 2011-2023



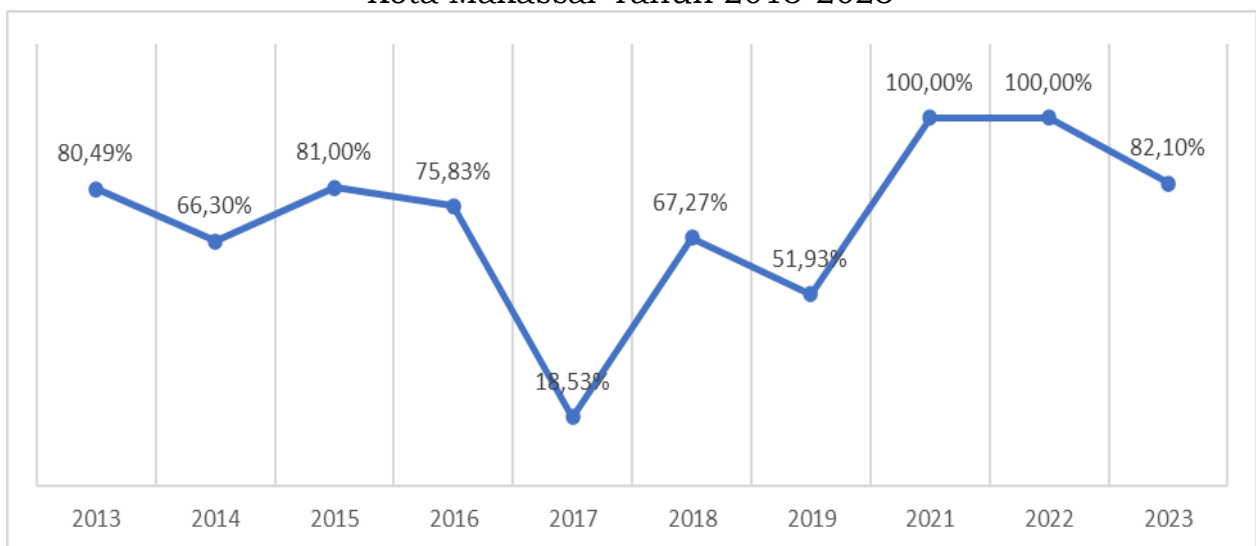
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Makassar, Tahun 2024

2.2.2.6. Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis

Kota Makassar cenderung mengalami kenaikan angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis dalam 10 tahun terakhir. Dari tahun 2013 hingga 2017 terlihat tren penurunan angka keberhasilan mulai dari 80,49%, kemudian 66,30%, dan paling rendah 18,53%. Kenaikan mulai terlihat di tahun 2018 dengan angka 67,27%, namun sempat turun lagi ke 51,93% tahun 2019. Kota Makassar akhirnya bisa mencapai angka 100% tahun 2021 dan 2022, sebelum kemudian turun menjadi 82,10% tahun 2023. Meski cenderung mengalami kenaikan, tapi angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis di Kota Makassar masih relatif lebih rendah dari target nasional untuk 2023. Dalam laporan tahunan penanggulangan TBC, Indonesia menargetkan keberhasilan pengobatan TBC atau *treatment success rate* sebesar 90%.

Grafik 2.73

Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis Kota Makassar Tahun 2013-2023



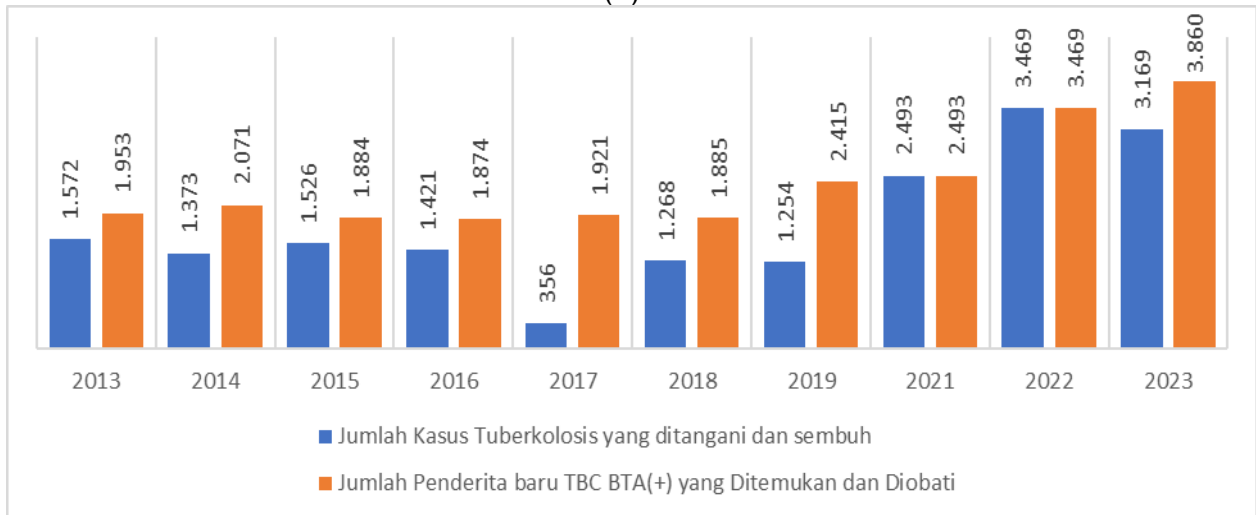
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Makassar, Tahun 2024

Penurunan angka keberhasilan pada beberapa tahun disebabkan karena jumlah penderita yang berhasil diobati lebih rendah dari jumlah yang diobati. Misalnya di tahun 2017, data Dinas Kesehatan mencatat hanya 356 orang penderita yang berhasil diobati, sementara yang diobati mencapai 1.921 orang.

Artinya . . .

Artinya terdapat 1.565 orang penderita TBC yang tidak berhasil pengobatannya atau termasuk kategori *lost to follow up*, gagal, atau meninggal.

Grafik 2.74
Jumlah Kasus Tuberkulosis yang Ditangani dan Sembuh dan Jumlah Perkiraan Penderita Baru TBC BTA (+) di Kota Makassar Tahun 2013-2023

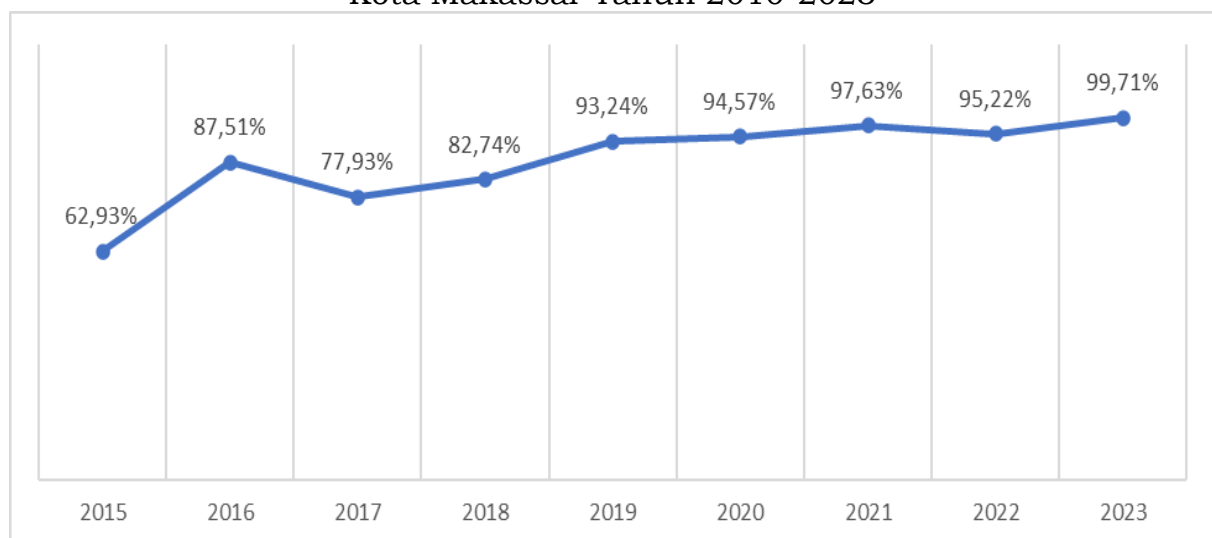


Sumber: Dinas Kesehatan Kota Makassar, Tahun 2024

2.2.2.7. Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional

Jaminan kesehatan nasional merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk memberikan kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi setiap rakyat Indonesia agar penduduk Indonesia dapat hidup sehat, produktif, dan sejahtera. Program ini bersifat wajib bagi semua penduduk untuk memastikan tidak ada satupun orang yang tidak mendapatkan layanan kesehatan karena tak mampu membayar biaya layanan. Kepesertaan jaminan kesehatan nasional di Kota Makassar sudah hampir menjangkau semua penduduk, dilihat dari angka cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN). Tahun 2015, hanya 62,93% penduduk yang menjadi peserta JKN, kemudian naik 87,51% tahun 2016, tetapi sempat turun lagi ke 77,93% setahun kemudian. Tahun 2018 hingga 2023, cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional Kota Makassar naik persisten, hingga akhirnya sampai ke 99,71% tahun 2023. Angka itu menunjukkan hampir tak ada lagi penduduk di Kota Makassar yang belum di *cover* oleh JKN.

Grafik 2.75
Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Kota Makassar Tahun 2010-2023



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Makassar, Tahun 2024

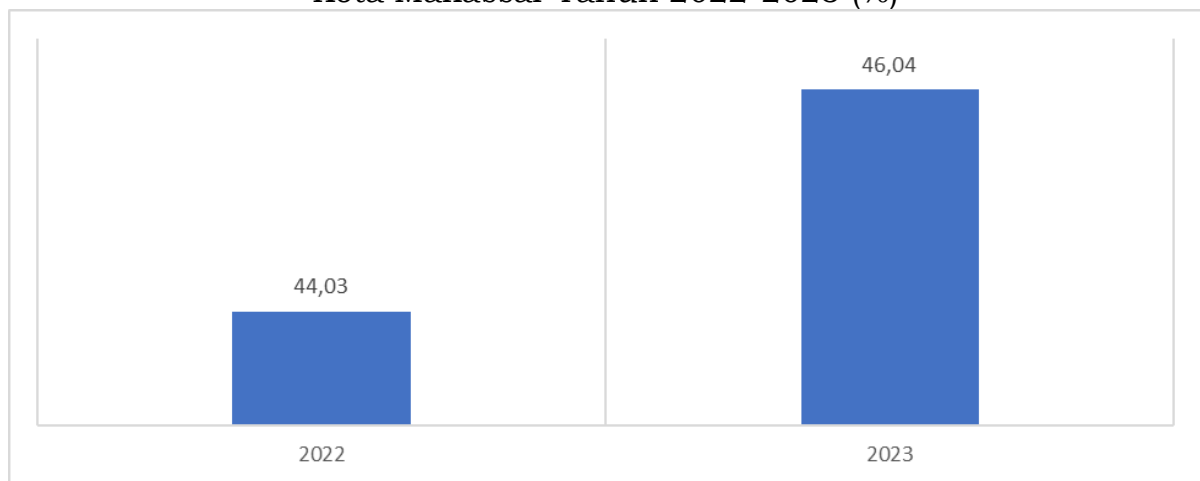
Meskipun . . .

Meskipun berhasil menaikkan cakupan hingga hampir mencapai 100%, catatan penting terkait JKN kaitannya dengan layanan kesehatan adalah kepesertaan JKN tidak serta merta bisa membuat masyarakat mendapatkan akses layanan kesehatan, khususnya bagi rumah tangga miskin. Hal ini disebabkan keseimbangan dampak program untuk melindungi orang miskin, baik dalam rangka mempromosikan kesehatan dan pemanfaatan perawatan maupun dalam rangka mengurangi dampak dari biaya yang dikeluarkan, paket manfaatnya tidaklah sebesar yang diperkirakan. Banyak orang miskin kurang memahami jenis layanan asuransi kesehatan yang mereka dapatkan dan cenderung tidak memanfaatkannya. Akibatnya, individu miskin dan keluarga di sektor informal mungkin tidak memiliki akses yang sama terhadap nutrisi dan investasi dalam kesehatan manusia seperti yang dinikmati oleh mereka yang memiliki perlindungan asuransi kesehatan.

2.2.2.8. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Data BPJS Ketenagakerjaan mencatat, cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan Kota Makassar tahun 2022 dan 2023 masih dibawah 50%, masing-masing 44,03% dan 46,04%. Masih rendahnya cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kota Makassar salah satunya disebabkan rendahnya kepesertaan pada pekerja non formal. Bagi pekerja formal, pemerintah punya aturan yang ketat terhadap untuk mendaftarkan semua pekerjanya menjadi peserta jaminan sosial ketenagakerjaan, namun tidak ada kewajiban yang bisa memaksa pekerja non formal untuk mendaftar sebagai peserta. Jumlah pekerja formal di Kota Makassar relatif tinggi, sehingga jika mereka tidak terdaftar sebagai peserta, maka cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan Kota Makassar akan rendah. Berdasarkan data BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 61,40% atau setara dengan 357.794 orang adalah pekerja formal, sementara pekerja informal mencapai 38,60% atau 224.914 orang.

Grafik 2.76
Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Kota Makassar Tahun 2022-2023 (%)



Sumber: BPJS Ketenagakerjaan Kota Makassar, Tahun 2023

Cakupan kepesertaan yang masih rendah membuat potensi kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kota Makassar cukup tinggi. BPJS Ketenagakerjaan Kota Makassar mencatat, setidaknya ada potensi 2.871.182 pekerja di Kota Makassar tahun 2023, namun yang terdaftar sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan masih 1.431.617 pekerja atau 49,86%, sehingga masih ada potensi pekerja untuk menjadi peserta sebanyak 1.439.565 pekerja. Pencapaian paling rendah ada di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan, perikanan, industri pengolahan, perdagangan . . .

perdagangan, rumah makan dan jasa akomodasi, transportasi, pergudangan dan komunikasi, dan lembaga keuangan, asuransi, real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan.

Tabel 2.28
Potensi dan Pencapaian Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Kota Makassar Tahun 2023

Sektor Usaha	Potensi	Pencapaian	%	Sisa	%
Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan, Perikanan	759.652	170.293	22,42	589.359	77,58
Pertambangan Dan Penggalian	31.545	91.004	288,49	-59.459	-188,49
Industri Pengolahan	414.102	61.109	14,76	352.993	85,24
Listrik, Gas Dan Air	19.240	13.488	70,1	5.752	29,9
Konstruksi	256.291	216.660	84,54	39.631	15,46
Perdagangan, Rumah Makan Dan Jasa Akomodasi	790.645	208.493	26,37	582.152	73,63
Transportasi, Pergudangan Dan Komunikasi	160.472	44.882	27,97	115.590	72,03
Lembaga Keuangan, Asuransi, Real Estate, Usaha Persewaan Dan Jasa Perusahaan	94.362	29.933	31,72	64.429	68,28
Jasa Kemasyarakatan	344.873	595.755	172,75	-250.882	-72,75
Total	2.871.182	1.431.617	49,86	1.439.565	50,14

Sumber: BPJS Ketenagakerjaan Kota Makassar, Tahun 2023

Tantangan pemerintah Kota Makassar ke depan untuk menaikkan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan ada pada pekerja informal. Pekerja informal umumnya mengalami kesulitan untuk menyisihkan sebagian pendapatan mereka membayar iuran karena sebagian besar pekerja informal berupah rendah. Berdasarkan data BPS Provinsi Sulawesi Selatan, rerata upah per bulan pekerja informal di Kota Makassar hanya Rp. 2.917.179 (data terakhir yang tersedia adalah tahun 2019), sementara biaya hidup yang harus ditanggung relatif tinggi. Hasil Survei Biaya Hidup yang dirilis oleh BPS menempatkan Kota Makassar sebagai salah satu dari 10 kota dengan biaya hidup paling mahal di Indonesia. Kota Makassar menempati urutan kelima dengan besaran biaya hidup Rp. 11.504.942 perbulan. Jika diperbandingkan antara rerata upah bulanan pekerja informal dengan biaya hidup, sulit bagi mereka untuk menyisihkan pendapatan untuk mendaftar sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan.

2.2.2.9. Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja Di Sektor Formal

Berdasarkan hasil pengolahan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal di Kota Makassar Tahun 2023 sudah mencapai 40,04%. Penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal terbagi-bagi dalam beberapa jenis gangguan, dimana gangguan penglihatan paling banyak mencapai 5.421 pekerja atau setara 21,12% dari total angkatan kerja disabilitas, kemudian gangguan pendengaran sebanyak 1.866 pekerja atau mencakup 7,27%, dan mengalami kesulitan/gangguan berjalan atau naik tangga mencapai 1.577 pekerja atau setara 6,14% dari total angkatan kerja disabilitas.

Tabel 2.29 . . .

Tabel 2.29
Jumlah dan Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal Kota Makassar Tahun 2023

Gangguan	Pekerja Formal Disabilitas	Angkatan Kerja Disabilitas	Persentase
Gangguan Penglihatan	5.421	25.673	21,12%
Gangguan Pendengaran	1.866	25.673	7,27%
Gangguan Berjalan	1.577	25.673	6,14%
Gangguan Tangan	826	25.673	3,22%
Gangguan Komunikasi	1.455	25.673	5,67%
Gangguan Lainnya	1.455	25.673	5,67%
Total	10.280*	25.673	40,04%

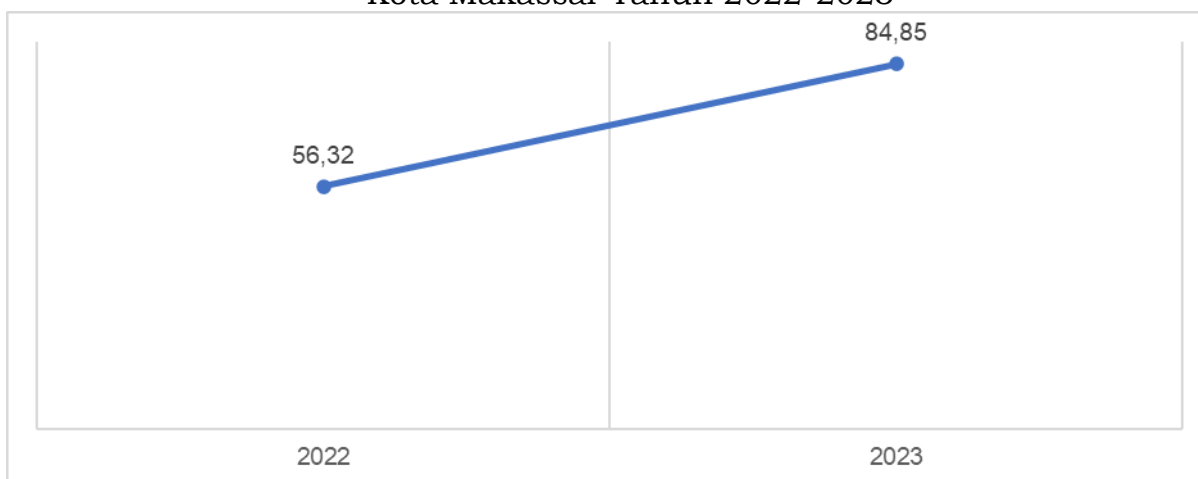
Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (data diolah), Tahun 2024

Meski persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal di Kota Makassar sudah hampir mendekati angka 50%, tapi mayoritas pekerja penyandang disabilitas saat ini masih berada di sektor informal. Persentase disabilitas ini mengacu pada lampiran SEB Buku I pada bagian definisi dan rumus indikator utama pembangunan yang membandingkan dengan total angkatan kerja disabilitas, berbeda dengan persentase yang ditetapkan dalam UU No. 8 Tahun 2016 yang membandingkan persentase terhadap total pekerja dalam satu institusi. Regulasi yang ada sudah memadai sebagai payung hukum untuk mempersempit diskriminasi terhadap penyandang disabilitas dalam pasar tenaga kerja. Pemerintah daerah hanya perlu memberikan dukungan substansial pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia para penyandang disabilitas, infrastruktur yang belum sepenuhnya ramah disabilitas, serta rendahnya kesadaran dan komitmen dari pihak swasta serta perusahaan lokal untuk mempekerjakan penyandang disabilitas, akibat minimnya insentif serta stigma sosial yang masih kuat.

2.2.2.10. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)

Kota Makassar termasuk daerah yang mengalami kenaikan iBangga yang signifikan dari tahun 2022 ke 2023. Tahun 2022, iBangga Kota Makassar masih di angka 56,32 atau termasuk kategori cukup baik (berkembang), namun setahun kemudian berhasil sampai ke angka 84,85 atau masuk pada kategori baik (tangguh). Kenaikan tersebut menempatkan posisi Kota Makassar sebagai daerah yang memiliki iBangga tertinggi di Provinsi Sulawesi Selatan.

Grafik 2.77
Indeks Pembangunan Keluarga Kota Makassar Tahun 2022-2023



Sumber: BKKBN, Tahun 2023

Salah satu indikator iBangga yang masih bermasalah di Kota Makassar adalah tingkat perceraian. Perceraian masuk sebagai salah satu indikator dari dimensi ketentraman. Berdasar data dari Pengadilan Agama (PA) kelas 1A Makassar, hingga Desember 2022 sudah mencatat sebanyak 2.635 kasus perceraian. Perinciannya, 2.024 kasus cerai gugat (pihak istri yang menuntut cerai) dan 611 kasus cerai talak (suami yang mengajukan talak perceraian). Tahun 2023, jumlah kasus perceraian sedikit menurun tapi secara nominal masih tetap tinggi yaitu 2.030 kasus, dimana sebagian besar dipicu karena adanya perselisihan atau pertengkaran. Selain itu, kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kota Makassar semakin tinggi. Tahun 2021, jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga sebanyak 504 kasus dengan 457 kasus (90,67%) yang melibatkan perempuan sebagai korban, dan selebihnya 47 kasus (9,33%) melibatkan laki-laki sebagai korban.

2.2.2.11. Indeks Perlindungan Anak

Pemerintah menghitung IPA di tingkat kabupaten/kota di tahun 2022, sehingga belum ada data *time series* yang dapat dianalisis. Satu-satunya data yang tersedia adalah data tahun 2022. Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Kemen PPPA dan BPS tahun 2022, Kota Makassar tercatat mencapai angka IPA sebesar 66,08. Angka lebih tinggi dari Sulawesi Selatan yang hanya 60,37 dan merupakan angka tertinggi dibandingkan kabupaten/kota lainnya. Relatif tingginya IPA Kota Makassar terhadap daerah lain di Sulawesi Selatan disebabkan karena nilai empat klaster yang tinggi yaitu Klaster II Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, Klaster III Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, Klaster IV Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya, dan Klaster V Perlindungan Khusus. Kota Makassar mampu mencatatkan angka indeks untuk Klaster II sebesar 80,34, Klaster III 83,90, Klaster IV 39,64, dan Klaster V sebesar 75,93. Kota Makassar hanya relatif rendah pada satu klaster yaitu Klaster I Hak Sipil dan Kebebasan dengan nilai 47,32. Dengan capaian IPA tersebut, Pemerintah Kota Makassar mendapatkan Pemerintah Kota Makassar meraih penghargaan dari Kemen PPPA sebagai kota layak anak dengan kategori Nindya. Meskipun secara relatif IPA Kota Makassar lebih tinggi dari provinsi dan semua kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, tapi angka tersebut masih berada dibawah target nasional yang ada dalam RPJMN tahun 2020-2024. Tahun 2022, pemerintah menetapkan target IPA sebesar 71,66. Oleh karena itu, isu tentang perlindungan anak masih perlu menjadi perhatian pemerintah Kota Makassar dalam jangka panjang.

Dua klaster yang perlu diperhatikan untuk menaikkan IPA yaitu Klaster I dan Klaster IV sebab capaian Kota Makassar untuk kedua klaster ini masih rendah. Pada Klaster I, ada lima indikator yang mesti diperhatikan pemerintah daerah yaitu Persentase anak berusia 0-17 tahun yang memiliki akta kelahiran; Persentase anak berusia 5-17 tahun yang pernah mengunjungi perpustakaan/memanfaatkan taman bacaan masyarakat; Persentase anak berusia 5-17 tahun yang pernah menggunakan internet; Persentase anak berusia 10-17 tahun yang pernah mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar; Persentase anak berusia 10-17 tahun yang ikut serta dalam kegiatan organisasi selain di tempat kerja atau sekolah. Sementara untuk Klaster IV, juga terdapat lima indikator yaitu Persentase anak berusia 7-17 tahun yang tidak sekolah; Persentase anak berusia 5-17 tahun yang mengunjungi peninggalan sejarah dan warisan budaya Indonesia; Persentase anak berusia 5-17 tahun yang mengikuti kursus (selain bimbingan belajar); Persentase anak berusia 5-17 tahun yang masih bersekolah yang pernah mengikuti ekstrakurikuler ; dan Persentase anak berusia 5-17 tahun yang terlibat dalam pertunjukan seni.

Tabel 2.30
Indeks Perlindungan Anak Tahun 2023
Kota Makassar

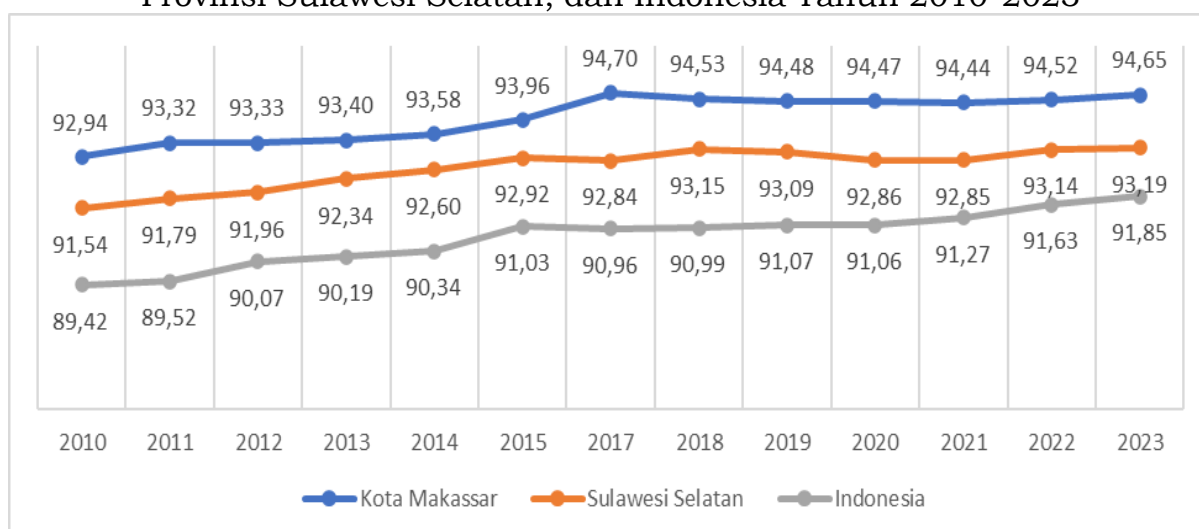
No	Kabupaten/ Kota	Klaster I Hak Sipil dan Kebebasan	Klaster II Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	Klaster III Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	Klaster IV Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya	Klaster V Perlindungan Khusus	IPA	IPHA	IPKA
1	Kepulauan Selayar	48,42	76,58	76,22	22,57	71,97	60,15	56,75	74,40
2	Bulukumba	44,99	74,41	80,18	25,65	61,48	57,94	56,87	63,56
3	Bantaeng	45,17	68,87	77,84	22,79	62,88	56,13	54,17	63,58
4	Jeneponto	40,86	69,54	75,00	22,98	55,42	53,30	52,63	55,03
5	Takalar	48,69	77,15	79,54	26,46	64,12	59,90	58,64	64,57
6	Gowa	45,45	74,37	80,13	28,29	70,33	60,44	57,58	71,10
7	Sinjai	48,67	76,88	74,97	23,88	52,82	56,06	56,92	51,68
8	Maros	48,00	77,60	78,17	27,76	70,25	61,19	58,57	73,42
9	Pangkep	52,27	75,98	77,19	23,59	70,19	60,75	58,05	70,59
10	Barru	44,88	73,48	83,83	25,06	63,72	58,76	57,29	66,47
11	Bone	48,13	75,15	77,49	24,61	52,10	56,00	57,04	51,51
12	Soppeng	50,17	70,55	79,00	29,05	66,91	59,72	57,65	65,90
13	Wajo	52,20	65,28	78,49	24,61	62,89	57,20	55,56	64,28
14	Sidrap	51,76	73,25	81,33	25,90	72,06	61,62	58,63	75,05
15	Pinrang	48,94	74,31	78,14	27,39	60,66	58,48	57,80	64,18
16	Enrekang	46,55	80,77	79,20	26,32	57,61	58,75	58,99	59,39
17	Luwu	47,40	76,27	76,79	21,33	61,80	57,52	56,25	60,02
18	Tana Toraja	46,17	74,50	72,46	23,77	54,03	54,83	55,00	52,42
19	Luwu Utara	50,62	74,59	79,56	24,43	67,49	60,10	57,96	67,07
20	Luwu Timur	53,33	76,77	76,91	29,20	63,95	60,72	59,76	64,05
21	Toraja Utara	46,06	73,80	76,37	25,83	57,27	56,44	56,15	54,98
22	Kota Makassar	47,32	80,34	83,90	39,64	75,93	66,08	63,21	79,91
23	Kota Parepare	48,35	81,27	81,57	32,36	67,21	62,84	61,53	72,14
24	Kota Palopo	48,28	83,68	77,99	35,04	71,80	64,21	61,98	76,37
Sulawesi Selatan		47,96	75,01	79,13	27,87	68,25	60,37	58,08	68,93

Sumber: Kemen PPPA dan Badan Pusat Statistik, Tahun 2023

2.2.2.12. Indeks Pembangunan Gender

Pembangunan gender Kota Makassar dilihat dari angka IPG, mengalami kenaikan dalam 14 tahun terakhir dan semakin mendekati angka ideal. Tahun 2010, IPG Kota Makassar sudah mencapai 92,94 lebih tinggi dari Provinsi Sulawesi Selatan dan nasional yang angkanya masing-masing 91,54 dan 89,42. Angka IPG Kota Makassar terus naik hingga mencapai 94,70 tahun 2017, tertinggi dalam periode ini dan semakin jauh meninggalkan provinsi dan nasional. Tapi setelah itu, terjadi penurunan beruntun tahun 2018 hingga 2021, kemudian naik kembali di tahun 2022 dan 2023 menjadi 94,52 dan 94,65. Meski angkanya masih lebih rendah dari 2017, tapi IPG Kota Makassar tetap lebih tinggi dari provinsi dan nasional yaitu 93,19 dan 91,85. Capaian IPG tahun 2023 menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia antara laki-laki dan perempuan di Kota Makassar relatif lebih merata.

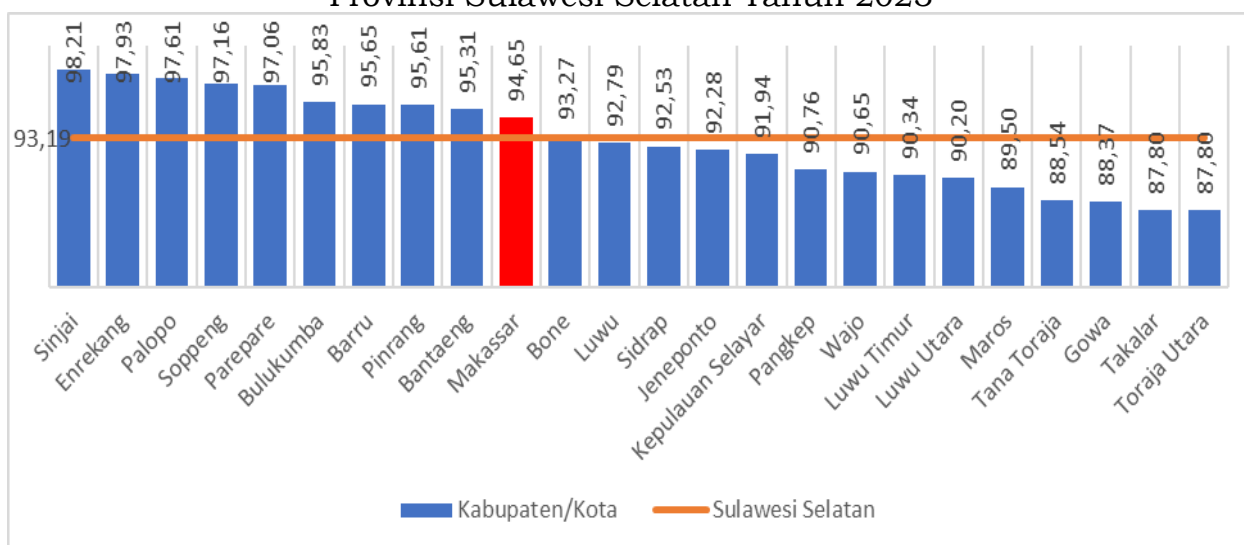
Grafik 2.78
Indeks Pembangunan Gender Kota Makassar,
Provinsi Sulawesi Selatan, dan Indonesia Tahun 2010-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2023

Pencapaian IPG Kota Makassar yang lebih tinggi dari provinsi dan nasional tentu mesti dipertahankan. Namun, hal tersebut tak serta merta membuat posisi relatif Kota Makassar terhadap beberapa daerah di Sulawesi Selatan lebih tinggi. Angka IPG Kota Makassar tahun 2023 ternyata bukan yang tertinggi di Sulawesi Selatan. Angka tersebut hanya menempatkan Kota Makassar pada posisi ke-10 dari 24 daerah. Kota Makassar masih tertinggal dari sembilan daerah lainnya yaitu Kabupaten Sinjai (98,21), Kabupaten Enrekang (97,93), Kota Palopo (97,61), Kabupaten Soppeng (97,16), Kota Parepare (97,06), Kabupaten Bulukumba (95,83), Kabupaten Barru (95,65), Kabupaten Pinrang (95,61), dan Kabupaten Bantaeng (95,31).

Grafik 2.79
Indeks Pembangunan Gender Kabupaten/Kota di
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023



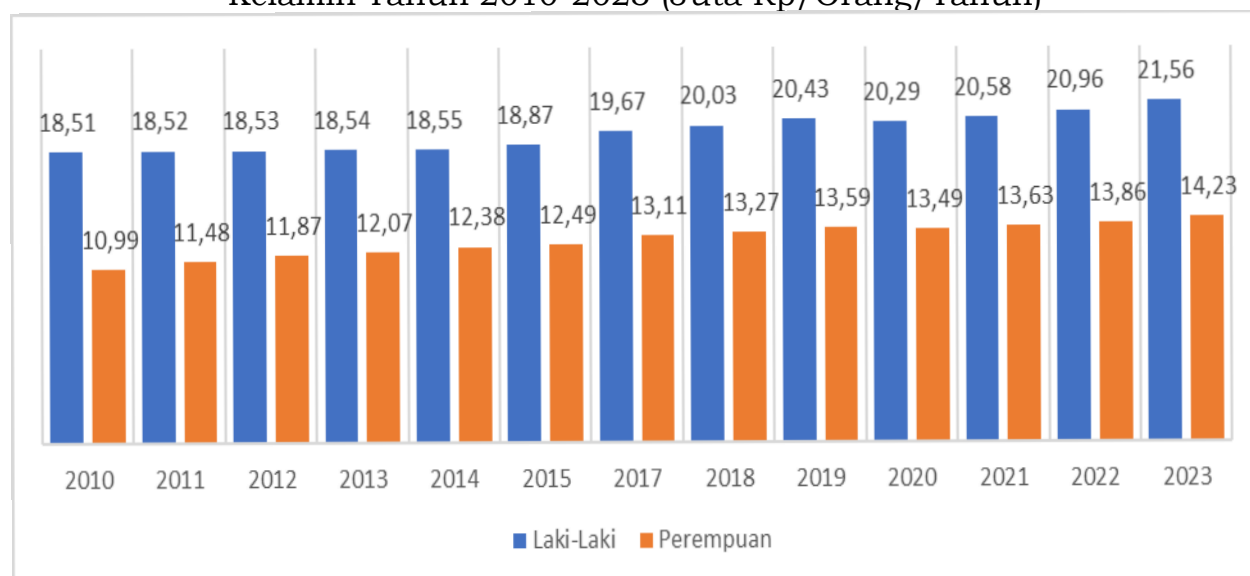
Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2024

Faktor penyebab masih tertinggalnya IPG Kota Makassar relatif terhadap sembilan daerah lainnya adalah disparitas yang tajam pada indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan antara laki-laki dan perempuan. Dalam 14 tahun terakhir, pengeluaran per kapita perempuan masih belum mampu mendekati laki-laki. Tahun 2010, rerata penduduk laki-laki di Kota Makassar menghabiskan pengeluaran sebesar Rp. 18,51 juta per tahun, sementara perempuan hanya Rp. 10,99 juta per tahun atau ada selisih Rp.

7,52 juta . . .

7,52 juta. Tahun 2011 hingga 2014, pengeluaran per kapita perempuan tumbuh lebih tinggi dari laki-laki, tapi masih belum mampu mempersempit kesenjangan. Tahun 2015 sampai 2023, giliran pengeluaran per kapita laki-laki yang cenderung naik lebih tinggi dari perempuan. Hingga di tahun 2023, pengeluaran per kapita laki-laki mencapai Rp. 21,56 juta dan perempuan hanya Rp. 14,23 juta per tahun atau terdapat selisih sebanyak Rp. 7,34 juta. Sebagai perbandingan dengan Kabupaten Sinjai yang memiliki IPG tertinggi di Sulawesi Selatan, kesenjangan antara pengeluaran per kapita laki-laki dan perempuan hanya Rp. 1,33 juta tahun 2023.

Grafik 2.80
Pengeluaran Per Kapita yang Disesuaikan Kota Makassar Menurut Jenis Kelamin Tahun 2010-2023 (Juta Rp/Orang/Tahun)



Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2024

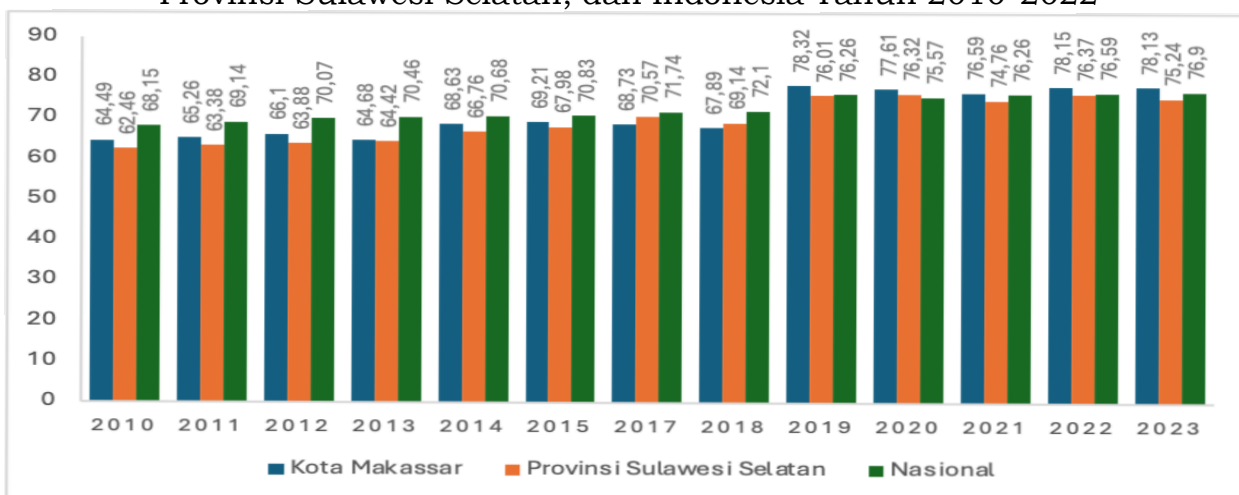
Ada banyak variabel yang dapat memperlebar disparitas antara pengeluaran per kapita laki-laki dan perempuan, salah satunya adalah ketimpangan pada aspek ketenagakerjaan atau lebih spesifik ketimpangan gender pada persoalan upah. Meski tak tersedia data tentang perbandingan upah antara laki-laki dan perempuan di Kota Makassar, tapi kondisi provinsi bisa menjadi proksi. Berdasarkan data BPS Sulawesi Selatan, terdapat kecenderungan yang menunjukkan bahwa perempuan lebih banyak terlibat dalam jenis pekerjaan tanpa bayaran. Setiap 100 orang yang melakukan pekerjaan tanpa bayaran, sekitar 70 di antaranya adalah perempuan. Namun, pada jenis pekerjaan yang menghasilkan pendapatan seperti bekerja sendiri, dibantu buruh, karyawan, dan pekerja lepas, pria masih mendominasi dengan persentase yang lebih tinggi. Karena dominan perempuan bekerja pada jenis pekerjaan tidak dibayar atau berupah rendah, maka pengeluaran per kapita mereka lebih rendah dari laki-laki.

2.2.2.13. Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Makassar, dalam beberapa tahun terakhir mengalami kenaikan yang menunjukkan bahwa salah satu indikator dari IDG keterlibatan perempuan di parlemen untuk Kota Makassar semakin banyak sehingga disparitas antara partisipasi perempuan dan laki-laki di ranah publik semakin berkurang. Tahun 2010, Kota Makassar mencatat nilai IDG sebesar 64,49, lebih tinggi dari Sulawesi Selatan dengan capaian 62,46, tapi lebih rendah dari nasional yang sudah sampai di angka 68,15. Angka tersebut terus naik, hingga di tahun 2017 sempat mengalami penurunan dari 69,21 tahun 2015 menjadi 68,73. Penurunan tersebut membuat capaian Kota Makassar berada dibawah provinsi yang menyentuh angka . . .

angka 70,57 dan masih tertinggi dari nasional. Penurunan tersebut berlanjut di tahun 2018 dan kemudian naik cukup tajam di tahun 2019 hingga 78,32, tapi kemudian menurun lagi tiga tahun berturut-turut yaitu di tahun 2020, 2021, dan pada tahun 2022 IDG Kota Makassar mengalami peningkatan sebesar 78,15 hingga di tahun 2023 capaian IDG sebesar 78,13, sedikit mengalami penurunan sebesar 0,02 point namun walaupun angka turun, capaian IDG Kota Makassar melebihi capaian IDG provinsi yang sebesar 75,24 dan nasional sebesar 76,90.

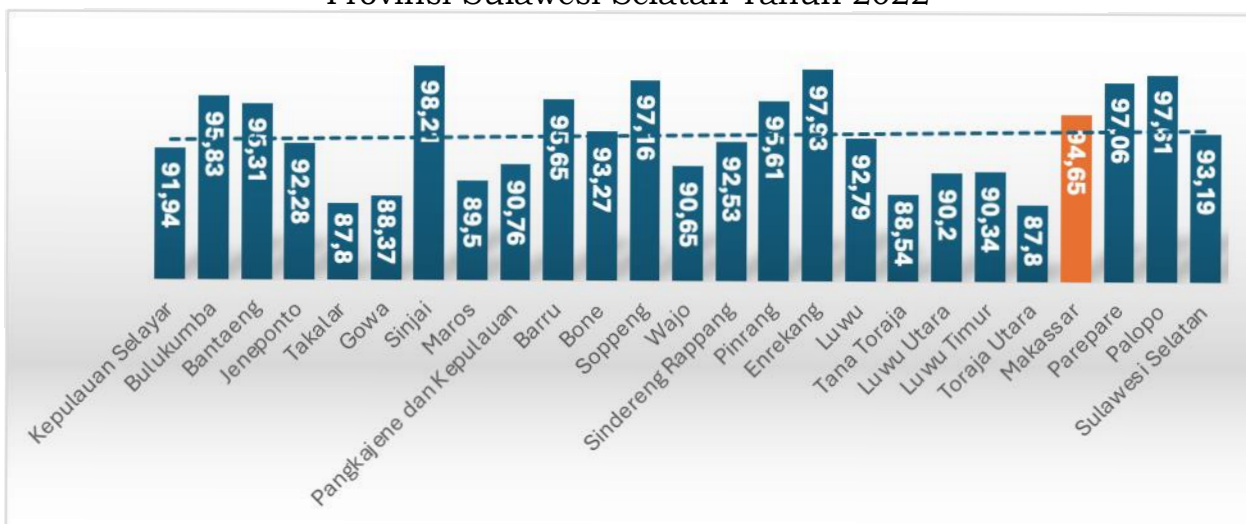
Grafik 2.81
Indeks Pemberdayaan Gender Kota Makassar,
Provinsi Sulawesi Selatan, dan Indonesia Tahun 2010-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2023

Meski pencapaian IDG Kota Makassar berada diatas angka provinsi dan nasional, tapi angka itu bukan yang tertinggi di Sulawesi Selatan. Capaian tersebut hanya menempatkan Kota Makassar pada urutan ke-7, masih berada dibawah Kabupaten Sinjai, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Soppeng, Kota Palopo, Kota Parepare, dan Kabupaten Barru. Kabupaten Sinjai mencatat angka tertinggi dengan nilai IDG 98,21 kemudian diikuti oleh Kabupaten Enrekang 97,53 dan Kabupaten Soppeng 97,16. Masih rendahnya IDG Kota Makassar relatif terhadap tiga daerah lainnya, menunjukkan bahwa masih perlu perbaikan dalam jangka panjang untuk mengejar ketertinggalan tersebut.

Grafik 2.82
Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten/Kota di
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022



Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2023

Salah satu tantangannya adalah keterlibatan perempuan di parlemen. Pada level provinsi, keterwakilan perempuan di parlemen masih jauh lebih rendah dari laki-laki, begitupun di Kota Makassar. Data statistik menunjukkan, tahun 2018, dari total anggota parlemen di Kota Makassar, 86% adalah laki-laki, sementara perempuan hanya 14%. Setahun kemudian, proporsi perempuan sempat naik hingga 26,53% dan laki-laki turun ke 73,47%, tapi dua tahun selanjutnya angkanya kembali turun yaitu 26% di tahun 2020 dan 24,49% tahun 2021. Tahun 2022 dan tahun 2023 proporsi perempuan kembali ke angka 26% dan laki-laki jadi 74%. Untuk tahun 2023 untuk proporsi perempuan pada anggota legislatif di Kota Makassar masih lebih tinggi dibandingkan pada tingkat Provinsi Sulawesi Selatan yang sebesar 25,88%.

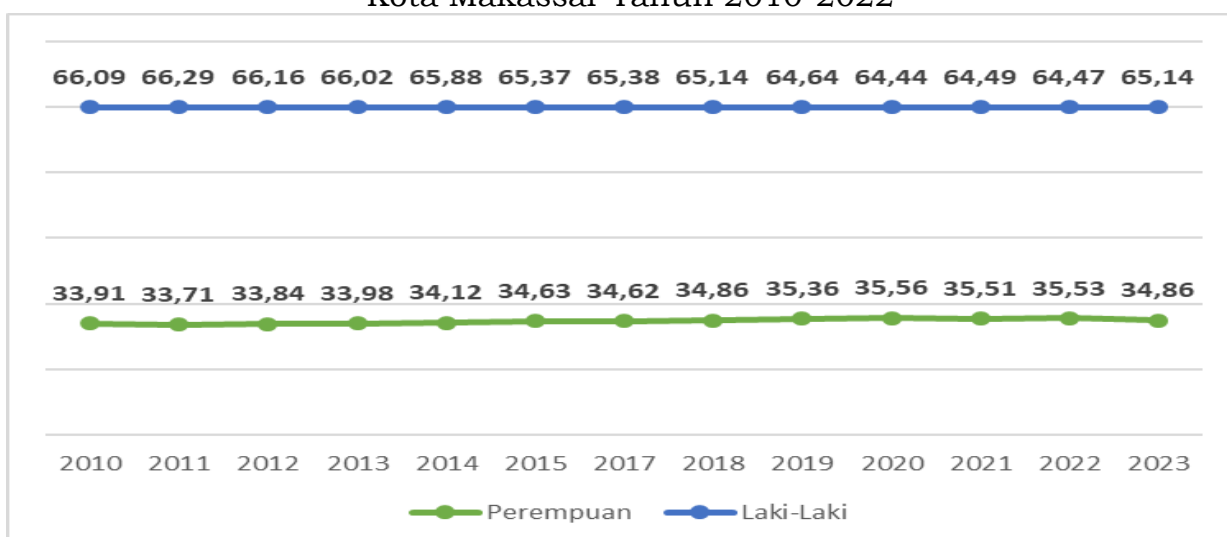
Grafik 2.83
Persentase Anggota Legislatif Laki-laki dan Perempuan
Kota Makassar Tahun 2018-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2022

Tantangan kedua yang menyebabkan masih relatif rendahnya IDG Kota Makassar relatif terhadap tiga daerah lainnya adalah kesenjangan distribusi pendapatan antara laki-laki dan perempuan. Distribusi pendapatan antara laki-laki dan perempuan yang dimaksud adalah perbandingan kontribusi pendapatan sektor non pertanian antara laki-laki dan perempuan (upah buruh non pertanian). Dalam 12 (duabelas) tahun terakhir, kontribusi pendapatan perempuan cenderung naik, tapi masih timpang jika dibandingkan dengan laki-laki. Tahun 2010, sebesar 66,09% total upah sektor non pertanian di Kota Makassar dikontribusi oleh laki-laki, sementara perempuan hanya 33,91%. Setahun kemudian, kontribusi perempuan sempat turun jadi 33,71%, tapi tahun-tahun selanjutnya meningkat secara konsisten, hingga mencapai 35,53% tahun 2022, dan ditahun 2023 kembali turun dengan angka 34,86, hal ini menjelaskan disparitas laki-laki dan perempuan masih sangat tajam.

Grafik 2.84
Sumbangan Pendapatan Perempuan dan Laki-Laki
Kota Makassar Tahun 2010-2022



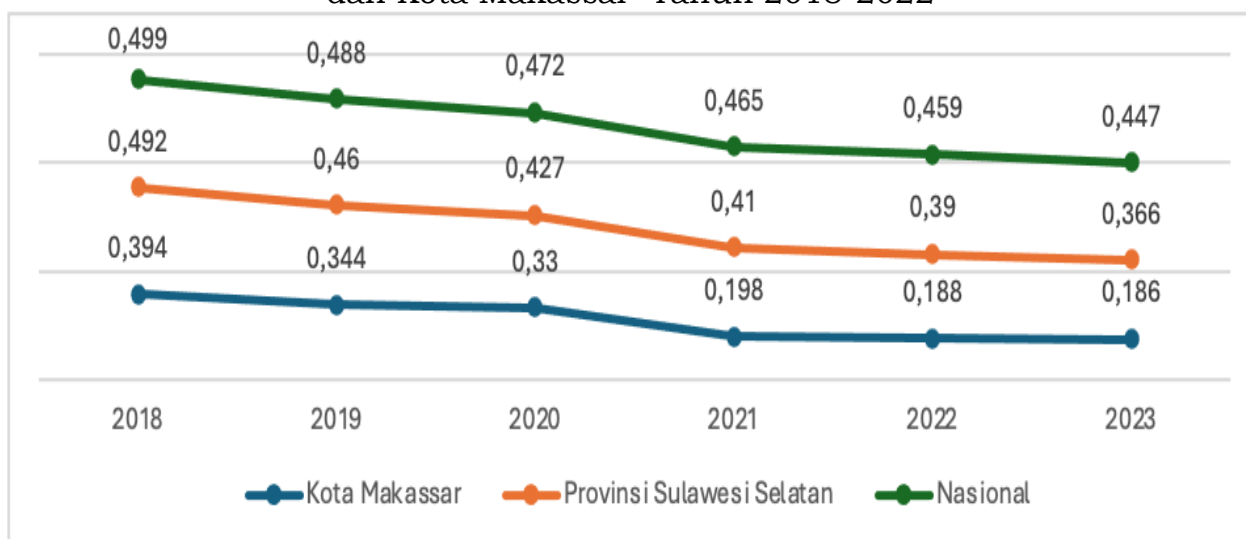
Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2023

Menurut BPS Provinsi Sulawesi Selatan, salah satu sebab masih rendahnya kontribusi pendapatan perempuan karena kondisi status pekerjaan penduduk perempuan yang bekerja lebih pada jenis pekerjaan yang tidak dibayar. Sebagian besar perempuan memang bekerja, tapi hanya membantu keluarga mereka saja, sehingga seringkali tidak ada balas jasa dari tenaga kerja perempuan yang dicurahkan. Berbanding terbalik dari perempuan, laki-laki justru lebih dominan bekerja pada jenis pekerjaan yang berbayar. Oleh karena itu, membuat perempuan berpindah dari pekerjaan tak berbayar ke pekerjaan berbayar adalah tantangan jangka panjang yang mesti diselesaikan oleh pemerintah Kota Makassar.

2.2.2.14. Indeks Ketimpangan Gender

Pada tahun 2017, BPS menghitung apa yang disebut sebagai indeks ketimpangan gender (IKG) untuk mengevaluasi ketidaksetaraan gender pada tiga dimensi yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi di pasar tenaga kerja. Berbeda dengan dua indeks sebelumnya yang semakin tinggi angkanya, semakin baik, IKG justru semakin rendah angkanya menunjukkan tingkat ketimpangan gender semakin sempit. Tahun 2018 hingga 2023, IKG Kota Makassar menunjukkan kinerja yang positif, dilihat dari trennya yang turun secara konsisten. Tahun 2018, IKG Kota Makassar masih di angka 0,394, kemudian turun 0,344 di tahun 2019. Tahun 2021 dan 2022 adalah penurunan paling tajam dengan capaian 0,198 dan 0,188 dan IKG Kota Makassar terus mengalami penurunan hingga tahun 2023 sebesar 0,186. Capaian Indeks Ketimpangan Gender Kota Makassar dalam lima tahun terakhir sangat baik dibandingkan Sulawesi Selatan dan Nasional, dimana IKG nasional masih mencatat angka diatas 0,4, sementara provinsi masih lebih dari 0,3.

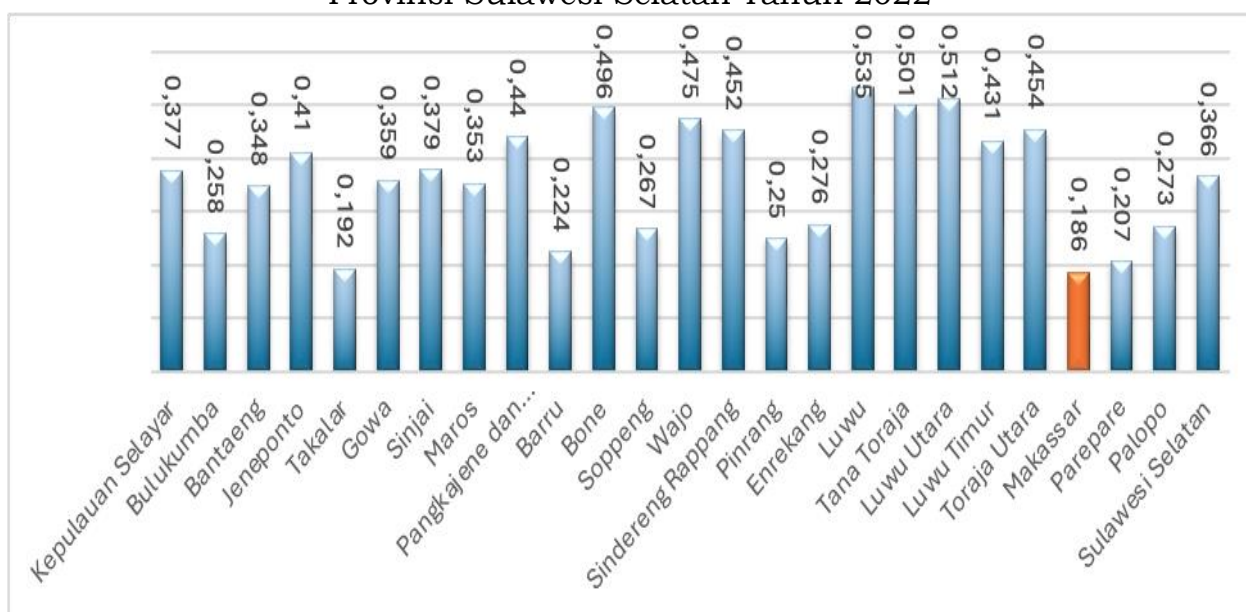
Grafik 2.85
Indeks Ketimpangan Gender Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan,
dan Kota Makassar Tahun 2018-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2023

Penurunan tajam IKG hingga mencapai 0,188 tahun 2022 berhasil menempatkan Kota Makassar pada posisi pertama daerah dengan IKG paling rendah di Sulawesi Selatan. Dari 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, hanya lima daerah yang memiliki IKG dibawah 0,3 yaitu Kota Makassar, Kota Parepare, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Gowa, dan Kota Palopo. Sementara hanya tujuh daerah yang angkanya lebih rendah dari provinsi, selain lima daerah sebelumnya, ditambah dengan Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Kepulauan Selayar, selebihnya masih berada di atas angka provinsi.

Grafik 2.86
Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten/Kota di
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022



Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2023

Penyebab rendahnya IKG Kota Makassar adalah keberhasilan menurunkan proporsi perempuan pernah kawin 15-49 tahun yang pernah melahirkan anak lahir hidup dalam 2 tahun terakhir tidak di fasilitas kesehatan dan proporsi perempuan pernah kawin 15-49 tahun yang melahirkan anak lahir hidup yang pertama kali berumur kurang dari 20 tahun. Untuk dua indikator ini, Kota Makassar mencatat angka masing-

masing . . .

masing 0,000% dan 0,192%. Angka itu menunjukkan bahwa tidak ada lagi perempuan di Kota Makassar yang pernah kawin 15-49 tahun yang pernah melahirkan anak lahir hidup dalam 2 tahun terakhir tidak di fasilitas kesehatan dan hampir tak ada lagi perempuan pernah kawin 15-49 tahun di Kota Makassar yang melahirkan anak lahir hidup yang pertama kali berumur kurang dari 20 tahun. Kota Makassar menempati peringkat pertama daerah yang paling rendah di Sulawesi Selatan untuk dua indikator ini.

Meski tren menunjukkan penurunan dan secara relatif lebih rendah dari kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, namun jika dikomparasi dengan daerah lain secara nasional, indeks ketimpangan gender Kota Makassar masih relatif tinggi. Secara nasional, IKG Kota Makassar paling rendah dibandingkan kab/kota yang ada di provinsi Sulawesi selatan dengan angka 0,186 dan angka Indeks Ketimpangan Gender (IKG) secara nasional yang terendah di Kota Madiun dengan angka 0,97 kemudian diikuti Kota Kediri sebesar 0,093, Kota Sleman 0,116 dan Kota Badung sebesar 0,126.

Tabel 2.31
Perbandingan IKG Kota Makassar dan Daerah Lain
di Indonesia Tahun 2022

No	Kabupaten/Kota	IKG 2023
1	Kota Madiun	0,079
2	Kota Kediri	0,093
3	Sleman	0,116
4	Badung	0,126
5	Kota Pekanbaru	0,130
6	Kota Padang Panjang	0,135
7	Kota Salatiga	0,143
8	Kota Surakarta	0,159
9	Ngawi	0,171
10	Kota Makassar	0,186
11	Kota Tanjung Pinang	0,227

Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2023

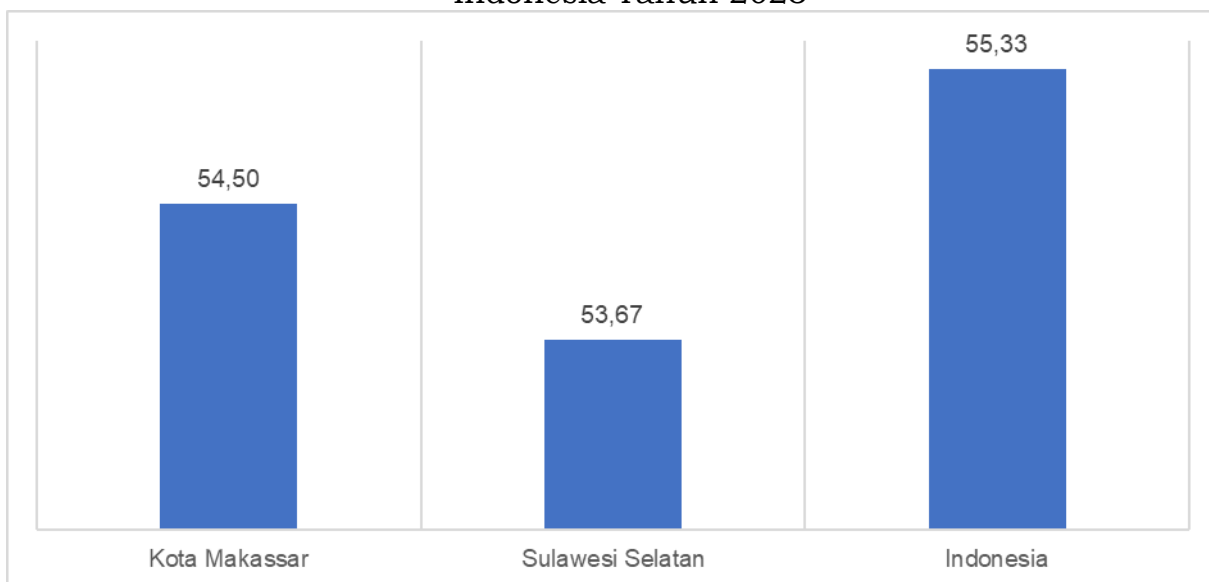
Ada dua komponen IKG yang masih menjadi permasalahan di Kota Makassar sehingga IKG Kota Makassar masih lebih tinggi dari beberapa daerah lain. Tiga indikator tersebut adalah Pendidikan SMA ke atas TPAK, dan Keterwakilan di Legislatif. Keterwakilan di Legislatif masih didominasi oleh laki-laki, bahkan syarat 30% keterwakilan perempuan belum bisa dipenuhi. Tahun 2023 keterwakilan perempuan di legislatif masih di angka 26,00% dan laki-laki 74,00%. Partisipasi angka kerja perempuan dan laki-laki juga masih timpang, perempuan hanya 41,19% dan laki-laki 77,86%. Partisipasi pendidikan SMA ke atas juga masih timpang, meski tak setimpang TPAK, perempuan hanya 65,05%, sementara laki-laki 68,00%.

2.2.2.15. Indeks Pembangunan Pemuda

IPP Kota Makassar tahun 2023 mencapai 54,50, lebih rendah dari Indonesia sebesar 55,33, tapi masih lebih tinggi dari Provinsi Sulawesi Selatan. Khusus Sulawesi Selatan, data yang digunakan adalah data tahun 2022. Capai IPP Kota Makassar juga masih lebih rendah jika dibandingkan dengan target RPJMN yang menargetkan tahun 2024 menjadi 57,67.

Grafik 2.87

Indeks Pembangunan Pemuda Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Indonesia Tahun 2023



Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar, Kemenpora, dan Draft RPJPD Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Masih rendahnya IPP Kota Makassar disebabkan karena nilai indeks kompositnya masih rendah, terutama domain kesehatan dan kesejahteraan, ketenagakerjaan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, dan gender dan diskriminasi. Pada domain ketenagakerjaan dan kesempatan kerja, nilai Kota Makassar masih di level 35,00, menunjukkan masih ada masalah pada dua indikator yang termasuk pada domain ini yaitu persentase pemuda wirausaha kerah putih yang angkanya masih rendah hanya 0,36% tahun 2023 dan tingkat pengangguran terbuka pemuda yang masih tinggi mencapai 14,84%. Pada domain kesehatan dan kesejahteraan, Kota Makassar mendapat angka 57,50, masih termasuk rendah. Hal itu disebabkan karena tiga dari empat indikator pada domain ini masih bermasalah yaitu angka kesakitan pemuda yang masih tinggi mencapai 8,29% tahun 2023, persentase pemuda yang merokok yang masih tinggi mencapai 23,88%, dan persentase remaja perempuan yang sedang hamil yang masih tinggi yaitu 10,70%.

Tabel 2.32
Indeks Pembangunan Pemuda Berdasarkan Komponen Kota Makassar Tahun 2023

Indikator Kinerja Pembangunan	Tahun 2023
Indeks Pembangunan Pemuda	54,50
- Pendidikan	73,33
- Kesehatan & Kesejahteraan	57,50
- Ketenagakerjaan dan Kesempatan Kerja	35,00
- Partisipasi & Kepemimpinan	40,00
- Gender & Diskriminasi	66,67

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar, Tahun 2023

Pada domain partisipasi dan kepemimpinan, Kota Makassar hanya mendapat nilai 40,00, sementara untuk domain gender dan diskriminasi, nilai indeksnya sudah cukup tinggi yaitu 66,67 tapi masih perlu didorong. Rendahnya nilai domain partisipasi dan kepemimpinan disebabkan karena persentase pemuda yang aktif dalam kegiatan organisasi dan persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat masih rendah, masing-masing angkanya hanya 11,49% dan 4,55%. Untuk domain gender

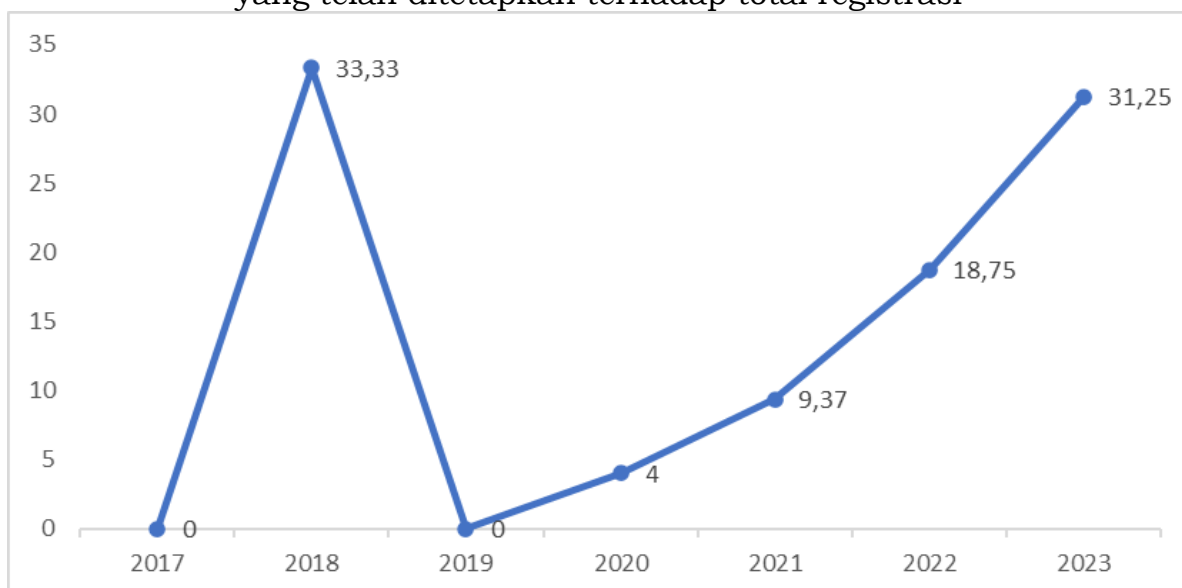
dan ...

dan diskriminasi masih perlu diperbaiki pada indikator angka perkawinan usia anak yang masih mencapai 10,34% dan persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal yang masih di angka 25,85%.

2.2.2.16. Persentase Benda, Bangunan, Struktur dan Situs Cagar Budaya yang Telah Ditetapkan Terhadap Total Registrasi

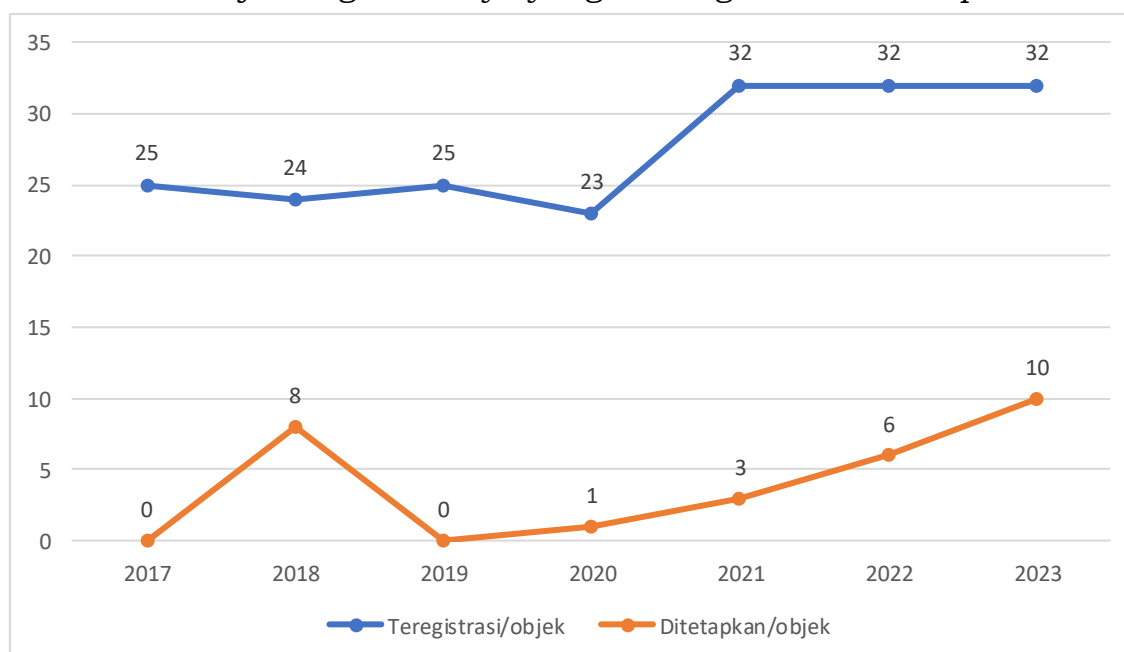
Pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2023 tercatat objek cagar budaya yang teregistrasi sebanyak 193 objek dengan target dan capaian yang dilakukan tiap tahunnya. Dari 2017 sampai dengan tahun 2023 objek Cagar Budaya yang telah ditetapkan sebanyak 28 objek, melalui sidang penetapan oleh tim ahli cagar budaya dan disahkan melalui Surat Keputusan Walikota Makassar. Pada tahun 2017 ada sebanyak 25 objek yang teregistrasi di tahun dan tidak ada objek yang ditetapkan sebagai objek cagar budaya. Pada tahun 2018 ada sebanyak 24 objek yang teregistrasi, dan yang ditetapkan sebanyak 8 objek cagar budaya. Pada tahun 2019 ada sebanyak 25 objek yang teregistrasi tetapi tidak ada sidang penetapan cagar budaya, dikarenakan adanya COVID 19. Pada tahun 2020 sebanyak 24 objek yang teregistrasi dan yang ditetapkan sebanyak 1 objek cagar budaya saja dikarenakan ada beberapa pendukung dari objek cagar budaya yang diusulkan tidak dapat dipenuhi misalkan sertifikat tanah dan bangunan. Pada tahun 2021 ada sebanyak 32 objek cagar budaya dan yang ditetapkan sebagai cagar budaya sebanyak 3 objek cagar budaya di tahun 2022 ada sebanyak 32 objek cagar budaya dan yang ditetapkan sebagai cagar budaya sebanyak 6 objek. Pada tahun 2023 ada sebanyak 32 objek cagar budaya dan yang ditetapkan sebagai cagar budaya sebanyak 10 objek.

Grafik 2.88
Persentase Benda, Bangunan, Struktur dan situs cagar Budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi



Sumber: Dinas Kebudayaan Kota Makassar, Tahun 2023

Grafik 2.89
Data Objek Cagar Budaya yang terintegrasi dan ditetapkan



Sumber: Dinas Kebudayaan Kota Makassar, Tahun 2023

Berdasarkan data tersebut di atas menunjukkan bahwa sejak tahun 2017 – 2023 menunjukkan dari 193 objek cagar budaya yang teregistrasi hanya 28 yang ditetapkan atau sebesar 14,50%, hal ini disebabkan sidang penetapan cagar budaya membutuhkan waktu yang panjang untuk pengkajian dan penulisan objek cagar budaya yang sudah diregistrasi bahkan pada prosesnya tidak dapat ditetapkan karena belum ditemukan objek sebagai cagar budaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pelestarian Cagar Budaya dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya.

2.3. Aspek Daya Saing

2.3.1. Daya Saing Ekonomi Daerah

2.3.1.1. PDRB

Pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Kota Makassar mengalami pertumbuhan sebesar 0,93% dibanding tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi bergerak lebih cepat seiring dengan pemulihan ekonomi yang semakin membaik. Hal ini didasarkan atas asumsi bahwa: (i) dukungan kebijakan pemerintah baik dalam bentuk fiskal maupun kebijakan lainnya diperkirakan mampu untuk mendorong perekonomian ketingkat yang lebih tinggi; (ii) kebijakan pemerintah Kota Makassar terutama sektor-sektor strategis yang mempercepat pergerakan aktivitas ekonomi terutama pada sektor-sektor UMKM untuk mendukung sektor perdagangan besar dan eceran, kebijakan terkait dengan upaya mendorong sektor swasta sehingga investasi bergerak yang berdampak pada sektor konstruksi dan sektor industri pengolahan; (iii) sektor perhotelan dan restoran kembali berjalan normal seiring upaya pemulihan ekonomi baik pada skala nasional yang berdampak pada Kota Makassar; (iv) sektor informasi dan komunikasi bertumbuh lebih cepat seiring dengan peningkatan permintaan masyarakat terhadap penggunaan internet.

Tiga lapangan usaha yang selama ini menjadi penopang pertumbuhan ekonomi Kota Makassar, yaitu industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, dan konstruksi pada tahun 2022 dapat bangkit, sehingga guncangan

pada . . .

pada lapangan usaha tersebut akan langsung mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Tabel 2.33
PDRB Berdasarkan Harga Berlaku Dan Harga Konstan (Triliun Rupiah)
Kota Makassar Tahun 2018 s.d 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1.	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	160,21	178,43	178,33	190,32	208,94
2.	PDRB Atas Dasar Harga Konstan	112,56	122,47	120,91	126,31	133,13

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2023

Tingkat kemajuan dan kesejahteraan penduduk suatu wilayah dipengaruhi oleh besar kecilnya nilai PDRB per kapita yang diciptakan. Namun angka PDRB per kapita bukanlah suatu angka riil yang dinikmati oleh penduduk wilayah tersebut. Kontribusi nilai PDRB per kapita terhadap kesejahteraan penduduk dipengaruhi beberapa faktor diantaranya adalah kepemilikan faktor produksi serta kesenjangan pendapatan antara yang berpendapatan tinggi dan yang berpendapatan rendah. Kemajuan pembangunan ekonomi yang dicapai dalam kurun waktu tahun 2018-2022 Kota Makassar mendorong meningkatnya nilai PDRB yang diciptakan. Nilai dan kontribusi sektor terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Kota Makassar dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.34
Nilai Sektor dalam PDRB atas Dasar Harga Berlaku Menurut (Juta Rp)
Lapangan Usaha Kota Makassar Tahun 2018 s.d 2022

No	Kategori/Subkategori	2018	2019	2020	2021	2022
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	808.429,00	854.968,00	840.918,05	905.358,84	1.007.223,84
2	Pertambangan dan Penggalian	1.102,10	990,9	0	-	-
3	Industri Pengolahan	29.380.566,40	32.666.060,90	31.925.716,50	34.200.058,66	38.892.736,95
4	Pengadaan Listrik dan Gas	50.468,60	54.824,50	51.902,20	57.153,84	63.190,34
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	307.684,70	306.466,00	323.615,70	341.524,51	368.879,31
6	Konstruksi	28.760.382,80	32.513.283,60	33.290.646,80	36.131.952,00	38.870.358,63
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	31.753.861,10	36.513.390,60	34.983.124,10	37.753.710,41	41.997.947,49
8	Transportasi dan Pergudangan	4.151.019,80	4.588.974,70	3.928.658,10	4.323.529,30	5.480.408,04
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.698.770,60	3.980.368,90	3.292.663,00	3.407.193,29	4.233.262,63
10	Informasi dan komunikasi	14.801.742,90	16.204.129,20	17.944.237,30	19.207.635,32	20.159.257,80
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	9.706.799,50	10.375.078,60	10.592.318,70	10.636.609,11	11.514.824,70
12	Real Estate	5.957.040,90	6.378.524,80	6.425.249,70	6.628.571,96	7.088.392,64
13	Jasa Perusahaan	1.897.195,10	2.163.559,40	1.957.202,00	2.104.351,32	2.513.006,71
14	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	5.494.161,10	6.090.926,60	6.193.187,00	6.516.963,87	6.733.069,62
15	Jasa Pendidikan	14.484.266,40	15.650.175,10	16.337.464,10	16.859.342,75	17.439.125,09
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4.483.768,90	5.020.835,80	5.813.675,50	6.387.493,46	7.054.410,76
17	Jasa lainnya	4.470.399,40	5.067.504,50	4.432.414,20	4.856.616,65	5.519.697,75
PDRB		142.448.701	160.207.659,30	178.332.992,77	190.318.065,29	208.935.792,29

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2023

Secara . . .

Secara detail tergambar pada tabel lapangan usaha yang tidak signifikan terpengaruh dengan guncangan pandemi Covid-19 adalah kategori Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi, kategori Lapangan Usaha Jasa Pendidikan, kategori Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial.

Tingginya permintaan masyarakat terhadap produk telekomunikasi, terutama layanan internet menjadi penyebab bertambahnya nilai PDRB sektor informasi dan komunikasi selama lima tahun terakhir. Secara berturut-turut nilai tambah sektor informasi dan komunikasi naik mulai dari angka Rp. 14,80 triliun pada tahun 2018, dan kemudian mencapai Rp. 16,20 triliun di tahun 2019, Rp. 17,94 triliun di tahun 2020, Rp. 19,20 triliun di tahun 2021, dan Rp. 20,16 triliun di tahun 2022. Tahun 2022, meski badai pandemik sudah mulai mereda, namun informasi dan komunikasi diprediksi menjadi salah satu sektor yang mendapat dampak positif karena sebagian besar aktivitas masyarakat dan pemerintah daerah masih dilakukan secara virtual sehingga penggunaan internet mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Oleh sebab itu, informasi dan komunikasi masih menjadi tumpuan ekonomi Kota Makassar di tahun 2022. Adapun untuk sektor lain di tahun 2022, juga sudah mulai memperlihatkan kemajuan yang signifikan.

Adapun jasa pendidikan aktivitas belajar mengajar sebagian besar sudah dilakukan secara tatap muka seperti yang telah dilakukan saat ini oleh para guru dan dosen di Kota Makassar. Sepanjang tahun 2018 hingga 2022, kinerja positif ditunjukkan sektor jasa pendidikan dalam menghasilkan nilai tambah bagi perekonomian Kota Makassar. Tahun 2018, sektor ini tercatat menciptakan angka PDRB sektoral Rp 14,48 triliun, bertambah dari Rp 12,82 triliun pada tahun sebelumnya. Kenaikan nilai PDRB sektoral terus berlanjut di tiga tahun terakhir dari Rp 16,33 triliun tahun 2020 menjadi Rp 16,85 triliun tahun 2021, dan akhirnya sampai pada angka Rp 17,43 triliun di tahun 2022 sekaligus menjadi nilai tertinggi selama periode ini.

Tabel 2.35
PDRB Kota Makassar Atas Dasar Harga Konstan
Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Tahun 2018 – 2022

No	Kategori/Subkategori	2018	2019	2020	2021	2022
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	504.691,80	525.999,90	508.925,20	518.307,32	532.418,47
2	Pertambangan dan Pengalihan	659,1	576,3	0	-	-
3	Industri Pengolahan	20.856.675,20	22.728.078,20	21.767.900,10	22.678.921,08	24.726.635,65
4	Pengadaan Listrik dan Gas	49.359,10	53.873,30	51.516,00	54.003,24	58.661,56
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	228.605,80	224.810,90	236.015,70	244.658,55	256.915,94
6	Konstruksi	18.397.670,50	20.034.234,20	20.232.795,60	21.101.287,57	21.371.122,85
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	22.484.333,70	25.142.389,60	23.777.629,40	25.119.554,41	26.747.838,19
8	Transportasi dan Pergudangan	2.737.517,90	2.995.636,70	2.476.090,80	2.641.163,22	3.138.086,46
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.682.317,20	2.849.880,00	2.284.794,40	2.326.299,49	2.791.541,59

10	Informasi dan komunikasi	13.735.373,80	14.916.416,90	16.487.162,80	17.525.169,34	18.129.787,68
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	6.152.597,00	6.366.608,00	6.482.785,20	6.282.853,94	6.290.561,86
12	Real Estate	3.648.893,60	3.835.372,80	3.838.843,70	3.949.175,28	4.100.560,97
13	Jasa Perusahaan	1.205.393,00	1.354.928,90	1.200.576,10	1.266.825,77	1.447.451,35
14	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	3.500.853,40	3.770.957,20	3.754.745,80	3.917.663,86	4.016.180,04
15	Jasa Pendidikan	10.434.496,30	11.120.165,70	11.302.838,00	11.695.481,34	11.881.439,49
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3.001.174,50	3.285.553,50	3.680.339,30	3.952.682,98	4.323.444,64
17	Jasa lainnya	2.947.802,70	3.260.346,90	2.822.793,90	3.038.780,28	3.319.951,38
PDRB		103.826.155,90	112.568.414,90	120.905.752,03	126.312.827,67	133.132.598,14

Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2023

PDRB-ADHK selama periode 2018-2022 juga memperlihatkan perkembangan pola yang hampir sama dengan PDRB-ADHB. Dampak pandemi Covid-19, nilai PDRB-ADHK menurun drastis menjadi Rp. 120.905.752,0 pada tahun 2020, kemudian perlahan-lahan mulai bangkit sebesar Rp. 126.312.827,67 pada Tahun 2021 dan pada tahun 2022 mengalami peningkatan yang cukup menggembirakan yaitu pada angka Rp.133,132,598,14.

Nilai tambah PDRB-ADHK dikontribusi oleh tiga sub lapangan usaha yang selama ini merupakan kontributor terbesar yaitu pertama sub perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor; kedua sub; industri pengolahan, ketiga sub kontruksi. Karena ketiga sektor tersebut menghasilkan nilai tambah paling besar dibandingkan 14 lapangan usaha lain, maka prioritas kebijakan Tahun 2022 harus diarahkan kepada sektor-sektor tersebut supaya dapat bertahan meskipun guncangan pandemi Covid-19 masih berlangsung pada tahun 2022. Sementara untuk Sub Informasi dan Komunikasi berada pada peringkat keempat dimana pada tahun 2020 berkontribusi sangat besar kepada PDRB namun seiring dengan semakin kondusifnya kondisi kesehatan masyarakat maka level PPKM mulai diturunkan dan perlahan seluruh sektor *essential* kembali beroperasi secara normal dan kembali sehingga diberlakukan kembali pertemuan tatap muka.

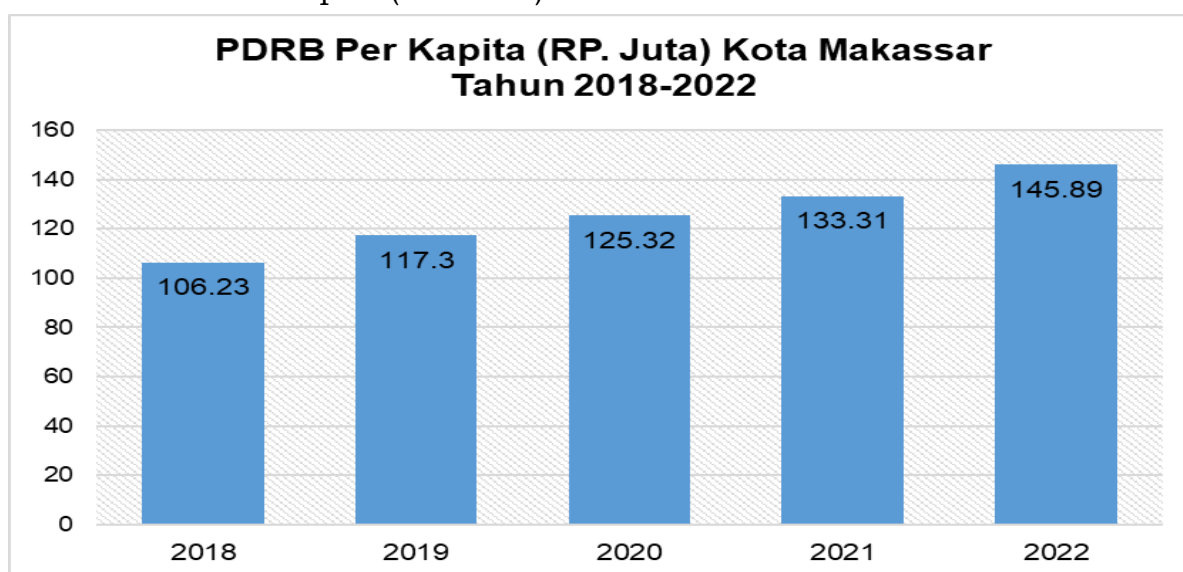
Jika nilai tambah seluruh sektor tersebut turun signifikan, maka pertumbuhan ekonomi Kota Makassar akan melambat dan akibatnya juga akan dirasakan oleh Provinsi Sulawesi Selatan karena sebagian dari kegiatan ekonominya bertumpu di Kota Makassar. Pada tahun 2022 diperkirakan nilai tambah seluruh sektor-sektor PDRB-ADHK mengalami peningkatan seiring dengan kebijakan pemerintah baik dari sisi fiskal maupun kebijakan lainnya yang mendorong pelaku-pelaku bisnis termasuk pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) untuk mengoperasikan usahanya. Sektor-sektor ekonomi produktif di berbagai lapangan usaha diprediksikan semakin berkembang yang selanjutnya berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. Dengan demikian dari sisi *demand*, permintaan sektor rumah tangga, sektor swasta, sektor pemerintah dan maupun sektor luar negeri akan mengalami peningkatan yang cukup signifikan di tahun 2022. Dengan demikian, dari sisi *supply* prediksi nilai PDRB-ADHK meningkat dan masih dikontribusi oleh ketiga sub lapangan usaha tersebut, menyusul sub lapangan usaha informasi dan komunikasi. Dari sisi *demand*, peran pemerintah dan sektor rumah tangga diprediksikan sebagai kontributor PDRB-ADHK.

2.3.1.2. PDRB Per Kapita

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat diartikan secara sederhana sebagai kenaikan output total (Produk Domestik Regional Bruto). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita suatu daerah merupakan konsep yang paling sering dipakai sebagai tolok ukur tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk daerah tersebut. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (satu tahun) yang merupakan penjumlahan seluruh pendapatan yang diperoleh perekonomian suatu wilayah yang dikelompokkan dalam 17 sektor ekonomi. Terdapat 2 (dua) jenis penilaian produk domestik regional bruto (PDRB) dibedakan dalam dua jenis penilaian yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan.

PDRB per kapita dihitung melalui total PDRB, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dibagi dengan total penduduk pada suatu daerah tertentu dengan tidak membedakan distribusi pendapatan menurut kelompok pendapatan tertentu.

Grafik 2.90
PDRB Per Kapita (RP. Juta) Kota Makassar Tahun 2018-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2023

PDRB dapat dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu dari sisi produksi, pengeluaran dan pendapatan. Namun demikian yang secara rutin dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) adalah penghitungan dari sisi produksi dan pengeluaran/penggunaan. Dapat kita lihat dari gambar di atas PDRB per kapita Kota Makassar selalu menunjukkan tren positif tiap tahunnya. Tiga sektor yang dominan dalam PDRB Kota Makassar ini ialah perdagangan, industri, dan konstruksi. Hasilnya, dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi sekaligus menekan harga pangan sehingga inflasi menjadi terkendali.

2.3.1.3. Rasio PDRB Industri Pengolahan

Dalam perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sisi lapangan usaha, salah satu sektor yang berperan penting adalah industri pengolahan. Sektor ini dapat menghasilkan nilai tambah dari hasil pengolahan produk, sehingga bisa berdampak secara signifikan pada perekonomian. Industri pengolahan juga memiliki keterkaitan erat dengan sektor-sektor ekstraktif, terutama sektor pertanian dan sektor pertambangan, sebab hasil-hasil dari kedua sektor bisa diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang bernilai tambah tinggi. Selain itu, sektor industri pengolahan juga bisa

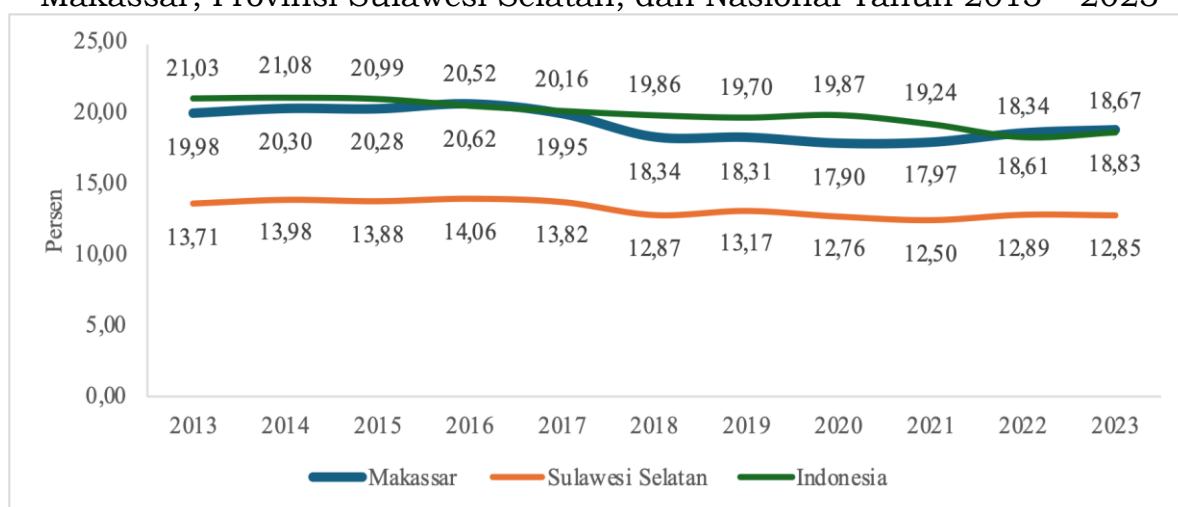
menjadi . . .

menjadi penopang sektor jasa, misalnya sektor perdagangan dan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, yang menggunakan hasil dari industri pengolahan sebagai input. Lebih lanjut, industri pengolahan yang padat karya juga menjadi penyumbang terbesar dalam penyerapan tenaga kerja.

Selama periode 2013-2023, industri pengolahan memegang peran cukup besar terhadap pergerakan ekonomi di Kota Makassar. Hal ini tercermin share industri pengolahan terhadap PDRB menempati urutan kedua tertinggi setelah perdagangan terhadap struktur ekonominya. Perkembangan kontribusinya secara rata-rata sebesar 19,19%, akan tetapi cenderung menurun dari dua titik waktu yaitu dari tahun 2013 sebesar 19,98 menjadi 18,83% di tahun 2023. Hal ini menandakan bahwa industri pengolahan mengalami penurunan peran dan digantikan oleh sektor-sektor ekonomi lainnya. Capaian di tahun 2023 ini mengalami penurunan 1,15 poin dari posisi 19,98% di tahun 2013. Penurunan terutama terjadi pada saat pandemi Covid-19, yakni mencapai 17,90% di tahun 2020, sebagai akibat dari pengurangan sisi penawaran dan permintaan barang/jasa, meskipun kembali meningkat pada masa pemulihan, tetapi capaiannya masih lebih rendah dibanding 11 tahun yang lalu. Kondisi tren penurunan ini tidak hanya terjadi di Kota Makassar, tetapi juga dialami di Provinsi Sulawesi Selatan yang menurun dari 13,71% di tahun 2013 menjadi 12,85% di tahun 2023, serta ditingkat nasional yang menurun dari 21,03% di tahun 2013 menjadi 18,76 di tahun 2023.

Grafik 2.91

Perkembangan Rasio Industri Pengolahan terhadap PDRB di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Nasional Tahun 2013 – 2023



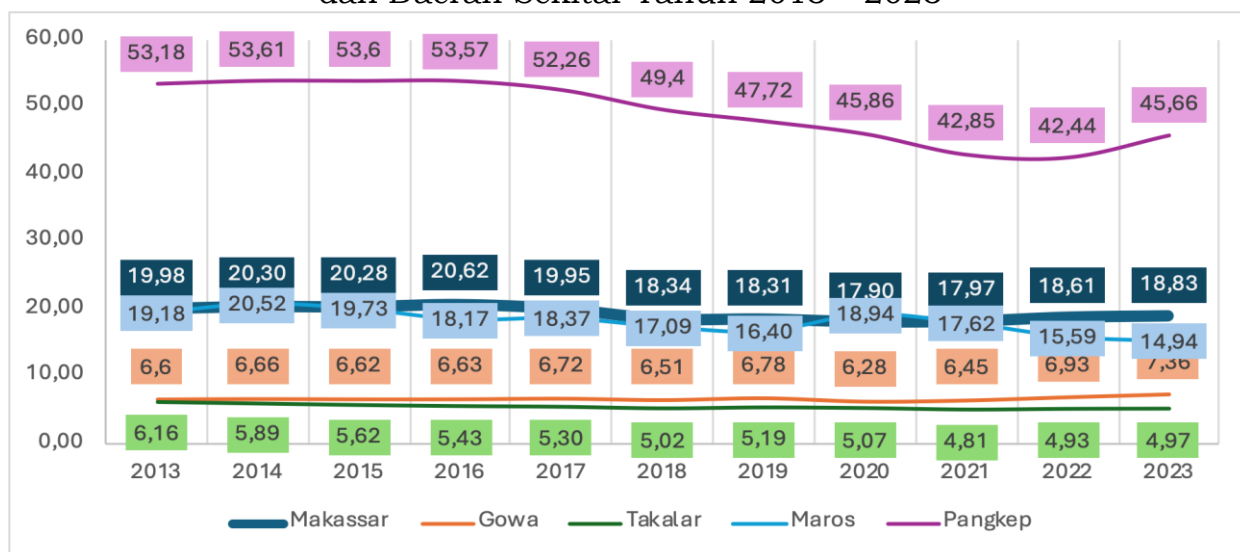
Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2024

Jika dibandingkan dengan kabupaten di Kawasan Mamminasata, share industri pengolahan Kota Makassar lebih tinggi dari Kabupaten Gowa, Maros, dan Takalar, namun lebih rendah dari Kabupaten Pangkep. Capaian share industri pengolahan Kota Makassar tergolong relatif tinggi dibanding dengan daerah Kawasan Mamminasata yaitu Gowa, Takalar, Maros dikontribusi oleh keberadaan Kawasan Industri Makassar (KIMA) dan berbagai jenis infrastruktur konektivitas yang tersedia yang menjadikan Kota Makassar sebagai tujuan investasi oleh perusahaan yang bergerak di sektor industri pengolahan. Lebih lanjut, jika dicermati share industri pengolahan di daerah tetangga, tren di Kabupaten Maros cukup fluktuatif karena kontribusi sektor transportasi dan pergudangan yang paling dominan di daerah ini cenderung bersifat fluktuatif, sehingga turut berpengaruh terhadap share sektor lainnya. Sementara itu, tren share industri pengolahan di Kabupaten Gowa dan Takalar cenderung stagnan, yang menunjukkan tidak adanya perubahan

mendasar . . .

mendasar dalam struktur perekonomian daerah. Tingginya share industri pengolahan di Kabupaten Pangkep dikontribusi oleh keberadaan industri semen Tonasa.

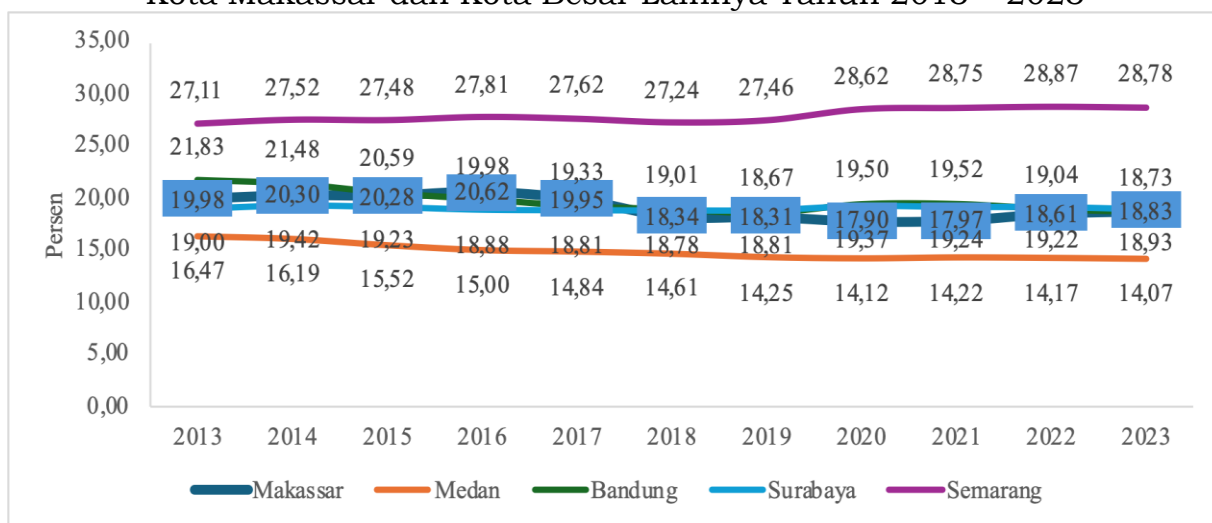
Grafik 2.92
Perkembangan Rasio Industri Pengolahan terhadap PDRB di Kota Makassar dan Daerah Sekitar Tahun 2013 – 2023



Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2024

Karakteristik Kota Makassar sebagai wilayah metropolitan tentunya memiliki ciri khas yang berbeda dengan daerah tetangga. Sebagai perbandingan dengan kota metropolitan lainnya, share industri pengolahan Kota Makassar pada tahun 2023 relatif lebih rendah dibanding Kota Semarang (28,78%), tetapi masih lebih tinggi dari Kota Medan (14,07%), serta hampir sama dengan Kota Bandung (18,73%) dan Kota Surabaya (18,93%). Kota Semarang menunjukkan tren meningkat, sedangkan Kota Medan menunjukkan tren menurun. Adapun Kota Bandung dan Kota Surabaya cenderung stagnan dengan pola yang hampir sama dengan Kota Makassar.

Grafik 2.93
Perkembangan Rasio Industri Pengolahan terhadap PDRB Kota Makassar dan Kota Besar Lainnya Tahun 2013 – 2023



Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2024

Berdasarkan uraian data sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa proporsi industri pengolahan terhadap PDRB Kota Makassar menempati urutan kedua terbesar terhadap total PDRB Kota Makassar. Hal ini mengindikasikan bahwa sektor industri memegang peran besar terhadap pergerakan perekonomian bahkan . . .

bahkan pada dua tahun terakhir sedikit melampaui rata-rata nasional, akan tetapi jika dibandingkan dengan kinerja pada beberapa kota yang setara di Indonesia, sumbangan sektor industri pengolahan masih dibawah dari Kota Surabaya dan Semarang. Salah satu penyebabnya adalah ketersediaan infrastruktur jalan dan pelabuhan di Kota Makassar belum menyamai dengan Kota Surabaya dan Semarang sehingga berimplikasi terhadap minat investor untuk berinvestasi pada sektor industri pengolahan di Makassar. Kondisi tersebut akan menjadi perhatian untuk Kota Makassar dalam 20 tahun akan datang

2.3.1.4. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan Minum

Sektor usaha ini mengalami perkembangan yang cukup pesat di Kota Makassar terutama akomodasi. Pada tahun 2013, jumlah akomodasi di Kota Makassar tercatat sebesar 316 unit, meningkat 5,4% menjadi 333 pada tahun 2023. Perkembangan ini tidak lepas dari posisi Kota Makassar sebagai gerbang Indonesia Bagian Timur dan juga penghubung antara wilayah barat dan timur Indonesia. Itu juga sebabnya Kota Makassar ramai dengan kegiatan MICE (*Meeting, Incentive, Convention, Exhibition*). Wisata MICE dapat memberi kontribusi 45% hingga 50% dalam peningkatan sektor usaha akomodasi di Kota Makassar. Selain itu, jumlah rumah makan dan restoran mengalami kenaikan berarti dari 281 unit pada tahun 2020 menjadi 3.443 unit pada tahun 2023.

Meskipun jumlah akomodasi ataupun rumah makan mengalami perkembangan pesat, namun nilai tambah yang dihasilkan sektor ini bagi perekonomian Kota Makassar cenderung mengalami perlambatan bahkan sebelum pandemi Covid-19. Kontribusi sektor usaha penyediaan akomodasi dan makan minum terhadap PDRB melambat dari 2,37% pada tahun 2013, menjadi 2,23% pada tahun 2019. Perlambatan ini dipengaruhi oleh penurunan tingkat penghunian kamar hotel dan konsumsi rumah tangga. Pada saat pandemi Covid-19, ketatnya pembatasan kegiatan masyarakat yang diberlakukan guna meredam penularan virus, membuat sektor penyediaan akomodasi dan makan minum lumpuh. Industri pariwisata dan kuliner di Kota Makassar yang seperti mati suri juga membuat sektor penyediaan akomodasi dan makan minum mengalami kontraksi cukup dalam. Pada 2020, kontraksi sektor ini mencapai minus 19,83%, lebih dalam dibanding sektor usaha lainnya. Peran atau kontribusi sektor ini terhadap PDRB Kota Makassar turun hingga 1,8% pada tahun 2020 dan berlanjut di tahun 2021 dengan tercatat sebesar 1,79%. Angka ini merupakan capaian terendah selama periode 2013-2023. Ditengah upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19, kontribusi sektor penyediaan akomodasi dan makan minum kemudian meningkat menjadi 2,03% di tahun 2022 dan 2,14% pada tahun 2023. Hal ini ditandai oleh meningkatnya kembali tingkat penghunian kamar hotel bintang dan non bintang masing-masing dari 39,70% dan 25,02% di tahun 2021 menjadi 51,62% dan 26,86% di tahun 2023. Selain itu, membaiknya kembali daya beli masyarakat pasca pandemi serta jumlah rumah makan dan restoran yang bertambah menjadi pengungkit naiknya nilai tambah sektor penyediaan akomodasi dan makan minum di Kota Makassar.

Sejalan dengan Kota Makassar, pada level Nasional, peran sektor penyediaan akomodasi makan dan minum terhadap PDB selama periode 2013 hingga 2019 juga mengalami perlambatan. Pada tahun 2013, rasio PDB penyediaan akomodasi makan dan minum mencatatkan angka 3,03%, turun menjadi 2,78% di tahun 2019. Akibat pandemi Covid-19, rasio PDB sektor ini turun berarti hingga tahun 2022 dengan mencatatkan angka 2,41%. Pada tahun 2023, kemudian kembali mengalami peningkatan menjadi 2,5%.

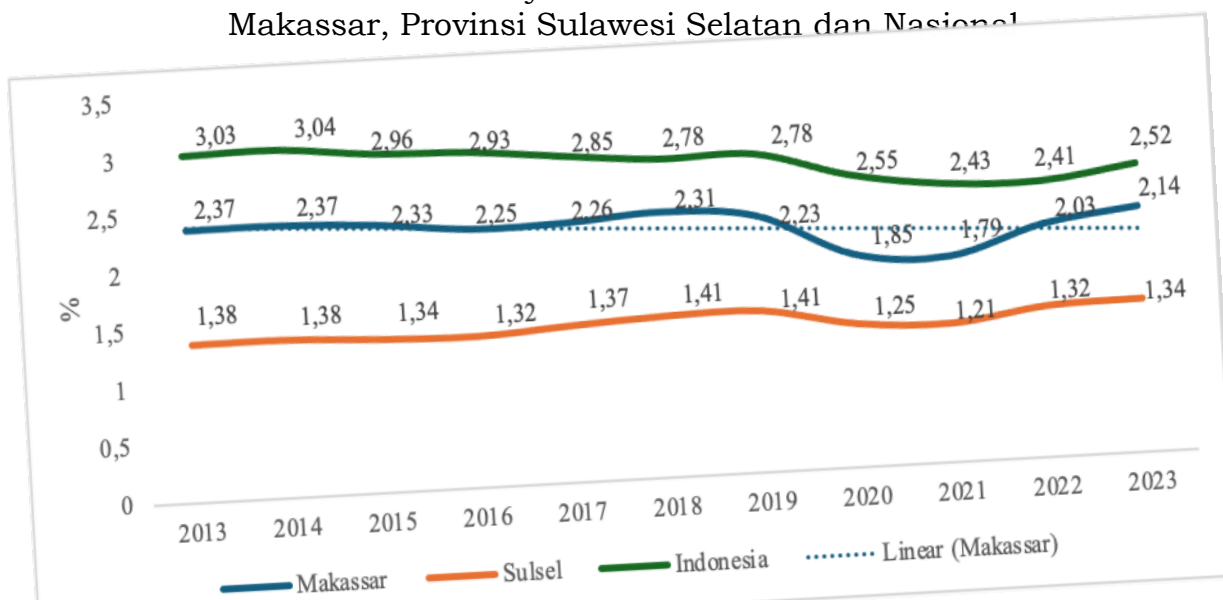
Berbeda dengan Kota Makassar dan Nasional, pada level provinsi, kontribusi

sektor . . .

sektor penyediaan akomodasi makan dan minum terhadap PDRB selama tahun 2013-2019 justru mengalami kenaikan dari 1,38% menjadi 1,41%. Kemudian di tahun 2020 dan 2021, kontribusinya turun menjadi 1,25% dan 1,21%, lalu kembali meningkat ke angka 1,34% pada tahun 2023.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa rasio penyediaan akomodasi makan dan minum Kota Makassar secara rata-rata berada di atas dari rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan, namun masih dibawah dari rata-rata nasional. Hal ini menjadi salah satu perhatian pemerintah Kota Makassar dalam 20 tahun ke depan untuk lebih meningkatkan sumbangan penyediaan akomodasi makan dan minum.

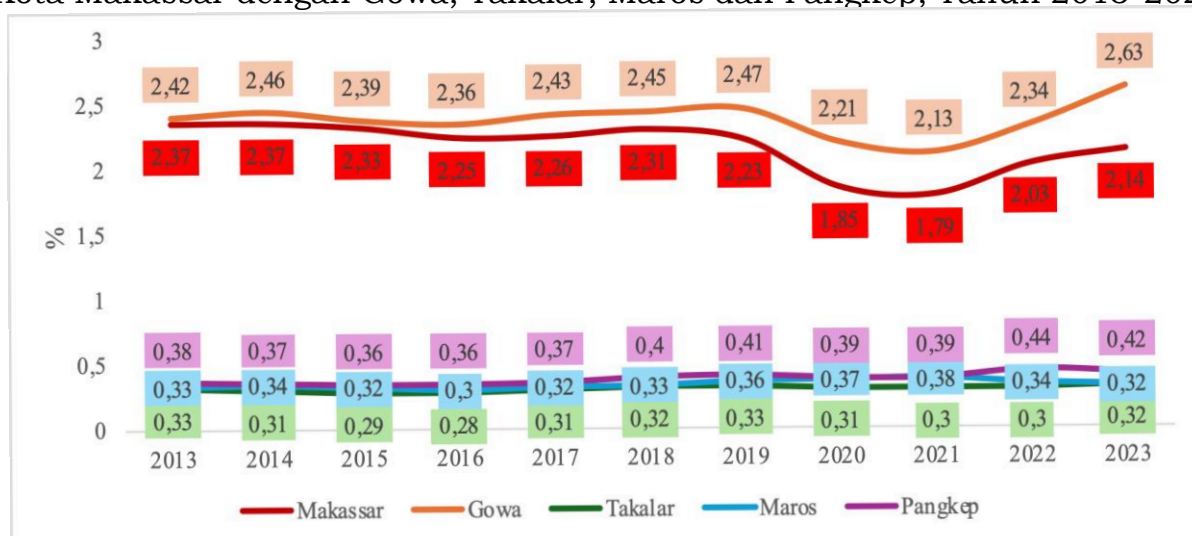
Grafik 2.94
Rasio PDRB dan PDB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional



Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2024

Jika dibandingkan dengan beberapa daerah lain khususnya di Kawasan Mamminasata di Provinsi Sulawesi Selatan, capaian rasio PDRB penyediaan akomodasi dan makan minum Kota Makassar lebih rendah dari Kabupaten Gowa dan berada di atas Kabupaten Takalar, Maros, dan Pangkep. Tingginya proporsi penyediaan akomodasi makan dan minum di Kabupaten Gowa menjelaskan bahwa aktivitas penyediaan makan dan minum lebih bertumbuh lebih cepat dibandingkan dengan Kota Makassar. Pada tahun 2013, kontribusi sektor penyediaan akomodasi dan makan minum Kabupaten Gowa tercatat sebesar 2,42%, meningkat 0,21% poin menjadi 2,63% pada tahun 2023. Kabupaten Pangkep juga menunjukkan kenaikan rasio PDRB penyediaan akomodasi dan makan minum dari 0,38% ditahun 2013 menjadi 0,42% pada tahun 2023. Dua Kabupaten lainnya yang berbatasan dengan Kota Makassar seperti Maros dan Takalar mengalami penurunan kontribusi PDRB sektor akomodasi dan makan minum selama tahun 2013 hingga 2023.

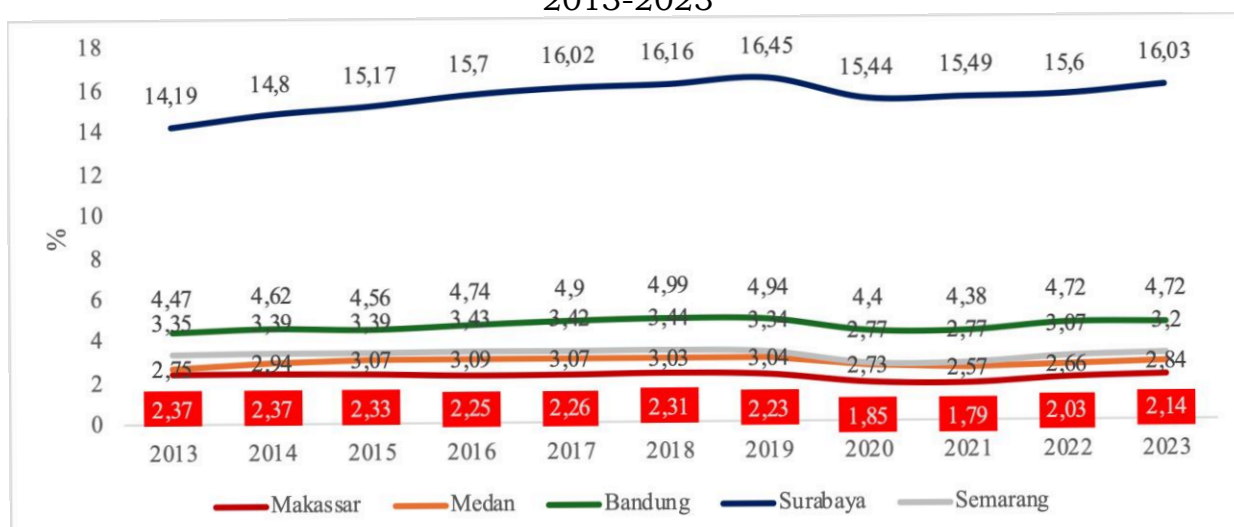
Grafik 2.95
Perbandingan Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum Kota Makassar dengan Gowa, Takalar, Maros dan Pangkep, Tahun 2013-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2024

Selain itu, jika dibandingkan kontribusi nilai tambah sektor penyediaan akomodasi dan makan minum Kota Makassar dengan kota besar lainnya di Indonesia, masih relatif tertinggal terutama dari Surabaya dan Bandung. Selama periode 2013-2023, tiga kota besar seperti Surabaya, Bandung dan Medan menunjukkan kenaikan rasio PDRB penyediaan akomodasi dan makan minum, sedangkan Kota Makassar dan Semarang justru sebaliknya. Kota Surabaya mencatatkan rasio PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 16,03% di tahun 2023, meningkat 1,84% poin dari tahun 2013. Sektor ini menjadi penyumbang terbesar ketiga bagi perekonomian Kota Surabaya setelah perdagangan dan industri pengolahan. Kemudian untuk Kota Bandung, rasio PDRB sektor tersebut tercatat sebesar 4,72% di tahun 2023, meningkat 0,25% poin dari tahun 2013.

Grafik 2.96
Perbandingan Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum Kota Makassar dengan Medan, Bandung, Surabaya dan Semarang, Tahun 2013-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2024

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa indikator pembangunan proporsi penyediaan makan dan minum terhadap PDRB Kota Makassar masih menjadi permasalahan yang ditandai oleh tren penurunan selama . . .

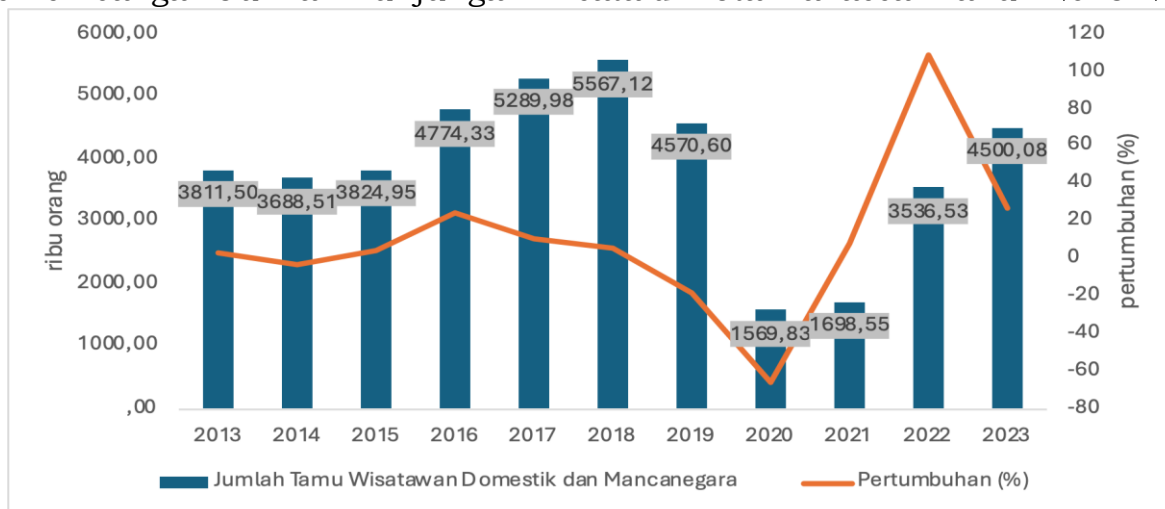
selama 11 tahun terakhir dan posisi relatif terhadap nasional dan beberapa kota yang setara di Indonesia. Hal tersebut menandakan bahwa sektor-sektor pemicu pergerakan penyediaan akomodasi makan dan minum belum bergerak secara maksimal seperti ketersediaan hotel secara fisik cukup berkembang tetapi tingkat hunian hotel yang belum maksimal. Penyebab lainnya adalah adanya pergerakan ekonomi di sub lapangan usaha lainnya lebih cepat dibandingkan dengan aktivitas pada penyediaan makan dan minum.

2.3.1.5. Jumlah Tamu Wisatawan Domestik dan Mancanegara (Orang)

Sektor pariwisata Indonesia menunjukkan perkembangan yang positif dalam beberapa tahun terakhir, meskipun sempat mengalami penurunan akibat pandemi Covid-19. Pemerintah Kota Makassar juga harus mengambil bagian untuk menjadikan industri pariwisata ini sebagai salah satu tulang punggung dalam meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah). Pariwisata menjadi salah satu sektor penting dalam perekonomian Indonesia, dengan kontribusi terhadap PDB mencapai 4% dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi jutaan orang.

Grafik 2.97

Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisata di Kota Makassar Tahun 2013-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2024

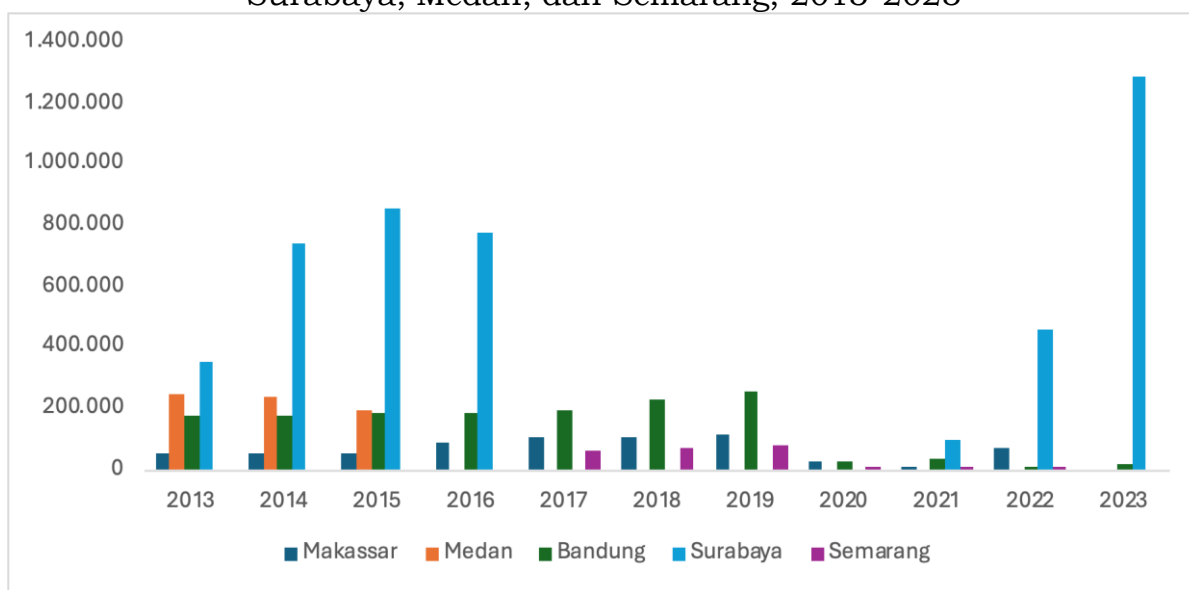
Jumlah kunjungan wisatawan baik wisatawan asing maupun domestik di Kota Makassar berfluktuasi selama 11 tahun terakhir. Pada periode 2013-2018, perkembangan kunjungan wisatawan di Kota Makassar memperlihatkan tren yang meningkat dari 3,8 juta orang menjadi 5,6 juta orang di tahun 2018. Capaian kinerja tersebut tidak bertahan pada tahun-tahun berikutnya, yaitu pada tahun 2019, jumlah kunjungan wisatawan sudah mulai menurun hingga mencapai puncak terendah di tahun 2020 yaitu 1,5 juta orang dan 1,7 juta orang di tahun 2021. Kondisi tersebut terutama sebagai akibat dari Pandemi Covid-19. Pada masa awal Covid, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara tercatat 29.358 orang turun drastis menjadi 3.367 orang di tahun 2021. Kondisi yang sama untuk kunjungan wisatawan domestik yang juga mengalami penurunan dari 4,46 juta orang menjadi 1,54 juta orang di tahun 2020 dan 1,69 juta orang di tahun 2021. Setelah pelonggaran mobilitas penduduk dan barang maka di tahun 2022 pergerakan manusia dan barang kembali mengalami perbaikan yang berimplikasi terhadap jumlah kunjungan wisatawan mancanegara di Kota Makassar yang tercatat sebesar 71.388 orang.

Pada tahun 2017-2019, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara mengalami peningkatan sebagai akibat dari upaya pemerintah Kota Makassar aktif menggelar acara dan program pariwisata dengan kegiatan event F8, Makassar culinary, festival losari, festival komunitas kreatif. Keberhasilan pemerintah . . .

pemerintah melaksanakan event-event berpengaruh signifikan terhadap jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Makassar. Upaya-upaya tersebut, masih menjadi perhatian pemerintah kota untuk membuat program dalam bentuk event untuk mendongkrak kembali jumlah wisatawan yang berkunjung di Kota Makassar di masa mendatang.

Sejak tahun 2021 hingga tahun tahun 2023, jumlah kunjungan wisatawan mengalami peningkatan signifikan akan tetapi percepatan pertumbuhannya cenderung melambat di tahun 2023. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya destinasi wisata di beberapa kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan.

Grafik 2.98
Perbandingan Jumlah Kunjungan Wisatawan Kota Makassar, Bandung, Surabaya, Medan, dan Semarang, 2013-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2024

Apabila dibandingkan dengan kota besar seperti Bandung, Surabaya, Medan dan Semarang, terlihat Kota Makassar masih tertinggal. Hal ini berarti sektor-sektor pendorong kepariwisataan relatif belum berkembang maksimal di Kota Makassar. Di tahun sebelum pandemi yakni tahun 2017-2019, jumlah wisatawan Kota Makassar masing-masing sebesar 102.461 orang, 105.462 orang, dan 111.147 orang, sementara Kota Bandung di tahun yang sama tercatat masing-masing sejumlah 189.902 orang, 189.902 orang, dan 227.560 orang.

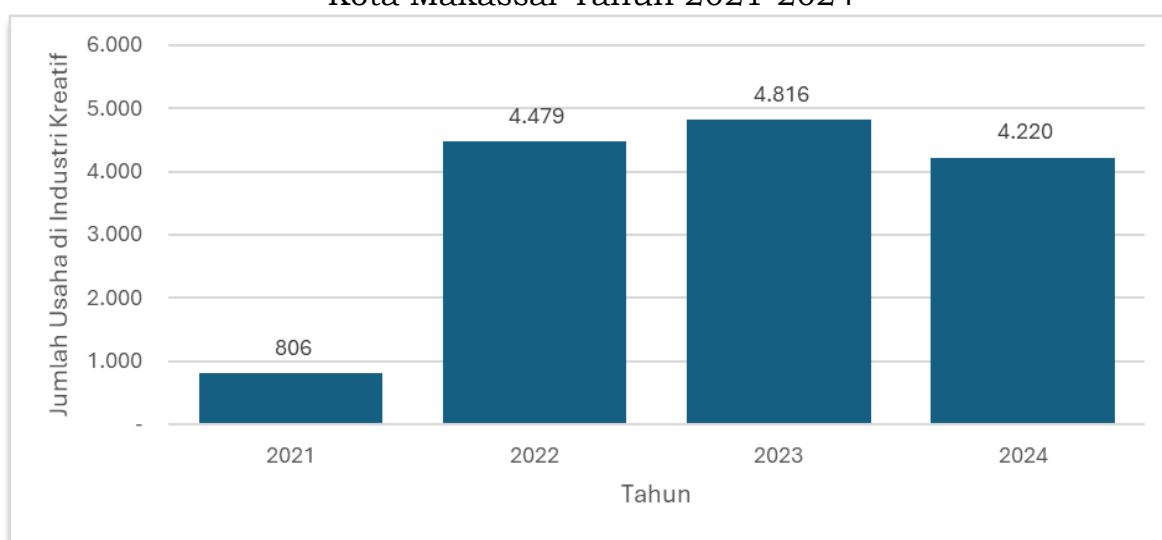
Belum optimalnya jumlah tamu wisatawan baik domestik maupun mancanegara disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: (i) belum tersedianya RIPPARDA Kota Makassar, (ii) ketersediaan infrastruktur destinasi wisata belum memadai, (iii) SDM pariwisata belum tersedia secara memadai, (iv) ekonomi kreatif belum berkembang secara signifikan.

2.3.1.6. Jumlah Industri Kreatif

Berdasarkan data historis jumlah perusahaan di industri kreatif di Makassar dari tahun 2021 hingga 2024, terlihat adanya fluktuasi yang signifikan. Pada tahun 2021, terdapat 806 perusahaan, namun jumlah ini melonjak drastis menjadi 4.479 perusahaan pada tahun 2022. Tahun 2023 menunjukkan peningkatan lebih lanjut dengan 4.816 perusahaan, tetapi kemudian terjadi penurunan menjadi 4.220 perusahaan pada tahun 2024. Fluktuasi ini mencerminkan dinamika pasar dan berbagai faktor ekonomi yang mempengaruhi industri kreatif di Makassar. Per tahun 2014, jumlah pelaku industri kreatif tercatat sebanyak 205 unit bisnis. Angka ini telah mengalami peningkatan . . .

peningkatan hingga lebih dari dua kali lipat menjadi 553 pada tahun 2023. Peningkatan secara progresif cukup terlihat pada periode 2014 hingga 2019, dimana jumlah pelaku industri kreatif di Kota Makassar yang awalnya masih berada di kisaran angka 200 di tahun 2014-2015, mengalami lonjakan yang cukup besar hingga menjadi lebih dari 300 unit memasuki tahun 2017-2018, dan bahkan kembali mengalami peningkatan yang lebih signifikan memasuki tahun 2019 yang mencapai 519. Meskipun demikian, peningkatan jumlah pelaku industri kreatif mengalami perlambatan dalam kurun lima tahun terakhir, dan bahkan hampir tidak mengalami perubahan yang cukup signifikan.

Grafik 2.99
Jumlah Industri Ekonomi Kreatif
Kota Makassar Tahun 2021-2024



Sumber: Dinas Pariwisata Kota Makassar, Tahun 2024

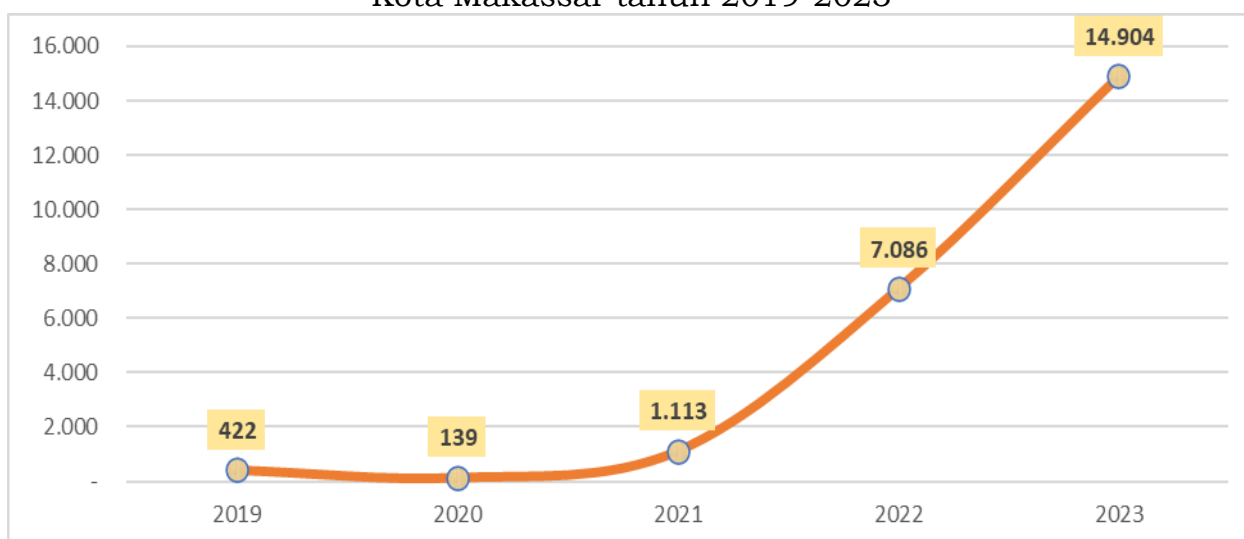
Industri kreatif memiliki peran penting dalam perekonomian Kota Makassar. Selain menciptakan lapangan kerja, industri ini juga mendorong inovasi dan diversifikasi ekonomi. Keberadaan industri kreatif dapat meningkatkan daya saing kota, menarik investasi, dan memperkuat identitas budaya lokal. Fluktuasi jumlah perusahaan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti perubahan kebijakan pemerintah, akses terhadap modal dan sumber daya, serta perubahan dalam permintaan pasar. Misalnya, lonjakan jumlah perusahaan pada tahun 2022 dapat dipicu oleh kebijakan pemerintah yang mendukung pengembangan industri kreatif atau peningkatan akses terhadap pembiayaan. Sebaliknya, penurunan pada tahun 2024 bisa jadi akibat dari tantangan ekonomi global atau lokal yang mempengaruhi daya beli masyarakat dan investasi di sektor ini. Dengan demikian, mendukung pertumbuhan dan stabilitas industri kreatif adalah langkah strategis untuk mencapai target ekonomi jangka panjang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Makassar.

2.3.1.7. Jumlah Industri Kecil dan Menengah Pada Level Kota Makassar

Selama periode lima tahun terakhir, terlihat adanya fluktuasi signifikan dalam jumlah entitas bisnis di bidang industri kecil dan menengah (IKM). Pada tahun pertama, jumlahnya mencapai 422, namun mengalami penurunan drastis di tahun kedua menjadi 139, yang kemungkinan besar disebabkan oleh Pandemi Covid-19. Setelah tahun kedua, sektor ini mulai pulih dengan peningkatan tajam pada tahun ketiga, mencapai 1.113 unit bisnis, dan melesat lebih tinggi pada tahun keempat dengan total 7.086 unit.

Grafik 2.100 . . .

Grafik 2.100
Jumlah Industri Kecil Menengah
Kota Makassar tahun 2019-2023



Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2024

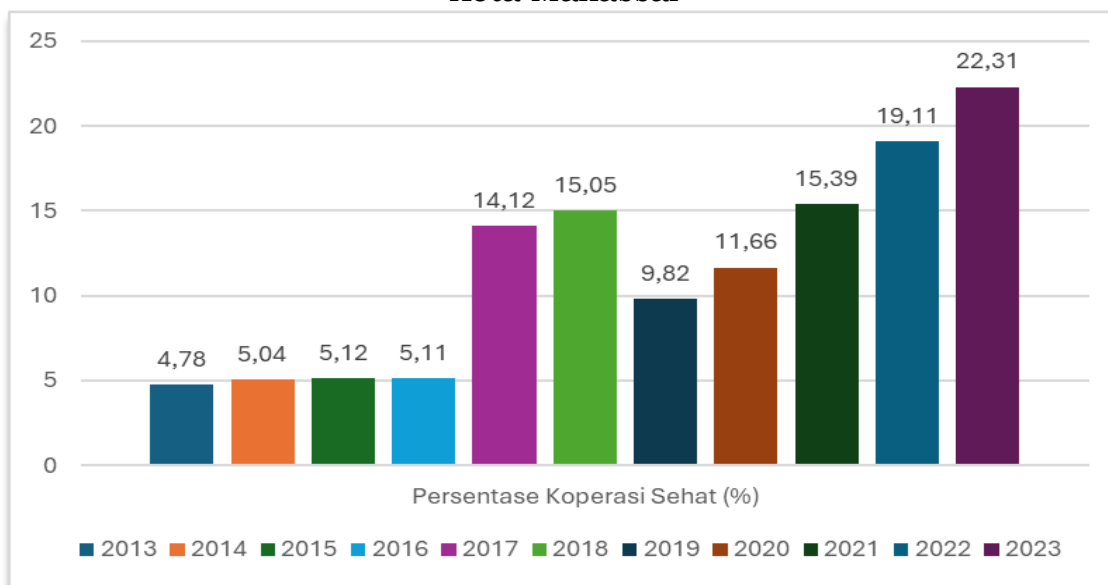
Pada tahun kelima, pertumbuhan tersebut semakin pesat, dengan total entitas bisnis mencapai 14.904, lebih dari dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Lonjakan ini bisa mencerminkan upaya intensif dalam mendukung pengusaha kecil dan menengah, baik dari sisi kebijakan maupun akses ke sumber daya yang lebih baik. Melihat tren ini, ada indikasi bahwa sektor ini berhasil melakukan adaptasi dan ekspansi yang signifikan yang mencerminkan pemulihan ekonomi yang kuat serta meningkatnya daya saing bisnis di pasar lokal.

Tren pertumbuhan yang konsisten selama tiga tahun terakhir menunjukkan bahwa sektor ini memiliki potensi besar untuk terus berkembang di masa depan. Peningkatan kapasitas dan dukungan berkelanjutan dari berbagai pihak dapat memainkan peran penting dalam mempertahankan momentum pertumbuhan yang telah dicapai, sehingga mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi regional.

2.3.1.8. Persentase Koperasi Sehat Kota Makassar

Di Tahun 2023, dari jumlah seluruh koperasi di Kota Makassar yang sebanyak 1.976, terdapat 1.059 atau 53,59% diantaranya yang masih termasuk dalam kategori koperasi aktif. Berdasarkan data selama sepuluh tahun terakhir, dari tahun 2013 hingga 2023, persentase koperasi sehat di Kota Makassar menunjukkan tren yang positif meskipun dengan peningkatan yang relatif kecil setiap tahunnya. Pada tahun 2013, persentase koperasi sehat tercatat sebesar 4,78%, dengan jumlah koperasi sehat sebanyak 38 koperasi dari total 795 koperasi aktif yang ada. Persentase ini terus mengalami kenaikan hingga mencapai 15,05% pada tahun 2018. Namun, pada tahun 2019 dan 2020, persentase koperasi sehat mengalami penurunan yang cukup signifikan, masing-masing menjadi 9,82% di tahun 2019 dan 11,66% di tahun 2020, yang disebabkan oleh dampak pandemi Covid-19. Banyak unit usaha koperasi yang terpaksa tidak dapat beroperasi atau bahkan tutup sementara akibat pembatasan kegiatan ekonomi. Memasuki tahun 2021, seiring dengan upaya pemerintah dalam mempercepat pemulihan ekonomi, persentase koperasi sehat mulai meningkat kembali menjadi 15,39%, dan terus mengalami kenaikan hingga mencapai 22,31% pada tahun 2023.

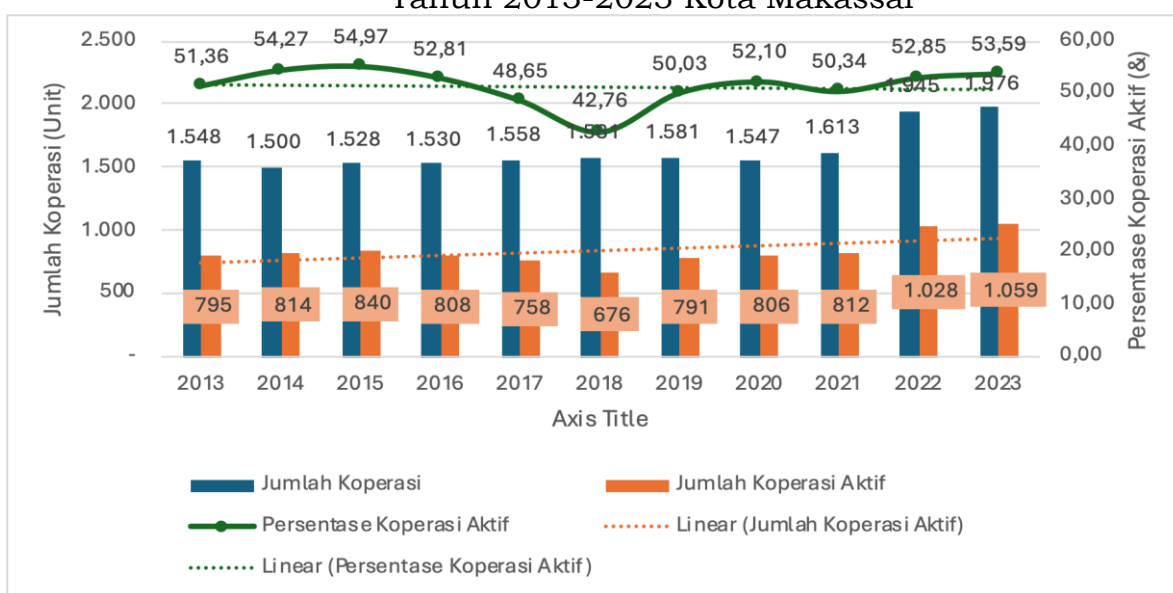
Grafik 2.101
 Persentase Jumlah Koperasi Sehat Tahun 2013-2023
 Kota Makassar



Sumber: Dinas Koperasi Kota Makassar, Tahun 2024

Secara umum, jika dilihat berdasarkan variasi dari jumlah koperasi aktif dalam kurun 2013-2023, jumlah koperasi aktif di Kota Makassar cenderung menunjukkan tren peningkatan yang moderat. Namun demikian, tren yang ditunjukkan dari sisi angka persentase belum dapat menunjukkan pola yang sama. Dalam kurun 2013-2023, tren linear yang diperlihatkan pada angka persentase koperasi aktif di Kota Makassar masih cenderung memperlihatkan terjadinya penurunan. Hal ini dapat disebabkan oleh menurunnya angka jumlah koperasi aktif secara eksplisit sehingga proporsinya terhadap total jumlah koperasi menjadi semakin kecil, ataupun disebabkan oleh rata-rata peningkatan jumlah koperasi baru yang cenderung lebih besar dibandingkan dengan penambahan jumlah koperasi aktif. Hal ini dapat menjadi salah satu indikasi terkait dengan adanya potensi koperasi yang belum mampu menyelenggarakan RAT dari sejak awal kali terbentuk hingga memasuki tahun ketiga pasca pembentukannya.

Grafik 2.102
 Perkembangan Jumlah Koperasi dan Koperasi Aktif
 Tahun 2013-2023 Kota Makassar

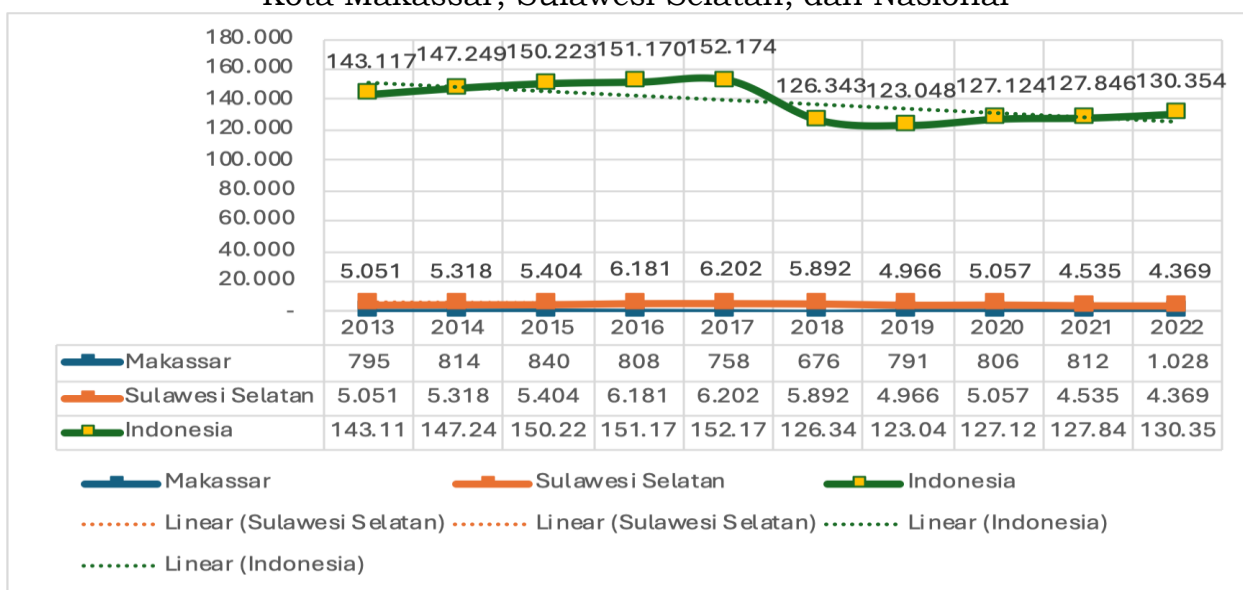


Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2024

Sementara itu, jika dibandingkan dengan Kabupaten Mamminasata, jumlah koperasi aktif di Kota Makassar relative lebih banyak jika dibandingkan dengan Gowa, Takalar, Maros, dan Pangkep. Dalam kurun 2013-2021, angka jumlah koperasi aktif di Kota Makassar cenderung berada di kisaran 700 hingga 800, dan memasuki dua tahun terakhir (2022 – 2023), jumlah koperasi aktif di Kota Makassar telah melampaui 1.000. Angka tersebut relatif lebih besar jika dibandingkan dengan angka koperasi aktif yang berada di Gowa dengan kisaran 500, serta Maros, Takalar, dan Pangkep yang cenderung masih berada di bawah angka 400. Tingginya jumlah koperasi aktif di Kota Makassar dibandingkan dengan kabupaten lainnya disebabkan oleh tingkat kesadaran masyarakat yang tinggi akan pentingnya koperasi sebagai wadah untuk saling membantu mencapai tingkat kesejahteraan secara bersama-sama dengan anggota koperasi.

Peningkatan jumlah koperasi aktif mengindikasikan bahwa geliat koperasi di Kota Makassar relative lebih hidup jika dibandingkan dengan kabupaten/kota sekitar. Tingginya angka jumlah koperasi aktif di Kota Makassar relatif terhadap wilayah sekitar juga menunjukkan bahwa koperasi masih cenderung menjadi pilihan bagi pelaku usaha UMKM, serta kelompok masyarakat sekitar untuk memajukan perekonomian mereka. Hal ini juga menandakan bahwa status Kota Makassar yang merupakan salah satu kota metropolitan dan sekaligus ibukota provinsi tidak membuat masyarakatnya lantas meninggalkan koperasi sebagai media bisnis yang berasaskan kekeluargaan anggota. Koperasi masih cenderung menjadi salah satu alternatif oleh masyarakat kota Makassar untuk di samping opsi perbankan dan lembaga pembiayaan non-bank lainnya.

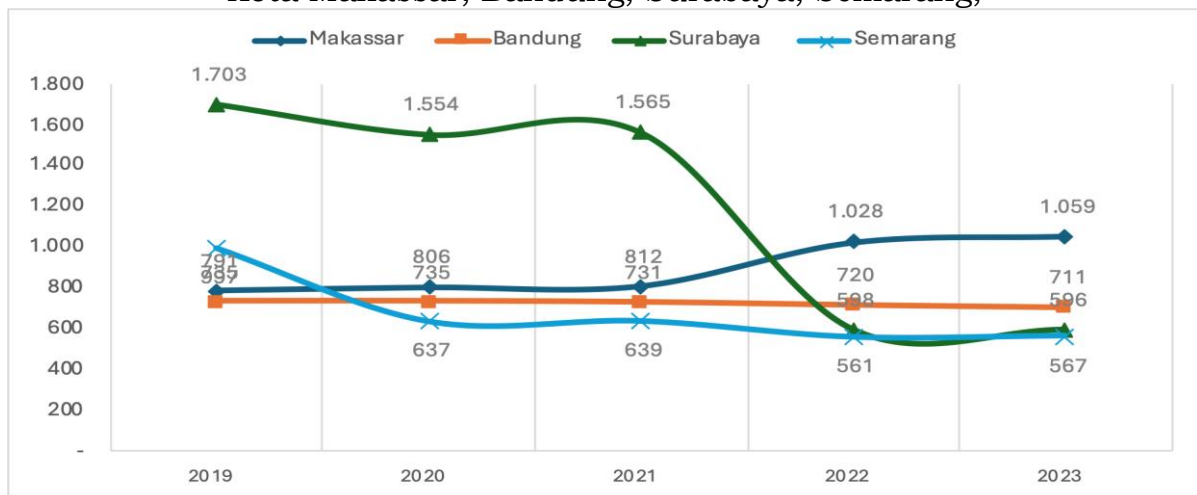
Grafik 2.103
Perkembangan Koperasi Aktif Tahun 2013-2023
Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dan Nasional



Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2024

Perbandingan dengan jumlah koperasi aktif, baik di level provinsi maupun nasional, menunjukkan bahwa tren jumlah koperasi aktif di Kota Makassar masih mampu menunjukkan pola yang positif dalam kurun (2013-2023), di saat tren jumlah koperasi aktif di level provinsi dan nasional justru menunjukkan pola yang negatif. Hal ini menunjukkan adanya geliat pertambahan jumlah koperasi aktif dari tahun ke tahun yang cenderung lebih progresif di Kota Makassar.

Grafik 2.104
Perkembangan Jumlah Koperasi Aktif Tahun 2013-2023
Kota Makassar, Bandung, Surabaya, Semarang,



Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2024

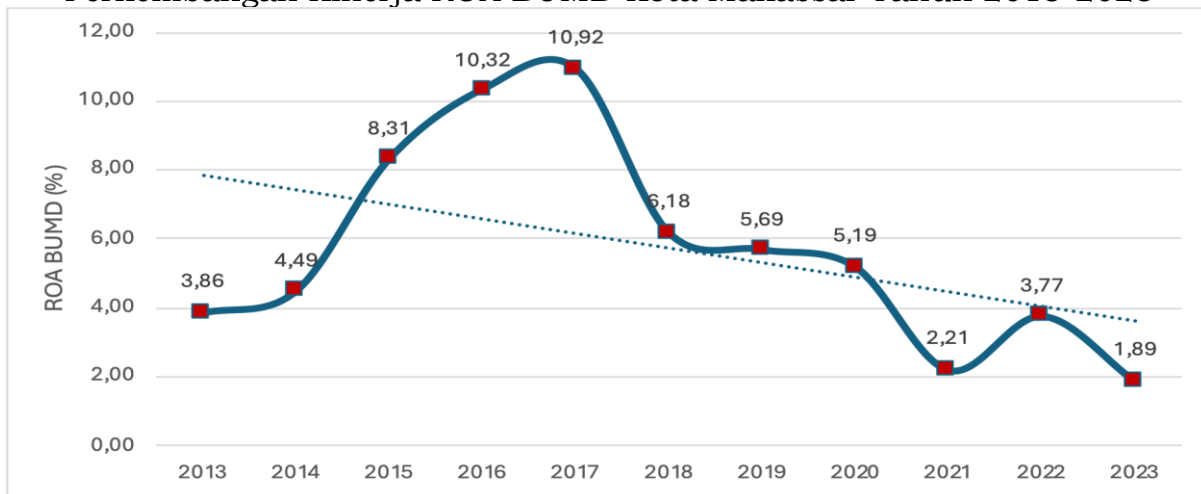
Demikian halnya pula dengan potret perbandingan tren jumlah koperasi aktif dengan ketiga kota besar lainnya di Pulau Jawa, tren yang ditunjukkan oleh Kota Makassar menjadi satu-satunya yang memperlihatkan tren positif dalam kurun lima tahun terakhir (2019-2023). Bahkan, jumlah koperasi aktif di Kota Surabaya cenderung memperlihatkan tren penurunan yang cukup progresif di lima tahun terakhir, lalu disusul oleh Kota Semarang dan Bandung yang juga memperlihatkan tren penurunan secara moderat. Jika dibandingkan dengan Kota Surabaya, jumlah koperasi aktif di Kota Makassar pada Tahun 2019-2020 masih jauh lebih rendah, namun memasuki dua tahun pasca Pandemi Covid-19, jumlah koperasi aktif di Kota Makassar meningkat secara progresif melebihi angka 1.000, di saat tren Kota Surabaya justru memperlihatkan pola yang sebaliknya, yakni menurun dari kisaran 1.500 ke angka 590-an.

Berdasarkan uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa jumlah koperasi aktif di Kota Makassar secara absolut mengalami peningkatan, posisinya melampaui beberapa keempat Kabupaten Mamminasata dan tiga kota setara, namun pertumbuhannya berfluktuasi dan cenderung melambat. Hal ini berarti lembaga koperasi masih mempunyai daya saing yang rendah terhadap lembaga non perbankan lainnya. Beberapa faktor penyebab antara lain adalah kualitas kelembagaan koperasi yang rendah termasuk manajemen unit koperasi, kualitas sumber daya manusia yang relatif rendah, rendahnya keberpihakan stakeholder terhadap keberlangsungan Koperasi dan sistem monitoring kelembagaan koperasi masih bersifat konvensional

2.3.1.9. Return on Assets (ROA) BUMD

Kota Makassar memiliki lima BUMD yang terdiri dari: 1) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Makassar, 2) Perusahaan Daerah (PD) Parkir Makassar Raya, 3) Perusahaan Daerah (PD) Pasar Makassar Raya, 4) Perusahaan Daerah (PD) Bank Perkreditan Rakyat Kota Makassar, dan 5) Perusahaan Daerah (PD) Terminal Makassar Metro. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menilai kinerja dan profitabilitas dari BUMD adalah Return on Asset (ROA). ROA mengukur seberapa besar tingkat pengembalian suatu entitas usaha yang dinyatakan dalam net profit secara relatif terhadap total nilai aset yang dimiliki perusahaan tersebut. Semakin besar nilai ROA mengindikasikan tingkat pengembalian yang dihasilkan oleh aset suatu perusahaan yang semakin besar atau dengan kata lain, pemanfaatan aset perusahaan tersebut menjadi semakin produktif.

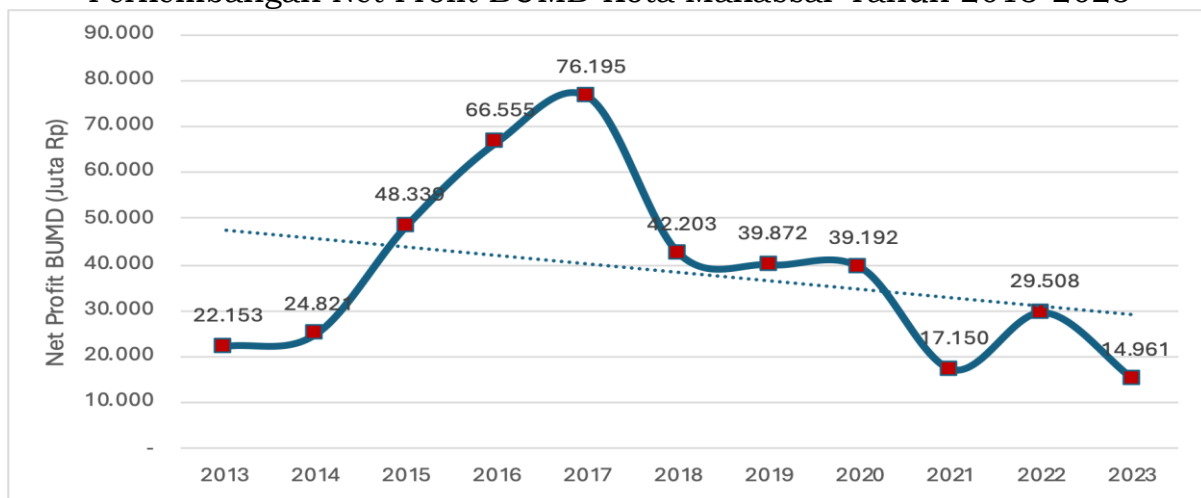
Grafik 2.105
Perkembangan Kinerja ROA BUMD Kota Makassar Tahun 2013-2023



Sumber: Bidang Perekonomian Setda Kota Makassar (data diolah), Tahun 2024

Secara umum, kinerja ROA BUMD Kota Makassar dalam kurun 2013-2023 menunjukkan tren penurunan. Meskipun sempat menunjukkan pola peningkatan yang cukup progresif di periode 2013-2017, namun setelah itu performa ROA BUMD Kota Makassar cenderung menurun setiap tahunnya, mengindikasikan adanya penurunan dari segi produktivitas aset yang dimiliki dalam menghasilkan profit. Memasuki tahun 2023 kemarin, ROA BUMD Kota Makassar tercatat hanya berada di kisaran 1,89%. Dalam tiga tahun terakhir (2021-2023), ROA BUMD Kota Makassar cenderung berada kisaran 2,60%, lebih rendah jika dibandingkan dengan kisaran ROA di tiga tahun sebelumnya (2018-2020) yang konsisten berada di kisaran level 5,20%.

Grafik 2.106
Perkembangan Net Profit BUMD Kota Makassar Tahun 2013-2023



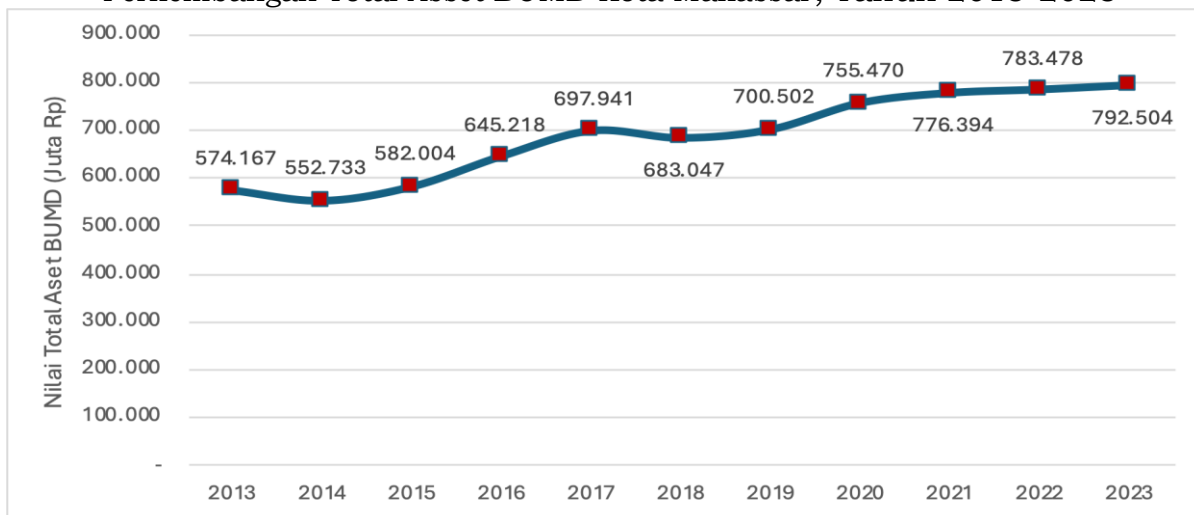
Sumber: Bidang Perekonomian Setda Kota Makassar (data diolah), Tahun 2024

Menurunnya kinerja ROA atau produktivitas BUMD Kota Makassar juga dapat dicerminkan oleh performa laba atau net profit yang dihasilkan dalam kurun 2013-2023. Dalam kurun sebelas tahun terakhir, tren capaian net profit oleh BUMD Kota Makassar mengalami penurunan. Pada periode 2013-2017, realisasi net profit oleh BUMD Kota Makassar sempat menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan dan berada di kisaran rata-rata Rp.47,61 Miliar, sebelum mencatatkan capaian tertinggi di level Rp.76,19 Miliar pada tahun 2017. Namun, setelah tahun 2017, kinerja net profit yang berhasil direalisasikan oleh BUMD Kota Makassar cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya. Di periode 2018-2020, rata-rata capaian laba

BUMD ...

BUMD Kota Makassar menurun menjadi Rp.42,09 Miliar dan pada tiga tahun terakhir (2021-2023) hanya berada pada kisaran Rp.20,54 Miliar.

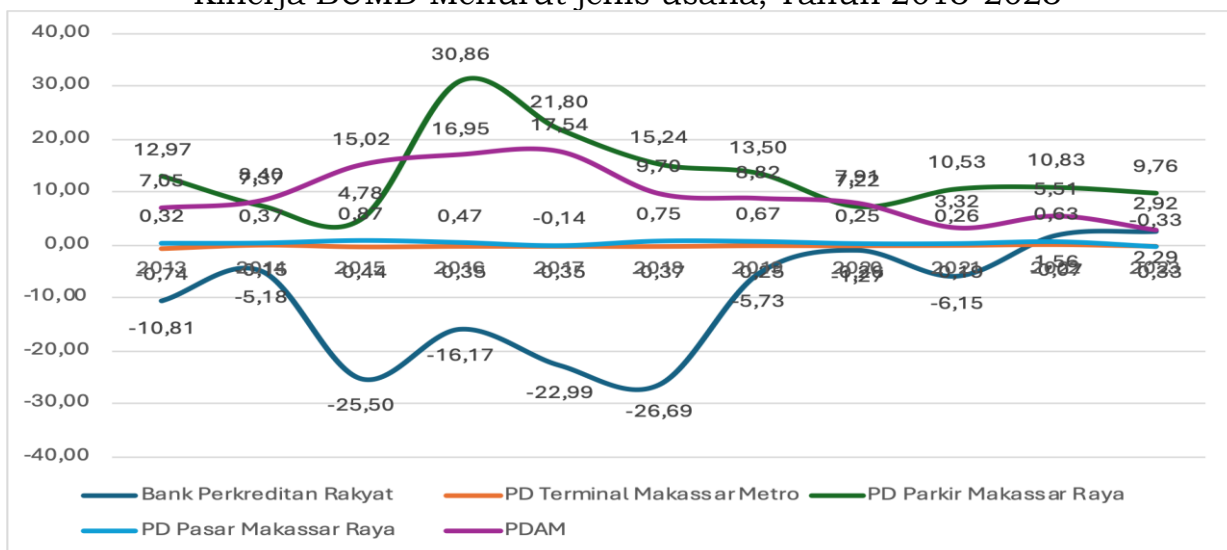
Grafik 2.107
Perkembangan Total Asset BUMD Kota Makassar, Tahun 2013-2023



Sumber: Bagian Perekonomian, Setda Kota Makassar (data diolah), Tahun 2024

Tren kinerja net profit yang mengalami penurunan cenderung tidak sejalan dengan tren yang ditunjukkan pada nilai total aset BUMD. Tren yang ditunjukkan oleh kinerja laba dalam kurun 2013-2023 cenderung kontraproduktif dengan realisasi nilai total aset BUMD yang cenderung menunjukkan tren peningkatan dalam periode yang sama. Dalam lima tahun terakhir (2019-2023), nilai rata-rata total aset BUMD Kota Makassar berada di kisaran Rp.761,67 Miliar. Nilai tersebut telah mengalami peningkatan yang cukup signifikan setelah pada lima tahun sebelumnya hanya cenderung berada di kisaran Rp.600 Miliar. Hal ini memberikan suatu gambaran bahwa peningkatan aset yang dimiliki oleh BUMD belum sepenuhnya dapat dioptimalkan dengan baik dalam menciptakan nilai tambah bagi perusahaan. Hal ini juga mengindikasikan bahwa terdapat pertambahan total aset yang bersifat tidak produktif.

Grafik 2.108
Kinerja BUMD Menurut jenis usaha, Tahun 2013-2023



Sumber: Bagian Perekonomian Setda Kota Makassar (data diolah), Tahun 2024

Sementara itu, jika dianalisis berdasarkan kinerja BUMD per unit usaha, dari lima BUMD yang dimiliki Pemerintah Kota Makassar, hanya dua diantaranya yang cenderung memperlihatkan kinerja ROA yang positif, yakni

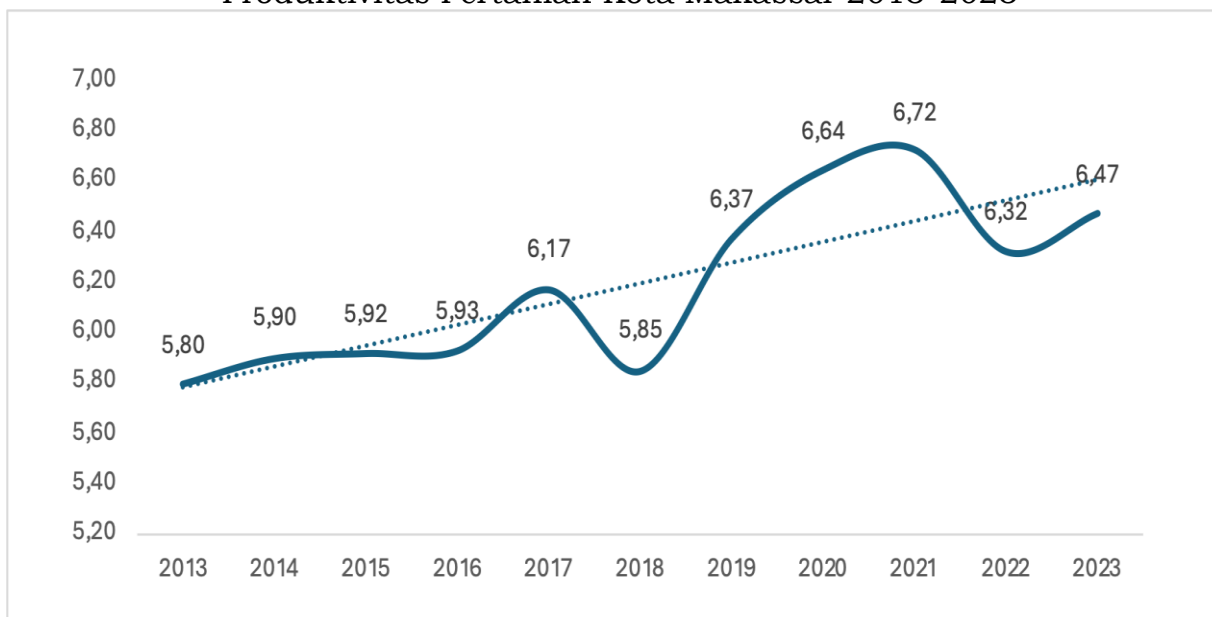
Perusahaan . . .

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan juga PD Parkir Makassar Raya. Sementara itu, dua BUMD lainnya, yakni Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan PD Terminal Makassar Metro masih cenderung memperlihatkan kinerja ROA yang negatif dalam kurun 2013-2023, meskipun BPR baru memperlihatkan capaian ROA positif di dua tahun terakhir. Namun demikian, performa ROA BPR dalam kurun 2013-2018 memperlihatkan capaian negatif yang sangat besar atau berada di bawah -10%. Hal ini mengindikasikan bahwa capaian laba oleh BPR sangat buruk atau cenderung menghasilkan kerugian yang cukup besar, relatif terhadap total asset dalam kurun waktu tersebut. Sementara itu, PD Pasar Makassar Raya masih cenderung memperlihatkan kinerja produktivitas yang cukup rendah, ditandai dengan ROA yang masih berada di bawah 1% selama kurun waktu 2013-2023. Masih belum optimalnya kinerja ROA, khususnya yang ditunjukkan oleh BPR, PD Pasar Makassar Raya, dan PD Terminal Makassar Metro mengindikasikan bahwa ketiga perusahaan tersebut masih sangat tidak produktif. Hal ini membawa implikasi berupa timbulnya kerugian berupa penempatan dana yang menjadi tidak produktif oleh pemerintah kota Makassar.

2.3.1.10. Produktivitas Pertanian

Secara umum, selama kurun waktu 2013-2023, produktivitas pertanian di Kota Makassar menunjukkan tren positif. Meskipun demikian, dalam dua tahun terakhir, produktivitas menurun dengan mencatatkan angka 6,32 di tahun 2022 dan 6,47 di tahun 2023. Penurunan produktivitas dalam dua tahun terakhir ini dipengaruhi oleh cuaca ekstrem. Selain itu di saat bersamaan teknik budidaya pertanian yang tidak berkelanjutan menyebabkan degradasi lahan dan erosi tanah yang menurunkan produksi dan produktivitas pangan.

Grafik 2.109
Produktivitas Pertanian Kota Makassar 2013-2023



Sumber: Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar (data diolah), Tahun 2024

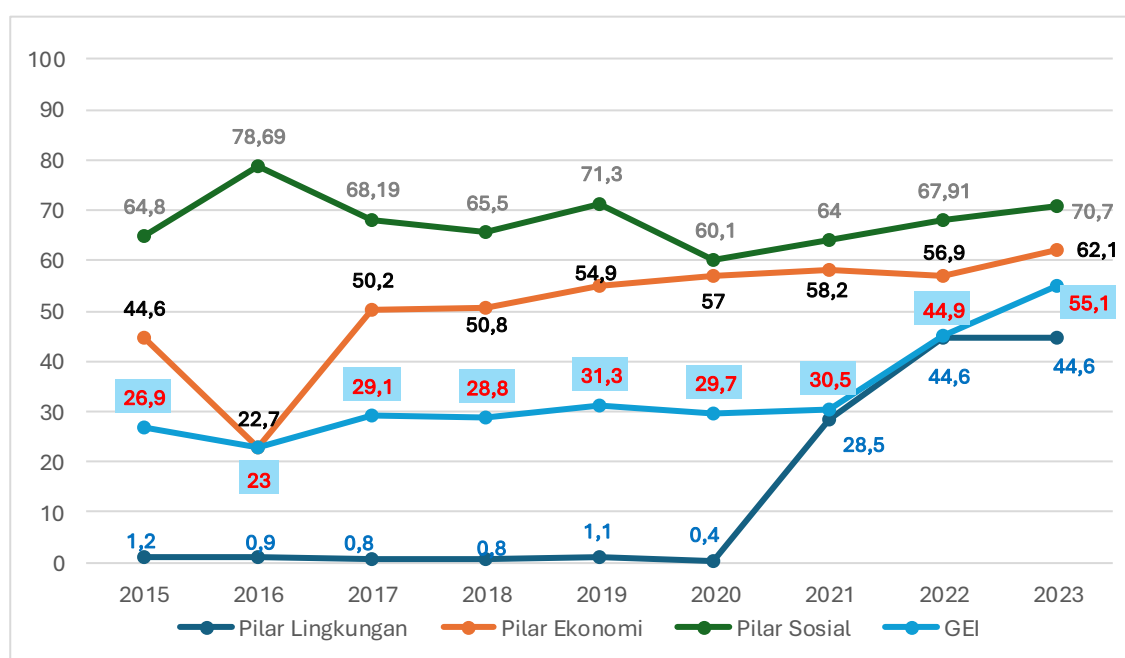
2.3.1.11. Indeks Ekonomi Hijau

Indeks ekonomi hijau/*Green Economy Indeks* merupakan kondisi capaian yang dikontribusi oleh pilar lingkungan, pilar ekonomi dan pilar sosial berskala 0-100 dimana bila semakin mendekati 100 maka indeks semakin baik. Dalam kurun waktu 9 tahun terakhir, efektivitas transformasi ekonomi Kota Makassar menuju ekonomi hijau menunjukkan indikasi membaik dimana capaian indeks ekonomi hijau semakin meningkat dan pada tahun

2023 . . .

2023 berada pada kategori baik tier-1 dengan nilai indeks 55,1. Capaian pilar lingkungan menunjukkan tren membaik, meskipun masih terkendala oleh beban pencemar pada badan air maupun udara, namun pada tahun 2022 dan 2023 meningkat sebesar 616,1 poin dan berada pada kategori sedang tier-2. Capaian pilar ekonomi menghadapi tantangan menurunnya produktivitas tanaman padi dan menurunnya produktivitas perikanan budidaya. Selain itu dari sisi ketenagakerjaan terjadi penurunan produktivitas tenaga kerja khususnya pada sektor jasa, namun dalam 5 tahun terakhir menunjukkan tren meningkat dan berada pada kategori baik tier-1. Sedangkan capaian pilar sosial, masih menghadapi tantangan dengan naiknya tingkat kemiskinan, namun dengan membaiknya angka rata-rata lama sekolah, angka harapan hidup dan menurunnya tingkat pengangguran, capaian pilar sosial semakin membaik dan berada pada kategori baik tier 2 pada tahun 2023.

Grafik 2.110
Indeks Ekonomi Hijau
Kota Makassar Tahun 2015-2023

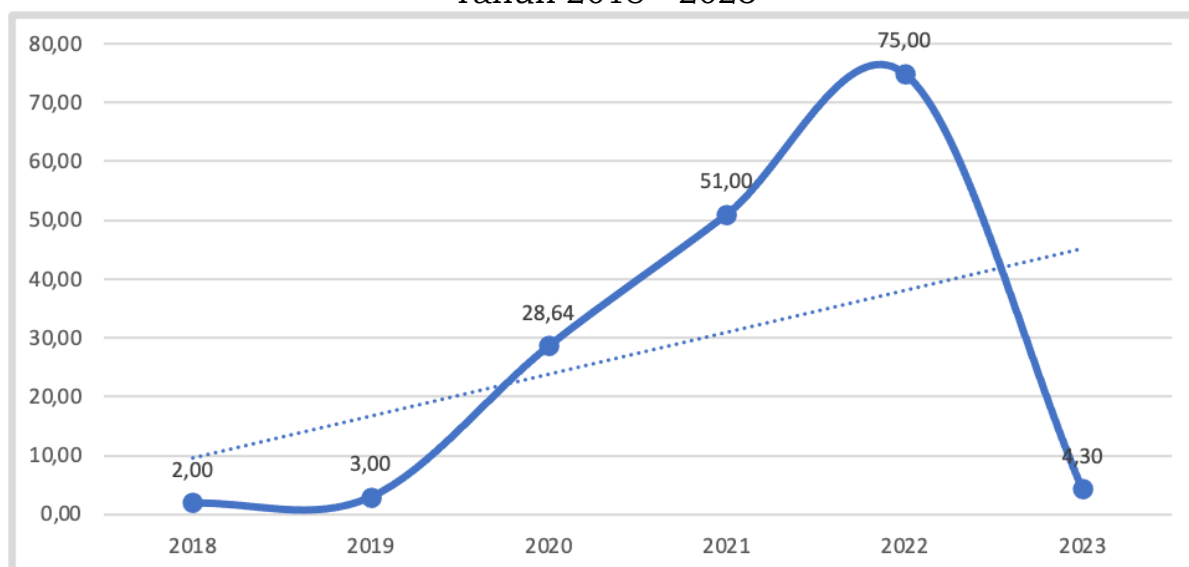


Sumber: Bappeda Kota Makassar (data diolah), Tahun 2024

2.3.1.12. Proporsi Realisasi Penyaluran Pupuk Organik terhadap Pupuk Kimia

Di Kota Makassar, tingkat substitusi penggunaan pupuk organik terhadap pupuk kimia telah mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari Tahun 2018 hingga 2022. Hal ini dapat diperlihatkan oleh tren proporsi penyaluran pupuk organik terhadap pupuk kimia yang cukup progresif peningkatannya dalam periode tersebut. Di Tahun 2018-2019, realisasi penyaluran pupuk organik terhadap pupuk kimia masih berada di kisaran angka 2-3%. Namun, memasuki Tahun 2020, realisasi tersebut mengalami peningkatan hingga 28%, menunjukkan tingkat penggunaan pupuk organik yang sudah mencapai lebih dari seperempat realisasi penyaluran pupuk kimia ke petani. Hal ini terus meningkat hingga tahun 2022, dimana tingkat penyaluran pupuk organik sudah mencapai 75% dari proporsi penyaluran pupuk kimia. Namun demikian, angka penyaluran pupuk organik tercatat mengalami penurunan yang signifikan di tahun 2023, dimana penyaluran pupuk organik hanya mencapai 4,3% dari pupuk kimia.

Grafik 2.111
Proporsi Penyaluran Pupuk Organik terhadap Pupuk Kimia (%)
Tahun 2018 - 2023



Sumber: Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar (data diolah), Tahun 2024

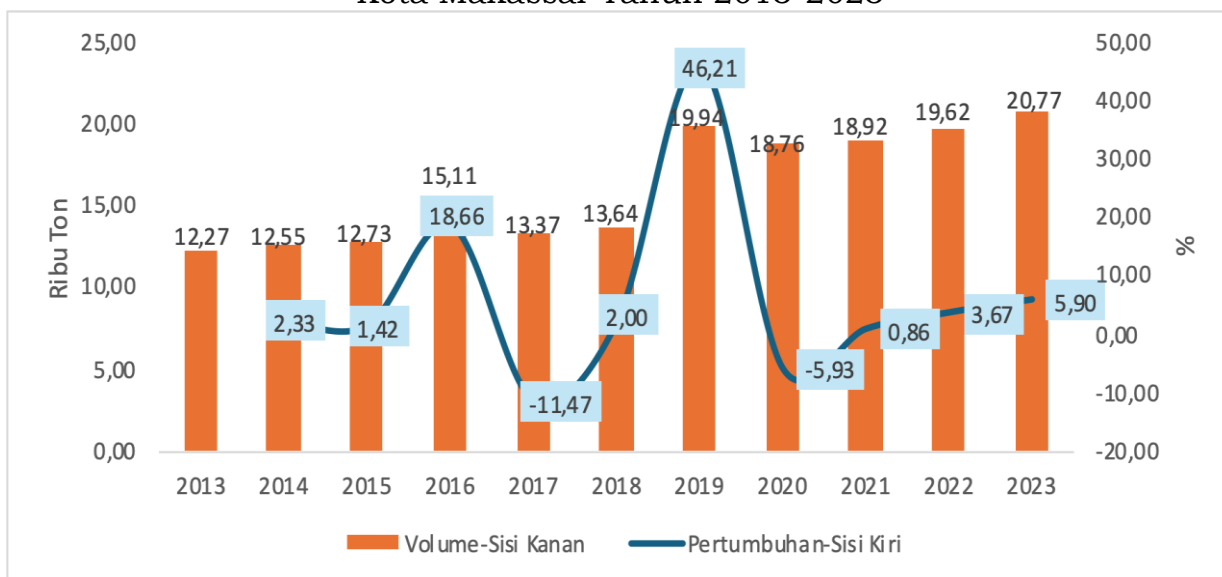
Capaian di tahun 2023 perlu menjadi catatan tersendiri. Hal ini dapat menjadi hambatan bagi transformasi dibidang pertanian yang memperhatikan aspek sustainabilitas dan peningkatan produktivitas pada jangka panjang. Penurunan yang sangat signifikan di tahun 2023 juga menimbulkan tantangan bagi pengimplementasian sustainable farming di Kota Makassar dan sekitarnya, dimana transformasi tersebut sangat diharapkan dapat mencegah kerusakan ekologi pada lahan pertanian dan memberikan peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan.

2.3.1.13. Produktivitas Perikanan Tangkap

Laporan Kementerian PPN/Bappenas menyebutkan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai peringkat pertama dalam pencapaian Indeks Ekonomi Biru pada tahun 2023 dengan nilai 80,86 poin. Angka ini meningkat 2,27 poin dari tahun sebelumnya dan mengalahkan Jawa Timur (71,63), Nusa Tenggara Timur (68,50) dan Sulawesi Utara (67,98). Pencapaian Provinsi Sulawesi Selatan ini utamanya didorong oleh nilai yang sangat tinggi dalam bidang perikanan tangkap dan budidaya perikanan. Hal ini sejalan dengan fakta bahwa Provinsi Sulawesi Selatan merupakan daerah di Indonesia dengan produksi perikanan terbesar.

Salah satu wilayah dengan produksi perikanan tangkap terbesar di Provinsi Sulawesi Selatan yakni Kota Makassar dengan nilai produksi sebesar Rp 613.98 Miliar di tahun 2023 dengan sekitar 3.734 rumah tangga yang menggantungkan mata pencaharian mereka dari sub-sektor tersebut. Selama periode 2013-2023, volume produksi perikanan tangkap di Kota Makassar secara umum menunjukkan tren positif. Pada tahun 2013, volume produksi tercatat sebesar 12,27 ribu ton, terus naik menjadi 19,94 ribu ton di tahun 2019. Kemudian akibat pandemi Covid-19, volume produksi di tahun 2020 turun menjadi 18,76 ribu ton. Penurunan ini disebabkan oleh berhentinya aktivitas nelayan melaut selama beberapa minggu akibat kebijakan pembatasan mobilitas untuk menekan penyebaran virus. Penurunan kasus dan pelanggaran kembali aktivitas melaut membuat volume produksi perikanan di Kota Makassar kembali meningkat di tahun 2021 hingga 2023. Pada tahun 2021, volume produksi tercatat sebesar 18,92 ribu ton, naik menjadi 20,77 ribu ton hingga tahun 2023.

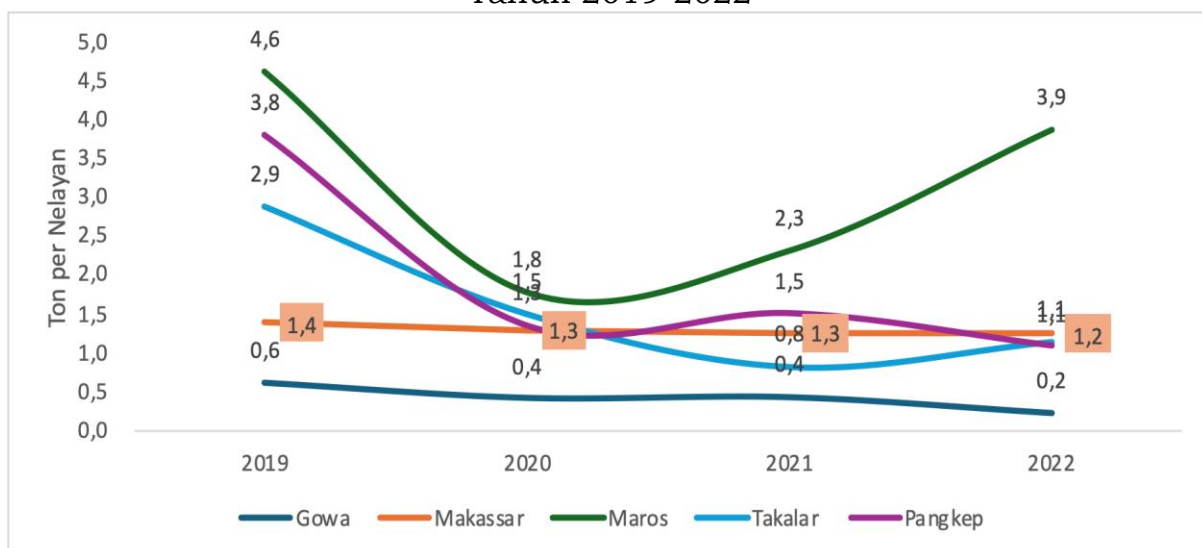
Grafik 2.112
Volume dan Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap Kota Makassar Tahun 2013-2023



Sumber: Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar (data diolah), Tahun 2024

Meskipun demikian, jika dilihat kinerja produksi selama tahun 2013 hingga 2023 mengalami fluktuatif dan cenderung melambat pada periode empat tahun terakhir. Pada tahun 2017, kinerja produksi perikanan tangkap sempat mengalami kontraksi yang cukup dalam dengan mencatatkan angka minus 11,47 %. Kemudian di tahun 2020 juga terjadi kontraksi mencapai minus 5,93 persen, lalu di periode berikutnya kembali tumbuh positif namun mengalami perlambatan. Melambatnya kinerja produksi perikanan tangkap di Kota Makassar sejalan dengan menurunnya produktivitas. Pada tahun 2019, produktivitas perikanan tangkap mencapai 1,4, turun menjadi 1,2 di tahun 2022. Ini berarti pada tahun 2019, setiap 1 nelayan bisa menghasilkan 1,4 ton per tahun, di tahun 2022 menurun menjadi 1,2 ton per tahun. Jika dibandingkan juga dengan daerah sekitar, produktivitas perikanan tangkap Kota Makassar masih tertinggal dari Kabupaten Maros yang mencatatkan angka 3,9 di tahun 2023.

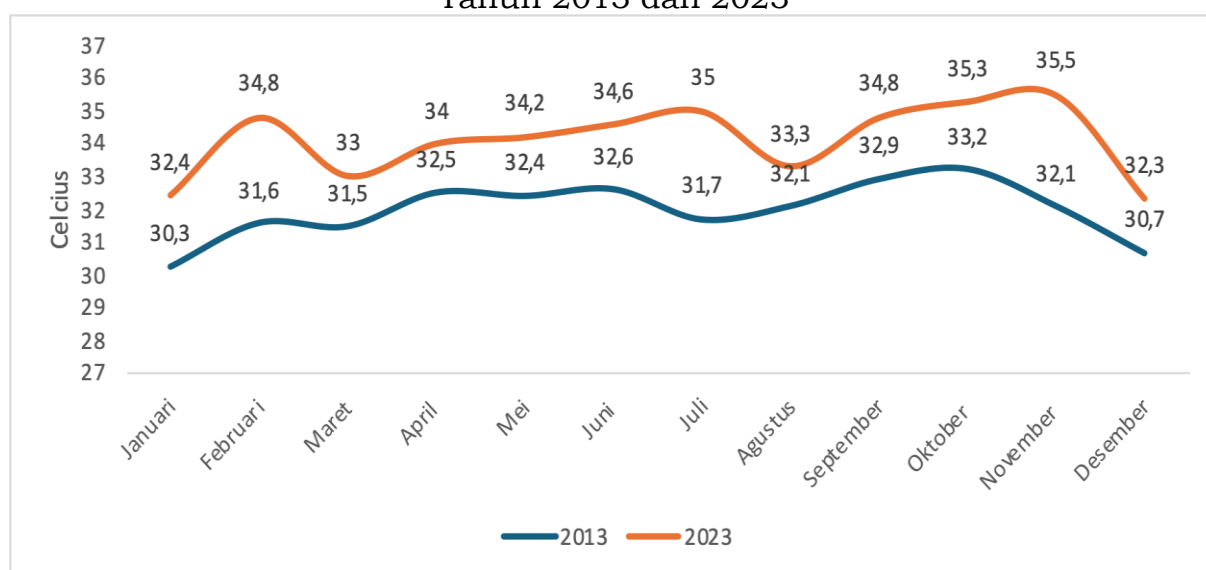
Grafik 2.113
Produktivitas Perikanan Tangkap Kota Makassar dengan Daerah Sekitar, Tahun 2019-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2024

Penurunan produktivitas perikanan tangkap di Kota Makassar utamanya dipengaruhi oleh lokasi tangkapan ikan yang semakin jauh dari pesisir, implikasinya biaya produksi yang tinggi. Migrasi ikan bisa terjadi akibat ekosistem perairan di wilayah pesisir pantai sudah tidak kondusif untuk ikan bertelur dan mencari makan. Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Pertama, penggunaan racun dan bom ikan yang merusak terumbu karang. Kedua, disebabkan oleh perubahan iklim yang menyebabkan ekosistem perairan terpengaruh oleh kenaikan suhu atau temperatur. Data Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Wilayah IV Makassar melaporkan rata-rata suhu maksimum di Kota Makassar pada tahun 2013 tercatat sebesar 31,97 °C, meningkat 6,67% menjadi 34,1 °C di tahun 2023.

Grafik 2.114
Rata-rata Suhu Maksimum per Bulan di Kota Makassar
Tahun 2013 dan 2023

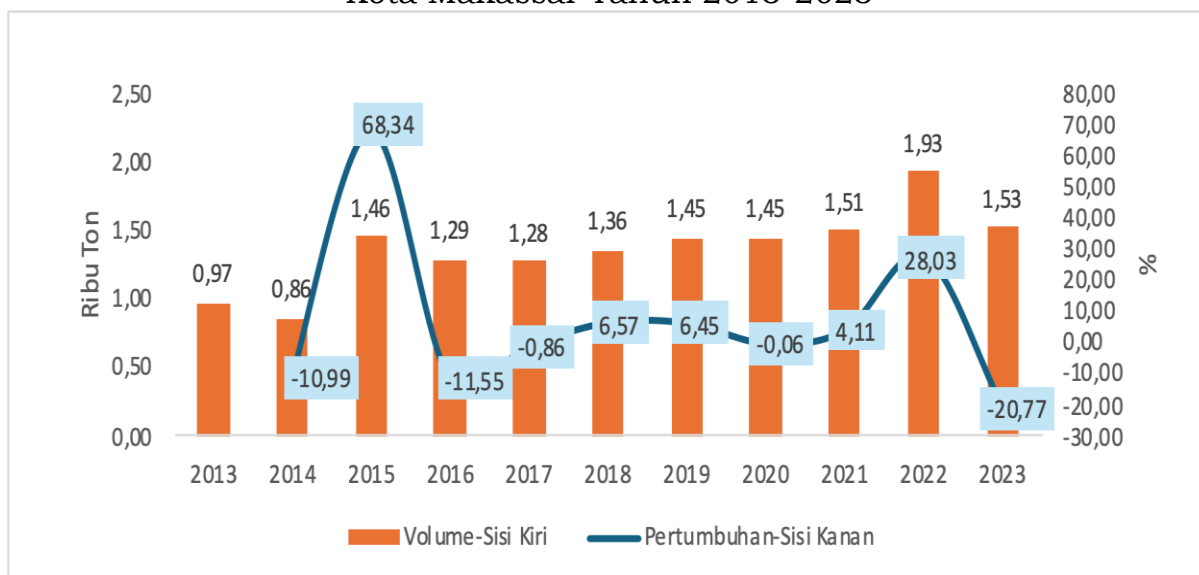


Sumber: Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Wilayah IV Makassar, Tahun 2024

2.3.1.14. Produktivitas Perikanan Budidaya

Pada 2013, produksi perikanan budidaya tercatat 0,97 ribu ton, jumlah itu turun menjadi 0,86 ribu ton di tahun 2014, lalu mengalami peningkatan signifikan menjadi 1,46 ribu ton di tahun 2015. Pada tahun 2016 dan 2017, kembali produksi perikanan budidaya mengalami penurunan, lalu terus meningkat menjadi 1,45 ribu ton pada tahun 2019. Akibat pandemi Covid-19, terjadi perlambatan produksi di tahun 2020 dengan mengalami kontraksi sebesar 0,06%. Pada tahun 2021, produksi perikanan budidaya kembali membaik dengan meningkat sebesar 4,11% menjadi 1,51 ribu ton. Peningkatan ini berlanjut hingga tahun 2022 dengan mencatatkan angka 28,03% atau menjadi 1,93 ribu ton. Kemudian di tahun 2023, volume produksi kembali turun 20,77% menjadi 1,53 ribu ton. Penurunan ini disebabkan oleh dampak *el nino* yang mengakibatkan kekeringan.

Grafik 2.115
Volume dan Pertumbuhan Produksi Perikanan Budidaya
Kota Makassar Tahun 2013-2023



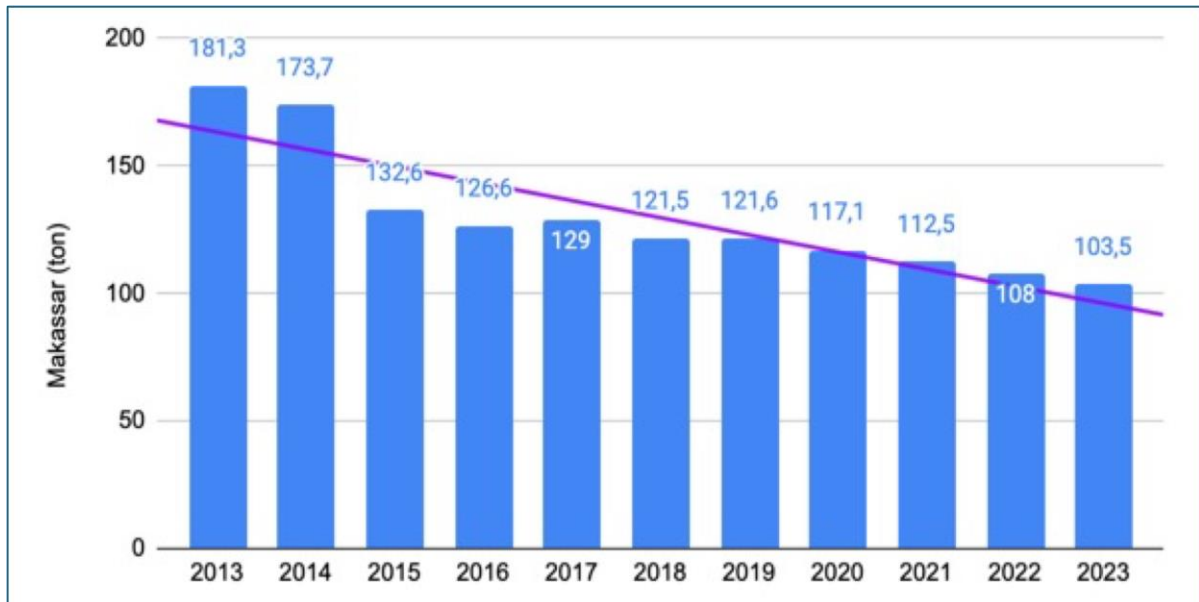
Sumber: Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar (data diolah), Tahun 2024

Perikanan budidaya ini memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan di Kota Makassar, mengingat jumlah populasi atau penduduk yang terus bertambah. Tujuannya untuk peningkatan pasokan ikan dengan cepat dan jangka panjang, menjadi sumber protein hewani yang penting bagi konsumsi masyarakat. Selain itu, ada sekitar 826 rumah tangga yang memiliki mata pencaharian sebagai pembudidaya di Kota Makassar. Namun sub-sektor ini mengalami permasalahan yang cukup serius dalam aspek produktivitas. Berdasarkan data statistik KKP, rata-rata produktivitas perikanan budidaya Kota Makassar selama periode 2019-2022 sebesar 1,79. Artinya, 1 Ha lahan budidaya perikanan hanya menghasilkan produksi sebesar 1,79 ton. Angka ini jauh tertinggal dari Kabupaten Takalar (69,85), Pangkep (29,63) dan Maros (2,63). Rendahnya produktivitas perikanan budidaya Kota Makassar utamanya dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan alam. Musuh utama perikanan budidaya adalah penyakit yang bisa menyerang ikan yang dibudidayakan sehingga membuatnya harus dipanen secara lebih cepat. Selain itu, kualitas perairan di sepanjang pesisir Kota Makassar yang kurang baik. Terlalu banyak aktivitas industri sehingga membuat ikan yang dibudidayakan rentan terkena penyakit.

2.3.1.15. Produktivitas Budidaya Perikanan Tambak

Pengembangan perikanan budidaya seperti tambak diharapkan akan meningkatkan kualitas lingkungan hidup khususnya laut karena dengan semakin tingginya produktivitas perikanan budidaya, maka ketergantungan terhadap usaha perikanan tangkap bisa yang merupakan ancaman utama keanekaragaman hayati bahari dapat dikurangi. Data menunjukkan bahwa secara umum produktivitas budidaya perikanan tambak Kota Makassar mengalami penurunan dalam kurun waktu 11 (sebelas) tahun sejak 2013 sampai 2023. Bahkan di tahun 2015, produktivitas menurun signifikan sebesar 23,7% dari 173,7 ton pada tahun 2014 turun menjadi 132,6 ton. Beberapa faktor yang menjadi penyebab menurunnya hasil budidaya perikanan di antaranya alih fungsi lahan perikanan budidaya menjadi areal perumahan/industri, terjadinya pencemaran dan perubahan cuaca yang ekstrim, serta kualitas SDM di bidang perikanan yang belum optimal.

Grafik 2.116
Produksi dan Budidaya Perikanan Tambak Kota Makassar
Tahun 2013 - 2023

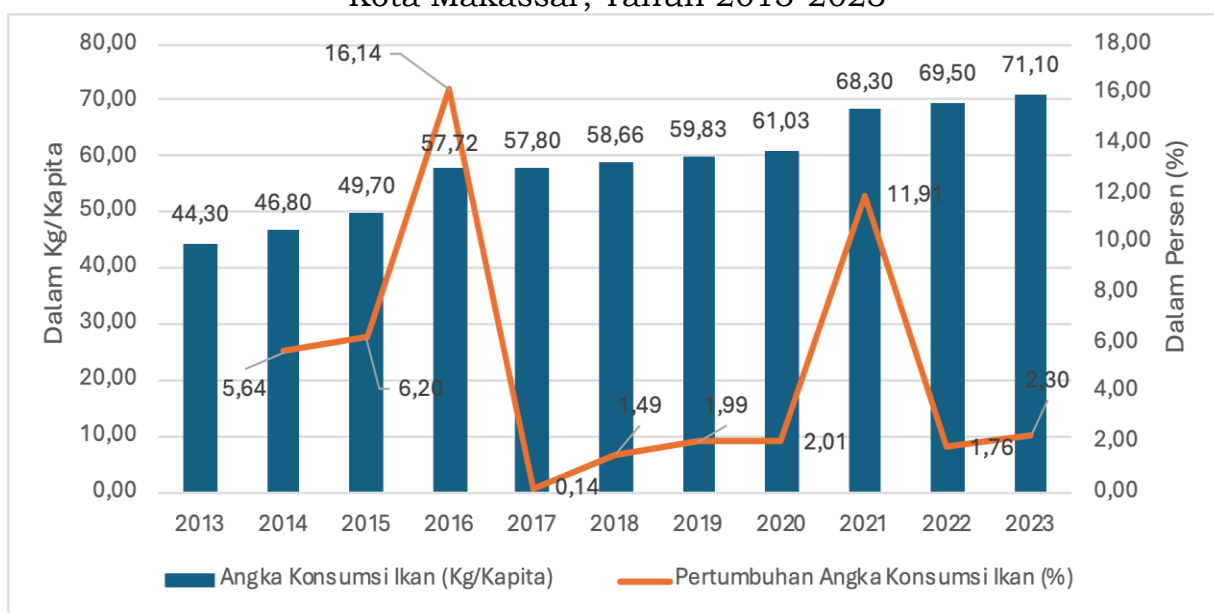


Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah), Tahun 2024

2.3.1.16. Angka Konsumsi Ikan

Secara umum, angka konsumsi ikan (AKI) di Makassar dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir menunjukkan tren yang positif, sebab terjadi peningkatan angka konsumsi ikan hampir di setiap tahunnya. Misalnya, pada tahun 2013 angka konsumsi ikan hanya 44.30 kg/kapita, namun di tahun 2023 indikator ini telah mencapai angka 71.70 kg/kapita. Maksudnya, sepanjang sepuluh tahun terakhir terjadi peningkatan sebesar 27.41 kg/kapita. Peningkatan angka konsumsi ikan didorong dari 2 sisi, yakni permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*). Dari sisi permintaan (*demand*), faktor utama yang mendorong kenaikan angka konsumsi ikan berupa peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengkonsumsi ikan sebagai sumber protein dan gizi melalui program GEMARIKAN (Gerakan Masyarakat Makan Ikan). Selain itu, peningkatan konsumsi ikan disebabkan oleh berkembangnya usaha kecil dan menengah di Kota Makassar seperti rumah makan/restoran, dan berbagai kegiatan-kegiatan sosial lainnya seperti pernikahan. Sementara itu dari sisi penawaran (*supply*), meningkatnya pasokan ikan pada musim tertentu membuat harga ikan relatif lebih murah dibandingkan komoditas lain seperti ayam dan daging. Terlebih lagi, Makassar merupakan daerah pesisir dan termasuk dalam WPP (*Wilayah Pengelolaan Perikanan*) 713 dengan potensi sumber daya alam perikanan yang amat besar dan kaya akan aneka jenis ikan seperti ikan cakalang, pelagis, demersal dan lain-lain. Meskipun angka konsumsi ikan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, pertumbuhan tersebut cenderung rendah dan melambat. Indikator ini hanya bertumbuh pesat dan signifikan pada tahun-tahun tertentu, misalnya pada tahun 2016 bertumbuh mencapai 16,16% atau meningkat sebesar 10,6% dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan yang pesat dan signifikan juga terjadi pada tahun 2021 dengan persentase pertumbuhan mencapai 11.91% atau meningkat sebesar 9,9% dari tahun sebelumnya.

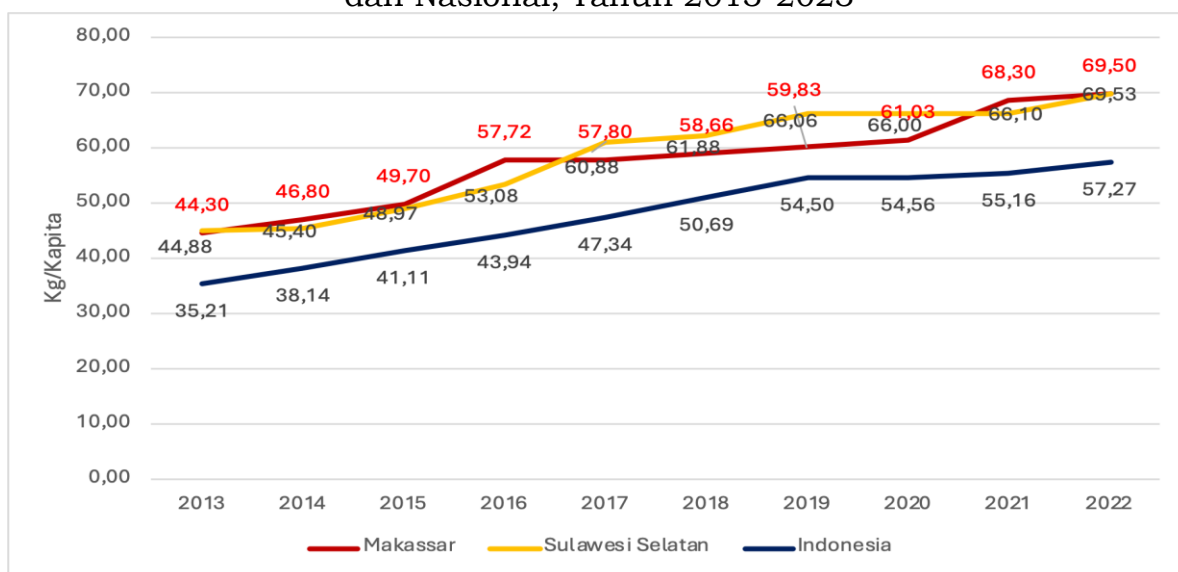
Grafik 2.117
Perkembangan Realisasi dan Pertumbuhan Angka Konsumsi Ikan Kota Makassar, Tahun 2013-2023



Sumber: Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar (data diolah), Tahun 2024

Jika dikomparasi dengan rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan dan Indonesia, posisi angka konsumsi ikan di Makassar dapat dikatakan unggul, walaupun perolehannya tidak jauh berbeda dengan Sulawesi Selatan. Angka konsumsi ikan di Makassar, mampu melampaui rata-rata nasional dengan beberapa faktor baik dari sosial-ekonomi maupun budaya. Tingginya konsumsi ikan di Kota Makassar identik dengan karakteristik suku bugis yang lebih suka ikan daripada ayam atau daging. Suku bugis erat kaitannya dengan wilayah pesisir sebab mereka merupakan kelompok pelaut ulung. Faktor lain yang juga cukup berpengaruh seperti gaya hidup, pendidikan, bahkan unsur *prestise* (kekayaan/kehormatan) sangat menonjol terhadap angka konsumsi ikan.

Grafik 2.118
Perkembangan Angka Konsumsi Ikan di Makassar, Sulawesi Selatan dan Nasional, Tahun 2013-2023



Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) (data diolah), Tahun 2024

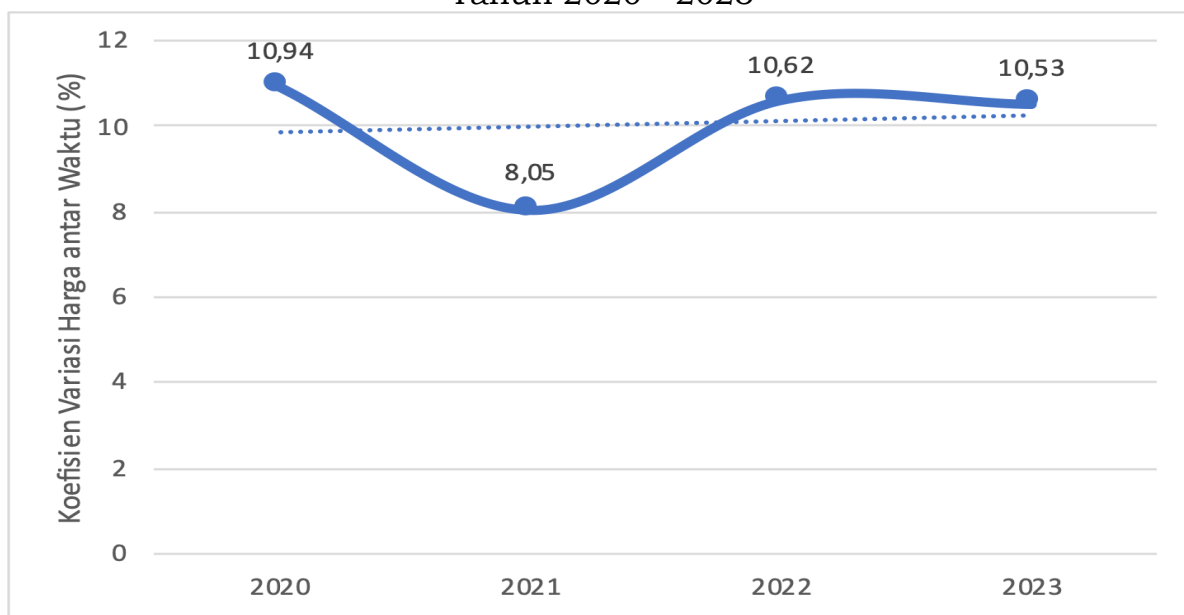
Secara umum dapat disimpulkan bahwa konsumsi ikan di Kota Makassar mengalami peningkatan akan tetapi percepatan pertumbuhannya berfluktuasi dan . . .

dan mengalami penurunan dalam dua tahun terakhir. Fenomena tersebut akan menjadi tantangan ke depan. Terlebih lagi, saat ini variabilitas dari perubahan iklim seperti kenaikan suhu, curah hujan yang tidak menentu, dan faktor lain berpengaruh sangat signifikan terhadap produksi perikanan. Lebih lanjut, kerusakan lingkungan juga menyulitkan nelayan untuk mencari komoditas ikan dengan kualitas yang baik. Oleh karena itu, dampak dari perubahan iklim dan kerusakan lingkungan akan mengganggu kualitas dan kuantitas komoditas ikan. Hal ini akan mengganggu pasokan (*supply*) ikan, yang berujung pada harga komoditas yang mahal dan distribusi yang tidak merata. Sehingga meskipun pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang mengkonsumsi ikan membaik dan meningkatkan permintaan (*demand*), pasokan ikan tidak mampu memenuhi permintaan masyarakat/rumah tangga.

2.3.1.17. Persentase Koefisien Variasi Harga antar Waktu Barang Kebutuhan Pokok

Berdasarkan data harga pangan yang dirilis oleh Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS), secara umum koefisien variasi harga antar waktu Kota Makassar dalam kurun empat tahun terakhir (2020-2023) menunjukkan tren peningkatan, walaupun tingkat yang masih moderat. Hal ini mengindikasikan kecenderungan terjadinya peningkatan gejolak harga pangan dari tiap tahunnya dalam kurun 2020-2023. Koefisien variasi harga antar waktu yang paling tinggi tercatat pada Tahun 2020 dengan nilai 10,94%.

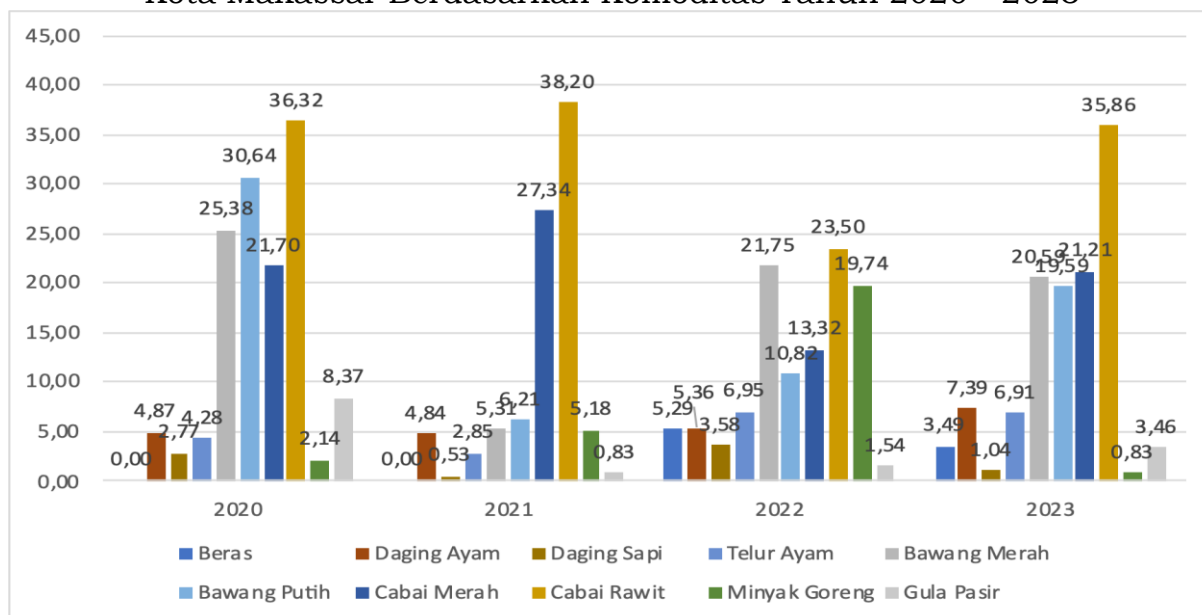
Grafik 2.119
Koefisien Harga Antar Waktu pada 10 Komoditas
Tahun 2020 - 2023



Sumber: Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (data diolah), Tahun 2024

Hal ini mengindikasikan bahwa terjadi gejolak harga yang cukup signifikan di masa Pandemi Covid-19. Meskipun di tahun berikutnya (2021) koefisien variasi harga antar waktu sempat menurun pada level 8,05%, di dua tahun berikutnya nilai koefisien selalu mencatatkan di atas angka 10%, dan berada di kisaran 10,5 – 10,6%.

Grafik 2.120
Tren Koefisien Variasi Harga Antar Waktu
Kota Makassar Berdasarkan Komoditas Tahun 2020 - 2023



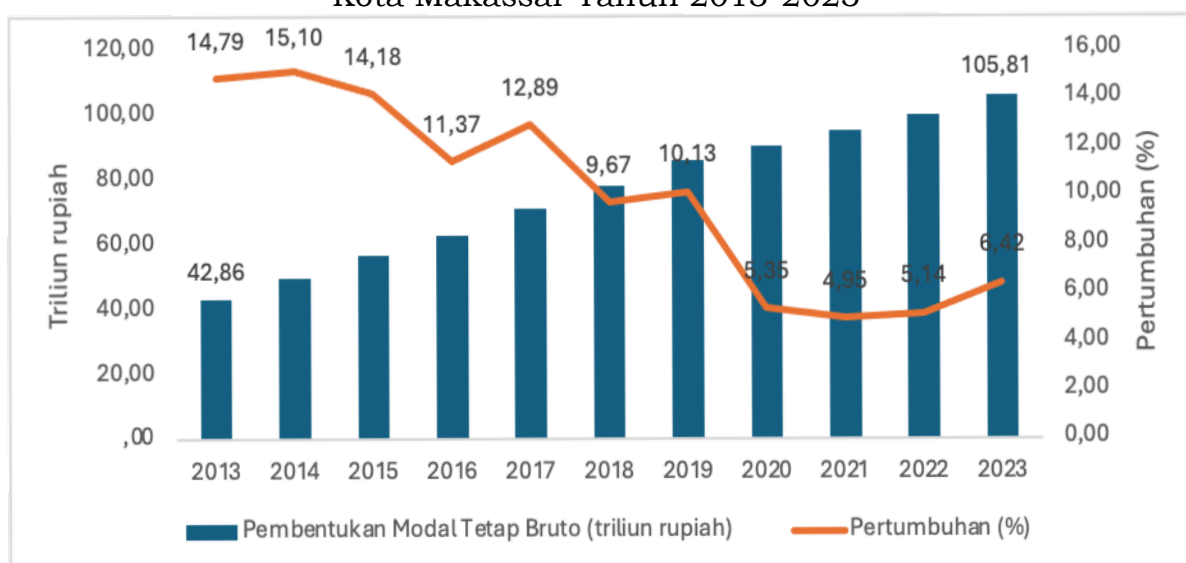
Sumber: Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (data diolah), Tahun 2024

Sementara itu, jika dianalisis berdasarkan komoditasnya, penyumbang porsi terbesar pada nilai koefisien variasi harga antar waktu Kota Makassar selama empat tahun terakhir diberikan oleh cabai rawit. Dalam kurun 2020-2023, cabai rawit konsisten menjadi komoditas dengan nilai koefisien variasi harga antar waktu yang terbesar, dan berada di kisaran 35% keatas, meskipun di tahun 2022 sempat menurun ke level 23,50%. Komoditas lainnya yang cenderung memiliki nilai koefisien variasi harga antar waktu yang cukup besar dari tahun ke tahun adalah cabai merah, bawang merah, dan bawang putih. Tren koefisien variasi harga antar waktu Kota Makassar berdasarkan komoditas cenderung memberikan suatu gambaran bahwa komoditas cabai rawit, bawang merah, bawang putih, dan cabai merah merupakan komoditas-komoditas yang sering mengalami fluktuasi harga di Kota Makassar dari tahun ke tahun.

2.3.1.18. Pembentukan Modal Tetap Bruto

BPS mencatat bahwa nilai pembentukan modal tetap Bruto (PMTB) selama 11 tahun terakhir mengalami peningkatan secara absolut dari Rp 42,86 triliun menjadi Rp 105,81 triliun atau meningkat diatas dari 2 kali lipat dari tahun 2013. Peningkatan aktivitas investasi didorong oleh beberapa faktor antara lain ketersediaan infrastruktur, kebijakan penciptaan iklim investasi, daya beli masyarakat, dan beberapa faktor lain.

Grafik 2.121
Perkembangan Nilai dan Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto
Kota Makassar Tahun 2013-2023



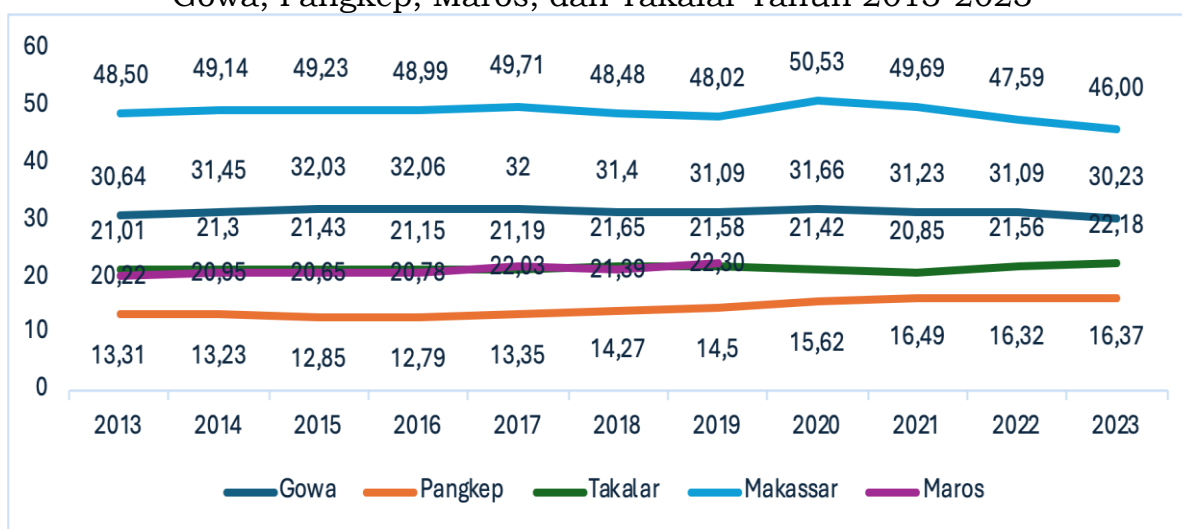
Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah), Tahun 2024

Meskipun secara absolut mengalami peningkatan nilai, namun percepatan peningkatan setiap tahun sangat tidak stabil dan bahkan mengalami perlambatan cukup drastis mulai tahun 2020 dengan angka satu digit dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selama periode 2013-2023, pertumbuhan PMTB terendah terjadi di tahun 2020 sebagai dampak buruk dari Pandemi Covid-19. Namun pada tiga tahun berikutnya, pertumbuhan PMTB secara perlahan-lahan mengalami peningkatan hingga mencapai 6,42% di tahun 2023, meskipun angka tersebut masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan capaian pada 11 tahun sebelumnya. Adanya percepatan pertumbuhan PMTB pada tiga tahun terakhir menunjukkan tingkat kepercayaan para investor yang semakin baik dan juga daya beli masyarakat yang mengalami peningkatan.

Salah satu indikator daya saing daerah adalah meningkatnya proporsi PMTB terhadap PDRB. BPS mencatat bahwa proporsi PMTB selama 11 tahun mengalami perlambatan terutama pada tiga tahun terakhir. Adanya penurunan proporsi PMTB terhadap PDRB Kota Makassar pada tiga tahun terakhir terutama dikontribusi oleh peningkatan permintaan dari sektor rumah tangga dan organisasi non profit, dan pengeluaran pemerintah sehingga peran sektor swasta sedikit mengalami tekanan. Meskipun demikian, proporsi PMTB terhadap PDRB tergolong tinggi yaitu rata-rata 48,76% per tahun. Angka tersebut menempati urutan kedua tertinggi setelah pengeluaran sektor rumah tangga. Kondisi tersebut merupakan peluang untuk meningkatkan daya saing Kota Makassar.

Jika dibandingkan dengan kabupaten lain di sekitar Kawasan Makassar, proporsi PMTB terhadap PDRB Kota Makassar menempati urutan tertinggi dibandingkan dengan Kabupaten Pangkep, Gowa, Maros, dan Takalar. Ketersediaan infrastruktur yang tersedia di Kota Makassar merupakan faktor utama mendorong sektor swasta lebih tertarik untuk melakukan pembentukan modal pada bisnis yang dilakoninya di Kota Makassar dibandingkan dengan kabupaten lainnya di Kawasan Mamminasata. Proporsi PMTB Kota Makassar rata-rata 48,72% lebih tinggi dari 31,35% untuk Gowa, 14,46% untuk Pangkep, dan 21,39% untuk Takalar.

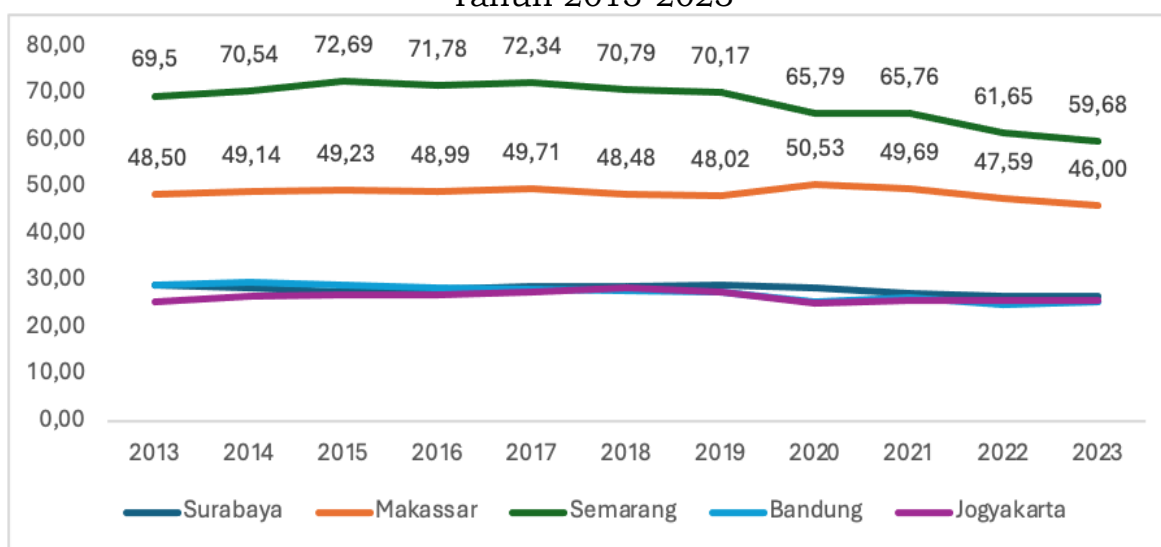
Grafik 2.122
Perbandingan Proporsi Pembentukan Modal Tetap Bruto Kota Makassar, Gowa, Pangkep, Maros, dan Takalar Tahun 2013-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah), Tahun 2024

Demikian halnya dengan perbandingan beberapa kota yang setara di Indonesia. Sumbangan investasi terhadap PDRB di Kota Makassar hampir dua kali lipat dari Kota Surabaya, Bandung, dan Yogyakarta. Artinya bahwa permintaan kegiatan investasi di Kota Makassar lebih tinggi daripada ketiga kota tersebut, namun lebih rendah dari Kota Semarang.

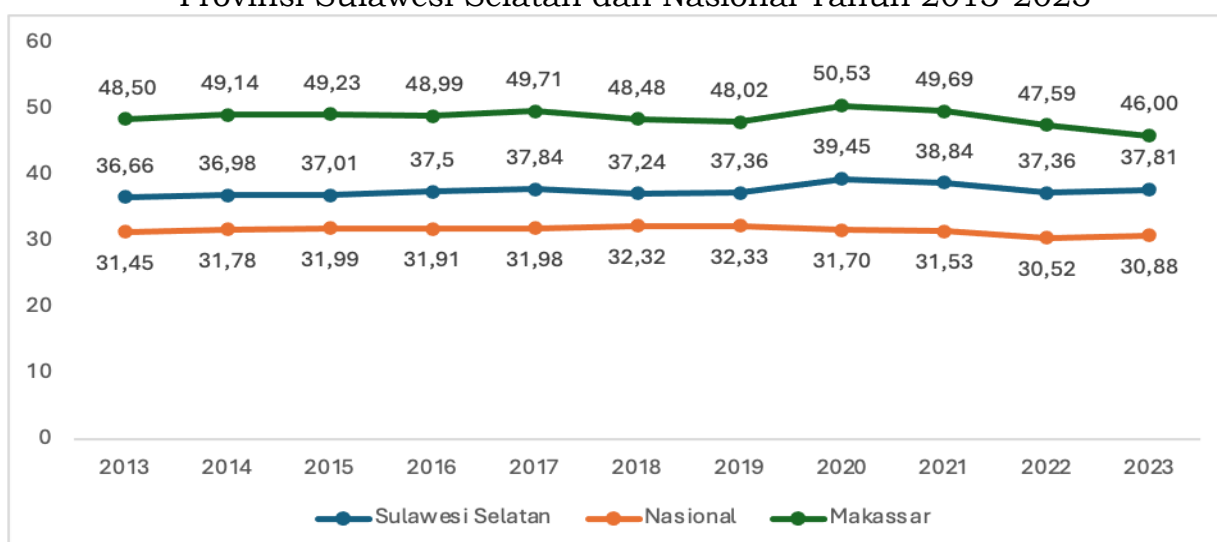
Grafik 2.123
Perbandingan Proporsi Pembentukan Modal Tetap Bruto Kota Makassar, Kota Surabaya, Kota Semarang, Kota Bandung dan Kota Yogyakarta Tahun 2013-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah), Tahun 2024

Peran sektor swasta terhadap permintaan barang dan jasa yang dihasilkan untuk kepentingan investasi tidak hanya unggul dari kabupaten Kawasan Mamminasata, namun posisinya diatas dari rata-rata Sulawesi Selatan dan Nasional sebagaimana nampak pada grafik di atas. Hal ini menandakan bahwa minat investor untuk menggunakan kembali barang dan jasa yang dihasilkan cukup tinggi di Kota Makassar terutama didorong oleh daya beli masyarakat Kota Makassar lebih tinggi dari daya beli masyarakat di beberapa kabupaten lainnya di Sulawesi Selatan.

Grafik 2.124
Perbandingan Proporsi Pembentukan Modal Tetap Bruto Kota Makassar,
Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2013-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah), Tahun 2024

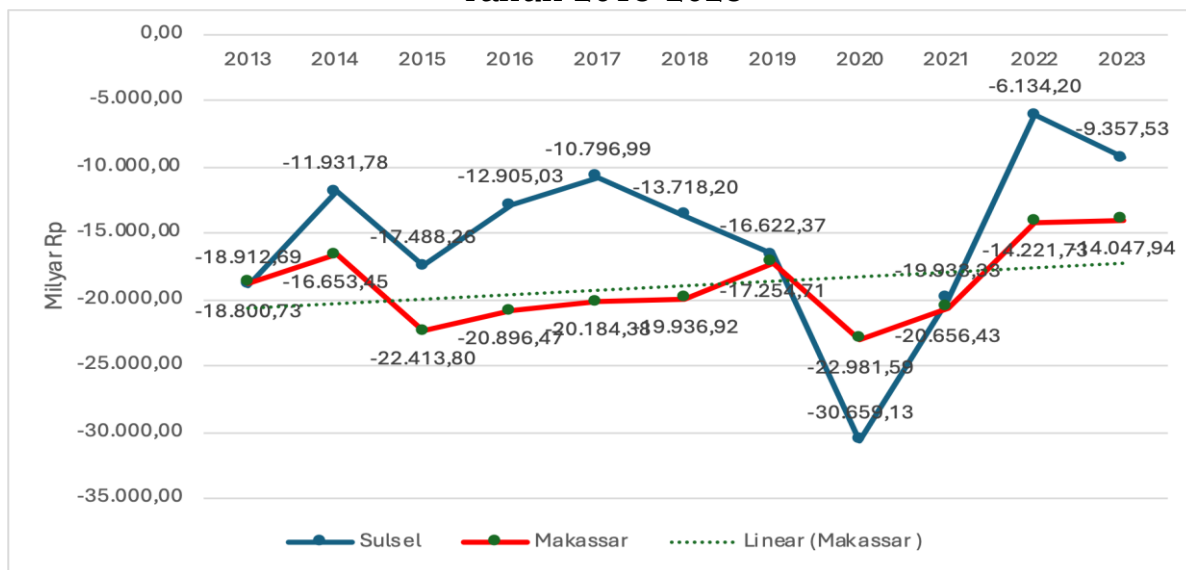
Secara umum dapat disimpulkan bahwa proporsi PMTB terhadap PDRB Kota Makassar selama 11 tahun terakhir cukup besar, menempati posisi di atas dari rata-rata Kabupaten di Kawasan Mamminasata, di atas dari rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan, di atas dari rata-rata Nasional dan beberapa kota yang setara, namun kontribusinya dalam beberapa tahun terakhir tampaknya mengalami penurunan sehingga berdampak terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi. Penurunan kontribusi PMTB terhadap PDRB disebabkan oleh antara lain: (i) perlambatan pembentukan modal bagi dunia usaha. (ii) Produksi barang dan jasa yang dihasilkan dalam perekonomian sebagian besar digunakan oleh sektor rumah tangga untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga, (iii) pelaku sektor luar negeri juga cenderung mengalami peningkatan penggunaan barang dan jasa dalam perekonomian. Hal ini mengindikasikan bahwa kegiatan pembentukan modal yang terjadi belum sepenuhnya efektif meningkatkan percepatan perputaran ekonomi sehingga masih memerlukan arah kebijakan yang terkait pada penciptaan iklim investasi yang kondusif.

2.3.1.19. Net Ekspor Barang dan Jasa

Data menunjukkan bahwa nilai net ekspor di Kota Makassar negative, perkembangan net ekspor di Kota Makassar berfluktuatif selama tahun 2013-2023 dan secara umum mengalami trend yang meningkat. Hal ini disebabkan nilai impor yang lebih tinggi dibandingkan dengan nilai ekspornya. Nilai net ekspor kota makassar tahun 2013 sebesar (-18.800,73) milyar rupiah, namun mengalami penurunan di tahun 2014 sebesar 11,42%. Tahun 2015 nilai net ekspor kembali meningkat sebesar 34,59% dari tahun sebelumnya yakni sebesar (-22.413,80) milyar rupiah. Hal ini dipicu oleh peningkatan kebutuhan bahan baku dan barang modal dalam rangka peningkatan aktivitas industri di Kota Makassar. Selanjutnya nilai net ekspor Kota Makassar mengalami penurunan hingga tahun 2019 sebesar (-17.254,71) milyar rupiah. Namun tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 33,19% yakni sebesar (-22.981,59). Hal ini disebabkan karena adanya pandemic covid-19 yang menyebabkan meningkatnya impor terutama konsumsi kebutuhan pokok karena ketidakstabilan produksi dan distribusi barang, sehingga lebih mengandalkan impor juga meningkatnya permintaan terhadap produk kesehatan seperti masker, APD dan peralatan medis lainnya. Nilai net ekspor

Kota Makassar kemudian menjadi membaik seiring dengan pemulihan ekonomi pasca pandemic hingga tahun 2023.

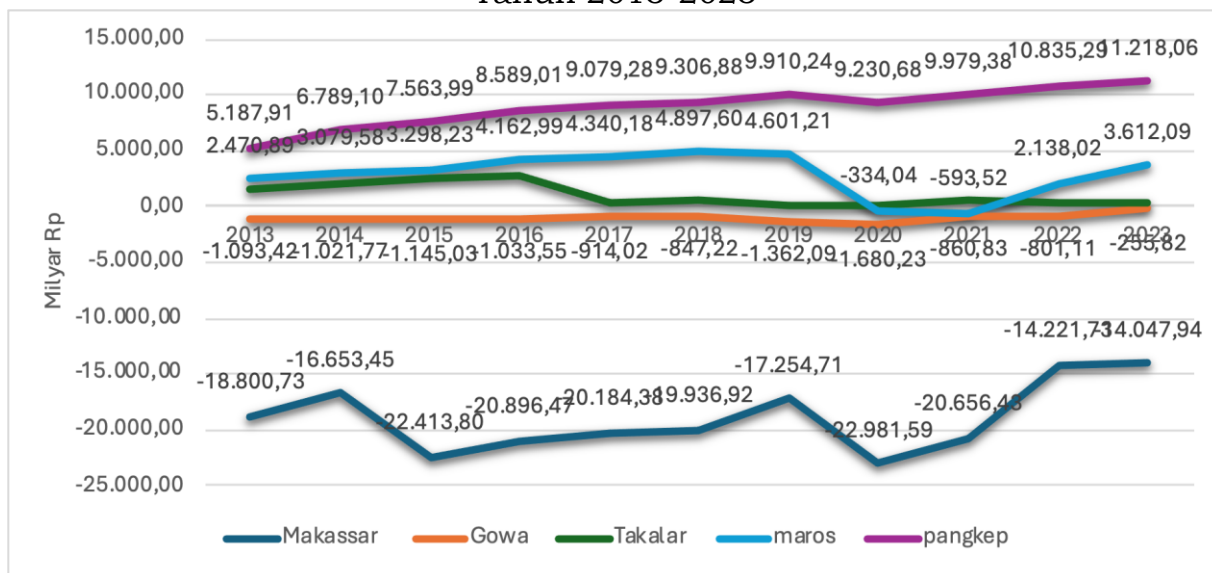
Grafik 2.125
Perkembangan Net Ekspor Kota Makassar dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah), Tahun 2024

Jika dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Selatan, nilai net ekspor Kota Makassar masih lebih rendah, kecuali di tahun 2020, nilai net ekspor Provinsi Sulawesi Selatan cukup besar yakni (-30.659,13) milyar Rupiah. Kondisi tersebut merupakan akumulasi dari kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan yang saat pandemic Covid-19 hampir seluruhnya tidak mampu melakukan ekspor akibat adanya pembatasan pergerakan barang dan orang.

Grafik 2.126
Perkembangan Net Ekspor Kota Makassar dan Daerah Sekitar Tahun 2013-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah), Tahun 2024

Dibandingkan dengan kabupaten lain di wilayah Mamminasata yakni Kabupaten Gowa, Maros, Takalar dan Pangkep, nilai Net Ekspor Kota Makassar paling rendah selama periode 2013-2023. Rendahnya kemampuan ekspor di kota Makassar menyebabkan nilai net ekspor negative. Sejumlah sektor ekonomi yang berkembang di Kota Makassar sebagai penopang pertumbuhan . . .

pertumbuhan ekonomi, seperti usaha penyedia akomodasi dan makan minum, perdagangan, industri, konstruksi dan properti. Namun beberapa di antara sektor tersebut justru menjadi penyumbang impor di Kota Makassar seperti perdagangan, industri yang membutuhkan barang modal dan peralatan yang harus di impor serta konstruksi. Adapun komoditas impor Kota Makassar terutama komoditas olahan makanan hewan, gandum, mesin mekanik dan Bahan bakar Mineral.

Nilai net ekspor terendah setelah kota Makassar adalah Kabupaten Gowa juga memiliki nilai net ekspor negative. Meskipun hasil pertanian di Kabupaten Gowa cukup besar namun belum berorientasi ekspor sebab masih memiliki daya saing rendah dan output yang pertanian tersebut diproduksi untuk mencukupi kebutuhan Kabupaten Gowa dan sekitarnya.

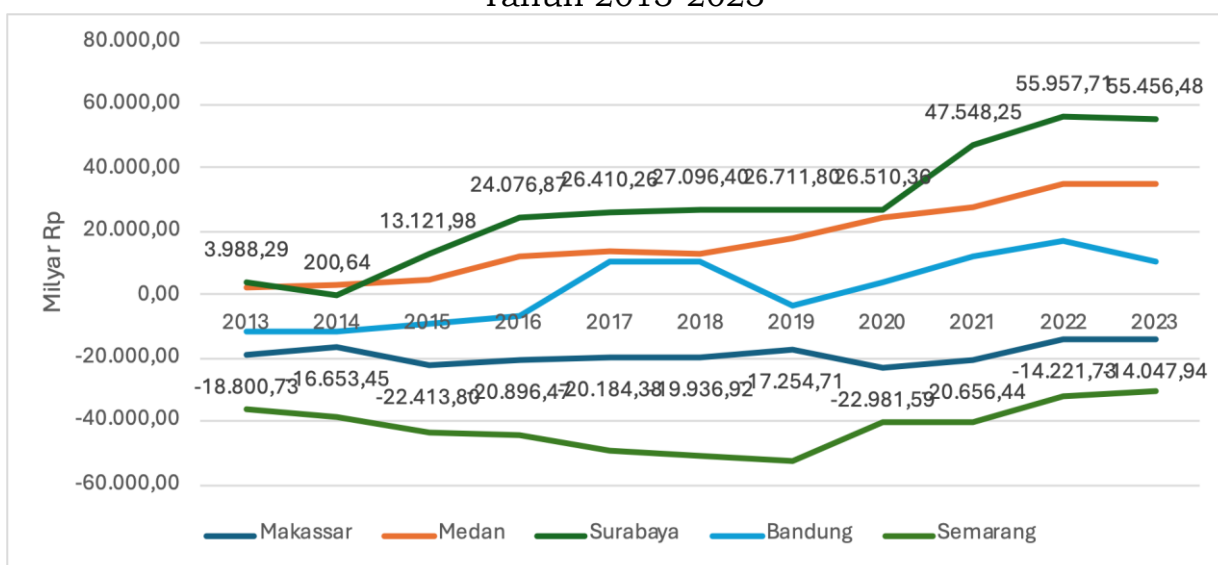
Berbeda dengan Kabupaten Takalar, Maros Dan Pangkep yang memiliki nilai net ekspor yang positif, walaupun secara umum di masa pandemic covid-19 hampir seluruh kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan mengalami penurunan net ekspor. Komoditas ekspor Kabupaten Takalar adalah telur ikan Terbang, rumput laut dan komoditas pertanian dan perkebunan. Komoditas ikan terbang menyumbang devisa di Kabupaten Takalar, namun saat pandemic covid-19 produksi tujuh komoditas perikanan termasuk telur ikan terbang mengalami penurunan drastis.

Net ekspor Kabupaten Maros selama periode 2013-2023 mengalami fluktuatif, namun masih memiliki nilai positif. Kecuali pada tahun 2020 -2021 nilai net ekspor kabupaten maros menurun dari 4.601,21 milyar rupiah di tahun 2019 turun menjadi (-334,04) milyar rupiah di tahun 2020 hingga 2021 sebesar (-593,52) milyar rupiah. Akan tetapi saat pemulihan, nilai net ekspor Kabupaten Maros kembali positif dan meningkat signifikan hingga tahun 2023 sebesar 3.612,09 milyar rupiah. Hal ini ditunjang oleh sejumlah komoditas ekspor yang dimiliki oleh Kabupaten Maros seperti Kopi Mallawa, Kayu Jati, produk makanan olahan hasil perikanan seperti Bandeng, Sarden, Agar-Agar, serta sektor perikanan berupa Rumput Laut dan Udang Windu.

Berbeda halnya dengan Kabupaten Pangkep yang memiliki tren net ekspor yang positif dengan nilai net ekspor sebesar 5.187,91 milyar rupiah di tahun 2013 hingga menjadi 11.218,06 pada tahun 2023. Sejumlah komoditas ekspor yang dimiliki Kabupaten Pangkep mencerminkan potensi Sumber daya alam dan industri di kabupaten tersebut. Komoditas Utama ekspor Kabupaten Pangkep adalah perikanan, tanaman pangan, hortikultura dan tanaman perkebunan rakyat. Tingginya volume ekspor dari komoditas tersebut yang menyebabkan nilai net ekspornya positif.

Jika dibandingkan dengan nilai net ekspor pada sejumlah kota besar relative lainnya di Indonesia, maka Kota Makassar relative lebih tinggi net net ekspornya dibandingkan dengan Kota Semarang. Hal ini dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2.127
Perkembangan Net Ekspor Kota Makassar dan Kota Besar Lainnya
Tahun 2013-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah), Tahun 2024

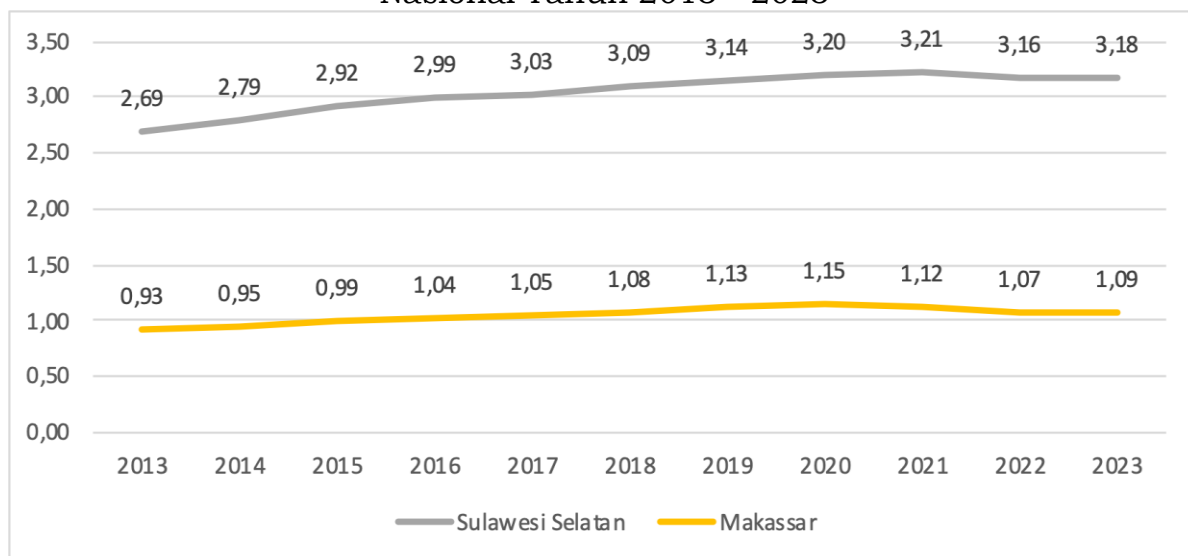
Data tersebut menunjukkan bahwa Kota Surabaya memiliki nilai net ekspor yang positif dengan tren yang meningkat selama periode 2013 – 2023. Begitu pula dengan Kota Medan yang terus mengalami peningkatan nilai net ekspor bahkan saat pandemic covid-19 pun, Kota Medan tetap meningkat dari 17.563, 73 milyar rupiah tahun 2019 meningkat sebesar 38,97% menjadi 27.416,59 milyar 2020. Nilai ini mengalami peningkatan signifikan hingga tahun 2023 yakni sebesar 55.456,48 milyar rupiah. Sementara Kota Bandung net ekspor cenderung mengalami fluktuasi, tertinggi pada tahun 2022 sebesar 17.219,71 milyar rupiah lalu turun 41,41% tahun 2023 menjadi 10.088,61 milyar rupiah.

Melihat perkembangan Net Ekspor di Kota Makassar jika dibandingkan dengan daerah sekitar dan kota lainnya di Indonesia, memiliki nilai negatif dengan tren yang meningkat, perlunya perhatian bagi pemerintah kota Makassar untuk menekan nilai net ekspor Kota Makassar dalam mengurangi barang impor terutama untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari rumah tangga secara individual, terutama barang mewah. Daerah yang dapat memproduksi lebih banyak barang dan jasa sendiri dapat mengurangi impor dan memperkuat ekonomi lokal. Selain itu nilai net ekspor yang negatif karena tingginya impor dapat menyebabkan defisit neraca perdagangan, melemahnya daya saing produk domestik dan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi kota Makassar.

2.3.1.20. Proporsi Kontribusi PDRB Kota Makassar Terhadap PDB Nasional

Secara umum, tren kontribusi PDRB Kota Makassar terhadap perekonomian Indonesia cenderung memperlihatkan peningkatan dalam kurun tahun 2013-2023. Dalam kurun waktu tersebut, share perekonomian Kota Makassar terhadap perekonomian di level nasional sudah berada di kisaran angka 1%. Memasuki Tahun 2016, kontribusi PDRB Kota Makassar terhadap PDB Indonesia selalu konsisten mencatatkan share diatas angka 1% di tiap tahunnya.

Grafik 2.128
Kontribusi PDRB Kota Makassar dan Provinsi Sulawesi Selatan Terhadap PDB Nasional Tahun 2013 - 2023



Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah), Tahun 2024

Hal ini mengindikasikan peran Kota Makassar yang cukup signifikan sebagai salah satu motor penggerak perekonomian Indonesia. Capaian angka 1% untuk kontribusi perekonomian di level Kabupaten/Kota terhadap perekonomian nasional sudah merupakan capaian yang cukup besar. Sebagai gambaran, perekonomian Sulawesi Selatan sendiri secara keseluruhan telah memberikan sumbangsih sebesar 3% bagi perekonomian nasional. Hal tersebut mengindikasikan bahwa dari angka 3% tersebut, sebesar kurang lebih sepertiganya disumbangkan oleh perekonomian Kota Makassar.

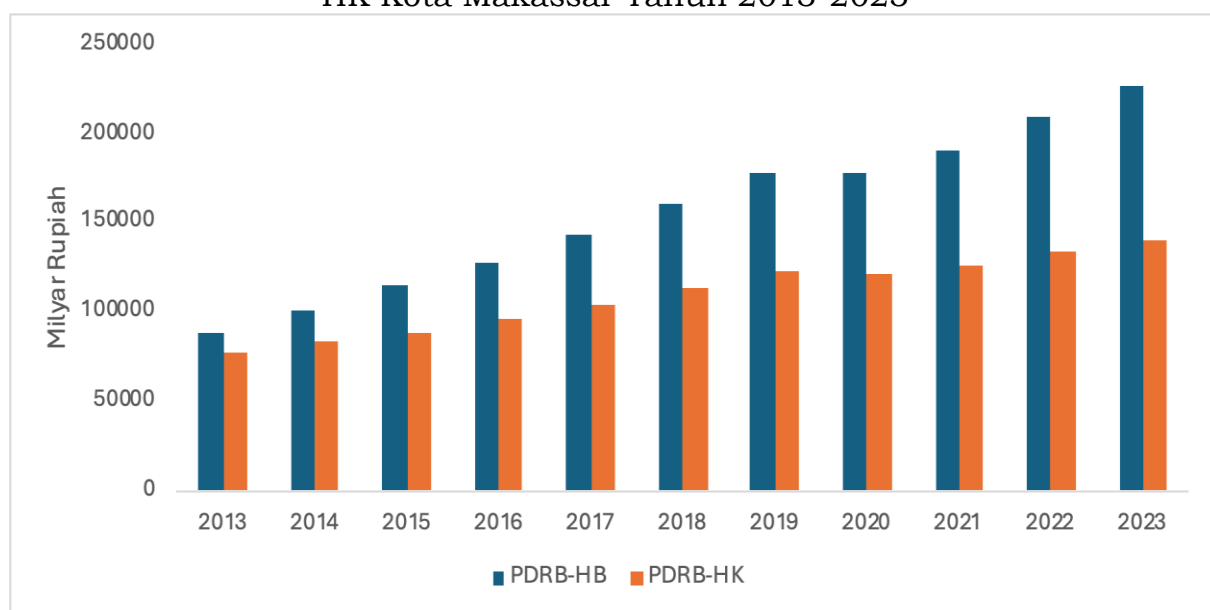
2.3.1.21. Proporsi Kontribusi PDRB Kota Makassar Terhadap Provinsi Sulawesi Selatan

Dalam kurun waktu 11 tahun terakhir, nilai PDRB Kota Makassar mengalami peningkatan baik berdasarkan atas dasar harga berlaku (PDRB-HB) maupun atas dasar harga konstan (PDRB-HK) kecuali pada tahun 2020. Hal tersebut menunjukkan bahwa perputaran kegiatan ekonomi produktif masyarakat Kota Makassar semakin berkembang dari tahun ke tahun kecuali tahun 2020. Penurunan yang terjadi pada tahun 2020 disebabkan oleh Pandemi Covid-19. Nilai PDRB menurun sekitar 97 milyar dari Rp 178430,06 milyar di tahun 2019 menjadi Rp 178332,99 milyar di tahun 2020. Pada tiga tahun berikutnya nilai PDRB-HB dan PDRB-HK mengalami perbaikan sebagai dampak positif dari upaya pemulihan perekonomian baik yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun dari pemerintah Kota Makassar. Peningkatan nilai PDRB-HB disebabkan oleh peningkatan volume produksi barang dan jasa yang dihasilkan dan peningkatan harga produk (pengaruh inflasi). Sementara pada peningkatan PDRB-HK disebabkan oleh peningkatan volume produksi barang dengan tingkat harga yang konstan.

Dari sisi supply, peningkatan nilai tambah PDRB Kota Makassar dikontribusi oleh secara berbeda oleh 17 sub lapangan usaha. Dari ke-17 sub lapangan usaha, terdapat tiga sub lapangan usaha yang mempengaruhi struktur perekonomian yaitu sub lapangan usaha industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, dan konstruksi dengan total nilai sebesar 57,06 % di tahun 2023. Selebihnya sebesar 42,94% terdistribusi pada ke-14 sub lapangan usaha yang lain. Dari sisi permintaan, nilai PDRB dikontribusi oleh dua pelaku ekonomi yaitu sektor rumah tangga yang menyumbang sekitar 50,02% dan Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar 46,63% di tahun 2023.

Grafik 2.129 . . .

Grafik 2.129
Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB-HB) dan PDRB-HK Kota Makassar Tahun 2013-2023

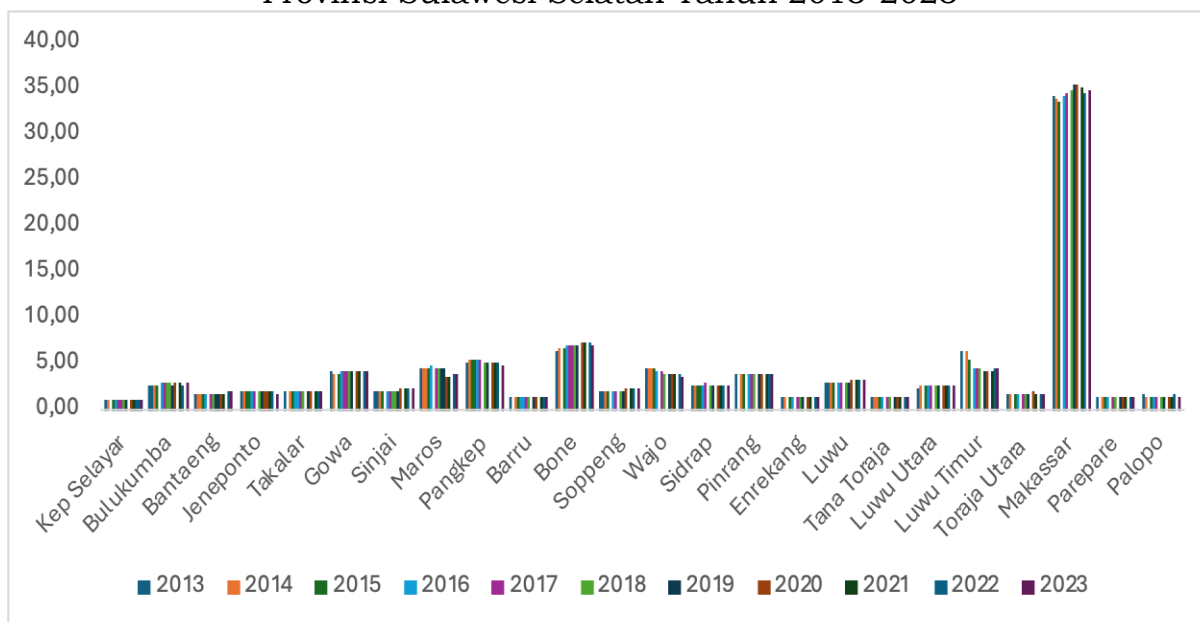


Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah), Tahun 2024

Jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar menyumbang rata-rata 34,49% per tahun. Kabupaten Bone menempati urutan kedua tertinggi namun nilainya masih berkisar pada angka 6-7%. Beberapa kabupaten yang berkontribusi pada angka 4 dan 5% seperti Gowa, Maros, dan Kabupaten Pangkep, selebihnya kabupaten lainnya hanya berkontribusi pada kisaran 1%, 2%, dan 3%. Hal ini menandakan bahwa perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan digerakkan oleh perputaran ekonomi Kota Makassar. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Kota Makassar memegang andil besar terhadap perekonomian Sulawesi Selatan.

Jika dikaitkan dengan kabupaten di Kawasan Mamminasata Kota Makassar masih menduduki peringkat pertama, sementara kabupaten di sekitarnya rata-rata hanya menyumbang sekitar 5,22% untuk Kabupaten Pangkep, 4,31% untuk Kabupaten Maros, 4,18% untuk Kabupaten Gowa, dan 2,01% untuk Kabupaten Takalar. Tingginya proporsi PDRB Kota Makassar terhadap provinsi disebabkan oleh aktivitas ekonomi di Sulawesi Selatan berpusat di Kota Makassar. Hal ini didorong oleh kelengkapan infrastruktur yang cukup memadai dan karakteristik sebagai ibu kota provinsi. Aktivitas sosial ekonomi masyarakat berpusat di Kota Makassar sehingga seluruh sektor-sektor terkait menghasilkan nilai tambah yang tinggi. Pemasaran untuk hasil komoditas pertanian yang berasal dari daerah sekitar berpusat di Makassar. Kondisi ini mendorong perputaran ekonomi di Kota Makassar menjadi semakin besar yang ditunjukkan oleh perkembangan pesat dari usaha mikro kecil dan menengah. Ketersediaan infrastruktur jalan, informasi dan telekomunikasi, dan pelabuhan merupakan faktor ketertarikan para investor untuk berinvestasi di Kota Makassar.

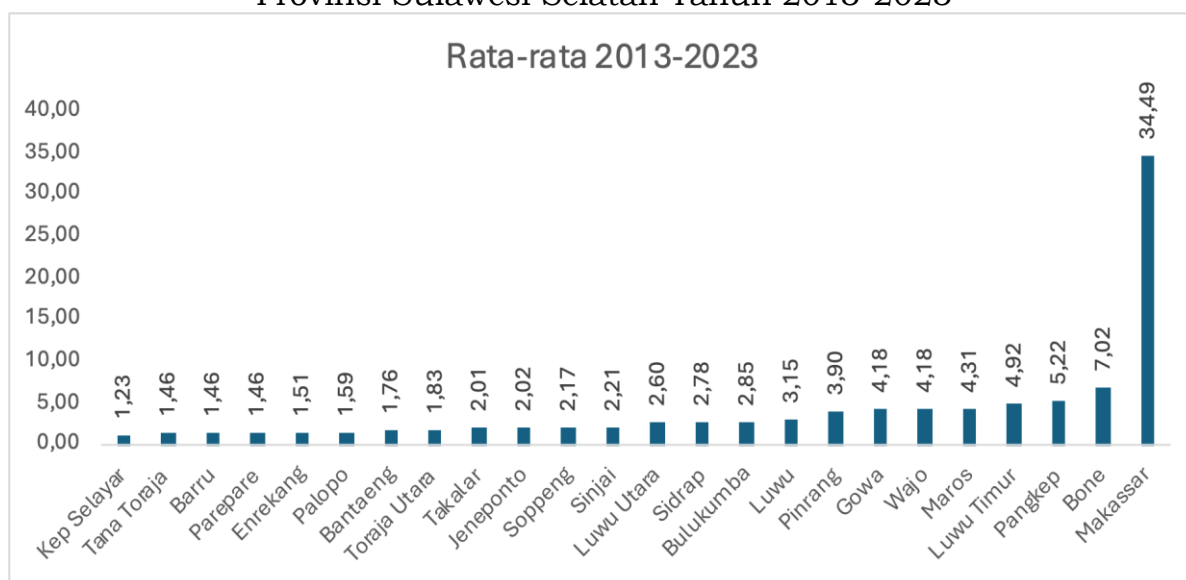
Grafik 2.130
Perkembangan Proporsi PDRB Kabupaten/Kota Terhadap Total PDRB Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah), Tahun 2024

Selama periode 2013-2023, kontribusi Kota Makassar sebesar 34,49% per tahun, disusul oleh Kabupaten Bone meskipun menduduki peringkat kedua terbesar namun sumbangannya hanya rata-rata 7,02% per tahun. Penyumbang terbesar berikutnya adalah Kabupaten Pangkep dengan rata-rata 5,22%, Luwu Timur 4,92%, dan Maros 4,31%. Ketiga kabupaten tersebut masing-masing memiliki industri pertambangan. Terdapat delapan kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan hanya menyumbang PDRB Sulawesi Selatan berkisar di atas 1% dan di bawah 2% yaitu Kabupaten Kepulauan Selayar, Tana Toraja, Barru, Parepare, Enrekang, Palopo, Bantaeng, dan Toraja Utara.

Grafik 2.131
Rata-rata Proporsi PDRB Kabupaten/Kota Terhadap Total PDRB Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2023



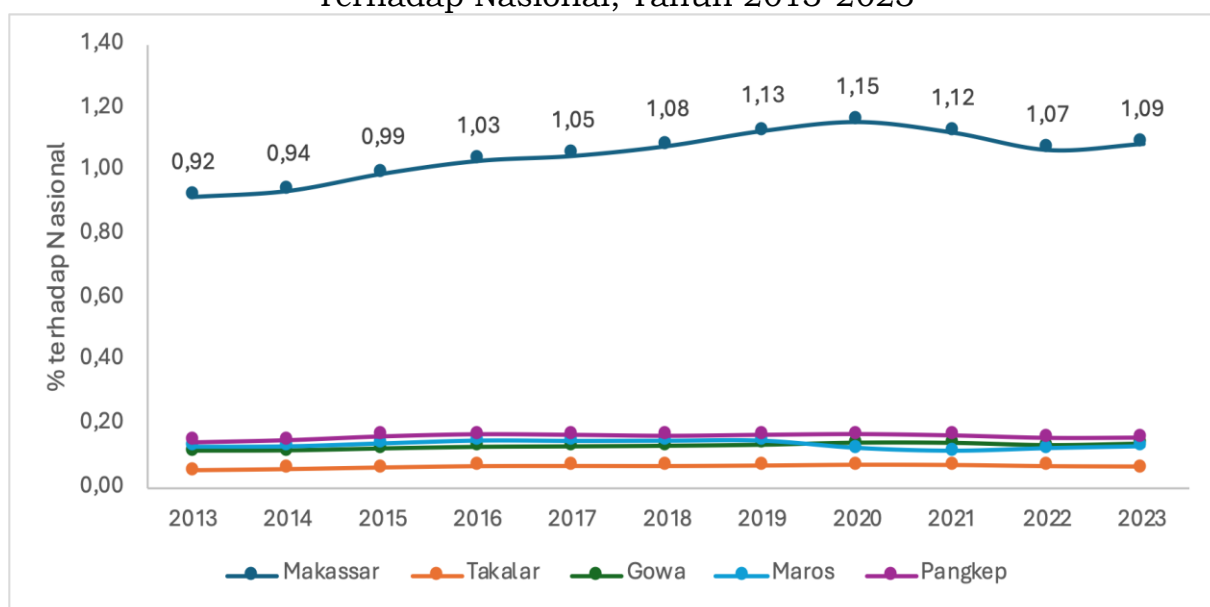
Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah), Tahun 2024

Proporsi PDRB keempat kabupaten/kota di Kawasan Mamminasata terhadap PDB nasional selama periode 2013-2023 masih tetap didominasi oleh Kota Makassar dengan rata-rata 1,05%. Ketiga kabupaten lainnya secara

rata-rata . . .

rata-rata hanya berkontribusi sebesar 0,06% untuk Kabupaten Takalar, masing-masing 0,13% Kabupaten Gowa dan Maros, serta 0,16% dikontribusi oleh Kabupaten Pangkep. Besarnya kontribusi PDRB Kota Makassar disebabkan oleh kegiatan ekonomi berpusat di Kota Makassar yang tercermin dari pusat perdagangan, keberadaan Kawasan Industri Makassar, pelabuhan dan fasilitas infrastruktur lainnya. Selain itu, produktivitas tenaga kerja di Kota Makassar juga relatif lebih tinggi yang tercermin dari tenaga kerja yang berpendidikan tinggi. Sementara proporsi PDRB Kabupaten Pangkep menempati urutan kedua disebabkan oleh adanya industri Semen Tonasa. Meskipun Kabupaten Maros juga memiliki industri Semen Bosowa dan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin namun kontribusinya terhadap PDRB belum menyamai dengan Kabupaten Pangkep dan Kota Makassar. Dari keempat kabupaten di Kawasan Mamminasata, proporsi Kabupaten Takalar menempati urutan terendah.

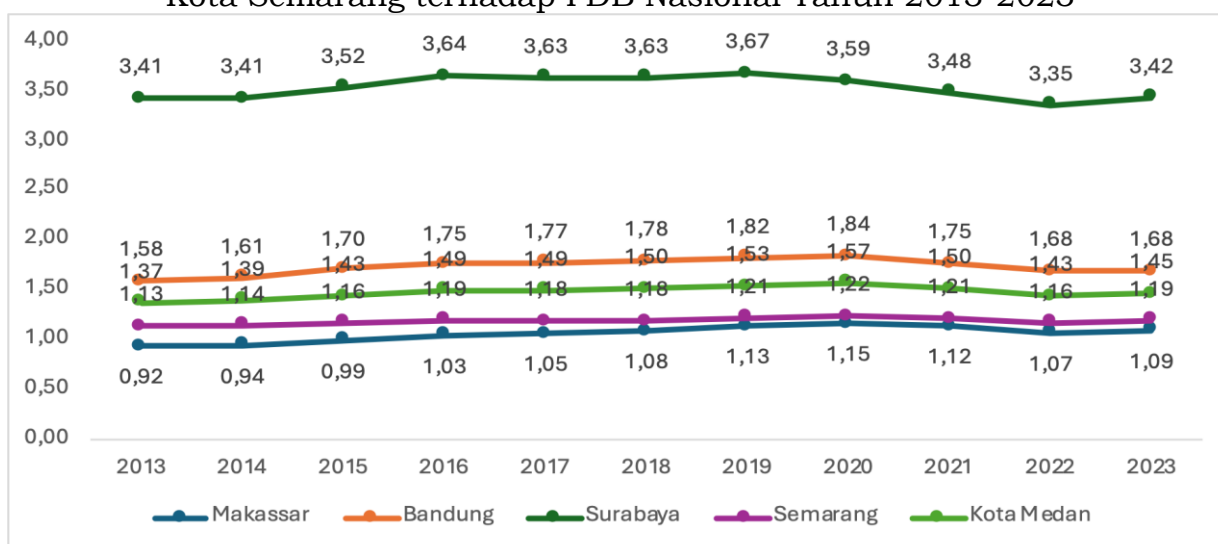
Grafik 2.132
Perbandingan Proporsi PDRB Kab/Kota Kawasan Mamminasata
Terhadap Nasional, Tahun 2013-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah), Tahun 2024

Posisi relatif Kota Makassar terhadap beberapa kabupaten di Kawasan Mamminasata menempati urutan pertama atas capaian PDRB, akan tetapi jika dibandingkan dengan beberapa kota yang setara di Indonesia, Kota Makassar berada di bawah Kota Surabaya, Kota Bandung, Kota Medan, dan Kota Semarang. Hal ini mengindikasikan bahwa kemampuan masyarakat di Kota Makassar dalam menghasilkan barang dan jasa akhir lebih rendah dari keempat kota tersebut. Rendahnya capaian PDRB Kota Makassar terutama dikontribusi oleh rendahnya produktivitas tenaga kerja. Selain itu, ketersediaan infrastruktur di Kota Makassar jauh lebih rendah dari kota-kota lainnya seperti Surabaya, Medan, Bandung, dan Semarang. Dengan kondisi tersebut dapat berimplikasi terhadap ketertarikan investor untuk menginvestasi di Kota Makassar. Ketersediaan infrastruktur yang berkualitas dan memadai dan kualitas sumber daya manusia yang tinggi di kota-kota tersebut merupakan penentu utama daya saing daerah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja PDRB Kota Makassar masih merupakan permasalahan pembangunan.

Grafik 2.133
Perkembangan Proporsi PDRB Kota Makassar, Kota Surabaya, Kota Medan, Kota Semarang terhadap PDB Nasional Tahun 2013-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik diolah, Tahun 2024

2.3.1.22. Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah

Tren persentase PAD terhadap pendapatan daerah Kota Makassar berfluktuasi dari tahun ke tahun. Semakin tinggi persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan semakin tinggi kemampuan daerah untuk membiayai kemampuannya menunjukkan kinerja keuangan daerah yang positif. Dalam hal ini kinerja keuangan positif dapat diartikan sebagai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai kebutuhan daerah dan mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Semakin tinggi derajat kemandirian suatu daerah menunjukkan semakin mampu membiayai pengeluarannya sendiri tanpa bantuan dari pemerintah pusat. Secara umum, semakin tinggi persentase pendapatan asli daerah dan semakin tinggi kemampuan daerah untuk membiayai kemampuannya sendiri akan menunjukkan kinerja keuangan daerah yang positif. Persentase PAD terhadap pendapatan pada tahun 2022 tergolong *cukup* dengan 38,69% jika dibandingkan dengan persentase PAD di tahun 2021 senilai 34,70%.

Tabel 2.36

Persentase PAD Terhadap Pendapatan Kota Makassar Tahun 2018 s.d 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	PAD	1.185.453.01 0.989,65	1.303.316.3 37.553,94	1.078.328.5 61.269,15	1.140.328. 483.697,93	1.387.904.74 6.600,23
2	Jumlah pendapatan daerah	3.428.479.72 9.162,65	3.666.359.9 90.154,91	3.323.662.2 86.602,28	3.286.048. 497.393,93	3.587.333.92 9.542,50
3	Persentase PAD terhadap pendapatan (1 / 2 x 100)	34,58	35,55	32,44	34,70	38,60

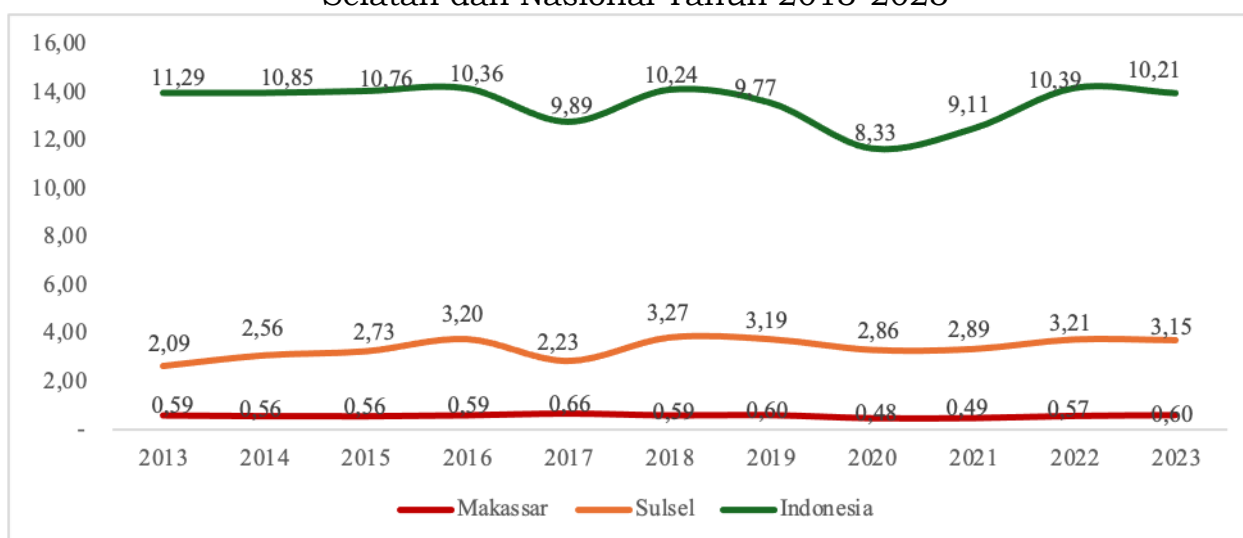
Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar, Tahun 2023

2.3.1.23. Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB

Rasio pajak daerah terhadap PDRB mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan penerimaan pajak. Selama periode 2013-2023, rata-rata rasio pajak daerah Kota Makassar terhadap PDRB tercatat sebesar 0,57%. Angka ini masih lebih rendah dibandingkan rata-rata provinsi sebesar 2,85%. Pada level nasional, rasio pajak mencapai rata-rata mencapai 10,11% per tahun selama 2013-2023. Jika melihat tren, rasio pajak daerah . . .

daerah Kota Makassar cenderung mengalami stagnasi. Rasio pajak daerah yang cenderung stagnan mengindikasikan belum optimalnya kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan penerimaan pajak. Peningkatan PDRB tidak diiringi dengan peningkatan penerimaan pajak. Selain itu, pencapaian rasio pajak daerah Kota Makassar masih jauh dari harapan Pemerintah Pusat yang menargetkan *local tax ratio* meningkat ke level 3%. Hal ini juga merupakan salah satu pilar dari Undang-Undang (UU) Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) yang berupaya mendorong peningkatan *local taxing power* agar daerah tidak bergantung pada dana transfer dari pusat.

Grafik 2.134
Perbandingan Rasio Pajak Daerah Kota Makassar dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2013-2023



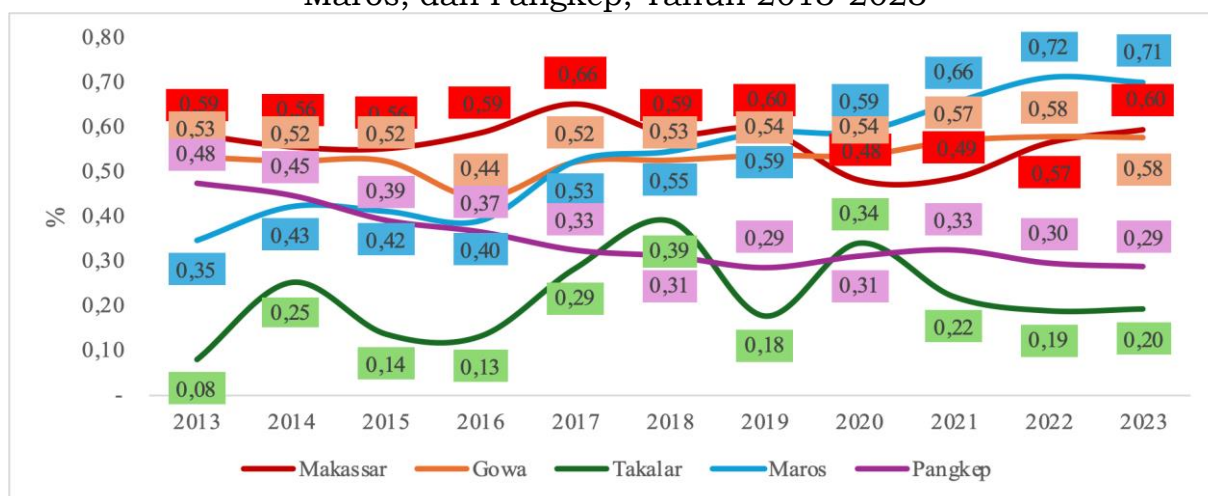
Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah), Tahun 2024

Rendahnya rasio pajak daerah terhadap PDRB turut dikontribusi oleh rendahnya jumlah penerimaan pajak daerah di Kota Makassar. Hal ini berarti perkembangan kegiatan ekonomi masyarakat yang berkontribusi terhadap peningkatan nilai tambah PDRB belum mampu mendorong peningkatan penerimaan pajak dari masyarakat. Kebijakan yang ditetapkan terkait dengan intensifikasi dan ekstensifikasi belum berhasil secara maksimal. Kondisi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yang saling terkait satu dengan lainnya. Beberapa faktor penyebab tersebut antara lain: (i) Kurangnya kepatuhan pajak masyarakat. (ii) Ketidakseimbangan antara sumber daya dan tugas yang berdampak pada kemampuan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi, menagih, dan menindaklanjuti pajak daerah yang belum dibayar dengan efektif. (iii) Keterbatasan teknologi: penggunaan teknologi yang terbatas dalam pengelolaan pajak daerah juga dapat menghambat efisiensi pemungutan pajak daerah. Kurangnya sistem informasi yang handal dan terintegrasi untuk memantau, mengelola, dan melacak data pajak dapat memperlambat proses pengumpulan pajak dan meningkatkan risiko kehilangan atau kelalaian data. (iv) Ketidakpastian regulasi dan kebijakan: ketidakpastian dalam regulasi pajak atau kebijakan fiskal dapat mengganggu iklim bisnis dan menghambat investasi. Hal ini dapat mengurangi aktivitas ekonomi dan pendapatan pajak daerah. Perubahan yang sering dalam kebijakan pajak atau regulasi yang tidak konsisten juga dapat membingungkan bagi wajib pajak dan mengurangi kepatuhan pajak.

Jika dibandingkan dengan daerah tetangga, rata-rata rasio pajak daerah Kota Makassar masih lebih tinggi dibanding Kabupaten Gowa (0,53%), Maros (0,54%), Pangkep (0,35%) dan Takalar (0,22%) selama periode 2013 hingga

2023. Meskipun demikian, baik Kabupaten Gowa maupun Maros selama tahun 2016 hingga 2023 menunjukkan kinerja penerimaan pajak yang konsisten meningkat. Bahkan di empat tahun terakhir capaian rasio pajak daerah Kabupaten Maros lebih tinggi dari Kota Makassar dan tiga daerah lainnya. Rasio pajak terhadap PDRB Kabupaten Maros pada tahun 2020 sebesar 0,59 %, meningkat 0,12 % poin menjadi 0,71% di tahun 2023.

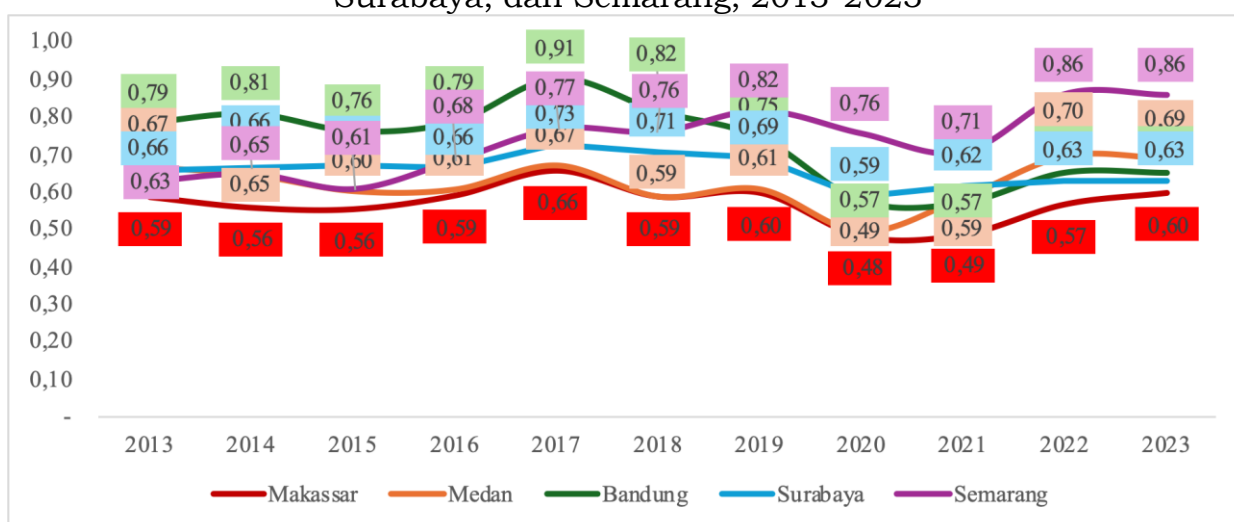
Grafik 2.135
Perbandingan Rasio Pajak Daerah Kota Makassar dengan Gowa, Takalar, Maros, dan Pangkep, Tahun 2013-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah), Tahun 2024

Selain itu, selama periode 2013-2023, pencapaian rasio pajak daerah Kota Makassar masih tertinggal dari kota besar lainnya di Indonesia. Kota Semarang mencatatkan rasio pajak daerah tertinggi dibanding kota besar lainnya dengan angka rata-rata sebesar 0,74%, dengan kota Bandung memiliki rasio pajak daerah tertinggi dengan rata-rata mencapai 0,80%. Namun akibat penyebaran Covid-19, penerimaan pajak daerah turun dan rata-rata rasio pajak daerah hanya tercatat sebesar 0,61%.

Grafik 2.136
Perbandingan Rasio Pajak Daerah Kota Makassar dengan Medan, Bandung, Surabaya, dan Semarang, 2013-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah), Tahun 2024

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemerintah Kota Makassar masih menghadapi permasalahan terkait dengan penerimaan pajak daerah. Hal tersebut ditandai oleh rasio pajak terhadap PDRB berada di bawah rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan, Nasional, dan beberapa . . .

beberapa kota yang setara di Indonesia seperti Bandung, Surabaya, Medan, dan Semarang. Untuk kabupaten yang terletak di Kawasan Mamminasata, posisi Kota Makassar berada diatas dari keempat kabupaten di kawasan akan tetapi pada tiga tahun terakhir Makassar di bawah dari Kabupaten Maros dan Gowa.

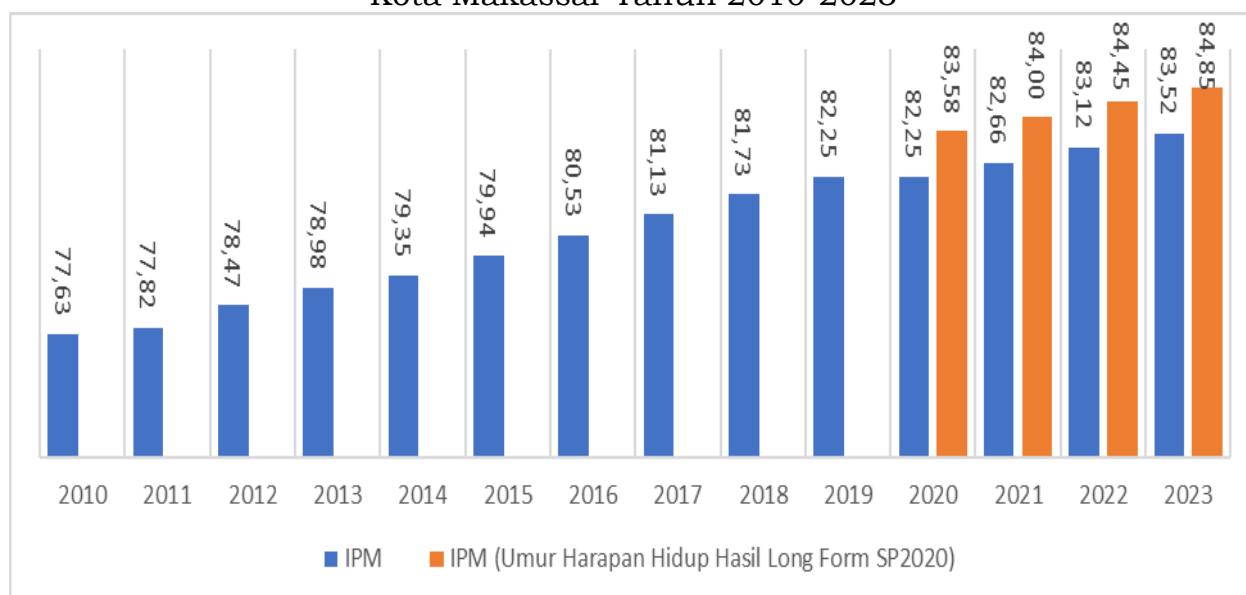
2.3.2. Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)

2.3.2.1. Indeks pembangunan Manusia (IPM)

Indeks pembangunan manusia (IPM) Kota Makassar terus meningkat hingga akhirnya mencapai predikat “sangat tinggi” sejak tahun 2016. Tahun 2016, Kota Makassar berhasil mencapai IPM 80,53 atau diatas angka 80 yang merupakan ambang batas kategori “sangat tinggi”. Setelah tahun 2016, IPM Kota Makassar terus naik hingga sampai di angka 82,25 di tahun 2020. Tahun 2023 hingga 2023, jika menggunakan UHH Hasil Long Form SP 2020, maka IPM Kota Makassar berhasil mencatatkan angka antara 83-84. Capaian tersebut jauh melampaui IPM Indonesia, Provinsi Sulawesi Selatan, dan seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.

Grafik 2.137

IPM Menggunakan UHH Metode Lama dan UHH Hasil Long Form SP 2020
Kota Makassar Tahun 2010-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2024

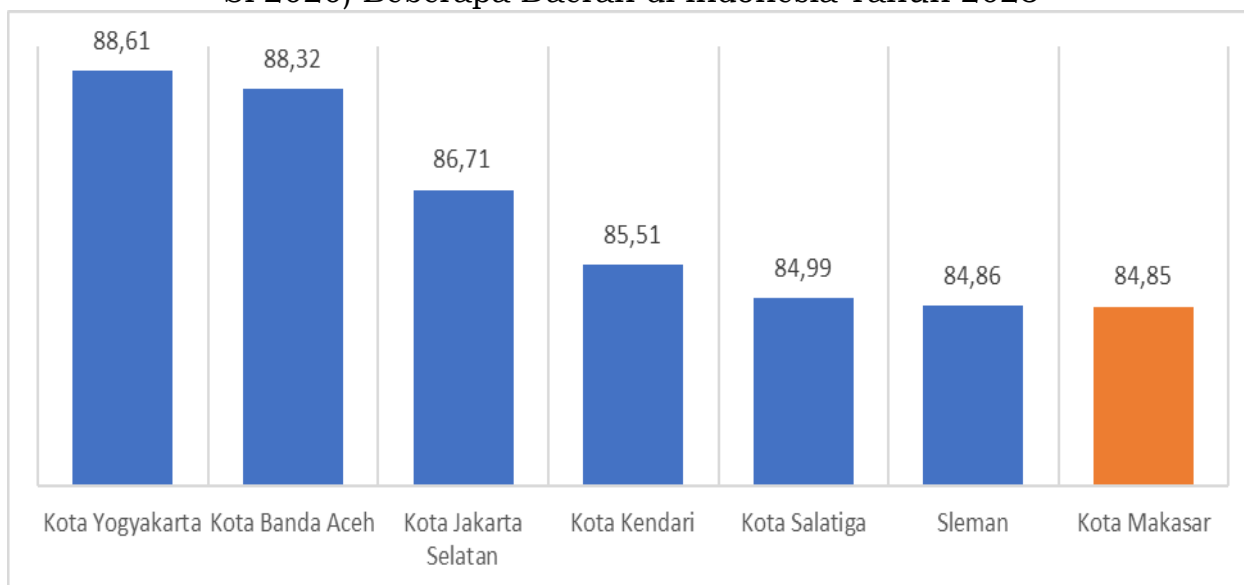
Kota Makassar dengan IPM diatas 80 atau termasuk kategori “sangat tinggi” mencerminkan kualitas sumber daya manusia yang unggul (mayoritas penduduk). Hal ini dapat dilihat dari tingginya tingkat pendidikan masyarakat di Kota Makassar, di mana sebagian penduduk telah menyelesaikan pendidikan menengah dan bahkan banyak yang melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi. Indeks pembangunan manusia kategori sangat tinggi menggambarkan sebagian besar penduduk usia sekolah berdasarkan jenjang sudah menempuh pendidikan formal. IPM sangat tinggi juga menunjukkan kualitas kesehatan masyarakat yang prima. Harapan hidup yang tinggi mengindikasikan akses yang baik terhadap layanan kesehatan dan pola hidup sehat yang dijalankan oleh penduduk. Kematian ibu dan bayi yang rendah, serta rendahnya prevalensi penyakit menular dan kronis, mencerminkan sistem kesehatan yang efektif dan keberhasilan dalam kampanye kesehatan publik. Kondisi ekonomi yang relatif stabil juga berkontribusi pada standar hidup yang tinggi, di mana penduduk memiliki akses yang lebih baik terhadap kebutuhan dasar seperti pangan, air bersih, dan perumahan yang layak,

sehingga . . .

sehingga menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan SDM yang berkualitas.

Meskipun berhasil mencapai kategori sangat tinggi, namun secara nasional, IPM Kota Makassar tahun 2023 berada di peringkat 7 tertinggi, masih berada di bawah Kota Yogyakarta, Kota Banda Aceh, Kota Jakarta Selatan, Kota Kendari, Kota Salatiga, dan Sleman. Daerah yang menempati peringkat pertama adalah Kota Yogyakarta dengan nilai IPM mencapai 88,61 atau selisih 3,76 poin dengan Kota Makassar, kemudian Kota Banda Aceh 88,32, Kota Jakarta Selatan 86,71, Kota Kendari 85,51, Kota Salatiga 84,88, dan Sleman 84,86.

Grafik 2.138
Indeks Pembangunan Manusia (Umur Harapan Hidup Hasil Long Form SP2020) Beberapa Daerah di Indonesia Tahun 2023



Sumber: Biro Pusat Statistik, Tahun 2024

Ada dua aspek yang masih perlu ditingkatkan yaitu pendidikan dan daya beli. Pada aspek pendidikan, rata-rata lama sekolah penduduk berusia 25 tahun ke atas di Kota Makassar masih di angka 11,56 tahun. Angka tersebut masih relatif rendah karena angka 11,56 tahun menunjukkan bahwa rerata penduduk usia 25 tahun ke atas di Kota Makassar level pendidikannya masih kelas dua SMA sederajat atau tidak tamat SMA. Selain itu, angka 11,56 tahun masih terpaut 3,44 tahun dari angka maksimum yang digunakan dalam perhitungan IPM yaitu 15 tahun. Angka 15 tahun menunjukkan bahwa penduduk usia 25 tahun ke atas rata-rata sudah menyelesaikan pendidikan sarjana.

Selain pendidikan, daya beli masyarakat Kota Makassar juga masih perlu ditingkatkan. Tahun 2023, rerata penduduk Kota Makassar membelanjakan uang mereka (pengeluaran per kapita disesuaikan) sebesar Rp. 17.889.000 per orang per tahun atau Rp. 1.490.750 per orang per bulan. Angka tersebut jauh tertinggal dari Jakarta Selatan dan Kota Yogyakarta yaitu 26.572.352 per orang per tahun dan Rp.19.920.000. Tinggi-rendahnya pengeluaran per kapita tergantung pada beberapa variabel seperti upah rata-rata pekerja, tingkat kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan. Sementara upah rata-rata pekerja terus bergerak naik seiring dengan kenaikan UMK tapi inflasi juga mengalami kenaikan yang menggerus pendapatan riil masyarakat.

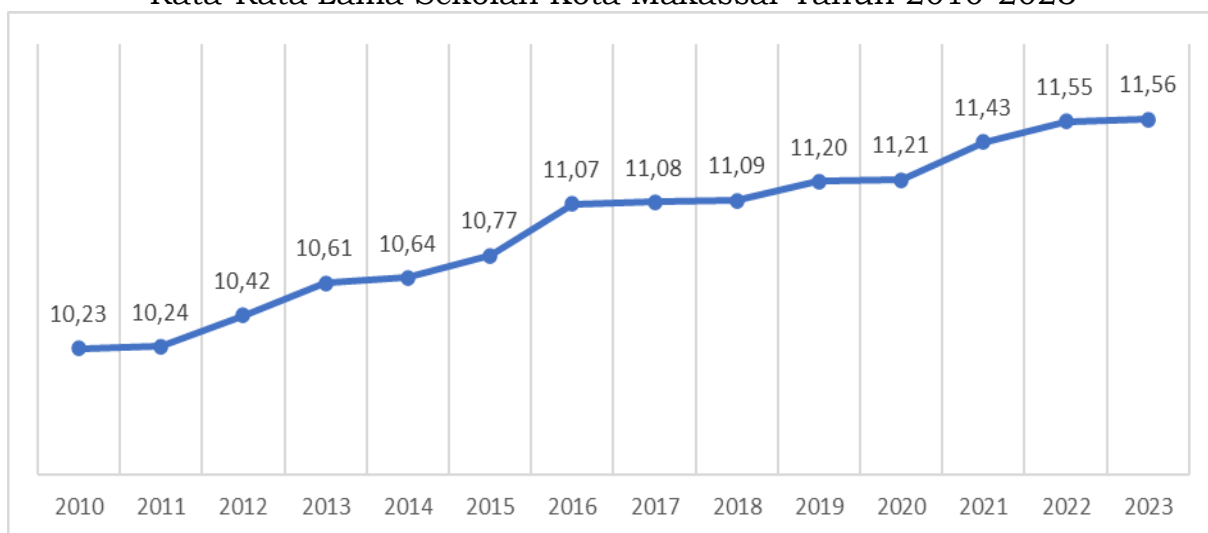
2.3.2.2. Rata-rata Lama Sekolah

Dalam 14 tahun terakhir, RLS Kota Makassar terus meningkat, namun besaran kenaikannya yang relatif kecil. Tahun 2010, RLS Kota Makassar 10,23 tahun, menunjukkan bahwa rerata penduduk usia 25 tahun ke atas saat itu

hanya . . .

hanya menempuh pendidikan formal selama 10,23 tahun atau setara dengan kelas satu SMA Sederajat. Butuh waktu lima tahun untuk menaikkan RLS satu tahun menjadi 11,07 tahun pada tahun 2016. Dari tahun 2016 hingga 2023, RLS Kota Makassar terus naik, tapi belum mencapai angka 12 tahun, padahal sudah tujuh tahun lalu sejak Kota Makassar mencapai RLS 11 tahun. Jika kenaikannya masih lambat, maka kemungkinan butuh waktu 5 tahun bagi Kota Makassar untuk mencapai RLS 12 tahun.

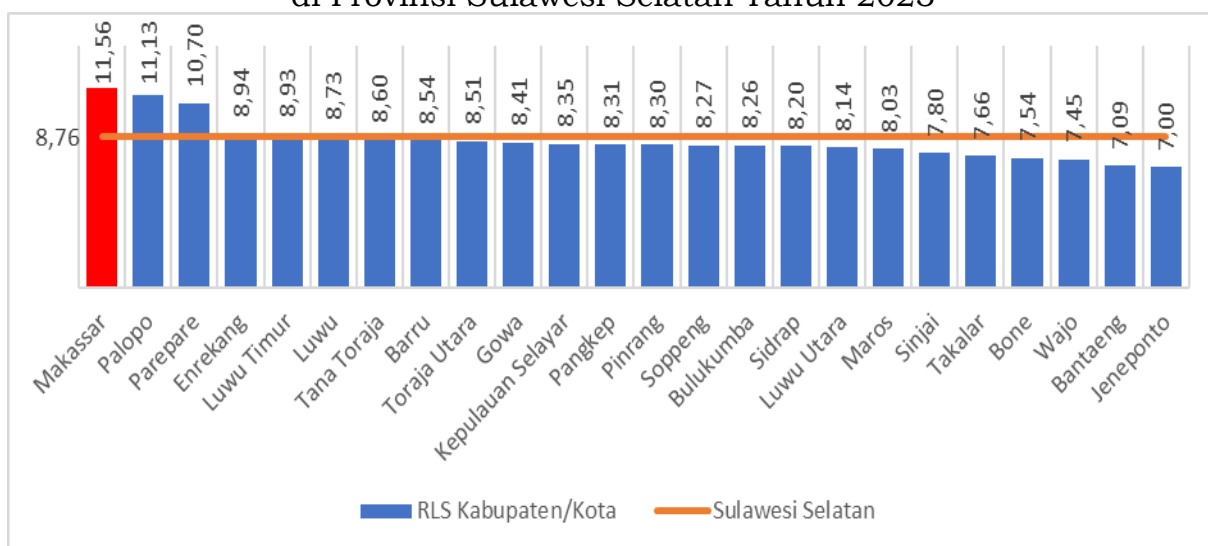
Grafik 2.139
Rata-Rata Lama Sekolah Kota Makassar Tahun 2010-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2023

Sebagai ibu kota provinsi, Kota Makassar memiliki RLS tertinggi di Sulawesi Selatan, lebih tinggi dari angka provinsi dan lebih tinggi dari semua kabupaten/kota lainnya. Capaian RLS 11,56 tahun di tahun 2023, membuat Kota Makassar melaju meninggalkan daerah lainnya. Selain Kota Makassar, ada dua daerah yang memiliki RLS dua digit yaitu Kota Palopo dan Kota Parepare masing-masing angkanya 11,13 tahun dan 10,70 tahun, selebihnya masih satu digit. Jika dibandingkan dengan provinsi, hanya lima kabupaten/kota yang memiliki RLS lebih tinggi dari Sulawesi Selatan, selain tiga kota tersebut, dua kabupaten lainnya adalah Enrekang dan Luwu Timur dengan angka 8,94 tahun dan 8,93 tahun.

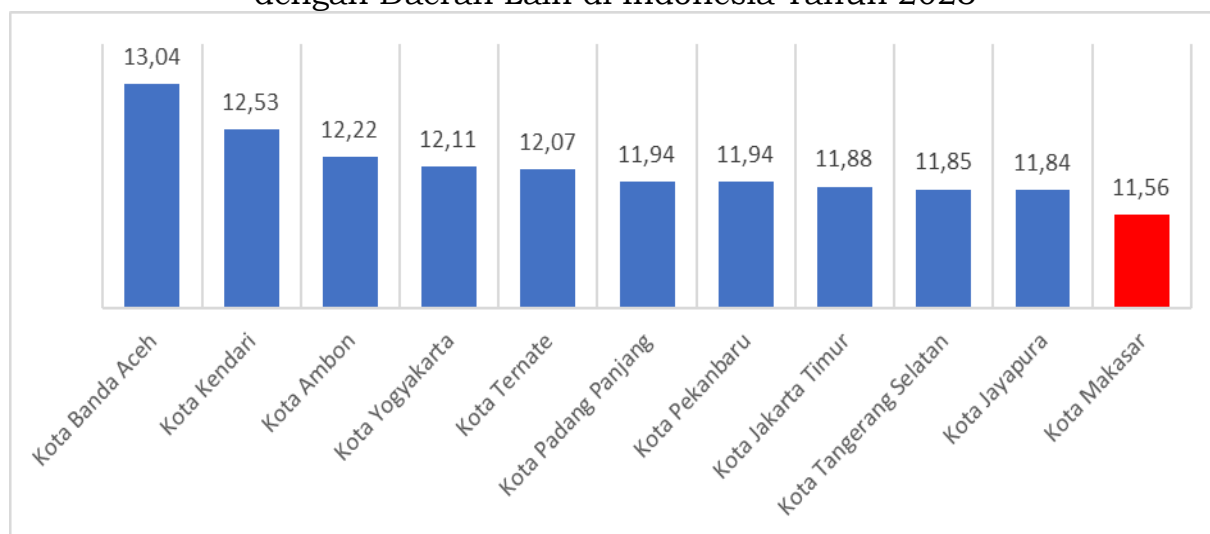
Grafik 2.140
Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023



Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2023

Membandingkan antara Kota Makassar dengan daerah lain di Sulawesi Selatan tentu tidak sepenuhnya memberikan gambaran capaian relatif RLS Kota Makassar karena Kota Makassar sebagai ibu kota punya fasilitas pendidikan yang jauh memadai dibandingkan daerah lain di Sulawesi Selatan. Untuk melihat sejauh mana capaian RLS Kota Makassar, maka perlu dibandingkan daerah lain yang relatif lebih setara dengan Kota Makassar. Data BPS mencatat, jika dikomparasi dengan seluruh daerah di Indonesia, RLS Kota Makassar bukan yang tertinggi, hanya berada pada peringkat 23 dari 514 kabupaten/kota, menunjukkan bahwa ada 22 daerah lainnya yang punya RLS lebih tinggi dari Kota Makassar. Dari 22 daerah tersebut, yang masuk 10 besar adalah Kota Banda Aceh, Kota Kendari, Kota Ambon, Kota Yogyakarta, Kota Ternate, Kota Padang Panjang, Kota Pekanbaru, Kota Jakarta Timur, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Jayapura. Kota Banda Aceh tahun 2023 mencapai RLS 13,04 tahun, kemudian disusul Kota Kendari 12,53 tahun dan Kota Ambon 12,22 tahun, hingga Kota Jayapura 11,84 tahun.

Grafik 2.141
Perbandingan Rata-rata Lama Sekolah Kota Makassar
dengan Daerah Lain di Indonesia Tahun 2023



Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2023

Perbandingan antara Kota Makassar dengan lain di Indonesia menunjukkan bahwa RLS Kota Makassar secara relatif masih rendah. Selain itu, dibandingkan dengan angka maksimum RLS 15 tahun, Kota Makassar masih tertinggal. Beberapa faktor dapat menjadi penyebab rendahnya angka rata-rata lama sekolah dalam suatu masyarakat. Pertama, akses terhadap pendidikan yang terbatas akibat faktor ekonomi, geografis, atau sosial dapat menghambat partisipasi dan kelangsungan pendidikan. Selain itu, kurangnya infrastruktur pendidikan yang memadai, termasuk kurangnya sekolah dan fasilitas pendukung, juga dapat menjadi kendala bagi siswa untuk memperpanjang masa sekolah mereka. Selain itu, faktor budaya dan sosial, seperti norma yang menekankan pekerjaan atau pernikahan di usia muda, juga dapat mempengaruhi rendahnya angka rata-rata lama sekolah dalam suatu komunitas.

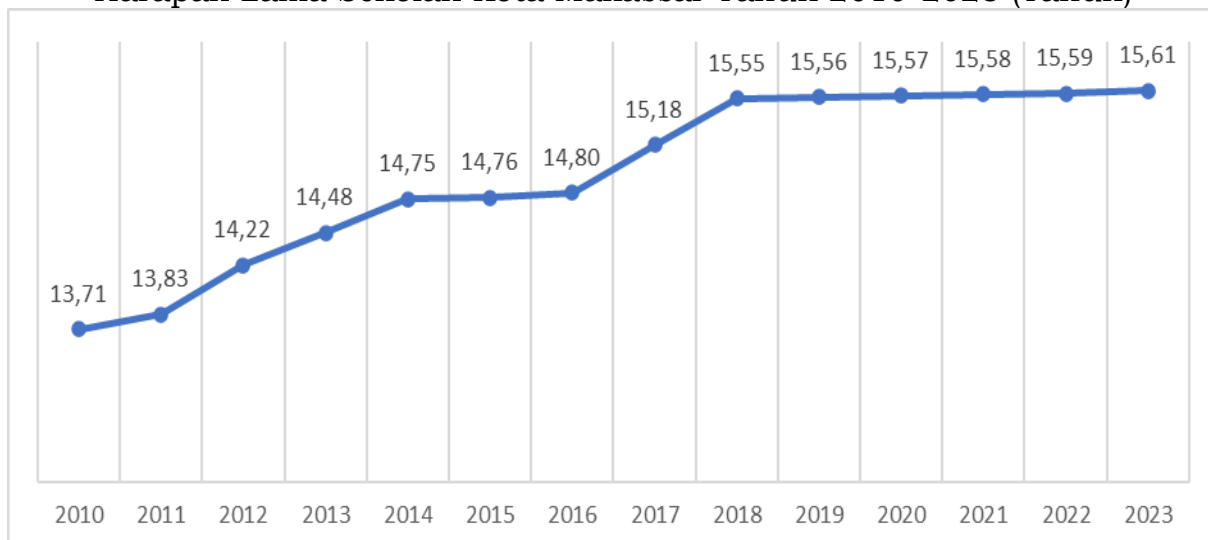
2.3.2.3. Harapan Lama Sekolah

Sama halnya dengan RLS, harapan lama sekolah (HLS) Kota Makassar juga cenderung naik dalam 14 tahun terakhir. Jika RLS menggambarkan lama sekolah yang ditempuh penduduk usia 25 tahun ke atas, HLS menggambarkan peluang lama sekolah yang bisa ditempuh penduduk di masa depan. Bagi Kota Makassar, butuh waktu yang cukup lama untuk menaikkan HLS satu poin. Tahun 2010, HLS Kota Makassar mencapai 13,71 tahun dan

mencapai . . .

mencapai angka 14 tahun pada tahun 2012. Untuk menaikkan ke 15 tahun, Kota Makassar butuh waktu empat tahun sehingga tercapai di tahun 2017 sebesar 15,18 tahun. Kota Makassar mengalami kesulitan menaikkan HLS ke angka 16, karena mulai tahun 2018 hingga 2023 (enam tahun) RLS Kota Makassar masih berkutat di angka 15 tahun.

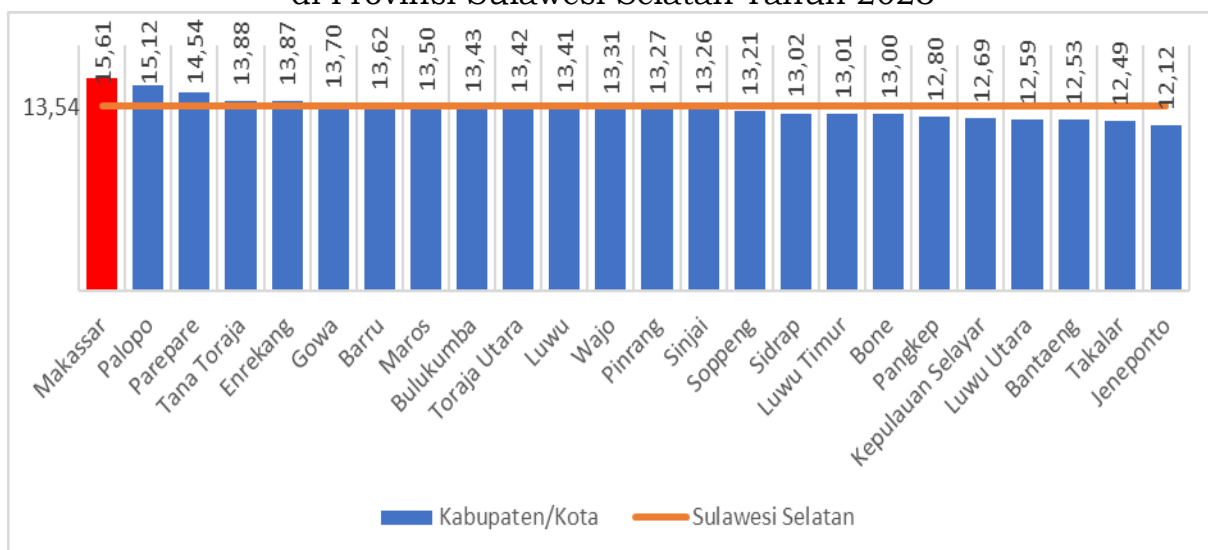
Grafik 2.142
Harapan Lama Sekolah Kota Makassar Tahun 2010-2023 (Tahun)



Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2023

Secara relatif, Kota Makassar memang menjadi daerah dengan HLS tertinggi di Sulawesi Selatan. Capaian 15,61 tahun menepati HLS Kota Makassar jauh berada di atas provinsi yang HLS-nya hanya 13,54 tahun. Sementara ada dua daerah yang angkanya mendekati Kota Makassar yaitu Kota Palopo dan Kota Parepare masing-masing 15,12 tahun dan 14,54 tahun. Kota Makassar yang memiliki HLS tertinggi di Sulawesi Selatan salah satunya disebabkan karena aksesibilitas pendidikannya relatif lebih baik dari banyak daerah lain, sebab fasilitas pendidikannya jauh lebih baik.

Grafik 2.143
Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023



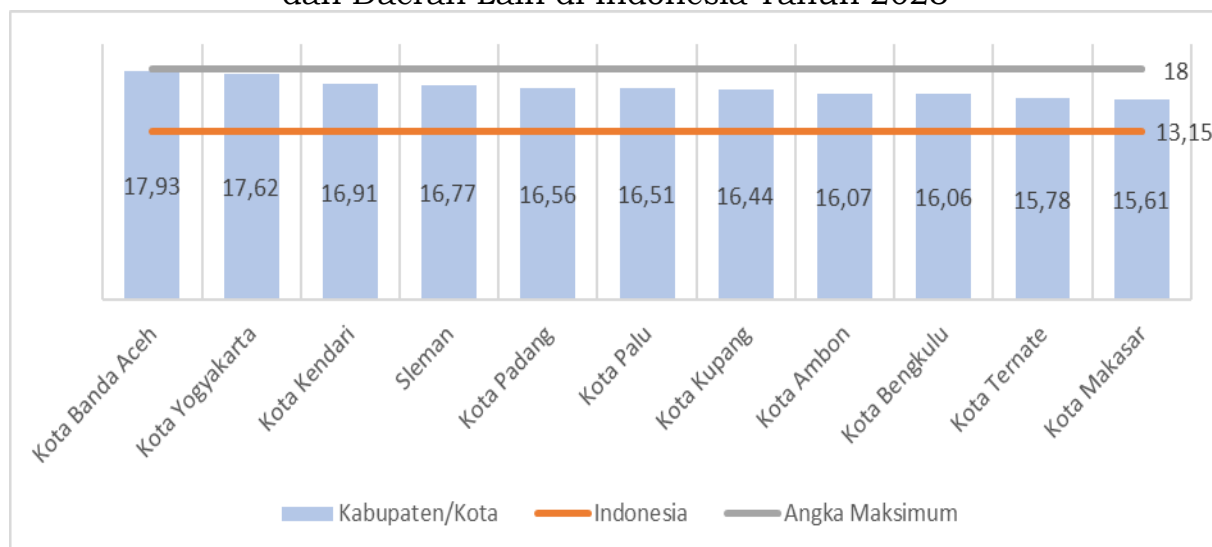
Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2023

Meski tertinggi di antara kabupaten/kota lainnya di Sulawesi Selatan, tapi dibandingkan secara nasional, HLS Kota Makassar sebenarnya masih relatif rendah, apalagi dikomparasi dengan kategori kota yang selevel dengan

Kota . . .

Kota Makassar. Secara nasional, capaian HLS Kota Makassar tahun 2023 hanya menempatkannya pada peringkat 15, dari 514 kabupaten/kota di Indonesia, menunjukkan masih ada 14 daerah lain yang punya HLS lebih tinggi dari Kota Makassar. Daerah yang HLS lebih tinggi dari Kota Makassar diantaranya Kota Banda Aceh, Kota Yogyakarta, Kota Kendari, Sleman, Kota Padang, Kota Palu, Kota Kupang, Kota Ambon, Kota Bengkulu, Kota Ternate, Kota Malang, Kota Langsa, Kota Mataram, dan Bantul

Grafik 2.144
Perbandingan Harapan Lama Sekolah Kota Makassar
dan Daerah Lain di Indonesia Tahun 2023



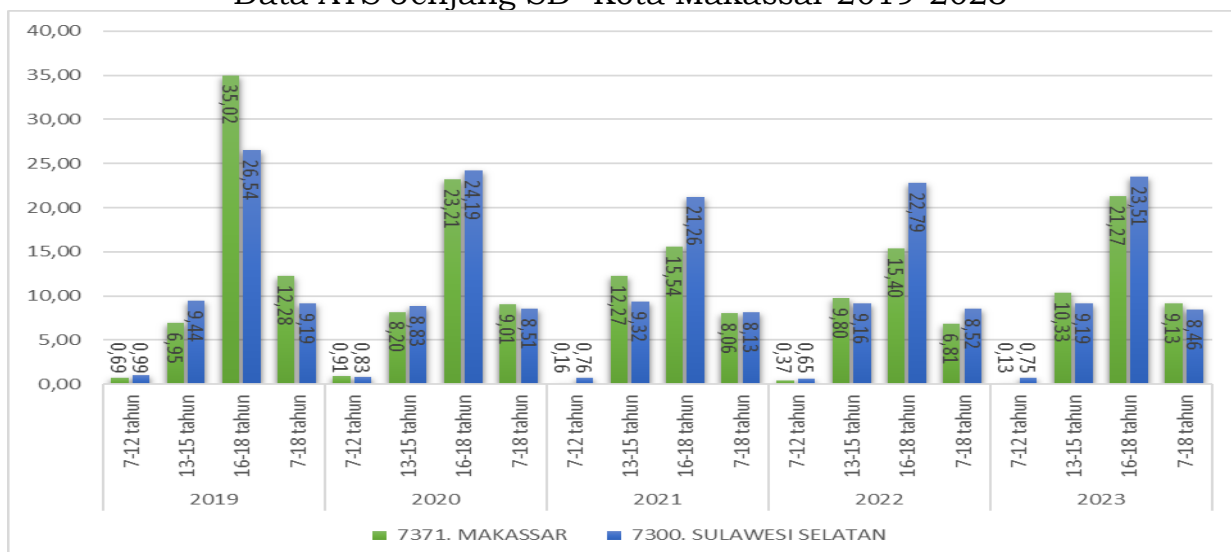
Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2023

Sama halnya dengan RLS, faktor yang mempengaruhi HLS juga beragam. Pertama, aksesibilitas pendidikan merupakan faktor utama yaitu apakah individu memiliki akses yang cukup terhadap sekolah dan infrastruktur pendidikan lainnya. Faktor ekonomi juga memainkan peran signifikan, karena biaya pendidikan, termasuk biaya sekolah, buku, dan seragam, dapat menjadi hambatan bagi keluarga dengan sumber daya terbatas. Faktor sosial dan budaya juga mempengaruhi, seperti norma-norma yang mengatur pernikahan, pekerjaan, atau tanggung jawab keluarga. Kualitas pendidikan, termasuk ketersediaan guru yang berkualitas dan kurikulum yang relevan, juga dapat mempengaruhi harapan lama sekolah, karena hal ini mempengaruhi motivasi dan kesiapan siswa untuk melanjutkan pendidikan mereka.

2.3.2.4. Anak Putus Sekolah

Berdasarkan data Anak Tidak Sekolah (ATS) Kota Makassar untuk jenjang sekolah dasar (SD) pada tahun 2021 yang sebesar 115 orang mengalami peningkatan di tahun 2022 sebanyak 78 anak dengan total jumlah sebesar 193 ATS, dan pada tahun 2023 mengalami penurunan dengan angka sebanyak 108 anak.

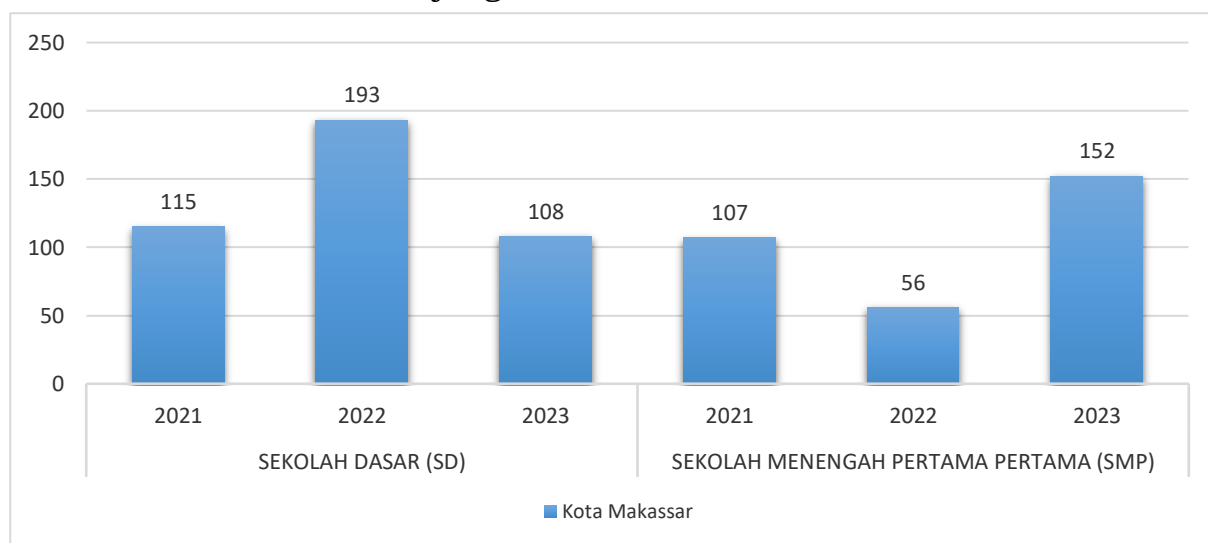
Grafik 2.145
Data ATS Jenjang SD Kota Makassar 2019-2023



Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2024

Sedangkan untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada tahun 2021 untuk anak tidak sekolah berjumlah 107 kemudian mengalami penurunan cukup banyak di tahun 2022 dengan jumlah 56 anak ATS dan pada tahun 2023 kembali mengalami peningkatan dengan jumlah sebesar 152 anak tidak sekolah di Kota Makassar.

Grafik 2.146
Data ATS Jenjang SMP Kota Makassar 2019-2023



Sumber: Portal Data Kemendikbud Ristek, Tahun 2022

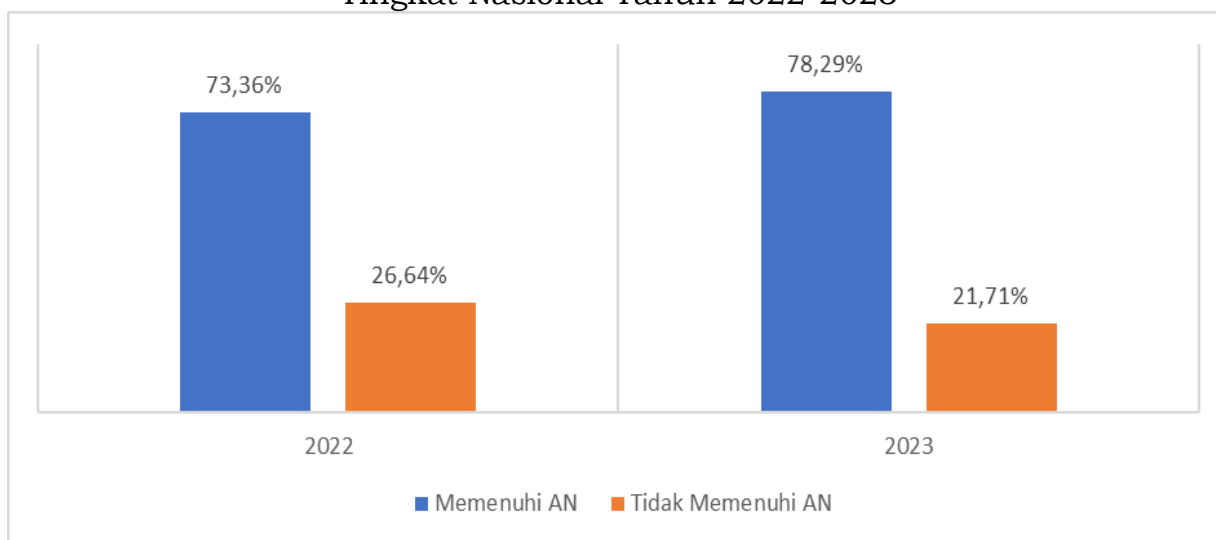
2.3.2.5. Persentase Satuan Pendidikan Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional Di Kab/Kota

Indonesia telah meraih banyak pencapaian pembangunan pendidikan diukur dengan berbagai indikator kuantitatif, misalnya angka partisipasi sekolah (APS). BPS mencatat, tahun 2023 APS usia 7-12 tahun sudah di angka 99,16%, 13-15 tahun berada di angka 96,1%. Kota Makassar sendiri memiliki APS 7-12 tahun sebesar 99,34% dan 93,88% untuk usia 13-15 tahun. Bank Dunia memberikan catatan kritis terhadap pencapaian pendidikan Indonesia yang bermasalah dalam kualitas pendidikan dengan menyebut bahwa sebagian besar siswa di Indonesia memang bersekolah tapi tidak belajar.

Ukuran kualitas pendidikan secara internasional adalah nilai PISA, namun Indonesia merumuskan indikator tersendiri yang cukup komprehensif dengan berbagai macam nilai indeks yang dimuat dalam rapor pendidikan. Rapor Pendidikan menampilkan kondisi satuan pendidikan berdasarkan data dari hasil asesmen dan survei-survei nasional yang melibatkan satuan pendidikan dan daerah. Rapor pendidikan pertama kali dipublikasi tahun 2021 dan terbaru tahun 2023. Tahun 2022, terdapat 73,36% satuan pendidikan yang menjadi kewenangan yang mencapai standar kompetensi minimum kemampuan literasi, sementara yang belum memenuhi kompetensi hanya 26,64%. Tahun 2023, satuan pendidikan yang memenuhi standar naik menjadi 78,29% dan yang belum memenuhi standar turun ke 21,71%.

Grafik 2.147

Persentase Satuan Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Kota Makassar yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Kemampuan Literasi Pada Asesmen Tingkat Nasional Tahun 2022-2023

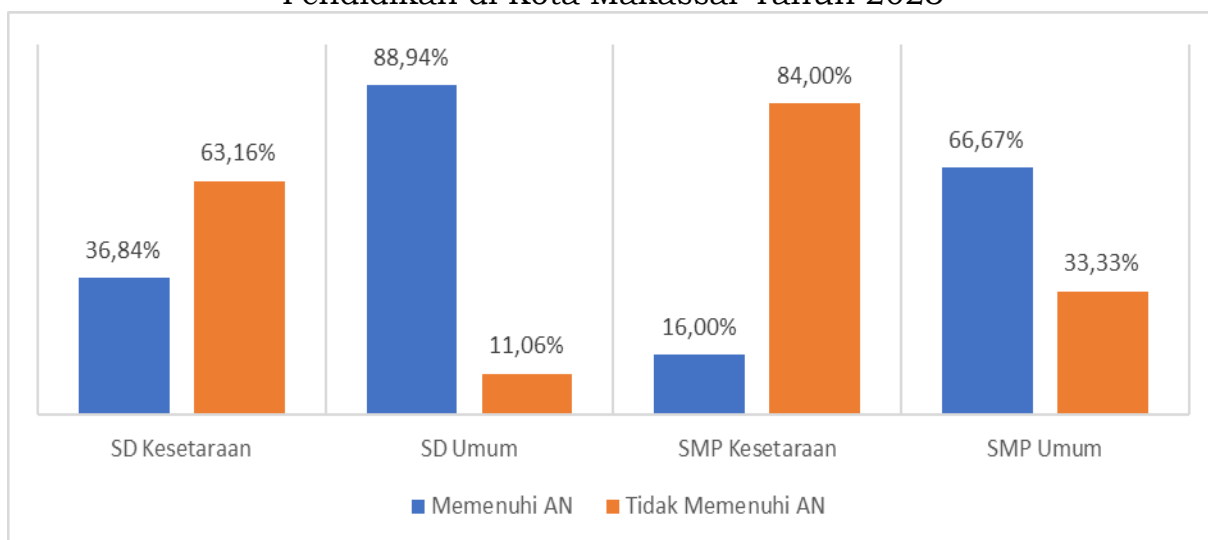


Sumber: Rapor Pendidikan (data diolah), Tahun 2024

Dari seluruh satuan pendidikan yang menjadi kewenangan pemerintah kota, satuan pendidikan SD umum yang paling besar proporsinya mencapai standar kompetensi minimum untuk kemampuan literasi. Tahun 2023, 88,94% SD umum di Kota Makassar memenuhi standar kompetensi minimum bidang literasi dan hanya 11,06% tidak memenuhi kompetensi minimum. Satuan pendidikan SMP kesetaraan yang paling rendah proporsinya, hanya 16% yang memenuhi standar kompetensi minimum, sementara yang tidak memenuhi mencapai 84%. SD kesetaraan juga menunjukkan proporsi serupa, dimana satuan pendidikan yang memenuhi standar hanya 36,84% dan yang tidak memenuhi mencapai 63,16%. SMP umum memiliki proporsi 66,67% untuk satuan pendidikan yang memenuhi kompetensi minimum kemampuan literasi dan yang tidak memenuhi hanya 33,33%.

Grafik 2.148

Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Kemampuan Literasi Pada Asesmen Tingkat Nasional Berdasarkan Satuan Pendidikan di Kota Makassar Tahun 2023

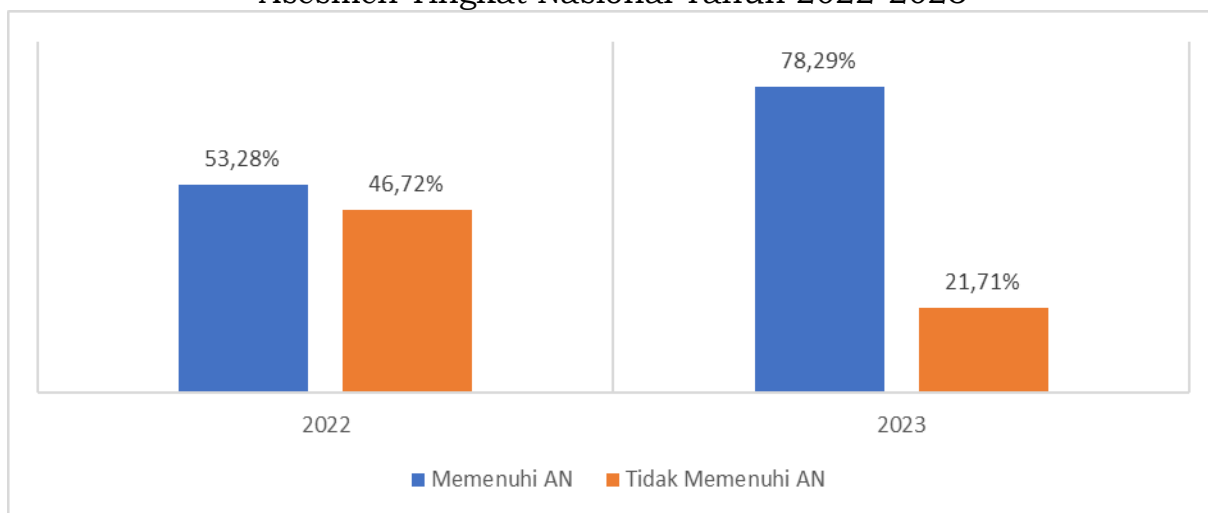


Sumber: Rapor Pendidikan (data diolah), Tahun 2024

Progres pencapaian persentase satuan pendidikan yang menjadi kewenangan Kota Makassar yang mencapai standar kompetensi minimum kemampuan numerasi juga cukup baik dalam dua tahun terakhir. Proporsi satuan pendidikan yang mencapai standar minimum kemampuan numerasi naik dari 53,28% atau setara dengan 398 satuan pendidikan pada tahun 2022 ke 78,29% atau 349 satuan pendidikan tahun 2023.

Grafik 2.149

Persentase Satuan Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Kota Makassar yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Kemampuan Numerasi Pada Asesmen Tingkat Nasional Tahun 2022-2023

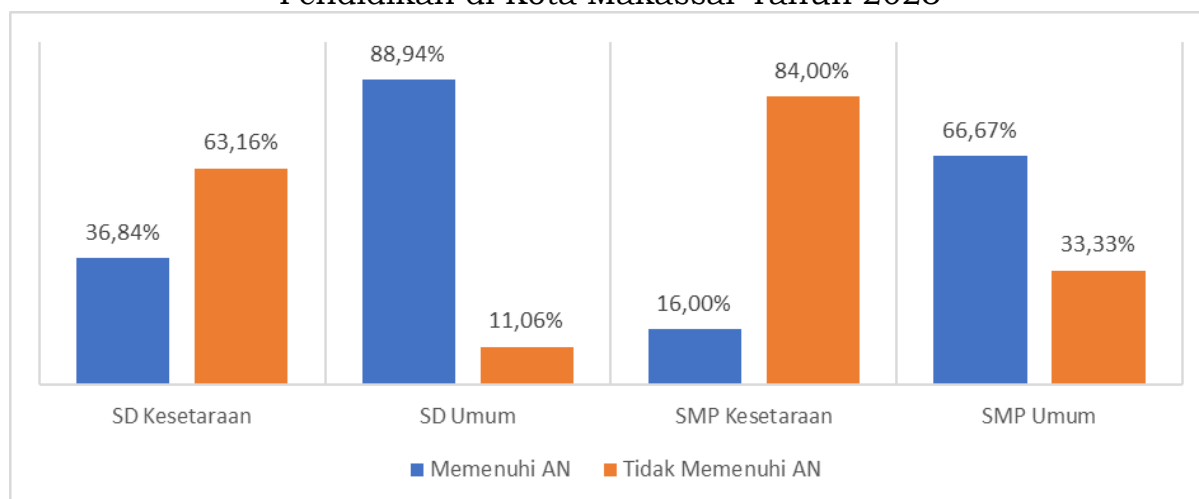


Sumber: Rapor Pendidikan (data diolah), Tahun 2024

Ada dua satuan pendidikan yang memiliki proporsi besar yang mencapai standar kompetensi yaitu SD umum dan SMP umum. Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum kemampuan numerasi pada asesmen tingkat nasional untuk satuan pendidikan SD umum mencapai 88,94% dan satuan pendidikan SMP umum 66,67%, sementara dua satuan pendidikan lain yaitu SD kesetaraan dan SMP kesetaraan lebih dominan tidak memenuhi standar minimum dengan proporsi masing-masing 63,16% dan 84,00% yang belum mampu memenuhi kompetensi umum.

Grafik 2.150

Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Kemampuan Numerasi Pada Asesmen Tingkat Nasional Berdasarkan Satuan Pendidikan di Kota Makassar Tahun 2023



Sumber: Rapor Pendidikan (data diolah), Tahun 2024

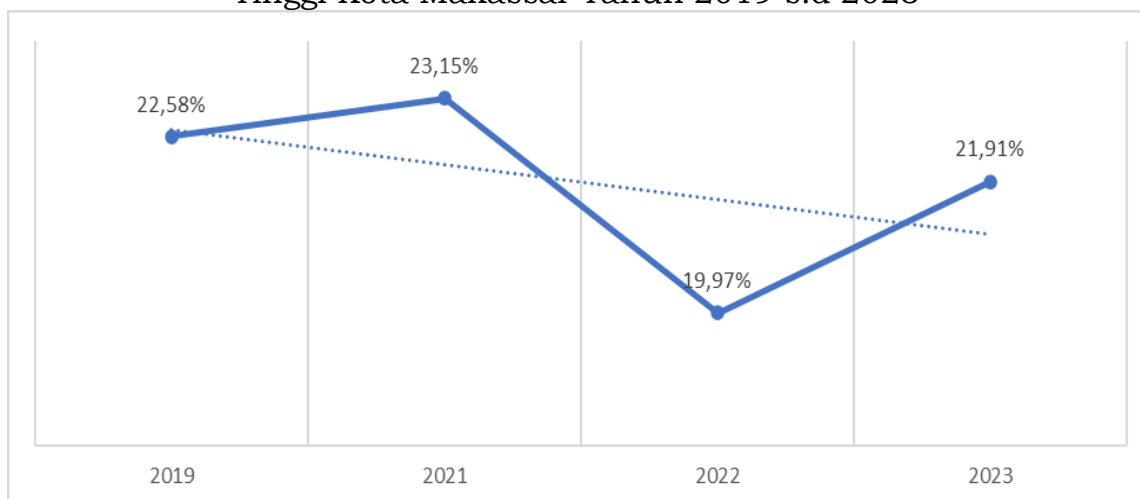
Meski persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum kemampuan literasi dan numerasi mengalami kenaikan di tahun 2023, namun yang belum memenuhi kompetensi juga masih cukup besar. Tim asesmen memberikan analisis akar masalah yang menyebabkan masih adanya satuan pendidikan di Kota Makassar yang belum memenuhi standar kompetensi minimum kemampuan literasi dan numerasi.

2.3.2.6. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun Ke Atas Yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi

Tahun 2019, ada 22,8% penduduk usia kerja di Kota Makassar yang berkualifikasi pendidikan tinggi atau setara 258.431 orang. Dari total penduduk usia kerja yang berkualifikasi pendidikan tinggi, 75,13% adalah angkatan kerja dan 24,87% bukan angkatan kerja. Dua tahun kemudian, proporsinya naik ke 23,15% atau setara 281.364 orang, menunjukkan bahwa jumlah penduduk usia kerja berkualifikasi tinggi Kota Makassar bertambah sebanyak 22.933 orang, 74,59% diantaranya adalah angkatan kerja dan sisanya bukan angkatan kerja. Tahun 2022, jumlah penduduk usia kerja berkualifikasi pendidikan tinggi di Kota Makassar turun sebanyak 35.582 orang sehingga totalnya menjadi 245.782 orang atau 19,97%. Penurunan terjadi pada penduduk usia kerja berkualifikasi pendidikan tinggi yang termasuk angkatan kerja dan bukan angkatan kerja masing-masing berkurang 21.382 orang dan 14.200 orang dari tahun sebelumnya. Tahun 2023, proporsinya kembali naik ke 21,91% atau 243.183 orang, namun masih relatif lebih rendah dibandingkan tahun 2019 dan 2021. Pada tahun 2023, jumlah penduduk usia kerja yang memiliki kualifikasi pendidikan tinggi hanya bertambah 2.599 orang, tapi jika dibandingkan pada kategori angkatan kerja dan bukan angkatan kerja, penambahan hanya terjadi pada kategori bukan angkatan kerja, sementara pada angkatan kerja terjadi penurunan penduduk usia kerja berkualifikasi pendidikan tinggi.

Grafik 2.151

Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi Kota Makassar Tahun 2019 s.d 2023



Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2023

Selain penurunan proporsi penduduk usia kerja berkualifikasi pendidikan tinggi, pemerintah daerah juga perlu mewaspadaai tingginya tingkat pengangguran terdidik atau pengangguran yang berasal dari perguruan tinggi. Tahun 2022, tercatat ada 6,28% dari total angkatan kerja berkualifikasi pendidikan tinggi belum mendapatkan pekerjaan atau menganggur. Persentase tersebut setara dengan jumlah 11.844 orang. Setahun kemudian, persentasenya naik ke 7,12% atau sebanyak 12.672 orang. Artinya, dari sisi persentase terjadi kenaikan 0,84%, sementara dari sisi jumlah, angkatan kerja yang berkualifikasi pendidikan tinggi yang menganggur bertambah sebanyak 828 orang.

Ada banyak faktor yang bisa menyebabkan angkatan kerja berpendidikan tinggi sulit mendapatkan pekerjaan, salah satunya adalah ketidaksesuaian antara keahlian/kompetensi yang diperoleh dari pendidikan tinggi dengan kebutuhan di pasar tenaga kerja atau disebut dengan *skill mismatch*. Seseorang bisa saja memiliki kualifikasi pendidikan tinggi, tapi seringkali tingkat pendidikan tidak selalu sejalan dengan skill/keahlian, bahkan lulusan diploma sekalipun. Di era pasar tenaga kerja saat ini, pendidikan hanya menjadi syarat administratif semata, tidak menentukan sepenuhnya mereka diterima oleh pemberi kerja. Era pasar tenaga kerja bergerak ke orientasi skill dan perlahan mulai tidak mementingkan kualifikasi pendidikan. Ini menjadi tantangan bagi pendidikan tinggi untuk terus menyesuaikan diri dengan perubahan. Faktor kedua yang juga umum terjadi adalah kesenjangan antara jumlah pencari kerja dan lowongan pekerjaan yang tersedia. Seiring bertambahnya penduduk sebagai akibat dari periode bonus demografi, Kota Makassar akan terus mengalami kenaikan angkatan kerja. Jika tidak diimbangi dengan peningkatan jumlah lowongan pekerjaan, khususnya pekerjaan yang membutuhkan kualifikasi pendidikan tinggi, maka pasti pengangguran terdidik bertambah banyak.

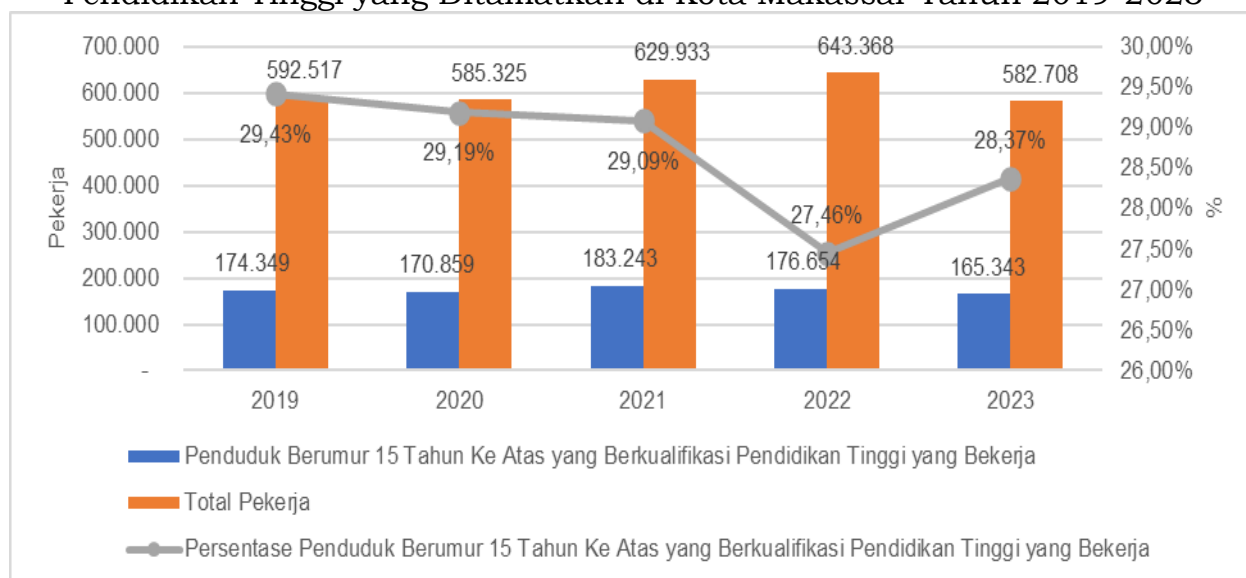
2.3.2.7. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Pendidikan Tinggi yang Ditamatkan

Data BPS Kota Makassar mencatat, kurang dari 1/3 pekerja di Kota Makassar berkualifikasi pendidikan tinggi. Dalam lima tahun terakhir, persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja menurut pendidikan tinggi yang ditamatkan di Kota Makassar cenderung turun. Tahun 2019, dari total pekerja di Kota Makassar, 29,43% diantaranya berkualifikasi pendidikan tinggi (diploma dan universitas) atau setara dengan 174.349 orang. Tiga tahun

selanjutnya . . .

selanjutnya, persentasenya turun konsisten, mulai dari 29,19% tahun 2020, kemudian 29,09% tahun 2021, dan paling rendah di tahun 2022 yaitu 27,46%. Penurunan tersebut disebabkan karena jumlah pekerja berkualifikasi pendidikan tinggi menurun, sementara jumlah pekerjanya naik. Tahun 2023, terjadi kenaikan cukup tinggi hingga mencapai 28,37%, namun jumlahnya menurun, hanya 165.343 orang.

Grafik 2.152
 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Pendidikan Tinggi yang Ditamatkan di Kota Makassar Tahun 2019-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2023

Ada banyak faktor yang bisa menyebabkan menurunnya persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja menurut pendidikan tinggi yang ditamatkan di Kota Makassar. Pertama, penduduk yang berusia 15 tahun ke atas yang menempuh pendidikan tinggi yang mengalami penurunan sehingga secara langsung tentu berpengaruh terhadap jumlah pekerja berkualifikasi pendidikan tinggi. Menurut data Disdukcapil Kota Makassar, tahun 2023 proporsi penduduk yang berkualifikasi masih relatif rendah, hanya 14,33% dari total penduduk atau setara dengan 211.308 jiwa. Angka itu menunjukkan bahwa dari 100 orang penduduk berusia 15 tahun ke atas di Kota Makassar, hanya 14 orang yang berpendidikan tinggi. Sebagian besar mereka berpendidikan Diploma IV/Strata I yaitu sebanyak 153.416 jiwa atau mencakup 72,60% dari total penduduk berpendidikan tinggi, sisanya berpendidikan D I/II, Akademi/Diploma III/S.Muda, Strata II, dan Strata III. Jika diidentifikasi berdasarkan kecamatan, sebagian besar berada di Kecamatan Rappocini, Tamalanrea, Manggala, Biringkanaya, Panakkukang, Tamalate, Mamajang, dan Ujung Pandang.

Tabel 2.37
 Jumlah Penduduk yang Berpendidikan Tinggi di Kota Makassar Tahun 2023

Kecamatan	D I/II	Akademi/ Diploma III	Diploma IV/Strata I	Strata II	S III	Total	Total Penduduk	%
Mariso	189	1.037	4.160	353	37	5.776	58.730	9,83%
Mamajang	196	1.310	5.799	608	62	7.975	58.293	13,68%
Makassar	210	1.256	6.007	514	54	8.041	82.237	9,78%
Ujung Pandang	87	491	2.510	245	28	3.361	24.851	13,52%
Wajo	58	460	2.950	194	17	3.679	29.503	12,47%
Bontoala	112	692	3.947	337	48	5.136	55.201	9,30%

Tallo	236	1.647	7.075	706	160	9.824	148.055	6,64%
Ujung Tanah	66	366	1.622	114	9	2.177	36.745	5,92%
Panakkukang	421	2.866	14.984	1.761	266	20.298	144.204	14,08%
Tamalate	604	3.541	18.240	2.448	277	25.110	188.432	13,33%
Biringkanaya	922	6.188	25.967	3.141	291	36.509	215.820	16,92%
Manggala	577	4.072	20.937	2.648	326	28.560	160.466	17,80%
Rappocini	721	4.410	23.878	3.493	437	32.939	150.613	21,87%
Tamalanrea	362	2.981	15.192	2.561	621	21.717	106.262	20,44%
Kepulauan Sangkarrang	16	37	148	5	-	206	14.981	1,38%
Total	4.777	31.354	153.416	19.128	2.633	211.308	1.470.261	14,33%

Sumber: Disdukcapil Kota Makassar, Tahun 2024

Data dari Disdukcapil mengkonfirmasi bahwa jumlah penduduk yang berkualifikasi pendidikan tinggi di Kota Makassar relatif rendah. Faktor kedua, bisa disebabkan karena jumlah penduduk angkatan kerja berkualifikasi pendidikan tinggi yang menganggur mengalami kenaikan. Data BPS Kota Makassar juga mengindikasikan hal tersebut. Tahun 2023, persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi yang tidak bekerja/menganggur di Kota Makassar mengalami kenaikan dari 11.844 orang di tahun 2022 menjadi 12.672 orang. Angka itu setara dengan 18,33% dari total pengangguran Kota Makassar. Kenaikan pengangguran berkualifikasi pendidikan tinggi di Kota Makassar mesti menjadi perhatian pemerintah kota ke depan. Kenaikan pengangguran terdidik mengindikasikan bahwa masih terdapat *mismatch* antara kebutuhan pemberi kerja dan keahlian/skill yang dimiliki oleh pencari kerja. Tingginya pengangguran terdidik juga mengindikasikan bahwa pasar tenaga kerja di Kota Makassar sebagian besar hanya membutuhkan pekerja tidak terdidik, dengan jenis pekerjaan ber-upah rendah.

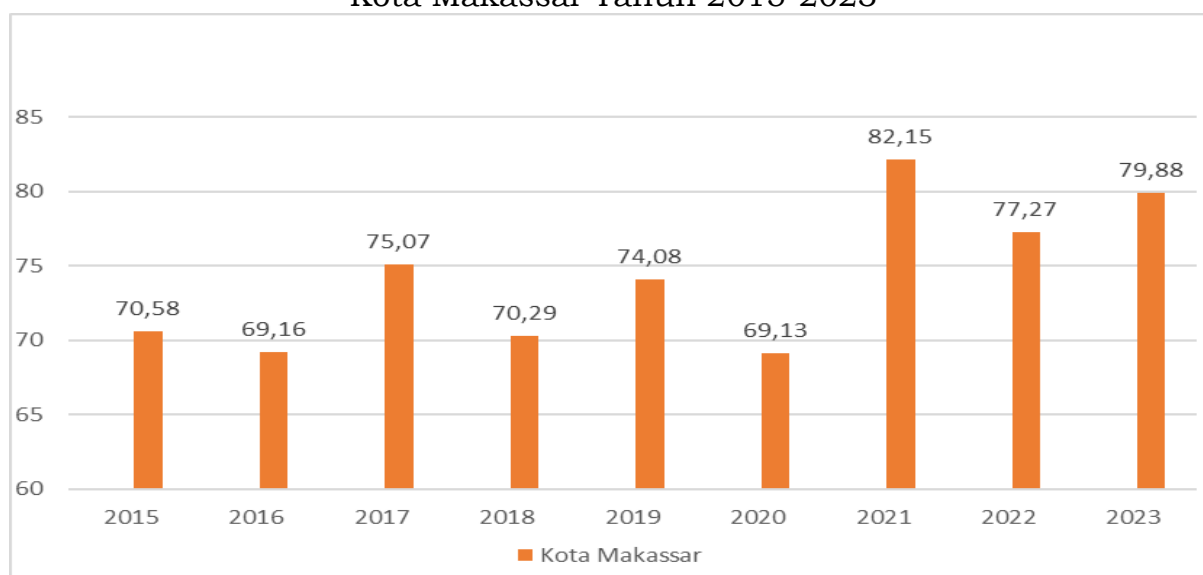
2.3.3. Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah

2.3.3.1. Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan

Data grafik menunjukkan akses hunian layak dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2023. Dimana capaian pada tahun 2023 sebesar 79,88% masih dibawah dari target RPJMD yaitu 100%. Penurunan akses hunian layak dipengaruhi oleh kurangnya penanganan terhadap peningkatan kualitas rumah tidak layak huni. Selain itu juga dipengaruhi oleh bertambahnya atau munculnya kawasan kumuh yang baru akibat pembangunan rumah dan sarana prasarana yang tidak memenuhi standar yaitu dari sisi ketahanan bangunan, kecukupan luas, akses air minum layak, dan akses sanitasi layak.

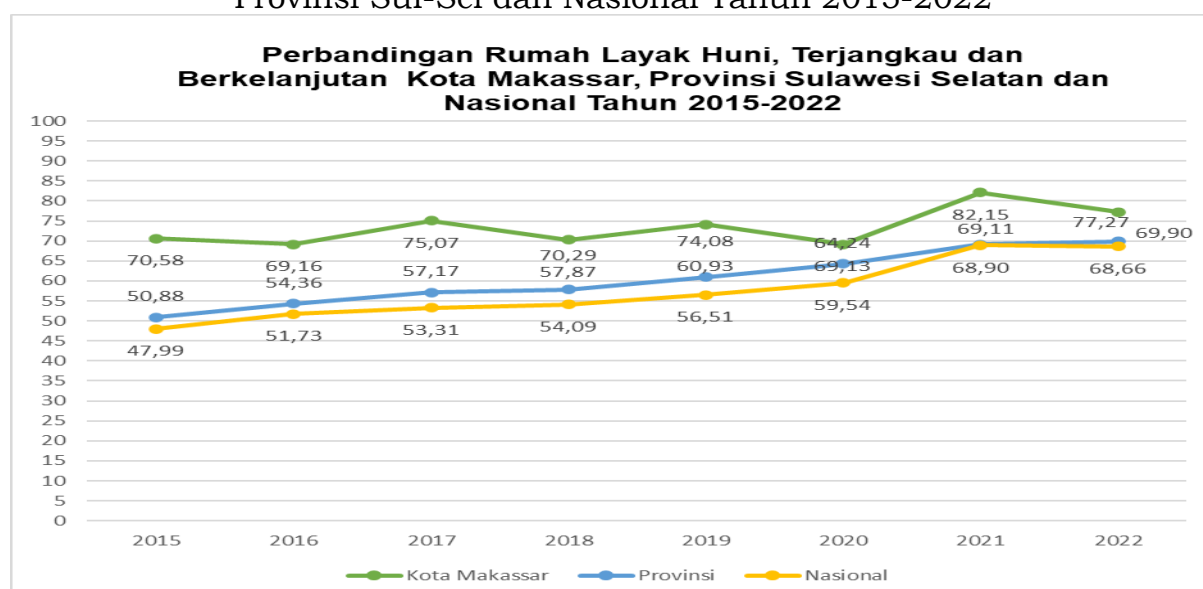
Peningkatan akses hunian layak secara umum dipengaruhi oleh adanya intervensi pemerintah. Pada tahun 2020- 2021 terjadi kenaikan yang cukup signifikan disebabkan adanya kebijakan pengembang membangun beberapa kawasan perumahan dan rumah swadaya oleh masyarakat. Kemudian pada tahun 2022-2023 terjadi kenaikan yang disebabkan adanya bantuan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat terkait penanganan kawasan kumuh terintegrasi melalui dana DAK.

Grafik 2.153
Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan
Kota Makassar Tahun 2015-2023



Sumber: SUSENAS, data diolah BAPPENAS dan BPS, Tahun 2024

Grafik 2.154
Perbandingan Rumah Layak Huni Kota Makassar,
Provinsi Sul-Sel dan Nasional Tahun 2015-2022



Sumber: SUSENAS, data diolah BAPPENAS dan BPS, Tahun 2024

Indikator hunian layak berdasarkan standar Kementerian PUPR adalah terdiri dari 4 komponen yaitu (1) ketahanan bangunan yang meliputi atap, dinding dan lantai, (2) kecukupan luas > 7m² per orang, (3) akses air minum layak, dan (4) akses sanitasi layak. Rumah tangga yang menempati hunian layak berdasarkan komponen tahun 2018-2023 ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 2.38
Rumah Tangga Akses Hunian Layak, terjangkau dan Berkelanjutan
Kota Makassar Tahun 2018-2023 Berdasarkan Komponen

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1 Ketahanan Bangunan (%)						
a. Atap	95,96	94,01	97,13	95,71	96,33	96,79
b. Dinding	88,91	100	92,25	100	96,27	96,27

c. Lantai . . .

	c. Lantai	97,99	100	98,48	99,95	99,67	99,54
2	Luas Lantai per Kapita > 7m ² (%)	84,09	83,04	82,42	88,24	87,64	87,52
3	Akses Air Minum Layak (%)	67,16	61,30	66,38	99,58	98,07	98,74
4	Akses Sanitasi Layak (%)	99,06	95,17	95,26	97,38	99,92	99,61

Sumber : SUSENAS (data diolah), Tahun 2024

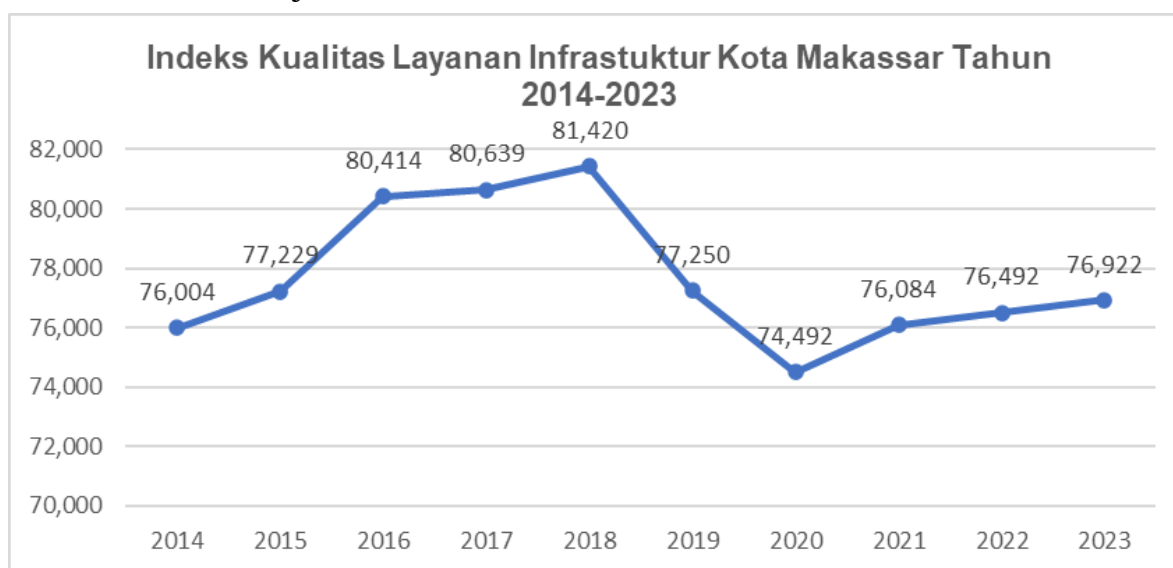
Dari tabel terlihat bahwa pada tahun 2023 komponen rumah layak huni, terjangkau dan berkelanjutan yang terdiri dari ketahanan bangunan yang terdiri dari atap genteng dan seng mencapai 96, 79% dinding yang terdiri dari tembok, plesteran anyaman bambu, kayu sebesar 96, 77% dan lantai yang terdiri dari marmer, keramik, teraso, papan dan bambu sebesar 99,54%. Luas lantai per kapita > 7m² 87,52%. Akses air minum layak 98,74% dan akses sanitasi layak 99,61%.

2.3.3.2. Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur

Nilai Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 mengalami kenaikan rata-rata 1,35 poin. Sementara tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 capaiannya berfluktuasi disebabkan adanya beberapa komponen yaitu penduduk berakses air minum, rumah tinggal bersanitasi, sampah yang tertangani dan area Kawasan kumuh yang berfluktuasi. Untuk komponen jalan kota dengan kondisi baik mengalami tren peningkatan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2023. Hal ini disebabkan adanya kebijakan Pemerintah Kota dalam merespon masyarakat terkait besarnya kebutuhan akan sarana dan prasarana jalan, baik melalui usulan Musrenbang maupun usulan pokir.

Grafik 2.155

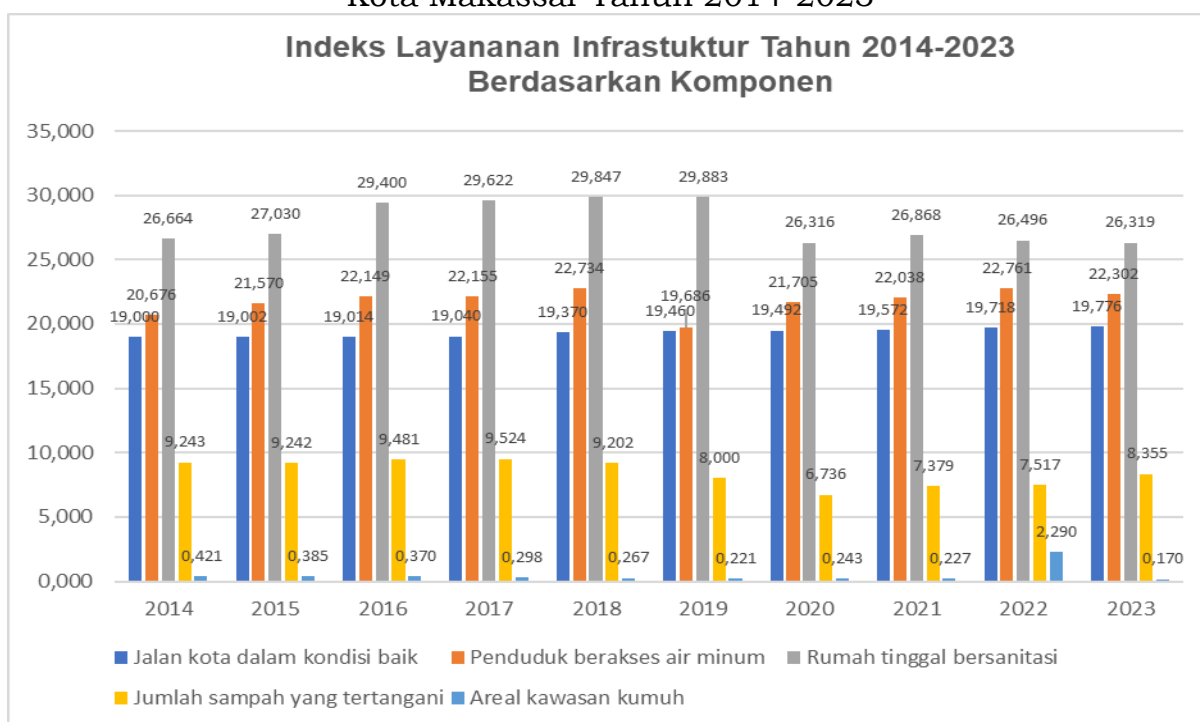
Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur Kota Makassar Tahun 2014-2023



Sumber: Bappeda Kota Makassar, Tahun 2023 (data diolah)

Dari Grafik terlihat pada tahun 2020 terjadi penurunan nilai indeks yang signifikan. Hal ini dipengaruhi oleh turunnya jumlah sampah yang tertangani dan jumlah penduduk yang terakses air minum. Hingga tahun 2023, Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur di kota makassar berada pada angka 76,922. Capaian indeks Kualitas Layanan Infrastruktur sangat dipengaruhi oleh komponen pembentuknya terutama komponen sanitasi dan air minum seperti tertera pada grafik berikut:

Grafik 2.156
Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur Berdasarkan Komponen Pembentuk Kota Makassar Tahun 2014-2023



Sumber: Bappeda Kota Makassar (data diolah), Tahun 2023

Untuk komponen jalan kota dengan kondisi baik mengalami tren peningkatan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2023. Penyelenggaraan jalan di Kota Makassar meliputi jalan nasional, jalan provinsi serta jalan kota. Dari 1.593,46 km panjang jalan kota 98,88% berada pada kondisi baik dan 1,12% pada kondisi rusak ringan maupun rusak berat.

Penyediaan air minum di Kota Makassar dilayani oleh Perumda Air Minum mencakup 15 wilayah Kecamatan termasuk sebagian masyarakat di wilayah kepulauan. Akses air minum penduduk Kota Makassar hingga tahun 2023 sebesar 74,34%. Masih terdapat sekitar 25,66% wilayah yang belum memiliki akses terhadap layanan air minum berkualitas

Rumah Tinggal bersanitasi didasarkan pada jumlah rumah yang menggunakan septictank atau ipal komunal yang tersebar pada 15 Kecamatan di Kota Makassar. pada tahun 2023 dari 279.975 rumah tinggal yang ada di Kota Makassar, 88,66% yang berakses sanitasi. Untuk pemenuhan SPM bidang sanitasi Pemerintah melalui dana APBN maupun APBD mendukung melalui beberapa program nasional. Dengan adanya kolaborasi pendanaan diharapkan adanya percepatan semua Kelurahan ODF (*Open Defecation Free*).

Sistem pelayanan persampahan di Kota Makassar dilaksanakan oleh masing-masing Kecamatan di bawah koordinasi Dinas Lingkungan Hidup. Timbulan sampah yang tertangani dihitung berdasarkan volume sampah yang masuk ke TPA Tamangapa selama setahun. Dari 376.707,41 ton timbulan sampah pada tahun 2023, 83, 55% yang dapat tertangani.

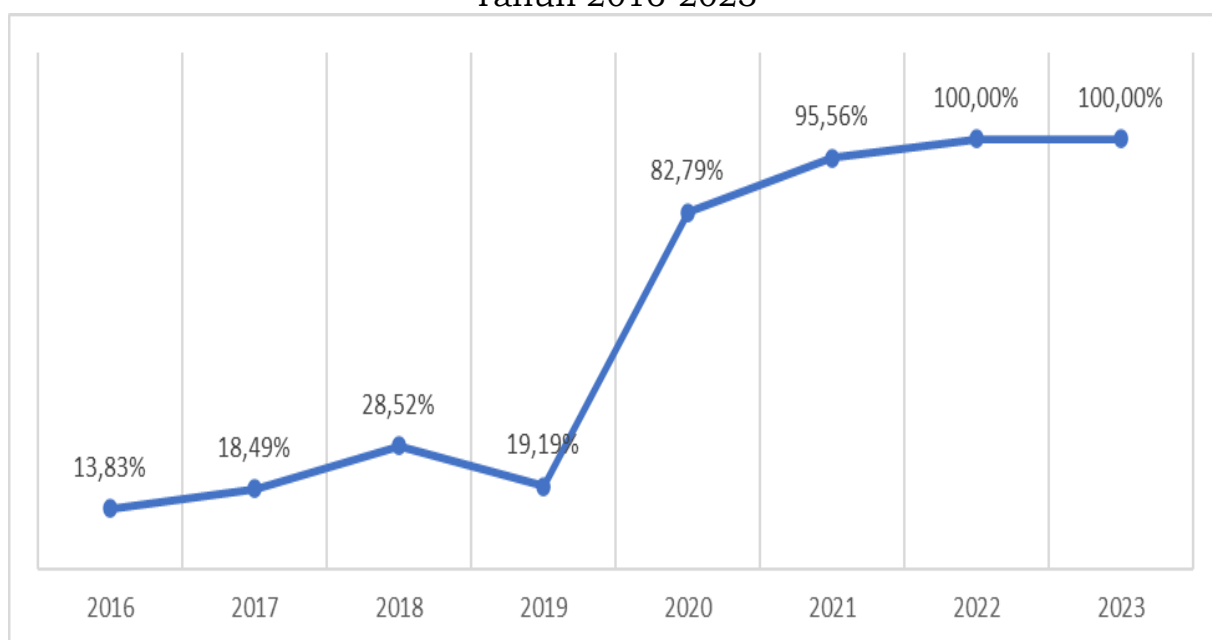
Kawasan Kumuh di Kota Makassar tersebar pada beberapa Kecamatan termasuk Kecamatan Kepulauan Sangkarrang. Indikator Kawasan Kumuh adalah keteraturan bangunan, jalan lingkungan, akses air minum, akses air limbah, drainase lingkungan, penanganan persampahan dan proteksi kebakaran. Berdasarkan ketujuh indikator tersebut kawasan kumuh dikelompokkan atas atas kumuh berat, kumuh sedang dan kumuh ringan. Dari 17.685,2 ha luas Kota Makassar, masih terdapat Kawasan kumuh seluas 299,36 ha pada tahun 2023.

2.3.4. Daya Saing Iklim Investasi

2.3.4.1. Persentase Gangguan Ketertiban Umum yang Dapat Diselesaikan

Selama tahun 2016 hingga 2023, kinerja penyelesaian gangguan ketertiban umum terus membaik. Tahun 2016 sampai 2019, persentase gangguan ketertiban umum yang dapat diselesaikan sempat berada di angka cukup rendah, hanya 13,83%, 18,49%, 28,52%, dan 19,19%. Tahun 2020 terjadi lonjakan signifikan menjadi 82,79% dan terus meningkat hingga mencapai angka 100% di tahun 2022 dan 2023. Angka tersebut menunjukkan bahwa pemerintah kota berhasil menyelesaikan semua gangguan ketertiban umum, terutama pada tahun 2020 hingga 2022, periode dimana Kota Makassar berhadapan dengan pandemi Covid-19. Pada periode ini ada banyak aturan yang dikeluarkan pemerintah kota, salah satunya adalah pembatasan mobilitas yang banyak dilanggar oleh masyarakat.

Grafik 2.157
Persentase Gangguan Ketertiban Umum yang Dapat Diselesaikan
Tahun 2016-2023

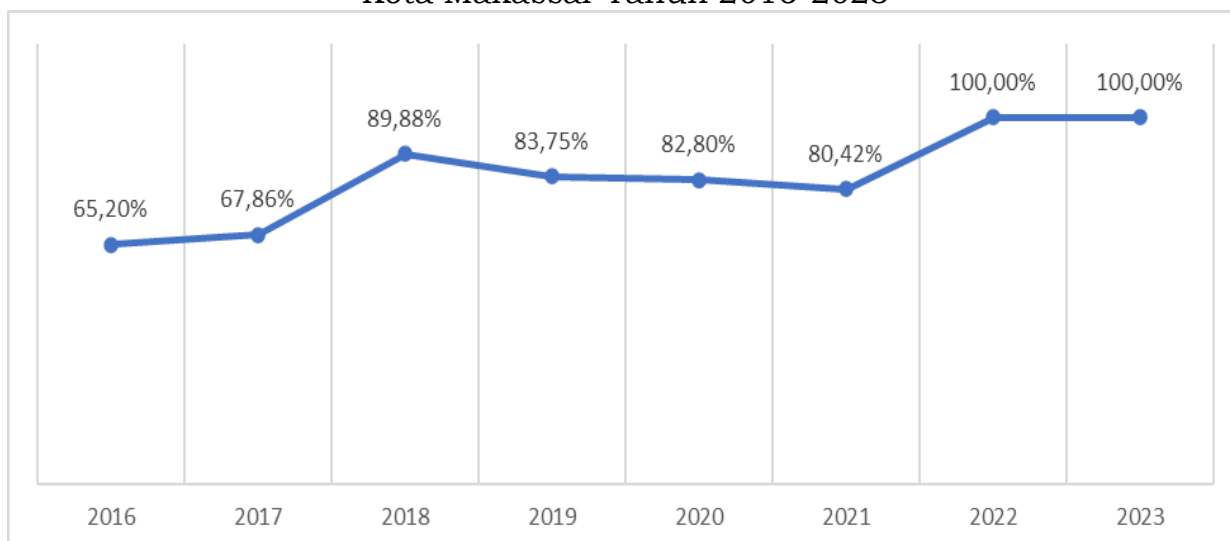


Sumber: Satpol PP Kota Makassar, Tahun 2023

2.3.4.2. Persentase Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang Ditegakkan

Selama delapan tahun terakhir, pemerintah Kota Makassar menunjukkan kinerja positif dalam hal penegakan hukum. Penegakan hukum yang dimaksud dalam konteks ini adalah penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Tahun 2016 hingga 2018, persentase peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang ditegakkan di Kota Makassar mengalami kenaikan, dari 65,20% ke 67,86%, dan kemudian menjadi 89,88%. Tiga tahun selanjutnya, angkanya turun berturut-turut, 83,75% tahun 2019 ke 82,80% tahun 2020, dan di tahun 2021 berada di angka 80,42%. Tahun 2022 dan 2023 menjadi kinerja terbaik pemerintah kota dalam penegakan hukum karena di dua tahun ini angkanya sudah mencapai 100%.

Grafik 2.158
Persentase Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang Ditegakkan Kota Makassar Tahun 2016-2023



Sumber: Satpol PP Kota Makassar, Tahun 2023

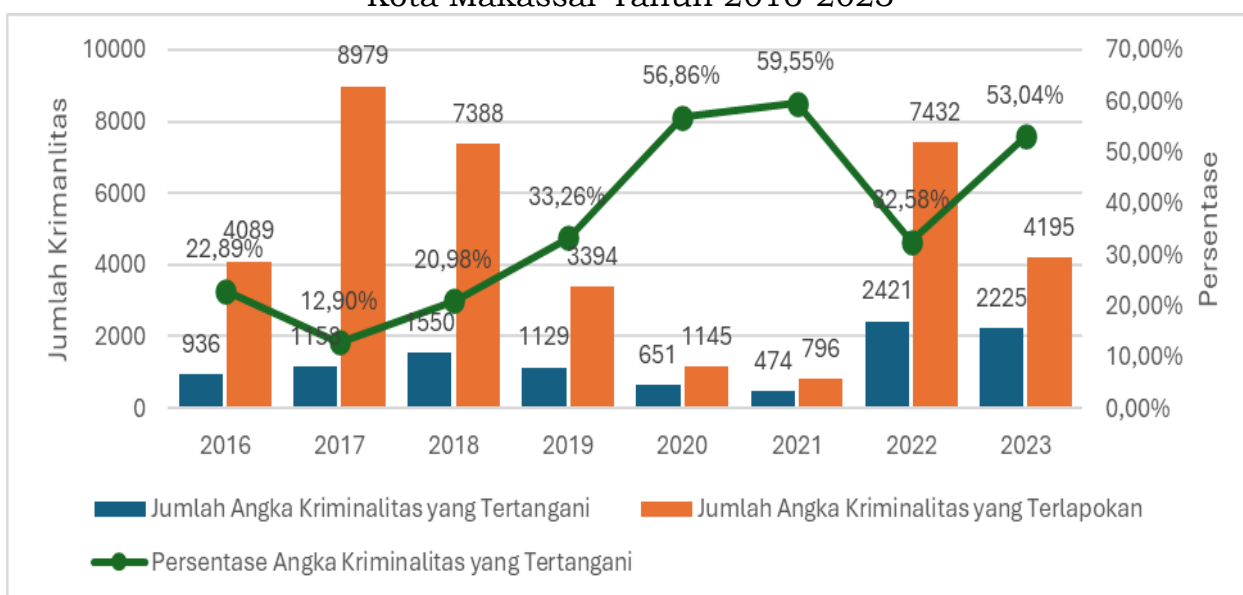
Kemampuan pemerintah kota mencapai kinerja terbaiknya dalam menegakkan hukum disebabkan oleh banyak faktor. Penegakan hukum yang efektif dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang saling terkait, termasuk keberadaan institusi hukum yang kuat, independen, dan transparan, serta keberadaan aturan yang jelas dan dapat diterapkan secara konsisten. Selain itu, faktor seperti tingkat korupsi, keadilan sosial, akses terhadap sistem peradilan, serta dukungan masyarakat terhadap penegakan hukum juga turut berperan. Faktor ekonomi, seperti tingkat pengangguran dan ketidaksetaraan ekonomi, juga dapat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum, karena ketidakstabilan ekonomi seringkali memicu kegiatan ilegal atau gangguan.

2.3.4.3. Persentase Tindak Kriminal yang Ditangani

Tahun 2016, dari 4.089 kasus atau tindakan kriminal yang dilaporkan ke kantor kepolisian, hanya 936 kasus yang berhasil ditangani atau hanya 22,89 persen, angkanya sempat menurun ke 12,90 persen tahun 2017, namun kembali naik di tahun 2018 menjadi 20,98 persen. Penurunan persentase angka kriminalitas yang ditangani turun di tahun 2017 karena jumlah kasus yang dilaporkan naik signifikan menjadi 8.979 kasus, meski jumlah kasus yang berhasil ditangani juga naik jadi 1.158 kasus. Tahun 2018, jumlah kasus yang berhasil ditangani bertambah jadi 1.550 kasus, sedangkan total kasus yang dilaporkan turun ke 7.388 kasus. Kenaikan persentase angka kriminalitas yang ditangani di Kota Makassar berlangsung tiga tahun berturut-turut yaitu di tahun 2019, 2020, dan 2021, masing-masing 33,26 persen, 56,86 persen, dan 59,55 persen. Sebab utamanya karena penurunan jumlah kasus yang dilaporkan. Jumlah kasus yang dilaporkan turun tajam ke 3.394 kasus tahun 2019 dan 1.145 kasus tahun 2020, disaat yang sama kasus yang berhasil ditangani juga turun, hanya 1.129 kasus tahun 2019 dan 651 kasus di tahun 2020, sehingga kenaikan persentase angka kriminalitas yang ditangani bukan disebabkan kinerja penanganan kasus, tapi karena penurunan pelaporan kasus. Saat jumlah kasus yang berhasil ditangani kembali meningkat di tahun 2022 2.421 kasus, persentase angka kriminalitas yang ditangani justru turun ke 32,58 persen karena kasus yang dilaporkan juga mengalami kenaikan signifikan ke 7.432 kasus. Setahun kemudian, baik kasus yang dilaporkan dan ditangani sama-sama menurun, tapi penurunan kasus yang ditangani lebih rendah sehingga persentase angka kriminalitas yang ditangani di Kota Makassar kembali naik jadi 53,04 persen.

Grafik 2.159 . . .

Grafik 2.159
 Persentase Tindak Kriminal yang Ditangani
 Kota Makassar Tahun 2016-2023



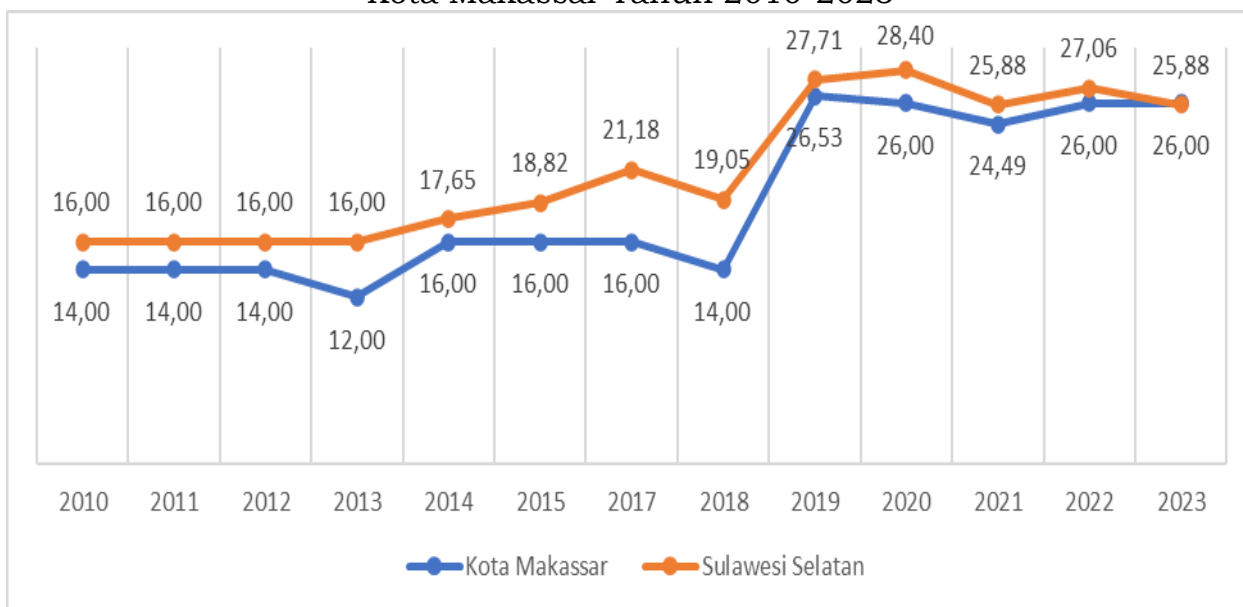
Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Tahun 2023

Secara umum, ada beberapa faktor yang bisa menjadi penyebab tingginya kasus kriminal yang tidak terselesaikan di Kota Makassar, satu diantaranya keterbatasan sumberdaya. Pihak berwenang dalam menangani sebuah kasus, sering kali diperhadapkan dengan keterbatasan sumber daya, termasuk jumlah personel polisi, peralatan investigasi, dan anggaran. Berdasarkan data Polrestabes Makassar, kasus kriminalitas masih tinggi, tahun 2023 angkanya mencapai 4.195 kasus. Dari seluruh kasus kriminalitas yang dilaporkan, dua kasus yang paling banyak adalah pencurian dan penganiayaan. Kasus pencurian yang dilaporkan tahun 2023 mencapai 1.972 kasus atau mencakup 47,01 persen dari total kasus yang dilaporkan dan kasus penganiayaan sebanyak 1.358 kasus atau setara 32,37 persen dari total kasus. Jika diakumulasi kasus penganiayaan dan pencurian, angkanya mencapai 3.330 kasus atau 79,38 persen dari laporan kasus. Kasus lain yang angkanya masih mencapai ratusan adalah penipuan dan Narkoba. Laporan masuk untuk kasus penipuan tahun 2023 mencapai 398 kasus atau 9,49 persen dan kasus Narkoba sebanyak 374 kasus atau 8,92 persen.

2.3.4.4. Persentase Perempuan Terpilih Terhadap Total Anggota DPRD

Di Kota Makassar, persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD dalam 14 tahun terakhir cenderung naik, terutama di tahun 2019 hingga 2023. Selama tahun 2010 hingga 2018, Persentase Perempuan Terpilih Terhadap Total Anggota DPRD di Kota Makassar masih berada pada rentang 12-16%. Kenaikan signifikan terjadi di tahun 2019 menjadi 26,53% dan relatif stabil hingga tahun 2023 berada di 26%. Walaupun cenderung naik, tapi angka Kota Makassar masih relatif lebih rendah dibandingkan provinsi. Kota Makassar bisa melampaui provinsi baru di tahun 2023 saja.

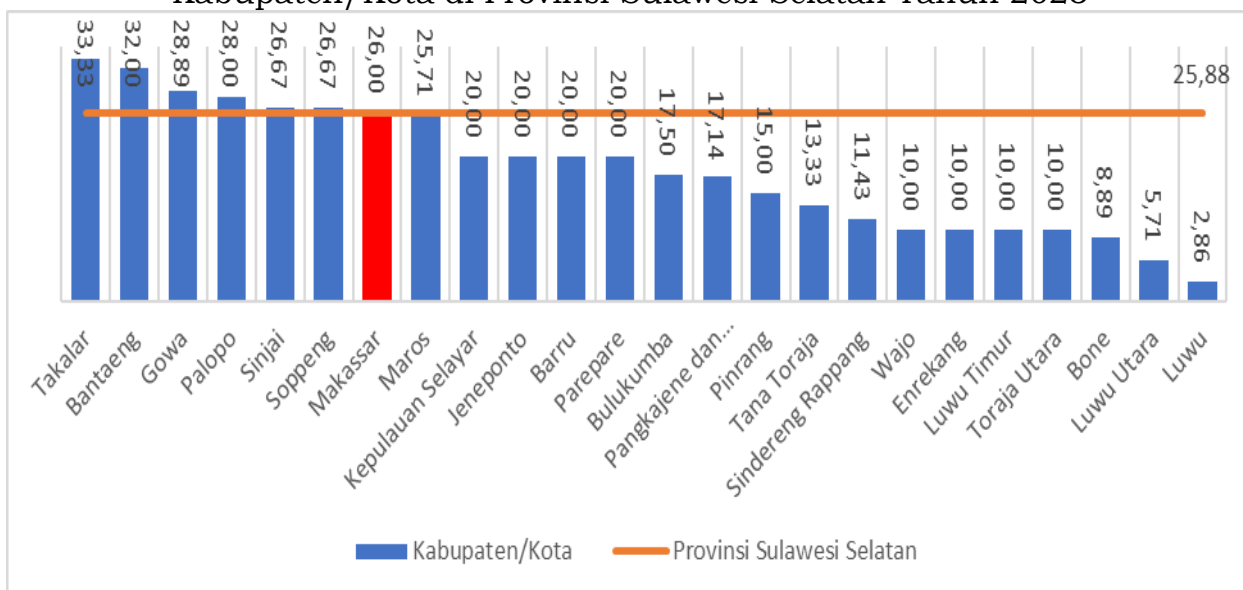
Grafik 2.160
 Persentase Perempuan Terpilih Terhadap Total Anggota DPRD
 Kota Makassar Tahun 2010-2023



Sumber: Sekretariat DPRD Kota Makassar, Tahun 2024

Jika dikomparasi dengan daerah lain, persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Kota Makassar masih lebih rendah dibandingkan Takalar, Bantaeng, Gowa, Palopo, Sinjai, dan Soppeng di tahun 2023. Keenam daerah ini masing-masing memiliki Persentase Perempuan Terpilih Terhadap Total Anggota DPRD 33,33%, 32,00%, 28,89%, 28,00%, 26,67%, dan 26,67%.

Grafik 2.161
 Persentase Perempuan Terpilih Terhadap Total Anggota DPRD Berdasarkan
 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023



Sumber: Sekretariat DPRD Kota Makassar, Tahun 2024

Keterlibatan perempuan di parlemen masih rendah disebabkan oleh berbagai faktor struktural, kultural, dan institusional yang menghambat partisipasi mereka. Secara struktural, perempuan seringkali menghadapi hambatan akses terhadap sumber daya politik dan ekonomi yang diperlukan untuk mencalonkan diri. Faktor kultural seperti stereotip gender yang meremehkan kemampuan perempuan dalam politik dan mengutamakan peran domestik juga memperburuk kondisi ini. Di banyak masyarakat, masih ada anggapan bahwa politik adalah domain laki-laki, yang menghalangi perempuan . . .

perempuan untuk berpartisipasi atau dilihat sebagai kandidat yang serius. Di sisi lain, faktor institusional seperti sistem pemilihan, kebijakan partai, dan kurangnya dukungan bagi perempuan yang ingin terjun ke dunia politik juga berperan dalam rendahnya keterlibatan perempuan di parlemen. Banyak partai politik yang masih enggan memberikan dukungan penuh kepada calon perempuan, dan ada sedikit dorongan untuk mengubah dinamika ini, meskipun ada kuota gender dalam beberapa kasus. Kurangnya mentor politik dan jaringan yang dapat membantu perempuan menavigasi dunia politik yang didominasi oleh laki-laki juga menjadi faktor signifikan. Akibatnya, meskipun ada kemajuan dalam meningkatkan keterlibatan perempuan, representasi mereka masih jauh dari proporsional.

2.3.4.5. Proporsi Perda yang Merupakan Inisiatif DPRD

Sepanjang tahun 2003 hingga 2022, jumlah Perda inisiatif DPRD Kota Makassar paling banyak hanya di tahun 2007 yaitu tiga Perda dengan proporsi 100%, menunjukkan bahwa hanya ada tiga Perda yang ditetapkan pada tahun tersebut dan ketiganya adalah inisiatif DPRD. Sebelum dan setelah tahun 2007, proporsinya rendah, bahkan ada beberapa tahun tertentu dimana tidak ada satupun Perda inisiatif DPRD seperti tahun 2008, tahun 2010, tahun 2012, tahun 2015, dst. Ini menggambarkan masih terbatasnya kemampuan DPRD Kota Makassar dalam menginisiasi sebuah Perda. Tiga Perda yang menjadi inisiasi DPRD tahun 2007 itu pun Perda yang berkaitan dengan internal organisasi DPRD yaitu Perda tentang protokoler, bukan Perda yang bersinggungan langsung dengan permasalahan masyarakat Kota Makassar.

Tabel 2.39
Proporsi Perda yang Merupakan Inisiatif DPRD
Kota Makassar Tahun 2003-2022

Tahun	Perda Inisiatif DPRD (Jumlah Perda)	Total Perda	Proporsi Perda Inisiatif DPRD (%)
2003	0	3	0,00%
2004	2	4	50,00%
2005	1	2	50,00%
2006	1	7	14,29%
2007	3	3	100,00%
2008	0	1	0,00%
2009	1	12	8,33%
2010	0	3	0,00%
2011	1	10	10,00%
2012	0	4	0,00%
2013	2	6	33,33%
2014	1	6	16,67%
2015	0	7	0,00%
2016	1	7	14,29%
2017	1	7	14,29%
2018	0	7	0,00%
2019	0	9	0,00%
2020	0	5	0,00%
2021	0	8	0,00%
2022	0	6	0,00%

Sumber: Sekretariat DPRD Kota Makassar, Tahun 2024

Secara normatif kurangnya Peraturan Daerah (Perda) inisiatif dari DPRD sering kali disebabkan oleh keterbatasan kapasitas teknis dan pengetahuan anggota DPRD dalam merumuskan kebijakan yang komprehensif dan berbasis bukti. Banyak anggota DPRD yang belum memiliki latar belakang atau

pemahaman . . .

pemahaman mendalam tentang proses legislasi, analisis kebijakan, dan kajian dampak regulasi. Hal ini mengakibatkan DPRD lebih mengandalkan usulan dari eksekutif yang biasanya sudah disertai dengan kajian yang lebih lengkap. Selain itu, infrastruktur pendukung seperti tenaga ahli dan akses terhadap data yang relevan juga sering kali terbatas, sehingga menghambat kemampuan DPRD untuk menginisiasi Perda secara mandiri.

2.3.4.6. Persentase Perempuan Pengurus Partai Politik

Keterwakilan 30% perempuan dalam kepengurusan partai politik di Kota Makassar sudah terpenuhi setidaknya sejak tahun 2013. Tahun 2013 dan 2014, persentase perempuan dalam struktur pengurus partai di Kota Makassar sudah mencapai 33,61% dan 33,61%, dan bertahan di atas 30%. Tahun 2018 menjadi proporsi tertinggi dalam beberapa tahun terakhir yaitu 36,36%, setelah itu menurun hingga di tahun 2024 menjadi 31,09%.

Kuota 30% pengurus perempuan dalam struktur partai politik bisa tercapai sepanjang tahun 2013 hingga 2024 karena hampir semua partai politik di Kota Makassar sudah melakukan hal tersebut. Satu-satunya partai yang belum memenuhi kuota perempuan dalam struktur kepengurusannya adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Berdasarkan data yang tersedia untuk kepengurusan masa bakti 2021 s/d 2026, proporsi perempuan dalam kepengurusan PPP hanya 12,68% atau hanya sembilan orang dari total pengurus sebanyak 62 orang. Partai lain (yang tersedia datanya) memiliki proporsi di atas 30%, bahkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk kepengurusan masa bakti 2020 s/d 2025 menempatkan 50% perempuan sebagai pengurus partai atau setara dengan 14 orang dari total 28 orang pengurus partai.

Tabel 2.40
Jumlah Pengurus Partai Politik Berdasarkan Jenis Kelamin
Kota Makassar Tahun 2013-2023

No	Nama Parpol	J K	Tahun											Ket	
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	L	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	27	27	27	- Masa Bakti 2021 s/d 2026
		P	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	13	13	13	
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	L	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	33	33	- Masa Bakti 2022 s/d 2023
		P	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	17	17	
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	L	15	15	13	13	12	12	13	13	13	13	13	13	- Masa Bakti 2013 s/d 2014 - Masa Bakti 2015 s/d 2016 - Masa Bakti 2017 s/d 2018 - Masa Bakti 2019 s/d 2024
		P	4	4	6	6	7	7	6	6	6	6	6	6	
4	Partai Golongan Karya (GOLKAR)	L	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	239	239	239	- Masa Bakti 2021 s/d 2026
		P	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	96	96	96	
5	Partai Nasional Demokrat (NASDEM)	L	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	19	19	19	19	- Masa Bakti 2020 s/d 2024
		P	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	9	9	9	9	

6	Partai Buruh	L	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Kosong
		P	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA)	L	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Kosong
		P	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	L	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	14	14	14	14	- Masa Bakti 2020 s/d 2025
		P	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	14	14	14	14	
9	Partai Kebangkitan Nusantara	L	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Kosong
		P	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	
10	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	L	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	22	22	22	22	- Masa Bakti 2020 s/d 2025
		P	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	13	13	13	13	
11	Partai Garda Republik Indonesia	L	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Kosong
		P	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	L	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	90	90	90	90	- Masa Bakti 2020 s/d 2025
		P	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	42	42	42	42	
13	Partai Bulan Bintang (PBB)	L	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Kosong
		P	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	
14	Partai Demokrat	L	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	85	85	- Masa Bakti 2022 s/d 2027
		P	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	44	44	
15	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	L	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Kosong
		P	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	
16	Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)	L	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	3	- Masa Bakti 2023
		P	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	2	
17	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	L	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	62	62	62	- Masa Bakti 2021 s/d 2026
		P	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	9	9	9	
Jumlah Laki Laki			15	15	13	13	12	12	13	158	486	604	607	
Jumlah Perempuan			4	4	6	6	7	7	6	84	202	263	265	
Total Laki-Laki Dan Perempuan			19	19	19	19	19	19	19	242	688	867	872	
Persentase Keterlibatan Perempuan Dalam Kepengurusan Partai Politik (Jumlah Perempuan / Jumlah Total Laki Laki & Perempuan X 100%)			21,05 %	21,05 %	31,58 %	31,58 %	36,84 %	36,84 %	31,58 %	34,71 %	29,36 %	30,33 %	30,39 %	

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar, Tahun 2024

Masih sulitnya partai politik memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan dalam kepengurusan disebabkan oleh beberapa faktor struktural dan budaya. Secara struktural, partai politik di Indonesia sering kali didominasi oleh jaringan dan hierarki yang sudah mapan, yang sebagian besar diisi oleh laki-laki. Perempuan yang ingin terlibat seringkali menghadapi hambatan berupa akses yang terbatas terhadap sumber daya politik, seperti dukungan finansial, jaringan politik, dan pengalaman organisasi. Selain itu, dalam beberapa partai, proses rekrutmen dan promosi kepemimpinan cenderung kurang transparan, yang menghambat perempuan untuk mencapai posisi strategis. Hambatan ini diperparah oleh kurangnya upaya yang sistematis . . .

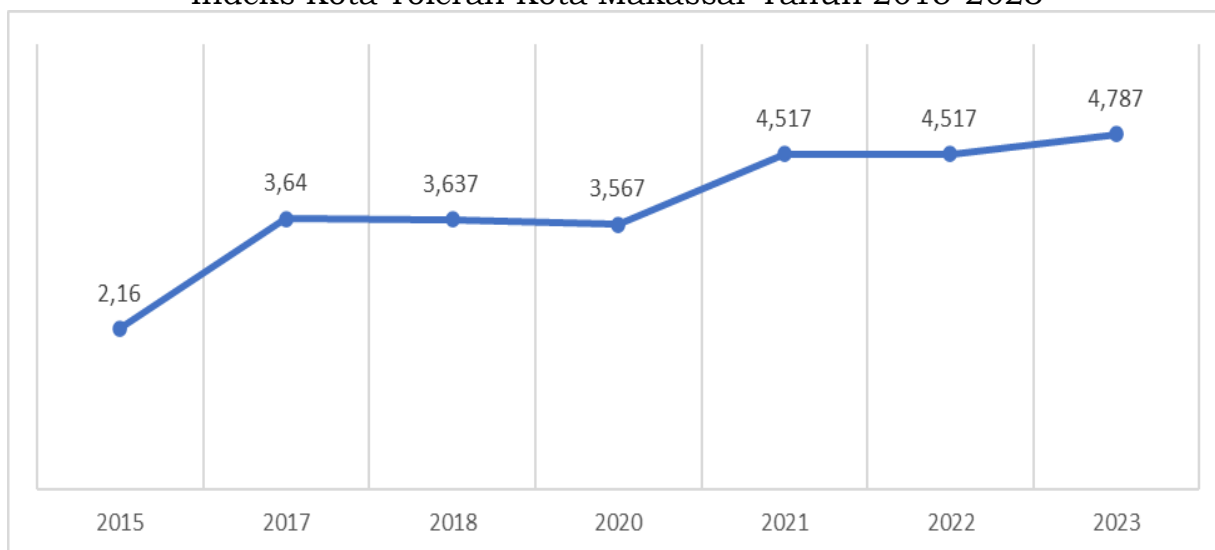
sistematis dari partai untuk membina kader perempuan, seperti pelatihan kepemimpinan atau mentoring.

Di sisi lain, faktor budaya juga berperan besar. Stereotip gender dan norma sosial yang masih kuat sering kali memosisikan perempuan sebagai kurang kompeten dalam politik, sehingga mengurangi dukungan baik dari dalam partai maupun dari konstituen. Persepsi ini membuat perempuan kurang percaya diri untuk maju dan menantang dominasi laki-laki dalam struktur partai. Selain itu, tanggung jawab ganda yang sering diemban oleh perempuan, baik di ranah domestik maupun profesional, juga membuat mereka lebih sulit untuk berkomitmen penuh dalam aktivitas politik yang memakan banyak waktu dan energi. Oleh karena itu, meskipun regulasi telah mengamankan kuota 30%, tantangan-tantangan ini masih menjadi penghalang signifikan bagi keterwakilan perempuan dalam kepemimpinan partai politik.

2.3.4.7. Indeks Kota Toleran

Sejak IKT dihitung pertama kali tahun 2015 hingga tahun 2023, IKT Kota Makassar menunjukkan tren meningkat, terutama di tahun 2021 hingga 2023. Tahun 2017, IKT Kota Makassar naik dari 2,16 ke 3,64. Meski mengalami kenaikan, IKT Kota Makassar tahun 2017 termasuk dalam 10 kota paling rendah atau berada pada peringkat 87 dari 94 kota yang disurvei. Posisi Kota Makassar sebagai 10 kota dengan IKT paling rendah bertahan hingga tahun 2021, walaupun IKT Kota Makassar terus naik. Kota Makassar baru keluar dari 10 kota IKT terbawah di tahun 2022.

Grafik 2.162
Indeks Kota Toleran Kota Makassar Tahun 2015-2023



Sumber: SETARA Institute, Tahun 2024

Ada beberapa faktor yang menyebabkan Kota Makassar dimasukkan dalam 10 kota dengan indeks paling rendah. Tahun 2020, Kota Makassar mengalami beberapa peristiwa yang dinilai mencederai toleransi. Sepanjang tahun 2020, di Kota Makassar telah terjadi 11 peristiwa intoleransi dan pelanggaran hak atas kebebasan beragama/berkeyakinan.

Tahun 2023, Kota Makassar sudah keluar dari 10 daerah dengan toleransi paling rendah di Indonesia. Hal itu dikarenakan ada terobosan yang dilakukan oleh pemerintah kota untuk memperkuat toleransi. Makassar dinilai dapat memperbaiki ekosistem toleransi yang dapat meredam peristiwa intoleransi. Pemerintah Kota Makassar berupaya melembagakan nilai-nilai toleransi dengan menyediakan anggaran yang memadai per tahun pada tahun 2023 yang digunakan untuk Bantuan Khusus FKUB Kota Makassar dan

Dialog . . .

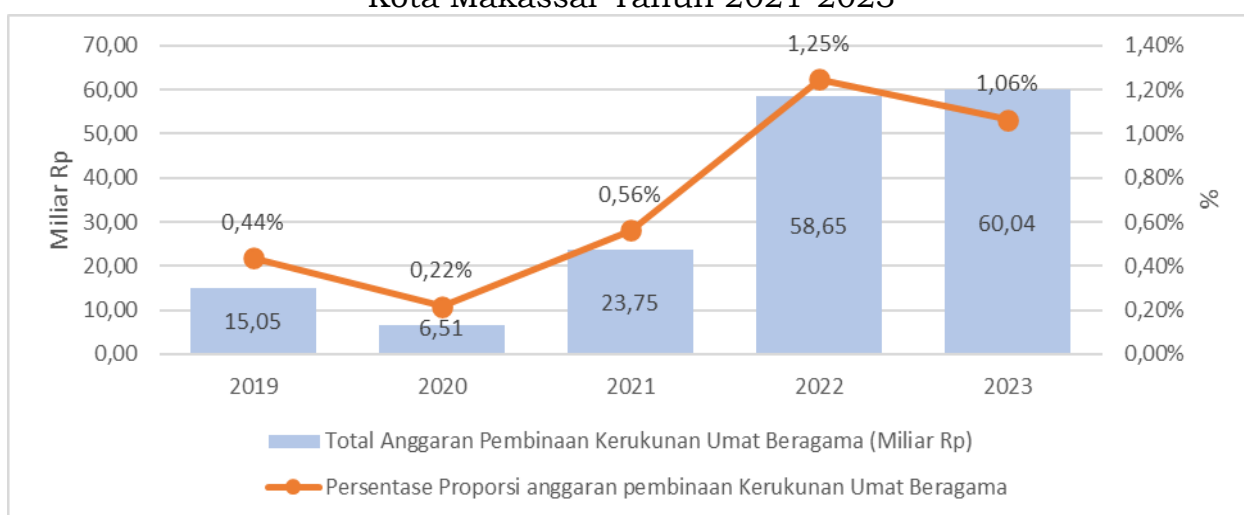
Dialog Pembauran Kebangsaan. Dalam bidang kebijakan, Pemerintah Kota Makassar menginstitutionalisasi toleransi melalui pembentukan beberapa tim percepatan.

Meskipun Kota Makassar berhasil keluar dari 10 kota paling intoleran di Indonesia, tapi tahun 2023 Makassar masih di peringkat 62 dari 94 kota. Hal itu disebabkan karena ada beberapa indikator yang masih perlu diperbaiki, salah satunya adalah rencana pembangunan dalam bentuk RPJMD dan produk hukum pendukung lainnya. Tahun 2023, Kota Makassar masih mendapat point 5,17 dan setelah dibobot menjadi 0,52. Angka itu masih tertinggal dari beberapa daerah lainnya yang sudah mencapai angka 6 ke atas. Pada pilar regulasi sosial, nilai indikator peristiwa intoleransi dan dinamika masyarakat sipil terkait isu toleransi juga masih relatif rendah. Nilai kedua indikator ini untuk Kota Makassar masing-masing di angka 4,50 dan 5,00.

2.3.4.8. Persentase Kegiatan Keagamaan yang Mendapat Dukungan/Difasilitasi

Kegiatan keagamaan yang mendapat dukungan/difasilitasi di Kota Makassar yang didasarkan pada data proporsi anggaran pembinaan kerukunan umat beragama. Dalam lima tahun terakhir, proporsi anggaran pembinaan kerukunan umat beragama dari terhadap total APBD Kota Makassar cenderung naik. Meski sempat turun dari 0,44% ke 0,22% di tahun 2020, tahun 2021 proporsinya naik ke 0,56% karena adanya penambahan alokasi anggaran sejumlah Rp. 23,75 miliar, yang setahun sebelumnya hanya dialokasikan Rp. 6,51 miliar. Untuk memperluas dukungan atau fasilitasi kegiatan keagamaan, tahun 2022 pemerintah kota menaikkan anggaran hingga 146,90% menjadi Rp. 58.65 miliar sehingga proporsinya terhadap APBD sampai 1,25%. Tahun 2023, alokasi dinaikkan lagi sebesar 2,37% hingga total anggaran sampai Rp. 60.04 miliar, namun proporsinya turun karena kenaikan anggaran pembinaan kerukunan umat beragama lebih rendah dibandingkan kenaikan APBD.

Grafik 2.163
Total dan Proporsi Anggaran Pembinaan Kerukunan Umat Beragama Kota Makassar Tahun 2021-2023



Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Tahun 2023

2.3.4.9. Jumlah Kerjasama Dengan Pemerintah Daerah Lainnya Provinsi/Kabupaten/Kota Kembar/Bersaudara (Sister City)

Kerja sama dengan pihak lain dianggap penting dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan publik, sehingga semua kerja sama khususnya kerja sama yang masuk dari pihak lain ke Kota Makassar selalu ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Makassar. Kerja sama ini bukan hanya

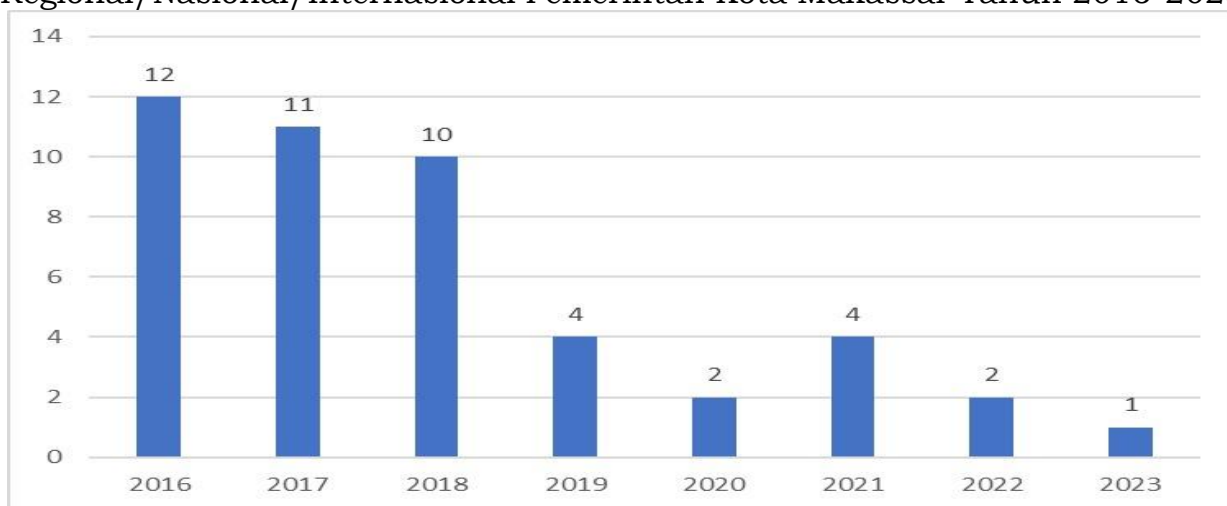
kerja . . .

kerja sama yang masuk ke Pemerintah Kota Makassar, tapi juga kerja sama yang diinisiasi oleh Kota Makassar dengan pihak lain.

Jumlah kerja sama Pemerintah Kota Makassar dengan Pemerintah Daerah Lainnya dalam delapan tahun terakhir cenderung menurun, tertinggi pada Tahun 2016 sebanyak 12 kerja sama. Selanjutnya terus menurun hingga empat tahun terakhir yaitu Tahun 2020 sampai Tahun 2023 masing-masing hanya ada 1 perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Daerah lainnya.

Grafik 2.164

Jumlah Perjanjian Kerja Sama dengan Pemerintah Daerah Lainnya Skala Regional/Nasional/Internasional Pemerintah Kota Makassar Tahun 2016-2023



Sumber: Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Makassar, Tahun 2024

Demikian halnya dengan kerja sama dengan entitas luar negeri, menunjukkan angka yang berfluktuasi, tertinggi pada Tahun 2018 sebanyak 6 perjanjian kerja sama internasional. Selanjutnya selama 5 tahun terakhir terus menurun. Kerja sama dengan pihak luar negeri merupakan salah satu upaya untuk mengatasi keterbatasan sumber daya baik manusia maupun keuangan. Kerja sama tersebut juga dapat mempererat hubungan diplomasi dengan pihak luar negeri.

2.4. Aspek Pelayanan Umum

2.4.1. Indeks Pelayanan Publik

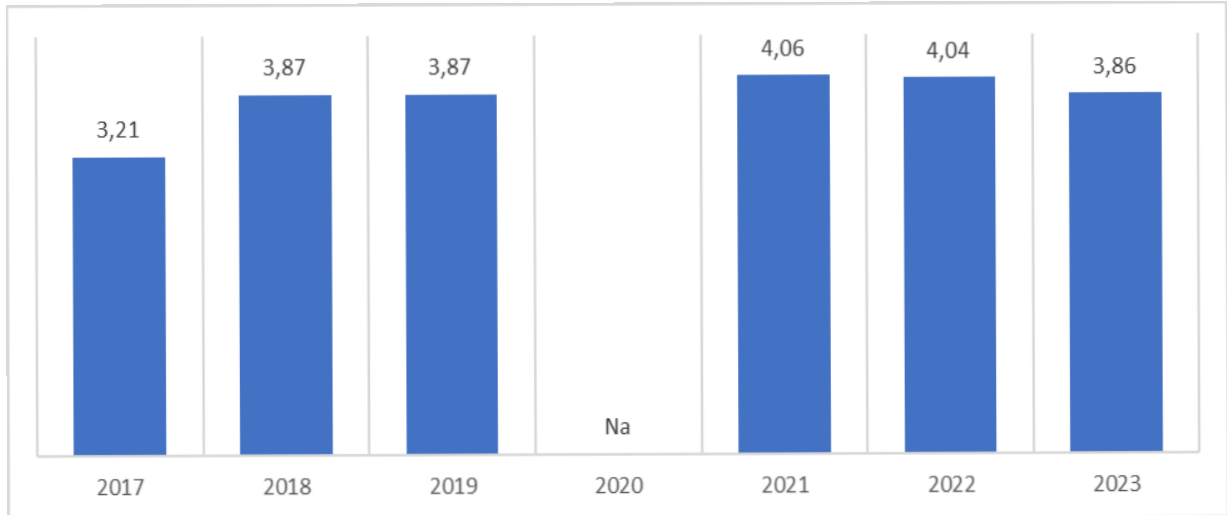
Dalam 8 tahun terakhir ada perubahan nilai IPP Kota Makassar. Tahun 2017 hingga 2019 terjadi kenaikan nilai IPP dari 3,21 ke 3,87. Tahun 2021 angkanya tetap naik ke 4,06, tapi dua tahun selanjutnya turun ke 4,04 dan 3,86. Capaian IPP tahun 2023 menempati IPP Kota Makassar pada kategori “baik”, yang merupakan kategori ke-7 dari 9 level kategori. Kategori “baik” pada nilai IPP menunjukkan bahwa unit pelayanan sudah menerapkan kebijakan pelayanan namun belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan, memiliki sarana prasarana yang baik, sudah memiliki inovasi tetapi belum diterapkan secara optimal.

Meski sudah mencapai kategori baik, namun pemerintah daerah masih perlu memberi perhatian pada nilai IPP karena belum mencapai nilai optimum dan karena tren dalam dua tahun terakhir yang menurun. Pemerintah Kota Makassar perlu fokus pada formulir 02 dan 03. Pada formulir 02 dan 03, ada beberapa aspek yang penting diperhatikan yaitu kebijakan pelayanan yang di dalamnya terdiri dari dimensi yaitu standar pelayanan, maklumat pelayanan, SKM, profesionalisme SDM, sarana dan prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, dan inovasi. Semua aspek ini akan dinilai oleh tim penilai (untuk formulir 02) dan masyarakat (untuk formulir 03),

sehingga . . .

sehingga penting melakukan perbaikan secara komprehensif pada semua aspek tersebut.

Grafik 2.165
Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Kota Makassar Tahun 2017-2023



Sumber: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tahun 2023

2.4.2. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Tahun 2023 kota makassar mendapatkan indeks 2,45 yang berkategori “Cukup” hal ini disebabkan kurangnya bukti dukung yang disertakan pada saat evaluasi dilaksanakan.

Tabel 2.41
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kota Makassar

Nama Indeks	Nilai					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
SPBE		2,60** Baik	2,60** Baik	2,04 Cukup	2,45 Cukup	3,41 Baik
Domain Kebijakan SPBE	-	2,03*	2,18*	1,20	3,00	3,30
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	-	2,06*	2,18*	1,20	3,00	3,30
Kebijakan Layanan	-	2,04*	2,18*			
Domain Tata Kelola SPBE	-	2,01*	2,08*	1,70	1,90	2,50
Perencanaan Strategis SPBE	-	2,12*	2,02*	1,75	1,00	1,50
Teknologi Informasi dan Komunikasi	-	2,02*	2,10*	1,25	2,25	3,25
Penyelenggara SPBE	-	1,89*	2,12*	2,50	3,00	3,00
Domain Manajemen SPBE	-	-	-	1,00	1,18	2,36
Penerapan Manajemen SPBE	-	-	-	1,00	1,25	2,63
Audit TIK	-	-	-	1,00	1,00	1,67
Domain Layanan SPBE	-	2,60*	2,69*	2,85	3,06	4,32
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	-	2,71*	2,80*	3,40	3,10	4,20
Layanan Publik Berbasis Elektronik	-	2,41*	2,49*	2,00	3,00	4,20

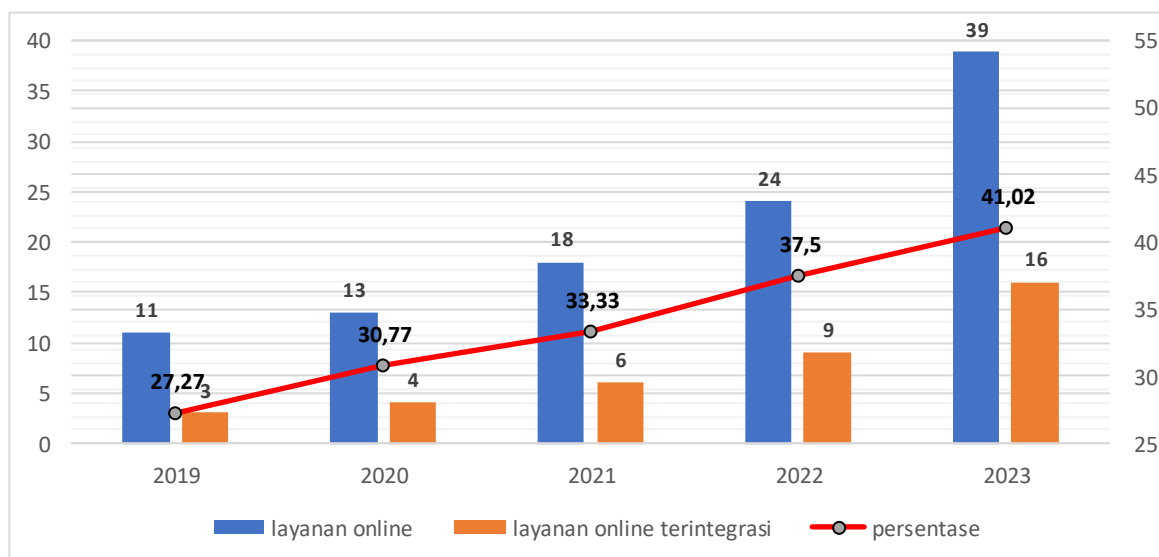
Sumber: Bappeda Kota Makassar (data diolah), Tahun 2024

Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Kota Makassar sudah dilaksanakan dengan baik dengan telah menggunakan aplikasi umum berbagi pakai yang telah ditetapkan secara nasional, atas melakukan replikasi dari layanan-layanan publik sejenis yang dibangun oleh Instansi lainnya. Dengan demikian diharapkan dapat menjadi pendorong penerapan SPBE keseluruhan sesuai dengan Peraturan dan pedoman yang berlaku, sehingga pada pelaksanaan evaluasi SPBE selanjutnya sudah dapat memenuhi indikator dan kriteria penilaian sesuai target atau melampaui target. Namun perlu usaha dan kerja keras dari Pemerintah Kota Makassar pada sebagian besar aspek lainnya untuk mewujudkan tata kelola SPBE yang baik.

2.4.3. Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik secara online dalam kurun waktu tahun 2019 hingga tahun 2023, belum seluruh layanan online yang dikembangkan terintegrasi menjadi satu kesatuan alur kerja baik antar perangkat maupun antar aplikasi yang mudah diakses, ditunjukkan pada grafik berikut:

Grafik 2.166
Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi
Kota Makassar Tahun 2019-2023



Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar (data diolah), Tahun 2024

Berdasarkan grafik diatas, layanan publik online yang dikembangkan oleh SKPD Pemerintah Kota Makassar terus meningkat dari tahun 2019 sebanyak 11 layanan meningkat menjadi 39 layanan publik online. Dan capaian pengintegrasian layanan publik online hingga tahun 2023 sebanyak 16 dari 39 layanan publik, atau 41%. Belum optimalnya pengintegrasian tersebut disebabkan aplikasi yang dikembangkan oleh perangkat daerah tidak memenuhi aspek interoperabilitas sebagai standar pengintegrasian. Dukungan sistem interoperabilitas sangat penting, mencakup standar, protokol, dan teknologi yang memungkinkan pertukaran data yang efektif antara berbagai platform, aplikasi, atau perangkat. Hal tersebut terjadi karena belum terbangun koordinasi antara perangkat daerah yang membangun aplikasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika. Umumnya aplikasi dikembangkan oleh vendor yang berbeda dengan standar yang berbeda pula. Selain itu dari sisi keberlanjutan, masih terdapat kelemahan disebabkan ketergantungan pengelolaan aplikasi yang diserahkan sepenuhnya kepada vendor. Tidak

optimalnya . . .

optimalnya integrasi layanan mengakibatkan keterbatasan akses masyarakat khususnya bagi yang memiliki keterbatasan mobilitas, selain itu rawan terhadap ketidakakuratan data antar sistem yang berbeda, serta inefisiensi biaya dan waktu.

2.4.4. Indeks Reformasi Hukum

Indeks Reformasi Hukum (IRH) pertama kali dikeluarkan pada tahun 2023, dan Kota Makassar langsung mendapat nilai IRH sebesar 97,23 (AA) atau termasuk dalam kategori “Istimewa”, kategori tertinggi dalam perhitungan IRH. Angka tersebut menunjukkan bahwa pemerintah kota telah berhasil dalam mengenali dan menggambarkan aturan-aturan, termasuk melakukan penyesuaian ulang dan pengurangan aturan yang secara keseluruhan berkontribusi pada peningkatan kinerja kementerian, ditambah dengan dukungan dari sumber daya manusia yang semakin terampil.

Grafik 2.167
Indeks Reformasi Hukum Kota Makassar Tahun 2023



Sumber: Badan Strategi Kebijakan Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan HAM, Tahun 2023 (data diolah)

Capaian IRH pemerintah Kota Makassar tahun 2023 disebabkan karena nilai dari empat komponen hampir mendekati angka maksimal. Dari empat aspek yang dinilai dalam IRH, pemerintah kota mendapat nilai maksimum pada dua aspek yaitu kompetensi ASN sebagai perancang peraturan perundang-undangan (*legal drafter*) pusat yang berkualitas mendapat nilai 25 dan Kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reuiu mendapat nilai 35. Aspek tingkat koordinasi kementerian hukum dan hak asasi manusia untuk melakukan harmonisasi regulasi/memperkuat koordinasi untuk melakukan harmonisasi regulasi mendapat nilai 22,4 dari bobot 25 dan aspek yang mendapat nilai paling rendah adalah penataan database peraturan perundang-undangan. Ada beberapa catatan yang perlu diperbaiki, berkaitan dengan IRH pemerintah Kota Makassar, seperti pada aspek penataan database peraturan perundang-undangan yang mendapat nilai paling rendah.

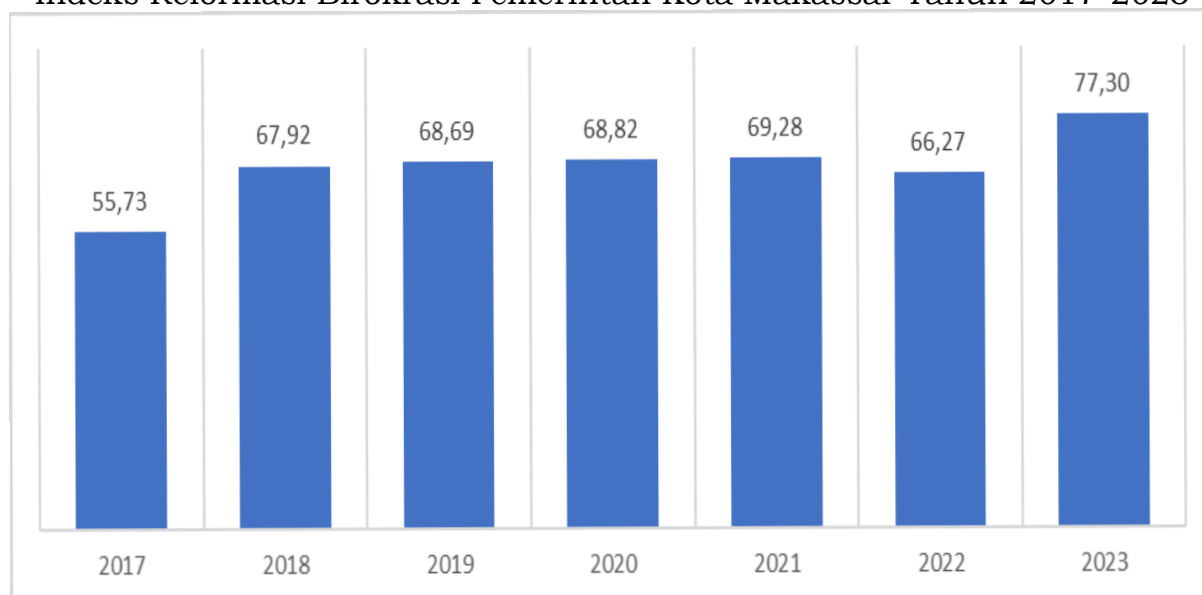
2.4.5. Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks ini dibangun dari dua komponen utama yaitu reformasi birokrasi general (RB general) dan reformasi birokrasi tematik (RB tematik). Dalam tujuh tahun terakhir, IRB pemerintah Kota Makassar cenderung naik, tapi sangat lambat. Tahun 2018, terjadi kenaikan signifikan dari 55,73 di tahun 2017 menjadi 67,92 atau bertambah 12,19 poin, namun memasuki tahun 2019

hingga . . .

hingga 2021, kenaikannya tidak pernah mencapai 1 poin, bahkan tahun 2022 mengalami penurunan ke 66,27. Tahun 2023, IRB pemerintah Kota Makassar mengalami kenaikan yang cukup tinggi hingga 77,30 atau naik 11,03 poin dan menjadi angka tertinggi dalam tujuh tahun terakhir. Namun Kemenpan RB memberikan catatan terkait dengan capaian tahun 2023 yaitu angka IRB tahun 2023 tidak bisa diperbandingkan dengan tahun sebelumnya karena ada perubahan kerangka logis, komponen, indikator, bobot, dan kriteria penilaian yang sangat berbeda dari tahun sebelumnya.

Grafik 2.168
Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2017-2023



Sumber: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB, Tahun 2024

Capaian IRB Kota Makassar tahun 2023 yaitu 77,30 termasuk dalam kategori BB atau sangat baik. Kategori ini berada pada kategori ketiga dari tujuh kategori nilai IRB. Kategori sangat baik yang dicapai Kota Makassar menunjukkan bahwa pemerintah Kota Makassar berhasil Memenuhi sebagian kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing, tapi sebagian pelaksanaan percepatan transformasi digital, dan Pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan. Dampak nyata terhadap pembangunan yang masih rendah dapat dilihat dari nilai RB tematik yang masih rendah yaitu 12,88, dan masih terdapat beberapa kelemahan pada aspek RB general.

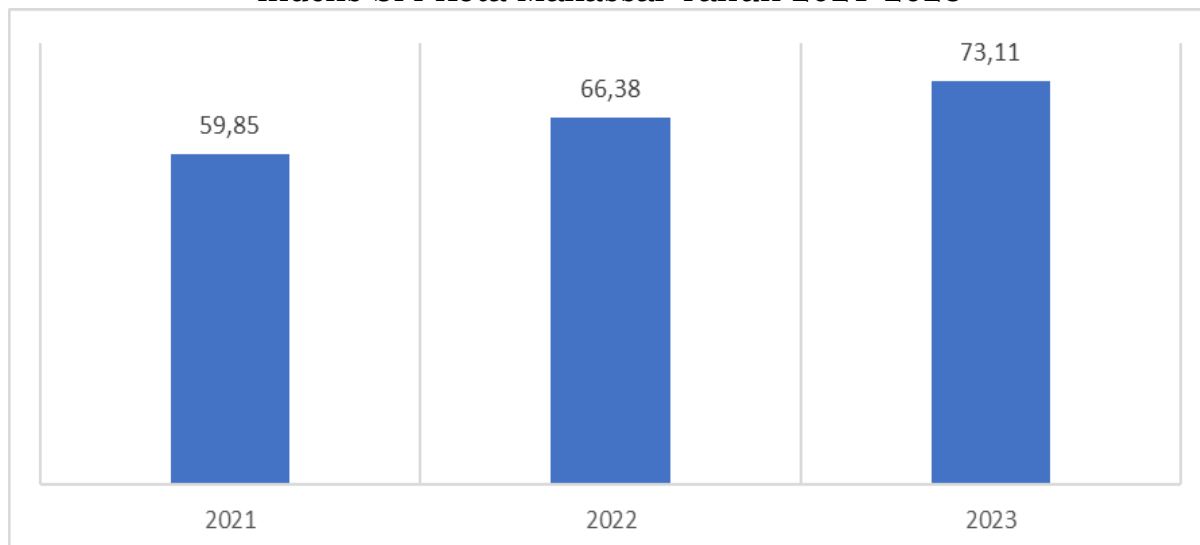
2.4.6. Indeks Survey Penilaian Integritas

Berdasarkan data yang tersedia pada tiga tahun terakhir, nilai indeks integritas pemerintah Kota Makassar mengalami kenaikan. Tahun 2021, pemerintah kota mendapat nilai 59,85, masih termasuk kategori rendah, dan secara relatif lebih rendah dari rata-rata indeks integritas dari seluruh peserta SPI yaitu 72,43. Tahun 2022, pemerintah kota berhasil melakukan beberapa perbaikan sehingga menaikkan angka indeks ke 66,38 atau bertambah 6,53 poin. Meski naik, indeks SPI pemerintah Kota Makassar masih lebih rendah dari seluruh peserta SPI yang mencapai 71,94 dan masih termasuk kategori “rentan”. Angka 66,38 memberikan gambaran bahwa risiko korupsi pada tujuh aspek yang dinilai relatif rendah. Memasuki tahun 2023, indeks SPI kembali naik 6,73 poin menjadi 73,11 atau masuk dalam kategori “waspada”. Capaian tahun 2023 sudah lebih tinggi dari nilai rerata seluruh peserta SPI yang mencapai 70,97. Kenaikan nilai indeks menunjukkan bahwa pemerintah kota semakin mampu meminimalisir risiko korupsi pada tingkat tertentu dan

memiliki . . .

memiliki sistem yang relatif mampu merespon/ mengantisipasi dengan tepat ketika korupsi terjadi.

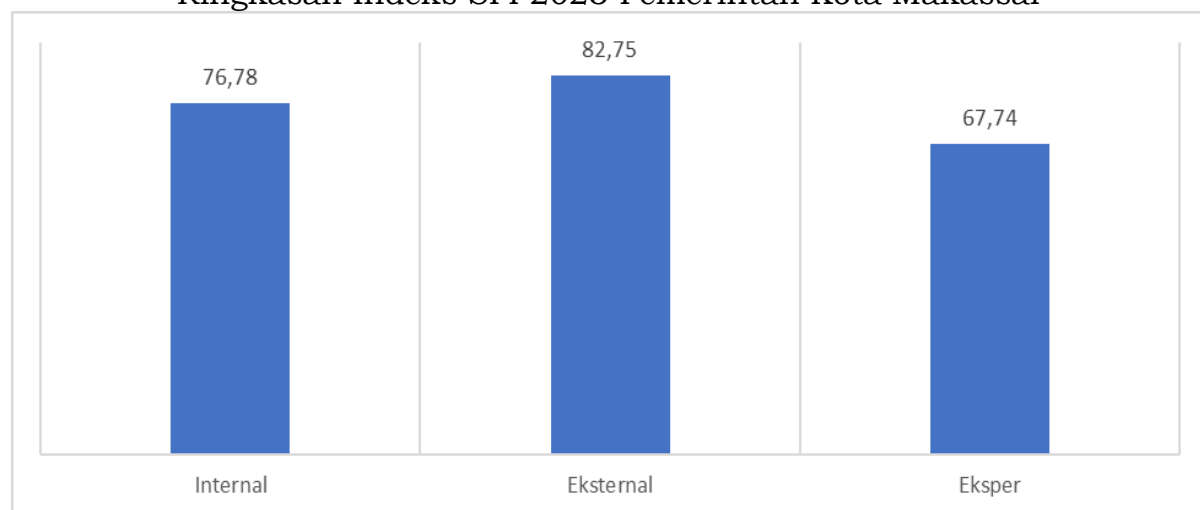
Grafik 2.169
Indeks SPI Kota Makassar Tahun 2021-2023



Sumber: Komisi Pemberantasan Korupsi, Tahun 2023

Jika dilihat per komponen, pemerintah kota mendapat nilai tertinggi pada komponen penilaian eksternal yaitu penilaian yang dilakukan oleh pihak pengguna jasa atau pengguna layanan yang dihasilkan oleh pemerintah Kota Makassar dengan nilai indeks 82,75, sementara untuk komponen penilaian internal mendapat nilai 76,78, dan paling rendah adalah nilai dari komponen penilaian ekspor sebesar 67,74.

Grafik 2.170
Ringkasan Indeks SPI 2023 Pemerintah Kota Makassar



Sumber: Komisi Pemberantasan Korupsi, Tahun 2023

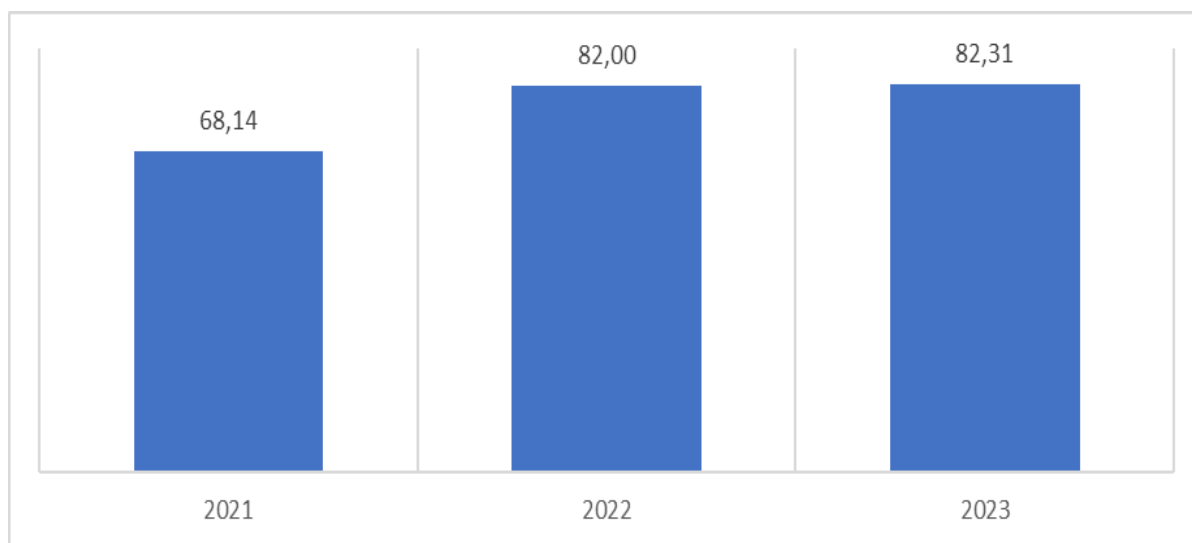
Pada lima aspek yang dinilai yaitu perdagangan pengaruh, pengelolaan SDM, pengelolaan anggaran, pengelolaan PBJ dan integritas pelaksanaan tugas. Pada perdagangan pengaruh, responden dari internal organisasi pemerintah Kota Makassar menilai risiko korupsi pada semua indikator dalam aspek perdagangan pengaruh termasuk kategori tinggi. Itu artinya, menurut penilaian responden internal ada keterlibatan pihak lain dalam penentuan program, penentuan pemenang tender, pemberian izin/rekomendasi, negosiasi sanksi/denda, kebijakan SDM, dan dalam penetapan penerima dan penyaluran bantuan-bantuan.

Perlu perbaikan mendasar terhadap upaya pencegahan korupsi yang sudah dilakukan dengan memastikan keberadaan hal-hal berikut: (1) Menegakkan sanksi/hukuman terkait pelanggaran perdagangan pengaruh berdasarkan kode etik dan/ atau regulasi internal lainnya secara adil dan konsisten; (2) Internalisasi larangan perdagangan pengaruh terhadap seluruh pegawai/pimpinan di instansi disertai contoh dari pimpinan; (3) Implementasi kebijakan, regulasi, dan mekanisme penanganan benturan kepentingan di instansi; (4) Mengintensifkan upaya peningkatan integritas bagi calon pimpinan/pejabat di instansi dan deklarasi konflik kepentingan yang dimiliki sebelum menjabat dan secara tahunan; (5) Penguatan mekanisme pengawasan internal untuk mendeteksi perdagangan pengaruh sebelum, saat, dan setelah pimpinan menduduki jabatan.

2.4.7. Nilai *Monitoring Center for Prevention* KPK

Dalam tiga tahun terakhir, nilai *Monitoring Center for Prevention* (MCP) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk nilai Kota Makassar mengalami kenaikan dari 68,14 di tahun 2021, kemudian 82 tahun 2022, dan di tahun 2023 menjadi 82,31. Nilai MCP sebesar 82,31 yang dicapai oleh Kota Makassar pada tahun 2023 menunjukkan bahwa pemerintah kota berada dalam kategori Klaster I (skor MCP 75 – 100), yang berarti pemerintah Kota Makassar telah menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam upaya pencegahan korupsi. Skor ini mencerminkan keberhasilan pemerintah Kota Makassar dalam memenuhi sebagian besar indikator dan sub indikator yang ditetapkan dalam penilaian MCP, mencakup area-area seperti perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, pengawasan APIP, manajemen ASN, pengelolaan barang milik daerah, dan optimalisasi pajak daerah. Pencapaian ini menunjukkan komitmen dan efektivitas Makassar dalam mengimplementasikan langkah-langkah antikorupsi yang telah ditentukan.

Grafik 2.171
Nilai *Monitoring Center For Prevention* (MCP) KPK
Kota Makassar Tahun 2021-2023



Sumber: Komisi Pemberantasan Korupsi, Tahun 2023

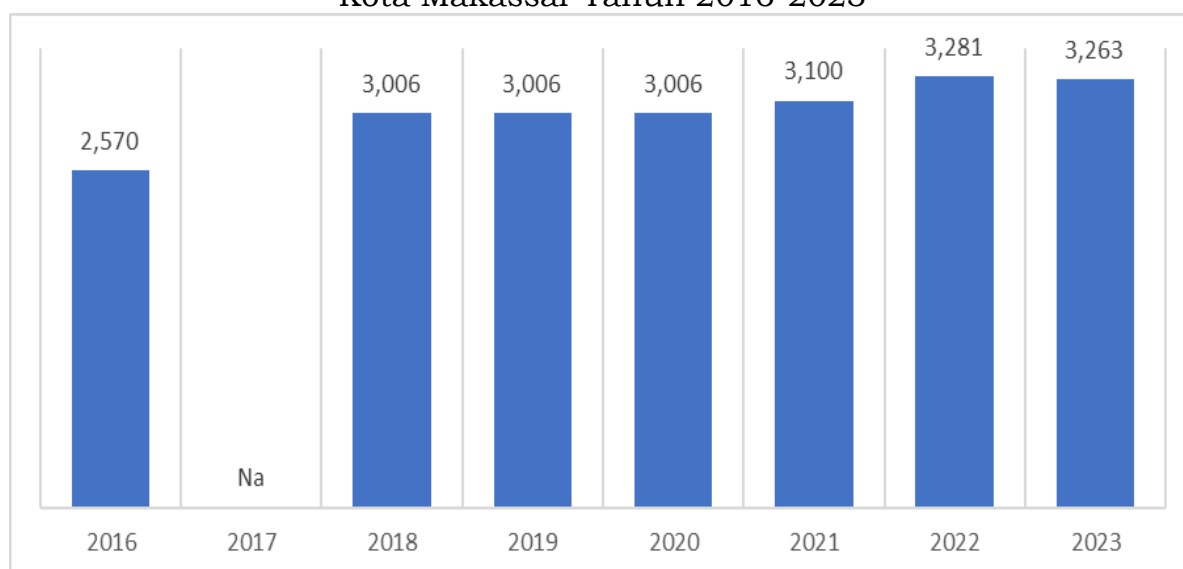
Namun jika komparasinya diperluas ke daerah se-Indonesia yang termasuk kota, capaian Kota Makassar masih rendah. Pemerintah Kota Semarang mendapat nilai MCP sebesar 98 tahun 2023, Pemerintah Kota Denpasar dan Kota Surabaya nilai MCP-nya 97, Pemerintah Kota Banda Aceh, Kota Pasuruan, dan Kota Blitar mencatat nilai MCP 96. Beberapa kota lainnya memiliki nilai MCP lebih tinggi dari Kota Makassar. Dilihat dari peringkat, nilai MCP Kota Makassar tahun 2023 berada di peringkat 263 dari total entitas pemerintah . . .

pemerintah daerah yang dinilai. Masih relatif rendahnya nilai MCP Makassar dibandingkan daerah lain di Indonesia disebabkan karena masih ada beberapa area yang nilainya rendah.

2.4.8. Indeks Maturitas SPIP

Dalam delapan tahun terakhir, indeks maturitas SPIP pemerintah Kota Makassar cenderung naik, meski sempat stagnan di tahun 2018 hingga 2020 disebabkan karena tidak adanya quality assurance (QA) yang dilakukan oleh BPKP pusat karena adanya pandemi Covid-19 tahun 2020. Tahun 2021, angka indeks mengalami kenaikan, meski relatif kecil menjadi 3,100. BPKP memberikan catatan terhadap pencapaian indeks tahun 2021 tersebut yaitu sistem pengendalian intern pemerintah Kota Makassar belum sepenuhnya mampu mengarahkan pada pencapaian tujuan organisasi; manajemen risiko pemerintah Kota Makassar belum sepenuhnya diimplementasikan dan dijadikan dasar dalam penilaian kinerja serta belum memanfaatkan informasi terkait risiko dan pengambilan keputusan; Organisasi perangkat daerah belum memiliki kebijakan risiko kemitraan; Sebagian besar OPD belum memiliki risk register terkait fraud/pencegahan korupsi; dan Belum dilakukan reuiu atas proses manajemen risiko oleh APIP. Lima catatan ini yang membuat indeks maturitas hanya naik 0,094 poin tahun 2021.

Grafik 2.172
Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Intern
Kota Makassar Tahun 2016-2023



Sumber: Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Tahun 2023

Memasuki tahun 2022, indeks maturitas naik ke 3,281 atau meningkat 0,181 poin, disebabkan karena kenaikan nilai pada komponen pencapaian tujuan. Tahun 2021, nilai komponen pencapaian tujuan naik dari 0,660 ke 0,866 meningkat 0,206 poin, sementara untuk komponen penetapan tujuan tidak berubah dari angka 1,600 dan untuk komponen struktur dan proses mengalami penurunan dari 0,840 ke 0,826 atau turun 0,014 poin.

Tahun 2023, indeks maturitas pemerintah Kota Makassar turun 0,018 poin menjadi 3,263. Penurunan tersebut disebabkan karena terjadi penurunan nilai pada komponen penetapan tujuan, yang di tahun sebelumnya 1,600 turun ke 1,400, meski disatu sisi terjadi kenaikan nilai pada dua komponen yaitu struktur dan proses dan pencapaian tujuan masing-masing menjadi 0,903 dan 0,960.

Sejak tahun 2018 hingga tahun 2023, nilai indeks maturitas pemerintah Kota Makassar sudah mencapai level 3 atau termasuk kategori “terdefinisi”.

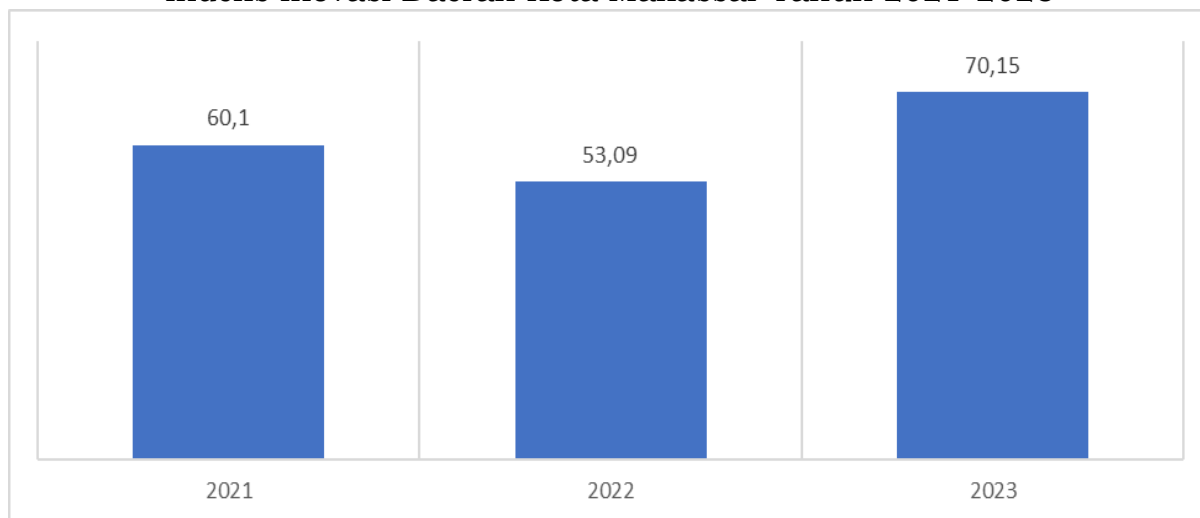
Tingkat . . .

Tingkat maturitas “Terdefinisi” menunjukkan bahwa pemerintah Kota Makassar telah mampu mengelola kinerjanya dengan baik, tidak hanya mampu merumuskan kinerja beserta indikator dan targetnya saja, tetapi juga telah mampu menyusun strategi pencapaian kinerja berupa program dan kegiatan yang efektif dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut. Pengendalian telah dibangun dan diimplementasikan pada seluruh program dan kegiatan organisasi. Organisasi juga telah menyusun dan mengimplementasikan kebijakan pengelolaan risiko (termasuk risiko korupsi) pada seluruh unit kerja organisasi. Namun demikian, belum terdapat evaluasi terhadap efektivitas pengendalian dan pengelolaan risiko (termasuk risiko korupsi) tersebut, yang berdampak pada masih adanya tugas dan fungsi organisasi yang belum berjalan secara efektif, masih adanya permasalahan yang tidak material dalam pelaporan keuangan dan pengelolaan aset, masih adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan cukup tingginya risiko keterjadian korupsi.

2.4.9. Indeks Inovasi Daerah

Selama tiga tahun terakhir, Kota Makassar berhasil mencatat angka indeks inovasi daerah yang cenderung naik. Tahun 2021, angka indeks Makassar sudah mencapai 60,1 atau termasuk kategori “sangat inovatif”, tapi setahun kemudian turun ke 53,09 atau kategori “inovatif”. Memasuki tahun 2023, Kemendagri memberikan nilai indeks inovasi daerah ke Kota Makassar sebesar 70,15, tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Capaian tersebut kembali menjadikan Kota Makassar sebagai daerah yang “sangat inovatif”.

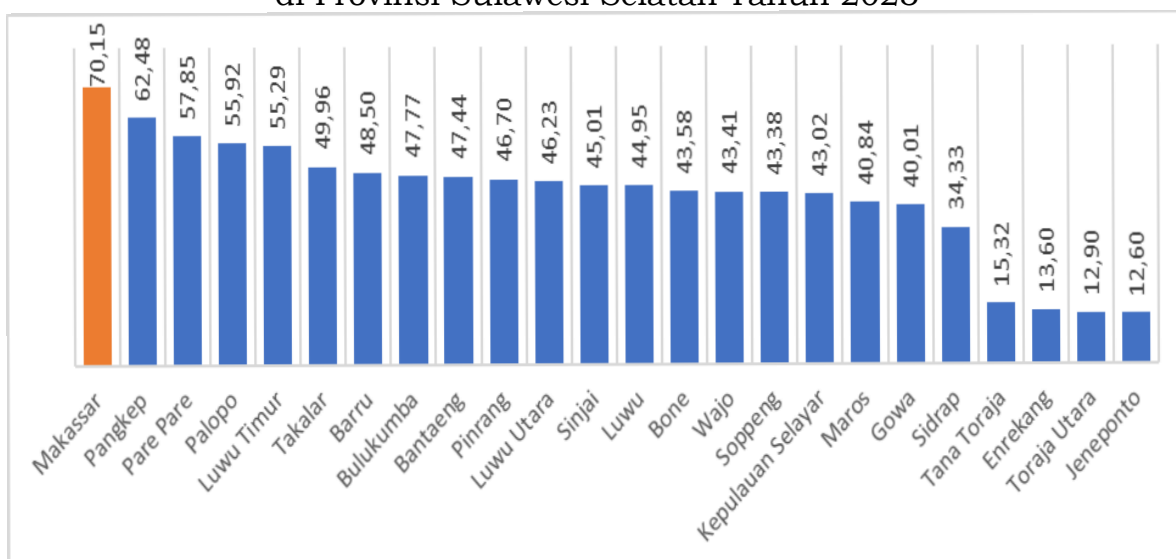
Grafik 2.173
Indeks Inovasi Daerah Kota Makassar Tahun 2021-2023



Sumber: Kementerian Dalam Negeri, Tahun 2023

Kenaikan nilai indeks di tahun 2023 tak hanya mengembalikan predikat Kota Makassar sebagai daerah yang sangat inovatif, tapi juga menempatkannya sebagai daerah dengan indeks inovasi daerah tertinggi di Sulawesi Selatan. Hanya ada dua daerah yang masuk kategori sebagai daerah “sangat inovatif” di Sulawesi Selatan yaitu Kota Makassar dan Kabupaten Pangkep, sebagian besar masih dalam kategori “inovatif”, bahkan ada yang termasuk kategori “kurang inovatif” yaitu Kabupaten Sidrap, Tana Toraja, Enrekang, Toraja Utara, dan Jeneponto.

Grafik 2.174
Indeks Inovasi Daerah Kabupaten/Kota
di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023

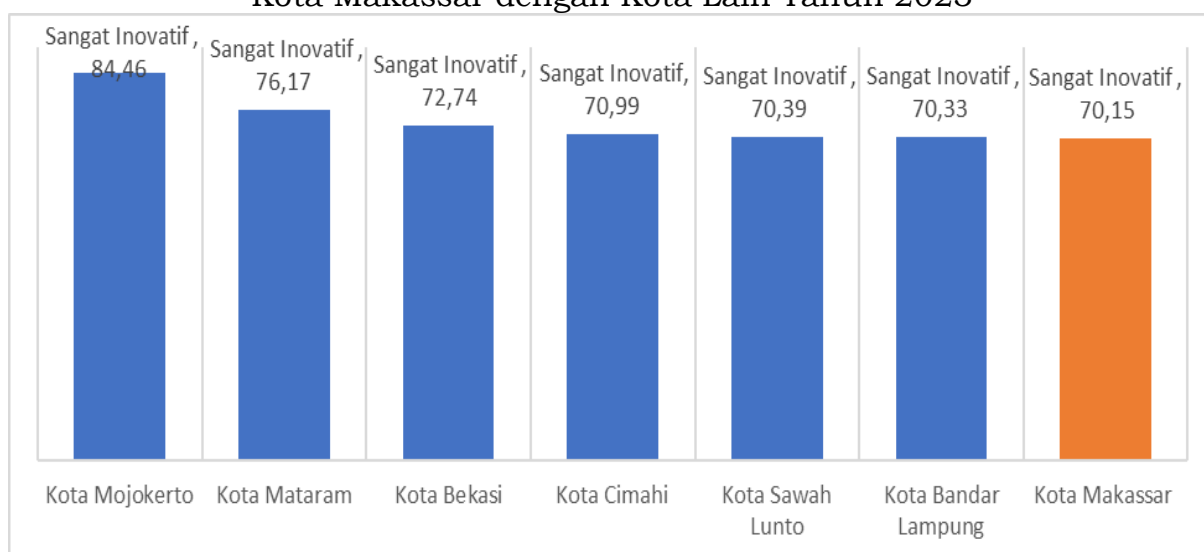


Sumber: Kementerian Dalam Negeri, Tahun 2023

Tidak hanya tinggi secara relatif di Sulawesi Selatan, indeks inovasi daerah Kota Makassar juga termasuk tinggi jika dikomparasi dengan kategori kota. Dari 93 kota yang dinilai oleh Kemendagri, posisi indeks inovasi Kota Makassar berada pada peringkat ke-7. Karena capaian tersebut, Kemendagri memberikan penghargaan kepada Kota Makassar pada ajang *Innovative Government Award (IGA) 2023*. Penghargaan ini diberikan sebagai pengakuan terhadap prestasi Pemerintah Kota Makassar dalam menerapkan 75 inovasi, di antaranya dua inovasi yang menjadi unggulan. Salah satunya adalah inovasi bernama 'Pakinta' yang dikembangkan oleh Badan Pendapatan Daerah dan telah memberikan kontribusi penting dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan pendapatan daerah.

Meski berhasil mendapatkan penghargaan sebagai kota inovatif, indeks inovasi Kota Makassar masih relatif lebih rendah dibandingkan beberapa kota lainnya. Secara nasional, Kota Makassar berada pada peringkat ketujuh daerah dengan indeks inovasi tertinggi pada kategori kota, masih tertinggal dari enam daerah lainnya. Daerah yang memiliki indeks inovasi paling tinggi dan menempati peringkat pertama adalah Kota Mojokerto dengan nilai indeks 84,46 tahun 2023. Capaian Kota Mojokerto salah satunya disebabkan karena jumlah inovasinya lebih banyak dibandingkan daerah lain. Setelah Kota Mojokerto, ada Kota Mataram dengan mencapai indeks inovasi 76,17. Tahun 2023, Kota Mataram memiliki total 134 inovasi, dimana empat inovasi paling diunggulkan. Empat inovasi yang diunggulkan Kota Mataram terbagi menjadi dua kategori, yaitu kategori digital sebanyak 3 inovasi dan 1 inovasi di kategori non digital.

Grafik 2.175
Perbandingan Indeks Inovasi Daerah
Kota Makassar dengan Kota Lain Tahun 2023



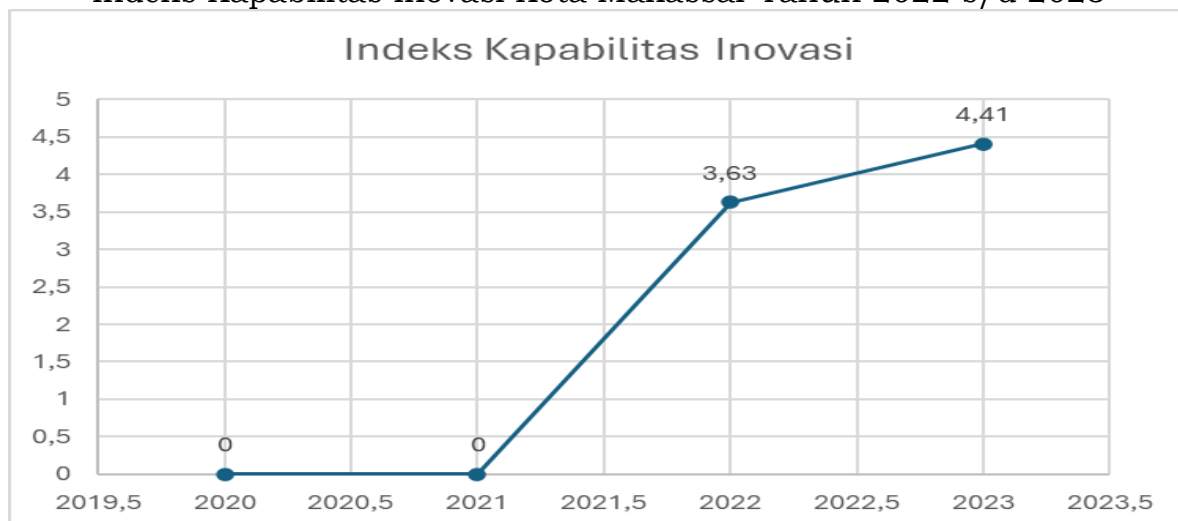
Sumber: Kementerian Dalam Negeri, Tahun 2023

Empat daerah lain yang memiliki indeks inovasi lebih tinggi dari Kota Makassar adalah Kota Bekasi, Kota Cimahi, Kota Sawah Lunto, dan Kota Bandar Lampung. Keempat kota ini juga memiliki inovasi yang lebih banyak dibandingkan Kota Makassar. Jika membandingkan antara Kota Makassar dan kota lainnya yang memiliki indeks inovasi lebih tinggi, kota-kota tersebut tidak hanya memiliki kuantitas inovasi lebih banyak, tapi juga inovasi mereka ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan yang sangat berdampak terhadap masyarakat.

2.4.10. Indeks Kapabilitas Inovasi

Indeks daya saing daerah, memiliki skor 1-5, dimana kapabilitas inovasi semakin baik jika angkanya semakin tinggi. Dalam dua tahun terakhir, indeks kapabilitas inovasi Kota Makassar naik dari 3,63 di tahun 2022 ke 4,41 pada tahun 2023. Kenaikan ini menjelaskan perbaikan terus menerus pada lingkungan inovasi agar terjadi kolaborasi, konektivitas, kreativitas, keragaman, konfrontasi lintas-visi, dan sudut pandang yang berbeda untuk menghasilkan produk inovatif. Capaian tahun 2023 juga menunjukkan kapabilitas inovasi Kota Makassar semakin mendekati angka ideal.

Grafik 2.176
Indeks Kapabilitas Inovasi Kota Makassar Tahun 2022 s/d 2023

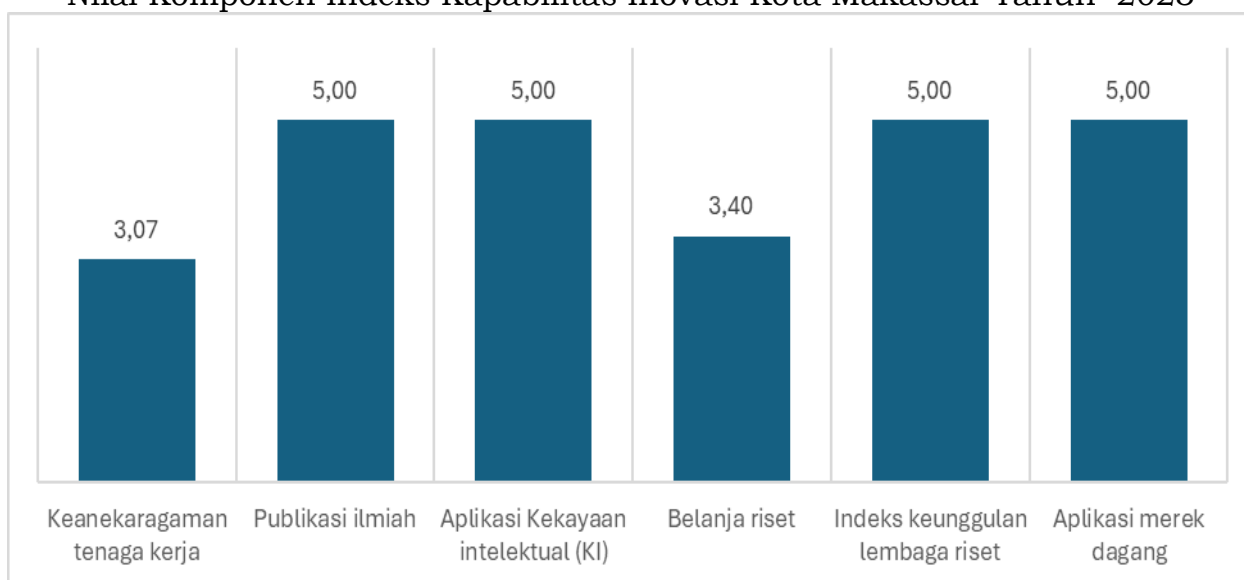


Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional, Tahun 2024

Ada enam indikator dalam mengukur indeks kapabilitas inovasi, yaitu Keanekaragaman tenaga kerja; Publikasi ilmiah; Aplikasi Kekayaan intelektual (KI); Belanja riset; Indeks keunggulan lembaga riset; dan Aplikasi merek dagang. Dari enam indikator tersebut, Kota Makassar sudah mendapat nilai ideal (5) untuk empat indikator yaitu publikasi ilmiah, aplikasi kekayaan intelektual, indeks keunggulan lembaga riset, dan aplikasi merek dagang. Namun ada dua indikator yang masih relatif rendah dan sangat strategis yaitu keanekaragaman tenaga kerja dan belanja riset dengan nilai masing-masing 3,07 dan 3,40. Dari data ini maka dapat disimpulkan bahwa tenaga kerja di Kota Makassar masih cenderung homogen (skillnya relatif sama, idenya relatif sama, pengetahuannya relatif sama) dan belanja riset yang dialokasikan oleh pemerintah daerah masih relatif rendah.

Grafik 2.177

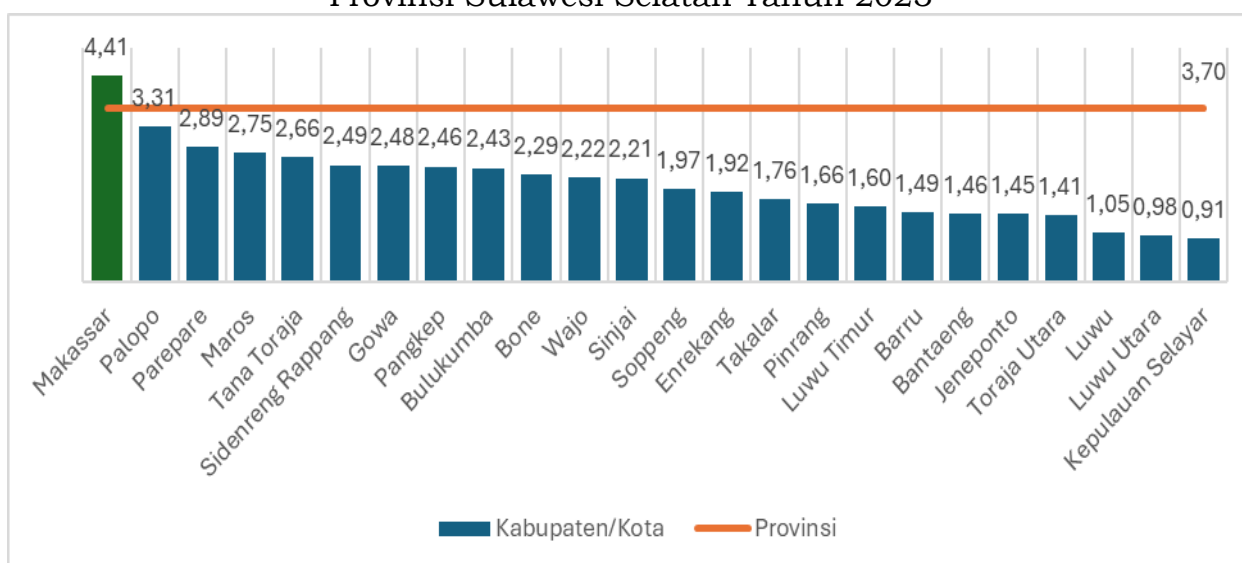
Nilai Komponen Indeks Kapabilitas Inovasi Kota Makassar Tahun 2023



Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional, Tahun 2024

Capaian indeks kapabilitas inovasi Kota Makassar tahun 2023 menempatkannya pada posisi pertama daerah dengan nilai indeks tertinggi di Sulawesi Selatan dan juga melampaui angka provinsi. Kota Makassar sangat terbantu dengan banyaknya kampus yang menghasilkan lebih banyak penelitian, publikasi, dan merek dagang. Daerah-daerah yang memiliki banyak universitas, cenderung memiliki indeks kapabilitas inovasi yang cukup tinggi. Selain Kota Makassar, Kota Palopo, Kota Parepare, Kabupaten Maros memiliki banyak perguruan tinggi sehingga mereka bisa mencatat angka yang tinggi setidaknya pada indikator publikasi ilmiah dan kekayaan intelektual.

Grafik 2.178
Indeks Kapabilitas Inovasi Kabupaten/Kota di
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023



Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional, Tahun 2024

Meskipun Kota Makassar memiliki indeks kapabilitas inovasi yang tinggi, namun perbaikan mesti tetap diupayakan, terutama untuk mendorong keragaman tenaga kerja dan meningkatkan belanja riset. Kolaborasi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan dunia usaha masih sangat lemah dan cenderung berjalan masing-masing. Pemerintah Kota Makassar belum memiliki peta jalan penelitian dan inovasi, sehingga ide penelitiannya cenderung bersifat spontanitas saja, padahal penelitian dan inovasi seharusnya direncanakan dengan baik agar dampaknya bisa lebih besar terhadap pembangunan daerah secara umum.

2.5. Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025

Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJPD pada akhir periode RPJPD yang menjelaskan Visi dan Misi Kota Makassar, arah kebijakan, sasaran pokok serta indikator dan target kinerja pembangunan daerah jangka panjang yang dicapai oleh Kota Makassar untuk kurun waktu 20 tahun, selain itu pelaksanaan evaluasi ini juga bertujuan mengetahui sejauhmana realisasi antara sasaran pokok arah kebijakan RPJPD dengan capaian sasaran RPJMD serta realisasi antara capaian sasaran pokok arah kebijakan RPJPD dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah Provinsi.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2005-2025, dengan visi Kota Makassar untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun **“Makassar sebagai Kota Maritim, Niaga, Pendidikan, Budaya dan Jasa yang Berorientasi Global, Berwawasan Lingkungan dan Paling Bersahabat”**. RPJPD 2005-2025 dijabarkan kedalam perodesasi RPJMD sebagai dokumen perencanaan jangka menengah untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, sebagai penjabaran Visi dan Misi Pemerintah Kota Makassar, yang dalam perodesasi RPJPD telah ditetapkan 4 (empat) perodesasi RPJMD Kota Makassar, yaitu RPJMD 2005-2009, RPJMD 2010-2014, RPJMD 2015-2019 dan RPJMD 2021-2026.

Visi RPJPD Kota Makassar 2005-2025 di-*cascading* menjadi 7 (tujuh) misi, 10 (sepuluh) sasaran pokok, 35 (tiga puluh lima) indikator kinerja sasaran pokok dengan 40 (empat puluh) indikator kinerja dan target kinerja. Penjabaran secara sistematis untuk menciptakan keselarasan Visi dan Misi yang diturunkan menjadi tujuan dan indikator tujuan serta sasaran dan indikator sasaran, RPJPD Tahun 2005 – 2025 Kota Makassar, dapat dijelaskan sebagai berikut.

Misi 1 : Mengembangkan Kultur Maritim dan Memanfaatkan Sumberdaya Laut Secara Optimal dan Berkelanjutan

Dalam upaya pencapaian Misi 1, diterjemahkan ke dalam 1 (satu) Sasaran Pokok dengan 4 (empat) indikator Sasaran, sehingga pencapaian Misi 1 dapat diukur melalui capaian masing-masing dengan indikator kinerja Sasaran Pokok “Meningkatnya kapasitas infrastruktur kemaritiman, sarana/prasarana perkotaan kawasan pesisir, dan pemanfaatan sumberdaya perikanan dan pulau-pulau” dengan indikator kinerja 1). Jumlah penumpang pengguna pelabuhan, 2). volume barang yang melewati pelabuhan, 3). kontribusi usaha perikanan dan kelautan pada PDRB, dan 4). Keberadaan *waterfront city*. Arah kebijakan pembangunan jangka panjang untuk mencapai sasaran pokok tersebut “Pengembangan dukungan infrastruktur kemaritiman; pengelolaan berkelanjutan potensi perikanan; serta pengembangan dan rehabilitasi kawasan strategis koridor pesisir melalui kawasan reklamasi kota untuk berkembangnya *waterfront city*”.

Uraian Sasaran Pokok dan target kerjanya dalam upaya pencapaian Misi 1, dengan dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 2.42
Sasaran Pokok dan Indikator Kinerja, Misi 1 RPJPD Tahun 2005-2025
Kota Makassar

Misi/ Sasaran Pokok	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Sasaran Pokok RPJPD Kota Makassar			
				2005- 2009	2010- 2014	2015- 2019	2020- 2025
Misi 1: Mengembangkan kultur maritim dan memanfaatkan sumberdaya laut secara optimal dan berkelanjutan							
Meningkatnya kapasitas infrastruktur kemaritiman, sarana/prasarana perkotaan kawasan pesisir, dan pemanfaatan sumberdaya perikanan dan pulau-pulau	Jumlah penumpang pengguna pelabuhan (Orang)	774.510	1.023.612	723.028	855.696	1.023.612	1.023.612
	Volume barang yang melewati pelabuhan (Ton)	9.836.472	3.585.902	7.474.636	3.819.623	3.585.902	3.585.902
	Kontribusi usaha perikanan dalam PDRB (%)	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
	Keberadaan <i>water front city</i>	Belum Ada	Ada	Belum ada	Ada	Ada	Ada

Misi 2 : Memberdayakan Kekuatan Ekonomi Masyarakat dan Memperkuat Daya Saing Ekonomi Kota

Dalam upaya pencapaian Misi 2, diterjemahkan ke dalam 2 (dua) Sasaran Pokok dengan 7 (tujuh) indikator Sasaran Pokok, sehingga pencapaian Misi 2

dapat . . .

dapat diukur melalui capaian masing-masing indikator kinerja Sasaran Pokok, sebagai berikut:

Sasaran pokok untuk Misi 2, yang pertama adalah: “Meningkatnya kesejahteraan masyarakat berbasis daya saing perdagangan dan jasa” dengan indikator kinerja: 1). PDRB/kapita (Juta Rp), 2). Angka pengangguran (%), 3). Kontribusi usaha perdagangan dalam PDRB (%), 4). Kontribusi usaha jasa dalam PDRB, dan 5). Jumlah wisatawan domestik dan mancanegara. Arah kebijakan untuk mencapai sasaran pokok ini adalah ”Pengembangan pusat-pusat perniagaan dan fasilitas pendukung perdagangan, jasa dan pariwisata, pengembangan UKM dan penguatan perusahaan Daerah, serta pemantapan iklim investasi”.

Sasaran pokok yang kedua adalah “Terlindunginya golongan masyarakat lapis bawah dari kerentanan sosial dan ekonomi”, dengan Indikator kinerja: 1). Persentase Penduduk miskin, 2). Persentase Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) tertangani. Arah kebijakan pembangunan jangka Panjang dalam mencapai sasaran pokok ini adalah “Penanggulangan kemiskinan dan penanganan PMKS secara terpadu melalui penanganan sektor informal perkotaan, pemberian jaminan sosial keluarga, dan peningkatan keterampilan anggota keluarga kurang mampu”.

Uraian Sasaran Pokok dan target kerjanya dalam upaya pencapaian Misi 2, dengan dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 2.43
Sasaran Pokok dan Indikator Kinerja, Misi 2 RPJPD Tahun 2005-2025
Kota Makassar

Misi/ Sasaran Pokok	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Sasaran Pokok RPJPD Kota Makassar			
				2005- 2009	2010- 2014	2015- 2019	2020- 2025
Misi 2: Memberdayakan kekuatan ekonomi masyarakat dan menguatkan daya saing ekonomi kota							
Meningka tnya kesejahter aan masyarak at berbasis daya saing perdagangan dan jasa	PDRB/kapita (Juta Rp)	78.770.000	152.194.340	37.007.451	78.770.000	114.171.731	152.194.340
	Angka pengangguran (%)	12,02	9,68	10,9	12,02	11,12	9,68
	Kontribusi usaha perdagangan dalam PDRB (%)	18,31	32,46	29,08	18,31	27,06	32,46
	Kontribusi usaha jasa dalam PDRB	21,66	7,02	16,26	21,66	9,18	7,02
	Jumlah wisatawan domestik (Orang)	1.761.658	23.349.446	2.072.538	3.771.067	9.383.620	23.349.446
	Jumlah wisatawan mancanegara (Orang)	24.395	330.420	28.699	53.879	134.064	330.420
Terlindungi ya golongan masyarakat lapis bawah dari kerentanan sosial dan ekonomi	Penduduk miskin (%)	6,19	5 - 6	5,86	4,38	5 - 6	5 - 6
	Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) tertangani (%)	80% (Permensos No.129/2008)	85%	80%	80%	82,50%	85%

Misi 3: . . .

Misi 3: Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Secara Layak dan Bermanfaat

Dalam upaya pencapaian Misi 3, diterjemahkan ke dalam 2 (dua) Sasaran Pokok dengan 7 (tujuh) indikator Sasaran Pokok, sehingga pencapaian Misi 3 dapat diukur melalui capaian masing-masing indikator kinerja Sasaran Pokok, sebagai berikut:

Sasaran Pokok Misi 3, yang pertama adalah “Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat”, dengan indikator kinerja yaitu: 1). Indeks Pembangunan Manusia (IPM), 2). Angka Rata-rata Lama Sekolah (Tahun), 3). Angka Partisipasi Murni (SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA, 4). Angka Harapan Lama Sekolah. Arah kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah untuk mencapai sasaran pokok ini adalah “Peningkatan dan pemerataan akses layanan pendidikan melalui kerangka pendidikan gratis, peningkatan kualitas layanan pendidikan, dan pengembangan fasilitas pendukung bagi Makassar sebagai kota tujuan pendidikan”.

Sasaran Pokok Misi 3, yang kedua adalah “Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, dengan indikator kinerja yaitu: 1). Angka Harapan Hidup, 2). Persentase Rumah Bersanitasi, 3). Persentase Penduduk Berakses Air Bersih. Arah kebijakan pembangunan jangka panjang untuk mencapai sasaran pokok ini adalah ”Peningkatan dan pemerataan akses dan jangkauan layanan kesehatan, peningkatan kualitas layanan kesehatan, dan dukungan sarana serta fasilitas bagi pola hidup bersih dan sehat dalam masyarakat”.

Uraian Sasaran Pokok dan target kinerjanya dalam upaya pencapaian Misi 3, dengan dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 2.44
Sasaran Pokok dan Indikator Kinerja, Misi 3 RPJPD Tahun 2005-2025
Kota Makassar

Misi/ Sasaran Pokok	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Sasaran Pokok RPJPD Kota Makassar			
				2005- 2009	2010- 2014	2015- 2019	2020- 2025
Misi 3: Meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara layak dan bermanfaat							
Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	79,94	84	77,63	79,94	82	84
	Angka rata-rata lama sekolah (Thn)	10,77	11	10,5	10,77	10,9	11
	Angka Partisipasi Murni (APM):						
	SD/MI (%)	98,57	99,57	98,69	98,57	99,07	99,57
	SMP/MTs (%)	96,78	97,78	94,91	96,78	99,28	97,78
	SMA/SMK/MA (%)	71,08	72,08	77,18	71,08	71,58	72,08
	Angka harapan lama sekolah (Tahun)	14,76	4,88	14,78	14,82	14,84	14,88

Terlindungnya golongan masyarakat lapis bawah dari kerentanan sosial dan ekonomi Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup (Tahun)	71,47	75	71,37	71,47	72	75
	Rumah bersanitasi (%)	90,1	100	70.6	90,1	100	100
	Penduduk berakses air bersih (%)	92,09	100	76.5	92,09	100	100

Misi 4 : Memantapkan dan Memanfaatkan Ruang serta Lingkungan Hidup Yang Nyaman, Tertib dan Berkesinambungan

Dalam upaya pencapaian Misi 4, diterjemahkan ke dalam 2 (dua) Sasaran Pokok dengan 7 (tujuh) indikator Sasaran Pokok, sehingga pencapaian Misi 4 dapat diukur melalui capaian masing-masing indikator kinerja Sasaran Pokok, sebagai berikut:

Sasaran Pokok Misi 4, yang pertama adalah “Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dalam menjamin kehidupan kota yang nyaman” dengan indikator kinerja yaitu: 1). Indeks Kota Nyaman, 2). Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Air, Udara, Tutupan Hutan, 3). Ruang Terbuka Hijau (%), 4). Kategori Penilaian Penghargaan Lingkungan. Kebijakan pembangunan untuk mencapai sasaran pokok tersebut diarahkan pada ”Perwujudan lingkungan hidup yang bersih dan terkendali dari pencemaran, penguatan kerangka legal dan konsistensi penataan ruang, serta penanganan kebersihan dan keindahan kota berbasis ruang terbuka hijau, penataan lorong serta penanganan sampah secara terpadu”.

Sasaran Pokok Misi 4, yang kedua adalah “Terpeliharanya ketertiban dan ketentraman dalam menjamin kehidupan kota yang nyaman”. Indikator kinerja dari sasaran pokok kedua ini adalah: 1). Cakupan Penyelesaian Kasus Kriminal, 2). Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Gangguan: Ketertiban, Ketentraman, Kenyamanan (K3) / Tingkat Penyelesaian Tindakan Kriminalitas. Arah kebijakan pembangunan untuk sasaran pokok ini adalah ”Peningkatan stabilitas keamanan dan pemeliharaan ketertiban umum berbasis partisipasi masyarakat dan penegakan hukum”.

Uraian Sasaran Pokok dan target kinerjanya dalam upaya pencapaian Misi 4, dengan dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 2.45
Sasaran Pokok dan Indikator Kinerja, Misi 4 RPJPD Tahun 2005-2025
Kota Makassar

Misi/ Sasaran Pokok	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Sasaran Pokok RPJPD Kota Makassar			
				2005- 2009	2010- 2014	2015- 2019	2020- 2025
Misi 4: Memantapkan dan memanfaatkan ruang dan lingkungan hidup yang nyaman, tertib dan berkesinambungan							

Meningkatnya . . .

Meningkat-nya kualitas lingkungan hidup dalam menjamin kehidupan kota yang nyaman	Indeks Kota Nyaman (Survei IAP)	63,62	77,82	-	63,62	70,72	77,82
	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) Air, udara, tutupan hutan	64,06	70	-	63,5	67,5	70
	Ruang terbuka hijau (%)	8,13	18,6	8,25	8,31	10,3	18,6
	Kategori penilaian penghargaan lingkungan	Belum dapat Piala Adipura	Piala Adipura	Belum dapat Piala Adipura	Piala Adipura	Piala Adipura	Piala Adipura
Terpeliharanya ketertiban dan ketenteraman dalam menjamin kehidupan kota yang nyaman	Cakupan Penyelesaian Kasus Kriminal (%)	30%	50%	35%	38%	45%	50%
	Tingkat penyelesaian pelanggaran gangguan: ketertiban, ketenteraman, kenyamanan (K3)/tingkat penyelesaian tindakan kriminalitas (%)	75%	85%	70%	75%	80%	85%

Misi 5 : Mengembangkan Manajemen Pembangunan Kota yang Berbudaya dan Berwawasan Masa Depan

Dalam upaya pencapaian Misi 5, diterjemahkan ke dalam 1 (satu) Sasaran Pokok dengan 3 (tujuh) indikator Sasaran Pokok, sehingga pencapaian Misi dapat diukur melalui capaian masing-masing indikator kinerja Sasaran Pokok. Sasaran Pokok Misi 5 adalah “Sasaran pokok dalam menjalankan Misi ini adalah “Berkembangnya infrastruktur dan fasilitas kota yang mendorong literasi warga kota dalam wawasan masa depan”, dengan indikator kinerja yaitu: 1). Indeks Kota Cerdas (*Smart City*), 2). Cakupan Infrastruktur Dan Fasilitas Kota Yang Layak (Cakupan Panjang Jalan Kualitas Baik, Cakupan Infrastruktur Perhubungan Kualitas Baik (Terminal dan Halte), Cakupan Sarana Dan Prasarana Utilitas Permukiman Yang Layak, Cakupan Jaringan Utilitas Kota yang Layak). Arah kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah untuk mencapai sasaran pokok ini adalah “Peningkatan kapasitas serta jangkauan infrastruktur dan fasilitas kota dengan jenis dan kualitas yang terus berkembang sesuai dinamika global”.

Uraian Sasaran Pokok dan target kinerjanya dalam upaya pencapaian Misi 6, dengan dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 2.46
Sasaran Pokok dan Indikator Kinerja, Misi 5 RPJPD Tahun 2005-2025
Kota Makassar

Misi/ Sasaran Pokok	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Sasaran Pokok RPJPD Kota Makassar			
				2005- 2009	2010- 2014	2015- 2019	2020- 2025
Misi 5: Mengembangkan manajemen pembangunan kota yang berbudaya dan berwawasan masa depan							
Berkembangnya infrastruktur dan fasilitas kota yang mendorong literasi warga kota dalam wawasan masa depan	Indeks Kota Cerdas (Smart City)	Belum ada penilaian baik	10 besar kota di Indonesia	Belum ada penilaian	Belum ada penilaian	15 besar kota di Indonesia	10 besar kota di Indonesia
	Cakupan infrastruktur dan fasilitas kota yang layak:						
	Cakupan Panjang Jalan Kualitas Baik (%)	56%	85%	56%	75%	80%	85%
	Cakupan infrastruktur perhubungan kualitas baik (terminal dan halte) (%)	60,00%	94%	60%	75%	90%	94%
	Cakupan sarana dan prasarana utilitas permukiman yang layak (%)	86,71%	98,35%	86,71%	90,59%	94,47%	98,35%
	Cakupan jaringan utilitas kota yang layak (%)	25%	100%	25,00%	75,05%	87,50%	100%

Misi 6 : Meningkatkan Apresiasi Budaya, Agama, Penegakan Hukum dan Kepedulian Terhadap Lingkungan

Dalam upaya pencapaian Misi 6, diterjemahkan ke dalam 1 (satu) Sasaran Pokok dengan 4 (empat) indikator Sasaran Pokok, sehingga pencapaian Misi dapat diukur melalui capaian masing-masing indikator kinerja Sasaran Pokok. Sasaran Pokok Misi 6, adalah “Berkembangnya apresiasi budaya, kehidupan beragama dan harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat”, dengan indikator kinerja yaitu: 1). Indeks Kebahagiaan, 2). Cakupan Nilai Budaya dan Kekayaan Budaya yang Dilestarikan dan Dikembangkan, 3). Persentase Tempat Ibadah Kualitas Baik, 4). Jumlah Insiden Terkait SARA. Arah kebijakan pembangunan jangka panjang untuk mencapai sasaran pokok ini adalah ”Pemeliharaan kehidupan beragama sebagai landasan moral masyarakat, apresiasi budaya dan kearifan lokal, dan penguatan harmoni sosial berbasis kemajemukan masyarakat.

Uraian Sasaran Pokok dan target kinerjanya dalam upaya pencapaian Misi 6, dengan dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 2.47
Sasaran Pokok dan Indikator Kinerja, Misi 6 RPJPD Tahun 2005-2025
Kota Makassar

Misi/ Sasaran Pokok	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Sasaran Pokok RPJPD Kota Makassar			
				2005- 2009	2010- 2014	2015- 2019	2020- 2025
Misi 6: Meningkatkan apresiasi budaya, agama, penegakan hukum dan kepedulian terhadap lingkungan							
Berkembangnya apresiasi budaya, kehidupan beragama dan harmoni sosial dalam kehidupan kemasyarakatan	Indeks Kebahagiaan	Belum ada penilaian	85%	Belum ada penilaian	75,21%	80%	85%
	Cakupan nilai budaya dan kekayaan budaya yang dilestarikan dan dikembangkan (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Tempat ibadah kualitas baik (%)	80%	80%	80%	100%	100%	100%
	Jumlah insiden terkait (SARA)	0	0	0	0	0	0

Misi 7 : Mengembangkan Sistem Pemerintahan yang Baik

Dalam upaya pencapaian Misi 7, diterjemahkan ke dalam 1 (satu) Sasaran Pokok dengan 4 (empat) indikator, sehingga pencapaian Misi dapat diukur melalui capaian masing-masing indikator kinerja Sasaran Pokok. Sasaran Pokok Misi 7, adalah “Berkembangnya pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang memuaskan”, dengan Indikator kinerja dari sasaran pokok yakni: 1). Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik, 2). Nilai Capaian SPM Pelayanan Dasar, 3). Nilai Akuntabilitas Kinerja (LAKIP), 4). Opini Laporan Keuangan. Arah kebijakan pembangunan untuk mencapai sasaran pokok ini adalah “Peningkatan profesionalisme dan penguatan kelembagaan pemerintahan; pengembangan akuntabilitas, transparansi dan partisipasi untuk perwujudan tata Kelola yang baik; transformasi birokrasi perwujudan pelayanan publik kelas dunia; dan pemantapan capaian standar pelayanan minimal (SPM)”.

Uraian Sasaran Pokok dan target kinerjanya dalam upaya pencapaian Misi 7, dengan dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 2.48
Sasaran Pokok dan Indikator Kinerja, Misi 7 RPJPD Tahun 2005-2025
Kota Makassar

Misi/ Sasaran Pokok	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Sasaran Pokok RPJPD Kota Makassar			
				2005- 2009	2010- 2014	2015- 2019	2020- 2025
Misi 7: Mengembangkan sistem pemerintahan yang baik							
Berkembangnya pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang memuaskan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Tidak ada penilaian	100%	80	80	100	100
	Nilai capaian SPM pelayanan dasar	Belum ada penetapan SPM	100%	Belum ada Penilaian Penetapan SPM	100%	100%	100%
	Nilai akuntabilitas kinerja (LAKIP)	CC	A	-	CC	B	A
	Opini laporan keuangan	WDP	WTP	-	WDP	WTP	WTP

Capaian sasaran pokok RPJPD Kota Makassar 2005-2025, dapat dirangkum pada tabel berikut ini:

Tabel 2.49
Evaluasi terhadap Hasil RPJPD Kota Makassar 2005-2025

Visi: Makassar sebagai Kota Maritim, Niaga, Pendidikan, Budaya dan Jasa yang Berorientasi Global, Berwawasan Lingkungan dan Paling Bersahabat

Misi/Sasaran Pokok	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Sasaran Pokok RPJPD RPJPD Kota Makassar				Capaian Kinerja RPJMD kabupaten/kota terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kota Makassar				Tingkat Capaian Kinerja RPJMD kabupaten/kota terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kota Makassar (%)				Capaian Pada Akhir Perencanaan	Rasio Capaian Akhir (%)	
				2005-2009	2010-2014	2015-2019	2020-2025	2005-2009	2010-2014	2015-2019	2020-2025	2005-2009	2010-2014	2015-2019	2020-2025			
Misi 1: Mengembangkan Kultur Maritim dan Memanfaatkan Sumberdaya Laut Secara Optimal dan Berkelanjutan																		
Meningkatnya kapasitas infrastruktur kemaritiman, sarana/prasarana perkotaan kawasan pesisir, dan pemanfaatan sumberdaya perikanan dan pulau-pulau	Jumlah penumpang pengguna pelabuhan (Orang)	774.510	1.023.612	723.028	855.696	1.023.612	1.023.612	904.124	1.008.894	104.926	129.185	125,05	117,90	10,25	12,62	129.185	12,62	
	Volume barang yang melewati pelabuhan (Ton)	9.836.472	3.585.902	7.474.636	3.819.623	3.585.902	3.585.902	5.915.856	8.983.350	8.753.568	5.937.372	79,15	235,19	244,11	165,58	5.937.372	165,58	
	Kontribusi usaha perikanan dalam PDRB (%)	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,58	0,52	0,43	0,43	290,00	260,00	215,00	215,00	0,43	215
	Keberadaan water front city	Belum Ada	Ada	Belum ada	Ada	Ada	Ada	Ada	N.a	N.a	Pemeliharaan Rutin Anjungan Pantai Losari, Pemasangan Instalasi Air Bersih	FS dan Pra Desain Revitalisasi Pantai Losari (Sport Water Front Arena)	N.a	N.a	Ada	Ada	Ada	100
Misi 2: Memberdayakan Kekuatan Ekonomi Masyarakat dan Penguatan Daya Saing Ekonomi Kota																		

Meningkatnya . . .

Misi/Sasaran Pokok	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Sasaran Pokok RPJPD RPJPD Kota Makassar				Capaian Kinerja RPJMD kabupaten/kota terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kota Makassar				Tingkat Capaian Kinerja RPJMD kabupaten/kota terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kota Makassar (%)				Capaian Pada Akhir Perencanaan	Rasio Capaian Akhir (%)
				2005-2009	2010-2014	2015-2019	2020-2025	2005-2009	2010-2014	2015-2019	2020-2025	2005-2009	2010-2014	2015-2019	2020-2025		
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat berbasis daya saing perdagangan dan jasa	PDRB/kapita (Juta Rp)	78.770.000	152.194.340	37.007.451	78.770.000	114.171.731	152.194.340	39.540.000	70.240.000	116.870.000	145.880.000	106,84	89,17	102,36	95,85	145.880.000	95,85
	Angka pengangguran (%)	12,02	9,68	10,9	12,02	11,12	9,68	12,86	10,94	9,83	11,82	82,02	108,99	111,60	77,89	11,82	77,89
	Kontribusi bidang usaha perdagangan dalam PDRB (%)	18,31	32,46	29,08	18,31	27,06	32,46	18,2	18,28	20,46	19,84	62,59	99,84	75,61	61,12	19,84	61,12
	Kontribusi bidang usaha jasa dalam PDRB (%)	21,66	7,02	16,26	21,66	9,18	7,02	42,56	43,69	42,32	42,52	261,75	201,71	461,00	605,70	42,52	605,70
	Jumlah wisatawan domestik	1.761.658	23.349.446	2.072.538	3.771.067	9.383.620	23.349.446	N.a	14.075.256	23.568.394	6.700.792	N.a	373,24	251,17	28,70	6.700.792	28,70
	Jumlah wisatawan mancanegara	24.395	330.420	28.699	53.879	134.064	330.420	N.a	177.760	458.579	104.113	N.a	329,92	342,06	31,51	104.113	31,51
Terlindungnya golongan masyarakat lapis bawah	Penduduk Miskin (%)	6,19	5 - 6	5,86	4,38	5 - 6	5 - 6	5,52	4,48	4,28	4,58	105,80	97,72	114,40	108,40	4,58	108,40
	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) tertangani (%)	80% (Permenso No.129/2008)	85%	80%	80%	82,50%	85%	N.a	N.a	89%	88,7%	N.a	N.a	107,27	104,35	88,7	104,35

Misi/Sasaran Pokok	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Sasaran Pokok RPJPD RPJPD Kota Makassar				Capaian Kinerja RPJMD kabupaten/kota terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kota Makassar				Tingkat Capaian Kinerja RPJMD kabupaten/kota terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kota Makassar (%)				Capaian Pada Akhir Perencanaan	Rasio Capaian Akhir (%)
				2005-2009	2010-2014	2015-2019	2020-2025	2005-2009	2010-2014	2015-2019	2020-2025	2005-2009	2010-2014	2015-2019	2020-2025		
Misi 3: Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Secara Layak dan Bermanfaat																	
Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	79,94	84	77,63	79,94	82	84	78,24	79,35	82,25	83,12	100,79	99,26	100,3	98,95	83,12	98,95
	Angka rata-rata lama sekolah (Tahun)	10,77	11	10,5	10,77	10,9	11	10,23	10,64	11,21	11,55	97,43	98,79	102,75	105,00	11,55	105
	Angka Partisipasi Murni (APM):																
	SD/MI (%)	98,57	99,57	98,69	98,57	99,07	99,57	96,9	95,7	95,42	91,25	98,19	97,09	96,32	91,64	91,25	91,64
	SMP/MTs (%)	96,78	97,78	94,91	96,78	99,28	97,78	85,6	79,86	79,29	71,6	90,19	82,52	79,87	73,23	71,60	73,23
	SMA/SMK/MA (%)	71,08	72,08	77,18	71,08	71,58	72,08	55,6	68,25	59,41	68,25	72,04	96,09	83,00	94,69	68,25	94,69
	Angka harapan lama sekolah (Thn)	14,76	4,88	14,78	14,82	14,84	14,88	13,71	14,75	15,56	15,59	92,76	99,53	104,85	104,77	15,59	104,77
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup (Tahun)	71,47	75	71,37	71,47	72	75	N.a	71,38	72,00	72,40	N.a	99,87	100	96,53	72,40	96,53
	Rumah bersanitasi (%)	90,1	100	70,6	90,1	100	100	86	88,83	99,61	89,56	121,81	98,59	99,61	89,56	89,56	89,56
	Penduduk berakses air bersih (%)	92,09	100	76,5	92,09	100	100	63,83	79,86	65	73,95	83,44	86,72	65,00	73,95	73,95	73,95
Misi 4: Memantapkan dan memanfaatkan ruang dan lingkungan hidup yang nyaman, tertib dan berkesinambungan.																	

Meningkatnya . . .

Misi/Sasaran Pokok	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Sasaran Pokok RPJPD RPJPD Kota Makassar				Capaian Kinerja RPJMD kabupaten/kota terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kota Makassar				Tingkat Capaian Kinerja RPJMD kabupaten/kota terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kota Makassar (%)				Capaian Pada Akhir Perencanaan	Rasio Capaian Akhir (%)
				2005-2009	2010-2014	2015-2019	2020-2025	2005-2009	2010-2014	2015-2019	2020-2025	2005-2009	2010-2014	2015-2019	2020-2025		
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dalam menjamin kehidupan kota yang nyaman	Indeks Kota Nyaman (survei IAP)	63,62	77,82	0	63,62	70,72	77,82	N.a	N.a	55,70	55,70	N.a	N.a	78,76	71,58	55,70	71,58
	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) Air, udara, tutupan hutan	63,5 (Nasional) 64,06 (Sulsel)	70	0	63,5	67,5	70	N.a	N.a	53,052	62,57	N.a	N.a	78,60	89,39	62,57	89,39
	Ruang terbuka hijau (%)	8,13	18,6	8,25	8,31	10,3	18,6	N.a	7,22	7,48	9,07	N.a	86,88	72,62	48,76	9,07	48,76
	Kategori penilaian penghargaan lingkungan	Belum dapat Piala Adipura	Piala Adipura	Belum dapat Piala Adipura	Piala Adipura	Piala Adipura	Piala Adipura	Sertifikat Adipura	Piala Adipura	Penilaian Piala Adipura	Penilaian Piala Adipura	50	75	0	0	Penilaian Piala Adipura	0
Terpeliharanya ketertiban dan ketenteraman dalam menjamin kehidupan kota yang nyaman	Cakupan Penyelesaian Kasus Kriminal (%)	30%	50%	35%	38%	45%	50%	N.a	N.a	N.a	32,58 %	N.a	N.a	N.a	65,16	32,58	65,16
	Tingkat penyelesaian pelanggaran gangguan : ketertiban, Ketenteraman, kenyamanan (K3)/ tingkat penyelesaian tindakan kriminalitas (%)	75%	85%	70%	75%	80%	85%	N.a	100%	88%	95,56%	N.a	133,33	110,20	112,42	95,56	112,42

Misi/Sasaran Pokok	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Sasaran Pokok RPJPD RPJPD Kota Makassar				Capaian Kinerja RPJMD kabupaten/kota terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kota Makassar				Tingkat Capaian Kinerja RPJMD kabupaten/kota terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kota Makassar (%)				Capaian Pada Akhir Periode Perencanaan	Rasio Capaian Akhir (%)
				2005-2009	2010-2014	2015-2019	2020-2025	2005-2009	2010-2014	2015-2019	2020-2025	2005-2009	2010-2014	2015-2019	2020-2025		
Misi 5: Mengembangkan manajemen pembangunan kota yang berbudaya dan berwawasan masa depan																	
Berkembangnya infrastruktur dan fasilitas kota yang mendorong literasi warga kota dalam wawasan masa depan	Indeks Kota Cerdas (Smart City)	Belum ada penilaian baik	10 besar kota di Indonesia	Belum ada penilaian	Belum ada penilaian	15 besar kota di Indonesia	10 besar kota di Indonesia	N.a	N.a	2,93 (11 besar kota di Indonesia)	2,50 (peringkat 64 Kota di Indonesia)	N.a	N.a	136,00	15,62	Peringkat 64	15,62
	Cakupan infrastruktur dan fasilitas kota yang layak:																
	Cakupan Panjang Jalan Kualitas Baik (%)	56%	85%	56	75	80	85	56,43	47,99	97,3	92,89	100,77	63,99	121,63	109,28	92,89	109,28
	Cakupan infrastruktur perhubungan kualitas baik (terminal dan halte) (%)	60,00%	94%	60	75	90	94	100	100	100	75	166,67	133,33	111,11	79,79	75	79,79
	Cakupan sarana dan prasarana utilitas permukiman yang layak (%)	86,71%	98,35%	86,71%	90,59%	94,47%	98,35%	47%	44%	93%	89%	54,20	48,57	98,44	90,49	89	90,49
Cakupan jaringan utilitas kota yang layak (%)	25%	100%	25,00%	75,05%	87,50%	100%	80%	82%	84%	84%	320,00	109,26	96,00	84,00	84	84	

Misi 6: . . .

Misi/Sasaran Pokok	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Thn Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Th Perencanaan	Target Sasaran Pokok RPJPD RPJPD Kota Makassar				Capaian Kinerja RPJMD kabupaten/kota terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kota Makassar				Tingkat Capaian Kinerja RPJMD kabupaten/kota terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kota Makassar (%)				Capaian Pada Akhir Perencanaan	Rasio Capaian Akhir (%)
				2005-2009	2010-2014	2015-2019	2020-2025	2005-2009	2010-2014	2015-2019	2020-2025	2005-2009	2010-2014	2015-2019	2020-2025		
Misi 6: Meningkatkan apresiasi budaya, agama, penegakan hukum dan kepedulian terhadap lingkungan.																	
Berkembangnya apresiasi budaya, kehidupan beragama dan harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat	Indeks kebahagiaan	N.A	85%	N.A	75,21%	80%	85%	N.a	75,21	76,5	sdg proses	N.a	94,01	95,63	-	-	-
	Cakupan nilai budaya dan kekayaan budaya yang dilestarikan dan dikembangkan (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	N.a	N.a	100%	100%	N.a	N.a	100,00	100,00	100	100
	Tempat ibadah kualitas baik (%)	80%	80%	80%	100%	100%	100%	N.a	N.a	98%	92%	N.a	N.a	98,00	92,00	92	92
	Jumlah insiden terkait SARA	0	0	0	0	0	0	0	N.a	N.a	0	0	N.a	N.a	100	100	0
Misi 7: Mengembangkan sistem pemerintahan yang baik.																	
Berkembangnya pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang memuaskan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Tidak ada penilaian	100%	80	80	100	100	N.a	N.a	77,74	78,96	N.a	N.a	77,74	78,96	78,96	78,96
	Nilai capaian SPM pelayanan dasar	Belum ada penetapan SPM	100%	Belum ada Penilaian Penetapan SPM	100%	100%	100%	Belum ada penetapan SPM	Belum ada penetapan SPM	N.a	89,29	Belum ada penetapan SPM	Belum ada penetapan SPM	N.a	89,29	89,29	89,29
	Nilai akuntabilitas kinerja (LAKIP)	CC	A	-	CC	B	A	-	CC	B	B	N.a	100%	100%	66,67%	B	66,67
	Opini laporan keuangan	WDP	WTP	-	WDP	WTP	WTP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	100	100	100%	100%	100

Dari 40 (empat puluh) indikator kinerja misi RPJPD 2005-2025, ada 25 (dua puluh lima) indikator kinerja dengan kategori Sangat Tinggi (62,5%), 7 (tujuh) indikator kinerja dengan kategori Tinggi (17,5%), 6 (enam) indikator kinerja dengan kategori Sedang (15%), 1 (satu) indikator kinerja dengan kategori Rendah (2,5%), dan 1 (satu) indikator kinerja dengan kategori Sangat Rendah (2,5%), dan secara keseluruhan dapat disimpulkan sebagai berikut :

Rata-rata capaian kinerja dari 40 indikator kinerja adalah 111% dengan kategori kinerja Sangat Tinggi

Capaian dan dari masing-masing empat puluh indikator kinerja dan predikat kinerjanya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.50
Rata-Rata Capaian dan Predikat Kinerja RPJPD 2005-2025
Kota Makassar

No	Misi/Sasaran Pokok	Indikator Kinerja Sasaran Pokok	Rata-Rata Capaian (%)	Predikat Kinerja
	Misi 1: Mengembangkan kultur maritim dan memanfaatkan sumberdaya laut secara optimal dan berkelanjutan			
1	Meningkatnya kapasitas infrastruktur kemaritiman, sarana/ prasarana perkotaan kawasan pesisir, dan pemanfaatan sumberdaya perikanan dan pulau-pulau	Jumlah penumpang pengguna pelabuhan (Orang)	66,46	Sedang
		Volume barang yang melewati pelabuhan (Ton)	181,01	Sangat Tinggi
		Kontribusi usaha perikanan dalam PDRB (%)	245	Sangat Tinggi
		Keberadaan water front city	Ada	Sangat Tinggi (100%/Ada)
	Misi 2: Memberdayakan kekuatan ekonomi masyarakat Dan penguatan daya saing ekonomi kota			
2	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat berbasis daya saing perdagangan dan jasa	PDRB/kapita (Juta Rp)	98,56	Sangat Tinggi
		Angka pengangguran (%)	95,12	Sangat Tinggi
		Kontribusi bidang usaha perdagangan dalam PDRB (%)	74,79	Sedang
		Kontribusi bidang usaha jasa dalam PDRB (%)	382,54	Sangat Tinggi
		Jumlah wisatawan domestik	217,70	Sangat Tinggi
		Jumlah wisatawan mancanegara	234,50	Sangat Tinggi
3	Terlindunginya golongan masyarakat lapis bawah	Penduduk Miskin (%)	106,58	Sangat Tinggi
		Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) (%)	105,81	Sangat Tinggi

Misi 3: . . .

	Misi 3: Meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara layak dan bermanfaat			
4	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	99,83	Sangat Tinggi
		Angka rata-rata lama sekolah (Tahun)	100,99	Sangat Tinggi
		Angka Partisipasi Murni (APM): SD/MI (%)	95,81	Sangat Tinggi
		SMP/MTs (%)	81,45	Tinggi
		SMA/SMK/MA (%)	86,46	Tinggi
	Angka harapan lama sekolah (Thn)	100,48	Sangat Tinggi	
5	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup (Tahun)	98,80	Sangat Tinggi
		Rumah bersanitasi (%)	102,39	Sangat Tinggi
		Penduduk berakses air bersih (%)	77,28	Tinggi
	Misi 4: Memantapkan dan memanfaatkan ruang dan lingkungan hidup yang nyaman, tertib dan berkesinambungan			
6	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dalam menjamin kehidupan kota yang nyaman	Indeks Kota Nyaman (Survei IAP)	75,17	Sedang
		Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) Air, udara, tutupan hutan	83,99	Tinggi
		Ruang terbuka hijau (%)	69,42	Sedang
		Kategori penilaian penghargaan lingkungan	31,25	Sangat Rendah
7	Terpeliharanya ketertiban dan ketenteraman dalam menjamin kehidupan kota yang nyaman	Cakupan Penyelesaian Kasus Kriminal (%)	65,16	Rendah
		Tingkat penyelesaian pelanggaran gangguan: ketertiban, ketenteraman, kenyamanan (K3)/tingkat penyelesaian tindakan kriminalitas (%)	118,65	Sangat Tinggi
	Misi 5: Mengembangkan manajemen pembangunan kota yang berbudaya dan berwawasan masa depan.			
8	Berkembangnya infrastruktur dan fasilitas kota yang mendorong literasi warga kota dalam wawasan masa depan	Indeks Kota Cerdas (Smart City)	75,81	Sedang
		Cakupan infrastruktur dan fasilitas kota yang layak:		
		Cakupan Panjang Jalan Kualitas Baik (%)	98,92	Sangat Tinggi
		Cakupan infrastruktur perhubungan kualitas baik (terminal dan halte) (%)	129,37	Sangat Tinggi
		Cakupan sarana dan prasarana utilitas permukiman yang layak (%)	72,93	Sedang
		Cakupan jaringan utilitas kota yang layak (%)	152,32	Sangat Tinggi

	Misi 6: Meningkatkan apresiasi budaya, agama, penegakan hukum dan kepedulian terhadap lingkungan			
9	Berkembangnya apresiasi budaya, kehidupan beragama dan harmoni sosial dalam kehidupan kemasyarakatan	Indeks Kebahagiaan	94,82	Sangat Tinggi
		Cakupan nilai budaya dan kekayaan budaya yang dilestarikan dan dikembangkan (%)	100	Sangat Tinggi
		Tempat ibadah kualitas baik (%)	95	Sangat Tinggi
		Jumlah insiden terkait (SARA)	100	Sangat Tinggi* (Tidak ada konflik)
	Misi 7: Mengembangkan sistem pemerintahan yang baik			
10	Berkembangnya pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang memuaskan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	78,35	Tinggi
		Nilai capaian SPM pelayanan dasar	89,29	Tinggi
		Nilai akuntabilitas kinerja (LAKIP)	88,89	Tinggi
		Opini laporan keuangan	100	Sangat Tinggi
	Rata-Rata Capaian		111	Sangat Tinggi

Berdasarkan kesimpulan evaluasi hasil RPJPD di atas, maka berikut disampaikan beberapa rekomendasi terhadap proses perencanaan dan proses pembangunan kedepannya. Hasil evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025 mencatat beberapa hal penting dalam setiap pencapaian misi yang perlu diperkuat untuk keberhasilan pembangunan kedepan, meliputi hal sebagai berikut :

1. Indikator kinerja RPJPD Kota Makassar tahun 2005-2025 masih banyak indikator yang berada pada level hasil (*outcome*) bahkan keluaran (*output*), dimana seyogyanya untuk indikator rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah adalah indikator level manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*) atau indikator yang bersifat komposit yaitu indikator yang terdiri dari beberapa variabel atau indikator yang berbeda, yang kemudian digabungkan menjadi satu ukuran tunggal untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap.
2. Indikator kinerja RPJPD Kota Makassar tahun 2005-2025 masih terdapat indikator yang secara urusan bukan masuk pada kewenangan pelaksanaan urusan Pemerintah Kota Makassar, sehingga sulit bagi Pemerintah Kota Makassar mengintervensi melalui program-program pembangunan daerah guna mencapai target-target yang ditetapkan. Guna penyusunan RPJPD berikutnya, penetapan indikator kinerja haruslah yang merupakan penjabaran dari pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Makassar seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Indikator kinerja RPJPD Kota Makassar tahun 2005-2025 secara kuantitas (jumlah) masih terlalu banyak, dimana seyogyanya untuk indikator rencana pembangunan jangka panjang dibatasi jumlahnya sehingga indikator yang ditetapkan betul-betul merupakan indikator yang berdampak jangka menengah dan jangka panjang.
4. Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang kedepan, strategi dan arah kebijakan pembangunan agar lebih berfokus pada peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah guna percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kota Makassar.

5. Menilai . . .

5. Menilai kembali prioritas kebijakan dan program pembangunan daerah, dimana program-program prioritas dapat diarahkan pada fokus:
 - a. Pencapaian target-target Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai prioritas belanja daerah guna pemenuhan jenis, mutu dan penerima pelayanan dasar sebagaimana amanah Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang SPM;
 - b. Pembangunan infrastruktur perkotaan, termasuk peningkatan kualitas jalan, pedestrian dan drainase, cakupan air minum, pengelolaan persampahan serta sistem transportasi publik yang baik serta pemenuhan ruang terbuka hijau mendekati ketentuan minimal yang ditetapkan undang-undang. Mencari alternatif pembiayaan infrastruktur dengan Kerjasama di sektor swasta atau skema pembiayaan infrastruktur lainnya seperti kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), kerjasama Penyediaan Infrastruktur (KSPI), dan lain-lain. Upaya menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan difokuskan kepada perluasan pengembangan ekonomi produktif bagi masyarakat rentan dan kurang mampu melalui perluasan akses berbagai program kebijakan mulai dari aspek produksi, pemasaran, dan akses permodalan serta mempermudah akses UKM terhadap modal dan teknologi;
 - c. Upaya menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) agar difokuskan pada peningkatan kompetensi penduduk usia Angkatan kerja, penciptaan lapangan kerja berbasis kewirausahaan, pengelolaan destinasi pariwisata lokal, serta memaksimalkan pemanfaatan dana kelurahan baik infrastruktur maupun pemberdayaan masyarakat
 - d. Upaya menurunkan angka kemiskinan dengan fokus pada peningkatan kualitas data penduduk miskin yang update dan valid dengan melibatkan unsur masyarakat dalam verifikasi dan validasi data, penanganan PMKS, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) penduduk miskin yang masih rendah, serta sinergitas program pengentasan kemiskinan agar implementasi program penanganan kemiskinan dapat berjalan efektif;
 - e. Upaya optimalisasi tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi dengan fokus peningkatan upaya reformasi birokrasi dan peningkatan kompetensi aparatur, peningkatan akuntabilitas kinerja (perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja), serta meningkatkan kemandirian keuangan daerah melalui optimalisasi penggalan potensi-potensi PAD, peningkatan kinerja Perusahaan Daerah (BUMD) dan pemanfaatan Barang Milik Daerah (aset).
 - f. Penyelenggaraan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat difokuskan dalam rangka penegakan Perda dan penanganan gangguan trantibum linmas, pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan non kebakaran, penyalahgunaan narkoba dan rehabilitasi penyalahgunaan narkoba.
6. Perlunya pemberdayaan dan peningkatan partisipasi pemuda yang berkualitas dalam pembangunan.
7. Perlunya penguatan kerja sama dengan pemerintah pusat dan provinsi, kelompok masyarakat, keagamaan, akademisi, mitra pembangunan, dan pemangku kepentingan lainnya dalam peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, dan penguatan kearifan lokal.
8. Perlunya optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat melalui pengembangan ekosistem kelembagaan, regulasi, iklim investasi, perencanaan hingga monitoring dan evaluasi yang kondusif, pemanfaatan . . .

pemanfaatan sistem informasi dan basis data serta penguatan kerjasama untuk mendorong inovasi pembangunan

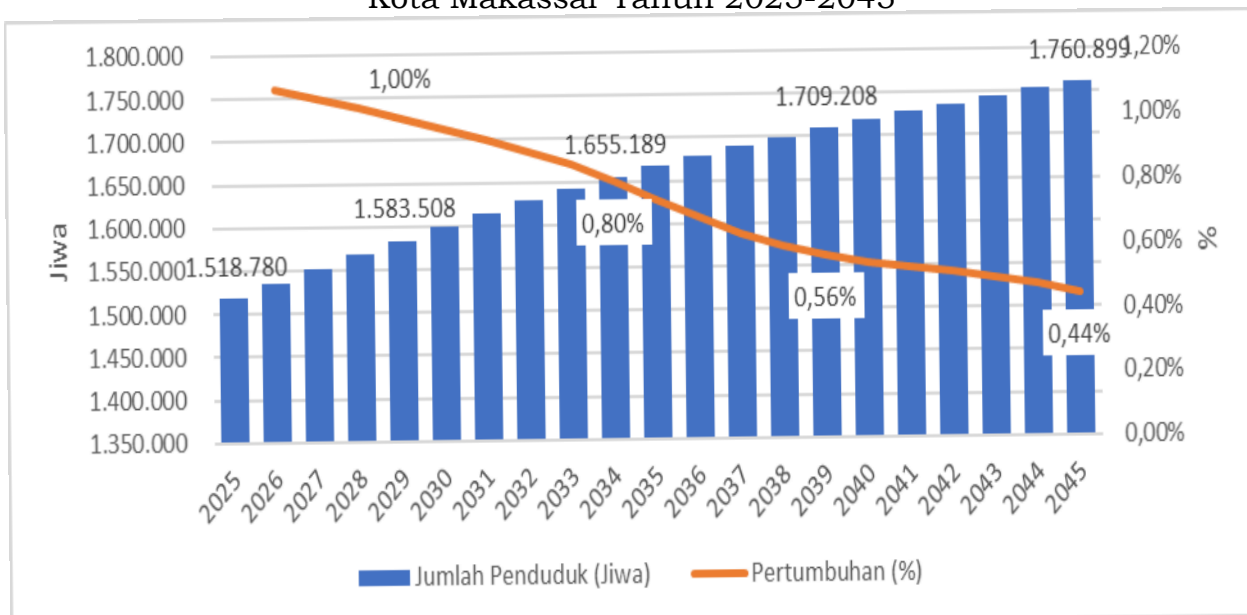
2.6. Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik

2.6.1. Tren Demografi

Sebagai daerah dengan jumlah penduduk terbanyak di Sulawesi Selatan, Kota Makassar diproyeksi mengalami kenaikan populasi sepanjang 20 tahun ke depan, namun dengan tren pertumbuhan yang melambat. Proyeksi tersebut didasarkan pada tiga asumsi utama yaitu pertama, diperkirakan angka TFR Kota Makassar akan menurun hingga berada dibawah *replacement rate*. Asumsi kedua, karena kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, diperkirakan angka kematian mengalami penurunan. Asumsi ketiga adalah jumlah migrasi keluar akan cenderung lebih banyak dibandingkan migrasi masuk sehingga menyebabkan angka net migrasi negatif.

Tahun 2025, jumlah penduduk Kota Makassar diperkirakan mencapai 1.518.780 jiwa atau naik 3,01 % dibandingkan tahun 2023. Memasuki akhir tahap pertama RPJPD (tahun 2029), populasinya bertambah menjadi 1.583.508 jiwa atau tumbuh 4,26 % dibandingkan tahun 2025 atau pertumbuhan tahunannya 1,00 %. Pada periode RPJPD kedua (tahun 2034), laju pertumbuhan tahunan akan berada antara 0,8-0,9 %, hingga pada akhir periode populasi Kota Makassar sampai 1.655.189 jiwa tahun 2034. Dua periode RPJPD terakhir, Kota Makassar akan mengalami perlambatan laju pertumbuhan penduduk antara 0,4-0,7 %, tahun 2039 diperkirakan Kota Makassar akan memiliki populasi sebanyak 1.709.208 jiwa dan tahun 2045 sampai 1.760.899 jiwa.

Grafik 2.179
Proyeksi Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk
Kota Makassar Tahun 2025-2045



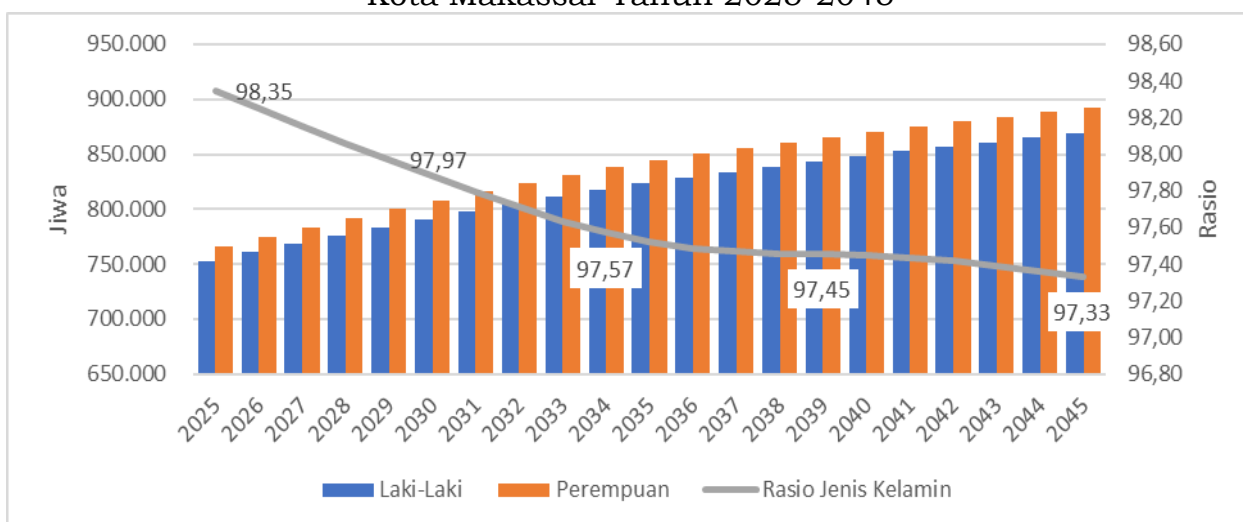
Sumber: Data Susenas BPS (data diolah), Tahun 2023

Ditinjau berdasarkan jenis kelamin, Kota Makassar termasuk daerah yang memiliki populasi laki-laki lebih rendah dibandingkan perempuan, sehingga diproyeksi hingga 20 tahun ke depan kondisi tersebut masih tetap sama, tapi dengan selisih yang semakin membesar. Tahun 2025, diperkirakan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 753.067 jiwa atau setara dengan 49,58 % dari total penduduk dan perempuan 765.713 jiwa atau 50,42 % dari seluruh populasi. Karena jumlah penduduk perempuan lebih dominan, maka rasio

jenis . . .

jenis kelamin diperkirakan ada di angka 98,35. Karena usia harapan hidup perempuan cenderung lebih panjang dari laki-laki, maka selisih antara penduduk laki-laki dan perempuan semakin lebar. Tahun 2029 atau pada akhir periode RPJPD tahap pertama, Kota Makassar diperkirakan akan memiliki penduduk laki-laki sebanyak 783.632 jiwa dan perempuan 799.876 jiwa, dengan rasio jenis kelamin yang menurun ke angka 97,97. Akhir RPJPD tahap kedua, rasio jenis kelamin turun jadi 97,57 disebabkan oleh jumlah penduduk perempuan yang naik hingga 837.772 jiwa dan laki-laki 817.417 jiwa. Dua periode RPJPD terakhir, populasi laki-laki diperkirakan sebanyak 843.581 jiwa dan 868.538 jiwa, sementara penduduk perempuan sebanyak 865.627 jiwa dan 892.362 jiwa. Pada dua periode tersebut, rasio jenis kelamin turun ke 97,45 dan 97,33.

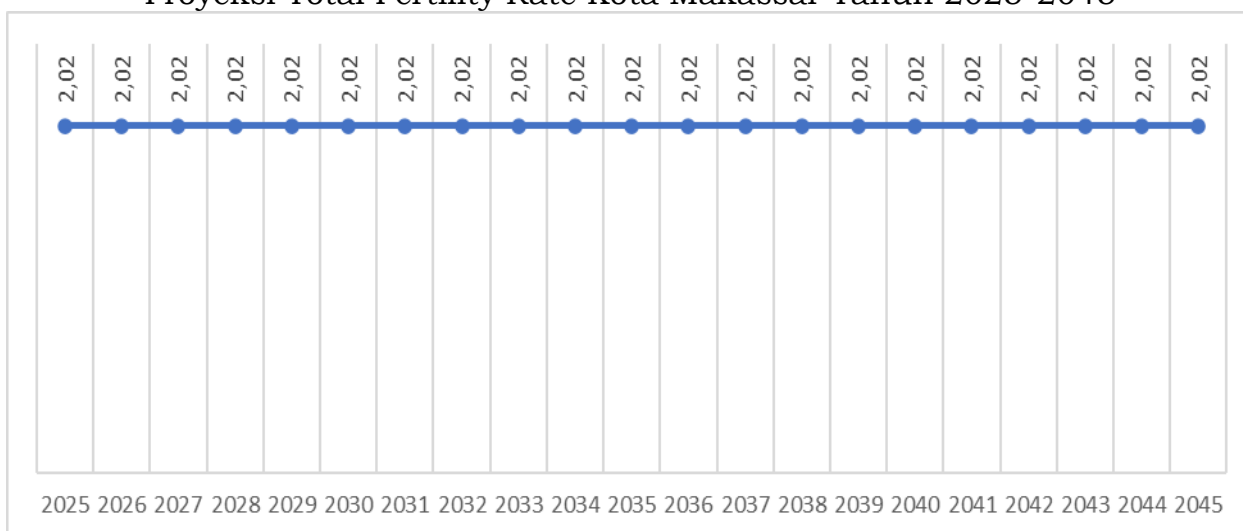
Grafik 2.180
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin Kota Makassar Tahun 2025-2045



Sumber: Data Susenas BPS (data diolah), Tahun 2023

Proyeksi penduduk Kota Makassar salah satunya dipengaruhi oleh proyeksi total fertility rate (TFR). Berdasarkan hasil sensus penduduk 2020, TFR Kota Makassar sudah berada di bawah *replacement rate*, angkanya 2,02. Oleh karena itu, dalam proyeksi ini diasumsikan bahwa Kota Makassar mampu mempertahankan TFR 2,02 dalam 20 tahun ke depan.

Grafik 2.181
Proyeksi Total Fertility Rate Kota Makassar Tahun 2025-2045



Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2023

Penduduk Kota Makassar dalam 20 tahun ke depan diperkirakan masih didominasi oleh penduduk usia produktif, sehingga Kota Makassar masih masuk pada fase bonus demografi, namun proporsi penduduk usia produktif terus menurun. Saat awal periode RPJPD (tahun 2025), diperkirakan 68,32 % penduduk Kota Makassar atau setara 1.037.703 jiwa merupakan penduduk usia produktif (berusia 15-64 tahun), sementara penduduk belum produktif (usia 0-14 tahun) 23,95 % dan penduduk usia tidak produktif 7,72 %. Proporsi penduduk usia produktif menurun di akhir periode RPJPD tahap pertama (tahun 2029) menjadi 69,06 % dan 30,94 % adalah penduduk usia non produktif. Tahun 2034, Kota Makassar diperkirakan akan memiliki 1.134.650 jiwa populasi produktif atau bertambah 41.080 jiwa dibandingkan tahun 2029. Meski mengalami penambahan, tapi proporsinya turun ke 68,55 %. Penduduk usia belum dan tidak produktif naik masing-masing menjadi 351.919 jiwa dan 168.620 jiwa. Pada akhir periode ketiga dan keempat RPJPD, total populasi usia produktif Kota Makassar mencapai 1.148.836 jiwa dan 1.171.580 jiwa, sementara total penduduk usia non produktif menjadi 560.372 jiwa dan 589.319 jiwa.

Tabel 2.51
Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Makassar Berdasarkan
Usia Produktif Dan Non Produktif Kota Makassar Tahun 2025-2045

Tahun	Usia 0-14 Tahun	Usia 15-64 Tahun	Usia 65+
2025	363.783	1.037.703	117.294
2026	360.957	1.052.448	122.006
2027	358.263	1.067.303	126.200
2028	355.616	1.081.089	131.107
2029	353.057	1.093.570	136.880
2030	350.735	1.105.001	143.080
2031	348.871	1.115.248	149.585
2032	347.713	1.124.279	156.146
2033	347.495	1.132.014	162.517
2034	351.919	1.134.650	168.620
2035	356.171	1.136.891	174.436
2036	360.143	1.138.983	179.808
2037	363.671	1.141.272	184.638
2038	366.112	1.144.520	188.985
2039	367.374	1.148.836	192.998
2040	368.282	1.153.284	196.908
2041	368.849	1.157.695	200.971
2042	369.075	1.161.836	205.434
2043	368.966	1.165.550	210.397
2044	368.511	1.168.773	215.844
2045	367.702	1.171.580	221.617

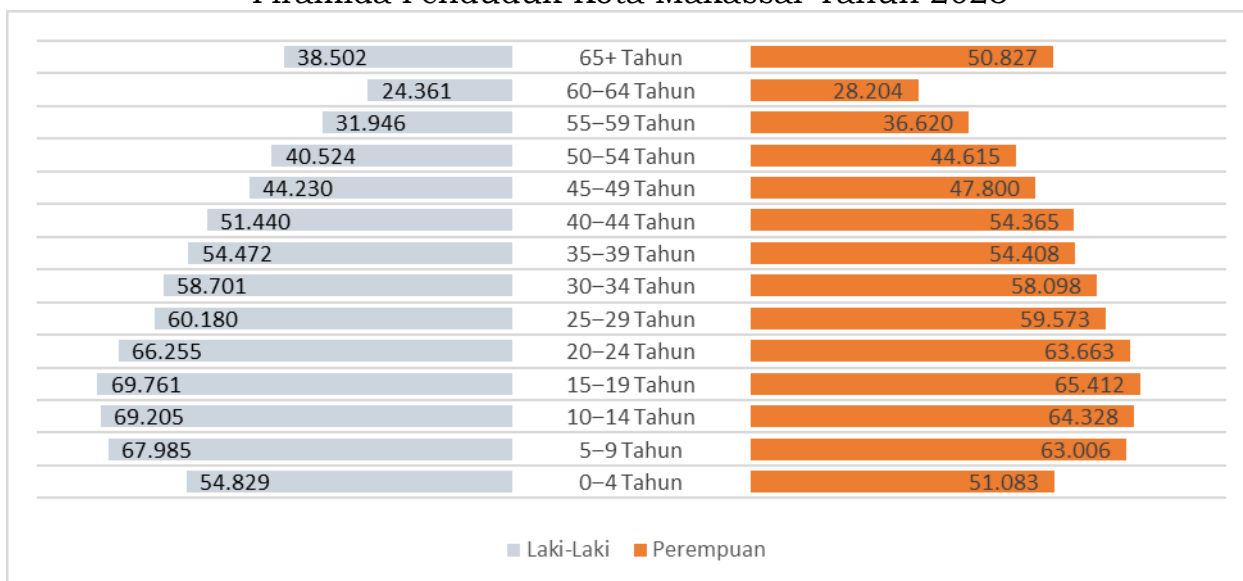
Sumber: Bappeda Kota Makassar (data diolah), Tahun 2023

Perubahan komposisi penduduk, dimana usia produktif mengalami kenaikan namun dengan pertumbuhan yang cenderung lambat, sementara penduduk non produktif naik lebih cepat, membuat piramida penduduk Kota Makassar akan mengalami perubahan bentuk. Piramida penduduk tahun 2023 sudah memberikan sinyal meningkatkan penduduk usia tua. Diperkirakan tahun 2045, piramida penduduk Kota Makassar mulai membesar di bagian atas, sementara di bagian tengah akan mengecil,

menggambarkan . . .

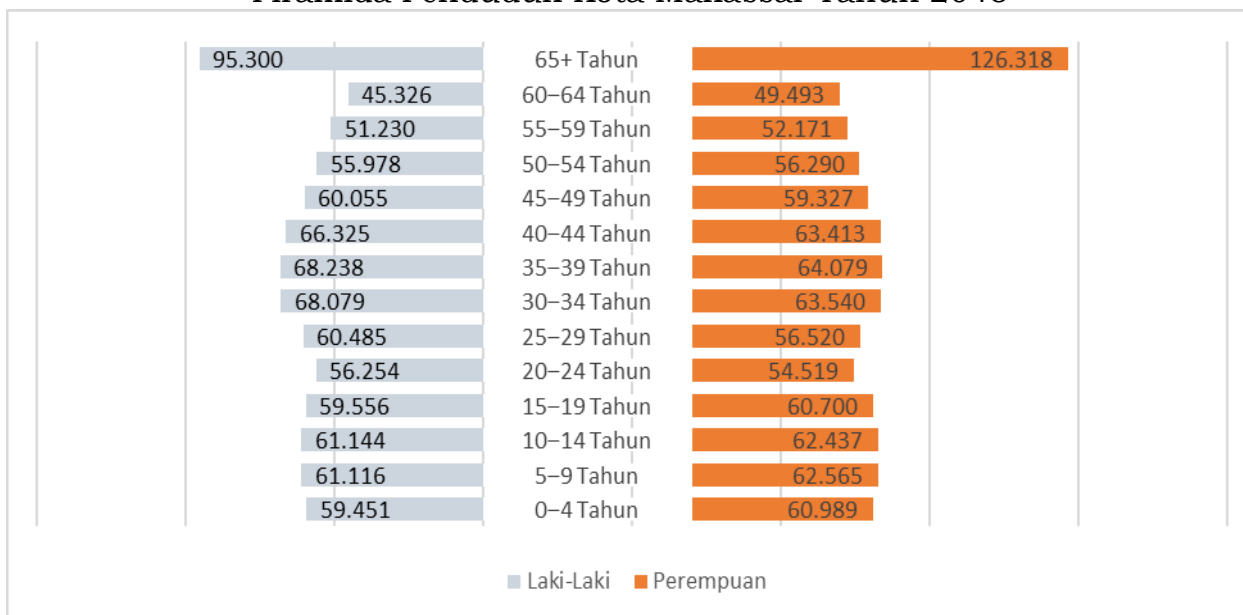
menggambarkan bahwa jumlah penduduk usia tua akan bertambah dan usia produktif akan menurun.

Grafik 2.182
Piramida Penduduk Kota Makassar Tahun 2023



Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2023

Grafik 2.183
Piramida Penduduk Kota Makassar Tahun 2045



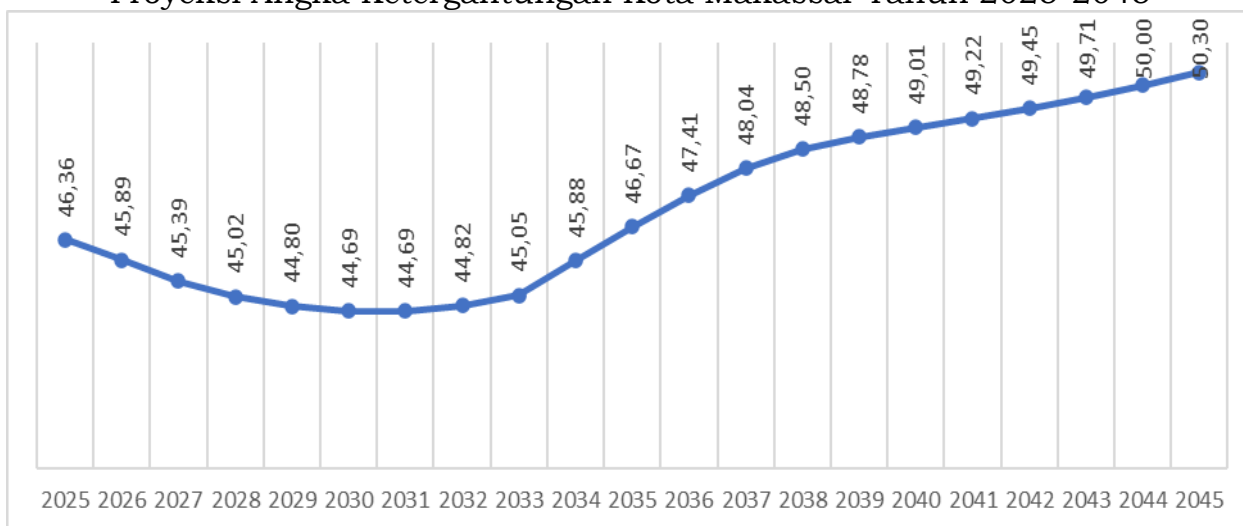
Sumber: Bappeda Kota Makassar (data diolah), Tahun 2023

Perubahan komposisi penduduk Kota Makassar akan berpengaruh terhadap angka ketergantungan. Karena jumlah penduduk usia produktif diperkirakan akan terus menurun pertumbuhannya, sementara penduduk non produktif akan meningkat, maka angka ketergantungan diproyeksi naik dalam 20 tahun ke depan. Grafik angka ketergantungan dalam 20 tahun ke depan membentuk pola menyerupai tanda centang. Sepanjang tahun 2025 hingga 2031, rasio ketergantungan Kota Makassar diperkirakan akan turun, disebabkan karena pertumbuhan penduduk usia produktif masih lebih tinggi usia non produktif. Sepanjang periode tersebut, diproyeksi pertumbuhan penduduk usia produktif berada di angka 1 %, sementara penduduk usia non produktif tumbuh di bawah 1 %. Tapi polanya akan berubah dimulai dari tahun 2032 hingga 2045, dimana rasio ketergantungan akan terus meningkat

hingga . . .

hingga akhir mencapai 50,30 tahun 2045. Hal itu disebabkan karena pertumbuhan penduduk usia non produktif lebih cepat dari usia produktif.

Grafik 2.184
 Proyeksi Angka Ketergantungan Kota Makassar Tahun 2025-2045



Sumber: Bappeda Kota Makassar (data diolah), Tahun 2023

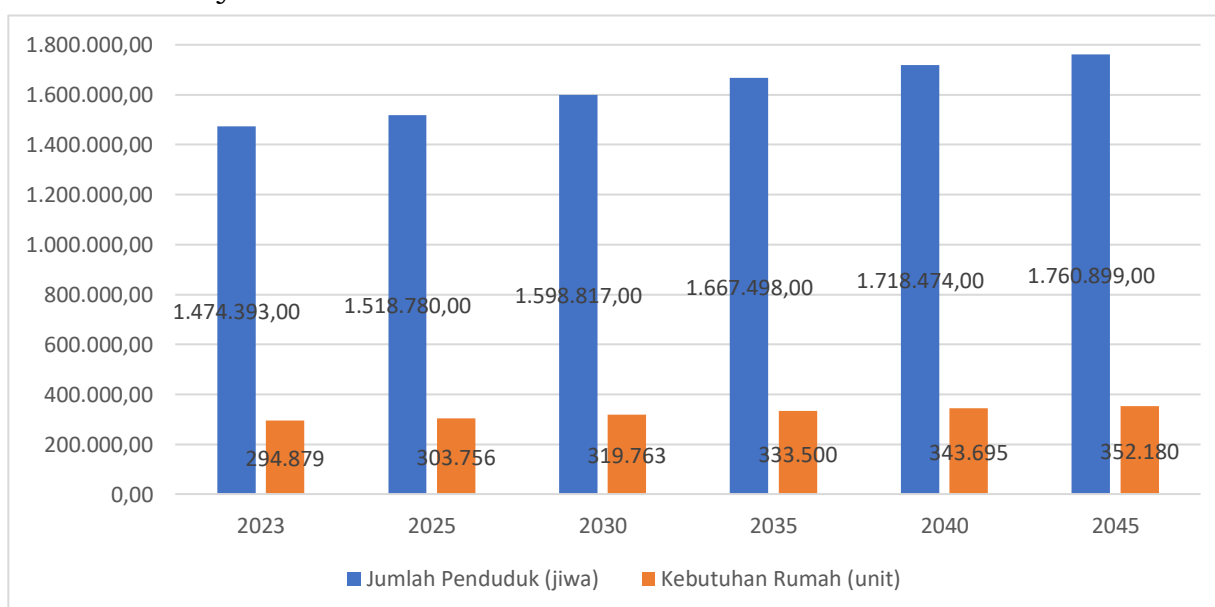
2.6.2. Analisis Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana

Dalam perencanaan jangka Panjang untuk pemenuhan sarana dan prasarana perkotaan, perkiraan kebutuhan hingga tahun 2045 dilakukan berdasarkan proyeksi penduduk, dimana tahun 2023 jumlah penduduk Kota Makassar tercatat sebanyak 1.436.779 jiwa, dan akan mencapai 1,640,691 jiwa pada tahun 2045. Proyeksi kebutuhan sarana dan prasarana dianalisis berdasarkan SNI 03-1733-2004 tentang Tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan.

2.6.2.1. Rumah/Tempat Tinggal

Proyeksi kebutuhan rumah di Kota Makassar yang didasarkan pada pertumbuhan jumlah penduduk, hingga tahun 2045 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2.185
 Proyeksi Kebutuhan Rumah Kota Makassar Tahun 2025-2045



Sumber: Bappeda Kota Makassar (data diolah), Tahun 2023

Hasil proyeksi pada tabel tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan rumah pada tahun 2025 sebesar 303.756 unit, meningkat sebanyak 8.877 unit dari tahun 2023. Jumlah kebutuhan tersebut terus meningkat hingga tahun 2045, yaitu sebanyak 352.180 unit atau meningkat sebesar 19,46% dari tahun 2023. Berikut disajikan hasil Proyeksi Kebutuhan Rumah per kecamatan Kota Makassar hingga Tahun 2045.

Tabel 2.52
Proyeksi Kebutuhan Rumah Per Kecamatan
Kota Makassar Tahun 2025-2045

No.	Kecamatan	Kebutuhan Rumah				
		2025	2030	2035	2040	2045
1	Mariso	12.323	12.972	13.529	13.943	14.287
2	Mamajang	12.567	13.230	13.798	14.220	14.571
3	Tamalate	39.487	41.568	43.354	44.679	45.782
4	Rappocini	33.152	34.899	36.398	37.511	38.437
5	Makassar	17.661	18.592	19.391	19.983	20.477
6	Ujung pandang	5.731	6.033	6.293	6.485	6.645
7	Wajo	6.421	6.759	7.049	7.265	7.444
8	Bontoala	11.787	12.408	12.941	13.337	13.666
9	Ujung Tanah	9.111	9.591	10.003	10.309	10.564
10	Kep Sangkarrang	1.282	1.349	1.407	1.450	1.486
11	Tallo	29.677	31.241	32.583	33.579	34.408
12	Panakkukang	30.596	32.208	33.592	34.619	35.473
13	Manggala	29.160	30.696	32.015	32.994	33.808
14	Biringkanaya	41.931	44.141	46.037	47.444	48.615
15	Tamalanrea	22.871	24.076	25.110	25.878	26.517
Jumlah		303.756	319.763	333.500	343.695	352.180

Sumber: Bappeda Kota Makassar (data diolah), Tahun 2023

Berdasarkan hasil analisis pada Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kota Makassar Tahun 2023-2043, pada tahun 2022 backlog hunian sebanyak 9.807 unit, dan diperkirakan pada tahun 2045 jumlah backlog hunian meningkat menjadi 64.460 unit. Dari sisi pemanfaatan ruang untuk permukiman dimana peruntukan ruang untuk permukiman seluas 9.713,92 ha, hingga tahun 2023 eksisting lahan yang dimanfaatkan untuk permukiman seluas 6.630,17 ha atau 37,49% dari luas wilayah kota.

2.6.2.2. Air Bersih

Perhitungan kebutuhan air bersih di Kota Makassar dihitung berdasarkan kapasitas minimum untuk melayani kebutuhan perumahan adalah 160 liter/orang/hari. Pada tahun 2045 kebutuhan air bersih meningkat menjadi 3.261 liter/detik, disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.53
Proyeksi Kebutuhan Air Bersih Kota Makassar Tahun 2025-2045

Uraian	Tahun				
	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	1.518.780	1.598.817	1.667.498	1.718.474	1.760.899
Proyeksi Kebutuhan Air Bersih (l/det)	2.813	2.961	3.088	3.182	3.261

Sumber: Bappeda Kota Makassar (data diolah), Tahun 2023

Berikut . . .

Berikut disajikan proyeksi kebutuhan air bersih berdasarkan pertumbuhan penduduk per wilayah kecamatan.

Tabel 2.54
Proyeksi Kebutuhan Air Bersih Per Kecamatan
Kota Makassar Tahun 2025-2045 (liter/detik)

No	Kecamatan	2025	2030	2035	2040	2045
1	Mariso	114	120	125	129	132
2	Mamajang	116	122	128	132	135
3	Tamalate	366	385	401	414	424
4	Rappocini	307	323	337	347	356
5	Makassar	164	172	180	185	190
6	Ujung pandang	53	56	58	60	62
7	Wajo	59	63	65	67	69
8	Bontoala	109	115	120	123	127
9	Ujung Tanah	84	89	93	95	98
10	Kepulauan Sangkarrang	12	12	13	13	14
11	Tallo	275	289	302	311	319
12	Panakkukang	283	298	311	321	328
13	Manggala	270	284	296	305	313
14	Biringkanaya	388	409	426	439	450
15	Tamalanrea	212	223	233	240	246
Jumlah		2.813	2.961	3.088	3.182	3.261

Sumber: Bappeda Kota Makassar (data diolah), Tahun 2023

Berdasarkan hasil proyeksi kebutuhan air bersih pada tahun 2045 di Kota Makassar, kecamatan yang memiliki jumlah kebutuhan air bersih terbanyak yaitu pada Kecamatan Biringkanaya sejumlah 450 liter/detik, sedangkan kecamatan yang memiliki kebutuhan air bersih terendah yaitu pada Kecamatan Kepulauan Sangkarrang sejumlah 14 liter/detik. Pada tahun 2023, kapasitas produksi air bersih Perumda Air Minum Kota Makassar 3.120 liter/detik. Sehingga dibutuhkan upaya peningkatan kapasitas serta pemenuhan kebutuhan air bersih baik perpipaan maupun non perpipaan pada tahun 2045 yang diperkirakan 3.261 liter/detik.

2.6.2.3. Energi/Listrik

Proyeksi kebutuhan energi listrik Kota Makassar tahun 2025-2045 dihitung berdasarkan bahwa setiap unit rumah tangga harus dapat dilayani daya listrik minimum 450 VA ditambah 40% dari total kebutuhan rumah tangga untuk sarana lingkungan. Berikut disajikan proyeksi kebutuhan energi listrik tahun 2025-2045 berdasarkan jumlah penduduk per kecamatan.

Tabel 2.55
Proyeksi Kebutuhan Energi Listrik Per Kecamatan
Kota Makassar Tahun 2025-2045 (kVA)

No	Kecamatan	2025	2030	2035	2040	2045
1	Mariso	8.040,55	8.172,41	8.523,47	8.784,04	9.000,89
2	Mamajang	8.200,25	8.334,72	8.692,76	8.958,50	9.179,66
3	Tamalate	25.765,34	26.187,84	27.312,81	28.147,77	28.842,67
4	Rappocini	21.631,69	21.986,42	22.930,89	23.631,90	24.215,32
5	Makassar	11.523,96	11.712,93	12.216,09	12.589,54	12.900,35
6	Ujung pandang	3.739,72	3.801,04	3.964,33	4.085,52	4.186,38

7	Wajo	4.189,48	4.258,18	4.441,10	4.576,87	4.689,86
8	Bontoala	7.690,86	7.816,98	8.152,78	8.402,01	8.609,44
9	Ujung Tanah	5.945,00	6.042,48	6.302,05	6.494,71	6.655,05
10	Kepulauan Sangkarrang	836,38	850,10	886,62	913,72	936,28
11	Tallo	19.364,10	19.681,63	20.527,11	21.154,63	21.676,88
12	Panakkukang	19.963,78	20.291,15	21.162,81	21.809,76	22.348,19
13	Manggala	19.026,66	19.338,66	20.169,40	20.785,99	21.299,14
14	Biringkanaya	27.359,87	27.808,53	29.003,11	29.889,74	30.627,65
15	Tamalanrea	14.923,15	15.167,86	15.819,43	16.303,04	16.705,52
	Jumlah	198.200,79	201.450,94	210.104,75	216.527,72	221.873,27

Sumber: Bappeda Kota Makassar (data diolah), Tahun 2023

Berdasarkan hasil proyeksi kebutuhan jaringan energi listrik pada tahun 2045 di Kota Makassar kebutuhan energi listrik diperkirakan mencapai 221.873,27 kVA.

2.6.2.4. Persampahan

Prasarana persampahan di Kota Makassar menggunakan sistem persampahan dengan metode pengangkutan sumber sampah sampai TPA Tamangapa. Berdasarkan data UPT TPA Tamangapa yang berada di Kecamatan Manggala, setiap harinya rata-rata sampah yang masuk sekitar 700 – 800 ton/hari, pada tahun 2022, timbulan sampah yang masuk ke TPA sebanyak 278.743.208 kg.

Kebutuhan prasarana persampahan sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 03/PRT/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, untuk setiap 2000 rumah tangga dilayani oleh 1 TPS3R, maka diperoleh hasil proyeksi kebutuhan TPS3R.

Tabel 2.56
Proyeksi Kebutuhan Prasarana Persampahan Tahun 2025-2045

Uraian	Tahun					
	2023	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	1.474.393	1.518.780	1.598.817	1.667.498	1.718.474	1.760.899
Jumlah Rumah Tangga	294.879	303.756	319.763	333.500	343.695	352.180
Proyeksi Kebutuhan TPS3R (unit)	8	152	160	167	172	176

Sumber: Bappeda Kota Makassar (data diolah), Tahun 2023

Berdasarkan hasil proyeksi kebutuhan prasarana persampahan menunjukkan tahun 2025 dibutuhkan 152 unit TPS3R. Pada tahun 2045 kebutuhan TPS3R yaitu 176 unit untuk seluruh wilayah kecamatan. Pada tahun 2023 terdapat gap jumlah TPS3R sebanyak 140 unit berdasarkan jumlah rumah tangga. Dan tahun 2045 dibutuhkan tambahan 168 unit TPS3R untuk seluruh wilayah kecamatan.

Tabel 2.57
 Proyeksi Kebutuhan Prasarana Persampahan Per Kecamatan
 Kota Makassar Tahun 2025-2045

No	Kecamatan	2023	2025	2030	2035	2040	2045
1	Mariso	1	6	6	7	7	7
2	Mamajang	1	6	7	7	7	7
3	Tamalate		20	21	22	22	23
4	Rappocini		17	17	18	19	19
5	Makassar		9	9	10	10	10
6	Ujung pandang		3	3	3	3	3
7	Wajo		3	3	4	4	4
8	Bontoala		6	6	6	7	7
9	Ujung Tanah		5	5	5	5	5
10	Kepulauan Sangkarrang	1	1	1	1	1	1
11	Tallo		15	16	16	17	17
12	Panakkukang		15	16	17	17	18
13	Manggala		15	15	16	16	17
14	Biringkanaya	4	21	22	23	24	24
15	Tamalanrea	1	11	12	13	13	13
Jumlah		8	152	160	167	172	176

Sumber: Bappeda Kota Makassar (data diolah), Tahun 2023

Pada seluruh wilayah kecamatan masih memerlukan penambahan TPS3R pada tahun 2025 hingga tahun 2045 kecuali Kecamatan Kepulauan Sangkarrang. Pada Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Mariso, Kecamatan Mamajang, dan Kecamatan Tamalanrea, meskipun telah memiliki TPS3R, masih dibutuhkan tambahan TPS3R pada tahun 2045.

2.6.2.5. Fasilitas Kesehatan

Seiring dengan perubahan pola demografi yang diuraikan pada proyeksi tren demografi, Kota Makassar akan berhadapan dengan beberapa tantangan kesehatan, terutama lonjakan penduduk berusia tua. Dalam SNI 03-1733-2004 tentang tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan yang merupakan acuan menghitung kebutuhan sarana prasarana, ada tujuh jenis sarana dan prasarana kesehatan yang penting untuk diproyeksi yaitu Posyandu, balai pengobatan warga, BKIA/klinik bersalin, Puskesmas pembantu dan balai kesehatan lingkungan, Puskesmas dan balai pengobatan, tempat praktek dokter, dan apotik/rumah obat.

Dalam 20 tahun ke depan, Kota Makassar diperkirakan akan mengalami perlambatan angka kelahiran karena TFR saat ini sudah berada di bawah angka *replacement rate*. Hal itu tentu berpengaruh terhadap proyeksi kebutuhan sarana prasarana Posyandu. Panduan SNI 03-1733-2004, menjelaskan untuk menghitung kebutuhan Posyandu, basis utamanya adalah jumlah penduduk yang akan dilayani Posyandu tersebut. Untuk satu Posyandu, setidaknya melayani 1.250 jiwa. Angka proyeksi penduduk yang digunakan menghitung kebutuhan Posyandu adalah penduduk usia Balita atau 1-5 tahun yang merupakan pengguna utama. Melalui Posyandu, anak-anak balita dapat secara teratur memeriksakan kesehatan mereka, termasuk pertumbuhan, perkembangan, dan status gizi. Ini tidak hanya membantu dalam deteksi dini masalah kesehatan, tetapi juga memungkinkan intervensi yang tepat waktu untuk mencegah komplikasi serius. Selain itu, Posyandu juga menjadi tempat untuk memberikan pendidikan kesehatan kepada orang tua tentang perawatan anak, pola makan sehat, imunisasi, dan praktik

kebersihan . . .

kebersihan, yang semuanya berkontribusi pada kesejahteraan dan perkembangan optimal anak balita.

Hasil proyeksi penduduk usia 1-5 tahun menunjukkan terjadi pertambahan jumlah penduduk dari tahun 2025 hingga 2038. Pertambahan penduduk mempengaruhi kebutuhan Posyandu yang diperkirakan akan meningkat pada periode yang sama, hingga di tahun 2038 angkanya mencapai 100 unit. Setelah melewati fase pertambahan jumlah penduduk, Kota Makassar akan mengalami penurunan jumlah penduduk usia 1-5 tahun dimulai tahun 2039 sampai 2045, sehingga jumlah Posyandu yang dibutuhkan juga berkurang hingga menjadi 97 unit tahun 2045. Proyeksi ini hanya memperkirakan berapa jumlah unit yang Posyandu yang dibutuhkan, tidak memasukkan spesifikasi Posyandunya. Untuk membangun Posyandu ke depan, pemerintah kota perlu setidaknya memperhatikan spesifikasi dalam SNI 03-1733-2004.

Tabel 2.58
Proyeksi Kebutuhan Sarana Prasarana Posyandu
Kota Makassar Tahun 2025-2045

Tahun	Penduduk Usia 1-5 Tahun (Jiwa)	Jumlah Penduduk Pendukung (Jiwa)	Kebutuhan Posyandu
2025	108.774	1.250	87
2026	111.790	1.250	89
2027	114.712	1.250	92
2028	117.394	1.250	94
2029	119.200	1.250	95
2030	120.086	1.250	96
2031	120.925	1.250	97
2032	121.708	1.250	97
2033	122.425	1.250	98
2034	123.065	1.250	98
2035	123.599	1.250	99
2036	124.003	1.250	99
2037	124.273	1.250	99
2038	124.406	1.250	100
2039	124.402	1.250	100
2040	124.239	1.250	99
2041	123.905	1.250	99
2042	123.415	1.250	99
2043	122.787	1.250	98
2044	122.039	1.250	98
2045	121.209	1.250	97

Sumber: Bappeda Kota Makassar (data diolah), Tahun 2023

Sarana prasarana selanjutnya adalah balai pengobatan warga. Balai pengobatan warga berfungsi memberikan pelayanan kepada penduduk dalam bidang kesehatan dengan titik berat terletak pada penyembuhan (*curative*) tanpa perawatan, berobat dan pada waktu-waktu tertentu juga untuk vaksinasi. Balai pengobatan warga melayani semua kelompok umur penduduk, sehingga basis data proyeksi penduduk yang digunakan untuk menghitung kebutuhan balai pengobatan warga adalah total penduduk.

Setiap satu unit balai pengobatan, setidaknya akan melayani 2.500 jiwa penduduk, yang merupakan standar dalam SNI 03-1733-2004. Karena total penduduk diproyeksi akan terus bertambah, sehingga dari tahun 2025 hingga

2045, kebutuhan balai pengobatan warga diperkirakan juga akan bertambah. Harapannya balai pengobatan warga bisa memainkan peran krusial dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan menyediakan akses yang mudah dan terjangkau ke layanan kesehatan dasar. Dengan menempatkan perawatan kesehatan yang komprehensif lebih dekat dengan komunitas, balai pengobatan dapat membantu mendeteksi dan mengelola penyakit secara dini, mengurangi beban penyakit yang dapat dicegah, dan meningkatkan kesadaran akan praktek kesehatan preventif. Selain itu, balai pengobatan warga juga berfungsi sebagai pusat penyuluhan kesehatan, memberikan informasi tentang gaya hidup sehat, pola makan yang seimbang, kebersihan lingkungan, serta pentingnya vaksinasi dan pemeriksaan rutin, yang kesemuanya berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup dan harapan hidup masyarakat secara keseluruhan.

Tabel 2.59
Proyeksi Kebutuhan Sarana Prasarana Balai Pengobatan Warga
Kota Makassar Tahun 2025-2045

Tahun	Proyeksi Penduduk (Jiwa)	Jumlah Penduduk Pendukung (Jiwa)	Kebutuhan Balai Pengobatan Warga
2025	1.518.780	2.500	608
2026	1.535.411	2.500	614
2027	1.551.766	2.500	621
2028	1.567.813	2.500	627
2029	1.583.508	2.500	633
2030	1.598.817	2.500	640
2031	1.613.704	2.500	645
2032	1.628.137	2.500	651
2033	1.642.026	2.500	657
2034	1.655.189	2.500	662
2035	1.667.498	2.500	667
2036	1.678.934	2.500	672
2037	1.689.582	2.500	676
2038	1.699.618	2.500	680
2039	1.709.208	2.500	684
2040	1.718.474	2.500	687
2041	1.727.515	2.500	691
2042	1.736.344	2.500	695
2043	1.744.913	2.500	698
2044	1.753.128	2.500	701
2045	1.760.899	2.500	704

Sumber: Bappeda Kota Makassar (data diolah), Tahun 2023

Angka kelahiran (TFR) yang berada di bawah *replacement rate*, ditambah dengan net migrasi yang negatif, berpengaruh terhadap kebutuhan BKIA/Klinik Bersalin. balai kesejahteraan ibu dan anak (BKIA) / Klinik Bersalin), yang berfungsi melayani ibu baik sebelum, pada saat dan sesudah melahirkan serta melayani anak usia sampai dengan 6 tahun. Untuk menghitung kebutuhan BKIA/Klinik Bersalin, basis data penduduk yang digunakan adalah penduduk perempuan usia subur (15-49 Tahun). Hasil proyeksi penduduk menunjukkan, Kota Makassar akan mengalami pertambahan penduduk perempuan usia subur dari tahun 2025 hingga 2035, setelah itu, jumlahnya akan berkurang. Meski begitu, proyeksi kebutuhan BKIA/klinik bersalin akan konstan sebanyak 14 unit karena standar nasional satu BKIA/klinik bersalin bisa melayani 30.000 jiwa.

Tabel 2.60
 Proyeksi Kebutuhan Sarana Prasarana BKIA/Klinik Bersalin
 Kota Makassar Tahun 2025-2045

Tahun	Proyeksi Penduduk Perempuan Usia Subur (15-49 Tahun/Jiwa)	Jumlah Penduduk Pendukung (Jiwa)	Kebutuhan BKIA/Klinik Bersalin
2025	409.571	30.000	14
2026	412.481	30.000	14
2027	415.172	30.000	14
2028	417.591	30.000	14
2029	419.677	30.000	14
2030	421.410	30.000	14
2031	422.795	30.000	14
2032	423.879	30.000	14
2033	424.654	30.000	14
2034	423.403	30.000	14
2035	422.341	30.000	14
2036	421.419	30.000	14
2037	420.593	30.000	14
2038	420.059	30.000	14
2039	420.345	30.000	14
2040	420.548	30.000	14
2041	420.722	30.000	14
2042	420.926	30.000	14
2043	421.226	30.000	14
2044	421.627	30.000	14
2045	422.100	30.000	14

Sumber: Bappeda Kota Makassar (data diolah), Tahun 2023

Proyeksi kebutuhan sarana prasarana kesehatan lainnya adalah Puskesmas pembantu dan balai pengobatan. Puskesmas pembantu dan balai pengobatan berfungsi sebagai unit pelayanan kesehatan sederhana yang memberikan pelayanan kesehatan terbatas dan membantu pelaksanaan kegiatan Puskesmas dalam lingkup wilayah yang lebih kecil. Puskesmas pembantu dibutuhkan karena memainkan peran yang penting dalam meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan masyarakat, terutama di daerah yang jauh dari Puskesmas utama atau di wilayah pedesaan yang terpencil.

Puskesmas pembantu melayani penduduk semua umur dengan memberikan pelayanan kesehatan yang tentunya terbatas dibandingkan Puskesmas. Karena melayani semua penduduk, maka basis data penduduk yang dipakai untuk menghitung kebutuhan Puskesmas pembantu dan balai pengobatan lingkungan adalah proyeksi total penduduk. Selama periode 20 tahun ke depan, diperkirakan kebutuhan Puskesmas pembantu dan balai pengobatan lingkungan akan bertambah, namun pertambahannya akan cenderung menurun. Hal itu sejalan dengan proyeksi penduduk yang bertambah dengan pertumbuhan yang melambat. Jika standar nasional, satu Puskesmas pembantu dan balai pengobatan lingkungan melayani 30.000 jiwa, maka kebutuhan Puskesmas pembantu dan balai pengobatan lingkungan berada diantara 51 hingga 59 unit untuk tahun 2025-2045. Meski begitu, ada beberapa catatan penting dalam penyediaan Puskesmas pembantu dan balai pengobatan lingkungan. Puskesmas pembantu dan balai pengobatan

lingkungan . . .

lingkungan tidak harus dibangun, tergantung dari kondisi geografis daerahnya. Jika ada daerah yang sulit dijangkau dan jauh jaraknya dari Puskesmas, maka butuh Puskesmas pembantu dan balai pengobatan lingkungan. Tapi jika semua masyarakat bisa mengakses layanan Puskesmas, Puskesmas pembantu dan balai pengobatan lingkungan tidak perlu dibangun.

Tabel 2.61
Proyeksi Kebutuhan Sarana Prasarana Puskesmas Pembantu dan Balai Pengobatan Lingkungan di Kota Makassar Tahun 2025-2045

Tahun	Proyeksi Penduduk (Jiwa)	Jumlah Penduduk Pendukung (Jiwa)	Kebutuhan Puskesmas Pembantu dan Balai Pengobatan Lingkungan
2025	1.518.780	30.000	51
2026	1.535.411	30.000	51
2027	1.551.766	30.000	52
2028	1.567.813	30.000	52
2029	1.583.508	30.000	53
2030	1.598.817	30.000	53
2031	1.613.704	30.000	54
2032	1.628.137	30.000	54
2033	1.642.026	30.000	55
2034	1.655.189	30.000	55
2035	1.667.498	30.000	56
2036	1.678.934	30.000	56
2037	1.689.582	30.000	56
2038	1.699.618	30.000	57
2039	1.709.208	30.000	57
2040	1.718.474	30.000	57
2041	1.727.515	30.000	58
2042	1.736.344	30.000	58
2043	1.744.913	30.000	58
2044	1.753.128	30.000	58
2045	1.760.899	30.000	59

Sumber: Bappeda Kota Makassar (data diolah), Tahun 2023

Sarana prasarana kesehatan yang harus disediakan oleh pemerintah daerah adalah Puskesmas. puskesmas dan balai pengobatan, yang berfungsi sebagai sarana pelayanan kesehatan tingkat pertama yang memberikan pelayanan kepada penduduk dalam penyembuhan penyakit, selain melaksanakan program pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit di wilayah kerjanya. Puskesmas menyediakan layanan kesehatan primer yang mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Ini termasuk pelayanan imunisasi, pemeriksaan kesehatan rutin, pengobatan penyakit umum, pelayanan kesehatan maternal dan anak, serta konseling tentang gaya hidup sehat. Selain itu, Puskesmas memberikan edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang berbagai aspek kesehatan, termasuk tentang pencegahan penyakit, perawatan kesehatan ibu dan anak, gizi, kebersihan, dan gaya hidup sehat. Hal ini membantu meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang kesehatan, serta mendorong perilaku yang lebih.

Setiap satu Puskesmas menurut SNI 03-1733-2004 melayani sebanyak 120.000 jiwa. Dengan membandingkan proyeksi total penduduk, maka setidaknya Kota Makassar membutuhkan 13-15 unit Puskesmas dari tahun 2025-2045 . . .

2025-2045. Namun berdasarkan data dari Dinas Kesehatan, Kota Makassar tidak mengalami masalah dalam hal penyediaan Puskesmas, karena tahun 2023, jumlah Puskesmas yang dimiliki Kota Makassar sudah mencapai 47 unit yang tersebar di semua kecamatan, dimana setiap kecamatan rerata lebih dari satu Puskesmas. Untuk kecamatan dengan wilayah yang relatif luas dan punya kepada penduduk yang tinggi, seperti Tamalate, Rappocini, Panakkukang, Manggala, Biringkanaya, dan Tamalanrea, bahkan memiliki Puskesmas 4-6 unit.

Tabel 2.62
 Proyeksi Kebutuhan Sarana Prasarana Puskesmas dan Balai Pengobatan
 Kota Makassar Tahun 2025-2045

Tahun	Proyeksi Penduduk (Jiwa)	Jumlah Penduduk Pendukung (Jiwa)	Kebutuhan Puskesmas dan Balai Pengobatan
2025	1.518.780	120.000	13
2026	1.535.411	120.000	13
2027	1.551.766	120.000	13
2028	1.567.813	120.000	13
2029	1.583.508	120.000	13
2030	1.598.817	120.000	13
2031	1.613.704	120.000	13
2032	1.628.137	120.000	14
2033	1.642.026	120.000	14
2034	1.655.189	120.000	14
2035	1.667.498	120.000	14
2036	1.678.934	120.000	14
2037	1.689.582	120.000	14
2038	1.699.618	120.000	14
2039	1.709.208	120.000	14
2040	1.718.474	120.000	14
2041	1.727.515	120.000	14
2042	1.736.344	120.000	14
2043	1.744.913	120.000	15
2044	1.753.128	120.000	15
2045	1.760.899	120.000	15

Sumber: Bappeda Kota Makassar (data diolah), Tahun 2023

Selanjutnya adalah tempat praktek dokter yang merupakan salah satu sarana yang memberikan pelayanan kesehatan secara individual dan lebih dititikberatkan pada usaha penyembuhan tanpa perawatan. Berdasarkan SNI 03-1733-2004, satu tempat praktek dokter melayani hingga 5.000 jiwa. Dengan menggunakan basis data proyeksi jumlah penduduk, maka diperkirakan selama 20 tahun ke depan kebutuhan tempat praktek dokter di Kota Makassar akan meningkat

Tabel 2.63
 Proyeksi Kebutuhan Sarana Prasarana Tempat Praktek Dokter
 Kota Makassar Tahun 2025-2045

Tahun	Proyeksi Penduduk (Jiwa)	Jumlah Penduduk Pendukung (Jiwa)	Kebutuhan Tempat Praktek Dokter
2025	1.518.780	5.000	304
2026	1.535.411	5.000	307
2027	1.551.766	5.000	310
2028	1.567.813	5.000	314
2029	1.583.508	5.000	317
2030	1.598.817	5.000	320
2031	1.613.704	5.000	323
2032	1.628.137	5.000	326
2033	1.642.026	5.000	328
2034	1.655.189	5.000	331
2035	1.667.498	5.000	333
2036	1.678.934	5.000	336
2037	1.689.582	5.000	338
2038	1.699.618	5.000	340
2039	1.709.208	5.000	342
2040	1.718.474	5.000	344
2041	1.727.515	5.000	346
2042	1.736.344	5.000	347
2043	1.744.913	5.000	349
2044	1.753.128	5.000	351
2045	1.760.899	5.000	352

Sumber: Bappeda Kota Makassar (data diolah), Tahun 2023

Fasilitas kesehatan terakhir yang perlu dihitung kebutuhannya selama 20 tahun mendatang adalah Apotik/Rumah Obat. Apotik berfungsi melayani penduduk dalam pengadaan obat-obatan, baik untuk penyembuhan maupun pencegahan. Satu apotik, bisa menjangkau 30.000 jiwa, sehingga dibandingkan dengan proyeksi populasi, maka jumlah kebutuhan apotik di Kota Makassar mencapai 51-59 unit dari tahun 2025 hingga 2045.

Tabel 2.64
 Proyeksi Kebutuhan Sarana Prasarana Apotek di
 Kota Makassar Tahun 2025-2045

Tahun	Proyeksi Penduduk (Jiwa)	Jumlah Penduduk Pendukung (Jiwa)	Kebutuhan Apotik/Rumah Obat
2025	1.518.780	30.000	51
2026	1.535.411	30.000	51
2027	1.551.766	30.000	52
2028	1.567.813	30.000	52
2029	1.583.508	30.000	53
2030	1.598.817	30.000	53
2031	1.613.704	30.000	54
2032	1.628.137	30.000	54
2033	1.642.026	30.000	55
2034	1.655.189	30.000	55

2035	1.667.498	30.000	56
2036	1.678.934	30.000	56
2037	1.689.582	30.000	56
2038	1.699.618	30.000	57
2039	1.709.208	30.000	57
2040	1.718.474	30.000	57
2041	1.727.515	30.000	58
2042	1.736.344	30.000	58
2043	1.744.913	30.000	58
2044	1.753.128	30.000	58
2045	1.760.899	30.000	59

Sumber: Bappeda Kota Makassar (data diolah), Tahun 2023

Proyeksi sarana dan prasarana kesehatan setidaknya bisa memberikan gambaran umum tentang kebutuhan sarana dan prasarana kesehatan di Kota Makassar selama 20 ke depan. Angka tersebut kebutuhan masing-masing sarana prasarana kesehatan tidak mesti mengikuti angka proyeksi, namun disesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya untuk konteks Puskesmas pembantu, jumlahnya tentu perlu menyesuaikan dengan memperhatikan wilayah di Kota Makassar yang jauh dari jangkauan Puskesmas. Jika semua wilayah bisa dijangkau oleh layanan Puskesmas, maka Puskesmas pembantu tidak dibutuhkan atau jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan proyeksi. Selain itu, selain masalah kuantitas, persebaran sarana prasarana kesehatan tidak kalah pentingnya. Walau jumlah fasilitas kesehatannya memenuhi, tapi tidak tersebar di semua wilayah Kota Makassar, maka kemungkinan masyarakat yang dapat memanfaatkan layanan fasilitas kesehatan tersebut juga terbatas. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah memperhatikan ketersebaran sarana dan prasarana kesehatan tersebut.

2.6.2.6. Fasilitas Pendidikan

Penyediaan sarana pendidikan idealnya bertujuan untuk memberikan layanan kepada semua unit administrasi pemerintahan, termasuk yang bersifat informal (RT, RW) maupun formal (Kelurahan, Kecamatan), dan bukan hanya bergantung pada jumlah penduduk yang dilayani. Hal ini juga mempertimbangkan desain ruang untuk unit-unit atau kelompok lingkungan yang ada. Struktur bangunan yang dibangun akan disesuaikan dengan konteks lingkungan. Lokasi penyediaan fasilitas akan dipertimbangkan sesuai dengan cakupan layanan yang dibutuhkan dalam area tertentu. Perencanaan sarana pendidikan harus selaras dengan tujuan pendidikan yang ingin dicapai, di mana ruang pembelajaran harus memungkinkan siswa untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara optimal. Namun dengan keterbatasan data, pada proyeksi ini hanya menggunakan data proyeksi penduduk.

Pada level kabupaten/kota, pemerintah daerah punya kewenangan mengelola pendidikan jenjang PAUD, SD, dan SMP. Untuk memproyeksi kebutuhan sarana prasarana pendidikan jenjang SD dan SMP, data yang digunakan adalah proyeksi penduduk berdasarkan usia masing-masing jenjang pendidikan. Hasil proyeksi kebutuhan sarana prasarana pendidikan di Kota Makassar dalam 20 tahun ke depan untuk jenjang pendidikan SD dan SMP dapat dilihat pada tabel Proyeksi Kebutuhan Sarana Prasarana Pendidikan Jenjang SD di Kota Makassar Tahun 2025-2045 dan Proyeksi Kebutuhan Sarana Prasarana Pendidikan Jenjang SMP di Kota Makassar Tahun 2025-2045.

Tabel 2.65
 Proyeksi Kebutuhan Sarana Prasarana Pendidikan Jenjang SD
 Kota Makassar Tahun 2025-2045

Tahun	Proyeksi Penduduk Usia SD (Usia 7-12 Th)	Jumlah Maksimum Siswa Per Rombel	Jumlah Rombel	Asumsi 1 Kelas 3 Rombel	Kebutuhan Kelas
2025	157.637	28	5.630	3	1.877
2026	151.249	28	5.402	3	1.801
2027	144.979	28	5.178	3	1.726
2028	139.078	28	4.967	3	1.656
2029	133.925	28	4.783	3	1.594
2030	130.414	28	4.658	3	1.553
2031	128.824	28	4.601	3	1.534
2032	132.023	28	4.715	3	1.572
2033	135.221	28	4.829	3	1.610
2034	138.320	28	4.940	3	1.647
2035	141.169	28	5.042	3	1.681
2036	143.133	28	5.112	3	1.704
2037	144.170	28	5.149	3	1.716
2038	145.138	28	5.184	3	1.728
2039	146.037	28	5.216	3	1.739
2040	146.851	28	5.245	3	1.748
2041	147.546	28	5.270	3	1.757
2042	148.098	28	5.289	3	1.763
2043	148.504	28	5.304	3	1.768
2044	148.753	28	5.313	3	1.771
2045	148.845	28	5.316	3	1.772

Sumber: Bappeda Kota Makassar (data diolah), Tahun 2023

Tabel 2.66
 Proyeksi Kebutuhan Sarana Prasarana Pendidikan Jenjang SMP
 Kota Makassar Tahun 2025-2045

Tahun	Proyeksi Penduduk Usia SMP (Usia 13-15 Tahun)	Jumlah Maksimum Siswa Per Rombel	Jumlah Rombel	Asumsi 1 Kelas 3 Rombel	Kebutuhan Kelas
2025	79,825	32	2,495	3	832
2026	79,891	32	2,497	3	832
2027	80,142	32	2,504	3	835
2028	80,252	32	2,508	3	836
2029	79,910	32	2,497	3	832
2030	78,903	32	2,466	3	822
2031	77,139	32	2,411	3	804
2032	71,110	32	2,222	3	741
2033	65,863	32	2,058	3	686
2034	61,739	32	1,929	3	643
2035	62,619	32	1,957	3	652
2036	64,360	32	2,011	3	670
2037	66,897	32	2,091	3	697
2038	69,212	32	2,163	3	721
2039	70,668	32	2,208	3	736

2040	71,228	32	2,226	3	742
2041	71,761	32	2,243	3	748
2042	72,271	32	2,258	3	753
2043	72,748	32	2,273	3	758
2044	73,183	32	2,287	3	762
2045	73,575	32	2,299	3	766

Sumber: Bappeda Kota Makassar (data diolah), Tahun 2023

2.6.2.7. Kebutuhan Jaringan Jalan

Pada umumnya sistem jaringan jalan di Kota Makassar berpola linier yang menghubungkan area pusat kota pada wilayah bagian barat dengan bagian kota lainnya yang berada di bagian selatan dan timur wilayah kota. Pada wilayah selatan dan timur kota yang umumnya area permukiman, pola jalan menggunakan sistem grid.

Berdasarkan arahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar, dalam kurun waktu 20 tahun yang akan datang, termuat rencana pembangunan jalan dengan pembiayaan baik yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kota Makassar dan swasta, sebagai berikut:

1. Pembangunan Flyover 1 terdiri dari Flyover BTP Perintis Kemerdekaan dan Flyover Baddoka Perintis Kemerdekaan; direncanakan pada tahun 2029-2034;
2. Pembangunan Flyover 2 terdiri dari Flyover Simpang Leimena – Urip Sumoharjo dan Flyover Simpang Batas Kota Makassar-Gowa. Direncanakan pelaksanaannya pada tahun 2035-2039;
3. Jalan Middle Ring Road Tahap I dan II, direncanakan pada tahapan pelaksanaan 3,4 dan 5 yaitu pada tahun 2029 sampai dengan tahun 2043;
4. Pembangunan Jalan Tol Maros-Makassar direncanakan tahun 2025-2034;
5. Pembangunan Jalan Tol New Port – Pesisir Makassar – Takalar direncanakan tahun 2029-2039;
6. Pembangunan Jalan Tol Makassar-Sungguminasa direncanakan pada tahun 2029-2034;

Sedangkan penyelenggaraan jalan meliputi jalan arteri sekunder, jalan kolektor primer, jalan kolektor sekunder, jalan lokal sekunder, jalan lingkungan sekunder, dan jalan khusus dilaksanakan dengan pemeliharaan rutin jalan.

2.7. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah

Berdasarkan rumusan pengembangan pusat pertumbuhan wilayah kota Makassar yang dituangkan dalam RTRW Kota Makassar 2024 - 2043, maka penataan ruang Kota Makassar bertujuan untuk “Mewujudkan ruang wilayah Kota Makassar sebagai kota inti Metropolitan Mamminasata, menuju kota dunia berbasis ekonomi yang smart, sombere dan berkelanjutan”.

Berdasarkan tujuan tersebut, pengembangan pusat pertumbuhan wilayah Kota Makassar untuk mewujudkannya dilaksanakan melalui Strategi penataan ruang Kota Makassar adalah sebagai berikut:

- a) mengembangkan pusat-pusat perdagangan dan jasa untuk pelayanan skala metropolitan Mamminasata dan regional;
- b) mengembangkan kawasan perdagangan terintegrasi dengan sistem metropolitan;
- c) mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kawasan untuk pelayanan wilayah hinterland;
- d) mengembangkan Fasilitas sosial dan fasilitas umum secara berhirarki dan tersebar pada pusat-pusat pelayanan;

e) mengembangkan . . .

- e) mengembangkan simpul jasa transportasi perkotaan dan sub perkotaan untuk pelayanan antar kawasan dan antar wilayah dalam lingkup Mamminasata;
- f) mengintegrasikan sistem transportasi antar kawasan dan antar wilayah dalam lingkup Metropolitan Mamminasata;
- g) meningkatkan sistem keterhubungan antar kawasan dan antar wilayah baik dalam lingkup Mamminasata, lingkup provinsi maupun yang lebih luas;
- h) memantapkan aksesibilitas antar wilayah guna mendukung pengembangan Koridor Ekonomi Sulawesi;
- i) mengembangkan keterpaduan sistem jaringan transportasi darat, transportasi laut, dan transportasi udara, untuk menjamin aksesibilitas yang tinggi antar wilayah;
- j) mengembangkan sarana dan prasarana wilayah untuk menunjang produktivitas ekonomi;
- k) mengembangkan sarana dan prasarana wilayah untuk menunjang peningkatan kualitas lingkungan dan pembangunan kota berkelanjutan;
- l) mengembangkan sarana dan prasarana untuk menunjang aktivitas pelayanan umum dan sosial perkotaan;
- m) menyediakan dan mengembangkan ruang terbuka dan peruntukan aktivitas bagi disabilitas dan masyarakat marjinal;
- n) menyediakan dan mengembangkan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas;
- o) mengembangkan pelayanan fasilitas umum dan fasilitas sosial dengan sistem pelayanan terpadu dan smart;
- p) mengembangkan sistem transportasi dan infrastruktur yang smart;
- q) mengembangkan sistem informasi yang terintegrasi melalui penyediaan simtaru;
- r) mengembangkan pelayanan perizinan pemanfaatan ruang yang terintegrasi dan transparan melalui penggunaan teknologi informasi.
- s) mengembangkan ruang peruntukan Kawasan pusat perdagangan dan jasa skala internasional, nasional dan regional;
- t) meningkatkan simpul jasa penunjang pelayanan skala internasional, nasional, dan regional;
- u) pengembangan kawasan strategis sebagai simpul jasa terpadu untuk mendukung Kota Makassar sebagai kota perdagangan dunia, dengan mendorong percepatan pengembangan simpul jasa terpadu melalui kebijakan kawasan strategis;
- v) mendorong peningkatan kegiatan usaha ekonomi melalui rencana pemanfaatan ruang yang interaktif untuk kemudahan investasi;
- w) menyediakan dan mengembangkan sarana dan prasarana penunjang aktivitas ekonomi;
- x) mendorong pengembangan usaha mikro dan ekonomi kerakyatan yang kreatif melalui penyiapan ruang dan infrastruktur pendukung;
- y) memudahkan pelayanan izin pemanfaatan ruang untuk mendorong tumbuhnya investasi usaha ekonomi kerakyatan yang kreatif;
- z) mengembangkan dan meningkatkan pusat pelayanan kegiatan penelitian konservasi;
- aa) mengembangkan prasarana pusat kegiatan penelitian dan konservasi;
- bb) Strategi pengembangan kota dengan pendekatan solusi berbasis alam (SBA), dengan mendorong pembangunan dan pengembangan kota dengan pendekatan alam dan berbasis lokal.

Strategi Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah Kota Makassar dalam RTRW Kota Makassar Tahun 2024 – 2043, didasarkan pada hasil

Evaluasi terhadap pelaksanaan pemanfaatan ruang ditujukan untuk menilai tingkat kesesuaian pelaksanaan pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang. Evaluasi terhadap pelaksanaan pemanfaatan ruang dilakukan untuk melihat:

a. Jenis dan Besaran Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang.

Jenis kesesuaian pemanfaatan ruang dievaluasi dengan tujuan untuk melihat apakah program yang sudah dilakukan sudah sesuai atau tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Pemanfaatan ruang dinyatakan sesuai jika: 1) jenis program yang dilaksanakan sesuai dengan yang tertuang dalam rencana dan indikasi program; 2) lokasi realisasi program sesuai dengan yang tertuang dalam rencana dan indikasi program. Penyebab atau permasalahan jika terdapat ketidaksesuaian pemanfaatan ruang harus dituliskan pada bagian keterangan di tabel evaluasi.

b. Dampak Ketidaksesuaian Pemanfaatan Ruang

Dampak ketidaksesuaian pemanfaatan ruang adalah efek/ akibat/pengaruh yang disebabkan oleh terjadinya ketidaksesuaian pelaksanaan pemanfaatan ruang yang meliputi dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dampak-dampak ini terdiri atas dampak yang menguntungkan atau positif (jika ada) dan merugikan, yang selanjutnya diklasifikasikan ke dalam besaran dampaknya, yaitu:

- (1) Berskala lingkungan (desa/kecamatan sampai kecamatan);
- (2) Berskala kabupaten/kota;
- (3) Berskala regional yaitu provinsi atau lintas kabupaten/kota;
- (4) Berskala Nasional.

Perkembangan Kota Makassar yang cukup signifikan dari berbagai sektor akan mempengaruhi pola penggunaan lahan. Begitupun dengan adanya berbagai permasalahan pemanfaatan ruang yang terjadi. Dari hasil evaluasi terhadap pemanfaatan ruang Kota Makassar, telah terjadi permasalahan penyimpangan pemanfaatan ruang terhadap kawasan-kawasan tertentu. Adapun besaran penyimpangan pemanfaatan ruang dan dampak pelaksanaan pemanfaatan ruang di Kota Makassar dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.67
Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

NO	Indikasi Program Lima Tahunan	Kesesuaian Kondisi Eksisting dan Aktual di Lapangan dengan Rencana		Realisasi Rencana		Persentase Realisasi Pemanfaatan Ruang	Dampak Ketidak-sesuaian Pemanfaatan Ruang
		Sesuai	Tidak Sesuai	Realisasi	Belum Terealisasi/ Selisih		
I. Perwujudan Struktur Ruang							
A. Sistem Pusat Pelayanan							
	1. Pusat Pelayanan Kota						
a.	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR Kota dan Peraturan Zonasi Kota	□		1	14	6.66%	Berskala Kota
b.	Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) atau Panduan Rancang Kota		□	0	0	0%	Berskala Kota
B. Sistem Jaringan Prasarana							
	1.1.1 Sistem Jaringan Jalan						
a.	Jaringan Jalan Bebas Hambatan						

	Studi dan Kajian Jalan Bebas Hambatan	<input type="checkbox"/>		2	2	50%	Berskala Nasional
	1.1.2 Sistem Jaringan Transportasi Sungai dan Penyeberangan			0	0		
a.	Studi dan kajian pembangunan simpul transportasi sungai dan penyeberangan	<input type="checkbox"/>		0	0	100%	Berskala Regional
	1.1.3 Sistem Jaringan Perkeretaapian						
a.	Studi dan kajian pengembangan sistem jaringan perkeretaapian	<input type="checkbox"/>		0	0	100%	Tidak Berdampak Negatif
b.	Studi dan kajian pengembangan sistem jaringan perkeretaapian umum perkotaan	<input type="checkbox"/>		0	0	100%	Tidak Berdampak Negatif
1.2	Sistem Jaringan Transportasi Laut						
a.	Studi dan kajian pengembangan sistem transportasi laut.	<input type="checkbox"/>		0	0	100%	Tidak Berdampak Negatif
1.3	Sistem Jaringan Transportasi Udara						
a.	Studi dan kajian pengembangan kawasan penunjang transportasi udara.	<input type="checkbox"/>		0	0	100%	Tidak Berdampak Negatif
2.4	Sistem Jaringan Prasarana Perkotaan						
	2.4.8 Manajemen Proteksi Kebakaran Perkotaan						
b.	Pembangunan hidran air	<input type="checkbox"/>		1	14	6,66%	Berskala Kota
c.	Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	<input type="checkbox"/>		0	0	100%	Berskala Kota
II. Perwujudan Pola Ruang							
A. Kawasan Lindung							
B. Kawasan Budidaya							
a.	Kawasan Peruntukan Perumahan						
1	Pengembangan dan peningkatan sarana prasarana kawasan peruntukan perumahan	<input type="checkbox"/>		10	30	33,33%	Berskala Kota
c.	Kawasan Peruntukan Perkantoran						
1	Pengembangan dan peningkatan sarana prasarana kawasan peruntukan perkantoran	<input type="checkbox"/>		0	15	0%	Berskala Kota
d.	Kawasan Peruntukan Industri						
1	Pengembangan dan peningkatan sarana prasarana kawasan peruntukan industri	<input type="checkbox"/>		0	7	0%	Berskala Kota
e.	Kawasan Peruntukan Pergudangan						
1	Pengembangan dan peningkatan sarana prasarana kawasan peruntukan pergudangan	<input type="checkbox"/>		0	2	0%	Berskala Kota
f.	Kawasan Peruntukan Pariwisata						
1	Pengembangan dan peningkatan sarana prasarana kawasan peruntukan pariwisata	<input type="checkbox"/>		0	23	17,85%	Berskala Kota
g.	Kawasan Peruntukan Ruang Non Hijau						
1	Pengembangan dan peningkatan sarana prasarana kawasan peruntukan ruang terbuka non hijau.	<input type="checkbox"/>		0	15	0%	Berskala Kota
C. Kawasan Strategis Kota							
1	Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi						

a. Pengembangan . . .

a	Pengembangan dan peningkatan fasilitas sarana prasarana kawasan strategis bisnis pusat kota	<input type="checkbox"/>		0	11	0%	Berskala Kota
b	Pengembangan, dan peningkatan fasilitas sarana prasarana kawasan strategis bisnis Losari.	<input type="checkbox"/>		0	2	0%	Berskala Kota
c	Pengembangan, dan peningkatan fasilitas sarana prasarana kawasan strategis bisnis global skala internasional, nasional, dan regional.	<input type="checkbox"/>		0	3	0%	Berskala Kota
d	Pengembangan, dan peningkatan fasilitas sarana prasarana kawasan strategis pelabuhan.	<input type="checkbox"/>		0	0	100%	Tidak Berdampak Negatif
e	Pengembangan dan peningkatan fasilitas sarana prasarana kawasan strategis bandar udara.	<input type="checkbox"/>		0	0	100%	Tidak Berdampak Negatif
f	Pengembangan dan peningkatan fasilitas sarana prasarana kawasan strategis maritim.	<input type="checkbox"/>		0	2	0%	Berskala Regional
g	Pengembangan dan peningkatan fasilitas sarana prasarana kawasan strategis koridor pesisir	<input type="checkbox"/>		0	8	0%	Berskala Regional
2	kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup						
a.	Pengembangan dan peningkatan fasilitas sarana dan prasarana kawasan strategis Lakkang.		<input type="checkbox"/>	0	0	100%	Tidak Berdampak Negatif
b.	Pengembangan dan peningkatan fasilitas sarana prasarana kawasan strategis Balang Tonjong dan sekitarnya		<input type="checkbox"/>	0	0	0%	Berskala Kota

Sumber: Bappeda Kota Makassar, (data diolah) Tahun 2024.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1. Permasalahan Pembangunan Kota Makassar

Permasalahan Pembangunan merupakan pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realitas/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia/dicapai. Hasil evaluasi terhadap gambaran umum kondisi daerah menjadi dasar identifikasi sejumlah permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan dan isu strategis daerah yang perlu diselesaikan dalam 20 (dua puluh) tahun kedepan dalam periode tahun 2025 – 2045. Beberapa permasalahan yang perlu menjadi perhatian dalam pembangunan jangka panjang Kota Makassar adalah sebagai berikut:

3.1.1. Belum Optimalnya Kualitas Kesehatan

Belum optimalnya kualitas kesehatan terindikasikan dari Usia Harapan Hidup (UHH) yang angka peningkatan tidak signifikan, serta beberapa angka indikator kesehatan menunjukkan penurunan kualitas. Angka kematian ibu tinggi (77/100.000) dan cenderung meningkat, yang disebabkan keterbatasan perawatan kesehatan berkualitas, kemiskinan, kurangnya akses pendidikan dan informasi tentang kesehatan reproduksi. Demikian pula prevalensi stunting mengalami kenaikan signifikan menjadi 25,6% dan berada jauh dibawah target nasional. Hal tersebut sangat dipengaruhi oleh pola asuh orang tua pada 1000 HPK serta pendataan yang tidak terintegrasi sehingga penanganan tidak dapat optimal. Dalam penanganan Tuberkulosis (TB), Jumlah penderita TB baru terus meningkat, namun tidak berbanding lurus dengan keberhasilan pengobatan. Keberhasilan pengobatan TB masih relatif rendah disebabkan beberapa hal yaitu tidak diobati akibat temuan penderita yang tidak bersedia diobati atau kehilangan kontak, gagal dalam pengobatan yaitu tidak semua yang diobati berhasil sembuh atau meninggal dunia.

Faktor lain adalah upaya kuratif dan rehabilitatif yang masih mendominasi dibandingkan upaya promotif dan preventif. Upaya peningkatan kualitas kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif yang dilaksanakan secara komprehensif, efektif, efisien, dan berkelanjutan tanpa mengabaikan aspek kuratif dan rehabilitatif serta paliatif yang ditujukan untuk menurunkan angka kesakitan, kecacatan, dan kematian. Masalah lain yang dihadapi adalah belum mencukupinya tenaga kesehatan, baik jumlah, jenis, kualitas dan distribusinya secara proporsional yang akan berpengaruh terhadap akses pelayanan kesehatan yang berkualitas dan dapat menimbulkan permasalahan pada sistem rujukan dan penanganan kasus tertentu. Pendekatan pembangunan kesehatan perlu lebih mengoptimalkan upaya promotif dan preventif termasuk pemberian imunisasi dasar lengkap, penerapan pola hidup bersih dan sehat, pengendalian faktor risiko lingkungan serta pencegahan perilaku berisiko. Upaya kuratif dan rehabilitatif, peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia tenaga kesehatan dan keterlibatan multisektor dalam tata kelola kesehatan, infrastruktur Kesehatan berteknologi tinggi, serta perluasan cakupan jaminan kesehatan nasional.

3.1.2. Belum Optimalnya Kualitas Pendidikan

Belum optimalnya kualitas pendidikan diindikasikan dari masih rendahnya jumlah satuan Pendidikan di Kota Makassar yg memenuhi standar minimum kemampuan literasi dimana proporsinya baru mencapai 21,71% pada tahun 2023. Hal ini disebabkan karena masih lemahnya kualitas guru pada beberapa satuan pendidikan yang berpengaruh pada kualitas pembelajaran, baik materi ajar maupun metode belajar. Belum optimalnya

kualitas . . .

kualitas pendidik juga tercermin Harapan Lama Sekolah Kota Makassar yang pada tahun 2023 hanya menempatkannya pada peringkat 15, dari 514 kabupaten/kota di Indonesia. Juga untuk Rata-Rata Lama Sekolah Kota Makassar, hanya berada pada peringkat 23 dari 514 kabupaten/kota seluruh Indonesia. Untuk Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun Ke Atas Yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi di tahun 2023, proporsinya masih berada pada 21,91 persen Atau 243.183.

Belum optimalnya kualitas pendidikan masyarakat juga terlihat dari masih rendahnya Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) yang pada tahun 2023 hanya mencapai 73,78 atau kategori “memenuhi standar”, yang masih relatif rendah dibandingkan daerah lain dan provinsi. Untuk Penduduk Usia 15 Tahun ke atas yang bekerja menurut pendidikan tinggi yang ditamatkan juga cenderung turun.

Untuk mengoptimalkan kualitas pendidikan penting untuk memprioritaskan implementasi wajib belajar 13 tahun, yang disertai dengan upaya komprehensif dalam penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS), serta peningkatan kualitas pembelajaran guna meningkatkan kualitas literasi dan numerasi, peningkatan kualifikasi pendidikan penduduk yang menamatkan pendidikan tinggi, serta peningkatan kualitas pekerja yang ditunjukkan dengan kesesuaian bidang keahlian pekerja dengan bidang keahlian pendidikan menengah dan tinggi yang telah ditempuh.

3.1.3. Belum Optimalnya Kesejahteraan Sosial

Belum optimalnya Kesejahteraan Sosial diindikasikan dengan penurunan angka kemiskinan yang masih stagnan pada angka 5,07%. Tahun 2023, persentase penduduk miskin Kota Makassar naik dari 4,58 persen ke 5,07 persen, yang secara nasional Kota Makassar berada pada kategori rendah, tertinggal dari 70 kabupaten/kota lainnya. Kemiskinan Kota Makassar cenderung naik dan tertinggal dari daerah lain, mencerminkan kualitas sumberdaya manusia yang masih rendah, membuat pekerja harus bekerja dengan upah murah. Pada sisi perlindungan sosial, mengindikasikan kurang tepat sasaran dan tidak didesain secara cermat, sehingga tidak mampu menurunkan tingkat kemiskinan.

Kesejahteraan sosial yang belum optimal juga tercermin dari kesenjangan pendapatan antar kelompok masyarakat yang cukup tinggi, dimana indeks gini Kota Makassar yang di tahun 2023 mencapai 0,388, lebih tinggi dari Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional berada pada angka 387 dan 0,377. Data ini mengindikasikan bahwa sebagian besar konsumsi rumah tangga dikuasai oleh segelintir kelompok terkaya, sementara pengeluaran rendah didominasi oleh banyak rumah tangga, yang disebabkan adanya ketimpangan peluang, pekerjaan yang tidak merata, tingginya konsentrasi kekayaan, dan ketahanan ekonomi rendah. Untuk itu pembangunan ekonomi harus mampu meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah, meningkatkan skill sehingga memungkinkan mereka bekerja di pekerjaan berupah tinggi.

Kesenjangan sosial juga tercermin dari cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan masih rendah berada dibawah 50%, hal tersebut karena umumnya pekerja sektor informal mengalami kesulitan untuk menyisihkan sebagian pendapatan mereka membayar iuran karena berupah rendah. Untuk meningkatkan ketahanan ekonomi rumah tangga salah satunya melalui jaminan sosial ketenagakerjaan.

Selanjutnya untuk Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal sebagai konteks inklusivitas terhadap penyandang disabilitas, menunjukkan Kota makassar masih belum inklusif dalam serapan tenaga kerja di sektor formal.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu perhatian pada penanggulangan kemiskinan, perluasan lapangan pekerjaan yang berupah UMR (Upah Minimum Regional), peningkatan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya bagi pekerja rentan kelompok miskin dan disabilitas serta keterlibatan sebanyak mungkin penyandang disabilitas dan pekerjaan-pekerjaan di sektor formal.

3.1.4. Belum Optimalnya Iptek dan Inovasi Dalam Mendukung Produktivitas Ekonomi

Belum optimalnya produktivitas perekonomian Kota Makassar tercermin dari beberapa indikator, diantara adalah melambatnya pertumbuhan sektor industri pengolahan, perdagangan, konstruksi, informasi dan komunikasi dan jasa pendidikan. Industri pengolahan cenderung melambat, salah satunya disebabkan oleh lahan Kawasan Industri Makassar (KIMA) yang semakin terbatas serta pengembangan sejumlah kawasan industri di luar Kota Makassar, sehingga ekspansi kegiatan industri menjadi terhambat dan cenderung tidak menjadi pilihan bagi investor baru. Faktor lain adalah, industri, lambatnya pertumbuhan industri kreatif, dimana sektor industri kreatif menunjukkan performa peningkatan setelah pandemi, namun sangat rentan terhadap gejolak dan kondisi perekonomian seperti pembatasan mobilitas masyarakat.

Produktivitas ekonomi yang belum optimal juga dapat dicerminkan dari performa laba atau net profit yang dalam kurun sebelas tahun terakhir, trennya mengalami penurunan. Pada periode 2018-2020, rata-rata capaian laba BUMD Kota Makassar menurun menjadi Rp.42,09 Miliar, dan pada tiga tahun terakhir (2021-2023) hanya berada di kisaran Rp.20,54 Miliar.

Percepatan pertumbuhan kunjungan wisatawan, datanya menunjukkan kecenderungan melambat, yang dapat dipengaruhi beberapa hal seperti sektor-sektor pendorong kepariwisataan relatif belum berkembang maksimal, belum ketersediaan infrastruktur destinasi wisata belum memadai dan ekonomi kreatif belum berkembang secara signifikan.

Belum optimalnya produktivitas perekonomian Kota Makassar juga dapat diketahui dari Tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Selama kurun waktu 10 tahun terakhir relatif berada pada kisaran dua digit, yang pada tahun 2023 berada pada angka 10,60%. Beberapa faktor yang menyebabkan TPT tinggi diantaranya: perlambatan pertumbuhan sektor-sektor yang cenderung padat karya, rendahnya kualitas manusia dan tidak sesuai dengan kebutuhan dunia industri, melambatnya pertumbuhan investasi swasta dan investasi pemerintah, pertumbuhan ekonomi belum inklusif.

Faktor lain tercermin dari masih rendahnya pemanfaatan Iptek serta masih lemahnya inovasi daerah dalam pengembangan perekonomian daerah, serta tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (TPAK) relatif rendah dibanding laki-laki. Hal tersebut disebabkan karena *opportunity cost* perempuan menikah relatif tinggi daripada upah yang diterima jika perempuan tersebut bekerja di luar rumah, terutama bagi perempuan yang sudah menikah dan memiliki anak usia balita.

Diperlukan pendekatan yang komprehensif dan terencana sebagai upaya dalam mendukung produktivitas ekonomi dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta berbagai inovasi di berbagai sektor seperti industri pengolahan, pariwisata, sektor industri kreatif dan UMKM. Hal lain yang perlu mendapatkan perhatian adalah penguatan kesetaraan gender dan inklusi sosial serta peningkatan kapasitas *emerging sectors* (bioekonomi dan bioteknologi, pendidikan dan riset, serta manajemen sumber daya). Ketersediaan infrastruktur telekomunikasi secara merata termasuk wilayah kepulauan, tersedianya regulasi dan kapasitas pemerintah daerah dalam

pemanfaatan . . .

pemanfaatan teknologi digital, dan kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi digital secara bijak terutama dalam hal kecakapan digital, etika dan budaya digital.

3.1.5. Belum Optimalnya Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

Belum optimalnya penerapan ekonomi hijau dan biru tercermin dari nilai Indeks Ekonomi Hijau yang meskipun menunjukkan nilai semakin membaik hingga tahun 2023, namun belum optimal. Kontribusi pilar lingkungan masih terkendala oleh konsentrasi beban pencemar pada badan air dan udara, terjadi penurunan kualitas air permukaan sebesar 20,12 poin akibat pencemaran limbah domestik, kualitas udara yang menurun akibat emisi hasil penggunaan energi yang tidak efisien dari sektor transportasi yaitu kemacetan dan kepadatan kendaraan diakibatkan belum tersedianya sistem transportasi massal yang murah dan nyaman. Kualitas tutupan lahan juga menurun 7,45 poin dalam 2 tahun terakhir akibat berkurangnya RTH karena pemenuhan pembangunan perumahan, aktivitas ekonomi dan pertumbuhan penduduk. Selain hal tersebut faktor sosial juga mempengaruhi terjadinya kerusakan sumber daya alam dan ekosistem yang berdampak langsung secara ekologis, akibat kegiatan manusia yang menimbulkan pencemar terhadap alam dan lingkungan. Pilar ekonomi masih menghadapi tantangan menurunnya produktivitas padi, perikanan budidaya dan produktivitas tenaga kerja pada sektor jasa. Dan pilar sosial, meskipun angka rata-rata lama sekolah, angka harapan hidup meningkat dan tingkat pengangguran semakin menurun, namun masih menghadapi tantangan dengan meningkatnya angka kemiskinan.

Belum optimalnya penerapan ekonomi hijau dan biru juga terindikasikan dalam pemanfaatan sumberdaya perairan, produktivitas perikanan tangkap yang cenderung melambat dalam 4 tahun terakhir yaitu dari jumlah 1,4 ton menjadi 1,2 ton pada tahun 2022. Hal tersebut dipengaruhi oleh lokasi tangkapan yang semakin jauh dari pesisir karena migrasi ikan yang disebabkan kerusakan ekosistem akibat aktivitas penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan serta perubahan iklim yang mengakibatkan perubahan temperatur air laut. Sedangkan pada produktivitas perikanan budidaya, mengalami penurunan 20,77% di tahun 2023. Rendahnya produktivitas perikanan budidaya Kota Makassar utamanya dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan alam, seperti penyakit, kualitas air di sepanjang pesisir Kota Makassar yang kurang baik, dimana banyak aktivitas industri yang membuat ikan yang dibudidayakan rentan terkena penyakit

Ekonomi hijau dan biru memuat konteks keberlanjutan dan inklusif, sehingga perlu mendorong penciptaan pertumbuhan ekonomi yang tinggi seiring dengan peningkatan kesejahteraan sosial dengan tetap menjaga kualitas daya dukung dan daya tampung lingkungan. Diperlukan peningkatan kapasitas sumberdaya pelaku sektor ekonomi dalam praktik pembangunan rendah karbon dan mendorong investasi hijau di berbagai sektor secara berkelanjutan. Seiring hal tersebut diperlukan pula integrasi pengelolaan sumberdaya ekonomi yang berasal dari ekosistem perairan sehingga menghasilkan nilai manfaat yang lebih luas dengan tetap memperhatikan aspek preservasi dan keberlanjutan dari sumberdaya perairan.

3.1.6. Belum Optimalnya Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

Belum Optimalnya Integrasi Ekonomi Domestik dan Global diindikasikan dengan proporsi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang mengalami perlambatan terutama pada tiga tahun terakhir. Penurunan proporsi PMTB terhadap PDRB terutama dikontribusi oleh peningkatan permintaan dari sektor rumah tangga dan pengeluaran pemerintah sehingga peran sektor

swasta . . .

swasta sedikit mengalami tekanan. Penurunan kontribusi PMTB terhadap PDRB disebabkan beberapa faktor, antara lain: Perlambatan pembentukan modal bagi dunia usaha serta produksi barang dan jasa yang dihasilkan sebagian untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga. Hal ini mengindikasikan pembentukan modal yang terjadi belum sepenuhnya efektif meningkatkan percepatan perputaran ekonomi sehingga memerlukan kebijakan terkait penciptaan iklim investasi yang kondusif.

Faktor lain tercermin dari nilai Net Ekspor yang negatif, hal disebabkan nilai impor yang lebih tinggi dibandingkan dengan nilai eksportnya. Nilai Net Ekspor kota Makassar mengalami penurunan hingga tahun 2020 tahun sebesar (-22.981,59) milyar rupiah, yang dipicu oleh meningkatnya Impor konsumsi kebutuhan pokok. Perlunya strategi dan kebijakan untuk meningkatkan nilai net ekspor kota Makassar dan mengurangi barang impor kebutuhan konsumsi rumah tangga dan Individual, terutama barang mewah, dengan memproduksi lebih banyak sendiri guna mengurangi impor dan memperkuat ekonomi lokal.

Kebijakan-kebijakan seperti meningkatkan daya saing produk lokal, memperluas atau mendiversifikasi pasar ekspor, serta meningkatkan kontribusi produk lokal terhadap perekonomian kota Makassar, harus menjadi prioritas guna meningkatkan integrasi ekonomi Kota Makassar dengan domestik maupun global.

3.1.7. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang belum Adaptif dan Integratif

Belum optimalnya tata kelola yang adaptif dan integratif tercermin dari beberapa parameter, salah satunya adalah indeks SPI. Indeks SPI Kota Makassar pada tahun 2023 berada pada nilai 73,11 berada dalam kategori "waspada". Pada lingkup penilaian internal untuk aspek keberadaan korupsi khususnya pada aspek perdagangan, masih menunjukkan level risiko tinggi. Indeks Pelayanan Publik (IPP) mengalami penurunan dalam kurun 3 (tiga) tahun terakhir, meskipun pada tahun 2023, IPP berada di level 3,86 atau termasuk dalam kategori "baik".

Parameter ketiga yang menunjukkan tata kelola pemerintahan yang lemah adalah indeks reformasi birokrasi yang belum berjalan optimal. Tahun 2023, Kota Makassar mendapat nilai IRB 77,30 atau termasuk kategori "baik" tetapi sebagian pelaksanaan percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan.

Indeks maturitas SPIP Kota Makassar juga masih belum memadai. Data menunjukkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir indeks SPIP Kota Makassar mengalami kenaikan, hingga di tahun 2023 mencapai 3,263 atau termasuk kategori "terdefinisi". Masih terdapat tugas dan fungsi organisasi yang belum berjalan secara efektif serta masih adanya permasalahan yang tidak material dalam pelaporan keuangan dan pengelolaan aset dan cukup tingginya risiko keterjadian korupsi.

Tata kelola yang adaptif dan terintegrasi memerlukan penguatan sistem pelayanan publik terutama dalam hal percepatan digitalisasi layanan publik. Selain itu perbaikan tata kelola pemerintahan termasuk penataan keuangan dan asset daerah dalam rangka mewujudkan *good governance*, peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah untuk pencapaian SPM, prioritas daerah yang mendukung pencapaian sasaran prioritas nasional serta penguatan pengendalian pembangunan, melalui penerapan manajemen risiko, termasuk risiko korupsi, fungsi organisasi yang efektif, inovasi yang diterapkan secara optimal, serta tingginya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

3.1.8. Pelayanan Publik Belum Maksimal Menerapkan Layanan Berbasis Digital

Belum optimalnya upaya transformasi digital diindikasikan dengan masih rendahnya kualitas dan keberlanjutan layanan berbasis elektronik. Hasil evaluasi terhadap layanan publik yang diselenggarakan secara online (*web based*), belum seluruh layanan publik diselenggarakan secara terintegrasi. Capaian dalam kurun waktu 5 tahun terakhir masih berada di bawah angka 50%. Hal tersebut disebabkan aplikasi yang dikembangkan oleh Perangkat Daerah tidak memenuhi aspek interoperabilitas sebagai standar pengintegrasian serta dari sisi keberlanjutan masih lemah akibat ketergantungan kepada pengembang aplikasi. Tidak optimalnya integrasi layanan mengakibatkan keterbatasan akses masyarakat khususnya bagi yang memiliki keterbatasan mobilitas, selain itu rawan terhadap ketidakakuratan data antar sistem yang berbeda, serta inefisiensi biaya dan waktu.

Pemanfaatan teknologi memiliki peran penting dalam upaya peningkatan kualitas administrasi pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan publik. Sehingga perlu mengoptimalkan penyediaan infrastruktur telekomunikasi secara merata, tersedianya regulasi dan kapasitas pemerintah daerah dalam pemanfaatan teknologi digital yang tepat, dan literasi digital untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi digital secara bijak, yang didukung pendanaan alternatif untuk tumbuh kembang ekosistem digital secara bersama antara pemerintah, masyarakat dan swasta.

3.1.9. Sistem Hukum dan Keamanan Ketertiban serta Demokrasi belum Sepenuhnya Menjamin Kepastian Hukum dan Rasa Aman Masyarakat

Keamanan, ketertiban serta demokrasi belum sepenuhnya menjamin kepastian hukum dan rasa aman masyarakat, terindikasikan dari jumlah aksi tindak kriminalitas di Kota Makassar yang masih tinggi. Jumlah tindak kriminalitas pada tahun 2023 sebanyak 4.195 kasus (*crime total*) dan angka kriminalitas (*crime rate*) sebesar 287 tindak kejahatan kriminalitas per 100.000 penduduk di Kota Makassar. Faktor yang mempengaruhi adalah arus urbanisasi di Kota Makassar yang belum sepenuhnya terkendali khususnya pada daerah atau wilayah yang berbatasan langsung dengan Kota Makassar. Faktor lain adalah belum optimalnya pengentasan kemiskinan, dan penanganan pengangguran terbuka khususnya pada usia angkatan kerja muda yang rentan melakukan aksi tindak kriminalitas.

Dari sisi pelaksanaan demokrasi, tercermin dari keterwakilan perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD, yang berada pada angka 26%, masih rendah jika dibandingkan amanah peraturan perundang-undangan yang sebesar 30%. Keterlibatan perempuan di parlemen masih rendah disebabkan oleh berbagai faktor, seperti struktural, kultural, dan institusional. Dari proporsi Peraturan Daerah (Perda) Inisiatif DPRD, juga masih rendah dimana tahun 2008, tahun 2010, tahun 2012, tahun 2015, tidak ada satupun Perda inisiatif DPRD. Pada tahun 2023, dari 11 (sebelas) Perda yang diundangkan, sebanyak 5 (lima) perda inisiatif dari DPRD. Dari sisi persentase perempuan pengurus Partai Politik, keterwakilannya masih rendah, belum memenuhi kuota 30% seperti yang diamanatkan oleh Peraturan perundang-undangan.

Penguatan terhadap ketaatan hukum, ketertiban dan keamanan tangguh serta demokrasi dapat diwujudkan dengan upaya penegakan hukum yang berkeadilan dan berlandaskan hak asasi manusia. Hal ini membutuhkan partisipasi dan pelibatan masyarakat termasuk dalam hal peningkatan partisipasi yang inklusif dalam partai politik. Menjaga Ketertiban umum,

Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat guna mendukung iklim investasi yang kondusif dan akhirnya berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

3.1.10. Belum Optimalnya Stabilitas Ekonomi Makro

Belum optimalnya stabilitas ekonomi makro terindikasikan dari masih rendahnya rasio pajak daerah terhadap PDRB yang mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan penerimaan pajak. Selama periode 2013-2023, rata-rata rasio pajak daerah Kota Makassar terhadap PDRB tercatat sebesar 0,57 persen, dan tren nya cenderung stagnan. Peningkatan PDRB seyogyanya diiringi dengan peningkatan penerimaan pajak. Guna mencapai kemandirian fiskal, pencapaian rasio pajak daerah Kota Makassar seyogyanya meningkat menjadi 3%, sesuai target *local tax ratio* UU HKPD.

Stabilitas ekonomi makro juga tercermin dari tingkat inflasi tahunan investasi yang masuk ke Kota Makassar, yang dari kedua sisi ini masih dalam kondisi yang kondusif. Inflasi pada tahun 2023 tercatat sebesar 2,89 persen (yoy). Capaian tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan inflasi yoy pada Desember 2022 yang tercatat berada pada level 5,81 persen. Sementara itu, akumulasi investasi (PMA dan PMDN) di Kota Makassar menunjukkan tren relatif meningkat. Tren positif ini perlu terus dijaga melalui berbagai capaian pembangunan ekonomi Kota Makassar seperti fasilitas infrastruktur jalan yang semakin membaik, ketersediaan listrik, dan telekomunikasi, Lembaga-lembaga perbankan dan non-perbankan.

Faktor lain yang mencerminkan stabilitas ekonomi makro adalah kepemilikan rekening tabungan, dimana terlihat tren peningkatan dalam kurun lima tahun terakhir, untuk penduduk berusia tujuh belas tahun keatas telah berada di kisaran 60%. Dari sisi pengelolaan keuangan daerah yang diukur melalui skor Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), Kota Makassar selama 2018 hingga 2022 masih selalu termasuk dalam kategori sangat memerlukan perbaikan. Data Tahun 2022 menunjukkan bahwa keuangan daerah Kota Makassar masih lemah pada dimensi transparansi pengelolaan keuangan daerah (di bawah 2), serta kondisi keuangan daerah (di bawah 6).

Diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian fiskal daerah, penguatan pengendalian inflasi daerah yang terkoordinasi, meningkatkan investasi melalui perbaikan sistem tata kelola investasi daerah, meningkatkan pengelolaan keuangan daerah melalui aksesibilitas terhadap pendanaan inovatif serta pengembangan pembiayaan inovatif.

3.1.11. Masih Rendahnya Implementasi Beragama Maslahat dan Kurang Berkembangnya Kebudayaan Maju

Belum optimalnya beragama maslahat dan berkebudayaan maju, tercermin dari masih rendahnya objek cagar budaya yang teregistrasi, dimana dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2023 tercatat baru sebanyak 193 objek cagar budaya yang teregistrasi dan yang telah ditetapkan sebanyak 28 objek atau 14,51%.

Belum optimalnya beragama maslahat dan berkebudayaan maju juga tercermin dari masih rendahnya Indeks Kota Toleran (IKT), dimana pada tahun 2015 sampai dengan 2022, Kota Makassar masuk sebagai 10 Kota dengan IKT paling rendah. Hal ini masih maraknya peristiwa intoleransi, seperti sepanjang tahun 2020 terjadi 11 peristiwa intoleransi dan pelanggaran hak atas kebebasan beragama/berkeyakinan. Masih rendahnya beragama maslahat tercermin dari dukungan Pemerintah Kota Makassar terhadap kegiatan keagamaan yang baru rerata sebesar 1,4% per tahun dari total APBD.

Dalam . . .

Dalam konteks ini diperlukan aktualisasi nilai-nilai agama sebagai landasan spiritual, etika dan moral, serta penguatan kerukunan antar umat beragama, pembenahan ekosistem toleransi dan dialog pembauran kebangsaan, pembinaan kerukunan umat beragama, perkuatan keimanan dan pemberdayaan umat. Guna pemajuan kebudayaan diperlukan preservasi dan perlindungan warisan budaya dan penguatan kearifan lokal, peningkatan kreativitas dan ide inovatif dalam pelestarian budaya dan kesenian daerah, serta peningkatan sinergitas antara lembaga/instansi untuk pemajuan kebudayaan.

3.1.12. Masih Tingginya Ketimpangan Gender serta masih Belum Optimalnya Pembangunan Keluarga, Perlindungan Anak, Pembangunan Pemuda

Belum optimalnya pembangunan keluarga, perlindungan anak, pembangunan pemuda dan ketimpangan gender, terindikasi dari beberapa faktor. Tahun 2022, pembangunan keluarga berada pada angka 84,85 atau masuk pada kategori baik (tangguh), namun angka tersebut tidak menggambarkan kecilnya permasalahan keluarga di Kota Makassar. Tingginya tingkat perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga tergambar dari jumlah kasus perceraian pada tahun 2023 sebanyak 2.030 kasus dan kasus kekerasan sebanyak 504 kasus. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan keluarga di Kota Makassar masih perlu didorong dalam jangka panjang.

Faktor lain tercermin dari rendahnya perlindungan anak, dimana capaian Indeks Perlindungan Anak (IPA) masih jauh dibawah target nasional. Klaster IPA yang masih perlu diperhatikan adalah Hak Sipil dan Kebebasan dengan nilai 47,32 dan Klaster IV Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya dengan nilai 39,64. Kondisi tersebut perlu upaya kolaboratif multi Sektor peningkatan pemenuhan hak dan perlindungan anak

Meskipun secara relatif IPA Kota Makassar lebih tinggi dari provinsi dan semua kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, tapi angka tersebut masih berada dibawah target nasional. Indeks Ketimpangan Gender berada dibawah angka nasional dan provinsi, berada pada nilai 0,188. Masih terdapat ketimpangan pada Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan yang masih rendah dan keterwakilan perempuan dalam legislatif yang belum memenuhi angka minimal 30%. Kondisi tersebut tentunya Pemerintah Kota Makassar dan masyarakat bersinergi untuk menciptakan kesetaraan gender terutama Pasar tenaga Kerja, serta meningkatkan peran perempuan dalam pendidikan politik sehingga dapat menciptakan daya saing yang memberikan kontribusi yang signifikan dalam penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan.

Pembangunan Pemuda belum optimal yang diindikasikan dari IPP Kota Makassar tahun 2023 mencapai 54,50, yang lebih rendah dari IPP Nasional yang sebesar 55,33. Upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan dengan pembinaan dan pengembangan bakat pemuda serta peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana yang mendukung aktivitas kepemudaan.

3.1.13. Tingginya Risiko Kerentanan Ketahanan Energi, Ketahanan Air dan Kemandirian Pangan

Tingginya risiko kerentanan terhadap ketahanan energi, ketahanan air dan kemandirian pangan, tercermin dari kerentanan pasokan listrik akibat musim. Krisis energi listrik terjadi pada tahun 2023, ketika terjadi cuaca panas dan kekeringan di Sulawesi yang menyebabkan kekurangan debit air di beberapa pembangkit listrik tenaga air (PLTA) sehingga dilakukan manajemen beban listrik di Wilayah Kota Makassar selama beberapa bulan.

Kerentanan . . .

Kerentanan ketahanan air juga terindikasikan dari ketersediaan sumber air baku, dimana Kota Makassar masih bergantung pada sumber air baku dari Sungai Jeneberang dan Sungai Maros/Waduk Lelopanning. Ketergantungan terhadap sumber air baku tersebut berdampak pada berkurangnya distribusi air bersih. Saat terjadi kekeringan pada tahun 2023, berakibat pada penurunan suplai air baku ke Perumda Air Minum Kota Makassar, sehingga dibutuhkan manajemen mitigasi melalui pembatasan waktu distribusi air, pengurangan tekanan air pada jaringan distribusi, bahkan penghentian distribusi air bersih pada beberapa wilayah.

Indikasi lain adalah prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan pada masa pandemi naik secara signifikan menjadi 5.46 % atau bertumbuh sebesar 85.72%, yang menandakan aspek keterjangkauan (*accessibility*) dan ketersediaan (*availability*) pangan sangat sulit diakses oleh masyarakat terkhususnya kalangan menengah kebawah. Fenomena ini menjadi indikasi pentingnya meningkatkan aspek jaring perlindungan/pengaman sosial (*social safety net*) seperti bantuan sosial untuk pangan dan lain-lain untuk melindungi masyarakat menengah ke bawah yang rawan/rentan terdampak (*vulnerable*), khususnya pada masa-masa krisis. Kinerja ketahanan pangan yang tercermin dari Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kota Makassar selama periode 2013-2023 capaiannya cenderung stagnan, bahkan jika dibandingkan dengan beberapa kota setara di Indonesia, posisi IKP Kota Makassar relatif lebih rendah. Beberapa faktor rendahnya IKP antara lain terkait dengan keamanan, ketersediaan pangan, produktivitas pelaku utama pangan, dan distribusi dan pemasaran produk pertanian di perkotaan. Belum optimalnya ketahanan pangan juga diindikasikan dari skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kota Makassar menunjukkan angka yang lebih rendah dibandingkan dengan skor PPH secara nasional. Rendahnya skor PPH disebabkan antara lain karena akses pangan rendah akibat menurunnya daya beli masyarakat yang disebabkan oleh kemiskinan dan stabilitas harga pangan. Selain itu, ragam komoditas pangan masih terbatas yang ditunjukkan dengan sumber karbohidrat masyarakat yang masih didominasi oleh beras.

Kondisi-kondisi tersebut perlu disikapi melalui berbagai upaya yang berfokus pada peningkatan ketahanan energi, air dan kemandirian pangan secara terpadu seperti pengembangan sumber energi baru untuk meningkatkan kapasitas pasokan listrik, dan meningkatkan keandalan melalui pengembangan teknologi digital, optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya air secara efektif, efisien dan berkelanjutan dengan pemanfaatan teknologi dalam pemenuhan akses air minum aman khususnya wilayah pulau dan rawan air, meningkatkan aspek jaring perlindungan/pengaman sosial dalam pemenuhan kebutuhan pangan khususnya kalangan menengah kebawah yang rentan terdampak khususnya pada masa krisis serta pengembangan diversifikasi pangan untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan pemenuhan konsumsi pangan yang aman dan bermutu.

3.1.14. Belum Optimalnya Kontribusi Kota Makassar sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Kontribusi PDRB Kota Makassar terhadap PDB Indonesia secara konsisten berada di angka 1% setiap tahun. Kontribusi terhadap Provinsi Sulawesi Selatan dan Kawasan Mamminasata, merupakan yang tertinggi dengan kontribusi sebesar 34,49%. Hal tersebut menunjukkan bahwa Kota Makassar memegang andil besar terhadap perekonomian Sulawesi Selatan dan memiliki peran cukup signifikan sebagai salah satu motor penggerak perekonomian Indonesia. Akan tetapi masih terdapat kondisi yang mengindikasikan belum optimalnya kontribusi Kota Makassar sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, tercermin dari Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur

perkotaan . . .

perkotaan yang cenderung fluktuatif dan mengalami penurunan sepanjang tahun 2014-2023. Beberapa kondisi capaian hingga tahun 2023 yang masih rendah, masih terdapat sekitar 25,66% penduduk belum memiliki akses terhadap layanan air minum berkualitas, masih terdapat sekitar 11,34% rumah tinggal belum berakses sanitasi, masih terdapat seluas 299,36 area kawasan kumuh, dan sebesar 1,12% jalan kota berada dalam kondisi rusak. Sebagai salah satu kota terbesar di Indonesia dengan potensi ekonomi yang signifikan, aktivitas ekonomi Kota Makassar dengan perkembangan sektor perdagangan, pariwisata, dan industri belum diimbangi dengan pengelolaan sampah yang efektif, pada tahun 2023 masih terdapat sekitar 16,45% dari total timbulan sampah yang tidak tertangani, dan hanya sebesar 4,16% dari timbulan sampah yang tertangani dapat terolah di fasilitas pengolahan sampah. Kondisi tersebut membawa dampak negatif dan tidak mendukung berkembangnya daya tarik pariwisata dan investasi jika masalah lingkungan dan risiko kesehatan akibat sanitasi yang tidak memadai masih menjadi isu utama.

Belum optimalnya kontribusi Kota Makassar sebagai pusat pertumbuhan ekonomi juga tercermin dari data hunian layak yang hanya mencapai capaian 79,88% pada tahun 2023. Rendahnya kinerja akses hunian layak ini dipengaruhi oleh kurangnya penanganan rumah tidak layak huni, bertambahnya kawasan kumuh yang baru, serta pembangunan rumah dan sarana prasarana yang tidak memenuhi standar, seperti dari sisi ketahanan bangunan, kecukupan luas, air bersih/minum, dan akses sanitasi aman.

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, perlu mengintegrasikan aspek lingkungan dalam perencanaan pembangunan. Upaya peningkatan daya saing sektor-sektor yang berkontribusi terhadap PDRB perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas layanan infrastruktur perkotaan, utamanya pemenuhan layanan air minum, sanitasi, pengelolaan persampahan, jaringan jalan yang baik dan sistem transportasi ramah lingkungan, serta optimalisasi pemanfaatan lahan dalam penyediaan hunian layak, aman, terjangkau dan berkelanjutan.

3.1.15. Masih Rendahnya Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup

Masih rendahnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup diindikasikan dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Makassar yang berada di bawah rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan dan nasional, dan sepanjang periode 5 tahun terakhir mengalami penurunan. Pada 2023 IKLH Kota Makassar berada pada nilai 57,53, menurun dari tahun 2020 yang pada nilai 62,57, atau menurun sebesar 5,04%. Penurunan ini disebabkan karena penurunan nilai Indeks Kualitas Udara (IKU dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), yang terjadi antara lain disebabkan pencemaran sungai/waduk di Makassar sehingga tidak memenuhi standar baku mutu, dan masih minimnya ruang terbuka hijau.

Rendahnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup juga tercermin dari masih rendahnya rumah tangga yang memiliki akses sanitasi aman, yang pada tahun 2022, hanya berada pada angka 4%, dan pada tahun 2023 menjadi 5,7%. Pada tahun 2023, data timbulan sampah terolah di fasilitas pengelolaan sampah, menunjukkan dari 376,707,41 ton/per tahun timbulan sampah, yang terolah di fasilitas pengolahan sampah baru sebesar 15.671,36 ton atau 4,16%

Selain kondisi diatas, juga tercermin dari lemahnya pengurangan ancaman keanekaragaman hayati yang berimplikasi terhadap keberlanjutan keanekaragaman hayati, hal tersebut tercermin dari penggunaan pupuk organik yang menurun signifikan, menurunnya produktivitas perikanan budidaya yang dipengaruhi oleh kualitas perairan yang kurang baik, dampak

perubahan iklim dan kerusakan lingkungan berpengaruh terhadap kualitas dan kuantitas komoditas ikan.

Kondisi rendahnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup ini harus menjadi prioritas melalui upaya-upaya pengelolaan lingkungan hidup seperti pencegahan pencemaran guna menjaga kualitas air, udara dan tanah. Meningkatkan luasan dan sebaran RTH, meningkatkan pemilahan dan pengolahan sampah di tingkat rumah tangga, untuk mengurangi sampah yang dibuang langsung ke TPA, serta mendorong upaya transformasi untuk mencegah kerusakan ekologi dalam upaya peningkatan produktivitas pertanian dan perikanan secara berkelanjutan.

3.1.16. Kapasitas Mitigasi dan Adaptasi Bencana serta Perubahan Iklim Masih Rendah.

Rendahnya kapasitas mitigasi dan adaptasi bencana serta perubahan iklim tergambar dari data Indeks Risiko Bencana yang pada tahun 2023 di angka 119,49 atau berada pada level risiko sedang. Kota Makassar memiliki risiko tinggi terhadap beberapa bencana yaitu tsunami, kebakaran, gelombang ekstrim, abrasi dan kekeringan. Namun yang perlu menjadi perhatian yaitu terjadinya banjir dan genangan yang terjadi setiap tahun dengan intensitas yang cenderung meningkat.

Dampak perubahan iklim yang dihadapi Kota Makassar adalah curah hujan yang tinggi selama musim hujan yang lebih pendek, perubahan dan kenaikan suhu selama musim kemarau yang lebih panjang beserta kekeringan, kenaikan muka air laut, angin kencang, dan gelombang besar, peningkatan suhu, dan berkurangnya potensi air tanah. Emisi Gas sebagai salah satu pemicu menunjukkan bahwa masih terdapat konsentrasi kontributor pembentuk Emisi GRK, yang dihasilkan dari penggunaan energi yang menyebabkan pemanasan global mengakibatkan perubahan iklim.

Diperlukan upaya konsisten dan berkelanjutan dalam mendorong implementasi pembangunan rendah karbon di berbagai sektor serta intervensi kebijakan dalam peningkatan kapasitas pemerintah dan masyarakat untuk penguatan manajemen bencana mulai mitigasi, adaptasi dan penanggulangan pasca bencana sebagai prioritas guna meningkatkan ketahanan terhadap bencana.

3.1.17. Belum Optimalnya Daya Saing Daerah dibanding Kota Maju Lainnya

Belum optimalnya daya saing Kota Makassar tercermin dari Indeks Daya Saing Daerah Kota Makassar, yang pada tahun 2023 hanya berada pada angka 3,91. Angka ini lebih tinggi dibandingkan capaian Nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan, namun capaian ini masih rendah jika dibandingkan dengan kota maju lainnya, seperti Medan Bandung, Semarang, dan Surabaya.

Rendahnya daya saing Kota Makassar ini tergambar dari capaian Indeks Daya Saing Daerah pada pilar 2 (Infrastruktur) seperti proporsi jumlah bandara, pelabuhan, kereta api dan lain-lain yang perolehannya hanya 2,64, dan pilar 11 (Dinamisme Bisnis) seperti kinerja pelayanan publik dan pertumbuhan nomor induk berusaha (NIB) yang hanya mencapai 2,71. Capaian beberapa pilar ini masih rendah jika dibandingkan dengan capaian kota maju lainnya, seperti Medan Bandung, Semarang, dan Surabaya.

Upaya-upaya untuk mewujudkan daya saing daerah dapat dilakukan dengan penataan kerangka regulasi dan kebijakan; peningkatan daya saing dan kerjasama daerah dalam skala regional, nasional dan global; penguatan kemampuan daerah, pemerintah dan komunitas dalam meminimalkan risiko terhadap gangguan atau krisis, serta memperkuat kapasitas untuk menghadapi dan pulih dari dampak yang ditimbulkan; peningkatan

kemandirian fiskal daerah. Selain itu, juga dibutuhkan langkah langkah konkrit dan masif untuk memperbaiki kualitas Infrastruktur, kinerja pelayanan publik serta keamanan, ketertiban dan kerawanan sosial.

3.2. Isu Strategis

3.2.1. Perubahan Iklim dan Hilangnya Keanekaragaman Hayati

Perubahan Iklim, polusi dan keanekaragaman hayati merupakan 3 krisis yang mengancam masa depan bumi dan manusia. Berdasarkan laporan *Intergovernmental Panel on Climate Change/IPCC* tahun 2022, diperkirakan pada tahun 2100 sekitar 50-75% dari populasi global berpotensi terdampak kondisi iklim serta terjadi pemanasan bumi hingga 1,5 derajat celcius dalam satu atau dua dekade mendatang. Beberapa kondisi yang telah terjadi yaitu: suhu permukaan bumi 1,09°C lebih tinggi dalam 10 tahun antara 2011-2020; pada tahun 2019 konsentrasi CO₂ di atmosfer merupakan yang tertinggi sejak 2 juta tahun terakhir; tingkat kenaikan permukaan laut nyaris 3 kali lipat dibandingkan dengan tahun 1901-1971; mencairnya gletser dan penurunan jumlah es di Laut Arktik sejak tahun 1990. Dalam satu dekade ke depan jika tidak dilakukan antisipasi maka perubahan iklim dapat menyebabkan sekitar 32-132 juta penduduk jatuh miskin dan jumlah penduduk yang mengalami kekurangan air akan meningkat hingga 4,8-5,7 miliar pada tahun 2050. Berbagai masalah timbul akibat perubahan iklim diantaranya kenaikan suhu dan perubahan pola hujan/anomali iklim/iklim ekstrim, peningkatan muka air laut, bencana alam (kekeringan, banjir), penurunan kehati dan risiko terhadap kesehatan masyarakat. Berbagai sektor terdampak akibat perubahan iklim seperti pertanian (produktivitas menurun), kesehatan (penyakit/wabah berbasis lingkungan), kehutanan, sumber daya air (kualitas dan kuantitas air), spesies dan habitat.

Berdasarkan hasil Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa/United Nations Framework on Climate Change Conference/*UNFCCC* tahun 2022, polusi udara merupakan penyebab kematian dini terbesar hingga 4,2 juta kematian setiap tahun. Perubahan Iklim dipicu aktivitas manusia sehingga menghasilkan emisi gas rumah kaca. Di Kota Makassar, Emisi Gas Rumah Kaca dikontribusi oleh beberapa sektor seperti sektor energi, sektor pertanian, kehutanan dan lainnya, sector limbah dan sector proses industri dan penggunaan produk. meliputi penggunaan bahan bakar pada peralatan bergerak dan tidak bergerak. Penggunaan bahan bakar pada peralatan yang tidak bergerak meliputi penggunaan bahan bakar dipembangkit listrik, penggunaan bahan bakar di rumah tangga, penggunaan bahan bakar pada industri manufaktur dan konstruksi, penggunaan bahan bakar di area komersial dan institusi dan penggunaan bahan bakar di sektor lainnya seperti pertanian, perikanan, dan lain-lain. Sementara penggunaan bahan bakar pada peralatan bergerak seperti penggunaan bahan bakar untuk transportasi. Sepanjang tahun 2022 tercatat emisi GRK sebesar 5.388,84 CO₂eq Gg yang sebagian besar atau sekitar 96% bersumber dari sektor energi. Tantangan pemanasan global baik kejadian ekstrim maupun perubahan iklim jangka panjang, tanpa usaha menurunkan emisi GRK, rata-rata suhu global akan meningkat 3-3,5 derajat celcius. Emisi GRK disebabkan oleh diantaranya penggunaan bahan bakar fosil, degradasi/deforestasi/hutan yang semakin menyusut. Berbagai masalah timbul akibat perubahan iklim diantaranya kenaikan suhu dan perubahan pola hujan/anomali iklim/iklim ekstrim, peningkatan muka air laut, bencana alam, penurunan kehati dan risiko terhadap kesehatan masyarakat. Berbagai sektor terdampak akibat perubahan iklim seperti pertanian (produktivitas menurun), kesehatan (penyakit/wabah berbasis lingkungan), kehutanan, sumber daya air (kualitas dan kuantitas air), spesies dan habitat.

3.2.2. Ruang . . .

3.2.2. Ruang Terbuka Hijau

Jumlah penduduk perkotaan yang terus meningkat dari waktu ke waktu dan arus urbanisasi, akan memberikan implikasi pada tingginya tekanan terhadap pemanfaatan ruang kota, sehingga penataan ruang kawasan perkotaan perlu mendapat perhatian yang khusus, terutama yang terkait dengan penyediaan kawasan hunian, fasilitas umum dan sosial serta sarana dan prasarana serta infrastruktur perkotaan. Berkurangnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) cenderung mengalami konversi guna lahan menjadi kawasan terbangun yang dilakukan tanpa memperhatikan keberadaan lingkungan sekitar. Sebagian besar permukaan tanah tertutup oleh jalan dan bangunan dengan karakter yang sangat kompleks yang berbeda dengan karakter ruang terbuka hijau.

Menurunnya kualitas dan kuantitas ruang terbuka publik yang ada di perkotaan berupa RTH, mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan perkotaan seperti seringnya terjadi banjir, tingginya polusi udara, dan meningkatnya kerawanan sosial (kriminalitas dan krisis sosial), menurunnya produktivitas masyarakat akibat stres karena terbatasnya ruang publik yang tersedia untuk interaksi sosial. Dengan kata lain, keberadaan RTH dapat mengendalikan dan memelihara integritas dan kualitas lingkungan, karena Ruang Terbuka Hijau mempunyai tujuan dan manfaat yang besar bagi keseimbangan, kelangsungan, kesehatan, kelestarian, dan peningkatan kualitas lingkungan itu sendiri.

Kota Makassar sebagai salah satu kota besar di Indonesia juga mengalami kondisi yang sama sehingga diperlukan upaya-upaya dalam rangka meningkatkan luasan RTH dengan memperhatikan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam binaan dan lingkungan perkotaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat serta untuk meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih.

Beberapa isu terkait RTH antara lain strategi dan kebijakan dalam upaya peningkatan luasan RTH publik dan RTH privat, isu teknis membahas tentang potensi peningkatan RTH melalui pendekatan ekologis dan isu kelembagaan membahas tentang penanganan RTH yang bersifat parsial (menjadi kewenangan beberapa Perangkat Daerah).

3.2.3. Digitalisasi dan IPTEKIN

Perkembangan IPTEKIN yang begitu pesat mendorong dunia saat ini memasuki digitalisasi. Digitalisasi ini dapat menjadi peluang sekaligus tantangan bagi pembangunan daerah saat ini dan di masa mendatang. Dapat dikatakan bahwa sebagian besar aktivitas ekonomi bergerak menuju digitalisasi dan otomatisasi. Harapannya akan meningkatkan produktivitas dan efisiensi dari proses produksi, begitu halnya aktivitas konsumen menjadi mudah dan nyaman. Dalam proses pembangunan diberbagai bidang, digitalisasi dan otomatisasi telah banyak digunakan seperti, pertahanan dan keamanan dengan cyber security, inklusi keuangan dengan *fin-tech*, pendidikan dengan e-learning, pengembangan UMKM dengan adanya e-commerce, *artificial intelligence* (AI) untuk pengajaran dan pembelajaran, pertanian melalui mekanisasi alat mesin pertanian (Alsintan), digitalisasi yang mendukung konektivitas, inovasi mesin multifungsi, digitalisasi di sektor pelayanan publik, teknologi hijau hingga penyediaan energi terbarukan.

Namun di sisi lain, digitalisasi bisa berpotensi mendisrupsi berbagai aspek kehidupan manusia, salah satunya menghilangkan jenis pekerjaan hingga berdampak pada meningkatnya angka pengangguran. Berbagai studi mengungkapkan hal tersebut bahwa sektor-sektor pekerjaan yang berisiko hilang karena terdampak adanya digitalisasi dan otomatisasi seperti, sektor

perhotelan . . .

perhotelan dan restoran, perdagangan eceran, serta konstruksi dan manufaktur. Digitalisasi ini memerlukan kesiapan adaptif dari masyarakat di Kota Makassar. Pemanfaatan teknologi perlu ditopang dengan kemampuan literasi dan pola pikir yang baik. Studi Smeru (2021) mengungkapkan status literasi digital pengguna internet Indonesia masih berada pada tingkat sedang, yakni dengan skor 3,47 dari 5, tertinggal dari Vietnam dan Malaysia. Selain itu, pemanfaatan teknologi oleh penduduk Kota Makassar untuk kegiatan produktif masih sangat rendah. BPS (2023) melaporkan hanya 6,56 persen penduduk yang menggunakan internet untuk kegiatan penjualan barang /jasa, hanya 14,81 persen untuk fasilitas finansial serta 5,66 persen untuk pembuatan konten digital. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi perencanaan pembangunan jangka panjang Kota Makassar agar mampu memanfaatkan digitalisasi secara optimal, serta meminimalkan risiko seiring terjadinya disrupsi teknologi.

Dampak lain dari digitalisasi ini adalah berpeluang semakin memperlebar ketimpangan antara orang kaya dan miskin. Ada kecenderungan orang dengan kemampuan menengah ke atas, misalnya, memiliki kemampuan lebih untuk membeli perangkat telekomunikasi dan pulsa dibanding orang miskin yang memiliki kebutuhan pokok yang harus diprioritaskan. Di Kota Makassar, masih ada sekitar 16,69 persen penduduk yang belum memiliki akses terhadap internet dan sebagian besar adalah perempuan dan kemungkinan besar berada di wilayah pesisir dan pulau kecil. Oleh karena itu, dalam menghadapi digitalisasi, beberapa isu yang perlu diperhatikan oleh Kota Makassar yakni peningkatan kualitas manusia, ketersediaan infrastruktur atau akses jaringan internet terutama di wilayah pesisir dan pulau kecil, serta regulasi atau kebijakan terkait digital ekonomi.

3.2.4. Bonus Demografi

Perkiraan penduduk dunia tahun 2045 sebanyak 9,45 Milyar, dengan proyeksi 65% akan tinggal di kawasan perkotaan. Populasi Kota Makassar saat ini mencapai lebih 1,4 juta jiwa atau menyumbang sekitar 15,43 persen total penduduk di Sulawesi Selatan. Jumlah ini diperkirakan akan terus meningkat hingga 1,54 juta jiwa pada tahun 2035. Kondisi ini memberikan tantangan tersendiri bagi pembangunan Kota Makassar terkait dengan penyesuaian tingginya kebutuhan hidup masyarakat dengan keterbatasan sumber daya alam dan lahan. Seiring bertambahnya jumlah penduduk, juga kebutuhan pangan, energi, serta air akan semakin meningkat. Oleh karena itu, menyesuaikan sektor produksi menjadi perlu untuk mendorong life-span (rentang hidup) yang semakin panjang.

Sementara itu, terkait dengan proporsi bertambahnya kelompok penduduk usia tua (*aging population*) di Kota Makassar juga menjadi tantangan seperti kewajiban pemerintah daerah terhadap pemenuhan perlindungan sosial. BPS (2023) memproyeksi proporsi kelompok penduduk usia tua pada tahun 2035 mencapai 10,28 persen, meningkat 5,03 poin dari tahun 2020 (5,25%). Hal tersebut disebabkan oleh menurunnya tingkat kematian dan angka kelahiran. Di sisi lain, terjadi peningkatan angka harapan hidup saat lahir. Bertambahnya kelompok penduduk usia tua berimplikasi terhadap pentingnya peningkatan fasilitas kesehatan bagi mereka. Umumnya penduduk yang berusia lanjut lebih rentan terkena penyakit, sehingga akan membutuhkan perawatan kesehatan yang intensif. Beban pelayanan kesehatan ini tentunya akan berpengaruh terhadap peningkatan belanja kesehatan pemerintah di masa mendatang.

Selain itu, terkait dengan tingginya penduduk usia muda juga akan menjadi peluang dan tantangan bagi pembangunan di Kota Makassar. Proporsi penduduk usia muda hingga tahun 2035 masih mendominasi struktur

penduduk . . .

penduduk di Kota Makassar yakni mencapai 67,92 persen. Proporsi tertinggi yakni di tahun 2025 dengan tercatat sebesar 70,17 persen. Fenomena bonus demografi ini menjadi peluang bagi Kota Makassar untuk mencapai transformasi ekonomi. Syarat untuk memperoleh manfaat maksimal dari bonus demografi ini adalah ketersediaan sumber daya manusia usia produktif yang melimpah, kemudian diimbangi dengan peningkatan kualitas dari sisi pendidikan dan keterampilan, termasuk kaitannya dalam menghadapi keterbukaan pasar tenaga kerja. Di sisi lain, fenomena ini juga memberikan tantangan seperti kewajiban pembukaan lapangan kerja. Mengingat angka pengangguran di Kota Makassar masih tinggi.

3.2.5. Penyediaan Transportasi Publik

Belum optimalnya pengelolaan sistem transportasi di Kota Makassar berdampak kemacetan pada titik-titik strategis. Penyebabnya antara lain jumlah kendaraan yang tidak sebanding dengan panjang jalan yang ada. Selain itu transportasi publik yang beroperasi (Trans Mamminasata) masih kurang efektif dimana load factor nya masih dibawah 35% dan lembaga yang menangani transportasi publik belum ada. Oleh karena itu dibutuhkan kajian yang lebih mendalam terkait pengelolaan bus atau transportasi publik ini sehingga mampu merubah pola pikir masyarakat untuk menggunakan transportasi publik. Dalam pengelolaan sistem transportasi juga dibutuhkan sistem transportasi yang terintegrasi dimana terdapat keterpaduan antar moda transportasi dalam satu simpul. Contoh dalam pengelolaan sistem transportasi di Makassar New Port direncanakan akan diintegrasikan antara moda transportasi rel kereta api, bus Trans Mamminasata dan moda transportasi laut. Dengan adanya sistem transportasi yang terintegrasi diharapkan dapat mengurangi kemacetan pada titik-titik strategis di Kota Makassar. Belum tuntasnya pembangunan Jalan Trans Sulawesi, serta ketersediaan dan kualitas infrastruktur jalan daerah yang masih rendah juga menyumbang pada keterbatasan aksesibilitas. Pendekatan konektivitas multimoda dan antarmoda belum secara optimal dilaksanakan termasuk pengembangan transportasi perkotaan (angkutan umum massal) di wilayah Metropolitan Makassar (Kota Makassar, Kab. Takalar, Kab. Gowa, Kab. Maros) masih belum optimal.

3.2.6. Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Pertanahan

Tantangan penyelenggaraan penataan ruang adalah rendahnya kepedulian pada penurunan kualitas lingkungan hidup akibat peningkatan intensitas kegiatan pemanfaatan ruang terutama yang terkait dengan eksploitasi SDA Ruang lingkup perencanaan yang tidak terbatas di daratan saja tetapi juga laut, bawah tanah, ruang udara dan angkasa. Kebijakan dalam prioritas bidang penyelenggaraan penataan ruang adalah mewujudkan penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan dengan meningkatkan kualitas rencana tata ruang, mengoptimalkan peran kelembagaan, dan diacunya rencana tata ruang dalam pelaksanaan pembangunan, melalui strategi: Mempercepat penyusunan dan pengesahan RTR, RRTR dan peraturan perundangan di daerah dan perkotaan untuk mewujudkan sinkronisasi program pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Meningkatkan kapasitas kelembagaan penataan ruang melalui peningkatan kualitas SDM dan koordinasi antar sektor dan wilayah, serta membangun kerjasama dan kesepakatan antar wilayah. Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang, mengoptimalkan pengawasan penyelenggaraan penataan ruang termasuk di dalamnya melalui pengendalian pemanfaatan ruang dan terbentuknya PPNS. Percepatan penyelesaian RTRW di berbagai tingkat

administrasi pemerintahan dan implementasi pengawasan penataan ruang. Tantangan terbesar dalam penyelenggaraan penataan ruang melalui adalah memastikan terimplementasikannya dokumen Rencana Tata Ruang, bukan hanya sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan ruang namun juga sebagai instrumen pengendalian pengembangan wilayah perkotaan.

Isu lain yang perlu menjadi perhatian adalah penuntasan integrasi tata ruang darat, laut, dan udara, pemenuhan kelengkapan dokumen rencana tata ruang, tumpang-tindih tata ruang antardaerah dan antar sektor, belum selarasnya rencana tata ruang dan rencana pembangunan, kuantitas dan kualitas SDM penataan ruang, serta efektivitas pengendalian pemanfaatan ruang. Isu terkait permasalahan pertanahan adalah rendahnya kepastian hukum hak atas tanah yang menimbulkan maraknya kasus pertanahan dan mafia tanah yang merugikan masyarakat. Rendahnya kepastian hukum hak atas tanah dapat menimbulkan sengketa dan konflik antara masyarakat dan negara, menghambat pembangunan infrastruktur dan investasi di wilayah. Belum tercatatnya bidang-bidang tanah, menyebabkan masyarakat sulit untuk membuktikan kepemilikan tanah yang dimilikinya sehingga memunculkan sengketa dengan pihak lain termasuk negara. Ketimpangan kepemilikan dan penguasaan tanah serta terbatasnya ketersediaan, akses, dan keterbukaan pada data dan informasi geospasial.

3.2.7. Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)

Pemerintah memutuskan untuk memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur pada tanggal 29 April 2019. Pemerintah kemudian mengeluarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang menjadi dasar hukum. Pembangunan IKN dilakukan dalam lima tahapan yaitu Tahapan Pertama (2022-2024), Tahapan Kedua (2024-2029), Tahapan Ketiga (2030-2034), Tahapan Keempat (2035-2039), dan Tahapan Kelima (2040-2045). Pembangunan IKN di desain untuk menjadi sumber pertumbuhan baru Indonesia dan menjadi superhub ekonomi yang menggerakkan rantai nilai perekonomian Indonesia. Itu artinya keberadaan IKN tidak hanya memberikan multiplier effect terhadap Provinsi Kalimantan Timur atau Pulau Kalimantan, tapi juga akan berdampak terhadap wilayah di sekitar Pulau Kalimantan, salah satunya Kota Makassar.

Efek pengganda dari IKN terhadap daerah di sekitarnya bisa terjadi dalam bentuk kerjasama antar daerah. Perpres No.63 Tahun 2022 telah mengatur pengembangan kerja sama dan kolaborasi antara IKN dan Daerah Mitra. Daerah mitra adalah wilayah tertentu di Pulau Kalimantan yang ditetapkan oleh Badan Otorita IKN untuk pembangunan dan pengembangan superhub ekonomi IKN. Daerah Mitra IKN memungkinkan berkolaborasi dan bersinergi dengan daerah lain yang telah berkembang sebelumnya di wilayah Pulau Kalimantan dan wilayah lainnya di Indonesia, termasuk Kota Makassar.

Badan otorita IKN telah menetapkan 8 (delapan) sektor pembangunan dalam kerja sama antar daerah yang berpotensi dikerjasamakan oleh mitra IKN antara lain (i) Sektor Ekonomi dan Industri, (ii) Logistik dan Konektivitas, (iii) SDM dan Ketenagakerjaan, (iv) Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, (v) Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, (vi) Energi dan Kelistrikan, (vii) Pertanian dan Ketahanan Pangan, dan (viii) Pengelolaan Sumber Daya Air. Jika memenuhi salah satu dari delapan sektor kerjasama, maka potensi Kota Makassar untuk menjadi daerah mitra IKN terbuka luas.

Dalam draf akhir RPJPN 2025-2045 memuat tentang arah pembangunan wilayah, dimana Pulau Sulawesi dijadikan sebagai wilayah penunjang superhub ekonomi nusantara dan industri berbasis sumberdaya termasuk Kota Makassar. Menjadikan Kota Makassar sebagai wilayah penunjang superhub ekonomi dan industri berbasis sumberdaya tidak lepas dari potensi

yang . . .

yang dimiliki. Secara geografis, Kota Makassar berada di ALKI II dan ALKI II yang berpotensi mendukung Wilayah Sulawesi sebagai hub dan pintu gerbang internasional di wilayah KTI. Pembangunan IKN di Pulau Kalimantan juga berpotensi mendorong pembangunan ekonomi di Kota Makassar sebagai daerah penyangga IKN. Kontribusi Kota Makassar sebagai daerah penyangga IKN berpotensi meningkatkan nilai tambah beberapa sektor ekonomi seperti industri pengolahan, akomodasi makan dan minum, perdagangan dan pariwisata. Karena dianggap sebagai penunjang superhub ekonomi nusantara, maka kemungkinan pemerintah pusat dan provinsi akan mengalokasikan anggaran untuk pengembangan sektor-sektor potensial di Kota Makassar. Ini bisa menjadi momentum bagi Kota Makassar untuk melakukan diversifikasi sumber pertumbuhan ekonomi.

BAB IV

VISI DAN MISI DAERAH

4.1. Visi

Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan pernyataan mengenai keadaan (*clarity of direction*) yang ingin dicapai dimasa depan (*desired future*) dalam 20 (dua puluh), yang menunjukkan gambaran ideal masa depan bagi Kota Makassar. Sesuai ketentuan pasal 263 ayat (2), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanahkan bahwa Visi pembangunan jangka panjang daerah harus berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana tata ruang wilayah. Visi RPJPD Kota Makassar juga berpedoman pada RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan 2025-2045.

4.1.1. Visi Indonesia 2045

Visi pembangunan jangka panjang nasional 2045 mengusung filosofis dan makna 5 Pancasila, 100 tahun Indonesia Merdeka yang dijabarkan menjadi 8 Misi Pembangunan, 17 Arah Pembangunan dengan 45 Indikator Utama Pembangunan (17-8-45).

Visi RPJPN 2025-2045 adalah: **“Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”**. Visi pembangunan jangka panjang nasional atau Visi Indonesia Emas 2045 tersebut mempunyai pokok visi sebagai berikut:

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan besar yang terletak di antara dua samudra besar, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia akan menjadi negara tangguh pada tahun 2045, yang memiliki kekuatan geopolitik, militer dan geoeкономи serta peradaban maritim yang besar di kancah dunia
2. Bersatu bermakna pada tahun 2045, NKRI akan memiliki kesatuan yang lebih kuat di seluruh wilayah dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Seluruh wilayah Indonesia akan tunduk pada satu sistem hukum nasional yang memastikan hak dan kewajiban yang sama bagi setiap warga negara di seluruh negeri. Pemerintahan akan dijalankan secara terpusat dengan satu pemerintahan nasional yang memegang kedaulatan dan otoritas tertinggi, sambil tetap mengakomodasi desentralisasi dan otonomi daerah untuk menjaga kohesi nasional.
3. Berdaulat bermakna pada tahun 2045, Indonesia sebagai negara kesatuan yang memiliki kemandirian dan kewenangan penuh untuk mengatur sendiri seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di wilayahnya.
4. Maju bermakna pada tahun 2045 Indonesia sebagai negara maju, perekonomiannya mencapai posisi nomor lima terbesar dunia, berbasiskan pengetahuan dan inovasi yang berakar pada budaya Indonesia. Indonesia menjadi negara berdaya, modern, tangguh, inovatif, dan adil, sehingga memiliki daya saing yang tinggi di kancah domestik dan global, ketahanan ekonomi yang kuat terhadap gejolak dan perubahan global serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat. Peran Indonesia semakin penting dalam berbagai forum internasional.
5. Berkelanjutan bermakna negara yang berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi seimbang dengan pembangunan sosial, berkelanjutan sumberdaya alam dan kualitas lingkungan hidup, serta tata kelola yang baik. Kualitas hidup masyarakat Indonesia ditandai dengan kehidupan yang sejahtera secara merata, kesehatan dan pendidikan yang prima,serta lingkungan yang asri dan lestari, lingkungan permukiman hidup . . .

hidup yang layak dan nyaman, bebas polusi udara, air, suara sampah serta kondisi hutan, sungai, danau dan laut beserta isinya terjaga dengan baik.

Visi Indonesia Emas 2045 sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan merupakan cita-cita yang menggema di pikiran dan relung hati seluruh bangsa. Dalam mewujudkan Visi pembangunan di masa depan yang gemilang, berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia mengutamakan nilai-nilai nasionalisme, demokrasi dan hak asasi manusia, keadilan sosial, ekonomi kerakyatan, kemandirian nasional, pengembangan sektor maritim, dan berkelanjutan pembangunan

Visi Indonesia 2045 memiliki 5 (lima) Sasaran Utama dan 8 (delapan) Misi (Agenda) Pembangunan 2045. Adapun Sasaran Utama Visi Indonesia Emas 2045 yaitu:

1. Pendapatan per kapita setara negara maju:
 - a. GNI Per Capita US \$30.300;
 - b. Kontribusi PDB Maritim 15%;
 - c. Kontribusi PDB Manufaktur 28%.
2. Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang:
 - a. Tingkat Kemiskinan 0,5-0,8%;
 - b. Rasio Gini (Indeks) 0,290-0,320;
 - c. Kontribusi PDRB KTI 28,5%.
3. Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat:
 - a. *Global Power Indeks (GPI)* peringkat 15 besar dunia.
4. Daya saing sumber daya manusia meningkat:
Indeks Modal Manusia (*Human Capital Indeks*) 0,73;
5. Intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menurun menuju *net zero emission*:
 - a. Penurunan Intensitas Emisi GRK 93,3%.
 - b. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 83,00

Misi (Agenda) pembangunan nasional 2045 yaitu:

1. **Mewujudkan transformasi sosial** untuk membangun manusia yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul dan berdaya saing.
2. **Mewujudkan transformasi ekonomi** untuk meningkatkan produktivitas melalui peningkatan inovasi iptek, ekonomi produktif (termasuk industri manufaktur, ekonomi dan keuangan syariah, pertanian, ekonomi biru dan bioekonomi, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi, tenaga kerja, serta BUMN), penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, serta pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.
3. **Mewujudkan transformasi tata Kelola** untuk membangun regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif.
4. **Memantapkan supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia** dengan memantapkan stabilitas ekonomi, politik, hukum dan keamanan nasional, serta memperkuat ketangguhan diplomasi Indonesia di tingkat global dan membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan.
5. **Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi** dengan memperkuat ketangguhan individu, keluarga, komunitas, masyarakat, pembangunan karakter, dan lingkungan yang mampu menyeimbangkan hubungan timbal balik antara sosial budaya dan ekologi, serta mengoptimalkan modal sosial budaya untuk tahan menghadapi berbagai

- bencana, perubahan dan guncangan, serta dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam.
6. **Pembangunan kewilayahan** diwujudkan untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan pembangunan melalui penerjemahan agenda transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, yang dilengkapi dengan landasan transformasi supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi. Penerjemahan tersebut dilakukan sesuai karakteristik masing-masing wilayah.
 7. **Dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan** menjadi faktor kunci pengembangan wilayah sekaligus sebagai pilar pendukung agenda transformasi.
 8. **Kesinambungan pembangunan** untuk mengawal pencapaian Indonesia Emas yang diwujudkan melalui kaidah pelaksanaan yang efektif serta pendanaan pembangunan.

Misi (Agenda) dan Sasaran Utama Indonesia Emas 2045 memiliki 17 (tujuh belas) Arah (Tujuan) Pembangunan yaitu:

- A. Transformasi Sosial, meliputi tujuan:
 1. Kesehatan untuk Semua
 2. Pendidikan Berkualitas yang Merata
 3. Perlindungan Sosial yang Adaptif
- B. Transformasi Ekonomi, meliputi tujuan:
 4. Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi
 5. Penerapan Ekonomi Hijau
 6. Transformasi Digital
 7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global
 8. Perkotaan dan Perdesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi
- C. Transformasi Tata Kelola, meliputi tujuan:
 9. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif
- D. Sebagai Landasan Transformasi pertama yaitu: Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia, meliputi tujuan:
 10. Hukum berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial
 11. Stabilitas Ekonomi Makro
 12. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gantar Kawasan
- E. Sebagai Landasan Transformasi kedua yaitu: Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi, meliputi tujuan:
 13. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju
 14. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif
 15. Lingkungan Hidup Berkualitas
 16. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan
 17. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim
- F. Ke-17 Arah (Tujuan) pembangunan tersebut mempunyai Kerangka Implementasi yang meliputi:
 1. Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan
 2. Mewujudkan Sasaran dan Prasarana Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan
 3. Mewujudkan Kesenambungan Pembangunan.

Arsitektur kinerja 17 (Tujuh Belas) Arah (Tujuan) Pembangunan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 4.1
17 (Tujuh Belas) Arah (Tujuan) Pembangunan Nasional



Sumber: Undang-Undang Nomor 59 tahun 2024 Tentang RPJPN 2025-2045

Tujuan pembangunan nasional 2024, di-cascade menjadi 45 (empat puluh lima) indikator utama pembangunan, yaitu:

Tabel 4.1
Indikator Utama Pembangunan Nasional

No	Arah (Tujuan) Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan (IUP) Nasional	Base line 2025*	Sasaran 2045
1.	Kesehatan untuk Semua	1. Indikator Kesehatan terkait Harapan Hidup: <ul style="list-style-type: none"> • Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun) • Angka Kematian Ibu 	74,4	80,0
		2. Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	18,80	5,0
		3. Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	274	76
		4. Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional (%)	98	99,5
2.	Pendidikan Berkualitas yang Merata	5. Hasil Pembelajaran <ul style="list-style-type: none"> a. Rata-rata nilai PISA <ul style="list-style-type: none"> • Membaca • Matematika • Sains b. Rata-rata nilai Asesmen nasional <ul style="list-style-type: none"> • Literasi Membaca • Numerasi c. Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun) d. Harapan Lama Sekolah 	396 404 416	485 490 487
		6. Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi (%)	62,89 54,36 9,33	75,73 68,72 12,0
		7. Persentase pekerja lulusan Pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	13,32	14,81
			33,94	60,00
			66,78	75,00

3.	Perlindungan Sosial yang Adaptif	8. Tingkat Kemiskinan (%)	7,0-8,0	0,5-0,8
		9. Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	43,19	99,5
		10. Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)	22,0	60,0
4.	Iptek Inovasi dan Produktivitas Ekonomi	11. Produktivitas Industri dan Pertanian		
		a. Rasio PDB Industri Pengolahan (%)	20,8	28,0
		b. Pertumbuhan PDB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)	3,2-3,4	3,3-4,2
		12. Pengembangan Pariwisata:		
		• Rasio PDB Pariwisata (%)	4,5	8,0
		• Devisa Pariwisata (miliar USD)	22,10	100
		13. Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)	7,9	11,0
		14. Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMN:		
		• Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah (%)	1,44	5,0
		• Rasio kewirausahaan (%)	4,14	8,0
		• Rasio volume usaha koperasi terhadap PDB (%)	1,1	5,0
• <i>Return on Asset (ROA) BUMN (%)</i>	3,4	5,6		
15. Penciptaan Lapangan Kerja Yang Baik				
a. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,00	4,00		
b. Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	35	80		
16. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	56,3	70,0		
17. Tingkat Penguasaan IPTEK				
a. Pengeluaran Iptek dan Inovasi (% PDB)	0,30	2,2-2,3		
b. Peringkat Indeks Inovasi Global (peringkat)	60	30 besar		
5.	Penerapan Ekonomi Hijau	18. Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau		
		a. Indeks Ekonomi Hijau	70,80	90,65
		b. Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	20	70
6.	Transformasi Digital	19. Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global (peringkat)	43	20 besar
7.	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	20. Biaya Logistik (% PDB)	13,5	8,0
		21. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDB)	30,1-30,2	27,2
		22. Ekspor Barang dan Jasa (% PDB)	21,0-21,6	40,0

8.	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	23. Kota maju, inklusif, dan berkelanjutan: <ul style="list-style-type: none"> • Proporsi kontribusi PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional (%) • Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%) • Persentase Desa Mandiri (%) 	44,34 67 4,00	48,92 100 16,25
9.	Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif	24. Indeks Materi Hukum	0,51	0,71
		25. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,12	5,0
		26. Indeks Pelayanan Publik	3,68	5,0
		27. Anti Korupsi: <ul style="list-style-type: none"> • Indeks Integritas Nasional • Indeks Persepsi Korupsi 	74,52 38	96,98 60
10.	Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial	28. Indeks Pembangunan Hukum	0,69	0,89
		29. Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	67,5	80,0
		30. Indeks Demokrasi Indonesia	Sedang (60-80)	Tinggi (>80)
11.	Stabilitas Ekonomi Makro	31. Rasio Pajak terhadap PDB (%)	10,70-11,20	18,0-22,0
		32. Tingkat Inflasi (%)	2,5 ± 1	2,0 ± 1
		33. Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan: a. Aset Perbankan/PDB (%) b. Aset Dana Pensiun/PDB (%) c. Aset Asuransi /PDB (%) d. Kapitalisasi Pasar Modal/PDB (%) e. Total Kredit/PDB (%)	66,9 8,0 9,1 57,8 37,8	200 60 20 120 80-90
		34. Inklusi Keuangan (%)	91	98
12.	Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gantar Kawasan	35. <i>Asia Power Index (Diplomatic Influence)</i>	61,54	75,0-80,0
		36. <i>Asia Power Index (Military Capability)</i>	16	45,0
13.	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	37. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	58,39	68,15
		38. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	76,77	84,20
14.	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	39. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	70,29	80,00
		40. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,425	0,15

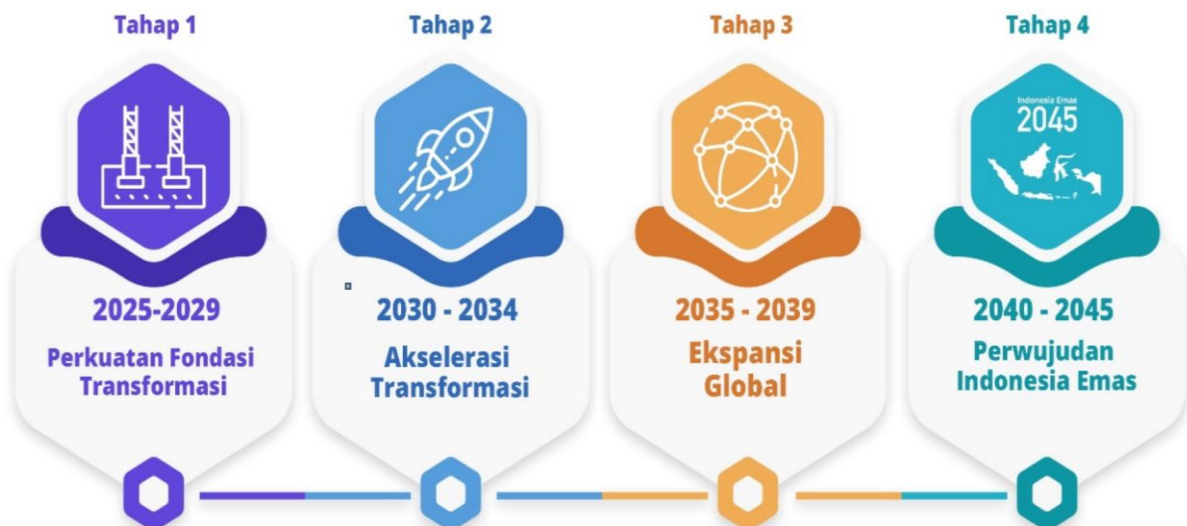
15.	Lingkungan Hidup Berkualitas	41. Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0,44	0,75
		42. Kualitas Lingkungan Hidup: <ul style="list-style-type: none"> • Indeks Kualitas Udara • Indeks Kualitas Air (IKA) • Indeks Kualitas Lahan (IKL) • Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) • Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%) • Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%) 	78,53 72,02 77,98 81,02 12,5 24 (16% terdaur ulang)	87,05 77,50 79,74 88,77 70,0 90 (35% terdaur ulang)
16.	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	43. Ketahanan Energi, Air dan Kemandirian menuju Kedaulatan Pangan: <ul style="list-style-type: none"> a. Ketahanan energi <ul style="list-style-type: none"> • Indeks ketahanan energi b. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (%) c. Ketahanan Air <ul style="list-style-type: none"> • Kapasitas Tampungan Air (m³/kapita) • Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%) 	6,77 7,21 65,18 39,20	8,24 0,77 200 100
		44. Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung akibat Bencana Relatif terhadap PDB (%)	0,137	0,11
17.	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	45. Persentase Penurunan Emisi GRK (%): <ul style="list-style-type: none"> • Kumulatif • Tahunan 	28,12 32,65	51,51 80,98

Sumber: Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang RPJPN 2025-2045

Untuk pelaksanaan Visi RPJPN 2025-2045, dilaksanakan pentahapan pembangunan yang secara garis besar sebagai berikut:

- Tahapan pertama (2025-2029) penguatan fondasi transformasi (pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,6 – 6,1 persen per tahun);
- Tahapan kedua (2030-2034) akselerasi transformasi (pertumbuhan ekonomi pada kisaran 6,9 - 7,8 persen per tahun);
- Tahapan ketiga (2035-2039), ekspansi global (Pertumbuhan ekonomi pada kisaran 6,4 – 7,6 persen pertahun)
- Tahapan keempat (2040-2045), Perwujudan Indonesia Emas 2045, (Pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,4 - 6,7 persen pertahun)

Gambar 4.2
Pentahapan Implementasi RPJPN 2025-2045



Sumber: Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang RPJPN 2025-2045

Hal lain yang perlu diperhatikan dalam RPJPN 2025-2045 adalah Arah Kebijakan untuk pembangunan wilayah Sulawesi, dimana Kawasan Sulawesi pada tahun 2045 Sulawesi berpotensi meningkatkan kontribusinya terhadap PDB nasional menjadi 8,4 persen apabila rata-rata pertumbuhan pulau terjaga pada sekitar 7,8-9,3 persen per tahun. Arah Kebijakan Wilayah Sulawesi adalah sebagai berikut:

Pengembangan Wilayah Sulawesi diarahkan sebagai **“Penunjang Ekonomi IKN dan Industri Berbasis SDA”** berperan sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) dan pintu gerbang internasional Kawasan Timur Indonesia (KTI), serta pengembangan industri hilirisasi mineral, dan lumbung pangan nasional. Untuk itu dibangun konektivitas antar wilayah yang menjadi kunci rantai nilai domestik (*Domestic Value Chain*), diperkuat dengan *Global Value Chain* melalui skema kerja sama regional. Pertumbuhan tinggi daerah akan lebih diimbangi dengan upaya-upaya yang inklusif dan berkelanjutan melalui perkuatan kebijakan pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial. Berdasarkan arah pembangunan tersebut, pembangunan di Wilayah Sulawesi mencakup 5 (lima) prioritas:

Pertama, pembangunan sumber daya manusia (SDM) terutama untuk mendukung peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, dan ketenagakerjaan, serta mendorong pembangunan ekosistem riset dan inovasi.

Kedua, pembangunan ekonomi yang diarahkan untuk penguatan rantai produksi dan rantai nilai, serta peningkatan produktivitas dan daya saing perekonomian wilayah secara berkelanjutan yang difokuskan pada kawasan industri pertambangan, kawasan industri galangan kapal, kawasan ekowisata, kawasan perikanan tangkap dan budidaya, serta industry pengolahannya, kawasan pertanian tanaman pangan, serta kawasan perkebunan kakao, kelapa, dan kopi.

Ketiga, pembangunan sarana dan prasarana konektivitas untuk mendukung fungsi *hub* dan pintu gerbang internasional KTI dengan memanfaatkan ALKI II dan III, serta peningkatan infrastruktur ketenagalistrikan dan digital.

Keempat, perbaikan tata kelola pemerintahan, termasuk penataan keuangan daerah untuk mewujudkan *good governance* dan kemandirian fiskal, serta penguatan stabilitas pertahanan dan keamanan di wilayah Sulawesi, khususnya di kawasan perbatasan.

Kelima, peningkatan ketahanan sosial, budaya, dan ekologi, termasuk penguatan pengendalian rencana tata ruang wilayah dengan

mempertimbangkan . . .

mempertimbangkan risiko bencana serta penuntasan RDTR kabupaten/kota untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berbudaya.

4.1.2. Visi RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan 2045

Pengertian visi dalam RPJPD ini adalah kondisi Sulawesi Selatan sebagai hasil dari pembangunan yang ingin diwujudkan sampai dengan tahun 2045. Rumusan visi RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan 2025-2045 adalah: **"Sulawesi Selatan Mandiri, Maju, dan Berkelanjutan"**.

Mandiri adalah kondisi Sulawesi Selatan pada tahun 2045 yang berkemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya melalui pemanfaatan potensi daerah, terutama dalam berposisi sebagai lumbung pangan nasional. Mandiri juga merupakan kondisi Sulawesi Selatan yang berdaya saing tinggi sehingga diperhitungkan dalam konstelasi nasional maupun global.

Maju adalah kondisi Sulawesi Selatan pada tahun 2045 dimana masyarakat hidup sejahtera dengan tingkat pendapatan yang tinggi dan merata. Pada saat itu pendapatan masyarakat Sulawesi Selatan sudah mendekati setara dengan pendapatan warga pada negara maju dan tingkat pendapatan antar lapisan masyarakat relatif merata. Kondisi maju tersebut juga ditandai oleh kualitas manusia yang unggul, dimana manusia Sulawesi Selatan memiliki derajat kesehatan, derajat pendidikan, dan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (iptekin) yang memungkinkannya mempunyai kualitas tinggi sebagai modal manusia.

Berkelanjutan adalah kondisi Sulawesi Selatan pada tahun 2045 yang hidup dalam kualitas lingkungan hidup yang terpelihara serta ketersediaan sumberdaya alam yang menjamin keterpenuhan kebutuhan hidup generasi berikutnya. Keberlanjutan ini dilandasi oleh resiliensi terhadap bencana dan dampak perubahan iklim. Berkelanjutan juga merupakan kondisi Sulawesi Selatan yang memiliki tata kelola yang baik dimana prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, transparansi, partisipasi dan ketaatan kepada hukum termanifestasikan dalam pemerintahan yang di dalamnya partisipasi masyarakat sipil berjalan secara substantif.

Dalam mewujudkan Visi Pembangunan Sulawesi Selatan, ditetapkan delapan Misi Pembangunan, sebagai upaya-upaya umum yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi daerah sampai dengan tahun 2045. Rumusan misi RPJPD Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut.

1. Mewujudkan transformasi sosial
2. Mewujudkan transformasi ekonomi
3. Mewujudkan transformasi tata kelola
4. Memantapkan keamanan daerah, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro
5. Memelihara ketahanan sosial budaya dan ekologi
6. Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan
7. Mewujudkan pemenuhan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan
8. Mendorong daya saing daerah untuk kesinambungan pembangunan

4.1.3. Visi Kota Makassar 2025-2045

Sejarah Kota Makassar diawali dengan sebuah bandar yang berada di muara Sungai Tallo dengan pelabuhan niaga kecil pada penghujung abad XV. Bandar Tallo itu awalnya berada di bawah Kerajaan Siang di sekitar Pangkajene. Pada pertengahan abad XVI, Tallo bersatu dengan sebuah kerajaan kecil lainnya yang bernama Gowa, dan mulai melepaskan diri dari kerajaan Siang. Akibat semakin intensifnya kegiatan pertanian di hulu sungai Tallo, mengakibatkan pendangkalan sungai Tallo, sehingga bandarnya dipindahkan ke muara sungai Jeneberang, disinilah terjadi pembangunan

kekuasaan . . .

kekuasaan kawasan istana oleh para ningrat Gowa-Tallo yang kemudian membangun pertahanan benteng Somba Opu, yang seratus tahun kemudian menjadi wilayah inti Kota Makassar. Pada masa pemerintahan Raja Gowa XVI, didirikan Benteng *Rotterdam*, pada masa itu terjadi peningkatan aktivitas pada sektor perdagangan lokal, regional dan internasional, sektor politik serta sektor pembangunan fisik oleh kerajaan. Masa itu merupakan puncak kejayaan Kerajaan Gowa, namun selanjutnya dengan adanya perjanjian Bungaya menghantarkan Kerajaan Gowa pada awal keruntuhan.

Hanya dalam seabad saja, Makassar menjadi salah satu kota niaga terkemuka dunia yang dihuni lebih 100.000 orang (kota terbesar ke 20 dunia). Pada zaman itu jumlah penduduk Amsterdam, yang termasuk kota kosmopolitan dan multikultural baru mencapai sekitar 60.000 orang. Perkembangan bandar Makassar yang demikian pesat itu, berkat hubungannya dengan perubahan-perubahan pada tatanan perdagangan internasional masa itu. Sampai pada pertengahan abad ke-17, Makassar berupaya merentangkan kekuasaannya ke sebagian besar Indonesia Timur dengan menaklukkan Pulau Selayar dan sekitarnya, kerajaan-kerajaan Wolio di Buton, Bima di Sumbawa, Banggai dan Gorontalo di Sulawesi bagian Timur dan Utara serta mengadakan perjanjian dengan kerajaan-kerajaan di Seram dan pulau-pulau lain di Maluku. Secara Internasional, sebagai salah satu bagian penting dalam dunia Islam, Sultan Makassar menjalin hubungan perdagangan dan diplomatik yang erat dengan kerajaan-kerajaan Banten dan Aceh di Indonesia Barat, Golconda di India dan Kekaisaran Ottoman di Timur Tengah.

Giati Makassar dalam jaringan perdagangan internasional, dan interaksi dengan komunitas kota yang kosmopolitan itu menyebabkan sebuah "*creative renaissance*" yang menjadikan Bandar Makassar sebagai salah satu pusat ilmu pengetahuan terdepan pada zamannya. Koleksi buku dan peta, zaman itu masih langka di Eropa namun di Makassar sudah banyak terkumpul. Makassar merupakan salah satu perpustakaan ilmiah terbesar di dunia, dan para sultan tak segan-segan memesan barang-barang paling mutakhir dari seluruh pelosok bumi, termasuk bola dunia dan teropong terbesar pada waktunya, yang dipesan secara khusus dari Eropa. Perang dahsyat Kerajaan Gowa-Tallo dengan Kompeni Dagang Belanda (VOC) untuk semakin memperluas wilayah kekuasaan serta persaingan Bandar Makassar, dimana pasukan Bugis, Belanda dan sekutunya dari Ternate, Buton dan Maluku memerlukan tiga tahun operasi militer di seluruh kawasan Indonesia Timur. Baru pada Tahun 1669, akhirnya dapat merata-tanahkan kota Makassar dan benteng terbesarnya, Somba Opu. Kejatuhan Makassar di tangan federasi itu merupakan sebuah titik balik yang berarti bahwa Bandar Niaga Makassar menjadi wilayah kekuasaan VOC, dan beberapa pasal perjanjian perdamaian membatasi dengan ketat kegiatan pelayaran antar-pulau Gowa-Tallo dan sekutunya. Pelabuhan Makassar ditutup bagi pedagang asing, sehingga komunitas saudagar hijrah ke pelabuhan-pelabuhan lain.

Pada dekade pertama se usai perang, seluruh kawasan itu dihuni tidak lebih 2.000 jiwa, dimana selama dikuasai VOC, Makassar menjadi sebuah kota yang terlupakan. 'Kota Kompeni' itu hanya berfungsi sebagai pos pengamanan di jalur utara perdagangan rempah-rempah tanpa *hinterland* bentuknya pun bukan 'bentuk kota', tetapi suatu aglomerasi kampung-kampung di pesisir pantai sekeliling *Fort Rotterdam*. Setelah Pemerintah Kolonial Hindia Belanda menggantikan kompeni perdagangan VOC yang bangkrut pada akhir abad ke-18, Makassar dihidupkan kembali dengan menjadikannya sebagai pelabuhan bebas pada tahun 1846. Tahun-tahun berikutnya terjadi kenaikan volume perdagangan yang pesat, dan kota Makassar berkembang dari sebuah pelabuhan *backwater* kembali menjadi bandar internasional. Dengan semakin

berputarnya . . .

berputarnya roda perekonomian Makassar, jumlah penduduknya meningkat dari sekitar 15.000 penduduk pada pertengahan abad ke-19 menjadi kurang lebih 30.000 jiwa pada awal abad berikutnya. Makassar abad ke-19 itu dijuluki “kota kecil terindah di seluruh Hindia-Belanda” (Joseph Conrad, seorang penulis Inggris-Polandia terkenal), dan menjadi salah satu *port of call* utama bagi para pelaut pedagang Eropa, India dan Arab maupun perahu-perahu pribumi yang beroperasi di antara Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Maluku. Dideklarasikan sebagai Kota Madya pada tahun 1906, Makassar tahun 1920-an adalah kota besar kedua di luar Jawa yang membanggakan dirinya dengan sembilan perwakilan asing, sederetan panjang toko di tengah kota yang menjual barang-barang mutakhir dari seluruh dunia dan kehidupan sosial-budaya yang dinamis dan kosmopolitan. Kebesaran dan kemajuan Makassar di masa lalu tentulah menjadi sebuah inspirasi, dimana pembentukan visi Kota Makassar kedepan tentunya tidak terlepas dari sejarah Bandar Makassar dahulu kala, yang akan dimuat dalam Visi Pembangunan Jangka Panjang Kota Makassar.

Selain memperhatikan sejarah panjang Kota Makassar, perumusan visi juga memperhatikan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah yakni terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan dan pemerataan pendapatan, penciptaan lapangan kerja dan peluang usaha, perbaikan pelayanan umum, pelestarian lingkungan hidup, dan peningkatan daya saing daerah. Selain itu, rumusan visi RPJPD ini mengacu pada visi RPJPN 2025-2045 dan visi RPJPD Provinsi Sulawesi-Selatan 2025-2045. Berdasarkan latar pemikiran tersebut maka rumusan visi RPJPD Kota Makassar 2025-2045 adalah:

**Makassar Kota Dunia, Maju dan Berkelanjutan
Yang Sombere’ dan Smart Untuk Semua**

Kota Dunia adalah kondisi Kota Makassar pada tahun 2045 sebagai Kota pusat pertumbuhan ekonomi yang aman, nyaman dan berdaya saing tinggi, dengan konektivitas dan kontribusi hingga ke jaringan internasional (*global chain*) terhadap arus orang/barang, jasa dan keuangan dengan fasilitas infrastruktur yang unggul bagi kesejahteraan Masyarakat Kota Makassar. Kondisi Kota Dunia juga ditandai dengan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, akuntabel dengan ASN yang profesional dan berkinerja tinggi.

Maju adalah kondisi Kota Makassar pada tahun 2045 dimana masyarakat hidup sejahtera dengan tingkat pendapatan per kapita setara negara maju, tingkat ketimpangan pendapatan antar lapisan masyarakat relatif merata, serta tingkat kemiskinan menuju nol persen. Kondisi maju juga ditandai dengan kualitas manusia yang unggul, memiliki derajat kesehatan dan derajat pendidikan yang tinggi, dan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (iptekin) sebagai modal manusia (*Human Capital*) yang mampu bersaing secara global.

Berkelanjutan adalah kondisi Kota Makassar pada tahun 2045 yang hidup dalam kualitas lingkungan hidup yang terpelihara serta ketersediaan sumber daya alam yang menjamin keterpenuhan kebutuhan hidup generasi berikutnya. Keberlanjutan ini dilandasi oleh resiliensi terhadap bencana dan dampak perubahan iklim. Berkelanjutan juga merupakan kondisi Kota Makassar yang memiliki tata kelola yang baik dengan ketaatan kepada hukum yang termanifestasikan dalam pemerintahan dengan partisipasi masyarakat sipil berjalan secara substantif.

Sombere' adalah kondisi Kota Makassar pada tahun 2045 yang berbudaya masyarakat maju dengan kualitas keluarga yang tinggi yang mengakar pada kearifan lokal dan nilai-nilai luhur "Bugis Makassar". *Sombere'* juga merupakan kondisi terwujudnya pemajuan kebudayaan, terwujudnya masyarakat yang religius dan menguatnya moderasi beragama, terlindunginya kekayaan intelektual dan meningkatnya citra kota (*city branding*).

Smart adalah kondisi Kota Makassar pada tahun 2045 sebagai kota cerdas (*smart city*) dengan pelayanan publik (*public services*) prima yang terintegrasi teknologi digital, serta terintegrasinya data untuk mendukung pengambilan kebijakan dan proses bisnis (*business process*).

Untuk Semua adalah kondisi Kota Makassar pada tahun 2045 sebagai kota dengan ketimpangan pendapatan rendah yang memiliki perlindungan sosial adaptif dan tepat sasaran yang didukung dengan lingkungan yang inklusif. Untuk semua juga ditandai dengan peran aktif masyarakat (*community engagement*) dalam pembangunan, kesetaraan dan inklusivitas sosial (*equity and social inclusion*), ramah anak dan kesetaraan gender.

Penyelarasan Visi RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan 2025-2045 dan RPJPD Kota Makassar 2025-2045 dilakukan dengan menyusun Visi RPJPD Kota Makassar 2025-2045 mengacu pada Visi RPJPD Provinsi Tahun 2025-2045 yang disesuaikan dengan karakteristik Kota Makassar. Penyelarasan Visi Provinsi Sulawesi-Selatan dengan Kota Makassar 2025-2045, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.2
Penyelarasan Visi RPJPN, RPJPD Provinsi Sul-Sel dan
Visi RPJPD Kota Makassar 2025-2045

No	Visi RPJPN	Visi RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan 2025-2045	Visi RPJPD Kota Makassar 2025-2045
1	Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan	Sulawesi Selatan Mandiri, Maju, dan Berkelanjutan	Makassar Kota Dunia, Maju dan Berkelanjutan Yang <i>Sombere'</i> dan <i>Smart</i> Untuk Semua

Untuk mencapai visi Kota Makassar 2045 tersebut ditetapkan 5 (lima) sasaran visi RPJPD, dengan 9 (sembilan) indikator kinerja. Penuangan sasaran visi beserta indikator kinerjanya, sebagai berikut:

1. Peningkatan pendapatan perkapita, dengan indikator kinerja:
 - 1) PDRB per kapita (Rp Juta)
 - 2) Indeks Ekonomi Biru Indonesia
 - 3) Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)
2. Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan, dengan indikator kinerja:
 - 4) Tingkat Kemiskinan (%)
 - 5) Rasio Gini (Indeks)
 - 6) Kontribusi PDRB Kota Makassar (%)
 - 7) Pertumbuhan Ekonomi (%)
3. Peningkatan daya saing daerah, dengan indikator kinerja:
 - 8) Indeks Inovasi Daerah
 - 9) Indeks Daya Saing Daerah
 - 10) Indeks Kota Toleran
4. Peningkatan daya saing sumberdaya manusia, dengan indikator kinerja:
 - 11) Indeks Modal Manusia
 - 12) Indeks Pembangunan Manusia

5. Intensitas emisi gas rumah kaca (GRK), dengan indikator kinerja:
 - 13) Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)
 - 14) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Penyelarasan juga dilakukan terhadap Sasaran Visi RPJPD yang dilakukan dengan menerjemahkan 5 (lima) sasaran Visi RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045 ke dalam sasaran Visi RPJPD Kota Makassar Tahun 2025-2045, beserta indikator dan target kinerjanya, sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 4.3
Penyelarasan 5 (lima) Sasaran Visi RPJPD Provinsi Sulawesi-Selatan dan Sasaran Visi RPJPD Kota Makassar 2025-2045

No	RPJPD Provinsi Sul-Sel 2025-2045			RPJPD Kota Makassar 2025-2045		
	Sasaran Visi/ Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi/ Indikator	Base line 2025	Target 2045
1	Sasaran 1: Peningkatan pendapatan/kapita			Sasaran 1: Peningkatan pendapatan/kapita		
1.1	1. PDRB per kapita (Rp Juta)	76,58-77,35	422,16-497,92	1. PDRB per kapita (Rp Juta)	177,48	788,08
1.2	2. Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	71,31	275,29	2. Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	101,40	335,40
1.3	3. Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	12,95-13,05	18,62-19,92	3. Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	19,29	27,15
2	Sasaran 2: Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan			Sasaran 2: Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan		
2.1	4. Tingkat Kemiskinan (%)	7,30-7,89	0,19-0,69	4. Tingkat Kemiskinan (%)	3,93	1,57
2.2	5. Rasio gini (Indeks)	0,371-0,376	0,309-0,332	5. Rasio gini (Indeks)	0,383	0,343
2.3	6. Kontribusi PDRB Provinsi (%)	3,21	3,23	6. Kontribusi PDRB Kota (%)	34,75	33,31
2.3	7. Pertumbuhan Ekonomi	5,50-6,30	6,90-8,94	7. Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,90	7,25
3	Sasaran 3: Meningkatnya daya saing daerah			Sasaran 3: Peningkatan daya saing daerah		
3.1	8. Indeks Inovasi Daerah	54-55	75-80	8. Indeks Inovasi Daerah	72,41	95,00
3.2	9. Indeks Daya Saing Daerah	3,45	4,00	9. Indeks Daya Saing Daerah	3,94	4,49
				10. Indeks Kota Toleran	4,9	6,5

4	Sasaran 4: Peningkatan daya saing sumber daya manusia			Sasaran 4: Peningkatan daya saing sumber daya manusia		
4.1	10. Indeks Modal Manusia	0,52	0,69	11. Indeks Modal Manusia	0,76	0,94
				12. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	85,54	89,92
5	Sasaran 5: Penurunan emisi GRK menuju <i>net zero emission</i>			Sasaran 5: Penurunan emisi GRK menuju <i>net zero emission</i>		
5.1	11. Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	37,00	89,74	13. Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	32,46	87,02
5.2	12. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	77,6	84,75	14. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	66.16	70.40

Untuk menjamin tercapainya target Sasaran Visi pada setiap tahapan lima tahunan, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.4
Target Sasaran Visi Kota Makassar Per-Tahapan

No	RPJPD Kota Makassar 2025-2045					Tahap 1 2029	Tahap 2 2034	Tahap 3 2039	Tahap 4 2045
	Sasaran Visi	Indikator	Capaian 2023	Baseline 2025	Target 2045				
1	Peningkatan pendapatan / kapita	1. PDRB per kapita (Rp Juta)	155,95	177,48	788,08	341,78	487,25	627,92	788,08
		2. Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	78,00	101,40	335,40	148,20	206,70	265,20	335,40
		3. Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	18,83	19,29	27,15	21,11	23,46	25,24	27,15
2	Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan	4. Tingkat Kemiskinan (%)	5,07	3,93	1,57	3,34	2,75	2,16	1,57
		5. Rasio gini (Indeks)	0,387	0,383	0,375	0,365	0,365	0,355	0,343

		6. Kontribusi PDRB Kab/Kota (%)	34,77	34,75	33,31	34,24	33,78	33,53	33,31
		7. Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,31	5,90	7,25	6,06	6,67	7,16	7,25
3	Peningkatan daya saing daerah	8. Indeks Inovasi Daerah	70,15	72,41	76,93	82,58	88,22	95,00	95,00
		9. Indeks Daya Saing Daerah	3,91	3,94	4,49	4,08	4,21	4,35	4,49
		10. Indeks Kota Toleran	4,8	4,9	6,5	5,3	5,7	6,1	6,5
4	Peningkatan daya saing sumber daya manusia	11. Indeks Modal Manusia	0,74	0,76	0,94	0,80	0,84	0,89	0,94
		12. Indeks Pembangunan Manusia	83,52	85,54	89,92	86,80	88,05	89,05	89,92
5	Penurunan emisi GRK menuju <i>net zero emission</i>	13. Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	N.A	32,46	87,02	44,60	55,96	74,32	87,02
		14. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	65,74	66,16	70,40	67,01	68,07	69,13	70,40

4.2. Misi

Visi pembangunan jangka panjang kemudian dirumuskan ke dalam misi, dengan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan berbagai agenda pembangunan untuk mencapai sasaran pokok yang ingin dicapai Kota Makassar dalam jangka waktu 5 (lima) tahun atau pentahapan per periode RPJMD, Bertolak dari permasalahan dan isu strategis pembangunan kota Makassar yang telah dijelaskan sebelumnya, secara umum dapat dijelaskan masalah pokok guna perumusan misi RPJPD adalah berkaitan dengan upaya-upaya tersebut bersifat transformatif agar Kota Makassar dapat berkontribusi signifikan terhadap Visi Indonesia Emas 2045,

Berdasarkan visi, permasalahan pembangunan dan isu strategi, rumusan Misi RPJPD Kota Makassar tahun 2025-2045 adalah:

1. Mewujudkan Transformasi Sosial

Transformasi Sosial ditujukan untuk melahirkan manusia Makassar yang unggul, Manusia unggul diperlukan agar Kota Makassar memiliki modal manusia dengan kualitas yang tinggi dan dapat bersaing pada tingkat global, baik sebagai pelaku pembangunan maupun sebagai penerima manfaat dari pembangunan, dibalik terkondisikannya bonus demografi, Misi ini mencakup upaya umum dalam mewujudkan derajat kesehatan

yang . . .

yang tinggi untuk semua, pendidikan yang berkualitas dan merata, serta perlindungan sosial yang adaptif untuk standar hidup setara negara maju,

2. **Mewujudkan Transformasi Ekonomi**

Transformasi ekonomi ditujukan untuk menggiatkan beragam aktivitas perekonomian yang memiliki nilai tambah tinggi melalui penerapan Iptekin dan etos kerja yang kuat sehingga produktivitas daerah dapat diperbesar. Penerapan Iptekin tersebut diorientasikan untuk mendorong pertumbuhan sektor-sektor kontributor utama PDRB seperti jasa dan perdagangan dan penerapan ekonomi hijau serta pengembangan industri berbasis usaha mikro, kecil dan menengah baik pada industri pengolahan/manufaktur maupun pada industri ekstraktif, termasuk dalam pemanfaatan dan pemeliharaan potensi ekonomi biru. Di balik penerapan Iptekin dalam memperbesar produktivitas perekonomian, prinsip ekonomi hijau dan biru dijadikan landasan dalam mengatasi eksternalitas lingkungan dari pertumbuhan ekonomi

3. **Mewujudkan Transformasi Tata Kelola**

Transformasi tata kelola ditujukan untuk mewujudkan pemerintahan dan birokrasi yang bersih, efektif, ramah, dan cepat. yang baik, untuk itu akan didorong penerapan prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, transparansi, partisipasi dan kepatuhan kepada hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan dan dalam pelayanan publik kepada masyarakat. Misi ini terutama mencakup upaya umum penguatan terwujudnya Transformasi Digital dan Tata Kelola Yang Berintegritas dan Adaptif, berbasis elektronik dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

4. **Memantapkan Ketentraman dan Ketertiban Umum Yang Tangguh, dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah**

Misi ini merupakan landasan bagi penyelenggaraan transformasi pada tiga misi sebelumnya, yang mencakup upaya umum dalam mewujudkan dan memelihara serta meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum yang tangguh, dalam meningkatkan ketaatan hukum, ketertiban dan keamanan tangguh serta demokrasi substansial, dan meningkatkan stabilitas ekonomi makro daerah,

5. **Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi**

Misi ini juga merupakan landasan bagi penyelenggaraan transformasi pada tiga misi sebelumnya, dengan memperkuat ketangguhan individu, keluarga, komunitas, masyarakat, pembangunan karakter, dan lingkungan yang mampu menyeimbangkan hubungan timbal balik antara sosial budaya dan ekologis, serta mengoptimalkan modal sosial budaya dalam pengelolaan risiko bencana dan iklim, menjaga keberlanjutan sumber daya alam, serta tahan menghadapi berbagai bencana, perubahan dan guncangan. Misi ini yang mencakup upaya umum dalam beragama maslahat dan berkebudayaan maju, keluarga berkualitas, kesetaraan gender dan masyarakat inklusif. Selain itu, misi ini juga mencakup upaya umum dalam memelihara ketahanan ekologi secara timbal-balik dengan ketahanan sosial budaya, terutama dalam kapasitas berketahanan energi, air dan pangan,

6. **Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan Yang Merata dan Berkeadilan**

Misi ini merupakan kerangka implementasi dari tiga transformasi yang didorong, Misi ini mencakup upaya umum dalam mewujudkan Kota Makassar sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, guna menjadikan makassar kota maju, inklusif dan berkelanjutan, Misi ini juga mencakup upaya umum dalam mendorong kemajuan daerah sebagai kontributor terhadap PDRB Nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan, serta dengan layanan infrastruktur dengan tingkat kemantapan yang tinggi,

7. Mewujudkan . . .

7. Mewujudkan Sarana dan Prasarana Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan

Misi ini merupakan kerangka implementasi dari tiga transformasi, dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan menjadi faktor kunci pengembangan wilayah sekaligus sebagai pilar pendukung agenda transformasi. Misi ini mencakup upaya umum guna keberlanjutan kota yang didukung ketahanan terhadap bencana dan risiko perubahan iklim, Misi ini juga memastikan bahwa sarana prasarana yang dibangun memenuhi standar kualitas dan ramah lingkungan sehingga bisa lebih mendukung dalam terwujudnya transformasi Kota Makassar,

8. Meningkatkan Daya Saing Daerah Untuk Kestinambungan Pembangunan

Misi ini merupakan kerangka implementasi yang terakhir, bahwa transformasi Kota Makassar terstruktur dalam suatu kesinambungan pembangunan dari satu tahapan ke tahapan berikutnya, Misi ini terutama mencakup upaya umum dalam mendorong daya saing daerah serta perencanaan pembangunan yang berkualitas demi terjaganya kesinambungan transformasi tersebut,

Sesuai kaidah pelaksanaan RPJPN, bahwa sinkronisasi RPJPN kedalam RPJPD dilakukan melalui penjabaran 8 (delapan) misi (agenda) pembangunan, berikut 20 (dua puluh) upaya transformatif yang telah ditetapkan di dalam RPJPN merupakan bagian muatan utama yang harus masuk di dalam RPJPD, Sesuai Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: 600,1/176/SJ dan Nomor: 1 Tahun 2024, tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, RPJPD Kabupaten/Kota wajib diselaraskan dengan RPJPD Provinsi, Penyelarasan Misi (Agenda) RPJPN, Misi RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan dengan Misi RPJPD Kota Makassar dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.5

Penyelarasan Misi (Agenda) RPJPN, Misi RPJPD Provinsi Sulawesi-Selatan 2025-2045 dan Misi RPJPD Kota Makassar 2025-2045

No	RPJPN 2025-2045		Misi RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan 2025-2045	Misi RPJPD Kota Makassar 2025-2045	Misi
	Kelompok Agenda	Agenda/Misi			
1	Transformasi Indonesia	Transformasi sosial	Mewujudkan Transformasi Sosial	Mewujudkan Transformasi Sosial	M.1
2		Transformasi ekonomi	Mewujudkan transformasi ekonomi	Mewujudkan Transformasi Ekonomi	M.2
3		Transformasi tata kelola	Mewujudkan transformasi tata kelola	Mewujudkan Transformasi Tata Kelola	M.3
4	Landasan Transformasi	Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia	Memantapkan keamanan daerah, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro	Memantapkan Ketentraman dan Ketertiban Umum Yang Tangguh, dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	M.4
5		Ketahanan sosial budaya dan ekologi	Memelihara ketahanan sosial budaya dan ekologi	Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	M.5
6	Kerangka Implementasi Transformasi	Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan	Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan	Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan Yang Merata dan Berkeadilan	M.6
7		Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	Mewujudkan pemenuhan sarana prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	Mewujudkan Sarana dan Prasarana Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	M.7
8		Kesinambungan pembangunan	Mendorong daya saing daerah untuk kesinambungan pembangunan	Meningkatkan Daya Saing Daerah Untuk Kesinambungan Pembangunan	M.8

BAB V

ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

*“Indicators are a way of seeing the big picture by looking at a small piece of it”
(The Jacksonville Community Council)*

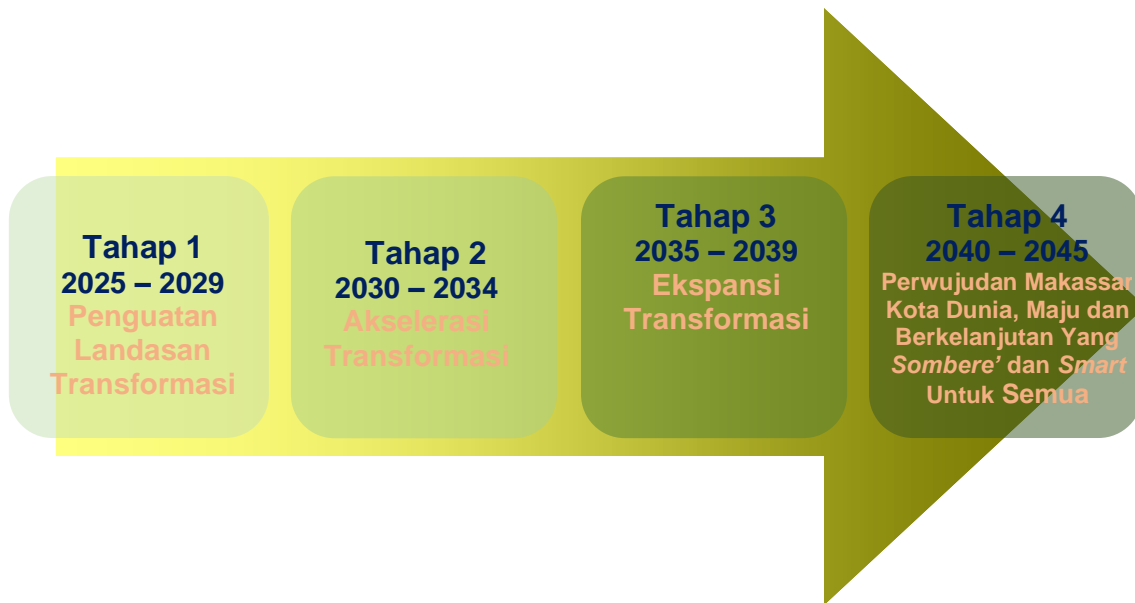
5.1. Arah Kebijakan

Dalam periode dua puluh tahun kedepan, dunia umumnya dan Indonesia khususnya, akan menghadapi perubahan yang jauh lebih cepat daripada yang pernah dialami sebelumnya, terutama dipicu oleh tren global seperti revolusi teknologi, perubahan demografi, perubahan iklim, serta dinamika geopolitik dan geoekonomi. Perubahan ini mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk sosial dan budaya, ekonomi, serta menuntut adaptasi dan inovasi yang cepat dari individu, masyarakat, dan Pemerintah Daerah untuk menghadapi tantangan serta memanfaatkan peluang yang muncul. Dalam upaya mencapai pembangunan yang terintegrasi antara nasional dan daerah yang sinergis, telah dirumuskan tiga pilar utama transformasi, yaitu transformasi sosial bertujuan untuk memperkuat kualitas hidup masyarakat Kota Makassar melalui akses yang lebih baik terhadap pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial fokusnya adalah pada kesehatan untuk semua, pendidikan berkualitas yang merata, serta perlindungan sosial yang adaptif, sementara transformasi ekonomi bertujuan memelihara konsistensi pertumbuhan ekonomi tinggi dan pendapatan per kapita Kota Makassar setara dengan negara maju, berkelanjutan dan inklusif yang mencakup upaya untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing. Ini termasuk penerapan teknologi, inovasi, dan pengembangan ekonomi hijau, serta integrasi ekonomi domestik dan global. Transformasi tata kelola melibatkan perbaikan dalam sistem dan mekanisme pemerintahan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan efektif. Ini mencakup peningkatan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah serta penegakan hukum yang kuat. Transformasi ini diperkuat oleh dua fondasi utama, yaitu keamanan wilayah yang tangguh, demokrasi yang substansial, stabilitas ekonomi makro daerah, ketahanan sosial, dan budaya, serta ekologi yang kokoh.

Landasan transformasi yang terdiri dari keamanan daerah tangguh menciptakan lingkungan yang aman dan stabil untuk mendukung kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat., demokrasi substansial memastikan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kebijakan yang diambil mencerminkan kebutuhan dan aspirasi rakyat, dan stabilitas ekonomi makro daerah mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan mengurangi risiko krisis ekonomi yang dapat mengganggu pembangunan bertujuan untuk menjamin keberhasilan transformasi secara menyeluruh. Hal ini dilakukan melalui penciptaan stabilitas ekonomi makro, keamanan dan ketertiban masyarakat, serta pengembangan demokrasi substansial di Kota Makassar.

Kerangka implementasi transformasi Kota Makassar memerlukan kerangka pelaksanaan yang solid, yang meliputi pembangunan berbasis masyarakat yang didukung oleh penyediaan sarana dan prasarana berkualitas secara bertahap. Oleh karena itu, penting untuk menjaga kesinambungan pembangunan agar setiap tahap dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Transformasi Kota Makassar hingga tahun 2045 dibagi dalam empat tahapan yang disajikan pada gambar berikut:

Gambar 5.1
Pentahapan Arah Kebijakan RPJPD Kota Makassar 2025-2045



Arah kebijakan yang disusun dengan kerangka kerja pembangunan per 5 (lima) tahun dalam rangka pencapaian visi daerah. Pentahapan per lima tahun mengacu pada tahap dan tematik pembangunan dalam RPJP Nasional Tahun 2025- 2045 yang disesuaikan dengan karakteristik daerah Kota Makassar. Selanjutnya Arah Kebijakan RPJPD dijabarkan secara rinci berdasarkan Misi dan diformulasikan menurut tahapan lima tahunan pembangunan daerah Kota Makassar sebagai berikut

5.1.1. Arah Kebijakan Periode 2025-2029

Pada periode awal pembangunan jangka panjang Kota Makassar, fokus utama adalah kebijakan "**Konsolidasi Penguatan Landasan Transformasi**" Tahap pertama ini bertujuan untuk memperkuat dasar-dasar transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola. Selain itu, ada penekanan pada penguatan ketahanan sosial budaya dan ekologi, keamanan daerah, demokrasi yang substansial, serta stabilitas ekonomi makro di wilayah Kota Makassar. Penguatan landasan transformasi ini didukung oleh pelaksanaan pembangunan yang merata di berbagai wilayah, termasuk pemenuhan sarana dan prasarana, serta peningkatan pembiayaan untuk pembangunan.

Transformasi Sosial diarahkan pada pembudayaan perilaku hidup sehat dan terpenuhinya pelayanan dasar kesehatan sehingga setiap individu memiliki akses yang mudah dan terjangkau terhadap layanan kesehatan yang dibutuhkan mulai dari pencegahan penyakit hingga pengobatan. Percepatan eliminasi penyakit merupakan upaya untuk menghilangkan atau mengurangi jumlah kasus penyakit tertentu sementara penerapan kebijakan promotif preventif merupakan kebijakan yang lebih fokus pada pencegahan penyakit daripada pengobatan, perkuatan sistem surveilans kesehatan adalah upaya memperkuat sistem pemantauan kesehatan untuk mendeteksi dini munculnya penyakit baru atau peningkatan kasus penyakit yang sudah ada serta pemenuhan akses pelayanan kesehatan berkualitas dan inklusif diberikan memenuhi standar yang telah ditetapkan dan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Tahap ini juga diarahkan pada penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas, inklusif, terintegrasi, berbasis teknologi informasi dan komunikasi serta sistem pendidikan maupun peningkatan kualitas tenaga pendidik upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan baik dari segi kurikulum, sarana prasarana, maupun tenaga pendidik, serta penguatan kebijakan dan akurasi data layanan perlindungan

sosial dalam menyempurnakan kebijakan perlindungan sosial dan memastikan data penerima manfaat akurat sehingga bantuan sosial tepat sasaran.

Transformasi Ekonomi diarahkan pada perluasan sektor industri yang ramah lingkungan merupakan upaya mendorong industri untuk mengadopsi teknologi dan proses produksi yang lebih ramah lingkungan, mengurangi limbah, dan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Sektor pariwisata yang mendukung pelestarian keanekaragaman hayati darat dan perairan adalah pariwisata yang tidak sekadar mengeksploitasi sumber daya alam, tetapi juga memberikan kontribusi pada upaya menjaga dan melindungi keanekaragaman hayati baik di darat maupun di laut. Penyediaan barang dan jasa serta badan usaha dengan meningkatkan daya saing melalui inovasi, penerapan teknologi terbaru dan peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk meningkatkan daya saing di pasar global. Penguatan landasan kebijakan penerapan ekonomi sirkular dalam mendukung industri pariwisata yang berkelanjutan dengan mengutamakan pelestarian lingkungan dan sumber daya alam. Selanjutnya peningkatan kapasitas angkatan kerja dengan memberikan keterampilan dan pengetahuan tenaga kerja agar lebih produktif dan mampu bersaing di pasar kerja serta partisipasi aktif perempuan dan kelompok marjinal dalam angkatan kerja dengan memberi kesempatan yang sama bagi perempuan dan kelompok marjinal untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi.

Transformasi Tata Kelola diarahkan pada peningkatan sistem tata kelola pemerintahan yang transparan melalui pembaharuan tata kelola pemerintahan yang bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), dengan mengacu pada prinsip-prinsip kejujuran, akuntabilitas, dan keadilan yang berorientasi pada pelayanan berkualitas dan responsif terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat untuk menciptakan lingkungan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien. Penguatan juga diarahkan pada penuntasan infrastruktur yang andal dan menjangkau seluruh wilayah termasuk kepulauan. Penguatan literasi digital didukung oleh keamanan informasi dan peningkatan digital skill sumber daya manusia merupakan upaya peningkatan kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi digital dan menjaga keamanan data pribadi dan informasi penting lainnya. Mengintensifkan kualitas SDM Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terbaik dengan tujuan dapat memberikan pelayanan publik yang prima, mendorong efisiensi dan efektivitas pemerintahan, serta mendukung inovasi dan kreativitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Memantapkan Ketentraman dan Ketertiban Umum Yang Tangguh, Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah diarahkan pada penguatan kapasitas ketentraman dan ketertiban agar dapat meningkatkan kemampuan lembaga keamanan dalam menjaga ketertiban masyarakat. Ini mencakup pencegahan tindak kejahatan, penanganan konflik, dan pemeliharaan situasi yang kondusif. Partisipasi aktif masyarakat dalam ruang publik yang sehat dengan mendorong masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam berbagai kegiatan di ruang publik, di mana semua pihak dapat berinteraksi secara terbuka dan demokratis, sementara jaminan kebebasan sipil dan kesetaraan untuk menjamin hak-hak dasar setiap warga negara. Selain itu, juga menjamin bahwa semua warga negara diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Mengoptimalkan transformasi tata kelola yang akuntabel, memperkuat pendidikan politik berbasis nilai-nilai luhur. Pada tahap ini juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif sebagai pondasi stabilitas ekonomi menjadi landasan kokoh bagi pembangunan untuk menarik minat investor menuju kemandirian fiskal daerah.

Ketahanan sosial budaya dan ekologi diarahkan pada optimalisasi perlindungan sosial melalui pemenuhan hak dan perlindungan sosial secara inklusif dengan memastikan semua warga negara terutama kelompok rentan mendapatkan akses terhadap layanan sosial dasar : kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial lainnya dengan tujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat termasuk kelompok minoritas, penyandang disabilitas, dan masyarakat miskin. Pada tahap ini dilakukan penguatan ketangguhan masyarakat melalui pendidikan keagamaan dan penguatan budaya serta kearifan lokal sejak dini untuk membentuk karakter individu yang baik, memperkuat nilai-nilai sosial, dan melestarikan budaya serta kearifan lokal. peningkatan kualitas layanan persampahan, air bersih dan sanitasi untuk menjaga kesehatan masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan. Perluasan integrasi dan kualitas perencanaan dan pembangunan berwawasan lingkungan melalui penguatan manajemen mitigasi bencana mencakup struktural (fisik) dan non struktural (masyarakat) dalam upaya untuk mengurangi risiko bencana sekaligus mengakselerasi pencapaian pembangunan rendah karbon dan pembangunan berketahanan iklim; peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan pengelolaan tanggap dan respon bencana dengan meningkatkan kemampuan pemerintah dan masyarakat dalam merespon dan mengatasi bencana. Pengembangan sistem pangan yang berkelanjutan dengan menciptakan model produksi dan konsumsi makanan bergizi serta mengintegrasikan praktik pertanian ramah lingkungan, teknologi inovatif, dan kebijakan yang mendukung ketahanan pangan dan pengurangan dampak perubahan iklim.

Pembangunan kewilayahan yang didukung sarana prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan diarahkan pada upaya untuk memperkuat kerjasama dan koordinasi yang efektif antar daerah dan penguatan Kebijakan melalui Penuntasan Perkada RTRW dan RDTR, untuk mendukung pengendalian dan penegakan hukum serta implementasi pembangunan sesuai pemanfaatan ruang yang ditetapkan. Penguatan juga diarahkan dalam pembangunan infrastruktur perkotaan secara merata dan inklusif, pengintegrasian pengembangan wilayah termasuk wilayah kecamatan kepulauan, lintas wilayah serta lintas kewenangan untuk memperkuat kedudukan dan peran Kota Makassar melalui peningkatan aksesibilitas, terhadap kawasan sekitar, regional sulawesi dan kawasan ibukota nusantara. Tahapan ini juga diarahkan pada pemanfaatan teknologi dalam peningkatan kualitas penyediaan sarana dan prasarana (energi, air bersih dan sanitasi, rumah layak huni dan transportasi perkotaan) secara merata dan inklusif, pemenuhan ketersediaan pangan; penguatan landasan dan implementasi awal transportasi cerdas dan rendah karbon; pemerataan pembangunan infrastruktur dasar dan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan tanggap bencana.

Kesinambungan Pembangunan diarahkan pada optimalisasi kapasitas fiskal daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien dengan mengelola anggaran secara efisien, mengembangkan sumber pendapatan baru, dan memperkuat infrastruktur keuangan, pemerintah daerah dapat meningkatkan fleksibilitas dalam merespons dinamika ekonomi dan sosial. Penerapan bauran pendanaan yang inovatif, seperti kemitraan publik-swasta dan pendanaan berkelanjutan, tidak hanya memperluas akses terhadap sumber daya keuangan, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui pendekatan yang komprehensif ini, pemerintah daerah dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi, inovasi, dan pembangunan berkelanjutan.

5.1.2. Arah Kebijakan Periode 2030-2034

Pada periode kedua pembangunan jangka panjang Kota Makassar, fokus kebijakan adalah **“Akselerasi Transformasi.”** Tahap ini melibatkan percepatan proses transformasi dalam aspek sosial, ekonomi, dan tata kelola, serta mempercepat penguatan ketahanan sosial budaya dan ekologi. Selain itu, upaya ini juga mencakup penguatan keamanan daerah, demokrasi yang substansial, dan stabilitas ekonomi makro di Kota Makassar. Akselerasi transformasi ini didukung oleh pelaksanaan pembangunan yang merata di seluruh wilayah, termasuk penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, serta penguatan pembiayaan untuk pembangunan.

Transformasi Sosial diarahkan pada akselerasi penyelenggaraan pendidikan yang adaptif terhadap integrasi ilmu pengetahuan dan teknologi serta perluasan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja, pembudayaan pola hidup sehat dan percepatan pelayanan kesehatan secara holistik termasuk pemenuhan sarana dan prasarana yang mendukung pola hidup sehat, percepatan eliminasi penyakit, pengelolaan kesehatan yang berfokus pada pencegahan penyakit, dan kemudahan akses masyarakat terhadap perlindungan sosial secara transparan dan akuntabilitas.

Transformasi Ekonomi diarahkan optimalisasi peningkatan daya saing badan usaha melalui inovasi, pengembangan industri kreatif dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berbasis riset ilmiah; peningkatan partisipasi upskilling tenaga kerja di era digital dalam berbagai sektor ekonomi dan penerapan ekonomi sirkular dengan menciptakan sistem ekonomi berkelanjutan yang ramah lingkungan dengan optimalisasi penggunaan sumber daya; percepatan pembangunan sektor pariwisata berbasis ekologi melalui penguatan kebijakan dan regulasi serta konservasi alam dan budaya.

Transformasi Tata Kelola diarahkan pada akselerasi sistem tata kelola pemerintahan yang transparan melalui pembaharuan dan penguatan tata kelola pemerintahan yang bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), memperkuat integritas dan profesionalisme aparatur sipil negara dengan membangun budaya pemerintah yang etis dan responsif, percepatan penerapan sistem pemerintahan dan pelayanan publik berbasis elektronik (*e-government*) melalui penguatan infrastruktur TIK, pengembangan sistem informasi, keterlibatan masyarakat sipil dan swasta. Memaksimalkan kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara yang primer dalam memberikan kontribusi yang optimal bagi pembangunan.

Memantapkan Ketentraman dan Ketertiban Umum Yang Tangguh, Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah diarahkan pada pemantapan kapasitas keamanan, ketertiban, dan ketentraman masyarakat merupakan upaya sistematis untuk meningkatkan kemampuan seluruh komponen masyarakat, termasuk pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat sipil dalam menciptakan kondisi yang aman, nyaman, dan kondusif bagi seluruh warga; Partisipasi aktif masyarakat dalam ruang publik yang sehat dengan mendorong masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam berbagai kegiatan di ruang publik, di mana semua pihak dapat berinteraksi secara terbuka dan demokratis, sementara jaminan kebebasan sipil dan kesetaraan untuk menjamin hak-hak dasar setiap warga negara. Memastikan setiap warga mendapatkan perlakuan yang adil dan setara di depan hukum tanpa diskriminasi. Stabilitas ekonomi, yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang konsisten, inflasi yang terkelola dengan baik, dan tingkat pengangguran yang rendah, menjadi fondasi yang kuat untuk pembangunan yang berkelanjutan. Meningkatkan partisipasi masyarakat dengan menciptakan ruang publik yang bersih dan aman yang memenuhi kebutuhan masyarakat serta mendukung inklusivitas, keberlanjutan, dan keterlibatan aktif; menegakkan prinsip-prinsip kebebasan, kesetaraan, dan keadilan sosial

untuk membangun masyarakat yang demokratis dan bermartabat; serta membangun iklim investasi yang kondusif untuk mendorong inovasi, meningkatkan kesejahteraan, dan mengurangi ketimpangan, di mana stabilitas ekonomi berfungsi sebagai penggerak utama untuk pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Ketahanan sosial budaya dan ekologi diarahkan pada memperkokoh pelestarian dan perlindungan budaya melalui pendidikan budaya kepada masyarakat, terutama generasi muda; pengembangan kemampuan keluarga dan komunitas dalam membangun, memaknai, dan menjalani kehidupan berdasarkan nilai-nilai religius, budaya, dan lingkungan; percepatan pembentukan ketangguhan masyarakat secara inklusif melibatkan peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana serta percepatan pembangunan infrastruktur rendah karbon yang tahan gempa dengan pemanfaatan teknologi berbasis kesiapsiagaan bencana; memaksimalkan potensi Energi Baru Terbarukan (EBT). Memperkokoh sistem pangan berkelanjutan dengan mengintegrasikan praktik pertanian ramah lingkungan dan teknologi inovatif dengan cara mengelola sumber daya secara bijaksana, mengurangi dampak lingkungan, memanfaatkan teknologi cerdas, serta meningkatkan akses dan distribusi pangan yang melibatkan partisipasi semua pihak dan melakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitas dan adaptasi terhadap perubahan kondisi.

Pembangunan kewilayahan yang didukung sarana prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan diarahkan pada penataan kawasan cepat tumbuh melalui pengendalian pemanfaatan ruang secara bijaksana untuk mendukung pengembangan seluruh wilayah darat dan kepulauan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dalam menjaga keseimbangan ekologis dan keberlanjutan; percepatan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas serta pengembangan sistem transportasi yang efisien yang mendukung peningkatan konektivitas antarmoda secara menyeluruh, termasuk integrasi yang harmonis antara bandara, kereta api, pelabuhan, dan angkutan barang, guna menciptakan jaringan transportasi yang terpadu dan memperkuat aliran logistik serta mobilitas..

Tahap ini juga diarahkan pada pemantapan implementasi transportasi massal yang komprehensif dan berkualitas serta penerapan teknologi dan digitalisasi dalam pengelolaan jaringan infrastruktur perkotaan, dengan sistem transportasi yang efisien dan terintegrasi secara luas, serta meningkatkan pengelolaan dan pemantauan infrastruktur kota dengan cara yang lebih modern dan responsif. Sistem pangan yang berkelanjutan melalui peningkatan produksi, distribusi dan konsumsi pangan dengan mengutamakan keseimbangan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.

Kesinambungan pembangunan diarahkan pada pengembangan kapasitas fiskal daerah melalui diversifikasi sumber pendanaan dari sektor publik melalui pajak, retribusi dan pendapatan asli daerah lainnya dan swasta melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), kemudahan perizinan serta peningkatan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan, yang terintegrasi dan *real time* dan meningkatkan transparansi merupakan kunci untuk meningkatkan daya saing daerah. Dengan mengimplementasikan bauran pendanaan yang inovatif dan responsif terhadap perubahan ekonomi, pemerintah daerah dapat memastikan keberlanjutan pembangunan, memperbaiki kualitas layanan publik, dan menarik investasi, sehingga mampu bersaing baik di tingkat nasional maupun internasional.

5.1.3. Arah Kebijakan Periode 2035-2039

Periode ketiga dari pembangunan jangka panjang Kota Makassar bertujuan untuk melaksanakan kebijakan "**Perluasan Transformasi**". Pada

tahap . . .

tahap ini, fokus utama adalah memperluas transformasi di bidang sosial, ekonomi, dan tata kelola, serta memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi. Selain itu, upaya ini juga mencakup penguatan keamanan daerah, peningkatan demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro. Pelaksanaan perluasan transformasi didukung oleh pembangunan wilayah yang merata melalui penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, serta penguatan pembiayaan pembangunan.

Transformasi Sosial diarahkan memperluas pelayanan kesehatan berkualitas untuk semua lapisan masyarakat melalui komitmen yang kuat dari pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan; menyediakan sarana dan prasarana pendukung pola hidup sehat mencakup berbagai fasilitas dan infrastruktur yang dapat memudahkan masyarakat untuk menjalani gaya hidup sehat, serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui penguatan kelembagaan, pengembangan kewirausahaan, dan kemitraan multisektor guna menciptakan sistem yang mandiri, inovatif, produktif, dan tangguh dalam menghadapi dinamika perubahan.

Transformasi Ekonomi diarahkan pada pemantapan pertumbuhan ekonomi melalui stabilisasi penerapan ekonomi sirkular untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya dan pengurangan limbah; pemantapan daya saing sektor unggulan yang berbasis industri kreatif, serta pemantapan pariwisata berkelanjutan dengan pengembangan community based tourism melalui pemetaan, analisis komunitas dan dukungan kebijakan untuk keberlanjutan destinasi pariwisata.

Transformasi Tata Kelola diarahkan pada optimalisasi keterbukaan informasi pemerintahan, pemberantasan korupsi, penerapan akuntabilitas, penegakan keadilan, peningkatan pelayanan publik, serta efektivitas penggunaan sumber daya, Optimalisasi kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara (ASN) yang unggul mampu memberikan pelayanan publik yang terbaik, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan, serta mendorong inovasi dan kreativitas dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.

Memantapkan Ketentraman dan Ketertiban Umum Yang Tangguh, Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah diarahkan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban, bersama dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam ruang publik, bertujuan menciptakan kondisi yang aman, nyaman, dan inklusif, serta menjamin kebebasan sipil dan kesetaraan hak. Stabilitas ekonomi yang solid, dengan pertumbuhan yang konsisten, inflasi yang terkelola, dan tingkat pengangguran yang rendah. Penataan ruang publik yang bersih dan inklusif serta penegakan keadilan sosial yang konsisten mendukung terbentuknya masyarakat demokratis. Hal ini menciptakan iklim investasi yang inovatif, mengurangi ketimpangan, dan memperkuat perekonomian secara menyeluruh, menuju transformasi sosial dan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Ketahanan sosial budaya dan ekologi diarahkan dengan memperkokoh pelestarian budaya melalui pendidikan masyarakat dan menguatkan ketangguhan keluarga religius serta beradab di tengah dinamika global. Percepatan pembentukan ketangguhan masyarakat secara inklusif mencakup peningkatan kapasitas menghadapi bencana dan pembangunan infrastruktur rendah karbon yang tahan gempa, dengan memanfaatkan teknologi berbasis kesiapsiagaan bencana dan adaptif terhadap perubahan. Memperkuat sistem pangan berkelanjutan dengan mengintegrasikan praktik urban farming ramah lingkungan dan teknologi inovatif melalui pengelolaan sumber daya yang bijaksana, pengurangan dampak lingkungan, optimalisasi potensi Energi Baru

Terbarukan (EBT) penggunaan teknologi cerdas, serta peningkatan akses dan distribusi pangan yang melibatkan semua pihak.

Pembangunan kewilayahan yang didukung sarana prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan diarahkan pada pengembangan simpul transportasi dan antar moda transportasi untuk konektivitas pendukung perekonomian termasuk wilayah kepulauan, antar kawasan, dan antar wilayah untuk mengurangi waktu tempuh, biaya logistik dan meningkatkan efisiensi dalam mobilitas barang dan orang; pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan pertumbuhan baru untuk mencegah dampak negatif terhadap lingkungan dan kualitas hidup dan penuntasan pengendalian pemanfaatan ruang pada permukiman ilegal baik wilayah darat maupun pesisir. Pada tahap ini juga pada pemantapan implementasi transportasi massal, peningkatan kualitas dan penerapan teknologi dan digitalisasi dalam pengelolaan jaringan infrastruktur perkotaan, dan percepatan pemerataan pembangunan infrastruktur terintegrasi dan tanggap bencana dan sistem pangan yang berkelanjutan.

Kesinambungan Pembangunan pemantapan kapasitas fiskal untuk memperkuat keuangan daerah dan mendukung pembangunan berkelanjutan melalui diversifikasi sumber pendanaan dari sektor publik dan swasta, peningkatan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan dengan regulasi yang dinamis disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan daerah, serta penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan kualitas layanan publik, menarik investasi, dan memperkuat otonomi daerah sehingga menjadi lebih mandiri dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Implementasi bauran pendanaan yang inovatif berbasis kinerja serta memperhatikan aspek keberlanjutan, akan semakin memperkuat fondasi pembangunan daerah yang berkelanjutan.

5.1.4. Arah Kebijakan Periode 2040-2045

Periode keempat dari pembangunan jangka panjang Kota Makassar diarahkan pada kebijakan **“Makassar Kota Dunia, Maju dan Berkelanjutan Yang Sombere’ dan Smart Untuk Semua”**. Tahap keempat ini dilakukan dengan perwujudan transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola yang efektif mencakup pencapaian ketahanan sosial budaya dan ekologi, stabilitas keamanan daerah, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro. Transformasi ini didorong oleh pelaksanaan pembangunan wilayah yang lebih merata, dengan pemenuhan sarana prasarana yang baik dan penguatan pembiayaan pembangunan yang terus meningkat.

Transformasi Sosial diarahkan untuk memperkokoh komitmen pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan terhadap pelayanan kesehatan berkualitas untuk semua lapisan masyarakat, menyediakan sarana dan prasarana pendukung pola hidup sehat, serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui penguatan kelembagaan, pengembangan kewirausahaan, dan kemitraan multisektor, sehingga terwujud manusia unggul dan berdaya saing dengan kesehatan prima, pendidikan berkualitas, dan perlindungan sosial yang terakses, dan menjadi kota yang sehat, cerdas, sejahtera, dan berdaya saing internasional dengan penguasaan tinggi dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni pada akhir tahun 2045.

Transformasi Ekonomi diarahkan pada memelihara konsistensi pertumbuhan ekonomi tinggi dan pendapatan per kapita Kota Makassar yang setara dengan negara maju dengan mendorong investasi domestik dan asing, inovasi produk, peningkatan SDM, stabilitas politik dan ekonomi, infrastruktur dan kebijakan pemerintah.

Transformasi Tata Kelola : diarahkan pada memantapkan tata kelola pemerintahan yang adaptif merespon perubahan lingkungan, sosial dan

teknologi . . .

teknologi dengan cepat dan tepat, berbasis digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi dan aksesibilitas layanan publik, berintegritas didasarkan nilai-nilai kejujuran, akuntabilitas dan profesionalisme dalam penyelenggaraan pemerintahan serta masyarakat sipil yang inovatif, produktif, dan bertanggung jawab.

Memantapkan Ketentraman dan Ketertiban Umum Yang Tangguh, Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah diarahkan pada mempertahankan Kota Makassar yang aman dan tertib dan berdaya saing tinggi bermitra dengan pemerintah pusat dan daerah lain untuk proyek strategis, inovasi dan teknologi baru, memastikan pencegahan korupsi dengan pengelolaan aset dan keuangan daerah yang transparan, serta mengembangkan masyarakat yang patuh hukum dengan aparat penegak hukum yang berintegritas dan berbasis hak asasi manusia, memperkuat demokrasi substansial dan pengelolaan fiskal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

Ketahanan sosial budaya dan ekologi diarahkan terwujudnya masyarakat religius dan berbudaya serta lingkungan perkotaan yang tangguh dengan pendekatan holistik yang meliputi penguatan komitmen religius dan kultural serta penerapan sistem adaptasi dan mitigasi terhadap bencana dan perubahan iklim. Peningkatan kesadaran nilai-nilai lokal memperkuat kohesi sosial, infrastruktur resilient dan strategi adaptasi, maupun risiko bencana dan perubahan iklim.

Pembangunan kewilayahan yang didukung sarana prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan diarahkan pada mempertahankan dan meningkatkan pembangunan kewilayahan dengan infrastruktur berkualitas yang terintegrasi guna mendukung konektivitas semakin luas dan perekonomian yang merata, inklusif berbasis digital dan berkeadilan. Pada tahap ini juga diarahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan perkotaan yang tangguh dengan sarana dan prasarana kota melalui pembangunan yang berkualitas dan ramah lingkungan serta memastikan semua lapisan masyarakat dapat menikmati manfaat pembangunan secara adil.

Kesinambungan Pembangunan diarahkan untuk kemandirian dan kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah, pengelolaan BUMD, dan pemanfaatan aset pemerintah kota dengan Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi untuk meningkatkan koordinasi antara instansi dan pemerintah pusat-daerah. Penerapan bauran pendanaan inovatif serta pengelolaan fiskal responsif untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah, dengan partisipasi publik aktif untuk memastikan transparansi dan daya saing

Tahapan arah kebijakan jangka panjang Kota Makassar Tahun 2025-2045, sebagaimana tergambar pada matriks berikut:

Tabel 5.1
Arah Kebijakan RPJPD Kota Makassar 2025-2045

Visi: Makassar Kota Dunia, Maju dan Berkelanjutan Yang Sombere' dan Smart Untuk Semua

Misi	Tahapan Arah Kebijakan			
	Tahapan I 2025-2029	Tahap II 2030-2034	Tahap III 2035-2039	Tahap IV 2040-2045
Misi 1: Mewujudkan Transformasi Sosial	Pembudayaan perilaku hidup sehat dan Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial melalui pemenuhan akses pelayanan kesehatan berkualitas dan inklusif, percepatan eliminasi penyakit dan penerapan kebijakan promotif preventif, perkuatan sistem surveilans kesehatan untuk memantau penyakit dan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas baik sistem pendidikan maupun peningkatan kualitas tenaga pendidik, serta penguatan kebijakan dan akurasi data layanan perlindungan sosial	Akselerasi penyelenggaraan pendidikan yang adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kebutuhan lapangan kerja, pembudayaan pola hidup sehat dan percepatan pelayanan kesehatan secara holistik termasuk pemenuhan sarana dan prasarana yang mendukung pola hidup sehat, percepatan eliminasi penyakit, pengelolaan kesehatan yang berfokus pada pencegahan penyakit, dan kemudahan akses masyarakat terhadap perlindungan sosial secara transparan dan akuntabilitas	Perluasan pelayanan kesehatan yang berkualitas untuk seluruh lapisan masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana pendukung pola hidup sehat, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang mandiri dan berkualitas. Selain itu, penguatan kelembagaan dan pengembangan kewirausahaan, bersama dengan kemitraan multisektor, akan mendorong keberhasilan dalam menciptakan sistem yang lebih mandiri, inovatif, produktif, dan tangguh dalam menghadapi dinamika perubahan.	Perwujudan manusia unggul dan berdaya saing dengan kesehatan prima, pendidikan berkualitas dan terakses perlindungan sosial

Misi 2: . . .

Misi	Tahapan Arah Kebijakan			
	Tahapan I 2025-2029	Tahap II 2030-2034	Tahap III 2035-2039	Tahap IV 2040-2045
Misi 2: Mewujudkan Transformasi Ekonomi	Perluasan sektor industri yang ramah lingkungan, sektor pariwisata yang mendukung pelestarian keanekaragaman hayati darat dan perairan, penyediaan barang dan jasa dan badan usaha dengan meningkatkan daya saing melalui inovasi, penerapan teknologi dan peningkatan kualitas SDM; penguatan landasan kebijakan penerapan ekonomi sirkular dalam mendukung industri pariwisata yang berkelanjutan; dan peningkatan kapasitas angkatan kerja serta partisipasi aktif perempuan dan kelompok marjinal dalam angkatan kerja.	Percepatan peningkatan daya saing badan usaha melalui inovasi, pengembangan industri kreatif dan penerapan iptek; peningkatan partisipasi angkatan kerja dan penerapan ekonomi sirkular percepatan pembangunan sektor pariwisata berbasis ekologi.	Pemantapan pertumbuhan ekonomi melalui stabilisasi penerapan ekonomi sirkular; pemantapan daya saing sektor unggulan yang berbasis industri kreatif dan inovatif dan iptek, serta pemantapan pariwisata berkelanjutan dengan pengembangan <i>community based tourism</i> .	Perwujudan pertumbuhan ekonomi tinggi dan pendapatan per kapita Kota Makassar yang setara dengan negara maju

Misi 3: . . .

Misi	Tahapan Arah Kebijakan			
	Tahapan I 2025-2029	Tahap II 2030-2034	Tahap III 2035-2039	Tahap IV 2040-2045
<p>Misi 3: Mewujudkan Transformasi Tata Kelola</p>	<p>Peningkatan sistem tata kelola pemerintahan yang transparan melalui pembaharuan tata kelola pemerintahan yang bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), dengan mengacu pada prinsip-prinsip kejujuran, akuntabilitas, dan keadilan yang berorientasi pada pelayanan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dengan menyediakan layanan yang berkualitas untuk menciptakan lingkungan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien. Penguatan diarahkan pada penuntasan infrastruktur yang andal dan menjangkau seluruh wilayah termasuk kepulauan serta penguatan literasi digital didukung keamanan informasi dan peningkatan digital skill SDM. Mengintensifkan kualitas SDM aparatur Sipil Negara (ASN) yang terbaik</p>	<p>Peningkatan akselerasi sistem tata kelola pemerintahan yang transparan melalui pembaharuan tata kelola pemerintahan yang bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), memperkuat integritas dan profesionalisme aparatur sipil negara, percepatan penerapan sistem pemerintahan dan pelayanan publik berbasis elektronik. Memaksimalkan kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara yang primer</p>	<p>Optimalisasi keterbukaan informasi pemerintahan, pemberantasan korupsi, penerapan akuntabilitas, penegakan keadilan, peningkatan pelayanan publik, serta efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya, Optimalisasi kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara (ASN) yang unggul</p>	<p>Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang adaptif, berbasis digitalisasi dan Berintegritas</p>

Misi	Tahapan Arah Kebijakan			
	Tahapan I 2025-2029	Tahap II 2030-2034	Tahap III 2035-2039	Tahap IV 2040-2045
<p>Misi 4: Memantapkan Ketentraman dan Ketertiban Umum Yang tangguh, dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah</p>	<p>Memperkuat keamanan dan ketertiban, diiringi partisipasi aktif masyarakat dalam ruang publik yang sehat bagi transformasi berkelanjutan. Jaminan atas kebebasan sipil dan kesetaraan kesetaraan memberikan ruang bagi setiap individu, serta stabilitas ekonomi menjadi landasan kokoh bagi pembangunan berkelanjutan. Pada tahap ini juga diarahkan pada pengembangan budaya hukum yang mengedepankan keseimbangan antara transformasi tata kelola dan akuntabilitas berbasis digital. Penguatan pendidikan politik berbasis nilai-nilai luhur yang memperkuat fondasi demokrasi dan partisipasi masyarakat. Stabilitas pertumbuhan ekonomi yang inklusif menarik minat investor menuju kemandirian fiskal</p>	<p>Pemantapan kapasitas keamanan, ketertiban, dan ketentraman masyarakat serta jaminan kebebasan dengan melibatkan pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat sipil. Pada tahap ini juga diarahkan akselerasi penguatan kelembagaan dan stabilitas ekonomi melalui peningkatan daya saing daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil, inflasi terkelola, dan pengangguran rendah mendukung pembangunan berkelanjutan dan inklusif.</p>	<p>Terwujudnya keamanan, ketertiban, dan partisipasi masyarakat yang inklusif; stabilitas ekonomi yang solid dan penataan ruang publik yang bersih, penegakan keadilan sosial, mendukung masyarakat demokratis, menciptakan iklim investasi inovatif, mengurangi ketimpangan, dan memperkuat perekonomian secara menyeluruh untuk transformasi sosial dan ekonomi yang berkelanjutan</p>	<p>Kota Makassar aman, tertib, dan berdaya saing tinggi, kemitraan strategis, inovasi teknologi, transparansi keuangan, pencegahan korupsi, serta masyarakat patuh hukum dan aparat berintegritas, pemantapan demokrasi dan pengelolaan fiskal untuk pertumbuhan ekonomi.</p>

Misi	Tahapan Arah Kebijakan			
	Tahapan I 2025-2029	Tahap II 2030-2034	Tahap III 2035-2039	Tahap IV 2040-2045
Misi 5: Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Optimalisasi perlindungan sosial melalui pemenuhan hak dan perlindungan sosial secara inklusif; penguatan ketangguhan masyarakat melalui pendidikan keagamaan dan penguatan budaya serta kearifan lokal sejak dini; peningkatan kualitas layanan persampahan, air bersih dan sanitasi; penguatan integrasi dan kualitas perencanaan dan pembangunan berwawasan lingkungan; penguatan manajemen mitigasi bencana mencakup struktural dan non struktural; peningkatan kapasitas pengelola tanggap dan respon bencana. Sistem pangan yang berkelanjutan.	Pelestarian dan perlindungan budaya melalui pendidikan budaya kepada masyarakat terutama generasi muda; percepatan terbentuknya ketangguhan masyarakat secara inklusif diantaranya peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana serta percepatan infrastruktur yang tahan bencana; pemanfaatan, pembangunan dan pengembangan teknologi berbasis kesiapsiagaan bencana ; percepatan pembangunan rendah karbon melalui EBT dan penerapan transportasi ramah lingkungan. Sistem pangan berkelanjutan mengintegrasikan praktik pertanian ramah lingkungan dan teknologi inovatif untuk mencapai ketahanan pangan.	Memperkokoh pelestarian budaya melalui pendidikan masyarakat dan memperkuat ketangguhan keluarga religius di tengah dinamika global. Percepat ketangguhan masyarakat dengan meningkatkan kapasitas menghadapi bencana dan membangun infrastruktur rendah karbon tahan gempa, memanfaatkan teknologi kesiapsiagaan bencana. Memperkuat sistem pangan berkelanjutan dengan praktik urban farming ramah lingkungan, teknologi inovatif, pengelolaan bijaksana, pengurangan dampak lingkungan, optimalisasi Energi Baru Terbarukan (EBT), serta peningkatan akses dan distribusi pangan secara inklusif.	Perwujudan masyarakat religius dan berbudaya serta lingkungan perkotaan yang tangguh terhadap ancaman dan tantangan perubahan baik sosial budaya, maupun risiko bencana dan perubahan iklim

Misi 6: . . .

Misi	Tahapan Arah Kebijakan			
	Tahapan I 2025-2029	Tahap II 2030-2034	Tahap III 2035-2039	Tahap IV 2040-2045
Misi 6: Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan Yang Merata dan Berkeadilan	Penguatan kerjasama dan koordinasi yang efektif antar daerah dan penguatan Kebijakan melalui Penuntasan Perkada RTRW dan RDTR, untuk mendukung pengendalian dan penegakan hukum serta implementasi pembangunan sesuai pemanfaatan ruang yang ditetapkan. Penguatan juga diarahkan dalam pembangunan infrastruktur perkotaan secara merata dan inklusif, pengintegrasian pengembangan wilayah termasuk wilayah kecamatan kepulauan, lintas wilayah serta lintas kewenangan untuk memperkuat kedudukan dan peran Kota Makassar melalui peningkatan aksesibilitas, terhadap Kawasan sekitar, regional sulawesi dan kawasan timur indonesia	Percepatan Penataan Kawasan kawasan cepat tumbuh melalui Pengendalian Pemanfaatan Ruang, untuk mendukung pengembangan seluruh wilayah darat dan kepulauan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; Percepatan pembangunan sarana prasarana berkualitas dan moda transportasi dalam mendukung konektivitas integrasi Bandara, Kereta Api dan Pelabuhan serta angkutan barang secara terpadu.	Diarahkan pada Pelaksanaan pengembangan simpul transportasi dan antar moda transportasi untuk konektivitas pendukung perekonomian termasuk wilayah kepulauan, antar kawasan, dan antar wilayah; pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan pertumbuhan baru dan penuntasan pengendalian pemanfaatan ruang pada permukiman ilegal baik wilayah darat maupun pesisir	Perwujudan pembangunan kewilayahan dengan infrastruktur berkualitas yang terintegrasi dalam mendukung konektivitas dan perekonomian yang merata, inklusif berbasis digital dan berkeadilan

Misi	Tahapan Arah Kebijakan			
	Tahapan I 2025-2029	Tahap II 2030-2034	Tahap III 2035-2039	Tahap IV 2040-2045
Misi 7: Mewujudkan Sarana dan Prasarana Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	Pemanfaatan teknologi dalam peningkatan kualitas penyediaan sarana dan prasarana (energi, air bersih dan sanitasi, rumah layak huni dan transportasi perkotaan) secara merata dan inklusif, pemenuhan ketersediaan pangan; penguatan landasan dan implementasi awal transportasi cerdas dan rendah karbon; pemerataan pembangunan infrastruktur dasar dan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan tanggap bencana	Percepatan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas serta pengembangan sistem transportasi yang efisien yang mendukung peningkatan konektivitas antarmoda secara menyeluruh, termasuk integrasi yang harmonis antara bandara, kereta api, pelabuhan, dan angkutan barang, guna menciptakan jaringan transportasi yang terpadu dan memperkuat aliran logistik serta mobilitas. Tahap ini juga diarahkan pada pemantapan implementasi transportasi massal yang komprehensif dan berkualitas serta penerapan teknologi dan digitalisasi dalam pengelolaan jaringan infrastruktur perkotaan, dengan sistem transportasi yang efisien dan terintegrasi secara luas, serta meningkatkan pengelolaan dan pemantauan infrastruktur kota dengan cara yang lebih modern dan responsif. Sistem pangan yang berkelanjutan melalui peningkatan produksi, distribusi dan konsumsi pangan dengan mengutamakan keseimbangan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan	Pengembangan simpul transportasi dan antar moda transportasi untuk konektivitas pendukung perekonomian termasuk wilayah kepulauan, antar kawasan, dan antar wilayah untuk mengurangi waktu tempuh, biaya logistik dan meningkatkan efisiensi dalam mobilitas barang dan orang; pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan pertumbuhan baru untuk mencegah dampak negatif terhadap lingkungan dan kualitas hidup dan penuntasan pengendalian pemanfaatan ruang pada permukiman ilegal baik wilayah darat maupun pesisir. Pada tahap ini juga pada pemantapan implementasi transportasi massal, peningkatan kualitas dan penerapan teknologi dan digitalisasi dalam pengelolaan jaringan infrastruktur perkotaan, dan percepatan pemerataan pembangunan infrastruktur terintegrasi dan tanggap bencana dan sistem pangan yang berkelanjutan.	Terwujudnya lingkungan perkotaan yang tangguh dengan sarana dan prasarana kota yang berkualitas, dan ramah lingkungan

Misi	Tahapan Arah Kebijakan			
	Tahapan I 2025-2029	Tahap II 2030-2034	Tahap III 2035-2039	Tahap IV 2040-2045
Misi 8: Meningkatkan Daya Saing Daerah Untuk Kestinambungan Pembangunan	Optimalisasi kapasitas fiskal daerah, meningkatkan fleksibilitas pengelolaan fiskal dan menerapkan bauran pendanaan yang inovatif.	Pengembangan diversifikasi sumber pendanaan dari sektor publik dan swasta, serta peningkatan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan. Mengimplementasikan bauran pendanaan yang inovatif dan responsif terhadap perubahan ekonomi, memperbaiki kualitas layanan publik, dan menarik investasi, sehingga mampu bersaing baik di tingkat nasional maupun internasional	Pemantapan kapasitas fiskal daerah melalui diversifikasi sumber pendanaan, pengelolaan keuangan yang fleksibel, serta prinsip transparansi dan akuntabilitas akan meningkatkan kualitas layanan publik, menarik investasi, dan memperkuat otonomi daerah untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.	Terwujudnya daya saing daerah secara berkelanjutan

5.2. Sasaran Pokok dan Arah Pembangunan

Sasaran pokok RPJPD Tahun 2025-2045 merupakan gambaran kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan secara langsung terwujudnya Visi dan Misi RPJPD Kota Makassar Tahun 2025-2045. Sasaran pokok menggambarkan kondisi yang diinginkan pada akhir periode 20 (dua puluh) tahun dan bagaimana upaya-upaya yang akan dilakukan, serta menjadi acuan dalam perumusan arah pembangunan jangka panjang daerah. Arah Pembangunan merupakan strategi dalam mencapai tujuan pembangunan daerah dan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional jangka panjang yang sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah yang merupakan penjabaran dari 8 (delapan) Misi Pembangunan guna mewujudkan Indonesia Emas Tahun 2045.

Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Kota Makassar, ditetapkan 10 (sepuluh) Sasaran Pokok dengan 17 (tujuh belas) Arah Pembangunan Kota Makassar, dan di-*breakdown* lebih lanjut kedalam 203 (dua ratus tiga) Kebijakan Transformasi. Pencapaian Sasaran Pokok diukur dengan 45 (empat puluh lima) Indikator Utama Pembangunan sebagai parameter kinerja pembangunan yang akan dicapai pada akhir periode perencanaan.

Selanjutnya Sasaran Pokok dan Arah Pembangunan Kota Makassar disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.2
Misi, Sasaran Pokok dan Arah Pembangunan
Kota Makassar 2025-2045

No	Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan Kota Makassar
1.	Misi 1: Mewujudkan Transformasi Sosial	1. Terwujudnya Kota Makassar dengan kualitas manusia yang tinggi dan berdaya saing global	1. Kesehatan untuk Semua
			2. Pendidikan Berkualitas yang
			3. Perlindungan Sosial yang Adaptif
2.	Misi 2: Mewujudkan Transformasi Ekonomi	2. Terwujudnya Kota Makassar dengan produktivitas ekonomi tinggi berbasis Iptekin dan Ekonomi Hijau	4. Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi Tinggi
			5. Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru
3.	Misi 3: Mewujudkan Transformasi Tata Kelola	3. Terwujudnya Kota Makassar sebagai Hub Perdagangan Kawasan Timur Indonesia dan Internasional	6. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global
			4. Terwujudnya Makassar sebagai Kota Cerdas dengan pemerintahan yang profesional dan melayani
			7. Tata Kelola yang Berintegritas, Adaptif dan Inovatif
			8. Transformasi Digital

No	Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan Kota Makassar
4.	Misi 4: Memantapkan Ketentraman dan Ketertiban Umum Yang Tangguh, dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	5. Terwujudnya Kota Makassar yang aman, tertib dan demokratis	9. Ketaatan Hukum, Ketertiban dan Keamanan Tangguh serta Demokrasi Substansial
		6. Terwujudnya Makassar sebagai kota tujuan utama investasi menuju kemandirian fiskal daerah	10. Stabilitas Ekonomi Makro Daerah
5.	Misi 5: Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	7. Terwujudnya Kota Makassar yang toleran, berketahanan sosial dan berkebudayaan maju didukung ketahanan ekologi yang tinggi	11 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju
			12. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat
			13. Berketahanan Energi dan Air dan Pangan
6.	Misi 6: Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan Yang Merata dan Berkeadilan	8. Terwujudnya Kota Makassar menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dengan PDRB tertinggi di kawasan timur indonesia	14. Perkotaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi
7.	Misi 7: Mewujudkan Sarana dan Prasarana Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	9. Terwujudnya Makassar menjadi Kota Berkelanjutan yang didukung ketahanan terhadap bencana dan risiko perubahan iklim	15. Lingkungan Hidup Berkualitas
			16. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim
8.	Misi 8: Meningkatkan Daya Saing Daerah Untuk Kestinambungan Pembangunan	10. Terwujudnya Kota Makassar Yang Berdaya Saing Nasional dan Global	17. Daya Saing Daerah Tinggi

Untuk menjamin keselarasan arah pembangunan Kota Makassar terhadap arah pembangunan provinsi dan nasional, maka dilakukan penyelarasan sebagaimana pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.3
Keselarasan Arah Pembangunan Nasional,
Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Makassar 2025-2045

No	Arah Pembangunan Nasional	Arah Pembangunan Provinsi Sul-Sel	Arah Pembangunan Kota Makassar
1.	Kesehatan untuk Semua	1. Kesehatan Untuk Semua	1. Kesehatan untuk Semua
2.	Pendidikan Berkualitas yang Merata	2. Pendidikan Berkualitas yang Merata	2. Pendidikan Berkualitas yang Merata
3.	Perlindungan Sosial yang Adaptif	3. Perlindungan Sosial yang Adaptif	3. Perlindungan Sosial yang Adaptif
4.	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	4. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	4. Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi Tinggi
5.	Penerapan Ekonomi Hijau	5. Penerapan Ekonomi Hijau	5. Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru
6.	Transformasi Digital	6. Transformasi Digital	8. Transformasi Digital
7.	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	6. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global
8.	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	8. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	14. Perkotaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi
9.	Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif	9. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif	7. Tata Kelola yang Berintegritas, Adaptif dan Inovatif
10.	Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial	10. Ketaatan Hukum, Ketertiban dan Keamanan Tangguh dan Demokrasi Substansial	9. Ketaatan Hukum, Ketertiban dan Ketertiban Umum Yang Tangguh serta Demokrasi Substansial
11.	Stabilitas Ekonomi Makro	11. Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	10. Stabilitas Ekonomi Makro Daerah
12.	Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gantar Kawasan	12. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gantar Kawasan	17. Daya Saing Daerah Tinggi
13.	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	13. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	11. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju
14.	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	14. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	12. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif
15.	Lingkungan Hidup Berkualitas	15. Lingkungan Hidup Berkualitas	15. Lingkungan Hidup Berkualitas
16.	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	16. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	13. Berketahanan Energi dan Air dan Pangan
17.	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	17. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	16. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Arak Kebijakan Transformatif serta Indikator Kinerja, Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Makassar, selanjutnya dapat dijelaskan secara lengkap sebagai berikut:

5.2.1. Sasaran . . .

5.2.1. Sasaran Pokok 1: Terwujudnya Kota Makassar dengan kualitas manusia yang tinggi dan berdaya saing global

Sasaran Pokok ini menggambarkan kondisi Sumber Daya Manusia di Kota Makassar yang berkualitas tinggi yang ditandai dengan manusia yang sehat, cerdas dan memiliki perlindungan sosial yang baik, melalui upaya pemenuhan pelayanan dasar dan pengembangan modal manusia dan modal sosial budaya. Dalam upaya mewujudkan Sasaran Pokok ini, difokuskan pada 3 (tiga) Arah Pembangunan yaitu: Kesehatan untuk Semua, Pendidikan Berkualitas yang Merata dan Perlindungan Sosial yang Adaptif, dengan arah kebijakan transformatif sebagai berikut:

1. Kesehatan untuk Semua

Pembangunan kesehatan bertujuan agar setiap penduduk Kota Makassar dapat hidup sehat, mencakup semua penduduk pada seluruh siklus hidup di seluruh wilayah dan bagi seluruh kelompok masyarakat, melalui penyediaan layanan dan sarana prasarana kesehatan yang terjangkau dan berkualitas terjangkau, mencakup promotif, preventif, kuratif dan paliatif.

Arah Kebijakan Transformasi untuk mewujudkan Arah Pembangunan “Kesehatan untuk Semua” di Kota Makassar dua puluh tahun ke depan adalah: 1). Perluasan upaya promotif-preventif terhadap masalah kesehatan dan pembudayaan perilaku hidup sehat; 2). Penguatan upaya pencegahan, deteksi, pengobatan dan pengendalian penyakit termasuk masalah kesehatan yang dipengaruhi oleh iklim dengan integrasi teknologi dan inovasi; 3). Peningkatan kapasitas masyarakat di bidang kesehatan melalui penguatan literasi kesehatan untuk menguatkan pelayanan kesehatan dasar berbasis masyarakat serta pemberdayaan pegiat sistem kesehatan alami/tradisional (herbal) sebagai alternatif pelayanan kesehatan rumah tangga; 4). Penguatan dan perluasan upaya penyehatan lingkungan didukung oleh tata kota, serta sarana dan prasarana yang mendukung pola hidup sehat termasuk konektivitas transportasi, ruang terbuka, fasilitas aktivitas fisik dan olahraga, akses air minum aman, layanan sanitasi aman, serta permukiman sehat; 5). Peningkatan kualitas, pemenuhan kebutuhan dan pemerataan tenaga kesehatan yang terlatih; 6). Peningkatan akses secara inklusif terhadap layanan fasilitas dan infrastruktur kesehatan yang berkualitas dan modern; 7). Perluasan penanggulangan permasalahan gizi makro dan gizi mikro, dan peningkatan nutrisi untuk 1000 hari pertama kehidupan secara inklusif; 8). Pencegahan dan penanganan stunting melalui pendekatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi secara konvergen; 9). Peningkatan edukasi di tingkat keluarga dan komunitas tentang pola makan dan gizi seimbang khususnya ibu hamil, bayi dan balita; 10). Percepatan eliminasi penyakit menular melalui rekayasa lingkungan habitat sektor dan pendekatan integrasi multisektor; 11). Percepatan pengurangan faktor risiko penyakit tidak menular secara terintegrasi lintas sektor; 12). Peningkatan upaya penemuan kasus dan pengobatan penyakit secara masif; 13). Penyediaan pelayanan kesehatan bergerak (*mobile health services*), khususnya untuk wilayah pulau dengan moda yang sesuai dengan karakteristik alam; 14). Pengembangan sistem telemedicine yang didukung oleh peningkatan cakupan jaminan kesehatan nasional; 15). Perluasan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Mandiri secara masif dengan mendorong masyarakat yang bekerja di sektor informal untuk menjadi peserta JKN secara mandiri; 16). Mendorong dan melakukan evaluasi terhadap partisipasi Perusahaan, IKM, dan UMKM untuk memastikan seluruh pekerja terdaftar sebagai peserta JKN, termasuk memberikan *reward and punishment* dalam pelaksanaannya.

2. Pendidikan Berkualitas yang Merata

Pendidikan berperan sentral dalam peningkatan kualitas hidup manusia serta mewujudkan kehidupan masyarakat dan bangsa yang bermartabat. Taraf pendidikan penduduk yang meningkat mampu menciptakan Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing, pendidikan diarahkan pada perwujudan pendidikan yang inklusif dan adaptif, serta peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan dengan tuntutan global berbasis prinsip pendidikan sepanjang hayat (*lifelong learning*).

Arah Kebijakan Transformasi untuk mewujudkan Arah Pembangunan “Pendidikan Berkualitas dan Merata” di Kota Makassar dalam dua puluh tahun kedepan adalah: 1). Peningkatan dan pemerataan kualitas antar satuan pendidikan untuk memastikan lulusan dengan kualitas yang setara dan tingkat kebermanfaatan tinggi; 2). Pemerataan sebaran perpustakaan dan menjalin kemitraan dengan stakeholders terkait dalam penyediaan layanan perpustakaan yang lebih luas untuk memperluas jangkauan literasi masyarakat; 3). Kampanye Gerakan Literasi Masyarakat untuk menciptakan budaya literasi di tengah masyarakat; 4). Pengembangan perpustakaan digital (*e-library*) melalui pemanfaatan aplikasi/TIK sebagai bentuk transformasi digital termasuk perluasan akses terhadap karya-karya dan referensi karya tulis *online*; 5). Perkuatan pengelolaan tenaga pendidik dengan meningkatkan kualitas dan kompetensi yang modern dan adaptif; 6). Peningkatan pendidikan digital melalui inovasi pada berbagai kurikulum pendidikan berbasis TIK dan *Internet of Things (IoT)*; 7). Pengembangan sistem pembelajaran jarak jauh melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), terutama untuk daerah kepulauan; 8). Mendorong penerapan kurikulum yang mengintegrasikan pemahaman dan penggunaan kemampuan numerasi siswa dalam berbagai konteks kehidupan sehari-hari; 9). Percepatan penuntasan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah) secara terintegrasi sesuai kewenangan pemerintah kabupaten/kota; 10). Penguatan Pendidikan non-formal (kesetaraan) dan pengembangan pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) untuk meningkatkan akses terhadap pendidikan bagi dewasa dan anak tidak sekolah; 11). Penguatan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSD) sebagai dukungan untuk mencegah anak tidak sekolah khususnya dari keluarga kurang mampu; 12). Peningkatan kualitas dan kuantitas Sekolah Ramah Anak dan Sekolah Inklusif dengan tenaga pendidik berkualifikasi memadai dan adaptif dengan latar belakang dan kebutuhan peserta didik; 13). Pendampingan Anak Tidak Sekolah (tidak mampu bersekolah dan putus sekolah) oleh Pemerintah Daerah, Organisasi Masyarakat dan Komunitas melalui penguatan motivasi, dan rujukan ke sekolah atau program pendidikan kesetaraan yang sesuai; 14). Peningkatan kualitas serta kuantitas sumber daya manusia yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan lapangan usaha; 15). Pembangunan ekosistem riset dan inovasi, yang berbasis digital untuk mendukung pengembangan ekonomi hijau dan biru, termasuk untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja.

3. Perlindungan Sosial yang Adaptif,

Perlindungan sosial yang adaptif ditujukan untuk percepatan pengentasan kemiskinan dan memperluas perlindungan yang menyeluruh bagi seluruh penduduk sesuai kerentanan yang dijalankan dengan prinsip berkeadilan, tepat sasaran dan inklusif.

Arah Kebijakan Transformasi untuk mewujudkan Arah Pembangunan “Perlindungan Sosial Yang Adaptif” di Kota Makassar dua puluh tahun kedepan adalah: 1). Pemanfaatan dan pemutakhiran rutin data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) dan basis data terkait lainnya untuk program pusat dan

daerah agar tepat sasaran, terutama penentuan target, manfaat, dan pelaksanaan bantuan sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan masyarakat; 2). Peningkatan akses rumah layak huni, terjangkau dan berkelanjutan bagi penduduk berpenghasilan rendah; 3). Peningkatan kolaborasi antar Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan perumahan bersubsidi yang memenuhi standar keandalan bangunan; 4). Perencanaan dan penganggaran melalui APBD serta komitmen daerah yang lebih berpihak untuk program perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, melalui pemenuhan SPM sosial dan penciptaan lapangan kerja yang mengutamakan kegiatan pemberdayaan masyarakat; 5). Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui peningkatan kapasitas pelaku usaha, fasilitasi modal usaha, dan peningkatan produktivitas dan akses pasar termasuk *e-commerce*; 6). Perluasan dan pemerataan pemenuhan dan akses penduduk terhadap perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi lokal yang terintegrasi dengan penciptaan peluang kerja, dan memiliki cakupan yang inklusif termasuk wilayah kepulauan, didukung infrastruktur yang laik dan responsif; 7). Peningkatan kemudahan akses peluang kerja dan peluang bisnis baru, termasuk usaha rintisan (*start-up*) terutama bagi rumah tangga miskin melalui perluasan lapangan usaha berbasis kewirausahaan dan ekonomi digital; 8). Peningkatan kualitas pekerja dan calon pekerja dari masyarakat berpenghasilan rendah melalui pelatihan keterampilan berbasis masyarakat; 9). Memperluas aksesibilitas kesempatan kerja di sektor formal bagi penyandang disabilitas melalui kebijakan yang mewajibkan Pemerintah Daerah, BUMD dan Perusahaan swasta mempekerjakan penyandang disabilitas sesuai peraturan perundang-undangan; 10). Perluasan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan termasuk bagi pekerja bukan penerima upah dan kaum rentan dengan mendorong dan melakukan evaluasi terhadap partisipasi Perusahaan, IKM, dan UMKM untuk memastikan seluruh pekerja terdaftar sebagai peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja, termasuk memberikan *reward and punishment* dalam pelaksanaannya; 11). Perluasan Kepesertaan Mandiri secara masif dengan mendorong masyarakat yang bekerja di sektor informal untuk menjadi peserta Jamsostek secara mandiri

Terwujudnya Kota Makassar dengan kualitas manusia yang tinggi dan berdaya saing global, diukur melalui Indikator dan Target Kinerja, sebagai berikut:

Tabel 5.4
Indikator Utama Pembangunan dan Target Sasaran Pokok 1
Kota Makassar 2025-2045

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Baseline (2025)	Target Kinerja 2045
1. Terwujudnya Kota Makassar dengan kualitas manusia yang tinggi dan berdaya saing global	1. Kesehatan untuk Semua	1. Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	73,09	77,99
		2. Kesehatan Ibu dan Anak:		
		a. Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	75	68
		b. Persentase persalinan di fasilitas kesehatan (%)	100	100
		c. Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	18,8	6,1

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Baseline (2025)	Target Kinerja 2045	
		3. Penanganan Tuberkulosis:			
		a. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>) (%)	50	90	
		b. Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>) (%)	83	90	
			4. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	100	100
	2. Pendidikan Berkualitas yang Merata	5. a. Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional di Kota Makassar untuk:	i) Literasi Membaca (%)	98	100
			ii) Numerasi (%)	98	100
			b. Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	11,79	15,00
			c. Harapan Lama Sekolah	15,72	18,00
			6. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	22,01	23,06
		7. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke atas yang bekerja menurut pendidikan tinggi	29,63	43,93	
3. Perlindungan Sosial yang Adaptif	8. a.	Tingkat Kemiskinan (%)	3,93	1,57	
		Indeks Gini	0,383	0,343	
	9. Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)	40,15	43,45		
	10. Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	57,39	100		

5.2.2. Sasaran Pokok 2: Terwujudnya Kota Makassar dengan produktivitas ekonomi tinggi berbasis Iptekin dan Ekonomi Hijau

Sasaran Pokok ini menggambarkan proses pembangunan ekonomi menuju makassar sebagai kota dengan produktivitas ekonomi yang tinggi, utamanya peningkatan produktivitas pada sektor-sektor utama penunjang ekonomi (perdagangan besar dan eceran, industri pengolahan, dan konstruksi), Industri Kecil dan Menengah, Koperasi, BUMD serta sektor-sektor jasa seperti MICE dan Pariwisata serta ekonomi kreatif.

Dalam upaya mewujudkan Sasaran Pokok ini, difokuskan pada 2 (dua) Arah Pembangunan yaitu: Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi Tinggi, dan Penerapan, dengan arah kebijakan transformatif sebagai berikut:

4. Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi Tinggi

Iptek dan inovasi menjadi pendorong ditujukan untuk tidak hanya menjaga, melainkan juga mempercepat keberlanjutan produktivitas sektor-sektor ekonomi dan memperkuat struktur ekonomi dalam jangka panjang.

Arah Kebijakan Transformasi untuk mewujudkan Arah Pembangunan

“Iptek, . . .

“Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi Tinggi” di Kota Makassar dua puluh tahun ke depan adalah: 1). Peningkatan nilai tambah sektor industri pengolahan melalui pengembangan teknologi, inovasi dan efisiensi rantai pasok dan distribusi; 2). Penguatan, peningkatan dan pengembangan industri pengolahan sebagai penunjang ekonomi pembangunan Ibu Kota Negara (IKN); 3). Penerapan pariwisata berkelanjutan termasuk pengembangan wisata alam (*eco-tourism*), sebagai sumber pertumbuhan ekonomi didukung ketersediaan infrastruktur dan sumberdaya di bidang pariwisata; 4). Pengembangan infrastruktur tepi air sebagai ruang publik sekaligus daya tarik destinasi Pariwisata yang dilengkapi dengan atraksi yang unik, amenities, dan aksesibilitas yang baik, modern dan terintegrasi; 5). Peningkatan pelaksanaan MICE, Event dan festival berskala nasional dan internasional; 6). Pendekatan yang komprehensif dan terencana dalam penguatan citra kota (*city branding*) sebagai upaya menciptakan persepsi positif dan mempromosikan Kota Makassar dengan pemanfaatan teknologi dan media sosial (portal resmi (*web site*), media sosial (*social media*), pemengaruh (*influencer*) dan aplikasi (*apps*); 7). Pengembangan industri ekonomi kreatif dengan penerapan TIK dan inovasi yang mendukung penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi dan menciptakan ekosistem bisnis yang dinamis dan berdaya saing; 8). Pengembangan sektor industri kreatif melalui peningkatan kapasitas pelaku usaha, fasilitasi modal usaha, dan peningkatan produktivitas dan akses pasar termasuk *e-commerce*; 9). Peningkatan kemudahan akses peluang kerja dan peluang bisnis baru, termasuk usaha rintisan (*start-up*) bagi industri kreatif melalui perluasan lapangan usaha berbasis kewirausahaan dan ekonomi digital; 10). Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha; 11). Penguatan kapasitas koperasi melalui penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi; 12). Peningkatan kinerja dan produktivitas BUMD melalui reformasi tata kelola (*good corporate governance*) yang lebih efektif dan efisien, serta kontribusi yang tinggi bagi Kota Makassar dan masyarakat; 13). Penerapan budidaya pertanian yang berkelanjutan untuk mencegah degradasi lahan; 14). Pelaksanaan *upskilling*, *reskilling* dan *newskilling* bagi angkatan kerja secara inklusif, terutama di bidang pariwisata, ekonomi kreatif dan industri; 15). Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas dan lansia melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam mengambil keputusan serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan; 16). Penguatan kesetaraan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan; 17). Peningkatan kualitas pekerja dan calon pekerja dari pencari kerja melalui pelatihan keterampilan berbasis masyarakat dengan prioritas masyarakat berpenghasilan rendah; 18). Penumbuhan dan peningkatan kapasitas *emerging sectors* (bioekonomi dan bioteknologi, pendidikan dan riset, serta manajemen sumber daya); 19). Pengembangan kebijakan dan ekosistem yang mendukung pengembangan dan penerapan inovasi.

5. Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

Penerapan ekonomi hijau ditujukan agar pertumbuhan ekonomi yang tinggi sejalan dengan meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan agar berkelanjutan. Penerapan ekonomi hijau juga dapat menjadi sumber pertumbuhan baru melalui peningkatan peluang kerja, investasi hijau dan pengembangan produk-produk hijau. Arah Kebijakan Transformatif untuk mewujudkan Arah Pembangunan “Penerapan Ekonomi Hijau” di Kota Makassar dua puluh tahun ke depan adalah: 1). Peningkatan penerapan praktik urban farming/pertanian perkotaan berkelanjutan berbasis

keunggulan wilayah; 2). Peningkatan kapasitas sumberdaya pelaku sektor ekonomi dalam praktik budidaya yang rendah karbon, cerdas iklim, dan produktif serta inklusif; 3). Pengelolaan dan pemanfaatan lahan secara berkelanjutan; 4). Peningkatan aksesibilitas terhadap pendanaan inovatif yang dapat mendukung kegiatan pembangunan menuju ekonomi hijau serta memfasilitasi berbagai kegiatan sektoral yang prioritas dan strategis, 5). Penerapan kompensasi jasa lingkungan untuk mendorong perlindungan keanekaragaman hayati, mitigasi perubahan iklim dan perlindungan cadangan karbon sebagai upaya perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup.

Terwujudnya Kota Makassar dengan produktivitas ekonomi tinggi berbasis Iptekin dan Ekonomi Hijau, diukur melalui Indikator dan Target Kinerja, sebagai berikut:

Tabel 5.5
Indikator Utama Pembangunan dan Target Sasaran Pokok 2
Kota Makassar 2025-2045

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Baseline (2025)	Target Kinerja 2045
2. Terwujudnya Kota Makassar dengan produktivitas ekonomi tinggi berbasis Iptekin dan Ekonomi Hijau	4. Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi Tinggi	11. Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	18,86	25,87
		12. Pengembangan Pariwisata:		
		a. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan	2,17	2,29
		b. Jumlah Tamu Wisatawan		
		o Domestik (Orang)	4.742.414	6.395.913
		o Mancanegara (Orang)	18.828	33.513
		13. Jumlah Industri Ekonomi Kreatif Kota Makassar	5.118	11.078
		14. Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD:		
		a. Jumlah industri kecil dan menengah di Kota Makassar	18.034	120.451
		b. Persentase Koperasi sehat di Kota Makassar	25,00	45,00
		c. <i>Return on Asset</i> (ROA) BUMD (%)	2,06	8,36
		d. Produktivitas Padi (Ton/Hektar)	6,77	8,41
	e. Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ribu Ton/Tahun)	21.401	28.823	
	15. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	8,53	5,33	
	16 a. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	60,02	66,73	
	b. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	42,98	44,81	
	17. Tingkat Penguasaan IPTEK:			
	a. Indeks Kapabilitas Inovasi	4,51	5,00	
	5. Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru	18. Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru:		
	a. Indeks Ekonomi Hijau	51,4	100,00	

5.2.3. Sasaran Pokok 3: Terwujudnya Kota Makassar sebagai Hub perdagangan Kawasan Timur Indonesia dan Internasional

Posisi strategis Kota Makassar sebagai Kota terbesar dan gerbang Kawasan Timur Indonesia (KTI), serta memperhatikan inspirasi sejarah kebesaran dan kemajuan Makassar di abad ke-17 sebagai kota niaga terkemuka dunia merupakan potensi besar untuk Makassar dapat menjadi Hub perdagangan KTI dan Internasional. Integrasi ekonomi Makassar/KTI dan Internasional akan mendorong peningkatan produktivitas perekonomian yang terintegrasi dan mendukung partisipasi dalam rantai nilai tambah global sehingga menciptakan kekuatan besar.

Dalam upaya mewujudkan Sasaran Pokok ini, difokuskan pada Arah Pembangunan “Integrasi Ekonomi Domestik dan Global, dengan arah kebijakan transformatif sebagai berikut:

6. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

Penerapan integrasi ekonomi domestik dan Global ditujukan agar dapat mendorong aktivitas ekonomi yang terintegrasi dan mendukung partisipasi dalam rantai pasok global. Arah kebijakan Transformasi untuk mewujudkan Arah Pembangunan “Integrasi Ekonomi Domestik dan Global” di Kota Makassar dua puluh tahun ke depan adalah: 1). Penguatan integrasi dan konektivitas dengan intra dan antar kawasan pertumbuhan ekonomi. 2). Peningkatan keterlibatan dan partisipasi para pelaku ekonomi dalam rantai pasok global (*global supply chain*); 3). Peningkatan pangsa ekspor barang dan jasa bernilai tambah tinggi di pasar global melalui ekspansi ekspor ke negara yang memiliki potensi pertumbuhan penduduk dan konsumsi yang tinggi; 4). Pemanfaatan ALKI II secara optimal untuk menghubungkan rantai pasok/nilai domestik dan global; 5). Peningkatan keterkaitan ekonomi antar pusat-pusat pertumbuhan melalui penguatan keterkaitan rantai pasok antarwilayah, peningkatan kerja sama ekonomi dan promosi dagang antar daerah, serta mendorong partisipasi daerah dalam rantai pasok global.

Terwujudnya Kota Makassar sebagai Hub perdagangan Kawasan Timur Indonesia dan Internasional, diukur melalui Indikator dan Target Kinerja, sebagai berikut:

Tabel 5.6
Indikator Utama Pembangunan dan Target Sasaran Pokok 3
Kota Makassar 2025-2045

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Baseline (2025)	Target Kinerja 2045
3. Terwujudnya Kota Makassar sebagai Hub Perdagangan Kawasan Timur Indonesia dan	6. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	19. Persentase Koefisien variasi harga antar waktu barang kebutuhan pokok (%)	10,21	7,30
		20. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	49,72	51,67
		21. Net Ekspor Barang dan Jasa	-13.936,03	1.787,52

5.2.4. Sasaran Pokok 4: Terwujudnya Makassar sebagai Kota Cerdas dengan pemerintahan yang profesional dan melayani

Sasaran Pokok ini menggambarkan proses transformasi pengelolaan sektor publik yang efisien, efektif, akuntabel melalui digitalisasi serta pemanfaatan Teknologi Informasi dan telekomunikasi (TIK) guna percepatan, transparansi kepada penerima layanan publik, utamanya melalui reformasi

hukum, . . .

hukum, pemerintahan berbasis elektronik, Reformasi Birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan integritas, monitoring pencegahan korupsi, serta maturitas SPIP. Dalam upaya mewujudkan Sasaran Pokok ini, difokuskan pada Arah Pembangunan “Tata Kelola Yang Berintegritas, Adaptif dan Inovatif” dan Transformasi Digital”, dengan arah kebijakan transformatif sebagai berikut:

7. Tata Kelola yang Berintegritas, Adaptif dan Inovatif

Penerapan tata kelola yang berintegritas, adaptif dan inovatif, ditujukan untuk terwujudnya kelembagaan yang efektif, adaptif dan taat asas serta tata kelola yang berintegritas, tangkas, dan kolaboratif. Arah Kebijakan Transformatif untuk mewujudkan Arah Pembangunan “Tata Kelola Yang Berintegritas, Adaptif dan Inovatif”, di Kota Makassar dua puluh tahun ke depan adalah: 1). Optimasi dan harmonisasi regulasi, termasuk proses pra regulasi yang memadai di daerah; 2). Pembangunan dan pengembangan Big Data harmonisasi regulasi yang memiliki filter untuk harmonisasi; 3). Pengembangan *smart government* serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN Daerah, dan pengelolaan aset daerah; 4). Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital, melalui pengembangan sistem kerja berbasis *Human Networking Management*, dan pelembagaan manajerial dan optimalisasi arsitektur SPBE yang implementatif di seluruh perangkat daerah; 5). Penyediaan NGWF (*Firewall Jaringan*) dan WAF (*Firewall Aplikasi*) serta sarana dan prasarana pendukung monitoring keamanan data dan informasi; 6). Penguatan organisasi pemerintah berbasis fungsional government, peningkatan kualitas leadership bagi *top* dan *middle management*, dan institusionalisasi budaya kerja fungsional *government*; 7). Penguatan pengelolaan sumber daya dengan mempertimbangkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan dan kesejahteraan sosial serta kesinambungan antar periode pembangunan; 8). Peningkatan respon terhadap laporan masyarakat melalui pengembangan perangkat dan mekanisme respon cepat layanan publik yang inklusif menuju *zero complain*; 9). Penguatan sistem pelayanan publik satu pintu yang terintegrasi berbasis digital; 10). Peningkatan kompetensi dan perilaku petugas pemberi layanan publik agar lebih responsif; 11). Peningkatan akses dan kemudahan layanan publik untuk semua terutama bagi kelompok rentan dan disabilitas; 12). Penguatan penjaminan mutu (sertifikasi ISO) seluruh lembaga layanan publik yg disediakan pemerintah; 13). Perbaikan tata kelola pemerintahan termasuk penataan keuangan dan aset daerah untuk mewujudkan *good governance* dan kemandirian fiskal berbasis digital; 14). Pengawasan proses dan penguatan integritas tata kelola pengembangan karir, promosi mutasi ASN dan manajemen kinerja dengan pemanfaatan teknologi informasi; 15). Transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan jasa-jasa; serta transparansi layanan perizinan berbasis digital; 16). Peningkatan partisipasi masyarakat sipil yang inklusif dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan; 17). Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah untuk pencapaian SPM dan prioritas daerah, serta mendukung pencapaian sasaran prioritas nasional; 18). Perkuatan pengendalian pembangunan, melalui penerapan manajemen risiko; 19). Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah

8. Transformasi Digital

Transformasi Digital terutama ditujukan untuk menyediakan pelayanan publik yang cepat, berkualitas, efisien, mudah diakses, transparan, dengan

memanfaatkan . . .

memanfaatkan TIK dan big data serta berbasis web (*web-based*). Arah Kebijakan Transformatif untuk mewujudkan Arah Pembangunan ini untuk dua puluh tahun ke depan adalah 1). Peningkatan layanan publik dengan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan secara terintegrasi; 2). Penyediaan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang handal dan terjangkau di seluruh wilayah kota termasuk wilayah pulau; 3). Peningkatan Literasi Digital Terpadu dan kemampuan SDM digital atau digital skill melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital, yang difokuskan pada pemahaman dan keterampilan penggunaan perangkat digital, navigasi internet, keamanan *online* dan siber.

Terwujudnya Makassar sebagai Kota Cerdas dengan pemerintahan yang profesional dan melayani, diukur melalui Indikator dan Target Kinerja, sebagai berikut:

Tabel 5.7
Indikator Utama Pembangunan dan Target Sasaran Pokok 4
Kota Makassar 2025-2045

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Baseline (2025)	Target Kinerja 2045
4. Terwujudnya Makassar sebagai Kota Cerdas dengan pemerintahan yang profesional dan melayani	7. Tata Kelola yang Berintegritas, Adaptif dan Inovatif	22. Indeks Reformasi Hukum	98,02	100
		23. a. Indeks SPBE	3,85	4,65
		b. Indeks Reformasi Birokrasi	79,97	100,00
		24. Indeks Pelayanan Publik	4,05	5,00
		25. a. Indeks Survey Penilaian Integritas	75,55	100,00
		b. Nilai MCP KPK	84,52	100
	c. Indeks Maturitas SPIP	3,42	5,00	
	8. Transformasi Digital	26. Persentase Layanan Publik Yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi (%)	45	95

5.2.5. Sasaran Pokok 5: Terwujudnya Kota Makassar yang aman, tertib dan demokratis

Makassar sebagai Kota yang aman, tertib dan demokratis merupakan kondisi yang kondusif untuk pembangunan serta daya saing daerah yang tinggi, dengan menjaga ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah, penanganan tindak kriminal, serta proses demokrasi yang substansial dan transparan. Dalam upaya mewujudkan Sasaran Pokok ini, difokuskan pada Arah Pembangunan “Ketaatan Hukum, Ketertiban dan Keamanan Tangguh serta Demokrasi Substansial”, dengan arah kebijakan transformatif sebagai berikut:

9. Ketaatan Hukum, Ketertiban dan Keamanan Tangguh serta Demokrasi Substansial

Perwujudan supremasi hukum yang berkeadilan, berkepastian, bermanfaat dan berlandaskan hak asasi manusia, merupakan faktor penting untuk menjadikan Makassar sebagai kota yang maju. Arah Kebijakan Transformatif untuk mewujudkan Arah Pembangunan ini adalah 1). Pengembangan sistem keamanan dan ketertiban masyarakat yang adaptif, kolaboratif dan sinergi antara lembaga keamanan dan penegakan hukum, masyarakat yang partisipatif; 2). Perwujudan stabilitas keamanan yang kondusif, bersih dan berkeadilan, serta penguatan implementasi dan

penegakan . . .

penegakan kebijakan yang tegas dan konsisten; 3). Penguatan kapasitas kelembagaan ketertiban dan ketentraman masyarakat dengan partisipasi masyarakat yang lebih bermakna; 4). Optimalisasi penciptaan ruang publik yang sehat serta ruang dialog untuk penyelesaian konflik sosial; 5). Peningkatan pengetahuan dan literasi masyarakat tentang politik dan demokrasi; 6). Mendukung penguatan integritas partai politik di daerah; 7). Peningkatan partisipasi publik dalam pemilihan kepala negara, pemilihan legislatif dan pemilihan kepala daerah; 8). Peningkatan partisipasi yang inklusif dalam partai politik

Terwujudnya Kota Makassar yang aman, tertib dan demokratis, diukur melalui Indikator dan Target Kinerja, sebagai berikut:

Tabel 5.8
Indikator Utama Pembangunan dan Target Sasaran Pokok 5
Kota Makassar 2025-2045

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Baseline (2025)	Target Kinerja 2045
5. Terwujudnya Kota Makassar yang aman, tertib dan demokratis	9. Ketaatan Hukum, Ketertiban dan Keamanan Tangguh serta Demokrasi Substansial	27. a. Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (%)	100	100
		b. Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah	100	100
		28. Persentase Tindak Kriminal Yang Ditangani (%)	59,01	90
		29. a. Persentase Perempuan Terpilih Terhadap Total Anggota DPRD (%)	16,0	30,0
		b. Perda Yang Merupakan Inisiatif DPRD	9	12
		c. Persentase Perempuan Pengurus Partai Politik (%)	31,6	40,0

5.2.6. Sasaran Pokok 6: Terwujudnya Makassar sebagai kota tujuan utama investasi, menuju kemandirian fiskal daerah

Makassar sebagai tujuan utama investasi, merupakan kondisi Kota yang mempunyai prospek cerah dan kondusif untuk menanamkan modal baik domestik maupun asing, dengan menjaga stabilitas ekonomi makro Kota Makassar yang pada akhirnya dapat meningkatkan kemandirian fiskal melalui pajak dan retribusi daerah guna melaksanakan pembangunan daerah, pelayanan publik serta pemberdayaan masyarakat. Dalam upaya mewujudkan Sasaran Pokok ini, difokuskan pada Arah Pembangunan “Stabilitas Ekonomi Makro Daerah”, dengan arah kebijakan transformatif sebagai berikut:

10. Stabilitas Ekonomi Makro Daerah

Arah pembangunan ini merupakan perwujudan kesinambungan fiskal daerah dan stabilitas ekonomi daerah, melalui upaya-upaya meningkatkan rasio pajak daerah terhadap PDRB, mengendalikan tingkat inflasi, meningkatkan investasi, serta pengelolaan keuangan daerah. Arah Kebijakan Transformasi, untuk mewujudkan stabilitas ekonomi makro Kota Makassar adalah: 1). Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui pengelolaan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), aset daerah, pemanfaatan pembiayaan alternatif, dan Transfer ke Daerah (TKD); 2). Mendorong kemandirian fiskal daerah melalui pencapaian rasio pajak daerah (*local tax ratio*) Kota Makassar minimal mencapai 3%; 3). Penguatan pengendalian inflasi daerah yang terkoordinasi dengan lintas *stakeholder* dan

kabupaten/kota; 4). Perbaiki sistem tata kelola investasi daerah (pelayanan perizinan, regulasi, kepastian hukum, pajak dan retribusi) dan digitalisasi informasi potensi investasi daerah beserta infrastruktur pendukungnya; 5). Peningkatan aksesibilitas terhadap pendanaan inovatif yang dapat mendukung kegiatan pembangunan menuju ekonomi hijau serta memfasilitasi berbagai kegiatan sektoral yang prioritas dan strategis; 6). Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan *blended finance*; 7). Dukungan insentif fiskal, pendanaan hijau (*green financing*), pendanaan biru (*blue financing*), dan pembiayaan alternatif lainnya

Terwujudnya Makassar sebagai Kota tujuan utama investasi, menuju kemandirian fiskal daerah, diukur melalui Indikator dan Target Kinerja, sebagai berikut:

Tabel 5.9
Indikator Utama Pembangunan dan Target Sasaran Pokok 6
Kota Makassar 2025-2045

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Baseline (2025)	Target Kinerja 2045
6. Terwujudnya Makassar sebagai kota tujuan utama investasi, menuju kemandirian fiskal daerah	10. Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	30. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0,75	2,00
		31. Tingkat Inflasi Gabungan (%)	3,16	2,17
		32. Persentase Peningkatan Investasi Daerah (%)	8,75	11,20
		33. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	61,15	84,00

5.2.7. Sasaran Pokok 7: Terwujudnya Kota Makassar yang toleran, berketahanan sosial dan berkebudayaan maju didukung ketahanan ekologi yang tinggi

Ketahanan sosial budaya dan ekologi yang kuat merupakan landasan sangat penting untuk mewujudkan transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, Kota Makassar. Ketahanan sosial budaya dan ekologi adalah ketangguhan manusia, masyarakat, beserta alam dan lingkungan sekitarnya untuk bertahan dan menjaga keseimbangan dalam menghadapi berbagai perubahan dan guncangan, agar daya dukung dan daya tampung lingkungan terus terjaga secara berkelanjutan dan setiap individu dapat hidup berkualitas dan berkontribusi dalam pembangunan. Dalam upaya mewujudkan Sasaran Pokok ini, difokuskan pada Arah Pembangunan “Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju”, “Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif”, dan “Berketahanan Energi, Air dan Pangan”, dengan arah kebijakan transformatif sebagai berikut:

11. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

Arah Pembangunan ini merupakan perwujudan peran agama sebagai landasan spiritual, etika, moral, dan modal dasar pembangunan, melalui upaya-upaya penetapan dan registrasi benda, bangunan, struktur, dan memberikan dukungan dan fasilitasi kegiatan-kegiatan keagamaan. Arah Kebijakan Transformasi, untuk mewujudkan beragama maslahat dan berkebudayaan maju adalah: 1). Preservasi dan perlindungan warisan budaya dan penguatan kearifan lokal, serta pengembangan pendidikan karakter sejak dini; 2). Mendorong tumbuh dan berkembangnya kreativitas dan ide inovatif dalam pelestarian budaya, pengembangan kesenian daerah dan menjaga kearifan lokal; 3). Peningkatan sinergitas antara lembaga/instansi untuk pemajuan kebudayaan, peningkatan intensitas pertunjukan seni dan pengembangan literasi budaya masyarakat; 4). Pembangunan ruang terbuka

berbasis . . .

berbasis budaya dan kearifan lokal; 5). Penguatan pendidikan yang selaras dengan nilai-nilai keagamaan/spiritual dan pokok-pokok kerukunan antar etnis sejak usia dini sebagai landasan moral dan etika; 6). Penguatan aktualisasi nilai-nilai agama sebagai landasan spiritual, etika, dan moral dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan; 7). Penguatan kerukunan antar umat beragama

12. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif

Arah Pembangunan ini merupakan perwujudan ketangguhan individu, keluarga, dan masyarakat untuk memastikan terbentuknya sumber daya manusia berkualitas sebagai motor penggerak pembangunan, melalui upaya-upaya Pembangunan Keluarga, Perlindungan Perempuan dan Anak, Pembangunan Pemuda, serta pembangunan dan pemberdayaan gender. Arah Kebijakan Transformasi untuk mewujudkan keluarga berkualitas, kesetaraan gender dan masyarakat inklusif adalah: 1). Peningkatan ketahanan kualitas keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal; 2). Pelembagaan pemenuhan hak dan penguatan sistem perlindungan anak secara efektif dan kolaboratif oleh pemerintah dan non pemerintah; 3). Pemenuhan hak dan perlindungan anak melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang; 4). Penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak melalui akses 24 jam setiap hari dalam seminggu (24/7) terhadap layanan darurat dan pengaduan, penanganan komprehensif oleh tenaga profesional mencakup tindak lanjut pengaduan, konseling, pendampingan, layanan kesehatan fisik dan mental serta rehabilitasi; 5). Peningkatan kompetensi dan daya saing pemuda agar mampu berkiprah dalam kancah nasional dan internasional; 6). Penguatan kapasitas lembaga kepemudaan yang diprioritaskan pada ketangguhan dan *resiliensi* pemuda dalam dinamika globalisasi; 7). Peningkatan kompetensi sumberdaya dan kelembagaan keolahragaan baik untuk olahraga prestasi dan olahraga masyarakat; 8). Penyelenggaraan event kepemudaan dan olahraga pemuda baik di tingkat daerah, maupun regional sebagai ajang pembinaan bakat sekaligus sarana pencarian bakat dan potensi atlet muda, melalui kemitraan dengan BUMN, Swasta dan *stakeholder* lainnya; 9). Peningkatan kualitas dan kuantitas Infrastruktur olahraga dan fasilitas kepemudaan sampai pada tingkat komunitas, didukung sarana olahraga yang dapat diakses dari berbagai kalangan untuk mendorong partisipasi luas dalam kegiatan olahraga dan kepemudaan; 10). Pembinaan dan pengembangan atlet muda dan pembinaan bakat olahraga sampai pada tingkat sekolah dan komunitas untuk menemukan talenta muda yang potensial didukung penyediaan fasilitas, pelatih berkualitas, dan akses ke kompetisi tingkat nasional atau internasional; 11). Pemenuhan hak dan perlindungan perempuan dalam situasi kekerasan berbasis gender, ketenagakerjaan, situasi darurat, rentan dan tindak pidana perdagangan orang, melalui penguatan kelembagaan, penyediaan infrastruktur yang aksesibel bagi semua, dan penegakan hukum yang berkeadilan menuju kesetaraan gender yang transformatif; 12). Pengintegrasian GEDSI (Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial) dalam perumusan dan pelaksana; 13). Pelembagaan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan, hingga pelaporan; 14). Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan

13. Berketahanan Energi, Air dan Pangan

Arah Pembangunan ini untuk memastikan kemandirian pangan didukung dengan ketahanan energi dan air, diversifikasi dan konservasi energi melalui upaya-upaya: meningkatkan ketahanan pasokan energi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, meningkatkan ketahanan Pangan dan Pola Pangan, peningkatan kapasitas air baku serta peningkatan akses terhadap air minum siap minum perpipaan. Raha Kebijakan Transformasi untuk mewujudkan ketahanan energi, air dan pangan adalah: 1). Penguatan ketahanan energi dengan pendekatan terpadu *Food Energy Water (FEW) Nexus*; 2). Pengembangan dan Pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan, untuk pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kapasitas energi listrik; 3). Pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; 4). Pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (*smart grid*) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; 5). Pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil (*isolated mini/micro-grid*) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; 6). Pengembangan elektrifikasi sektor transportasi; 7). Pengembangan penelitian dan peningkatan kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat, pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan kelistrikan yang diikuti kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan sesuai kewenangan pemerintah kota; 8). Pengembangan diversifikasi pangan untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang; 9). Penjaminan akses dan keterjangkauan pangan dan gizi terutama pada anak dalam periode 1000 hari pertama dalam kehidupan, masyarakat berpendapatan rendah, tinggal di wilayah pesisir dan pulau pulau kecil atau terkena dampak bencana; 10). Optimalisasi sumber daya air dan pengembangan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman terutama untuk wilayah pulau dan rawan air; 11). Pembangunan tampungan air serba guna yang memberikan manfaat secara cepat bagi kebutuhan air sehari-hari masyarakat; 12). Pengembangan pengetahuan dan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air; 13). Peningkatan efisiensi penggunaan air di semua sektor; 14). Perlindungan dan pemulihan ekosistem terkait sumberdaya air untuk menjamin keberlanjutan pasokan air dan meminimalisir risiko kerugian akibat bencana terkait air; 15). Mempercepat dan memperluas akses serta meningkatkan kualitas layanan air siap minum perpipaan dan akses sanitasi melalui sistem terpusat di wilayah perkotaan terutama Kawasan kumuh dan wilayah pulau; 16). Penguatan lembaga pelaksana penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang berkinerja baik dan optimal; 17). Peningkatan akses air minum yang aman, merata dan terjangkau, peningkatan mutu air dan peningkatan efisiensi penggunaan air; 18). Peningkatan keberlanjutan layanan dan efektivitas penggunaan sarana dan prasarana air minum

Terwujudnya Kota Makassar yang toleran, berketahanan sosial dan berkebudayaan maju didukung ketahanan ekologi yang tinggi, diukur melalui Indikator dan Target Kinerja, sebagai berikut:

Tabel 5.10
Indikator Utama Pembangunan dan Target Sasaran Pokok 7
Kota Makassar 2025-2045

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Baseline (2025)	Target Kinerja 2045	
7. Terwujudnya Kota Makassar yang toleran, berketahanan sosial dan berkebudayaan maju didukung ketahanan ekologi yang tinggi	12. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	34. Persentase benda, bangunan, struktur, dan situs cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi (%)	14,51	15,54	
		35. Persentase kegiatan keagamaan yang mendapat dukungan/fasilitasi (%)	1,15	2,00	
	11. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif	36. a. Indeks Pembangunan Keluarga b. Indeks Perlindungan Anak c. Indeks Pembangunan Pemuda	a. Indeks Pembangunan Keluarga	85,95	98,95
			b. Indeks Perlindungan Anak	69,44	96,44
			c. Indeks Pembangunan Pemuda	54,50	64,17
		37. Indeks Ketimpangan Gender	0,179	0,120	
	16. Berketahanan Energi dan Air dan Pangan	38. Ketahanan Energi, Air dan Pangan a. Ketahanan Energi: o Konsumsi Listrik per Kapita (kWh) b. Ketahanan Pangan: o Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (%) o Indeks Ketahanan Pangan o Skor Pola Pangan Harapan c. Ketahanan Air: o Kapasitas Air Baku (m ³ /detik) o Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	a. Ketahanan Energi: o Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)	1.627	2.381
			b. Ketahanan Pangan: o Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (%)	4,57	1,10
			o Indeks Ketahanan Pangan	84,98	90,66
			o Skor Pola Pangan Harapan	86,24	93,32
c. Ketahanan Air: o Kapasitas Air Baku (m ³ /detik)			3,35	10,27	
o Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)			45,66	100	

5.2.8. Sasaran Pokok 8: Terwujudnya Kota Makassar menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dengan PDRB tertinggi di Kawasan Timur Indonesia

Makassar sebagai kota metropolitan, dan pintu gerbang Kawasan Timur Indonesia berpotensi menjadi pusat jasa dan perdagangan yang maju, sesuai dengan sub lapangan usaha yang selama ini merupakan kontributor terbesar untuk PBDR Kota Makassar. Dalam upaya mewujudkan Sasaran Pokok ini, difokuskan pada Arah Pembangunan “Perkotaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi”, dengan arah kebijakan transformatif sebagai berikut:

14. Perkotaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Arah Pembangunan ini merupakan perwujudan Makassar sebagai kota maju dan menyejahterakan, melalui upaya-upaya meningkatkan kontribusi PDRB Kota Makassar terhadap PDB Nasional dan PDRB Provinsi Sulawesi Selatan, penyediaan akses hunian layak dan terjangkau, serta menyediakan layanan infrastruktur yang berkualitas. Arah Kebijakan Transformasi, untuk mewujudkan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi adalah: 1).

Mendukung . . .

Mendukung pengembangan bandara utama Sultan Hasanuddin yang terintegrasi dengan pengembangan wilayah; 2). Peningkatan peran Kota Makassar dalam upaya peningkatan diversifikasi ekonomi yang inklusif berbasis digital; 3). Mendukung pengembangan pelabuhan Makassar sehingga dapat berperan sebagai hub komoditas untuk kawasan timur Indonesia; 4). Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru, dengan konsep pembangunan *Transit Oriented Development* (TOD) yang mengintegrasikan tata ruang dan sistem transportasi, untuk mendukung pengembangan wilayah dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung; 5). Peningkatan daya saing sektor-sektor yang berkontribusi terhadap PDRB; 6). Optimalisasi lahan untuk penyediaan hunian vertikal (sewa dan milik) yang terpadu dengan layanan dasar permukiman, termasuk sistem transportasi publik; 7). Penerapan bauran pendanaan dalam meningkatkan akses pembiayaan perumahan masyarakat untuk memperoleh hunian layak, aman, terjangkau, dan berkelanjutan; 8). Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di Kawasan Industri dan kawasan strategis lainnya khususnya untuk pekerja; 9). Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau terutama bagi penduduk berpenghasilan rendah sesuai dengan karakteristik wilayah; 10). Peningkatan kolaborasi antar Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan perumahan bersubsidi yang memenuhi standar keandalan bangunan; 11). Pembangunan dan peningkatan kapasitas jalan daerah untuk mendukung integrasi rantai pasok domestik (menghubungkan sentra produksi dan pelabuhan/bandara); 12). Pengembangan transportasi perkotaan termasuk sistem angkutan umum massal perkotaan di Wilayah Metropolitan Makassar yang andal serta modern dalam melayani mobilitas penumpang; 13). Peningkatan konektivitas antara daratan dengan pulau, serta wilayah berbatasan; 14). Mendukung percepatan perwujudan jalur kereta antar kota Makassar - Parepare, serta pengembangan kereta angkutan barang terpadu dengan pengembangan kawasan, simpul transportasi utama (pelabuhan), dan fasilitas antarmoda; 15). Mendukung percepatan pembangunan jalan tol; 16). Penerapan transportasi ramah lingkungan *Electric Vehicle* (EV), terutama di kawasan perkotaan dan metropolitan; 17). Pengembangan pengetahuan dan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman sesuai karakteristik daerah di perkotaan, dan kepulauan; 18). Penanganan permukiman kumuh, peremajaan kota secara inklusif, serta permukiman kembali untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh.

Terwujudnya Kota Makassar menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dengan PDRB tertinggi di kawasan timur Indonesia, diukur melalui Indikator dan Target Kinerja, sebagai berikut:

Tabel 5.11
Indikator Utama Pembangunan dan Target Sasaran Pokok 8
Kota Makassar 2025-2045

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Baseline (2025)	Target Kinerja 2045
8. Terwujudnya Kota Makassar menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dengan PDRB tertinggi di Kawasan Timur Indonesia	15. Perkotaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	39. Kota Maju, Inklusif dan Berkelanjutan:		
		a. Proporsi Kontribusi PDRB Kota Makassar Terhadap PDB Nasional	1,17	1,53
		b. Proporsi Kontribusi PDRB Kota Makassar terhadap PDRB Provinsi Sul-Sel	34,75	33,3
		c. Rumah Tangga dengan akses hunian layak,	81,63	100
		d. Indeks Layanan Infrastruktur	78,69	94,09

5.2.9. Sasaran Pokok 9: Terwujudnya Makassar Kota Berkelanjutan yang didukung ketahanan terhadap bencana dan risiko perubahan iklim

Makassar kota berkelanjutan yang didukung dengan ketahanan terhadap bencana dan risiko perubahan iklim, terutama ditekankan pada pembangunan rendah karbon untuk mencapai penurunan emisi GRK, serta pembangunan berketahanan iklim untuk menekan potensi kerugian ekonomi akibat perubahan iklim. Dalam upaya mewujudkan Sasaran Pokok ini, difokuskan pada Arah Pembangunan “Lingkungan Hidup Berkualitas”, dan “Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim”, dengan arah kebijakan transformatif sebagai berikut:

15. Lingkungan Hidup Berkualitas

Arah Pembangunan ini merupakan perwujudan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup untuk peningkatan kualitas hidup, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, melalui upaya-upaya: Pengurangan Ancaman Keanekaragaman Hayati, Pemanfaatan Keberlanjutan Keanekaragaman Hayati, peningkatan kualitas lingkungan hidup, dan pengelolaan Sampah. Arah Kebijakan Transformasi untuk mewujudkan Lingkungan Hidup Berkualitas adalah: 1). Penguatan upaya pengelolaan dan perlindungan hutan bakau dan ekosistemnya; 2). Perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang kota dengan mempertimbangkan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup serta risiko bencana; 3). Peningkatan pelestarian dan perlindungan keanekaragaman hayati dan restorasi ekosistem terdegradasi; 4). Pelestarian dan perlindungan wilayah sungai dan badan air, dan penguatan/pemanfaatan jasa ekosistem lingkungan secara berkelanjutan berbasis kearifan lokal; 5). Penguatan pengendalian dan penegakan hukum lingkungan hidup; 6). Peningkatan penggunaan bibit rendah emisi dan penggunaan pupuk organik serta penerapan pertanian perkotaan berkelanjutan; 7). Perencanaan program konservasi dan restorasi yang berfokus pada pelestarian keanekaragaman hayati komoditas ekonomis penting dan endemik, dengan mempertimbangkan budaya setempat; 8). Penguatan pengendalian dan penegakan hukum implementasi tata ruang wilayah kota; 9). Perencanaan dan percepatan upaya penuntasan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota; 10). Peningkatan kualitas air, kualitas udara, pengelolaan limbah, dan tutupan lahan melalui

penerapan . . .

penerapan teknologi terkini dan terjangkau; 11). Meningkatkan dan mempercepat akses sanitasi aman kepada seluruh rumah terutama di kawasan pemukiman dan wilayah pulau; 12). Penyediaan akses sanitasi aman melalui sistem terpusat di wilayah perkotaan; 13). Pemenuhan akses air minum dan sanitasi aman, berkelanjutan secara inklusif; 14). Eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga melalui pemicuan perubahan perilaku masyarakat yang didukung oleh penyediaan sarana dan prasarana rantai layanan sanitasi yang aman; 15). Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir; 16). Peningkatan kualitas infrastruktur persampahan dan sistem pengelolaan air limbah; 17). Pengelolaan persampahan yang terpadu dari hulu hingga ke hilir dengan target pemilahan sampah sejak dari rumah tangga dengan peningkatan persentase sampah terangkut dan tertangani di TPST dengan berorientasi pada prinsip ekonomi sirkuler.

16. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Arah Pembangunan ini merupakan perwujudan Pembangunan rendah karbon dilakukan untuk mencapai penurunan emisi GRK secara kumulatif dari tahun 2010 hingga 2045, melalui upaya-upaya: penguatan kapasitas adaptasi dan mitigasi risiko bencana dan penurunan Emisi GRK (tahunan dan kumulatif). Arah Kebijakan Transformasi untuk mewujudkan Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim adalah: 1). Penguatan manajemen bencana, mencakup mitigasi struktural dan nonstruktural, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan adaptasi pemulihan terhadap bencana serta pemanfaatan teknologi berbasis tanggap bencana; 2). Pembangunan sistem peringatan dini multi-ancaman bencana terpadu dan inklusif melalui penerapan teknologi yang andal dan terintegrasi; 3). Pengembangan natural based solution untuk pengendalian banjir seperti perkuatan tanggul alami di sungai; 4). Pengembangan *Flood Forecasting Warning System*; 5). Mendukung perlindungan Makassar dari banjir kala ulang 100 tahun; 6). Pembangunan infrastruktur tanggap bencana yang selaras dengan kondisi lingkungan dan kemajuan teknologi dalam meminimalisir munculnya berbagai resiko akibat bencana alam dan perubahan iklim; 7). Pemerataan dan penguatan konektivitas wilayah dengan strategi adaptasi dampak perubahan iklim agar meminimalkan dampak negatif bencana dan tidak mendisrupsi aktivitas logistic dan perekonomian; 8). Penegakan standar keandalan bangunan serta peremajaan bangunan hunian yang berketahanan bencana dan iklim; 9). Peningkatan kapasitas pengelolaan sumber pendanaan inovatif berbasis lingkungan untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim; 10). Perlindungan wilayah tepi air dan pulau pulau kecil dari risiko abrasi; 11). Peningkatan kapasitas SDM yang adaptif terhadap perubahan iklim; 12). Peningkatan kapasitas pengelolaan sumber pendanaan inovatif berbasis lingkungan untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim; 13). Penguatan upaya pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan aksi mitigasi dan penurunan emisi GRK serta; 14). Penguatan implementasi pembangunan rendah karbon; 15). Pengembangan transportasi publik dan transportasi berkelanjutan serta elektrifikasi transportasi; 16). Penerapan efisiensi energi dan peningkatan pemanfaatan energi baru terbarukan, termasuk pengupayaan dekarbonisasi sumber energi; 17). Pengembangan natural based solution untuk melindungi, memulihkan dan mengelola lingkungan secara berkelanjutan.

Terwujudnya Kota Makassar yang resilien terhadap bencana dan perubahan iklim, diukur melalui Indikator dan Target Kinerja, sebagai berikut

Tabel 5.12
Indikator Utama Pembangunan dan Target Sasaran Pokok 9
Kota Makassar 2025-2045

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Baseline (2025)	Target Kinerja 2045
9. Terwujudnya Makassar Kota Berkelanjutan yang didukung ketahanan terhadap bencana dan risiko perubahan iklim	13. Lingkungan Hidup Berkualitas	40. Pengurangan Ancaman Keanekaragaman Hayati:		
		a. Proporsi Realisasi Penyaluran Pupuk Organik Terhadap Pupuk Kimia (%)	13,66	40,58
		Pemanfaatan Keberlanjutan Keanekaragaman Hayati:		
		a. Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	1.559	1.757
		b. Angka Konsumsi Ikan (kg/kapita)	77,18	130,14
		41. Kualitas Lingkungan Hidup:		
		a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	66,16	70,40
	b. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	7,88	74,85	
	c. Pengelolaan Sampah:			
	o Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	4,50	90	
	o Proporsi Rumah Tangga Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	100	100	
	14. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	42. Indeks Risiko Bencana	107	59
		43. Penurunan Emisi GRK Tahunan (%)	1,17	58,57

5.2.10. Sasaran Pokok 10: Terwujudnya Kota Makassar Yang Berdaya Saing Nasional dan Global

Makassar sebagai kota dengan daya saing daerah yang tinggi sehingga dapat menarik investor dan pelancong, memerlukan kombinasi dari kualitas manusia yang tinggi, dukungan infrastruktur yang mantap, stabilitas keamanan dan ketentraman yang terjaga, serta tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berintegritas. Dalam upaya mewujudkan Sasaran Pokok ini, difokuskan pada Arah Pembangunan “Daya Saing daerah Tinggi”, dengan arah kebijakan transformatif sebagai berikut:

17. Daya Saing Daerah Tinggi

Arah Pembangunan ini merupakan perwujudan makassar yang dapat merespons secara cepat dan tepat dinamika nasional maupun internasional, membuka dan memanfaatkan peluang untuk pengembangan ekonomi, penguatan kerja sama pembangunan, serta dapat meningkatkan peran dan citra makassar (*city branding*) di tingkat nasional maupun dunia internasional. Arah Kebijakan Transformasi untuk mewujudkan Daya Saing Daerah Tinggi, 1). Penataan kerangka regulasi dan kebijakan yang mendukung peningkatan kerjasama daerah; 2). Peningkatan daya saing dan kerjasama daerah dalam

skala . . .

skala regional, nasional dan global; 3). Penguatan kemampuan daerah, pemerintah dan komunitas dalam meminimalkan risiko terhadap gangguan atau krisis, serta memperkuat kapasitas untuk menghadapi dan pulih dari dampak yang ditimbulkan; 4). Peningkatan kemandirian fiskal daerah berfokus pada optimalisasi sumber Pendapatan Asli Daerah-termasuk optimalisasi pengelolaan BUMD dan kerjasama pemanfaatan aset pemerintah kota; 5). Penguatan kebijakan dan implementasi Pengelolaan Perolehan Peningkatan Nilai Kawasan/Land Value Capture sebagai inovasi pembiayaan yang mendukung pembangunan infrastruktur.

Terwujudnya Kota Makassar sebagai kota dengan daya saing yang tinggi, diukur melalui Indikator dan Target Kinerja, sebagai berikut

Tabel 5.13
Indikator Utama Pembangunan dan Target Sasaran Pokok 10
Kota Makassar 2025-2045

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Baseline (2025)	Target Kinerja 2045
10. Terwujudnya Kota Makassar Yang Berdaya Saing Nasional dan Global	17. Daya Saing Daerah Tinggi	44. Jumlah Kerjasama Kota Kembar/Bersaudara (<i>Sister City</i>)	1	5
		45. Indeks Daya Saing Daerah	3,94	4,49

Keterkaitan antara sasaran pokok, arah pembangunan berikut arah kebijakan transformasi, pembangunan jangka panjang Kota Makassar tahun 2045, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.14
Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, dan Arah Kebijakan Transformasi
Kota Makassar Tahun 2025-2045

Visi: Makassar Kota Dunia, Maju dan Berkelanjutan Yang Sombere' dan Smart Untuk Semua				
No	Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan Kota Makassar	Arah Kebijakan Transformatif
1.	Misi 1: Mewujudkan Transformasi Sosial	1. Terwujudnya Kota Makassar dengan kualitas manusia yang tinggi dan berdaya saing global	1. Kesehatan untuk Semua	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perluasan upaya promotif-preventif terhadap masalah kesehatan dan pembudayaan perilaku hidup sehat; 2. Penguatan upaya pencegahan, deteksi, pengobatan dan pengendalian penyakit termasuk masalah kesehatan yang dipengaruhi oleh iklim dengan integrasi teknologi dan inovasi; 3. Peningkatan kapasitas masyarakat di bidang kesehatan melalui penguatan literasi kesehatan untuk menguatkan pelayanan kesehatan dasar berbasis masyarakat serta pemberdayaan pegiat sistem kesehatan alami/tradisional (herbal) sebagai alternatif pelayanan kesehatan rumah tangga; 4. Penguatan dan perluasan upaya penyehatan lingkungan didukung oleh tata kota, serta sarana dan prasarana yang mendukung pola hidup sehat termasuk konektivitas transportasi, ruang terbuka, fasilitas aktivitas fisik dan olahraga, akses air minum aman, layanan sanitasi aman, serta permukiman sehat; 5. Peningkatan kualitas, pemenuhan kebutuhan dan pemerataan tenaga kesehatan yang terlatih; 6. Peningkatan akses secara inklusif terhadap layanan, fasilitas dan infrastruktur kesehatan yang berkualitas dan modern; 7. Perluasan penanggulangan permasalahan gizi makro dan gizi mikro, dan peningkatan nutrisi untuk 1000 hari pertama kehidupan secara inklusif; 8. Pencegahan dan penanganan stunting melalui pendekatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi secara konvergen; 9. Peningkatan edukasi di tingkat keluarga dan komunitas tentang pola makan dan gizi seimbang khususnya ibu hamil, bayi dan balita; 10. Percepatan eliminasi penyakit menular melalui rekayasa lingkungan habitat sektor dan pendekatan integrasi multisektor; 11. Percepatan pengurangan faktor risiko penyakit tidak menular secara terintegrasi lintas sektor;

12. Peningkatan . . .

No	Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan Kota Makassar	Arah Kebijakan Transformatif
				<p>12. Peningkatan upaya penemuan kasus dan pengobatan penyakit secara masif;</p> <p>13. Penyediaan pelayanan kesehatan bergerak (<i>mobile health services</i>), khususnya untuk wilayah pulau dengan moda yang sesuai dengan karakteristik alam;</p> <p>14. Pengembangan sistem telemedicine yang didukung oleh peningkatan cakupan jaminan kesehatan nasional;</p> <p>15. Perluasan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Mandiri secara masif dengan mendorong masyarakat yang bekerja di sektor informal untuk menjadi peserta JKN secara mandiri;</p> <p>16. Mendorong dan melakukan evaluasi terhadap partisipasi Perusahaan, IKM, dan UMKM untuk memastikan seluruh pekerja terdaftar sebagai peserta JKN, termasuk memberikan <i>reward and punishment</i> dalam pelaksanaannya.</p>
			2. Pendidikan Berkualitas yang Merata	<p>1. Peningkatan dan pemerataan kualitas antar satuan pendidikan untuk memastikan lulusan dengan kualitas yang setara dan tingkat kebermanfaatan tinggi;</p> <p>2. Pemerataan sebaran perpustakaan dan menjalin kemitraan dengan stakeholders terkait dalam penyediaan layanan perpustakaan yang lebih luas untuk memperluas jangkauan literasi masyarakat;</p> <p>3. Kampanye Gerakan Literasi Masyarakat untuk menciptakan budaya literasi di tengah masyarakat;</p> <p>4. Pengembangan perpustakaan digital (<i>e-library</i>) melalui pemanfaatan aplikasi/TIK sebagai bentuk transformasi digital termasuk perluasan akses terhadap karya-karya dan referensi karya tulis <i>online</i>;</p> <p>5. Perkuatan pengelolaan tenaga pendidik dengan meningkatkan kualitas dan kompetensi yang modern dan adaptif;</p> <p>6. Peningkatan pendidikan digital melalui inovasi pada berbagai kurikulum pendidikan berbasis TIK dan <i>Internet of Things (IoT)</i>;</p> <p>7. Pengembangan sistem pembelajaran jarak jauh melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), terutama untuk daerah kepulauan;</p> <p>8. Mendorong penerapan kurikulum yang mengintegrasikan pemahaman dan penggunaan kemampuan numerasi siswa dalam berbagai konteks kehidupan sehari-hari;</p> <p>9. Percepatan penuntasan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah) secara terintegrasi sesuai kewenangan pemerintah kabupaten/kota;</p>

No	Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan Kota Makassar	Arah Kebijakan Transformatif
				<ol style="list-style-type: none"> 10. Penguatan Pendidikan non-formal (kesetaraan) dan pengembangan pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) untuk meningkatkan akses terhadap pendidikan bagi dewasa dan anak tidak sekolah; 11. Penguatan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSD) sebagai dukungan untuk mencegah anak tidak sekolah khususnya dari keluarga kurang mampu; 12. Peningkatan kualitas dan kuantitas Sekolah Ramah Anak dan Sekolah Inklusif dengan tenaga pendidik berkualifikasi memadai dan adaptif dengan latar belakang dan kebutuhan peserta didik; 13. Pendampingan Anak Tidak Sekolah (tidak mampu bersekolah dan putus sekolah) oleh Pemerintah Daerah, Organisasi Masyarakat dan Komunitas melalui penguatan motivasi, dan rujukan ke sekolah atau program pendidikan kesetaraan yang sesuai; 14. Peningkatan kualitas serta kuantitas sumber daya manusia yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan lapangan usaha; 15. Pembangunan ekosistem riset dan inovasi, yang berbasis digital untuk mendukung pengembangan ekonomi hijau dan biru, termasuk untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja.
			3. Perlindungan Sosial yang Adaptif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanfaatan dan pemutakhiran rutin data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) dan basis data terkait lainnya untuk program pusat dan daerah agar tepat sasaran, terutama penentuan target, manfaat, dan pelaksanaan bantuan sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan masyarakat; 2. Peningkatan akses rumah layak huni, terjangkau dan berkelanjutan bagi penduduk berpenghasilan rendah; 3. Peningkatan kolaborasi antar Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan perumahan bersubsidi yang memenuhi standar keandalan bangunan; 4. Perencanaan dan penganggaran melalui APBD serta komitmen daerah yang lebih berpihak untuk program perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, melalui pemenuhan SPM sosial dan penciptaan lapangan kerja yang mengutamakan kegiatan pemberdayaan masyarakat; 5. Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui peningkatan kapasitas pelaku usaha, fasilitasi modal usaha, dan peningkatan produktivitas dan akses pasar termasuk <i>e-commerce</i>;

No	Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan Kota Makassar	Arah Kebijakan Transformatif
				<p>6. Perluasan dan pemerataan pemenuhan dan akses penduduk terhadap perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi lokal yang terintegrasi dengan penciptaan peluang kerja, dan memiliki cakupan yang inklusif termasuk wilayah kepulauan, didukung infrastruktur yang laik dan responsif;</p> <p>7. Peningkatan kemudahan akses peluang kerja dan peluang bisnis baru, termasuk usaha rintisan (<i>start-up</i>) terutama bagi rumah tangga miskin melalui perluasan lapangan usaha berbasis kewirausahaan dan ekonomi digital;</p> <p>8. Peningkatan kualitas pekerja dan calon pekerja dari masyarakat berpenghasilan rendah melalui pelatihan keterampilan berbasis masyarakat;</p> <p>9. Memperluas aksesibilitas kesempatan kerja di sektor formal bagi penyandang disabilitas melalui kebijakan yang mewajibkan Pemerintah Daerah, BUMD dan Perusahaan swasta mempekerjakan penyandang disabilitas sesuai peraturan perundang-undangan;</p> <p>10. Perluasan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan termasuk bagi pekerja bukan penerima upah dan kaum rentan dengan mendorong dan melakukan evaluasi terhadap partisipasi Perusahaan, IKM, dan UMKM untuk memastikan seluruh pekerja terdaftar sebagai peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja, termasuk memberikan <i>reward and punishment</i> dalam pelaksanaannya;</p> <p>11. Perluasan Kepesertaan Mandiri secara masif dengan mendorong masyarakat yang bekerja di sektor informal untuk menjadi peserta Jamsostek secara mandiri.</p>
2.	Misi 2: Mewujudkan Transformasi Ekonomi	2. Terwujudnya Kota Makassar dengan produktivitas ekonomi tinggi berbasis Iptekin dan Ekonomi Hijau	4. Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi Tinggi	<p>1. Peningkatan nilai tambah sektor industri pengolahan melalui pengembangan teknologi, inovasi dan efisiensi rantai pasok dan distribusi;</p> <p>2. Penguatan, peningkatan dan pengembangan industri pengolahan sebagai penunjang ekonomi pembangunan Ibu Kota Negara (IKN);</p> <p>3. Pembangunan, penataan dan peningkatan daya saing destinasi wisata secara berkelanjutan meliputi wisata bahari, wisata pulau, wisata budaya, wisata sejarah, dan wisata kuliner termasuk pengembangan wilayah alam (<i>eco-tourism</i>) sebagai sumber pertumbuhan ekonomi, didukung ketersediaan infrastruktur dan sumberdaya di bidang pariwisata;</p> <p>4. Pengembangan infrastruktur tepi air sebagai ruang publik sekaligus daya tarik destinasi Pariwisata yang dilengkapi dengan atraksi yang unik, amenitas, dan aksesibilitas yang baik, modern dan terintegrasi;</p>

No	Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan Kota Makassar	Arah Kebijakan Transformatif
				<ol style="list-style-type: none"> 5. Peningkatan pelaksanaan MICE, Event dan festival berskala nasional dan internasional; 6. Pendekatan yang komprehensif dan terencana dalam penguatan citra kota (<i>city branding</i>) sebagai upaya menciptakan persepsi positif dan mempromosikan Kota Makassar dengan pemanfaatan teknologi dan media sosial (portal resmi (<i>web site</i>), media sosial (<i>social media</i>), pemengaruh (<i>influencer</i>) dan aplikasi (<i>apps</i>); 7. Pengembangan industri ekonomi kreatif dengan penerapan TIK dan inovasi yang mendukung penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi dan menciptakan ekosistem bisnis yang dinamis dan berdaya saing; 8. Pengembangan sektor industri kreatif melalui peningkatan kapasitas pelaku usaha, fasilitasi modal usaha, dan peningkatan produktivitas dan akses pasar termasuk <i>e-commerce</i>; 9. Peningkatan kemudahan akses peluang kerja dan peluang bisnis baru, termasuk usaha rintisan (<i>start-up</i>) bagi industri kreatif melalui perluasan lapangan usaha berbasis kewirausahaan dan ekonomi digital; 10. Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha; 11. Penguatan kapasitas koperasi melalui penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi; 12. Peningkatan kinerja dan produktivitas BUMD melalui reformasi tata kelola (<i>good corporate governance</i>) yang lebih efektif dan efisien, serta kontribusi yang tinggi bagi Kota Makassar dan masyarakat; 13. Penerapan budidaya pertanian yang berkelanjutan untuk mencegah degradasi lahan; 14. Pelaksanaan <i>upskilling</i>, <i>reskilling</i> dan <i>newskilling</i> bagi angkatan kerja secara inklusif, terutama di bidang pariwisata, ekonomi kreatif dan industri; 15. Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas dan lansia melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam mengambil keputusan serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan; 16. Penguatan kesetaraan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan; 17. Peningkatan kualitas pekerja dan calon pekerja dari pencari kerja melalui pelatihan keterampilan berbasis masyarakat dengan prioritas masyarakat berpenghasilan rendah;

No	Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan Kota Makassar	Arah Kebijakan Transformatif
				<p>19. Penumbuhan dan peningkatan kapasitas <i>emerging sectors</i> (bioekonomi dan bioteknologi, pendidikan dan riset, serta manajemen sumber daya);</p> <p>20. Pengembangan kebijakan dan ekosistem yang mendukung pengembangan dan penerapan inovasi.</p>
			5. Penerapan Ekonomi Hijau	<p>1. Peningkatan penerapan praktik urban farming/pertanian perkotaan berkelanjutan berbasis keunggulan wilayah;</p> <p>2. Peningkatan kapasitas sumberdaya pelaku sektor ekonomi dalam praktik budidaya yang rendah karbon, cerdas iklim, dan produktif serta inklusif;</p> <p>3. Pengelolaan dan pemanfaatan lahan secara berkelanjutan;</p> <p>4. Peningkatan aksesibilitas terhadap pendanaan inovatif yang dapat mendukung kegiatan pembangunan menuju ekonomi hijau serta memfasilitasi berbagai kegiatan sektoral yang prioritas dan strategis.</p> <p>5. Penerapan kompensasi jasa lingkungan untuk mendorong perlindungan keanekaragaman hayati, mitigasi perubahan iklim dan perlindungan cadangan karbon sebagai upaya perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup</p>
		3. Terwujudnya Kota Makassar sebagai Hub Perdagangan Kawasan Timur Indonesia dan Internasional	6. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	<p>1. Penguatan integrasi dan konektivitas dengan intra dan antar kawasan pertumbuhan ekonomi.</p> <p>2. Peningkatan keterlibatan dan partisipasi para pelaku ekonomi dalam rantai pasok global (<i>global supply chain</i>);</p> <p>3. Peningkatan pangsa ekspor barang dan jasa bernilai tambah tinggi di pasar global melalui ekspansi ekspor ke negara yang memiliki potensi pertumbuhan penduduk dan konsumsi yang tinggi;</p> <p>4. Pemanfaatan ALKI II secara optimal untuk menghubungkan rantai pasok/nilai domestik dan global;</p> <p>5. Peningkatan keterkaitan ekonomi antar pusat-pusat pertumbuhan melalui penguatan keterkaitan rantai pasok antarwilayah, peningkatan kerja sama ekonomi dan promosi dagang antar daerah, serta mendorong partisipasi daerah dalam rantai pasok global.</p>

No	Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan Kota Makassar	Arah Kebijakan Transformatif
3.	Misi 3: Mewujudkan Transformasi Tata Kelola	4. Terwujudnya Makassar sebagai Kota Cerdas dengan pemerintahan yang profesional dan melayani	7. Tata Kelola yang Berintegritas, Adaptif dan Inovatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimasi dan harmonisasi regulasi, termasuk proses pra regulasi yang memadai di daerah; 2. Pembangunan dan pengembangan Big Data harmonisasi regulasi yang memiliki filter untuk harmonisasi; 3. Pengembangan <i>smart government</i> serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digitalSDM ASN Daerah, dan pengelolaan aset daerah; 4. Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital, melalui pengembangan sistem kerja berbasis <i>Human Networking Management</i>, dan pelembagaan manajerial dan optimalisasi arsitektur SPBE yang implementatif di seluruh perangkat daerah; 5. Penyediaan NGWF (<i>Firewall Jaringan</i>) dan WAF (<i>Firewall Aplikasi</i>) serta sarana dan prasarana pendukung monitoring keamanan data dan informasi; 6. Penguatan organisasi pemerintah berbasis fungsional government, peningkatan kualitas leadership bagi <i>top</i> dan <i>middle management</i>, dan institusionalisasi budaya kerja fungsional government; 7. Penguatan pengelolaan sumber daya dengan mempertimbangkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan dan kesejahteraan sosial serta kesinambungan antar periode pembangunan; 8. Peningkatan respon terhadap laporan masyarakat melalui pengembangan perangkat dan mekanisme respon cepat layanan publik yang inklusif menuju <i>zero complain</i>; 9. Penguatan sistem pelayanan publik satu pintu yang terintegrasi berbasis digital; 10. Peningkatan kompetensi dan perilaku petugas pemberi layanan publik agar lebih responsif; 11. Peningkatan akses dan kemudahan layanan publik untuk semua terutama bagi kelompok rentan dan disabilitas; 12. Penguatan penjaminan mutu (sertifikasi ISO) seluruh lembaga layanan publik yg disediakan pemerintah; 13. Perbaiki tata kelola pemerintahan termasuk penataan keuangan dan aset daerah untuk mewujudkan <i>good governance</i> dan kemandirian fiscal berbasis digital;

No	Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan Kota Makassar	Arah Kebijakan Transformatif
				<p>14. Pengawasan proses dan penguatan integritas tata kelola pengembangan karir, promosi mutasi ASN dan manajemen kinerja dengan pemanfaatan teknologi informasi;</p> <p>15. Transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan jasa-jasa; serta transparansi layanan perizinan berbasis digital;</p> <p>16. Peningkatan partisipasi masyarakat sipil yang inklusif dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan;</p> <p>17. Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah untuk pencapaian SPM dan prioritas daerah, serta mendukung pencapaian sasaran prioritas nasional;</p> <p>18. Perkuatan pengendalian pembangunan, melalui penerapan manajemen risiko;</p> <p>19. Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah.</p>
			8. Transformasi Digital	<p>1. Peningkatan layanan publik dengan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan secara terintegrasi;</p> <p>2. Penyediaan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang handal dan terjangkau di seluruh wilayah kota termasuk wilayah pulau;</p> <p>3. Peningkatan Literasi Digital Terpadu dan kemampuan SDM digital atau digital skill melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital, yang difokuskan pada pemahaman dan keterampilan penggunaan perangkat digital, navigasi internet, keamanan <i>online</i> dan siber.</p>
4.	Misi 4: Memantapkan Ketentraman dan Ketertiban Umum Yang Tangguh, dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	5. Terwujudnya Kota Makassar yang aman, tertib dan demokratis	9. Ketaatan Hukum, Ketertiban dan Keamanan Tangguh serta Demokrasi Substansial	<p>1. Pengembangan sistem keamanan dan ketertiban masyarakat yang adaptif, kolaboratif dan sinergi antara lembaga keamanan dan penegakan hukum, masyarakat yang partisipatif;</p> <p>2. Perwujudan stabilitas keamanan yang kondusif, bersih dan berkeadilan, serta penguatan implementasi dan penegakan kebijakan yang tegas dan konsisten;</p> <p>3. Penguatan kapasitas kelembagaan ketertiban dan ketentraman masyarakat dengan partisipasi masyarakat yang lebih bermakna;</p> <p>4. Optimalisasi penciptaan ruang publik yang sehat serta ruang dialog untuk penyelesaian konflik sosial;</p> <p>5. Peningkatan pengetahuan dan literasi masyarakat tentang politik dan demokrasi;</p> <p>6. Mendukung penguatan integritas partai politik di daerah;</p> <p>7. Peningkatan partisipasi publik dalam pemilihan kepala negara, pemilihan legislatif dan pemilihan kepala daerah;</p> <p>8. Peningkatan partisipasi yang inklusif dalam partai politik.</p>

No	Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan Kota Makassar	Arah Kebijakan Transformatif
		6. Terwujudnya Makassar sebagai kota tujuan utama investasi, menuju kemandirian fiskal daerah	10. Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui pengelolaan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), aset daerah, pemanfaatan pembiayaan alternatif, dan Transfer ke Daerah (TKD); 2. Mendorong kemandirian fiskal daerah melalui pencapaian rasio pajak daerah (<i>local tax ratio</i>) Kota Makassar minimal mencapai 3%; 3. Penguatan pengendalian inflasi daerah yang terkoordinasi dengan lintas <i>stakeholder</i> dan kabupaten /kota; 4. Perbaikan sistem tata kelola investasi daerah (pelayanan perizinan, regulasi, kepastian hukum, pajak dan retribusi) dan digitalisasi informasi potensi investasi daerah beserta infrastruktur pendukungnya; 5. Peningkatan aksesibilitas terhadap pendanaan inovatif yang dapat mendukung kegiatan pembangunan menuju ekonomi hijau serta memfasilitasi berbagai kegiatan sektoral yang prioritas dan strategis; 6. Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan <i>blended finance</i>; 7. Dukungan insentif fiskal, pendanaan hijau (<i>green financing</i>), pendanaan biru (<i>blue financing</i>), dan pembiayaan alternatif lainnya.
5.	Misi 5: Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	7. Terwujudnya Kota Makassar yang toleran, berketahanan sosial dan berkebudayaan maju didukung ketahanan ekologi yang tinggi	11 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	<ol style="list-style-type: none"> 1. Preservasi dan perlindungan warisan budaya dan penguatan kearifan lokal, serta pengembangan pendidikan karakter sejak dini; 2. Mendorong tumbuh dan berkembangnya kreativitas dan ide inovatif dalam pelestarian budaya, pengembangan kesenian daerah; 3. Peningkatan sinergitas antara lembaga/instansi untuk pemajuan kebudayaan, peningkatan intensitas pertunjukan seni dan pengembangan literasi budaya masyarakat; 4. Pembangunan ruang terbuka berbasis budaya dan kearifan lokal; 5. Penguatan pendidikan yang selaras dengan nilai-nilai keagamaan/spiritual dan pokok-pokok kerukunan antar etnis sejak usia dini sebagai landasan moral dan etika; 6. Penguatan aktualisasi nilai-nilai agama sebagai landasan spiritual, etika, dan moral dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan; 7. Penguatan kerukunan antar umat beragama;

No	Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan Kota Makassar	Arah Kebijakan Transformatif
			12. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan ketahanan kualitas keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal; 2. Pelembagaan pemenuhan hak dan penguatan sistem perlindungan anak secara efektif dan kolaboratif oleh pemerintah dan non pemerintah; 3. Pemenuhan hak dan perlindungan anak melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang; 4. Penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak melalui akses 24 jam setiap hari dalam seminggu (24/7) terhadap layanan darurat dan pengaduan, penanganan komprehensif oleh tenaga profesional mencakup tindak lanjut pengaduan, konseling, pendampingan, layanan kesehatan fisik dan mental serta rehabilitasi; 5. Peningkatan kompetensi dan daya saing pemuda agar mampu berkiprah dalam kancah nasional dan internasional; 6. Penguatan kapasitas lembaga kepemudaan yang diprioritaskan pada ketangguhan dan <i>resiliensi</i> pemuda dalam dinamika globalisasi; 7. Peningkatan kompetensi sumberdaya dan kelembagaan keolahragaan baik untuk olahraga prestasi dan olahraga masyarakat; 8. Penyelenggaraan event kepemudaan dan olahraga pemuda baik di tingkat daerah, maupun regional sebagai ajang pembinaan bakat sekaligus sarana pencarian bakat dan potensi atlet muda, melalui kemitraan dengan BUMN, Swasta dan <i>stakeholder</i> lainnya; 9. Peningkatan kualitas dan kuantitas Infrastruktur olahraga dan fasilitas kepemudaan sampai pada tingkat komunitas, didukung sarana olahraga yang dapat diakses dari berbagai kalangan untuk mendorong partisipasi luas dalam kegiatan olahraga dan kepemudaan; 10. Pembinaan dan pengembangan atlet muda dan pembinaan bakat olahraga sampai pada tingkat sekolah dan komunitas untuk menemukan talenta muda yang potensial didukung penyediaan fasilitas, pelatih berkualitas, dan akses ke kompetisi tingkat nasional atau internasional;

No	Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan Kota Makassar	Arah Kebijakan Transformatif
				<ol style="list-style-type: none"> 11. Pemenuhan hak dan perlindungan perempuan dalam situasi kekerasan berbasis gender, ketenagakerjaan, situasi darurat, rentan dan tindak pidana perdagangan orang, melalui penguatan kelembagaan, penyediaan infrastruktur yang aksesibel bagi semua, dan penegakan hukum yang berkeadilan menuju kesetaraan gender yang transformatif; 12. Pengintegrasian GEDSI (Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial) dalam perumusan dan pelaksana; 13. Pelembagaan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan, hingga pelaporan; 14. Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan.
			13. Berketahanan Energi dan Air dan Pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan ketahanan energi dengan pendekatan terpadu <i>Food Energy Water (FEW) Nexus</i>; 2. Pengembangan dan Pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan, untuk pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kapasitas energi listrik; 3. Pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; 4. Pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (<i>smart grid</i>) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; 5. Pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil (<i>isolated mini/micro-grid</i>) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; 6. Pengembangan elektrifikasi sektor transportasi; 7. Pengembangan penelitian dan peningkatan kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat, pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan kelistrikan yang diikuti kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan sesuai kewenangan pemerintah kota;

No	Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan Kota Makassar	Arah Kebijakan Transformatif
				<ol style="list-style-type: none"> 8. Pengembangan diversifikasi pangan untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang; 9. Penjaminan akses dan keterjangkauan pangan dan gizi terutama pada anak dalam periode 1000 hari pertama dalam kehidupan, masyarakat berpendapatan rendah, tinggal di wilayah pesisir dan pulau pulau kecil atau terkena dampak bencana; 10. Optimalisasi sumber daya air dan pengembangan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman terutama untuk wilayah pulau dan rawan air; 11. Pembangunan tampungan air serba guna yang memberikan manfaat secara cepat bagi kebutuhan air sehari-hari masyarakat; 12. Pengembangan pengetahuan dan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air; 13. Peningkatan efisiensi penggunaan air di semua sektor; 14. Perlindungan dan pemulihan ekosistem terkait sumberdaya air untuk menjamin keberlanjutan pasokan air dan meminimalisir risiko kerugian akibat bencana terkait air; 15. Mempercepat dan memperluas akses serta meningkatkan kualitas layanan air siap minum perpipaan dan akses sanitasi melalui sistem terpusat di wilayah perkotaan terutama Kawasan kumuh dan wilayah pulau; 16. Penguatan lembaga pelaksana penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang berkinerja baik dan optimal; 17. Peningkatan akses air minum yang aman, merata dan terjangkau, peningkatan mutu air dan peningkatan efisiensi penggunaan air; 18. Peningkatan keberlanjutan layanan dan efektivitas penggunaan sarana dan prasarana air minum.

No	Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan Kota Makassar	Arah Kebijakan Transformatif
6.	Misi 6: Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan Yang Merata dan Berkeadilan	8. Terwujudnya Kota Makassar menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dengan PDRB tertinggi di Kawasan Timur Indonesia	14. Perkotaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendukung pengembangan bandara utama Sultan Hasanuddin yang terintegrasi dengan pengembangan wilayah; 2. Peningkatan peran Kota Makassar dalam upaya peningkatan diversifikasi ekonomi yang inklusif berbasis digital; 3. Mendukung pengembangan pelabuhan Makassar sehingga dapat berperan sebagai hub komoditas untuk kawasan timur Indonesia; 4. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru, dengan konsep pembangunan <i>Transit Oriented Development</i> (TOD) yang mengintegrasikan tata ruang dan sistem transportasi, untuk mendukung pengembangan wilayah dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung; 5. Peningkatan daya saing sektor-sektor yang berkontribusi terhadap PDRB; 6. Optimalisasi lahan untuk penyediaan hunian vertikal (sewa dan milik) yang terpadu dengan layanan dasar permukiman, termasuk sistem transportasi publik; 7. Penerapan bauran pendanaan dalam meningkatkan akses pembiayaan perumahan masyarakat untuk memperoleh hunian layak, aman, terjangkau, dan berkelanjutan; 8. Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di Kawasan Industri dan kawasan strategis lainnya khususnya untuk pekerja; 9. Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau terutama bagi penduduk berpenghasilan rendah sesuai dengan karakteristik wilayah; 10. Peningkatan kolaborasi antar Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan perumahan bersubsidi yang memenuhi standar keandalan bangunan; 11. Pembangunan dan peningkatan kapasitas jalan daerah untuk mendukung integrasi rantai pasok domestik (menghubungkan sentra produksi dan pelabuhan/bandara); 12. Pengembangan transportasi perkotaan termasuk sistem angkutan umum massal perkotaan di Wilayah Metropolitan Makassar yang andal serta modern dalam melayani mobilitas penumpang; 13. Peningkatan konektivitas antara daratan dengan pulau, serta wilayah berbatasan;

No	Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan Kota Makassar	Arah Kebijakan Transformatif
				14. Mendukung percepatan perwujudan jalur kereta antar kota Makassar - Parepare, serta pengembangan kereta angkutan barang terpadu dengan pengembangan kawasan, simpul transportasi utama (pelabuhan), dan fasilitas antarmoda; 15. Mendukung percepatan pembangunan jalan tol; 16. Penerapan transportasi ramah lingkungan <i>Electric Vehicle</i> (EV), terutama di kawasan perkotaan dan metropolitan; 17. Pengembangan pengetahuan dan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman sesuai karakteristik daerah di perkotaan, dan kepulauan; 18. Penanganan permukiman kumuh, peremajaan kota secara inklusif, serta permukiman kembali untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh;
7.	Misi 7: Mewujudkan Sarana dan Prasarana Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	9. Terwujudnya Makassar Kota Berkelanjutan yang didukung ketahanan terhadap bencana dan risiko perubahan iklim	15. Lingkungan Hidup Berkualitas	1. Penguatan upaya pengelolaan dan perlindungan hutan bakau dan ekosistemnya; 2. Perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang kota dengan mempertimbangkan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup serta risiko bencana; 3. Peningkatan pelestarian dan perlindungan keanekaragaman hayati dan restorasi ekosistem terdegradasi; 4. Pelestarian dan perlindungan wilayah sungai dan badan air, dan penguatan/pemanfaatan jasa ekosistem lingkungan secara berkelanjutan berbasis kearifan lokal; 5. Penguatan pengendalian dan penegakan hukum lingkungan hidup; 6. Peningkatan penggunaan bibit rendah emisi dan penggunaan pupuk organik serta penerapan pertanian perkotaan berkelanjutan; 7. Perencanaan program konservasi dan restorasi yang berfokus pada pelestarian keanekaragaman hayati komoditas ekonomis penting dan endemik, dengan mempertimbangkan budaya setempat; 8. Penguatan pengendalian dan penegakan hukum implementasi tata ruang wilayah kota; 9. Perencanaan dan percepatan upaya penuntasan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota; 10. Peningkatan kualitas air, udara pengelolaan limbah, dan tutupan lahan melalui penerapan teknologi terkini dan terjangkau; 11. Meningkatkan dan mempercepat akses sanitasi aman kepada seluruh rumah terutama di kawasan pemukiman dan wilayah pulau; 12. Penyediaan akses sanitasi aman melalui sistem terpusat di wilayah perkotaan;

No	Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan Kota Makassar	Arah Kebijakan Transformatif
				<ul style="list-style-type: none"> 13. Pemenuhan akses air minum dan sanitasi aman, berkelanjutan dan inklusif; 14. Eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga melalui pemicuan perubahan perilaku masyarakat yang didukung oleh penyediaan sarana dan prasarana rantai layanan sanitasi yang aman; 15. Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir; 16. Peningkatan kualitas infrastruktur persampahan dan sistem pengelolaan air limbah; 17. Pengelolaan persampahan yang terpadu dari hulu hingga ke hilir dengan target pemilahan sampah sejak dari rumah tangga dengan peningkatan persentase sampah terangkut dan tertangani di TPST dengan berorientasi pada prinsip ekonomi sirkuler.
			16. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penguatan manajemen bencana, mencakup mitigasi struktural dan nonstruktural, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan adaptasi pemulihan terhadap bencana serta pemanfaatan teknologi berbasis tanggap bencana; 2. Pembangunan sistem peringatan dini multi-ancaman bencana terpadu dan inklusif melalui penerapan teknologi yang andal dan terintegrasi; 3. Pengembangan natural based solution untuk pengendalian banjir seperti perkuatan tanggul alami di sungai; 4. Pengembangan <i>Flood Forecasting Warning System</i>; 5. Mendukung perlindungan Makassar dari banjir kala ulang 100 tahun; 6. Pembangunan infrastruktur tanggap bencana yang selaras dengan kondisi lingkungan dan kemajuan teknologi dalam meminimalisir munculnya berbagai resiko akibat bencana alam dan perubahan iklim; 7. Pemerataan dan penguatan konektivitas wilayah dengan strategi adaptasi dampak perubahan iklim agar meminimalkan dampak negatif bencana dan tidak mendisrupsi aktivitas logistic dan perekonomian; 8. Penegakan standar keandalan bangunan serta peremajaan bangunan hunian yang berketahanan bencana dan iklim; 9. Peningkatan kapasitas pengelolaan sumber pendanaan inovatif berbasis lingkungan untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim; 10. Perlindungan wilayah tepi air dan pulau pulau kecil dari risiko abrasi; 11. Peningkatan kapasitas SDM yang adaptif terhadap perubahan iklim;

No	Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan Kota Makassar	Arah Kebijakan Transformatif
				12. Peningkatan kapasitas pengelolaan sumber pendanaan inovatif berbasis lingkungan untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim; 13. Penguatan upaya pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan aksi mitigasi dan penurunan emisi GRK serta; 14. Penguatan implementasi pembangunan rendah karbon; 15. Pengembangan transportasi publik dan transportasi berkelanjutan serta elektrifikasi transportasi; 16. Penerapan efisiensi energi dan peningkatan pemanfaatan energi baru terbarukan, termasuk pengupayaan dekarbonisasi sumber energi. 17. Pengembangan natural based solution untuk melindungi, memulihkan dan mengelola lingkungan secara berkelanjutan
8.	Misi 8: Meningkatkan Daya Saing Daerah Untuk Kesenambungan Pembangunan	10. Terwujudnya Makassar sebagai Kota dengan Daya Saing Daerah yang tinggi	17. Daya Saing Daerah Tinggi	1. Penataan kerangka regulasi dan kebijakan yang mendukung peningkatan kerjasama daerah; 2. Peningkatan daya saing dan kerjasama daerah dalam skala regional, nasional dan global; 3. Penguatan kemampuan daerah, pemerintah dan komunitas dalam meminimalkan risiko terhadap gangguan atau krisis, serta memperkuat kapasitas untuk menghadapi dan pulih dari dampak yang ditimbulkan; 4. Peningkatan kemandirian fiskal daerah berfokus pada optimalisasi sumber Pendapatan Asli Daerah-termasuk optimalisasi pengelolaan BUMD dan kerjasama pemanfaatan aset pemerintah kota. 5. Penguatan kebijakan dan implementasi pengelolaan perolehan Peningkatan Nilai Kawasan/Land Value Capture sebagai inovasi pembiayaan yang mendukung pembangunan infrastruktur.

Sasaran Pokok RPJPD 2025-2045 merupakan gambaran rangkaian kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan terwujudnya Visi dan Misi. Sasaran pokok merupakan kuantifikasi visi dan misi pada akhir periode RPJPD Kota Makassar berupa target-target pembangunan jangka panjang, pada setiap tahapan pembangunan untuk 5 (lima) tahunan, yang dibuat pada tiap butir misi untuk menjelaskan fokus dan keterkaitannya melalui indikator beserta target kinerjanya guna menjelaskan sasaran pokok dimaksud selama 20 (dua puluh) tahun.

10 (Sepuluh) Sasaran Pokok pembangunan jangka panjang Kota Makassar, pencapaiannya akan diukur melalui Indikator Utama Pembangunan (IUP) Kota Makassar yang berjumlah 45 (empat puluh lima). Indikator utama pembangunan Daerah harus selaras dengan RPJPD Provinsi, dengan melengkapi *baseline* data tahun 2023 dan tahun 2025 serta target tahun 2045, yang disajikan melalui tabel keselarasan sebagai berikut:

Tabel 5.15

Penyelarasan Indikator Utama Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan dan Indikator Utama Pembangunan Kota Makassar Menurut Arah Pembangunan Kota Makassar 2025-2045

No	Arah Pembangunan Kota Makassar	Indikator Utama Pembangunan Provinsi Sul-Sel			Indikator Utama Pembangunan Kota Makassar			
		Indikator	Target		Indikator Utama Pembangunan	Capaian 2023	Target	
			2025	2045			2025	2045
1.	Kesehatan untuk Semua	1. Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	73,79	79,18	1. Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	72,60	73,09	77,99
		2. Kesehatan Ibu dan Anak:			2. Kesehatan Ibu dan Anak:			
		a. Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	140	16	a. Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	76,67	75	68
		b. Persentase persalinan di fasilitas kesehatan	-	-	b. Persentase persalinan di fasilitas kesehatan (%)	100	100	100
		c. Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	23,9	6,1	c. Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	25,6	18,8	6,1
		3. Penanganan Tuberkulosis:			3. Penanganan Tuberkulosis:			
		a. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>) (%)	79	95	a. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>) (%)	25,91	50	90,00
		b. Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>) (%)	91,54	98	b. Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>) (%)	82,09	83	90
		4. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	98	99,5	4. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	99,43	100	100

No	Arah Pembangunan Kota Makassar	Indikator Utama Pembangunan Provinsi Sul-Sel		Indikator Utama Pembangunan Kota Makassar				
		Indikator	Target		Indikator Utama Pembangunan	Capaian 2023	Target	
			2025	2045			2025	2045
2.	Pendidikan Berkualitas yang Merata	5. a. Persentase Kab/Kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: i) Literasi Membaca ii) Numerasi	8,33 - 12,50 0,00 - 4,17	66,67 - 70,83 59,33 - 62,50	5. a. Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional di Kota Makassar untuk: i) Literasi Membaca (%) ii) Numerasi (%) b. Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (Tahun) c. Harapan Lama Sekolah (Tahun)	78,29 78,29 11,56 15,61	98,00 98,00 11,79 15,72	100 100 15,00 18,00
		b. Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: i) Literasi Membaca ii) Numerasi	31,61 - 25,30 -	69,55 - 71,55 61,50 - 63,50				
		c. Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (Tahun) d. Harapan Lama Sekolah	9,47 13,80 - 13,81	11,97 - 12,02 15,27 - 15,31				
		6. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	12,81	12,81 - 13,96	6. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	21,91	22,01	23,06
		7. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke atas yang bekerja menurut pendidikan tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	76,58	90	7. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke atas yang bekerja menurut pendidikan tinggi yang ditamatkan (%)	28,37	29,63	43,93

No	Arah Pembangunan Kota Makassar	Indikator Utama Pembangunan Provinsi Sul-Sel			Indikator Utama Pembangunan Kota Makassar			
		Indikator	Target		Indikator Utama Pembangunan	Capaian 2023	Target	
			2025	2045			2025	2045
3.	Perlindungan Sosial yang Adaptif	8. Tingkat Kemiskinan (%)	7,30 - 7,89	0,19 - 0,69	8. a. Tingkat Kemiskinan (%)	5,07	3,93	1,57
					b. Indeks Gini	0,387	0,383	0,343
		9. Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)	44,5 - 45,0	79,22	9. Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)	40,04	40,15	43,45
		10. Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	20	50	10. Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	46,04	57,39	100
4.	Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi Tinggi	11. Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	12,95 - 13,05	18,62 - 19,92	11. Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	18,83	18,86	25,87
		12. Pengembangan Pariwisata:			12. Pengembangan Pariwisata:			
		a. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	1,51	2,4	a. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	2,14	2,17	2,29
		b. Jumlah Tamu Wisatawan			b. Jumlah Tamu Wisatawan			
		o Mancanegara (Hotel Berbintang) (Ribu Orang)	78,22	195,55	o Domestik (Orang)	4.431.826	4.742.414	6.395.913
		o Mancanegara (Orang)			17.360	18.828	33.513	
		13. Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif provinsi terhadap PDB Ekonomi Kreatif (%)	2,68	2,97	13. Jumlah Industri Ekonomi Kreatif Kota Makassar	4.220	5.118	11.078

No	Arah Pembangunan Kota Makassar	Indikator Utama Pembangunan Provinsi Sul-Sel			Indikator Utama Pembangunan Kota Makassar			
		Indikator	Target		Indikator Utama Pembangunan	Capaian 2023	Target	
			2025	2045			2025	2045
		14. Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD:			14. Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD:			
		a. Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah Non Pertanian pada Level Provinsi	10,24	13,08				
		b. Proporsi jumlah industri kecil dan menengah pada level Provinsi (%)	1,46	3,38	a. Jumlah industri kecil dan menengah di Kota Makassar	14.904	18.034	120.451
		c. Rasio Kewirausahaan Provinsi (%)	3,53	10,02	b. Persentase Koperasi sehat di Kota Makassar (%)	53,59	25,00	45,00
		d. Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (%)	0,75	4,82	c. <i>Return on Asset</i> (ROA) BUMD (%)	1,89	2,06	8,36
		e. <i>Return on Asset</i> (ROA) BUMD (%)	0,97	5,62	d. Produktivitas Padi (Ton/Hektar)	-	6,77	8,41
		f. Nilai Tukar Petani Pangan	98	115 - 117	e. Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ribuan Ton/Tahun)	20.770	21.401	28.823
		g. Nilai Tukar Nelayan	112	120 - 122				
		15. a. Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi (%)	3,80 - 4,10	2,63 - 3,64	15. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	10,6	8,53	5,33
		b. Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	39	80				
		16 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	54,3	64,7	16 a. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	58,72	60,02	66,73
					b. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	NA	42,98	44,81
		17. Tingkat Penguasaan IPTEK:			17. Tingkat Penguasaan IPTEK:			
		a. Indeks Kapabilitas Inovasi	3,8	4,5 - 4,9	a. Indeks Kapabilitas Inovasi	4,41	4,51	5,00

No	Arah Pembangunan Kota Makassar	Indikator Utama Pembangunan Provinsi Sul-Sel			Indikator Utama Pembangunan Kota Makassar			
		Indikator	Target		Indikator Utama Pembangunan	Capaian 2023	Target	
			2025	2045			2025	2045
5.	Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru	18. Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru: a. Indeks Ekonomi Hijau b. Porsi EBT dalam bauran energi primer	67,80 53,85	77,03 79,69	18. Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru: a. Indeks Ekonomi Hijau	55,1	51,4	100,00
6.	Transformasi Digital	19. a. Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	6	7,7	19. Persentase Layanan Publik Yang Diselenggarakan Secara <i>Online</i> dan Terintegrasi (%)	41	45	95
7.	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	20. Koefisien variasi harga antar wilayah tingkat provinsi	8,67	5,25	20. Persentase koefisien variasi harga antar waktu barang kebutuhan pokok (%)	10,53	10,21	7,30
		21. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	38,07	5,25	21. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	46,63	49,72	51,67
		22. Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	6,8	12,9	22. Net Ekspor Barang dan Jasa	-14.047,94	-13.936,03	1.787,52

No	Arah Pembangunan Kota Makassar	Indikator Utama Pembangunan Provinsi Sul-Sel			Indikator Utama Pembangunan Kota Makassar			
		Indikator	Target		Indikator Utama Pembangunan	Capaian 2023	Target	
			2025	2045			2025	2045
8.	Perkotaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	23. Kota dan desa Maju, Inklusif dan Berkelanjutan:			23. Kota Maju, Inklusif dan Berkelanjutan:			
		a. Proporsi Kontribusi PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional	1,47	1,81	a. Proporsi Kontribusi PDRB Kota Makassar Terhadap PDB Nasional (%)	1,09	1,17	1,53
		b. Rumah Tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	77,5	100	b. Proporsi Kontribusi PDRB Kota Makassar terhadap PDRB Provinsi Sul-Sel (%)	34,67	34,67	28,80
		c. Persentase Desa Mandiri	0,75	9,93	c. Rumah Tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	79,88	81,63	100
				d. Indeks Layanan Infrastruktur	76,92	78,69	94,09	
9.	Tata Kelola yang Berintegritas, Adaptif dan Inovatif	24. Indeks Reformasi Hukum	79,9	100	24. Indeks Reformasi Hukum	97,23	98,02	100
		25. Indeks SPBE	3,2	5	25.a. Indeks SPBE	3,41	3,85	4,65
					b. Indeks Reformasi Birokrasi	77,30	79,97	100
		26. Indeks Pelayanan Publik	4,41	5	26. Indeks Pelayanan Publik	3,86	4,05	5,00
				27.a. Indeks Survey Penilaian Integritas	73,11	75,55	100	
				b. Nilai MCP KPK	82,31	84,52	100	
				c. Indeks Maturitas SPIP	3,26	3,42	5,00	

No	Arah Pembangunan Kota Makassar	Indikator Utama Pembangunan Provinsi Sul-Sel			Indikator Utama Pembangunan Kota Makassar			
		Indikator	Target		Indikator Utama Pembangunan	Capaian 2023	Target	
			2025	2045			2025	2045
10.	Ketaatan Hukum, Ketertiban dan Keamanan Tangguh serta Demokrasi Substansial	28. a. Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah (%)	70	100	28. a. Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (%)	100	100	100
					b. Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah (%)	100	100	100
		29. Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya	64,53	81,91	29. Persentase Tindak Kriminal Yang Ditangani (%)	53,04	55,03	90
		30. Indeks Demokrasi Provinsi	Tinggi	Tinggi	30. a. Persentase Perempuan Terpilih Terhadap Total Anggota DPRD (%)	26,0	16,0	30,0
					b. Perda Yang Merupakan Inisiatif DPRD (Perda)	10	9	12
					c. Persentase Perempuan Pengurus Partai Politik (%)	31,4	31,6	40,0

No	Arah Pembangunan Kota Makassar	Indikator Utama Pembangunan Provinsi Sul-Sel			Indikator Utama Pembangunan Kota Makassar			
		Indikator	Target		Indikator Utama Pembangunan	Capaian 2023	Target	
			2025	2045			2025	2045
11.	Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	31. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0,6	0,9	31. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0,60	0,75	2,00
		32. Tingkat Inflasi (%)	3,2 – 3,8	1,1 - 3,2	32. Tingkat Inflasi Gabungan (%)	2,89	3,16	2,17
		33. Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan			33. Pertumbuhan Investasi Daerah (%)	48,67	8,75	11,20
		a. Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)	23,54	61,6				
		b. Aset Dana Pensiun/PDRB (%)	0,13	2,91				
	c. Nilai Transaksi Saham Per Kapita per Provinsi (Rp)	2.718.532,8	29.931.570,98					
	d. Total Kredit/PDRB (%)	24,2	58,4					
	34. Inklusi Keuangan (%)	94,46	99,04	34. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	-	61,15	84,00	
12.	Daya Saing Daerah Tinggi	35. Persentase Kerjasama Daerah Yang Ditindaklanjuti	60	90	35. Jumlah Kerjasama Kota Kembar/Bersaudara (<i>Sister City</i>)	1	1	5
		36. Indeks Ketahanan Nasional	3,04	4,04	36. Indeks Daya Saing Daerah	3,91	3,94	4,49
13.	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	37. Indeks Pembangunan Kebudayaan	56,43 - 56,51	65,44 – 66,14	37. Persentase benda, bangunan, struktur, dan situs cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi (%)	14,51	14,51	15,54
		38. Indeks Kerukunan Umat Beragama	77,14-77,16	84,61 - 84,83	38. Persentase kegiatan keagamaan yang mendapat dukungan/ fasilitasi oleh Pemerintah Daerah (%)	1,06	1,15	2,00

No	Arah Pembangunan Kota Makassar	Indikator Utama Pembangunan Provinsi Sul-Sel			Indikator Utama Pembangunan Kota Makassar			
		Indikator	Target		Indikator Utama Pembangunan	Capaian 2023	Target	
			2025	2045			2025	2045
14.	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif	39. a. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	70,34 - 70,35	75,33 - 75,42	39. a. Indeks Pembangunan Keluarga	84,85	85,95	98,95
		b. Indeks Perlindungan Anak	61,37-62,48	75 - 85	b. Indeks Perlindungan Anak	66,08	69,44	96,44
		c. Indeks Pembangunan Pemuda	54,67-55,42	69 - 75	c. Indeks Pembangunan Pemuda	NA	54,50	64,17
		40. Indeks Ketimpangan Gender	0,348-0,344	0,163-0,122	40. Indeks Ketimpangan Gender	0,186	0,179	0,120
15.	Lingkungan Hidup Berkualitas	41. Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	0,537	0,634	41. Pengurangan Ancaman Keanekaragaman Hayati:			
					a. Proporsi Realisasi Penyaluran Pupuk Organik Terhadap Pupuk Kimia (%)	4,30	13,66	40,58
					Pemanfaatan Keberlanjutan Keanekaragaman Hayati:			
		a. Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)			1.528	1.559	1.757	
		b. Angka Konsumsi Ikan (kg/kapita)			71,50	77,18	130,14	

No	Arah Pembangunan Kota Makassar	Indikator Utama Pembangunan Provinsi Sul-Sel		Indikator Utama Pembangunan Kota Makassar				
		Indikator	Target		Indikator Utama Pembangunan	Capaian 2023	Target	
			2025	2045			2025	2045
		42. Kualitas Lingkungan Hidup:			42. Kualitas Lingkungan Hidup:			
		a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	77,6	84,75	a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	65,74	66,16	70,40
		b. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	12,83	60	b. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	5,70	7,88	74,85
		c. Pengelolaan Sampah:			c. Pengelolaan Sampah:			
		o Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	11	90	o Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah(%)	4,16	4,50	90
		o Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	35	100	o Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	100	100	100

No	Arah Pembangunan Kota Makassar	Indikator Utama Pembangunan Provinsi Sul-Sel		Indikator Utama Pembangunan Kota Makassar				
		Indikator	Target		Indikator Utama Pembangunan	Capaian 2023	Target	
			2025	2045			2025	2045
16.	Berketahanan Energi dan Air dan Pangan	43. Ketahanan Energi, Air dan Pangan			43. Ketahanan Energi, Air dan Pangan			
		a. Ketahanan Energi:			a. Ketahanan Energi:			
		o Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)	1.680	5.335	o Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)	1.565	1.627	2.381
		o Intensitas Energi Primer (SBM/Rp Milyar)	298	338				
		b. Ketahanan Pangan:			b. Ketahanan Pangan:			
		o Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (%)	7,05	0,42	o Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (%)	5,18	4,57	1,10
					o Indeks Ketahanan Pangan	89,28	84,98	90,66
					o Skor Pola Pangan Harapan	89,60	86,24	93,32
		c. Ketahanan Air:			c. Ketahanan Air:			
		o Kapasitas Air Baku (m ³ /detik)	3,3	12,26	o Kapasitas Air Baku (m ³ /detik)	3,26	3,35	10,27
		o Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	42,01	100	o Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	28,49	45,66	100

No	Arah Pembangunan Kota Makassar	Indikator Utama Pembangunan Provinsi Sul-Sel			Indikator Utama Pembangunan Kota Makassar			
		Indikator	Target		Indikator Utama Pembangunan	Capaian 2023	Target	
			2025	2045			2025	2045
17.	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	44. Indeks Risiko Bencana	150,07	122,30 - 98,59	44. Indeks Risiko Bencana	119,49	107	59
		45. Penurunan Emisi GRK Tahunan (%) a. Kumulatif b. Tahunan	6,53 12,82	32,56 69,93	45. Penurunan Emisi GRK Tahunan (%)	N.A	1,17	58,57

10 (Sepuluh) Sasaran Pokok pembangunan jangka panjang Kota Makassar, keterukuran pencapaiannya akan diukur melalui indikator Indikator Utama Pembangunan Daerah yang merupakan alat ukur untuk melihat pencapaian dari tujuan pembangunan daerah serta kontribusi terhadap tujuan pembangunan jangka panjang Nasional maupun Provinsi Sulawesi Selatan. Indikator Utama Pembangunan (IUP) Kota Makassar berjumlah 45 (empat puluh lima) penetapan target lima tahunan dari setiap indikator, sebagaimana yang tercantum pada matrik berikut:

Tabel 5.16

Sasaran Pokok dan Indikator Utama Pembangunan dan Target Berdasarkan Tahapan Pembangunan Kota Makassar 2025-2045

Visi: Makassar Kota Dunia, Maju dan Berkelanjutan Yang Sombere' dan Smart Untuk Semua								
Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Baseline (2025)	Target Kinerja Pembangunan				Capaian Akhir Kinerja
				2029	2034	2039	2045	
1. Terwujudnya Kota Makassar dengan kualitas manusia yang tinggi dan berdaya saing global	1. Kesehatan untuk Semua	1. Usia Harapan Hidup (UHH) (Tahun)	73,09	74,07	75,29	76,52	77,99	77,99
		2. Kesehatan Ibu dan Anak:						
		a. Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	75	74	72	70	68	68
		b. Persentase persalinan di fasilitas kesehatan (%)	100	100	100	100	100	100
		c. Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	18,8	16,2	12,4	9,9	6,1	6,1
		3. Penanganan Tuberkulosis:						
		a. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>)	50	70	90	90	90	90
b. Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>) (%)	83	85	90	90	90	90		
		4. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	100	100	100	100	100	100

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Baseline (2025)	Target Kinerja Pembangunan				Capaian Akhir Kinerja	
				2029	2034	2039	2045		
	2. Pendidikan Berkualitas yang Merata	5. a. Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional di Kota Makassar untuk: i) Literasi Membaca (%) ii) Numerasi (%)	98	100	100	100	100	100	
			98	100	100	100	100	100	
			11,79	12,37	13,32	14,52	15,00	15,00	
		3. Perlindungan Sosial yang Adaptif	8. a. Tingkat Kemiskinan (%)	3,93	3,34	2,75	2,16	1,57	1,57
	b. Indeks Gini		0,383	0,373	0,363	0,353	0,343	0,343	
9. Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)	40,15		40,49	41,14	42,04	43,45	43,45		
		10. Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	57,39	80	90	100	100	100	

2. Terwujudnya . . .

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Baseline (2025)	Target Kinerja Pembangunan				Capaian Akhir Kinerja
				2029	2034	2039	2045	
2. Terwujudnya Kota Makassar dengan produktivitas ekonomi tinggi berbasis Iptekin dan Ekonomi Hijau	4. Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi Tinggi	11. Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	18,86	20,26	21,53	22,60	25,87	25,87
		12. Pengembangan Pariwisata:						
		a. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	2,17	2,20	2,23	2,26	2,29	2,29
		b. Jumlah Tamu Wisatawan						
		o Domestik (Orang)	4.742.414	5.099.788	5.492.829	5.924.538	6.395.913	6.395.913
		o Mancanegara (Orang)	18.828	22.500	26.171	29.842	33.513	33.513
		13. Jumlah Industri Ekonomi Kreatif di Kota Makassar	5.118	6.310	7.800	9.290	11.078	11.078
		14. Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD:						
		a. Jumlah industri kecil dan menengah di Kota Makassar	18.034	26.403	53.107	106.816	120.451	120.451
		b. Persentase Koperasi sehat di Kota Makassar (%)	25,00	30,00	35,00	40,00	45,00	45,00
c. <i>Return on Asset</i> (ROA) BUMD (%)	2,06	2,81	4,67	6,52	8,36	8,36		
d. Produktivitas Padi (Ton/Hektar)	6,77	7,18	7,59	8,00	8,41	8,41		
e. Jumlah produksi perikanan tangkap (Ribuan Ton/Tahun)	21.401	22.714	24.470	26.362	28.823	28.823		
15. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	8,53	7,77	6,79	5,69	5,33	5,33		
16. a. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	60,02	61,70	63,37	65,05	66,73	66,73		
b. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	42,98	43,44	43,90	44,35	44,81	44,81		
17. Tingkat Penguasaan IPTEK:								
a. Indeks Kapabilitas Inovasi	4,51	4,70	4,87	4,98	5,00	5,00		

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Baseline (2025)	Target Kinerja Pembangunan				Capaian Akhir Kinerja
				2029	2034	2039	2045	
	5. Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru	18. Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru: a. Indeks Ekonomi Hijau	51,4	66,6	81,8	96,9	100,00	100,00
3. Terwujudnya Kota Makassar sebagai Hub Perdagangan Kawasan Timur Indonesia dan Internasional	6. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	19. Persentase Koefisien variasi harga antar waktu barang kebutuhan pokok (%)	10,21	9,48	8,75	8,03	7,30	7,30
		20. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	49,72	50,21	50,69	51,18	51,67	51,67
		21. Net Ekspor Barang dan Jasa	-13.936,03	-7.211,86	-3.369,21	-1.527,33	1.787,52	1.787,52
4. Terwujudnya Makassar sebagai Kota Cerdas dengan pemerintahan yang profesional dan melayani	7. Tata Kelola yang Berintegritas, Adaptif dan Inovatif	22. Indeks Reformasi Hukum	98,02	99,60	100	100	100	100
		23. a. Indeks SPBE b. Indeks Reformasi Birokrasi	3,85	4,05	4,25	4,45	4,65	4,65
			79,97	85,31	91,99	98,66	100,00	100,00
		24. Indeks Pelayanan Publik	4,05	4,43	4,91	5,00	5,00	5,00
		25. a. Indeks Survey Penilaian Integritas b. Nilai MCP KPK c. Indeks Maturitas SPIP	75,55	80,44	86,55	92,67	100,00	100,00
	84,52		88,94	94,47	100	100	100	
	3,42	3,74	4,13	4,53	5,00	5,00		
8. Transformasi Digital	26. Persentase Layanan Publik Yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi (%)	45	50	60	75	95	95	

5. Terwujudnya . . .

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Baseline (2025)	Target Kinerja Pembangunan				Capaian Akhir Kinerja
				2029	2034	2039	2045	
5. Terwujudnya Kota Makassar yang aman, tertib dan demokratis	9. Ketaatan Hukum, Ketertiban dan Keamanan Tangguh serta Demokrasi Substansial	27. a. Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (%)	100	100	100	100	100	100
		b. Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah (%)	100	100	100	100	100	100
		28. Persentase Tindak Kriminal Yang Ditangani (%)	55,03	59,01	68	78	90	90
		29. a. Persentase Perempuan Terpilih Terhadap Total Anggota DPRD (%)	16,0	16,0	20,0	24,0	30,0	30,0
		b. Perda Yang Merupakan Inisiatif DPRD (Perda)	9	9	10	11	12	12
		c. Persentase Perempuan Pengurus Partai Politik (%)	31,6	33,5	35,8	38,2	40,0	40,0
6. Terwujudnya Makassar sebagai kota tujuan utama investasi, menuju kemandirian fiskal daerah	10. Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	30. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0,75	1,00	1,25	1,50	2,00	2,00
		31. Tingkat Inflasi Gabungan (%)	3,16	2,91	2,66	2,42	2,17	2,17
		32. Persentase Peningkatan Investasi Daerah (%)	8,75	9,36	9,97	10,58	11,20	11,20
		33. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	61,15	73,20	79,50	81,23	84,00	84,00

7. Terwujudnya . . .

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Baseline (2025)	Target Kinerja Pembangunan				Capaian Akhir Kinerja
				2029	2034	2039	2045	
7. Terwujudnya Kota Makassar yang toleran, berketahanan sosial dan berkebudayaan maju didukung ketahanan ekologi yang tinggi	11. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	34. Persentase benda, bangunan, struktur, dan situs cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi (%)	14,51	15,54	15,54	15,54	15,54	15,54
		35. Persentase kegiatan keagamaan yang mendapat dukungan/fasilitas (%)	1,15	1,32	1,53	1,74	2,00	2,00
	12. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif	36. a. Indeks Pembangunan Keluarga	85,95	88,55	91,85	95,25	98,95	98,95
		b. Indeks Perlindungan Anak	69,44	74,20	80,60	87,50	96,44	96,44
		c. Indeks Pembangunan Pemuda	54,50	58,17	61,00	63,67	64,17	64,17
	13. Berketahanan Energi dan Air dan Pangan	37. Indeks Ketimpangan Gender	0,179	0,168	0,152	0,138	0,120	0,120
		38. Ketahanan Energi, Air dan Pangan						
		a. Ketahanan Energi:						
		o Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)	1,627	1,778	1,966	2,155	2,381	2,381
		b. Ketahanan Pangan:						
		o Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (%)	4,57	3,49	2,40	1,32	1,10	1,10
		o Indeks Ketahanan Pangan	84,98	86,40	87,82	89,24	90,66	90,66
	o Skor Pola Pangan Harapan	86,24	88,01	89,78	91,55	93,32	93,32	
c. Ketahanan Air:								
o Kapasitas Air Baku (m ³ /detik)	3,35	4,73	6,46	8,19	10,27	10,27		
o Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	45,66	80,00	86,25	92,50	100,00	100,00		

8. Terwujudnya . . .

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Baseline (2025)	Target Kinerja Pembangunan				Capaian Akhir Kinerja
				2029	2034	2039	2045	
8. Terwujudnya Kota Makassar menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dengan PDRB tertinggi di kawasan timur Indonesia	14. Perkotaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	39. Kota Maju, Inklusif dan Berkelanjutan:						
		a. Proporsi Kontribusi PDRB Kota Makassar Terhadap PDB Nasional	1,17	1,26	1,35	1,44	1,53	1,53
		b. Proporsi Kontribusi PDRB Kota Makassar terhadap PDRB Provinsi Sul-Sel	34,67	32,00	30,00	28,80	28,80	28,80
		c. Rumah Tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	81,63	86,60	92,81	99,02	100,00	100,00
		d. Indeks Layanan Infrastruktur	78,69	81,77	85,62	89,47	94,09	94,09
9. Terwujudnya Makassar Kota Berkelanjutan yang didukung ketahanan terhadap bencana dan risiko perubahan iklim	15. Lingkungan Hidup Berkualitas	40. Pengurangan Ancaman Keanekaragaman Hayati:						
		a. Proporsi Realisasi Penyaluran Pupuk Organik Terhadap Pupuk Kimia (%)	13,66	26,45	35,40	37,76	40,58	40,58
		Pemanfaatan Keberlanjutan Keanekaragaman Hayati:						
		a. Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	1.559	1.597	1.645	1.695	1.757	1.757
		b. Angka Konsumsi Ikan (kg/kapita)	77,18	90,42	103,66	116,90	130,14	130,14
		41. Kualitas Lingkungan Hidup:						
a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	66,16	67,01	68,07	69,13	70,40	70,40		
b. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	7,88	40,72	54,82	67,71	74,85	74,85		
c. Pengelolaan Sampah:								
o Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	4,50	20	48,75	67,50	90	90		
o Proporsi Rumah Tangga Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	100	100	100	100	100	100		

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Baseline (2025)	Target Kinerja Pembangunan				Capaian Akhir Kinerja
				2029	2034	2039	2045	
	16. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	42. Indeks Risiko Bencana	107	95	83	71	59	59
		43. Penurunan Emisi GRK Tahunan (%)	1,17	3,70	9,88	35,69	58,57	58,57
10. Terwujudnya Kota Makassar Yang Berdaya Saing Nasional dan Global	17. Daya Saing Daerah Tinggi	44. Jumlah Kerjasama Kota Kembar/Bersaudara (<i>Sister City</i>)	1	2	3	4	5	5
		45. Indeks Daya Saing Daerah	3,94	4,08	4,21	4,35	4,49	4,49

5.3. Arah Pembangunan Kewilayahan dan Sarana Prasarana

5.3.1. Arah Kebijakan Transformasi Wilayah

Kota Makassar merupakan bagian dari Kawasan Perkotaan Mamminasata yang berperan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Kawasan Strategis Nasional (KSN) dengan fungsi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi nasional berbasis perdagangan dan jasa, industri berbasis inovasi riset dan teknologi dan simpul transportasi internasional sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah nasional (RTRWN) yang pengembangannya dilakukan dengan pendekatan koridor pertumbuhan, Memperhatikan hal tersebut, maka pembangunan kewilayahan jangka panjang kota Makassar menerapkan tiga transformasi yaitu transformasi sosial, transformasi ekonomi, dan transformasi tata kelola, Transformasi ini didukung oleh dua landasan transformasi yaitu keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah serta ketahanan sosial, budaya dan ekologi, Substansi transformasi dan landasan transformasi ini yang diterjemahkan kedalam 8 (delapan) Misi Pembangunan Daerah kota Makassar,

Transformasi sosial bertujuan untuk mewujudkan manusia Makassar yang unggul dan berkualitas tinggi dan dapat bersaing pada tingkat global, Transformasi tata kelola bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang menerapkan prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, transparansi, partisipasi dan kepatuhan kepada hukum yang bermuara pada pelayanan publik berkualitas dan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik, Transformasi Ekonomi bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi agar tercapai peningkatan produktivitas melalui penerapan Iptekin dan ekonomi produktif diiringi dengan pengendalian pemanfaatan ruang, dan implementasi transformasi digital, serta penguatan keterkaitan rantai pasok antar wilayah dan rantai pasok global, dalam rangka memperkuat peran kawasan Makassar sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Jasa dan Perdagangan dan Ekonomi Kreatif serta Industri Berbasis Inovasi Riset dan Teknologi,

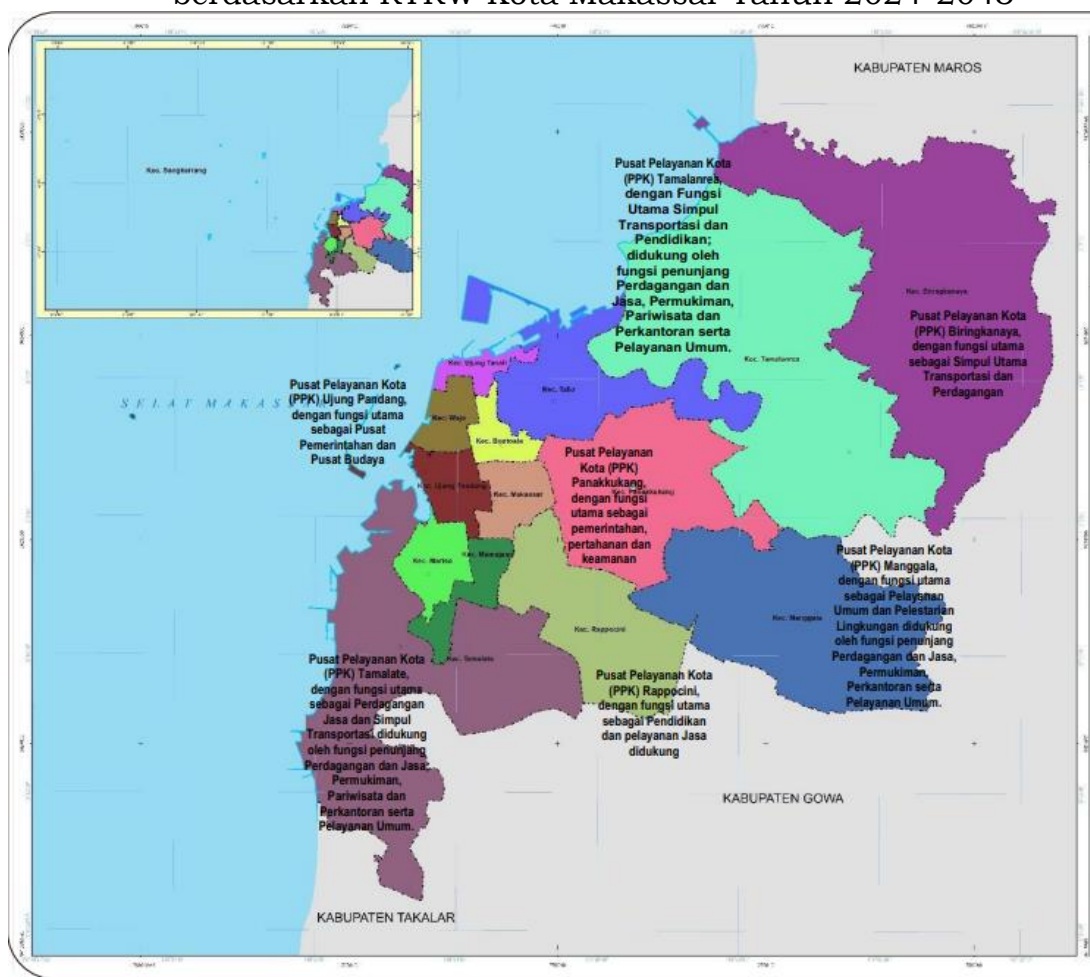
Landasan transformasi yakni keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah bertujuan untuk menjamin keberhasilan transformasi secara menyeluruh melalui penciptaan stabilitas ekonomi makro daerah, daya saing daerah, pengembangan kerjasama antar daerah, ketaatan hukum serta keamanan dan ketertiban masyarakat yang didukung oleh pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan, Demikian juga dengan landasan transformasi berupa ketahanan sosial budaya dan ekologi bertujuan untuk mewujudkan pemenuhan sarana dan prasarana dasar yang berkualitas dan memastikan pembangunan dilaksanakan dengan basis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, pengendalian pemanfaatan ruang, serta memperkuat ketangguhan dalam menghadapi bencana dan perubahan iklim,

5.3.2. Arah Kebijakan Wilayah

Pengembangan wilayah kota Makassar sebagai bagian dari Kawasan Pembangunan Makassar diarahkan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Jasa dan Perdagangan dan Ekonomi Kreatif serta Industri Berbasis Inovasi Riset dan Teknologi sebagaimana arahan Rencana Tata Ruang, baik Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Rincinya, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Rencana Tata Ruang Kota Makassar,

Arah pembangunan kewilayahan kota Makassar meliputi:

Gambar 5.2
Arah Pengembangan Wilayah Kota Makassar
berdasarkan RTRW Kota Makassar Tahun 2024-2043



Sumber : Data Diolah, RTRW Kota Makassar Tahun 2024-2043,

- a) Arah pembangunan Pusat Pelayanan Kota (PPK) Ujung Pandang, dengan fungsi utama sebagai Pusat Pemerintahan dan Pusat Budaya didukung oleh fungsi penunjang Perdagangan dan Jasa, Permukiman, Pariwisata dan Perkantoran serta Pelayanan Umum, Untuk itu pengembangan PPK Ujung Pandang diarahkan pada:

Pertama perwujudan manusia Makassar yang unggul dan berkualitas tinggi dan dapat bersaing di tingkat global diprioritaskan pada peningkatan pelayanan, akses, serta sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan yang merata dan berkualitas serta perlindungan sosial yang adaptif melalui pemenuhan pelayanan dasar.

Kedua, perwujudan PPK Ujung Pandang sebagai pusat pemerintahan dan pusat budaya yang didukung oleh pengembangan kawasan perdagangan dan jasa serta kawasan perkantoran dan kawasan transportasi yang terintegrasi dengan sistem metropolitan, pengembangan UMKM berbasis digitalisasi ekonomi dan inovasi untuk mengoptimalkan perwujudan kota Makassar sebagai kota dunia berbasis ekonomi yang *smart*.

Ketiga, pengembangan tata Kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan adaptif diprioritaskan pada penataan keuangan daerah untuk mewujudkan good governance dan kemandirian fiskal serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Keempat, kehidupan masyarakat yang aman dan tangguh, Demokrasi Substansial serta kemandirian ekonomi makro daerah diprioritaskan pada penataan keuangan dan aset daerah untuk

mewujudkan . . .

mewujudkan kemandirian fiscal berbasis digital, dan pengembangan sumber alternatif pendapatan daerah serta penguatan sektor keuangan syariah.

Kelima, menguatkan ketangguhan keluarga dan masyarakat yang religius dan beradab di tengah dinamisasi masyarakat global, dan memberdayakan perempuan dan anak untuk mencapai kesetaraan gender, perlindungan warisan budaya dan kearifan lokal melalui pengelolaan kawasan cagar budaya, peningkatan ketahanan energi melalui pengembangan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) dengan mempertimbangkan keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta optimalisasi pengelolaan kawasan lindung berupa pemenuhan ketersediaan ruang terbuka hijau.

Keenam, perwujudan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan diprioritaskan pada peningkatan akses dan kualitas infrastruktur konektivitas antar wilayah melalui peningkatan kualitas dan pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan, pengembangan jalur kereta api perkotaan dan jalur kereta api monorel Mamminasata, pengembangan pelabuhan pengumpan lokal, pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan, dan pengembangan infrastruktur telekomunikasi serta pemenuhan rumah layak huni yang terintegrasi dengan fasilitas umum dan fasilitas sosial, ruang terbuka non hijau serta infrastruktur perkotaan.

Ketujuh, perwujudan sarana dan prasarana, khususnya pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar yaitu SPAM melalui pembangunan jaringan air baku, unit produksi, unit pelayanan dan unit distribusi dan Sistem pengelolaan air limbah domestic (SPALD) yang terintegrasi dan ramah lingkungan serta penguatan manajemen bencana, pengendalian risiko Bencana dan dampak perubahan iklim melalui pembangunan jaringan dan bangunan pengendalian banjir dan jalur serta tempat evakuasi bencana dengan mengutamakan pengendalian rencana tata ruang wilayah.

Kedelapan, perwujudan daya saing daerah untuk kesinambungan pembangunan dengan penerapan teknologi dan inovasi dioptimalkan melalui pengembangan kerjasama antar daerah baik kerjasama wajib maupun kerjasama sukarela berskala regional, nasional dan internasional dan sinkronisasi perencanaan pusat, pemerintah provinsi Sulawesi Selatan dan pemerintah kota Makassar.

- b) Arah pembangunan Pusat Pelayanan Kota (PPK) Panakkukang, dengan fungsi utama sebagai pemerintahan dan pertahanan keamanan didukung oleh fungsi penunjang permukiman dan perdagangan dan jasa, Untuk itu pengembangan Panakkukang diarahkan pada:

Pertama perwujudan manusia Makassar yang unggul dan berkualitas tinggi dan dapat bersaing di tingkat global diprioritaskan pada peningkatan pelayanan, akses, serta sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan yang merata dan berkualitas serta perlindungan sosial yang adaptif melalui pemenuhan pelayanan dasar.

Kedua, perwujudan PPK Panakkukang sebagai kawasan pemerintahan dan pertahanan keamanan yang didukung oleh pengembangan kawasan permukiman dan kawasan perdagangan dan jasa yang terintegrasi dengan sistem metropolitan, pengembangan UMKM berbasis digitalisasi ekonomi dan inovasi untuk mengoptimalkan perwujudan kota Makassar sebagai kota dunia berbasis ekonomi yang *smart*.

Ketiga, pengembangan tata Kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan adaptif diprioritaskan pada penataan keuangan daerah untuk mewujudkan good governance dan kemandirian fiskal serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Keempat, kehidupan masyarakat yang aman dan tangguh, Demokrasi Substansial serta kemantapan ekonomi makro daerah diprioritaskan pada penataan keuangan dan aset daerah untuk mewujudkan kemandirian fiskal berbasis digital, dan pengembangan sumber alternatif pendapatan daerah serta penguatan sektor keuangan syariah.

Kelima, menguatkan ketangguhan keluarga dan masyarakat yang religius dan beradab di tengah dinamisasi masyarakat global, dan memberdayakan perempuan dan anak untuk mencapai kesetaraan gender, perlindungan warisan budaya dan kearifan lokal, pembangunan tempat pengelolaan persampahan dengan metode 3R, peningkatan ketahanan energi melalui pengembangan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) dengan mempertimbangkan keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, serta optimalisasi pengelolaan kawasan lindung berupa badan air, kawasan perlindungan setempat, kawasan ekosistem mangrove dan pemenuhan ketersediaan ruang terbuka hijau.

Keenam, perwujudan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan diprioritaskan pada peningkatan akses dan kualitas infrastruktur konektivitas antar wilayah melalui peningkatan kualitas dan pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan, pengembangan jalur kereta api perkotaan dan jalur kereta api monorel Mamminasata, pengembangan pelabuhan pengumpan lokal, pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan, dan pengembangan infrastruktur telekomunikasi serta pemenuhan rumah layak huni yang terintegrasi dengan fasilitas umum dan fasilitas sosial serta infrastruktur perkotaan.

Ketujuh, perwujudan sarana dan prasarana, khususnya pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar yaitu SPAM melalui pembangunan jaringan air baku, unit produksi, unit pelayanan dan unit distribusi, pembangunan dan pemeliharaan sistem jaringan drainase, serta penguatan manajemen bencana, pengendalian risiko Bencana dan dampak perubahan iklim melalui pembangunan bangunan pengendalian banjir dan jalur evakuasi bencana dengan mengutamakan pengendalian rencana tata ruang wilayah.

Kedelapan, perwujudan daya saing daerah untuk kesinambungan pembangunan dengan penerapan teknologi dan inovasi dioptimalkan melalui pengembangan kerjasama antar daerah baik kerjasama wajib maupun kerjasama sukarela berskala regional, nasional dan internasional dan sinkronisasi perencanaan pusat, pemerintah provinsi Sulawesi Selatan dan pemerintah kota Makassar.

- c) Arah Pembangunan Pusat Pelayanan Kota (PPK) Biringkanaya, dengan fungsi utama sebagai Simpul Utama Transportasi dan Perdagangan didukung oleh fungsi penunjang Perdagangan dan Jasa, Pendidikan, Permukiman, dan Perkantoran serta Pelayanan Umum, Untuk itu pengembangan Biringkanaya diarahkan pada:

Pertama perwujudan manusia Makassar yang unggul dan berkualitas tinggi dan dapat bersaing di tingkat global diprioritaskan pada peningkatan pelayanan, akses, serta sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan yang merata dan berkualitas serta perlindungan sosial yang adaptif melalui pemenuhan pelayanan dasar.

Kedua . . .

Kedua, perwujudan PPK Biringkanaya sebagai kawasan simpul utama Transportasi dan Perdagangan yang didukung oleh pengembangan Pendidikan, Jasa, Perkantoran dan kawasan permukiman yang terintegrasi dengan sistem metropolitan, pengembangan UMKM berbasis digitalisasi ekonomi dan inovasi untuk mengoptimalkan perwujudan kota Makassar sebagai kota dunia berbasis ekonomi yang *smart*.

Ketiga, pengembangan tata Kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan adaptif diprioritaskan pada penataan keuangan daerah untuk mewujudkan *good governance* dan kemandirian fiskal serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Keempat, kehidupan masyarakat yang aman dan tangguh, Demokrasi Substansial serta kemantapan ekonomi makro daerah diprioritaskan pada penataan keuangan dan aset daerah untuk mewujudkan kemandirian fiskal berbasis digital, dan pengembangan sumber alternatif pendapatan daerah serta penguatan sektor keuangan syariah.

Kelima, menguatkan ketangguhan keluarga dan masyarakat yang religius dan beradab di tengah dinamisasi masyarakat global, dan memberdayakan perempuan dan anak untuk mencapai kesetaraan gender, perlindungan warisan budaya dan kearifan lokal, pembangunan tempat pengelolaan persampahan dengan metode 3R, peningkatan ketahanan energi melalui pengembangan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) dengan mempertimbangkan keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, serta optimalisasi pengelolaan kawasan lindung berupa badan air, kawasan perlindungan setempat, kawasan ekosistem mangrove dan pemenuhan ketersediaan ruang terbuka hijau,

Keenam, perwujudan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan diprioritaskan pada peningkatan akses dan kualitas infrastruktur konektivitas antar wilayah melalui peningkatan kualitas dan pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan, pengembangan jalur kereta api perkotaan dan jalur kereta api monorel Mamminasata, pengembangan pelabuhan pengumpan lokal, pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan, dan pengembangan infrastruktur telekomunikasi serta pemenuhan rumah layak huni yang terintegrasi dengan fasilitas umum dan fasilitas sosial serta infrastruktur perkotaan.

Ketujuh, perwujudan sarana dan prasarana, khususnya pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar yaitu SPAM melalui pembangunan jaringan air baku, unit produksi, unit pelayanan dan unit distribusi, pembangunan dan pemeliharaan sistem jaringan drainase, serta penguatan manajemen bencana, pengendalian risiko Bencana dan dampak perubahan iklim melalui pembangunan bangunan pengendalian banjir dan jalur evakuasi bencana dengan mengutamakan pengendalian rencana tata ruang wilayah.

Kedelapan, perwujudan daya saing daerah untuk kesinambungan pembangunan dengan penerapan teknologi dan inovasi dioptimalkan melalui pengembangan kerjasama antar daerah baik kerjasama wajib maupun kerjasama sukarela berskala regional, nasional dan internasional dan sinkronisasi perencanaan pusat, pemerintah provinsi Sulawesi Selatan dan pemerintah kota Makassar.

- d) Arah Pembangunan Pusat Pelayanan Kota (PPK) Rappocini, dengan fungsi utama sebagai Pendidikan dan pelayanan Jasa didukung oleh fungsi penunjang Perdagangan dan Jasa, Permukiman, Pariwisata dan Perkantoran serta Pelayanan Umum, Untuk itu pengembangan Rappocini diarahkan pada:

Pertama perwujudan manusia Makassar yang unggul dan berkualitas tinggi dan dapat bersaing di tingkat global diprioritaskan pada peningkatan pelayanan, akses, serta sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan yang merata dan berkualitas serta perlindungan sosial yang adaptif melalui pemenuhan pelayanan dasar.

Kedua, perwujudan PPK Rappocini sebagai kawasan Pelayanan Jasa dan Pendidikan yang didukung oleh pengembangan Perkantoran, Pelayanan Umum, Pariwisata, kawasan permukiman dan kawasan perdagangan yang terintegrasi dengan sistem metropolitan, pengembangan UMKM berbasis digitalisasi ekonomi dan inovasi untuk mengoptimalkan perwujudan kota Makassar sebagai kota dunia berbasis ekonomi yang *smart*.

Ketiga, pengembangan tata Kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan adaptif diprioritaskan pada penataan keuangan daerah untuk mewujudkan *good governance* dan kemandirian fiskal serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Keempat, kehidupan masyarakat yang aman dan tangguh, Demokrasi Substansial serta kemantapan ekonomi makro daerah diprioritaskan pada penataan keuangan dan aset daerah untuk mewujudkan kemandirian fiskal berbasis digital, dan pengembangan sumber alternatif pendapatan daerah serta penguatan sektor keuangan syariah.

Kelima, menguatkan ketangguhan keluarga dan masyarakat yang religius dan beradab di tengah dinamisasi masyarakat global, dan memberdayakan perempuan dan anak untuk mencapai kesetaraan gender, perlindungan warisan budaya dan kearifan lokal, pembangunan tempat pengelolaan persampahan dengan metode 3R, peningkatan ketahanan energi melalui pengembangan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) dengan mempertimbangkan keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, serta optimalisasi pengelolaan kawasan lindung berupa badan air, kawasan perlindungan setempat, kawasan ekosistem mangrove dan pemenuhan ketersediaan ruang terbuka hijau.

Keenam, perwujudan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan diprioritaskan pada peningkatan akses dan kualitas infrastruktur konektivitas antar wilayah melalui peningkatan kualitas dan pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan, pengembangan jalur kereta api perkotaan dan jalur kereta api monorel Mamminasata, pengembangan pelabuhan pengumpan lokal, pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan, dan pengembangan infrastruktur telekomunikasi serta pemenuhan rumah layak huni yang terintegrasi dengan fasilitas umum dan fasilitas sosial serta infrastruktur perkotaan.

Ketujuh, perwujudan sarana dan prasarana, khususnya pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar yaitu SPAM melalui pembangunan jaringan air baku, unit produksi, unit pelayanan dan unit distribusi, pembangunan dan pemeliharaan sistem jaringan drainase, serta penguatan manajemen bencana, pengendalian risiko Bencana dan dampak perubahan iklim melalui pembangunan bangunan pengendalian banjir dan jalur evakuasi bencana dengan mengutamakan pengendalian rencana tata ruang wilayah.

Kedelapan, perwujudan daya saing daerah untuk kesinambungan pembangunan dengan penerapan teknologi dan inovasi dioptimalkan melalui pengembangan kerjasama antar daerah baik kerjasama wajib maupun kerjasama sukarela berskala regional, nasional dan internasional dan sinkronisasi perencanaan pusat, pemerintah provinsi Sulawesi Selatan dan pemerintah kota Makassar.

- e) Arah Pembangunan Pusat Pelayanan Kota (PPK) Tamalate, dengan fungsi utama sebagai Perdagangan Jasa dan Simpul Transportasi didukung oleh fungsi penunjang Perdagangan dan Jasa, Permukiman, Pariwisata dan Perkantoran serta Pelayanan Umum, untuk itu pengembangan Tamalate diarahkan pada:

Pertama perwujudan manusia Makassar yang unggul dan berkualitas tinggi dan dapat bersaing di tingkat global diprioritaskan pada peningkatan pelayanan, akses, serta sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan yang merata dan berkualitas serta perlindungan sosial yang adaptif melalui pemenuhan pelayanan dasar.

Kedua, perwujudan PPK Tamalate sebagai kawasan Perdagangan Jasa dan Simpul Transportasi yang didukung oleh pengembangan kawasan permukiman, Perkantoran, Jasa, Pelayanan Umum dan Pariwisata yang terintegrasi dengan sistem metropolitan, pengembangan UMKM berbasis digitalisasi ekonomi dan inovasi untuk mengoptimalkan perwujudan kota Makassar sebagai kota dunia berbasis ekonomi yang *smart*.

Ketiga, pengembangan tata Kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan adaptif diprioritaskan pada penataan keuangan daerah untuk mewujudkan *good governance* dan kemandirian fiskal serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Keempat, kehidupan masyarakat yang aman dan tangguh, Demokrasi Substansial serta kemantapan ekonomi makro daerah diprioritaskan pada penataan keuangan dan aset daerah untuk mewujudkan kemandirian fiskal berbasis digital, dan pengembangan sumber alternatif pendapatan daerah serta penguatan sektor keuangan syariah.

Kelima, menguatkan ketangguhan keluarga dan masyarakat yang religius dan beradab di tengah dinamisasi masyarakat global, dan memberdayakan perempuan dan anak untuk mencapai kesetaraan gender, perlindungan warisan budaya dan kearifan lokal, pembangunan tempat pengelolaan persampahan dengan metode 3R, peningkatan ketahanan energi melalui pengembangan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) dengan mempertimbangkan keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, serta optimalisasi pengelolaan kawasan lindung berupa badan air, kawasan perlindungan setempat, kawasan ekosistem mangrove dan pemenuhan ketersediaan ruang terbuka hijau.

Keenam, perwujudan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan diprioritaskan pada peningkatan akses dan kualitas infrastruktur konektivitas antar wilayah melalui peningkatan kualitas dan pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan, pengembangan jalur kereta api perkotaan dan jalur kereta api monorel Mamminasata, pengembangan pelabuhan pengumpan lokal, pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan, dan pengembangan infrastruktur telekomunikasi serta pemenuhan rumah layak huni yang terintegrasi dengan fasilitas umum dan fasilitas sosial serta infrastruktur perkotaan.

Ketujuh, perwujudan sarana dan prasarana, khususnya pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar yaitu SPAM melalui pembangunan jaringan air baku, unit produksi, unit pelayanan dan unit distribusi, pembangunan dan pemeliharaan sistem jaringan drainase, serta penguatan manajemen bencana, pengendalian risiko Bencana dan dampak perubahan iklim melalui pembangunan bangunan pengendalian banjir dan jalur evakuasi bencana dengan mengutamakan pengendalian rencana tata ruang wilayah.

Kedelapan, perwujudan daya saing daerah untuk kesinambungan pembangunan dengan penerapan teknologi dan inovasi dioptimalkan melalui pengembangan kerjasama antar daerah baik kerjasama wajib maupun kerjasama sukarela berskala regional, nasional dan internasional dan sinkronisasi perencanaan pusat, pemerintah provinsi Sulawesi Selatan dan pemerintah kota Makassar.

- f) Arah Pembangunan Pusat Pelayanan Kota (PPK) Tamalanrea, dengan Fungsi Utama Simpul Transportasi dan Pendidikan; didukung oleh fungsi penunjang Perdagangan dan Jasa, Permukiman, Pariwisata dan Perkantoran serta Pelayanan Umum, Untuk itu pengembangan Tamalanrea diarahkan pada:

Pertama perwujudan manusia Makassar yang unggul dan berkualitas tinggi dan dapat bersaing di tingkat global diprioritaskan pada peningkatan pelayanan, akses, serta sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan yang merata dan berkualitas serta perlindungan sosial yang adaptif melalui pemenuhan pelayanan dasar.

Kedua, perwujudan PPK Tamalanrea sebagai kawasan Simpul Transportasi dan Pendidikan yang didukung oleh pengembangan kawasan permukiman, perdagangan, jasa, pelayanan umum, pariwisata dan perkantoran yang terintegrasi dengan sistem metropolitan, pengembangan UMKM berbasis digitalisasi ekonomi dan inovasi untuk mengoptimalkan perwujudan kota Makassar sebagai kota dunia berbasis ekonomi yang *smart*.

Ketiga, pengembangan tata Kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan adaptif diprioritaskan pada penataan keuangan daerah untuk mewujudkan *good governance* dan kemandirian fiskal serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Keempat, kehidupan masyarakat yang aman dan tangguh, Demokrasi Substansial serta kemantapan ekonomi makro daerah diprioritaskan pada penataan keuangan dan aset daerah untuk mewujudkan kemandirian fiskal berbasis digital, dan pengembangan sumber alternatif pendapatan daerah serta penguatan sektor keuangan syariah.

Kelima, menguatkan ketangguhan keluarga dan masyarakat yang religius dan beradab di tengah dinamisasi masyarakat global, dan memberdayakan perempuan dan anak untuk mencapai kesetaraan gender, perlindungan warisan budaya dan kearifan lokal, pembangunan tempat pengelolaan persampahan dengan metode 3R, peningkatan ketahanan energi melalui pengembangan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) dengan mempertimbangkan keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, serta optimalisasi pengelolaan kawasan lindung berupa badan air, kawasan perlindungan setempat, kawasan ekosistem mangrove dan pemenuhan ketersediaan ruang terbuka hijau.

Keenam, perwujudan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan diprioritaskan pada peningkatan akses dan kualitas infrastruktur konektivitas antar wilayah melalui peningkatan kualitas dan pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan, pengembangan jalur kereta api perkotaan dan jalur kereta api monorel Mamminasata, pengembangan pelabuhan pengumpan lokal, pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan, dan pengembangan infrastruktur telekomunikasi serta pemenuhan rumah layak huni yang terintegrasi dengan fasilitas umum dan fasilitas sosial serta infrastruktur perkotaan.

Ketujuh, perwujudan sarana dan prasarana, khususnya pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar yaitu SPAM melalui pembangunan jaringan air baku, unit produksi, unit pelayanan dan unit distribusi,

pembangunan dan pemeliharaan sistem jaringan drainase, serta penguatan manajemen bencana, pengendalian risiko Bencana dan dampak perubahan iklim melalui pembangunan bangunan pengendalian banjir dan jalur evakuasi bencana dengan mengutamakan pengendalian rencana tata ruang wilayah.

Kedelapan, perwujudan daya saing daerah untuk kesinambungan pembangunan dengan penerapan teknologi dan inovasi dioptimalkan melalui pengembangan kerjasama antar daerah baik kerjasama wajib maupun kerjasama sukarela berskala regional, nasional dan internasional dan sinkronisasi perencanaan pusat, pemerintah provinsi Sulawesi Selatan dan pemerintah kota Makassar.

- g) Arah Pembangunan Pusat Pelayanan Kota (PPK) Manggala, dengan fungsi utama sebagai Pelayanan Umum dan Pelestarian Lingkungan didukung oleh fungsi penunjang Perdagangan dan Jasa, Permukiman, Perkantoran serta Pelayanan Umum, Untuk itu pengembangan Manggala diarahkan pada:

Pertama perwujudan manusia Makassar yang unggul dan berkualitas tinggi dan dapat bersaing di tingkat global diprioritaskan pada peningkatan pelayanan, akses, serta sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan yang merata dan berkualitas serta perlindungan sosial yang adaptif melalui pemenuhan pelayanan dasar.

Kedua, perwujudan PPK Manggala sebagai kawasan Pelayanan Umum dan Pelestarian Lingkungan yang didukung oleh pengembangan kawasan permukiman, perdagangan, jasa, Pelayanan Umum dan Perkantoran yang terintegrasi dengan sistem metropolitan, pengembangan UMKM berbasis digitalisasi ekonomi dan inovasi untuk mengoptimalkan perwujudan kota Makassar sebagai kota dunia berbasis ekonomi yang *smart*.

Ketiga, pengembangan tata Kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan adaptif diprioritaskan pada penataan keuangan daerah untuk mewujudkan good governance dan kemandirian fiskal serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Keempat, kehidupan masyarakat yang aman dan tangguh, Demokrasi Substansial serta kemantapan ekonomi makro daerah diprioritaskan pada penataan keuangan dan aset daerah untuk mewujudkan kemandirian fiskal berbasis digital, dan pengembangan sumber alternatif pendapatan daerah serta penguatan sektor keuangan syariah.

Kelima, menguatkan ketangguhan keluarga dan masyarakat yang religius dan beradab di tengah dinamisasi masyarakat global, dan memberdayakan perempuan dan anak untuk mencapai kesetaraan gender, perlindungan warisan budaya dan kearifan lokal, pembangunan tempat pengelolaan persampahan dengan metode 3R, peningkatan ketahanan energi melalui pengembangan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) dengan mempertimbangkan keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, serta optimalisasi pengelolaan kawasan lindung berupa badan air, kawasan perlindungan setempat, kawasan ekosistem mangrove dan pemenuhan ketersediaan ruang terbuka hijau.

Keenam, perwujudan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan diprioritaskan pada peningkatan akses dan kualitas infrastruktur konektivitas antar wilayah melalui peningkatan kualitas dan pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan, pengembangan jalur kereta api perkotaan dan jalur kereta api monorel Mamminasata, pengembangan pelabuhan pengumpan lokal, pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan, dan pengembangan infrastruktur

telekomunikasi serta pemenuhan rumah layak huni yang terintegrasi dengan fasilitas umum dan fasilitas sosial serta infrastruktur perkotaan.

Ketujuh, perwujudan sarana dan prasarana, khususnya pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar yaitu SPAM melalui pembangunan jaringan air baku, unit produksi, unit pelayanan dan unit distribusi, pembangunan dan pemeliharaan sistem jaringan drainase, serta penguatan manajemen bencana, pengendalian risiko Bencana dan dampak perubahan iklim melalui pembangunan bangunan pengendalian banjir dan jalur evakuasi bencana dengan mengutamakan pengendalian rencana tata ruang wilayah.

Kedelapan, perwujudan daya saing daerah untuk kesinambungan pembangunan dengan penerapan teknologi dan inovasi dioptimalkan melalui pengembangan kerjasama antar daerah baik kerjasama wajib maupun kerjasama sukarela berskala regional, nasional dan internasional dan sinkronisasi perencanaan pusat, pemerintah provinsi Sulawesi Selatan dan pemerintah kota Makassar.

- h) Arah Pembangunan Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK) Tallo, yang berfungsi sebagai pusat permukiman, dan perdagangan dan jasa dan simpul transportasi, Untuk itu pengembangan Tallo diarahkan pada:

Pertama perwujudan manusia Makassar yang unggul dan berkualitas tinggi dan dapat bersaing di tingkat global diprioritaskan pada peningkatan pelayanan, akses, serta sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan yang merata dan berkualitas serta perlindungan sosial yang adaptif melalui pemenuhan pelayanan dasar.

Kedua, perwujudan SPPK Tallo sebagai pengembangan kawasan permukiman, perdagangan, jasa dan Simpul Transportasi yang terintegrasi dengan sistem metropolitan, pengembangan UMKM berbasis digitalisasi ekonomi dan inovasi untuk mengoptimalkan perwujudan kota Makassar sebagai kota dunia berbasis ekonomi yang *smart*,

Ketiga, pengembangan tata Kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan adaptif diprioritaskan pada penataan keuangan daerah untuk mewujudkan good governance dan kemandirian fiskal serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Keempat, kehidupan masyarakat yang aman dan tangguh, Demokrasi Substansial serta kemantapan ekonomi makro daerah diprioritaskan pada penataan keuangan dan aset daerah untuk mewujudkan kemandirian fiskal berbasis digital, dan pengembangan sumber alternatif pendapatan daerah serta penguatan sektor keuangan syariah.

Kelima, menguatkan ketangguhan keluarga dan masyarakat yang religius dan beradab di tengah dinamisasi masyarakat global, dan memberdayakan perempuan dan anak untuk mencapai kesetaraan gender, perlindungan warisan budaya dan kearifan lokal, pembangunan tempat pengelolaan persampahan dengan metode 3R, peningkatan ketahanan energi melalui pengembangan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) dengan mempertimbangkan keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, serta optimalisasi pengelolaan kawasan lindung berupa badan air, kawasan perlindungan setempat, kawasan ekosistem mangrove dan pemenuhan ketersediaan ruang terbuka hijau,

Keenam, perwujudan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan diprioritaskan pada peningkatan akses dan kualitas infrastruktur konektivitas antar wilayah melalui peningkatan kualitas dan pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan, pengembangan jalur kereta api perkotaan dan jalur kereta api monorel Mamminasata, pengembangan pelabuhan pengumpan lokal, pengembangan

infrastruktur ketenagalistrikan, dan pengembangan infrastruktur telekomunikasi serta pemenuhan rumah layak huni yang terintegrasi dengan fasilitas umum dan fasilitas sosial serta infrastruktur perkotaan.

Ketujuh, perwujudan sarana dan prasarana, khususnya pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar yaitu SPAM melalui pembangunan jaringan air baku, unit produksi, unit pelayanan dan unit distribusi, pembangunan dan pemeliharaan sistem jaringan drainase, serta penguatan manajemen bencana, pengendalian risiko Bencana dan dampak perubahan iklim melalui pembangunan bangunan pengendalian banjir dan jalur evakuasi bencana dengan mengutamakan pengendalian rencana tata ruang wilayah.

Kedelapan, perwujudan daya saing daerah untuk kesinambungan pembangunan dengan penerapan teknologi dan inovasi dioptimalkan melalui pengembangan kerjasama antar daerah baik kerjasama wajib maupun kerjasama sukarela berskala regional, nasional dan internasional dan sinkronisasi perencanaan pusat, pemerintah provinsi Sulawesi Selatan dan pemerintah kota Makassar.

- i) Arah Pembangunan Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK) Bontoala, yang berfungsi sebagai pusat permukiman, perdagangan dan jasa, dan pelayanan umum, Untuk itu pengembangan Bontoala diarahkan pada:

Pertama perwujudan manusia Makassar yang unggul dan berkualitas tinggi dan dapat bersaing di tingkat global diprioritaskan pada peningkatan pelayanan, akses, serta sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan yang merata dan berkualitas serta perlindungan sosial yang adaptif melalui pemenuhan pelayanan dasar.

Kedua, perwujudan SPPK Bontoala sebagai pengembangan kawasan permukiman, perdagangan, jasa, dan Pelayanan Umum yang terintegrasi dengan sistem metropolitan, pengembangan UMKM berbasis digitalisasi ekonomi dan inovasi untuk mengoptimalkan perwujudan kota Makassar sebagai kota dunia berbasis ekonomi yang *smart*.

Ketiga, pengembangan tata Kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan adaptif diprioritaskan pada penataan keuangan daerah untuk mewujudkan good governance dan kemandirian fiskal serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Keempat, kehidupan masyarakat yang aman dan tangguh, Demokrasi Substansial serta kemantapan ekonomi makro daerah diprioritaskan pada penataan keuangan dan aset daerah untuk mewujudkan kemandirian fiskal berbasis digital, dan pengembangan sumber alternatif pendapatan daerah serta penguatan sektor keuangan syariah.

Kelima, menguatkan ketangguhan keluarga dan masyarakat yang religius dan beradab di tengah dinamisasi masyarakat global, dan memberdayakan perempuan dan anak untuk mencapai kesetaraan gender, perlindungan warisan budaya dan kearifan lokal, pembangunan tempat pengelolaan persampahan dengan metode 3R, peningkatan ketahanan energi melalui pengembangan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) dengan mempertimbangkan keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, serta optimalisasi pengelolaan kawasan lindung berupa badan air, kawasan perlindungan setempat, kawasan ekosistem mangrove dan pemenuhan ketersediaan ruang terbuka hijau.

Keenam, perwujudan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan diprioritaskan pada peningkatan akses dan kualitas infrastruktur konektivitas antar wilayah melalui peningkatan kualitas dan pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan, pengembangan jalur kereta api perkotaan dan jalur kereta api monorel Mamminasata,

pengembangan pelabuhan pengumpan lokal, pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan, dan pengembangan infrastruktur telekomunikasi serta pemenuhan rumah layak huni yang terintegrasi dengan fasilitas umum dan fasilitas sosial serta infrastruktur perkotaan.

Ketujuh, perwujudan sarana dan prasarana, khususnya pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar yaitu SPAM melalui pembangunan jaringan air baku, unit produksi, unit pelayanan dan unit distribusi, pembangunan dan pemeliharaan sistem jaringan drainase, serta penguatan manajemen bencana, pengendalian risiko Bencana dan dampak perubahan iklim melalui pembangunan bangunan pengendalian banjir dan jalur evakuasi bencana dengan mengutamakan pengendalian rencana tata ruang wilayah.

Kedelapan, perwujudan daya saing daerah untuk kesinambungan pembangunan dengan penerapan teknologi dan inovasi dioptimalkan melalui pengembangan kerjasama antar daerah baik kerjasama wajib maupun kerjasama sukarela berskala regional, nasional dan internasional dan sinkronisasi perencanaan pusat, pemerintah provinsi Sulawesi Selatan dan pemerintah kota Makassar.

- j) Arah Pembangunan Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK) Mamajang, yang berfungsi sebagai pusat permukiman, perdagangan dan jasa, dan pelayanan umum, Untuk itu pengembangan Mamajang diarahkan pada:

Pertama perwujudan manusia Makassar yang unggul dan berkualitas tinggi dan dapat bersaing di tingkat global diprioritaskan pada peningkatan pelayanan, akses, serta sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan yang merata dan berkualitas serta perlindungan sosial yang adaptif melalui pemenuhan pelayanan dasar.

Kedua, perwujudan SPPK Mamajang sebagai pengembangan kawasan permukiman, perdagangan, jasa, dan Pelayanan Umum yang terintegrasi dengan sistem metropolitan, pengembangan UMKM berbasis digitalisasi ekonomi dan inovasi untuk mengoptimalkan perwujudan kota Makassar sebagai kota dunia berbasis ekonomi yang *smart*,

Ketiga, pengembangan tata Kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan adaptif diprioritaskan pada penataan keuangan daerah untuk mewujudkan good governance dan kemandirian fiskal serta peningkatan kualitas pelayanan publik, Keempat, kehidupan masyarakat yang aman dan tangguh, Demokrasi Substansial serta kemantapan ekonomi makro daerah diprioritaskan pada penataan keuangan dan aset daerah untuk mewujudkan kemandirian fiskal berbasis digital, dan pengembangan sumber alternatif pendapatan daerah serta penguatan sektor keuangan syariah.

Kelima, menguatkan ketangguhan keluarga dan masyarakat yang religius dan beradab di tengah dinamisasi masyarakat global, dan memberdayakan perempuan dan anak untuk mencapai kesetaraan gender, perlindungan warisan budaya dan kearifan lokal, pembangunan tempat pengelolaan persampahan dengan metode 3R, peningkatan ketahanan energi melalui pengembangan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) dengan mempertimbangkan keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, serta optimalisasi pengelolaan kawasan lindung berupa badan air, kawasan perlindungan setempat, kawasan ekosistem mangrove dan pemenuhan ketersediaan ruang terbuka hijau.

Keenam, perwujudan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan diprioritaskan pada peningkatan akses dan kualitas infrastruktur konektivitas antar wilayah melalui peningkatan kualitas dan pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan, pengembangan jalur kereta api perkotaan dan jalur kereta api monorel Mamminasata,

pengembangan pelabuhan pengumpan lokal, pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan, dan pengembangan infrastruktur telekomunikasi serta pemenuhan rumah layak huni yang terintegrasi dengan fasilitas umum dan fasilitas sosial serta infrastruktur perkotaan.

Ketujuh, perwujudan sarana dan prasarana, khususnya pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar yaitu SPAM melalui pembangunan jaringan air baku, unit produksi, unit pelayanan dan unit distribusi, pembangunan dan pemeliharaan sistem jaringan drainase, serta penguatan manajemen bencana, pengendalian risiko Bencana dan dampak perubahan iklim melalui pembangunan bangunan pengendalian banjir dan jalur evakuasi bencana dengan mengutamakan pengendalian rencana tata ruang wilayah.

Kedelapan, perwujudan daya saing daerah untuk kesinambungan pembangunan dengan penerapan teknologi dan inovasi dioptimalkan melalui pengembangan kerjasama antar daerah baik kerjasama wajib maupun kerjasama sukarela berskala regional, nasional dan internasional dan sinkronisasi perencanaan pusat, pemerintah provinsi Sulawesi Selatan dan pemerintah kota Makassar.

- k) Arah Pembangunan Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK) Mariso, yang berfungsi sebagai pusat permukiman dan pelayanan umum, Untuk itu pengembangan Mariso diarahkan pada:

Pertama perwujudan manusia Makassar yang unggul dan berkualitas tinggi dan dapat bersaing di tingkat global diprioritaskan pada peningkatan pelayanan, akses, serta sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan yang merata dan berkualitas serta perlindungan sosial yang adaptif melalui pemenuhan pelayanan dasar.

Kedua, perwujudan SPPK Mariso sebagai pengembangan kawasan permukiman dan Pelayanan Umum yang terintegrasi dengan sistem metropolitan, pengembangan UMKM berbasis digitalisasi ekonomi dan inovasi untuk mengoptimalkan perwujudan kota Makassar sebagai kota dunia berbasis ekonomi yang *smart*.

Ketiga, pengembangan tata Kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan adaptif diprioritaskan pada penataan keuangan daerah untuk mewujudkan good governance dan kemandirian fiskal serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Keempat, kehidupan masyarakat yang aman dan tangguh, Demokrasi Substansial serta kemantapan ekonomi makro daerah diprioritaskan pada penataan keuangan dan aset daerah untuk mewujudkan kemandirian fiskal berbasis digital, dan pengembangan sumber alternatif pendapatan daerah serta penguatan sektor keuangan syariah.

Kelima, menguatkan ketangguhan keluarga dan masyarakat yang religius dan beradab di tengah dinamisasi masyarakat global, dan memberdayakan perempuan dan anak untuk mencapai kesetaraan gender, perlindungan warisan budaya dan kearifan lokal, pembangunan tempat pengelolaan persampahan dengan metode 3R, peningkatan ketahanan energi melalui pengembangan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) dengan mempertimbangkan keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, serta optimalisasi pengelolaan kawasan lindung berupa badan air, kawasan perlindungan setempat, kawasan ekosistem mangrove dan pemenuhan ketersediaan ruang terbuka hijau,

Keenam, perwujudan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan diprioritaskan pada peningkatan akses dan kualitas infrastruktur konektivitas antar wilayah melalui peningkatan kualitas dan pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan, pengembangan jalur

kereta api perkotaan dan jalur kereta api monorel Mamminasata, pengembangan pelabuhan pengumpan local, pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan, dan pengembangan infrastruktur telekomunikasi serta pemenuhan rumah layak huni yang terintegrasi dengan fasilitas umum dan fasilitas sosial serta infrastruktur perkotaan.

Ketujuh, perwujudan sarana dan prasarana, khususnya pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar yaitu SPAM melalui pembangunan jaringan air baku, unit produksi, unit pelayanan dan unit distribusi, pembangunan dan pemeliharaan sistem jaringan drainase, serta penguatan manajemen bencana, pengendalian risiko Bencana dan dampak perubahan iklim melalui pembangunan bangunan pengendalian banjir dan jalur evakuasi bencana dengan mengutamakan pengendalian rencana tata ruang wilayah.

Kedelapan, perwujudan daya saing daerah untuk kesinambungan pembangunan dengan penerapan teknologi dan inovasi dioptimalkan melalui pengembangan kerjasama antar daerah baik kerjasama wajib maupun kerjasama sukarela berskala regional, nasional dan internasional dan sinkronisasi perencanaan pusat, pemerintah provinsi Sulawesi Selatan dan pemerintah kota Makassar.

- 1) Arah Pembangunan Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK) Makassar, yang berfungsi sebagai pusat permukiman dan pelayanan umum, Untuk itu pengembangan Makassar diarahkan pada:

Pertama perwujudan manusia Makassar yang unggul dan berkualitas tinggi dan dapat bersaing di tingkat global diprioritaskan pada peningkatan pelayanan, akses, serta sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan yang merata dan berkualitas serta perlindungan sosial yang adaptif melalui pemenuhan pelayanan dasar.

Kedua, perwujudan SPPK Makassar sebagai pengembangan kawasan permukiman dan Pelayanan Umum yang terintegrasi dengan sistem metropolitan, pengembangan UMKM berbasis digitalisasi ekonomi dan inovasi untuk mengoptimalkan perwujudan kota Makassar sebagai kota dunia berbasis ekonomi yang *smart*.

Ketiga, pengembangan tata Kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan adaptif diprioritaskan pada penataan keuangan daerah untuk mewujudkan good governance dan kemandirian fiskal serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Keempat, kehidupan masyarakat yang aman dan tangguh, Demokrasi Substansial serta kemantapan ekonomi makro daerah diprioritaskan pada penataan keuangan dan aset daerah untuk mewujudkan kemandirian fiskal berbasis digital, dan pengembangan sumber alternatif pendapatan daerah serta penguatan sektor keuangan syariah.

Kelima, menguatkan ketangguhan keluarga dan masyarakat yang religius dan beradab di tengah dinamisasi masyarakat global, dan memberdayakan perempuan dan anak untuk mencapai kesetaraan gender, perlindungan warisan budaya dan kearifan lokal, pembangunan tempat pengelolaan persampahan dengan metode 3R, peningkatan ketahanan energi melalui pengembangan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) dengan mempertimbangkan keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, serta optimalisasi pengelolaan kawasan lindung berupa badan air, kawasan perlindungan setempat, kawasan ekosistem mangrove dan pemenuhan ketersediaan ruang terbuka hijau.

Keenam, perwujudan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan diprioritaskan pada peningkatan akses dan kualitas

infrastruktur konektivitas antar wilayah melalui peningkatan kualitas dan pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan, pengembangan jalur kereta api perkotaan dan jalur kereta api monorel Mamminasata, pengembangan pelabuhan pengumpan lokal, pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan, dan pengembangan infrastruktur telekomunikasi serta pemenuhan rumah layak huni yang terintegrasi dengan fasilitas umum dan fasilitas sosial serta infrastruktur perkotaan.

Ketujuh, perwujudan sarana dan prasarana, khususnya pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar yaitu SPAM melalui pembangunan jaringan air baku, unit produksi, unit pelayanan dan unit distribusi, pembangunan dan pemeliharaan sistem jaringan drainase, serta penguatan manajemen bencana, pengendalian risiko Bencana dan dampak perubahan iklim melalui pembangunan bangunan pengendalian banjir dan jalur evakuasi bencana dengan mengutamakan pengendalian rencana tata ruang wilayah.

Kedelapan, perwujudan daya saing daerah untuk kesinambungan pembangunan dengan penerapan teknologi dan inovasi dioptimalkan melalui pengembangan kerjasama antar daerah baik kerjasama wajib maupun kerjasama sukarela berskala regional, nasional dan internasional dan sinkronisasi perencanaan pusat, pemerintah provinsi Sulawesi Selatan dan pemerintah kota Makassar.

- m) Arah Pembangunan Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK) Wajo, yang berfungsi sebagai pusat permukiman, dan perdagangan dan jasa dan simpul transportasi, Untuk itu pengembangan Wajo diarahkan pada:

Pertama perwujudan manusia Makassar yang unggul dan berkualitas tinggi dan dapat bersaing di tingkat global diprioritaskan pada peningkatan pelayanan, akses, serta sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan yang merata dan berkualitas serta perlindungan sosial yang adaptif melalui pemenuhan pelayanan dasar.

Kedua, perwujudan SPPK Wajo sebagai pengembangan kawasan permukiman, perdagangan, jasa, dan simpul transportasi yang terintegrasi dengan sistem metropolitan, pengembangan UMKM berbasis digitalisasi ekonomi dan inovasi untuk mengoptimalkan perwujudan kota Makassar sebagai kota dunia berbasis ekonomi yang *smart*.

Ketiga, pengembangan tata Kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan adaptif diprioritaskan pada penataan keuangan daerah untuk mewujudkan good governance dan kemandirian fiskal serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Keempat, kehidupan masyarakat yang aman dan tangguh, Demokrasi Substansial serta kemantapan ekonomi makro daerah diprioritaskan pada penataan keuangan dan aset daerah untuk mewujudkan kemandirian fiskal berbasis digital, dan pengembangan sumber alternatif pendapatan daerah serta penguatan sektor keuangan syariah.

Kelima, menguatkan ketangguhan keluarga dan masyarakat yang religius dan beradab di tengah dinamisasi masyarakat global, dan memberdayakan perempuan dan anak untuk mencapai kesetaraan gender, perlindungan warisan budaya dan kearifan lokal, pembangunan tempat pengelolaan persampahan dengan metode 3R, peningkatan ketahanan energi melalui pengembangan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) dengan mempertimbangkan keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, serta optimalisasi pengelolaan kawasan lindung berupa badan air, kawasan perlindungan setempat, kawasan ekosistem mangrove dan pemenuhan ketersediaan ruang terbuka hijau.

Keenam, perwujudan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan diprioritaskan pada peningkatan akses dan kualitas infrastruktur konektivitas antar wilayah melalui peningkatan kualitas dan pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan, pengembangan jalur kereta api perkotaan dan jalur kereta api monorel Mamminasata, pengembangan pelabuhan pengumpan lokal, pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan, dan pengembangan infrastruktur telekomunikasi serta pemenuhan rumah layak huni yang terintegrasi dengan fasilitas umum dan fasilitas sosial serta infrastruktur perkotaan.

Ketujuh, perwujudan sarana dan prasarana, khususnya pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar yaitu SPAM melalui pembangunan jaringan air baku, unit produksi, unit pelayanan dan unit distribusi, pembangunan dan pemeliharaan sistem jaringan drainase, serta penguatan manajemen bencana, pengendalian risiko Bencana dan dampak perubahan iklim melalui pembangunan bangunan pengendalian banjir dan jalur evakuasi bencana dengan mengutamakan pengendalian rencana tata ruang wilayah.

Kedelapan, perwujudan daya saing daerah untuk kesinambungan pembangunan dengan penerapan teknologi dan inovasi dioptimalkan melalui pengembangan kerjasama antar daerah baik kerjasama wajib maupun kerjasama sukarela berskala regional, nasional dan internasional dan sinkronisasi perencanaan pusat, pemerintah provinsi Sulawesi Selatan dan pemerintah kota Makassar.

- n) Arah Pembangunan Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK), Kepulauan Sangkarrang, yang berfungsi sebagai pusat permukiman, pariwisata, dan pelayanan umum, Untuk itu pengembangan Kepulauan Sangkarrang diarahkan pada:

Pertama perwujudan manusia Makassar yang unggul dan berkualitas tinggi dan dapat bersaing di tingkat global diprioritaskan pada peningkatan pelayanan, akses, serta sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan yang merata dan berkualitas serta perlindungan sosial yang adaptif melalui pemenuhan pelayanan dasar.

Kedua, perwujudan SPPK Manggala sebagai pengembangan kawasan permukiman, Pelayanan Umum dan Pariwisata yang terintegrasi dengan sistem metropolitan, pengembangan UMKM berbasis digitalisasi ekonomi dan inovasi untuk mengoptimalkan perwujudan kota Makassar sebagai kota dunia berbasis ekonomi yang *smart*,

Ketiga, pengembangan tata Kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan adaptif diprioritaskan pada penataan keuangan daerah untuk mewujudkan good governance dan kemandirian fiskal serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Keempat, kehidupan masyarakat yang aman dan tangguh, Demokrasi Substansial serta kemantapan ekonomi makro daerah diprioritaskan pada penataan keuangan dan aset daerah untuk mewujudkan kemandirian fiskal berbasis digital, dan pengembangan sumber alternatif pendapatan daerah serta penguatan sektor keuangan syariah.

Kelima, menguatkan ketangguhan keluarga dan masyarakat yang religius dan beradab di tengah dinamisasi masyarakat global, dan memberdayakan perempuan dan anak untuk mencapai kesetaraan gender, perlindungan warisan budaya dan kearifan lokal, pembangunan tempat pengelolaan persampahan dengan metode 3R, peningkatan ketahanan energi melalui pengembangan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) dengan mempertimbangkan keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, serta optimalisasi pengelolaan kawasan

lindung berupa badan air, kawasan perlindungan setempat, kawasan ekosistem mangrove dan pemenuhan ketersediaan ruang terbuka hijau,

Keenam, perwujudan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan diprioritaskan pada peningkatan akses dan kualitas infrastruktur konektivitas antar wilayah melalui peningkatan kualitas dan pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan, pengembangan jalur kereta api perkotaan dan jalur kereta api monorel Mamminasata, pengembangan pelabuhan pengumpan lokal, pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan, dan pengembangan infrastruktur telekomunikasi serta pemenuhan rumah layak huni yang terintegrasi dengan fasilitas umum dan fasilitas sosial serta infrastruktur perkotaan.

Ketujuh, perwujudan sarana dan prasarana, khususnya pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar yaitu SPAM melalui pembangunan jaringan air baku, unit produksi, unit pelayanan dan unit distribusi, pembangunan dan pemeliharaan sistem jaringan drainase, serta penguatan manajemen bencana, pengendalian risiko Bencana dan dampak perubahan iklim melalui pembangunan bangunan pengendalian banjir dan jalur evakuasi bencana dengan mengutamakan pengendalian rencana tata ruang wilayah.

Kedelapan, perwujudan daya saing daerah untuk kesinambungan pembangunan dengan penerapan teknologi dan inovasi dioptimalkan melalui pengembangan kerjasama antar daerah baik kerjasama wajib maupun kerjasama sukarela berskala regional, nasional dan internasional dan sinkronisasi perencanaan pusat, pemerintah provinsi Sulawesi Selatan dan pemerintah kota Makassar,

- o) Arah Pembangunan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) Ujung Tanah, yang berfungsi sebagai pusat permukiman, dan perdagangan dan jasa, pertahanan dan keamanan, dan simpul transportasi, Untuk itu pengembangan Ujung Tanah diarahkan pada:

Pertama perwujudan manusia Makassar yang unggul dan berkualitas tinggi dan dapat bersaing di tingkat global diprioritaskan pada peningkatan pelayanan, akses, serta sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan yang merata dan berkualitas serta perlindungan sosial yang adaptif melalui pemenuhan pelayanan dasar.

Kedua, perwujudan PPL Ujung Tanah sebagai pusat pemukiman, perdagangan, jasa, pertahanan dan keamanan yang terintegrasi dengan sistem metropolitan, pengembangan UMKM berbasis digitalisasi ekonomi dan inovasi untuk mengoptimalkan perwujudan kota Makassar sebagai kota dunia berbasis ekonomi yang *smart*,

Ketiga, pengembangan tata Kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan adaptif diprioritaskan pada penataan keuangan daerah untuk mewujudkan good governance dan kemandirian fiskal serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Keempat, kehidupan masyarakat yang aman dan tangguh, Demokrasi Substansial serta kemantapan ekonomi makro daerah diprioritaskan pada penataan keuangan dan aset daerah untuk mewujudkan kemandirian fiskal berbasis digital, dan pengembangan sumber alternatif pendapatan daerah serta penguatan sektor keuangan syariah.

Kelima, menguatkan ketangguhan keluarga dan masyarakat yang religius dan beradab di tengah dinamisasi masyarakat global, dan memberdayakan perempuan dan anak untuk mencapai kesetaraan gender, perlindungan warisan budaya dan kearifan lokal, pembangunan tempat pengelolaan persampahan dengan metode 3R, peningkatan ketahanan energi melalui pengembangan pembangkit listrik tenaga diesel

(PLTD) dengan mempertimbangkan keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, serta optimalisasi pengelolaan kawasan lindung berupa badan air, kawasan perlindungan setempat, kawasan ekosistem mangrove dan pemenuhan ketersediaan ruang terbuka hijau,

Keenam, perwujudan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan diprioritaskan pada peningkatan akses dan kualitas infrastruktur konektivitas antar wilayah melalui peningkatan kualitas dan pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan, pengembangan jalur kereta api perkotaan dan jalur kereta api monorel Mamminasata, pengembangan pelabuhan pengumpan lokal, pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan, dan pengembangan infrastruktur telekomunikasi serta pemenuhan rumah layak huni yang terintegrasi dengan fasilitas umum dan fasilitas sosial serta infrastruktur perkotaan.

Ketujuh, perwujudan sarana dan prasarana, khususnya pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar yaitu SPAM melalui pembangunan jaringan air baku, unit produksi, unit pelayanan dan unit distribusi, pembangunan dan pemeliharaan sistem jaringan drainase, serta penguatan manajemen bencana, pengendalian risiko Bencana dan dampak perubahan iklim melalui pembangunan bangunan pengendalian banjir dan jalur evakuasi bencana dengan mengutamakan pengendalian rencana tata ruang wilayah.

Kedelapan, perwujudan daya saing daerah untuk kesinambungan pembangunan dengan penerapan teknologi dan inovasi dioptimalkan melalui pengembangan kerjasama antar daerah baik kerjasama wajib maupun kerjasama sukarela berskala regional, nasional dan internasional dan sinkronisasi perencanaan pusat, pemerintah provinsi Sulawesi Selatan dan pemerintah kota Makassar.

BAB VI PENUTUP

RPJPD adalah landasan yuridis formal pelaksanaan pembangunan yang berisi visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Kota Makassar untuk 20 (dua puluh). Visi merupakan kondisi Kota Makassar yang ingin dicapai (*clarity of direction*) pada akhir periode perencanaan di tahun 2045 (*desired future*), yang kemudian dilaksanakan melalui upaya-upaya pada misi guna mewujudkan visi sebagai komitmen seluruh *stakeholder* pembangunan, dalam melaksanakan transformasi secara menyeluruh untuk mendukung dan mewujudkan cita-cita **“Indonesia Emas 2045”**. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) harus dijadikan acuan oleh seluruh pelaku pembangunan, termasuk pihak swasta, dan organisasi masyarakat sipil. Visi Kota Makassar 2025-2045 dapat terwujud melalui partisipasi semua pelaku pembangunan.

Dengan diundangkannya dokumen RPJPD ini maka ditetapkan kaidah- kaidah pelaksanaan yang mencakup konsistensi perencanaan dan pendanaan, kerangka pengendalian, dan mekanisme perubahan, sebagai berikut:

1. Konsistensi Perencanaan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) memiliki posisi tertinggi dalam perencanaan pembangunan daerah, menjadi pedoman bagi dokumen perencanaan turunannya meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Indikator RPJPD harus menjadi bagian dari RPJMD, dan seluruh indikator RPJMD harus menjadi bagian dari Renstra Perangkat Daerah. RPJPD menjadi pedoman visi, misi, dan program bagi pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan serta sinkronisasinya dengan kebijakan pendanaan diperlukan untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya serta kesediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal.

Upaya menjamin konsistensi perencanaan dan pendanaan juga perlu didukung dengan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas. Hal tersebut dilakukan khususnya untuk menentukan prioritas pembangunan Daerah sampai dengan level proyek/keluaran (*output*), serta memastikan pelaksanaannya.

Penyusunan dokumen perencanaan turunan RPJPD menerapkan prinsip Kerangka Kerja Logis (KKL) pembangunan, Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial, agar intervensi kebijakan relevan dengan tujuan pembangunan yang telah direncanakan. Penggunaan KKL dilakukan dengan menerapkan pendekatan Tematik, Spasial, Holistik dan Integratif (THIS). KKL menggambarkan hubungan antara *input-process-output-outcome-impact*. Sasaran Pokok dan Indikator Utama Pembangunan yang bersifat *impact-outcome*, harus diterjemahkan dengan baik hingga ke level input. Pendetailan sasaran dan indikatornya tersebut dilakukan melalui dokumen turunannya, meliputi rencana pembangunan jangka menengah (RPJMD) dan tahunan (RKPD). Pengarusutamaan Gender merupakan strategi untuk mengurangi kesenjangan Gender dan mencapai kesetaraan Gender dengan mengintegrasikan isu-isu Gender ke dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan atas kebijakan dan program pembangunan yang dapat menjamin perempuan dan laki-laki mempunyai akses dan kontrol terhadap sumber daya, mendapat manfaat dan terlibat dalam pengambilan keputusan yang sama dalam proses pembangunan.

Inklusi . . .

Inklusi Sosial bertujuan untuk memastikan bahwa semua kelompok masyarakat, terutama yang rentan dan terpinggirkan, memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dan mendapatkan manfaat dari proses pembangunan. Inklusi sosial menekankan pentingnya menciptakan kondisi yang memungkinkan semua individu, tanpa memandang latar belakang, status sosial, jenis kelamin, disabilitas, etnisitas, agama, atau faktor lainnya, untuk terlibat dan memperoleh manfaat dari pembangunan.

Sebagai alat ukur ketercapaian sasaran pokok pembangunan, KKL dilengkapi indikator kinerja pada setiap tingkatannya. Dalam memastikan kesinambungan pembangunan, seluruh Indikator Utama Pembangunan (IUP) RPJPD harus menjadi bagian dari RPJDM, dan seluruh indikator RPJMD harus menjadi bagian dari Renstra Perangkat Daerah.

Pencapaian sasaran pokok dalam RPJPD, RPJMD, dan RKPD, perlu didukung dengan sinkronisasi perencanaan dan pendanaan pembangunan. Sebagai upaya menjamin pencapaian IUP, perlu dilakukan penguatan pendanaan pembangunan dengan mengoptimalkan pemanfaatan berbagai pendanaan pembangunan, baik yang bersumber dari Pemerintah Daerah maupun non pemerintah secara lebih inovatif, integratif, dan tepat sasaran. Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan sumber pendanaan pembangunan, dilakukan peningkatan kualitas belanja dan pembiayaan prioritas pembangunan yang sesuai dengan tahapan pembangunan. Selain melakukan efisiensi dalam belanja, pemerintah juga dapat memanfaatkan pendanaan pembangunan yang bersumber dari pinjaman, hibah, untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan secara berkelanjutan.

2. Kerangka Pengendalian

Dalam rangka menjamin tercapainya sasaran pembangunan Daerah, diperlukan pengendalian yang kontinu dan partisipatif dengan memanfaatkan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan. Pengendalian dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan, evaluasi, dan manajemen risiko yang dilakukan pada tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Aktivitas pengendalian didukung oleh sistem elektronik yang terintegrasi dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Sistem elektronik terpadu juga diintegrasikan dengan tata kelola data pembangunan yang mendorong kebijakan pembangunan berbasis bukti.

Pengendalian RPJPD dilaksanakan melalui pengendalian jangka menengah (RPJMD) dan jangka pendek/tahunan (RKPD) yang hasilnya disampaikan kepada Walikota. Berdasarkan tahapan pelaksanaannya, ruang lingkup pengendalian pembangunan Daerah terbagi menjadi dua bagian, yakni Pengendalian perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan. Pengendalian pada tahap perencanaan bertujuan memastikan konsistensi perencanaan pembangunan, meningkatkan kualitas desain proyek prioritas pembangunan Daerah, serta menjamin ketersediaan alokasi anggaran, baik dari pemerintah maupun non pemerintah. Pengendalian ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi perencanaan jangka menengah dan jangka pendek.

Pengendalian jangka menengah mencakup: (i) penjabaran perencanaan RPJPD, ke RPJMD, dan RPJMD ke dokumen Renstra Perangkat Daerah; (ii) kesiapan desain proyek prioritas pembangunan Daerah, termasuk penerapan prinsip KKL dan penetapan ukuran keberhasilan; (iii) konsistensi perencanaan dan penganggaran; dan (iv) identifikasi risiko perencanaan pembangunan dan mitigasinya. Pengendalian jangka pendek mencakup: (i) penjabaran perencanaan RPJMD ke dokumen RKPD, dan

dokumen . . .

dokumen RKPD ke dokumen Renja Perangkat Daerah; (ii) kesiapan desain proyek prioritas pembangunan Daerah termasuk penerapan KKL dan penetapan ukuran keberhasilan; (iii) konsistensi perencanaan dan penganggaran; dan (iv) identifikasi risiko perencanaan pembangunan dan mitigasinya.

Pengendalian pada tahap pelaksanaan bertujuan untuk menjamin implementasi pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengendalian ini dilaksanakan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana jangka menengah (RPJMD) dan jangka pendek/tahunan (RKPD). Pemantauan dan evaluasi tersebut mencakup: (i) pemantauan pelaksanaan proyek prioritas pembangunan Daerah; (ii) pemantauan mitigasi risiko pembangunan; (iii) evaluasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan Daerah; dan (iv) evaluasi pencapaian sasaran kinerja utama dan program Perangkat Daerah yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan Daerah. Pengendalian pembangunan tersebut perlu didukung dengan tatanan regulasi agar pelaksanaannya berjalan dengan efektif. Tatanan regulasi tersebut menyinergikan regulasi terkait pemantauan, evaluasi, pengendalian, manajemen risiko pembangunan, dan manajemen kinerja.

3. Mekanisme Perubahan

Dokumen perencanaan yang adaptif menjadi kunci mitigasi risiko atas perubahan faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan. Dalam keadaan kahar (*force majeure*) yang meliputi perubahan geopolitik, geoekonomi, dan bencana, target RPJPD dapat dimutakhirkan melalui RPJMD. Pemutakhiran target ini dilakukan berdasarkan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Penerapan kaidah pelaksanaan didukung oleh pemanfaatan transformasi digital melalui penggunaan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan pada seluruh tahapan siklus pembangunan. Sistem elektronik terpadu tersebut bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan ketangkasan proses bisnis perencanaan dan pelaksanaan RPJPD Tahun 2025-2045. Adapun tata kelola data bertujuan untuk meningkatkan kualitas kebijakan melalui pemanfaatan data referensi yang sama.

4. Komunikasi Publik

Dengan komunikasi publik yang baik, diharapkan kebijakan dan program pemerintah dapat dengan mudah dipahami oleh publik dan dapat mengundang partisipasi publik dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian kebijakan pembangunan, sehingga sistem pemerintahan yang dinamis, transparan, responsif, dan komunikatif dapat diwujudkan. Prinsip dasar komunikasi publik terdiri dari tiga hal pokok, yaitu: (i) struktur dan tata kelola komunikasi lintas sektor dan daerah yang obyektif, akuntabel, inovatif, dan profesional; (ii) penyediaan informasi yang akurat, transparan, tepat waktu, menarik, dan dapat dimanfaatkan oleh para pihak secara mudah dan murah; serta (iii) keterlibatan semua kelompok masyarakat secara demokratis berbasis data yang valid dengan metode komunikasi yang sesuai kebutuhan publik yang beragam. Komunikasi publik RPJPD 2025-2045 berprinsip “tidak ada yang tertinggal” (*no one left behind*) dan partisipasi yang bermakna (*meaningful participation*). Komunikasi publik dilaksanakan dengan mengutamakan keterbukaan, menjamin akses yang luas, jelas, tepat, cepat, dan objektif. Dengan demikian komunikasi publik dapat mendorong partisipasi publik yang lebih bermakna dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pembangunan.

5. **Pembiayaan Pembangunan**

Upaya mewujudkan Visi RPJPD Tahun 2025-2045 memerlukan kapasitas pembiayaan yang memadai. Peningkatan kapasitas pembiayaan dilakukan melalui

pengembangan inovasi pembiayaan, baik berupa perluasan sumber-sumber pembiayaan, penerapan skema atau mekanisme pelaksanaan yang baru, hingga optimalisasi peran sektor keuangan.

Peningkatan kapasitas pembiayaan sektor publik dilakukan melalui perluasan sumber-sumber dan pengembangan inovasi skema pembiayaan yang mencakup: (i) perkuatan perencanaan pembiayaan; (ii) perkuatan dan perluasan kerja sama dengan sektor publik dan Badan Usaha, dan kerja sama keuangan lainnya untuk mengembangkan sumber-sumber pembiayaan; dan (iii) optimalisasi pemanfaatan aset;

Peningkatan kapasitas pembiayaan sektor non publik dilakukan melalui:

(i) optimalisasi dana masyarakat (filantropi, dana sosial korporasi, dan dana keagamaan) untuk pembangunan; (ii) inovasi skema pembiayaan sektor non publik serta; (v) penguatan penerapan bauran pendanaan (*blended finance*). Peningkatan kapasitas pembiayaan sektor publik dan nonpublik perlu diikuti dengan manajemen investasi yang berkualitas sehingga kapasitas pembiayaan yang ada dapat digunakan secara optimal.

6. **Pedoman Transisi**

Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kota Makassar, maka penyusunan RPJPD Kota Makassar Tahun 2045-2065 tetap berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok dalam dokumen RPJPD ini, termasuk penyelesaian target kinerja RPJMD 2040-2045 yang belum tercapai, dan menjaga keselarasan arah kebijakan dan sasaran pokok beserta Indikator Utama Pembangunan Kota Makassar dengan arah kebijakan, sasaran pokok dan Indikator Utama Pembangunan Nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan, serta mengantisipasi permasalahan dan isu-isu yang akan mempengaruhi kinerja Pembangunan Kota Makassar.

WALI KOTA MAKASSAR,

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Muhammad Izhar Kurniawan.SH.,MH

Nip : 19851228 200801 1 003